



**BINTANG MERAH SPESIAL KONGRES NASIONAL KE-VI PKI**



**DOKUMEN-DOKUMEN**  
**KONGRES NASIONAL**  
**KE-VI**  
**PARTAI KOMUNIS INDONESIA**

**DJAKARTA**

7 - 14 September 1959

**I**

**BINTANG MERAH NOMOR SPESIAL**



Jajasan "Pembaruan"  
Djakarta 1960

## SEKEDAR PENGANTAR

DISEPANDJANG sedjarah PKI jang hampir 40 tahun usianja, Kongres Nasionalnja jang ke-VI jang berlangsung dari tg. 7 sampai tg. 14 September 1959 adalah Kongresnja jang terbesar.

Redaksi „Bintang Merah“, jang sudah selalu menerbitkan nomor-nomor istimewa berisi material lengkap Sidang<sup>2</sup> Pleno CC PKI, Konfernas<sup>2</sup> PKI dan Kongres Nasional ke-V PKI, tidak mau melewatkan kesempatan jang historis ini, jaitu Kongres PKI jang terbesar disepandjang sedjarahnja, setjara tidak memadai.

Inilah sebabnja „Bintang Merah“ menerbitkan nomor<sup>2</sup> spesial jang memuat material lengkap Kongres Nasional ke-VI PKI. Penerbitan spesial „Bintang Merah“ inipun djadinja penerbitan „Bintang Merah“ jang terbesar disepandjang sedjarahnja jang kini sudah 14 tahun. Tiga djilid „Bintang Merah“ nomor spesial, masing-masingnja setebal kuranglebih 400 halaman, djadi seluruhnja kuranglebih 1,200 halaman, akan mengundjungi parapembatja. Djilid ini adalah djilid pertamanja.

Sepintas-lalu baik kita ingat, bahwa hingga kini dokumen<sup>2</sup> Kongres<sup>2</sup> PKI jang ke-I, II, III dan IV belum lagi dibukukan. Sebagian dari dokumen<sup>2</sup> itu dibakar oleh pendjajah<sup>2</sup> Belanda dan Djepang, sebagian lagi hilang tak tentu rimbanja dirimba sedjarah kita jang pelik ini. Sisanja masih ter-serak<sup>2</sup>, sebagian ada di-museum<sup>2</sup>, sebagian lagi pada perorangan<sup>2</sup>, sehingga belum mungkin penghimpunannja dilakukan. Sungguhpun demikian ada tekad pada redaksi „Bintang Merah“, untuk pada suatu waktu menghimpun dokumen<sup>2</sup> jang menjisa itu dan menerbitkannya. Dengan bantuan kaum revolusioner umumnja, kiranja hal ini bukannya tidak mungkin.

Mengenai dokumen<sup>2</sup> Kongres Nasional ke-VI PKI jang kita himpun sekarang ini, mulai Laporan Umum Kawan Aidit sampai pada resolusi<sup>2</sup>nja, sebenarnja tak memerlukan ia akan katapengantar. Dokumen<sup>2</sup> ini mengantarkan dirinja sendiri. Ia begitu djelasnja, ia begitu gamblangnja, djelas dan gamblang dalam mendjawab semua soal pokok dan penting revolusi Indonesia, dalam menganalisa dan menjimpulkan situasi jang kita hadapi, dan dalam merumuskan tugas<sup>2</sup> jang harus ditunaikan.

Kongres Nasional ke-VI, seperti diketahui, telah menyelesaikan atjara<sup>2</sup> Laporan Umum CC, Perubahan Konstitusi Partai, Perubahan Program Partai, dan Pemilihan CC dan Komisi Verifikasi dengan baik, dalam suasana lebih bulatnja persatuan didalam Partai dan antara Partai dan massa Rakjat, sehingga Kawan Aidit menamakannja Kongres persatuan djaja.

Segala angkatan didalam Partai, mulai jang tertua sampai jang termuda, dihimpun oleh satu rasa bersama — solidaritet proletar, solidaritet Komunis. Persatuan jang berdasarkan kesatuan ideologi, ideologi Marxisme-Leninisme inilah jang membikin Partai monolit seperti granit.

Dari mempeladjar dokumen<sup>2</sup> jang diterbitkan ini orang akan bisa menimba bukan sadja isi Kongres jang tak terlupakan itu, tetapi-pun semangatnja, djiwanja.

Dokumen<sup>2</sup> ini berhak mendjadi milik dan makaitu wadji mendjadi milik setiap kader Komunis, setiap kader revolusioner. Bukan hanja bukunja, tetapi melalui bukunja — isinja.

Kemudian — dan disini terletak tugas jang tak ringan bagi setiap kader Komunis, setiap kader revolusioner — intisari dokumen<sup>2</sup> ini harus „disosialisasikan” mendjadi milik Rakjat dan „diterdjemahkan” kedalam aksi<sup>2</sup> Rakjat.

Begitu banjak rintangan jang harus dilalui Kongres Nasional ke-VI PKI, tetapi djustru dilaluinja rintangan<sup>2</sup> itu dengan sukses membikin Kongres itu lebih bernilai, lebih bermutu — berlian dari segala berlian! Tjahaja Kongres itu tidak hanja berumur setahun-dua, ia akan tetap seminar selama ber-puluh<sup>2</sup> tahun j.a.d., menerangi djalan ke Indonesia merdeka penuh dan demokratis, Indonesia jang mau tak mau akan mendjadi Sosialis.

Kongres Nasional ke-VI PKI telah mengisi hati kita. Mari hati kita sekarang mengisi pelaksanaan keputusan<sup>2</sup> Kongres jang besar itu!

N j o t o

Pemimpin Redaksi „Bintang Merah”,  
Wakil Ketua II CC PKI.

Djakarta, Djanuari 1960

## KONGRES PERSATUAN DJAJA

*Pidato pembukaan Kongres Nasional ke-VI PKI yang  
diutjapkan oleh Kawan D. N. AIDIT, Sekretaris  
Djenderal CC PKI, pada tgl. 7 September 1959*

Kawan<sup>2</sup> jang tertjinta !

Atasnama Comite Central daripada Kongres Nasional ke-V PKI jang menjelenggarakan Kongres Nasional ke-VI ini, saja meng-utjapkan selamat datang kepada kawan<sup>2</sup> semua dan mengharap-kan agar kawan<sup>2</sup> tetap sehat walafiat selama Kongres ini berlangsung.

Dengan rasa terimakasih jang takterhingga kepada Rakjat pe-kerdja Indonesia jang barisannja makin lama makin besar dan megah berdiri dibelakang PKI, dengan rasa terimakasih jang se-besar<sup>2</sup>nja kepada proletariat sedunia jang selamanja memihak per-djuangan Partai Komunis dan Rakjat Indonesia (*tepuktangan*), dengan rasa terimakasih jang se-dalam<sup>2</sup>nja kepada gurubesar<sup>2</sup> kita Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung dan lain<sup>2</sup> jang telah memberi pedoman<sup>2</sup> kepada kita dalam melakukan perdjjuangan untuk membebaskan Rakjat Indonesia dari penindasan, penghisap-an dan penghinaan, dengan ini Kongres Nasional ke-VI PKI saja njatakan dibuka. (*Tepuktangan*).

Biarpun Kongres belum membentuk Komisi Mandat, djadi dengan sendirinja belum mungkin ada laporannja, tetapi dari Panitia Kon-gres telah saja terima laporan, bahwa utusan<sup>2</sup> dari semua Daerah Besar dan Pulau jang seharusnya datang kekongres ini, semuanya sudah berada didalam Kongres. (*Tepuktangan*). Utusan dari Dae-rah-daerah Besar dan Pulau<sup>2</sup> ini membawa mandat penuh dari se-mua anggota dan tjalonanggota Partai di Daerah Besar atau di Pulaunja. Dengan demikian, dalam Kongres Nasional ke-VI PKI ini diwakililah semua anggota dan tjalonanggota jang sekarang djumlahnja lebih dari 1,5 djuta. (*Tepuktangan*). Berdasarkan fasal 32 Konstitusi PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V ta-hun 1954, Kongres ini adalah sah. (*Tepuktangan lama*).

Kongres jang mulia !

Walaupun dengan sangat menjesal, tapi perlu saja beritahukan kepada para peserta Kongres Nasional ke-VI PKI, bahwa untuk mendjadi tamu Kongres kita jang bersedjarah ini telah berada di Jakarta utusan<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> sekawan, jaitu :

Kawan *Dimo Ditchev*, anggota CC Partai Komunis Bulgaria. (*Tepuktangan*).

Kawan *Jerzy Albrecht*, Sekretaris CC Partai Buruh Persatuan Polandia. (*Tepuktangan*).

Kawan *Morris Hughes*, anggota Politbiro CC Partai Komunis Australia. (*Tepuktangan*).

Kawan *Ursinio Rojas*, anggota Politbiro CC Partai Sosialis Rakjat Kuba. (*Tepuktangan lama dan semua berdiri*).

Kawan *Pal Ilku*, anggota CC Partai Buruh Sosialis Hongaria. (*Tepuktangan*).

Kawan *Kurt Barthels*, anggota CC Partai Persatuan Sosialis Djerman. (*Tepuktangan*).

Kawan *Giuseppe Boffa*, Wakil CC Partai Komunis Italia. (*Tepuktangan*).

Kongres Nasional ke-VI PKI mengutjapkan selamat datang pada semua tamu ini, dan mengutjapkan terimakasih jang sebesar-besarnja kepada Partai<sup>2</sup> sekawan jang begitu besar perhatiannja pada Kongres kita, pada klas buruh dan Rakjat Indonesia serta pada tanahair kita. (*Tepuktangan*). Dengan adanja bukti perhatian besar dari Partai<sup>2</sup> sekawan kepada Kongres Partai kita, maka gagallah usaha kaum imperialis untuk mengisolasi proletariat Indonesia dari gerakan proletariat sedunia. (*Tepuktangan lama*). Dari lubuk hati kita jang se-dalam<sup>2</sup>nja, kita mengutjapkan terimakasih jang ber-limpah<sup>2</sup> kepada kawan<sup>2</sup> pemimpin<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> Marxis-Leninis sekawan ini. (*Tepuktangan*). Adalah karena ketentuan Peperpu Bagian Angkatan Darat maka mereka tidak bisa hadir sebagai tamu jang terhormat didalam Kongres kita ini, walaupun mereka sudah mempunyai visa dari Perwakilan Republik Indonesia diluarnegeri, artinja dari Pemerintah Indonesia, untuk datang ke Indonesia. Kenyataan ini mentjerminkan salahsatu segi daripada situasi politik jang rumit ditanahair kita, tetapi ini bukanlah segi satu<sup>2</sup>nja daripada situasi politik ditanahair kita. Difihak lain kawan-kawan, kenyataan ini djuga mendemonstrasikan betapa kuatnja solidaritet internasional dari kaum Komunis sedunia. (*Tepuktangan lama dan semua berdiri*).

Kawan<sup>2</sup>!

Adalah sangat menggembirakan, bahwa Kongres Nasional ke-VI PKI dikundjungi oleh kawan<sup>2</sup> dari sukubangsa<sup>2</sup> jang djauh lebih banjak djumlahnja daripada ketika Kongres Nasional ke-V, oleh kawan<sup>2</sup> wanita jang sudah lumajan djumlahnja dan oleh semua angkatan Komunis Indonesia. (*Tepuktangan*). Kongres ini adalah Kongres persatuan djaja daripada kaum Komunis Indonesia, djaminan mutlak bagi tertjiptanja persatuan djaja klas buruh, Rakjat

pekerdja dan nasion Indonesia. (*Tepuktangan*). Harapan Kongres Nasional ke-V supaya pengundjung Kongres Nasional ke-VI Partai mentjerminkan persatuan seperti jang kita lihat sekarang, sudah terpenuhi. (*Tepuktangan lama dan semua berdiri*).

Untuk memimpin sidang<sup>2</sup> Kongres Nasional ke-VI PKI ini saja usulkan kita membentuk sebuah Presidium Kongres jang terdiri dari kawan<sup>2</sup>:

(*Daftar nama anggota<sup>2</sup> Presidium Kongres dimuat pada halaman 218*).

Saja bertanja: apakah susunan Presidium Kongres ini dapat disetudju oleh Kongres? (*Semua mengangkat kartu tanda setudju; tepuktangan lama dan semua hadirin berdiri*).

Sekarang saja persilahkan semua anggota Presidium naik ke podium untuk memimpin Kongres.



## UNTUK DEMOKRASI DAN KABINET GOTONGROJONG

*Laporan Umum Komite Central PKI kepada Kongres Nasional  
ke-VI PKI, disampaikan oleh Kawan D. N. AIDIT  
pada tgl. 7 dan 8 September 1959*

Kawan<sup>2</sup> jang tertjinta !

Per-tama<sup>2</sup> izinkanlah saja mengutjapkan terimakasih jang tak terhingga karena Partai telah memberi kehormatan kepada saja untuk menjampaikan Laporan Umum ini kepada Kongres Nasional ke-VI Partai, Kongres daripada penggalang<sup>2</sup> front nasional dan pembangun<sup>2</sup> Partai Komunis Indonesia jang djaja, Kongres daripada pedjuang<sup>2</sup> militan untuk kemerdekaan nasional jang penuh, untuk demokrasi dan perdamaian dunia jang abadi. (*Tepuktangan*).

Kongres Nasional ke-VI ini adalah Kongres jang disiapkan dengan baik, dengan semangat revolusioner jang tinggi dan dengan semangat pengabdian jang tulus kepada Rakjat.

Lebih setengah tahun sebelum Kongres ini dilangsungkan bahan<sup>2</sup> Kongres sudah disebarakan untuk dibahas oleh kader<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> Partai. Ribuan rapat besar dan ketjil, tjeramah umum dan diskusi dilangsungkan untuk membahas bahan<sup>2</sup> Kongres kita, jaitu *Rentjana Tesis Daripada Laporan Umum CC PKI* jang akan disampaikan kepada Kongres Nasional ke-VI Partai, *Rentjana Perubahan Program* dan *Rentjana Perubahan Konstitusi PKI*. Mengenai bahan-bahan ini banjak pendapat jang berupa saran<sup>2</sup> sudah disampaikan kepada Sekretariat CC. Semuanja telah dipeladjari oleh Komisi Tesis, Komisi Perubahan Program dan Komisi Perubahan Konstitusi. Pendapat<sup>2</sup> jang akan menambah baiknja bahan<sup>2</sup> Kongres telah dimasukkan kedalam dokumen<sup>2</sup> jang akan dibahas oleh Kongres kita sekarang. Dalam Laporan Umum jang saja sampaikan ini sudah dimasukkan usul<sup>2</sup> jang tepat dan penting mengenai *Rentjana Tesis Laporan Umum*.

Tentu dalam Kongres ini tidak mungkin tiap<sup>2</sup> usul mendapat pembahasan<sup>2</sup> satu per satu. Satu kenjataan jalah bahwa semua rapat anggota, rapat fraksi<sup>2</sup> dan Komite<sup>2</sup> Partai serta semua Konferensi Partai jang diadakan untuk membahas bahan<sup>2</sup> Kongres, telah menjetudjuj pokok<sup>2</sup> pikiran jang dikemukakan dalam *Rentjana Tesis*. (*Tepuktangan lama*).

Rentjana Tesis telah memainkan peranan yang luarbiasa besarnya dalam membangkitkan semangat dan perhatian anggota<sup>2</sup> Partai terhadap semua masalah penting dan pokok yang akan dibahas dalam Kongres Nasional ke-VI PKI. Laporan Umum ini pada hakikatnya merupakan perpaduan antara Rentjana Tesis dengan pendapat<sup>2</sup> yang tepat dan penting mengenai Rentjana Tesis. Oleh karena itu sesudah ada Laporan Umum ini, Rentjana Tesis sudah tidak mempunyai peranan apa<sup>2</sup> lagi dalam kehidupan Partai kita.

Sebagaimana kawan<sup>2</sup> ketahui, bahan<sup>2</sup> Kongres oleh Sekretariat CC djuga disampaikan kepada orang<sup>2</sup> diluar PKI, kepada pembesar-pembesar sivil dan militer, kepada tokoh<sup>2</sup> partai<sup>2</sup> dan organisasi-organisasi massa, kepada sardjana<sup>2</sup> dan pekerdja<sup>2</sup> kebudayaan. Kita djuga meminta pendapat<sup>2</sup> perseorangan dari kalangan massa Rakjat pekerdja. Banyak pendapat, baik tertulis maupun setjara lisan telah kita terima, dan djuga telah menjadi bahan diskusi dalam komisi<sup>2</sup> yang bersangkutan. Atasnama seluruh anggota Partai Komunis Indonesia dan atasnama Kongres Nasional ke-VI PKI dari mimbar ini saja mengutjapkan banyak terimakasih kepada semua mereka yang berada diluar PKI, tetapi yang sudah begitu baik hati sudi menjampaikan saran<sup>2</sup>nja mengenai bahan<sup>2</sup> Kongres PKI.

Kegiatan anggota<sup>2</sup> Partai dalam menjambut Kongres Nasional ke-VI ini tidak hanya dalam membahas bahan<sup>2</sup> Kongres, tetapi djuga dalam hal<sup>2</sup> lain. Kongres ini kita siapkan djuga dengan berbagai atjara yang dapat lebih mengeratkan hubungan Partai dengan massa dalam bentuk kegiatan<sup>2</sup> memperbesar amal kepada Rakjat, mendorong madju kesenian Rakjat, menggiatkan pendidikan dalam Partai, meluaskan anggota dan organisasi Partai. Semua kegiatan ini telah mengangkat taraf kesedaran ideologi, politik dan organisasi Partai kita dan ini sangat penting bagi perkembangan Partai kita selandjutnja.

Sebagai tjontoh ingin saja kemukakan, bahwa dalam kegiatan memperbesar amal kepada Rakjat dalam rangka menjambut Kongres Nasional ke-VI PKI, ribuan Regu Kerdjabakti telah terbentuk dan kita mendapat pengalaman<sup>2</sup> yang sangat kaya dilapangan ini. Dalam Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti ini telah mengambil bagian Pemimpin<sup>2</sup> Partai dari semua tingkat dan tidak sedikit orang<sup>2</sup> diluar PKI. Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti sangat penting untuk dikembangkan sesudah Kongres. Pendeknja, Kongres ini bukanlah hanya Kongres kaum Komunis, tetapi ber-djuta<sup>2</sup> Rakjat Indonesia ikut merasakan bahwa Kongres ini adalah kongresnja sendiri. (*Tepuktangan lama*).

Kawan<sup>2</sup>!

Kongres kita menerima banjak surat<sup>2</sup> dan tilgram<sup>2</sup> ucapan selamat dari Partai<sup>2</sup> sekawan. Atas ucapan<sup>2</sup> selamat ini kita menjampaikan rasa terimakasih dan harapan semoga persaudaraan yang hangat antara Partai<sup>2</sup> Marxis-Lennis menjadi semakin tergembleng.

Kongres kita djuga menerima sumbangan<sup>2</sup> berupa barang, menerima banjak surat dan tilgram dari seluruh pelosok tanahair, dari organisasi<sup>2</sup> massa dan perseorangan<sup>2</sup> yang menundukkan simpatinja pada Kongres kita. Semua tanda simpat. ini merupakan dorongan bagi Partai, dan chususnja bagi peserta<sup>2</sup> Kongres, untuk bekerdja lebih baik dalam melaksanakan tugas<sup>2</sup> patriotiknya. Kepada semua penjumbang ini atasnama Kongres saja mengutipkan banjak terimakasih. (*Tepuktangan*).

Kawan<sup>2</sup>!

Sedjak Kongres Nasional ke-V Partai sampai sekarang kita telah banjak kehilangan kawan<sup>2</sup> kita yang terbaik. Diantaraja kita kehilangan Kawan Bachtaruddin, anggota CC Partai. Selain daripada itu kawan<sup>2</sup> yang gagahberani dan pantang mundur telah dibunuh dengan tjara yang sangat biadab oleh pemberontak<sup>2</sup> kontra-revolusioner „PRRI” di Sumatera Barat, chususnja di Situdjuh, Suliki dan Atar. Demikian djuga kebiadaban kaum kontra-revolusioner „Permesta” telah menjebakkan sampai adjalnja sedjumlah Komunis<sup>2</sup> yang terbaik di Sulawesi Utara. Disamping itu tidak sedikit kawan<sup>2</sup> kita yang menjadi korban kebiadaban DI-TII.

Diluarnegeri kita djuga telah kehilangan kawan<sup>2</sup> yang sudah terudji dalam kesetiaannya dan keuletannya dalam mengibarkan dan membela pandji<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme, yang ditjintai dengan sepenuh hati oleh proletariat internasional, seperti Kawan<sup>2</sup> Boleslav Bierut dari Polandia, Antonin Zapotocky dari Tjekoslowakia, Kuichi Tokuda dari Djepang, Marcel Cachin dan Juliot Curie dari Perantjis, Dimitri Manuilsky dari Uni Sovjet dll.

Untuk putera<sup>2</sup> terbaik dari tanahairnja ini dan untuk pahlawan<sup>2</sup> proletariat yang ditjintai dengan sepenuh hati oleh klas dan Rakyatnja, baik yang didalam maupun yang diluarnegeri, saja mengadjak para peserta Kongres Nasional ke-VI PKI untuk berdiri sebentar dan mengheningkan tjipta. (*Semua hadirin berdiri dan suasana hening meliputi ruangan*).

Kawan<sup>2</sup>!

Lebih 5 tahun sudah berlalu sedjak Kongres Nasional Partai kita yang ke-V. Dengan kebanggaan Komunis dapat kita katakan, bahwa pada pokoknja kita telah melaksanakan dengan baik tugas<sup>2</sup> yang diberikan oleh Kongres Nasional ke-V Partai.

Banjak jang sudah terdjadi selama lebih dari 5 tahun itu, baik didalamnegeri, diluarnegeri maupun didalam Partai sendiri. Tetapi apapun jang sudah terdjadi, dan betapapun kesulitan<sup>2</sup> jang pernah dihadapi oleh Rakjat dan Partai kita selama itu, Kongres sekarang dilangsungkan dalam situasi dalam dan luarnegeri, dan situasi intern Partai jang djauh lebih baik, lebih maju dan lebih terkon-solidasi, daripada ketika kita melangsungkan Kongres Nasional ke-V dalam bulan Maret tahun 1954. (*Tepuktangan lama*).

Sedjak Kongres Nasional ke-V sampai sekarang sudah dilangsungkan 3 kali Konferensi Nasional Partai, 8 kali Sidang Pleno CC dan beberapa kali Sidang Politbiro jang diperluas dengan anggota-anggota CC jang bertempat-tinggal di Djakarta, dimana pimpinan sentral Partai telah memeriksa pelaksanaan tugas<sup>2</sup> jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V, menganalisa situasi dan menetapkan pelaksanaan tugas<sup>2</sup> dengan tjara<sup>2</sup> jang lebih efektif.

Berkat petundjuk<sup>2</sup> Kongres Nasional ke-V, dapat dikatakan bahwa Partai selalu berkedudukan memegang inisiatif dalam kehidupan politik negeri kita. Kepertjajaan massa Rakjat makin lama makin bertambah besar akan kebenaran garis politik dan akan ketulusan serta kemampuan Partai dalam melaksanakan tugas<sup>2</sup> nasional dan internasionalja. Kenjataan<sup>2</sup> ini telah membikin lebih erat hubungan Partai dengan massa Rakjat. Kepertjajaan Rakjat jang makin besar kepada Partai telah menimbulkan rasa irihati, takut dan kuatir pada partai<sup>2</sup>, golongan<sup>2</sup> dan orang<sup>2</sup> jang memusuhi kepentingan Rakjat, atau jang karena ketidakdjudjuran dan keragu-raguannya membela kepentingan Rakjat merasa berdosa kepada Rakjat. Mereka memfitnah Partai, berusaha menimbulkan provokasi<sup>2</sup> dan membikin komplotan<sup>2</sup> terhadap Partai dengan tudjuan „membendung Komunisme“ atau „membasmi Komunisme“ di Indonesia.

Sekarang kita menghadapi pekerdjaan<sup>2</sup> jang lebih berat. Makin bertambah besar kepertjajaan jang diberikan oleh Rakjat kepada Partai, makin berat kewadjiban dan tanggungdjawab jang dipikul oleh tiap<sup>2</sup> anggota Partai. Persoalan<sup>2</sup> jang dihadapi oleh Partai makin pelik.

Dilapangan politik luarnegeri kita harus lebih sungguh<sup>2</sup> lagi melanjutkan politik anti-kolonial dan tjinta damai, sedangkan dilapangan politik dalamnegeri kita harus terus memperdjuangkan supaya lebih banjak hak<sup>2</sup> politik berpindah ketangan Rakjat pekerdja.

Tugas<sup>2</sup> politik luar dan dalamnegeri hanja dapat kita laksanakan dengan baik djika kita tetap setia dan dengan lebih sungguh<sup>2</sup> meneruskan pelaksanaan tugas<sup>2</sup> urgen seperti jang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, jaitu, *pertama* menggalang

front persatuan nasional anti-imperialis yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodal dibawah pimpinan klas buruh; dan kedua meneruskan pembangunan Partai yang tersebar diseluruh negeri dan mempunjai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi. Melaksanakan dua tugas urgen ini sekaligus berarti memperkuat front internasional anti-kolonial dan tjinta damai.

Djadi, tugas<sup>2</sup> urgen Partai kita sekarang masih belum berubah dari yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V. Berdasarkan dua tugas urgen tsb. telah kita siapkan dan sekarang kita langsung Kongres Nasional ini dengan empat sembojan pokok, jaitu : „Dengan PKI didepan meneruskan perjuangangan Rakjat untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis“, „Perbaiki pekerdjaan front nasional, pentjilkan lebih landjut kekuatan kepalabatu“, „Perkuat front internasional anti-kolonial dan tjinta damai“ dan „Landjutkan pembangunan Partai diseluruh negeri yang bersatu erat dengan massa, yang terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi“. (Tepuktangan lama). Empat sembojan pokok ini mendjiwai Kongres Nasional ke-VI kita dan selandjutnja akan mendjiwai semua kegiatan Partai sesudah Kongres. (Tepuktangan). Dengan didjiwai oleh sembojan<sup>2</sup> ini djuga kita berdjung terus untuk peluasan hak<sup>2</sup> demokrasi bagi Rakjat dan untuk Kabinet Gotongrojong. (Tepuktangan lama).

Tudjuan pokok daripada Kongres Nasional ke-VI Partai ini ialah untuk menetapkan tugas<sup>2</sup> dilapangan ideologi, politik dan organisasi berdasarkan dua tugas urgen diatas, agar Partai kita lebih mampu mengubah imbalanced kekuatan politik didalamnegeri. Dengan berbuat demikian berartilah, bahwa kita mentjiptakan sjarat<sup>2</sup> untuk lebih mendekatkan Rakjat dan nasion Indonesia kepada tudjuan strategis revolusi Indonesia, jaitu penyelesaian tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar<sup>2</sup>nja. (Tepuktangan). Ini berarti mengachiri samasekali kekuasaan imperialisme dan feodalisme, berarti membentuk Pemerintah Rakjat, jaitu Pemerintah dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat. (Tepuktangan lama).

Dengan melakukan tugas<sup>2</sup> seperti diuraikan diatas, berarti bahwa kita dipimpin oleh rasa tanggungjawab yang ada pada kita terhadap klas buruh, terhadap Rakjat pekerdja, terhadap seluruh Rakjat dan nasion Indonesia dan terhadap gerakan klas buruh revolusioner internasional.

## MENERUSKAN PERJUANGAN UNTUK INDONESIA JANG MERDEKA PENUH DAN DEMOKRATIS

### (1) Imperialisme Belanda Masih Tetap Musuh Pertama Rakjat Indonesia

Kawan<sup>2</sup> !

Program PKI jang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai antara lain menyatakan, bahwa tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional dan perubahan<sup>2</sup> demokratis di Indonesia belum lagi terlaksana. Hasrat Rakjat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan nasional jang penuh, untuk kebebasan<sup>2</sup> demokratis dan untuk memperbaiki penghidupannya masih belum terpenuhi. Apa jang diinjatakan oleh program PKI ini sampai sekarang masih berlaku.

Dengan menyatakan bahwa tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional dan perubahan<sup>2</sup> demokratis dinegeri kita belum lagi terlaksana, tidaklah berarti bahwa kita tidak menilai hasil<sup>2</sup> jang ditjapai oleh Rakjat Indonesia dan Partai kita dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional dan demokrasi sedjak Kongres Nasional ke-V Partai sampai sekarang. Partai kita selamanya menilai sukses<sup>2</sup> dalam tiap<sup>2</sup> perjuangan sebagai hasil djerih-pajah dan pengorbanan Rakjat jang harus didjundjungtinggi.

Selama waktu jang ditinjau, Rakjat Indonesia telah berhasil mengusir pulang Misi Militer Belanda (MMB), membubarkan apa jang dinamakan Uni Indonesia-Belanda, membubarkan "Sticusa" (lembaga hubungan kebudayaan Indonesia-Belanda), membatalkan „hutang Indonesia" kepada Belanda, menjingkirkan pengawasan pemerintah Belanda atas politik luarnegeri dan perdagangan luarnegeri Indonesia, membatalkan persetudjuan KMB, mengeluarkan dari Indonesia pegawai<sup>2</sup> kolonial Belanda dan orang<sup>2</sup> Belanda lainnja jang dapat merugikan kepentingan Indonesia, mengambilalih dan menasionalisasi perusahaan<sup>2</sup> kepunjaan kaum kolonialis Belanda. (*Tepuktangan lama*).

Djuga dalam pendemokrasian sistim pemerintahan telah tertjapai hasil<sup>2</sup>, sebagai akibat kemenangan Partai dan kekuatan<sup>2</sup> demokratis lainnja dalam pemilihan umum untuk Parlemen pertama dan pemilihan<sup>2</sup> DPRD tingkat I dan II.

Tepat sekali garis politik jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai jaitu, bahwa imperialisme Belanda adalah musuh pertama Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan*). Garis politik ini adalah objektif dan dengan garis politik ini Partai mendjadi lebih mampu

memobilisasi kekuatan Rakyat Indonesia yang se-besarnya untuk dipukulkan kepada imperialisme Belanda dan kakitangannya. (*Tepuktangan*).

Dengan tertjapainya hasil<sup>2</sup> dalam perjuangan melawan imperialisme Belanda dan adanya pendemokrasian sistim pemerintahan, mungkin timbul pertanyaan<sup>2</sup>: Apakah dengan demikian tidak berarti bahwa tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional dan perubahan demokratis sudah selesai? Apakah dengan demikian imperialisme Belanda sudah bukan musuh pertama Rakyat Indonesia lagi?

Dengan hasil<sup>2</sup> yang sampai sekarang sudah ditjapa, dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda samasekali tidak berarti bahwa tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional sudah selesai. Djuga adanya sekedar pendemokrasian sistim pemerintahan walaupun soal ini sangat penting, samasekali tidak berarti bahwa tugas perubahan<sup>2</sup> demokratis dinegeri kita sudah rampung.

Kenyataan sekarang ialah, bahwa kaum kolonialis Belanda masih menduduki 20% daripada wilayah Republik Indonesia, yaitu Irian Barat; bahwa perusahaan<sup>2</sup> Belanda yang sudah diambilalih belum semua dinasionalisasi; bahwa dalam perdagangan luarnegeri Indonesia masih banyak menggunakan saluran kapitalis<sup>2</sup> Belanda; bahwa di Indonesia masih ada kapital Belanda dilapangan perminjakan (BPM atau Anglo-Dutch Shell) yang belum diganggu gugat samasekali; bahwa kakitangan Belanda masih banyak yang menduduki fungsi penting dalam alat<sup>2</sup> negara dan dilapangan ekonomi, bahwa masih ada gerombolan<sup>2</sup> bersenjata yang beroperasi untuk kepentingan kaum kolonialis Belanda; bahwa udara, lautan dan pantai<sup>2</sup> Indonesia masih terus-menerus diantjam oleh pesawat<sup>2</sup> udara dan kapalselam<sup>2</sup> Belanda; dan bahwa dilapangan pendidikan dan kebudayaan kaum kolonialis Belanda masih mempunyai pengaruh. *Semuanya ini menunjukkan bahwa perjuangan Rakyat Indonesia untuk mengachiri kekuasaan kaum imperialis Belanda masih belum selesai, bahwa tugas pembebasan nasional samasekali belum rampung, bahwa Indonesia masih belum merdeka penuh atau pada hakekatnja masih berkedudukan setengah-djadjahan. Imperialisme Belanda masih tetap merupakan musuh pertama Rakyat Indonesia. (Tepuktangan lama).*

Masih bertjokolnja sisa<sup>2</sup> feodalisme di-desa<sup>2</sup> dalam bentuk monopoli tanah oleh tuantanah, dalam bentuk sewatanah yang berwujud barang dan berwujud kerdja, dan dalam bertuk hutang<sup>2</sup> yang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap tuantanah<sup>2</sup> merupakan bukti<sup>2</sup>, bahwa kita tidak mungkin berbitjara tentang sudah terlaksananya tugas<sup>2</sup> perubahan demokratis. *Indonesia masih tetap negeri setengah-feodal.*

Selain daripada itu, kita samasekali belum dapat berbitjara tentang selesainya tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional, karena imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda, makin menempati kedudukan<sup>2</sup> penting di Indonesia di lapangan ekonomi, politik dan kebudayaan. Kalau kita berbitjara tentang kebebasan nasional, maka tidaklah berarti bahwa kita ingin bebas dari imperialis Belanda untuk menerima imperialis AS atau imperialis lainnya. Adanya kekuatan militer AS di Irian Barat; adanya tokoh<sup>2</sup> dan partai<sup>2</sup> kanan yang masih leluasa menjalankan politik imperialis AS di Indonesia; adanya infiltrasi kebudayaan AS melalui lektur, film, pendidikan dsb.; adanya bantuan kapaludarat, pilot<sup>2</sup>, senjata<sup>2</sup> dan perlengkapan<sup>2</sup> militer lainnya serta instruktur<sup>2</sup> militer dari AS kepada kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, berkeharannya perwira<sup>2</sup> AS dan orang „FBI“ (djawatan mata<sup>2</sup> AS) di Indonesia, semuanya ini merupakan bukti<sup>2</sup>, bahwa imperialisme AS sudah merupakan bahaya yang terus-menerus mengancam kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. *(Tepuktangan)*.

*Imperialis AS adalah musuh Rakyat Indonesia yang paling berbahaya berhubung imperialisme ini adalah yang paling agresif, paling mampu melaksanakan maksud<sup>2</sup> djahat, berhubung dengan penanaman modalnya yang makin besar di Indonesia, berhubung masih agak banyak orang<sup>2</sup> Indonesia yang berkedudukan penting tetapi naif mengira imperialisme AS tidak begitu djahat. Politik anti-imperialisme tanpa melawan infiltrasi<sup>2</sup> dan intrik<sup>2</sup> AS adalah omong-kosong. Imperialisme AS pada waktu sekarang adalah musuh Rakyat Indonesia yang lebih berbahaya daripada imperialisme yang mana sadja, karena djika ia sudah masuk maka sukarlah untuk menendangnya keluar.*

Diterimanya Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing oleh Parlemen dalam bulan September tahun 1958, walaupun ditentang keras oleh PKI dan Rakyat pekerdja Indonesia, berarti dibukanya pintu Indonesia untuk masuknya dan diperkuatnya kegiatan<sup>2</sup> politik, ekonomi dan kebudayaan negeri imperialis, terutama Amerika Serikat, Djepang dan Djerman Barat. PKI menentang dengan teguh ketika Rantjangan Undang<sup>2</sup> ini dibitjarakan di Parlemen, karena PKI yakin, bahwa Undang<sup>2</sup> ini semata-mata hanya menguntungkan kaum imperialis dan memudahkan kaum imperialis melakukan intervensi<sup>2</sup>-nya dan setjara legal mendapatkan dan memupuk komprador<sup>2</sup>-nya di kalangan orang<sup>2</sup> Indonesia. Undang<sup>2</sup> ini merintangi pelaksanaan tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional dan membuka djalan bagi kaum imperialis untuk mempertahankan Indonesia sebagai tempat penanaman modalnya, dan ini berarti menghalangi pembangunan ekonomi na-

sional Indonesia. Oleh karena itu PKI akan terus mengajak seluruh kaum buruh dan seluruh Rakyat Indonesia untuk menuntut kepada Pemerintah agar Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing dibatalkan. (*Tepuktangan dan seruan : „Setudju“*).

Dari uraian diatas djelaslah, bahwa perdjjuangan nasional untuk melikwidasi sepenuhnya kekuasaan ekonomi Belanda dalam rangka merealisasi pembatalan KMB dan perdjjuangan membebaskan Irian Barat tidak dapat dipisahkan dari perdjjuangan nasional melawan intrik<sup>2</sup>, infiltrasi<sup>2</sup> dan bahaya intervensi AS. Djadi, kewajiban pembebasan nasional kita sekarang ialah membersihkan sisa<sup>2</sup> kolonialisme Belanda, dengan teguh melawan kegiatan subversi Amerika Serikat dengan SEATO-nja, mentjegah bertambahnya penanaman modal AS dan negeri<sup>2</sup> imperialis lainnya, dan memperlakukan perusahaan<sup>2</sup> AS sama dengan perusahaan<sup>2</sup> Belanda apabila AS terus-menerus mempersendjatai gerombolan<sup>2</sup> kontra-revolusioner atau memberikan bantuan sendjata kepada Belanda dalam agresi terhadap Republik Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

## (2) Indonesia Masih Tetap Berada Dalam Tjengkeraman Krisis Ekonomi

Kesimpulan Kongres Nasional ke-V Partai kita antara lain ialah, bahwa Indonesia berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi yang terus-menerus sebagai akibat sifat ekonomi yang masih kolonial. Kesimpulan ini masih tetap berlaku hingga sekarang. Adanya krisis ekonomi Amerika Serikat dalam tahun 1957-1958 yang berakibat sangat luas pada dunia kapitalis lebih memperdalam lagi tjengkeraman krisis pada tubuh ekonomi Indonesia.

Beberapa hal pokok yang menyebabkan masih berlangsungnya keadaan ekonomi yang suram ialah :

*Pertama* : pembagian kerdja internasional setjara kapitalis, dimana Indonesia termasuk didalamnya, mengakibatkan (a) perbedaan yang makin besar diantara negeri<sup>2</sup> industri dan negeri<sup>2</sup> terbelakang, dan (b) tetap terbelakangnya negeri<sup>2</sup> yang sudah terbelakang itu.

Pembagian kerdja internasional setjara kapitalis telah membikin Indonesia praktis tidak mempunyai potensi dan kemampuan untuk mengatur dan memperbesar produksinya dalam segala lapangan. Ini disebabkan karena kedudukan bahan<sup>2</sup> ekspor kita makin tak terdjamin dipasaran dunia kapitalis, sebab menghadapi saingan barang<sup>2</sup> sintetis, menghadapi spekulasi dan manipulasi harga dari kaum monopoli besar, menghadapi kegontjangan permintaan yang semakin sering dan hebat, dan menghadapi pasaran kapitalis yang

semakin terbatas. Keadaan yang demikian telah membikin Indonesia kurang mampu mengimpor barang<sup>2</sup> yang dibutuhkan, terutama barang<sup>2</sup> modal, dan menjebabkan tidak adanya dasar sama-sekali bagi Indonesia untuk memperbesar produksi barang<sup>2</sup> yang dijual dalam pasaran kapitalis itu.

Angka<sup>2</sup> produksi Indonesia yang sepenuhnya dapat dipertjaya sukar didapat. Angka<sup>2</sup> resmi menundukkan produksi barang ekspor sbb.: dalam tahun 1958, selain satu-dua barang seperti kina dan tembakau yang produksinya naik sedikit, dan minyak, batubara serta bauxiet yang produksinya konstan, barang<sup>2</sup> ekspor lainnya semuanya menunjukkan kemunduran. Misalnja, djika dibandingkan dengan tahun 1957 produksi karet dalam tahun 1958 merosot dengan 6%, padahal produksi karet dalam tahun 1957 sudah 15% lebih rendah djika dibandingkan dengan tahun 1954. Produksi barang<sup>2</sup> ekspor lain seperti serat, kopi, minyak-sawit, kopra dan lada sedjak 1954 menunjukkan garis menurun yang tetap. Produksi timah yang dalam tahun 1957 sudah merosot hampir 23% djika dibandingkan dengan 1954, dalam tahun 1958 merosot lagi dengan 18%.

Mengenai produksi industri dalam negeri yang sudah sangat kecil dan yang masih sangat tergantung pada impor bahan baku, djuga mengalami kemunduran. Industri dalam negeri bukan hanya tidak berkembang, tetapi selama tahun 1958 banyak perusahaan industri yang bekerja djauh dibawah kapasitas yang ada. Sektor ini umumnya mengalami kesukaran<sup>2</sup> besar karena menghadapi persaingan hebat dari barang-djadi yang diimpor, lemahnya pasar dalam negeri, dan Pemerintah sampai sekarang gagal dalam mendatangkan barang<sup>2</sup> modal dan dalam memberikan perlindungan kepada industri nasional berupa djaminan pasar, persediaan bahan baku dan bantuan modal.

Walaupun dalam keadaan dunia ekonomi kapitalis sedang menaik, ekonomi negara kita tetap berada dalam keadaan yang sulit. Apalagi diwaktu krisis! Per Jacobbsen, Sekretaris Djenderal Dana Moneter Internasional, terus terang mengatakan dimuka sidang ECOSOC dari PBB yang diadakan di Mexico dalam bulan April 1959 bahwa *„negeri<sup>2</sup> penghasil bahan<sup>2</sup> mentah djanganlah mengharap-kan bahwa pemulihan industri dunia akan menolong mereka dari kesulitan mereka”*. Apakah lagi yang masih dapat diharapkan oleh Indonesia dari pasaran dunia kapitalis, djika dalam situasi pemulihan („recovery”) sudah begitu tipis harapan bagi kedudukan bahan<sup>2</sup> ekspor kita? Harga barang-djadi yang di ekspor oleh negara<sup>2</sup> kapitalis tetap naik, sedang harga bahan<sup>2</sup> mentah yang mereka impor dari kita turun dengan hebat. Hal ini dibenarkan oleh tin-djauan ekonomi dunia tahun 1958 dari PBB yang berbitjara tentang

„kemerosotan penghasilan ekspor negara<sup>2</sup> yang menghasilkan bahan-bahan ekspor sebanyak 7-8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, padahal harga barang<sup>2</sup> terus-menerus naik”. Perkembangan ini dibenarkan oleh kenyataan di Indonesia dimana di tahun 1958 nilai impor dalam rupiah turun dengan 37% dan volume impor malahan turun dengan 47% dibandingkan dengan tahun 1957. Mengenai volume ekspor dalam tahun 1958 turun dengan hampir 14% (tidak termasuk minyak dan hasil<sup>2</sup>nya), padahal nilai<sup>2</sup>nya dalam rupiah turun dengan lebih dari 25%. Lihatlah betapa Indonesia menderita sebagai akibat krisis ekonomi di-negeri Barat.

Dari kenyataan<sup>2</sup> diatas djelaslah, bahwa sistim BE, Ekspor (BE) yang dianggap djalan keluar oleh Menteri Keuangan dalam kabinet Djuanda jll, Mr Sutikno Slamet (PNI), tidak dapat memperbaiki situasi ekspor-impor dan semakin memerosotkan nilai rupiah serta menyebabkan kenaikan harga barang<sup>2</sup> keperluan hidup. Sistim BE malahan lebih mengikatkan Indonesia kepada ekonomi kapitalis dan makin membikin parah ekonomi Indonesia. Sistim ini hanya bertudjuan mengedjar devisa (mata uang asing — dolar atau pound sterling) dan menghambat perluasan perdagangan dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis, sehingga Indonesia tidak menarik keuntungan setjukupnja dari kenyataan adanya kubu Sosialis yang ekonominya kuat dan terus tumbuh. Sekalipun sekarang sistim BE sudah dihapuskan, tetapi ini tidak berarti bahwa orientasi perdagangan luar-negeri dengan sendirinya akan berubah.

Dengan politik yang tidak realistis ini, yang dirugikan bukanlah negeri<sup>2</sup> Sosialis, tetapi Indonesia sendiri, khususnya pembangunan ekonominya.

Kedua : sisa<sup>2</sup> feodalisme yang masih meradjalela tidak memungkinkan pembebasan tenaga<sup>2</sup> produktif di-desa<sup>2</sup> dan tidak memungkinkan adanya kenaikan produksi bahan<sup>2</sup> makanan dan hasil<sup>2</sup> pertanian lainnja. Bahan<sup>2</sup> makanan seperti beras, ketela, djagung dan lain<sup>2</sup> pada umumnya tetap atau sedikit sekali mengalami kenaikan dalam tahun 1958. Kematjetan produksi ini tidak memungkinkan adanya perbaikan hidup bagi kaum tani yang meliputi 60-70% dari seluruh penduduk Indonesia. Keadaan sekarang malahan lebih serius lagi, yaitu dimana produksi bahan makanan kita sudah tidak lagi bisa mengedjar kenaikan djumlah penduduk. Ini berarti tambahan beban berat bagi impor Indonesia, kenaikan harga barang<sup>2</sup> pokok dan kemerosotan yang lebih landjut dalam tingkat hidup Rakyat banyak. Kematjetan ini yang pada pokoknja disebabkan oleh masih kuatnja sisa<sup>2</sup> feodalisme dalam ekonomi kita, djuga disebabkan oleh kematjetan transpor dan oleh karena Pemerintah belum samasekali mengambil tindakan<sup>2</sup> kongkrit dan tepat untuk

membantu kaum tani dengan kredit yang langsung, murah dan mudah, dengan menjadikan bibit<sup>2</sup> dan rabuk yang cukup dan baik.

Keadaan tersebut tidak hanya menjulitkan peningkatan produksi barang<sup>2</sup> pertanian tetapi juga tidak memungkinkan diperluasnya pasaran dalam negeri yang sangat diperlukan bagi perkembangan industri nasional. Dengan demikian, maka masih adanya sisa<sup>2</sup> feodalisme dalam ekonomi Indonesia terang juga sangat menghalangi kemajuan ekonomi dalam segala lapangan.

Ketiga krisis ekonomi Indonesia juga disebabkan oleh sangat lemahnya sektor ekonomi yang dikuasai negara. Ekonomi sektor negara seharusnya menempati „posisi komando“, seharusnya merupakan sektor yang mendorong, memimpin dan memupuk perkembangan industri dalam negeri, termasuk industri berat. Selain daripada itu Pemerintah Indonesia tidak akan dapat mengatasi „kesukaran“ keuangan berupa defisit yang terus-menerus meningkat dalam anggaran belanja negara dan kenaikan uang yang dipinjam dari bank sentral, selama ekonomi sektor negara belum kuat, selama negara belum menguasai sebagian yang berarti daripada lapangan usaha Indonesia. Mengembangkan ekonomi sektor negara adalah satu keharusan jika menurut pasal 33 daripada Undang<sup>2</sup> Dasar 1945 „Kesukaran“ keuangan negara belum dapat diatasi, selama ekonomi kita terus-menerus digontjangkan oleh inflasi dan kemacetan produksi seperti yang dijelaskan diatas.

Demikian setjara singkat krisis ekonomi Indonesia yang bersifat kemacetan dalam produksi, kelemahan karena masih tergantung pada ekspor-impor yang terus-menerus mengalami kegontjangan, semakin banyaknya yang beredar yang tidak produktif dan semakin merajalelanya inflasi dan kenaikan harga barang<sup>2</sup> pokok. Dengan demikian, teranglah bahwa krisis ekonomi kita berpangkal kepada sifatnya yang kolonial, ekonomi yang masih sangat tergantung pada pasaran dunia ekonomi kapitalis.

Keadaan yang suram dan matjet ini pula membikin Pemerintah Indonesia tidak sanggup menguasai dan mengatur keadaan harga didalam negeri. Malahan sebaliknya, tindakan dilapangan ekspor-impor seperti misalnya sistim BE telah mengakibatkan makin meningkatnya harga barang<sup>2</sup>. Keadaan ini lebih parah lagi setelah Menteri Perdagangan dalam Kabinet Djuanda jll. Rachmat Muljosiseno (NU), menjerah bulat<sup>2</sup> kepada manipulasi kaum spekulan dan tukang tjatut besar yang se-wenang<sup>2</sup> mempermainkan pasaran, yang akibatnya lebih hebat menekan penghidupan Rakyat. Barang<sup>2</sup> kebutuhan pokok seperti beras, tekstil, gula dan minyak menjadi tak terkendalikan harganya atau lenjap dari pasar.

Kaum spekulan berhasil menunggangi situasi peredaran barang<sup>2</sup>

jang sangat sulit, pertama karena matjetnja produksi dalam negeri, kedua karena terbatasnja persediaan barang<sup>2</sup> impor, berhubungan dengan adanya pengurangan impor karena kemunduran ekspor, ketiga karena tidak lantjarnya transpor, dan keempat karena politik harga jang mendorong meradjalelanja spekulasi.

*Politik harga* Menteri Perdagangan kabinet Djuanda jll. jang disokong oleh golongan liberal adalah menjesuaikan harga pemerintah dengan harga pasar. Alasannja supaya tidak terdapat perbedaan harga resmi dan harga pasar jang sudah tinggi. (*Tawa*). Djadi, pemerintah mengikuti apa jang sudah diperbuat oleh kaum spekulan (*tawa*), dan ini dilakukan atasnama ..... „ekonomi terpimpin“. (*Tawa*). Ja, terpimpin oleh kaum spekulan! (*Tawa*). Ini adalah politik melindungi kaum parasiter, jaitu para pedagang dan tukang tjatut besar, jang main spekulasi dengan mengorbankan kepentingan konsumen jang sebagian sangat terbesar terdiri dari massa Rakjat jang ber-puluh<sup>2</sup> djuta.

Politik harga jang didjalankan seharusnja politik harga rendah jang ditetapkan dan dikendalikan setjara konsekwen oleh pemerintah. Tjara mengendalikan harga dan mentjegah meradjalelanja spekulasi dan tjatut adalah supaya pemerintah mengharuskan pasar mengikuti harga rendah jang ditetapkan oleh pemerintah, (*tepuktangan*). membandjiri pasar dengan barang<sup>2</sup> kebutuhan Rakjat sehari<sup>2</sup> dan langsung melaksanakan distribusi barang<sup>2</sup> tersebut untuk mendjamin golongan konsumen jang tidak mampu. Pemerintah Djuanda pernah menetapkan harga pasar supaya tidak melebihi harga 15 Desember 1958. Tetapi ketentuan pemerintah ini kemudian ditjabut setelah ternyata tidak djalan. Sebabnja kematjetan jalah karena tidak diikuti oleh tindakan<sup>2</sup> jang diperlukan untuk itu dan tidak dilakukan setjara konsekwen, malahan kepentingan para pedagang dan tukang tjatut besar lebih dilindungi daripada kepentingan ber-puluh<sup>2</sup> djuta massa Rakjat konsumen.

Permainan harga oleh kaum spekulan dan golongan parasiter lainnja sangat dimungkinkan karena *politik distribusi* jang didjalankan oleh Kementerian Perdagangan selama ini tidak sehat. Pemerintah masih sadja memupuk susunan aparat perdagangan jang ber-lapis<sup>2</sup> dalam peredaran barang<sup>2</sup> dipasar antara importir atau distributor dengan pendjual etjeran (*detailis*). Susunan aparat perdagangan jang ber-lapis<sup>2</sup> ini menjebabkan adanja perdagangan perantara jang sangat banjak djumlahnja sehingga menjebabkan pengambilan keuntungan jang banjak dan ber-lapis<sup>2</sup> pula oleh golongan parasiter atas kerugian para konsumen jang sebagian sangat terbesar terdiri dari Rakjat pekerdja jang tidak mampu. Karena itu Pemerintah dalam mendjalankan politik distribusinja harus se-

banjak mungkin mengurangi djumlah pedagang perantara dan menggunakan koperasi<sup>2</sup> Rakjat, RK<sup>2</sup>, RT<sup>2</sup> dan warung<sup>2</sup> sebagai saluran distribusi jang utama.

Berbitjara tentang *koperasi*, maka sudah seharusnja dituntut pada pemerintah supaja lebih banjak memberikan proteksi dan fasilitas tanpa diskriminasi guna mengembangkan koperasi<sup>2</sup> jang didirikan oleh Rakjat pekerdja, karena koperasi<sup>2</sup> ini lebih sehat dasarnya daripada „koperasi“ kapitalis model Hatta. Koperasi<sup>2</sup> Rakjat pekerdja harus sungguh<sup>2</sup> dikembangkan dengan tjara<sup>2</sup> jang demokratis untuk membantu melantjarkan distribusi barang<sup>2</sup> keperluan hidup jang pokok. Pohtik jang didjalankan oleh djawatan koperasi jang tidak menghendaki koperasi mendjual barang<sup>2</sup> dibawah harga pasar harus dihentikan. Politik ini adalah kelanjutan daripada politik harga jang sangat liberal dari djawatan perdagangan, jang apabila dipraktekkan dalam koperasi, maka koperasi<sup>2</sup> akan mendjadi organisasi<sup>2</sup> pedagang spekulan dan tjatut. Kehidupan koperasi jang demokratis harus dipupuk dengan membiasakan adanya rapat<sup>2</sup> anggota koperasi untuk mengontrol kebedjaksanaan pengurus<sup>2</sup>nja.

Mengenai status *perusahaan<sup>2</sup> Belanda jang diambilalih* ada beberapa kemajuan dilapangan per-undang-an, tetapi masih banjak rintangan<sup>2</sup> dalam mengefektifkan perusahaan<sup>2</sup> itu sebagai perusahaan negara. Usaha untuk mempartikelirkan perusahaan<sup>2</sup> tsb, mendapat tentangan keras dari kaum buruh dan dari kaum patriot pada umumnya. Usaha<sup>2</sup> kaum kapitalis untuk mendjadikan perusahaan<sup>2</sup> tjampuran dengan 20% kapital partikelir djuga tidak berhasil, sehingga kemungkinan besar perusahaan<sup>2</sup> itu akan tetap 100% perusahaan<sup>2</sup> negara. Pemerintah sudah mengeluarkan PP no. 2 dan PP no. 3 tahun 1959 untuk melaksanakan Undang<sup>2</sup> Nasionalisasi Perusahaan<sup>2</sup> Belanda. Apabila kedua PP ini, dan terutama sekali PP no. 2 tahun 1959 dilaksanakan setjara konsekwen, maka usaha untuk mempartikelirkan perusahaan<sup>2</sup> tersebut sudah gagal sama sekali. Tetapi PP no. 2 dan no. 3 itu mengandung kelemahan<sup>2</sup>, misalnja dalam badan<sup>2</sup> pelaksana nasionalisasi masih djuga belum terdjamin komposisi keanggotaan jang demokratis, tidak ada ketentuan dimana wakil<sup>2</sup> serikatburuh diikutsertakan. Masalah ikutnja wakil serikatburuh<sup>2</sup> dalam badan<sup>2</sup> pelaksana daripada perusahaan<sup>2</sup> jang sudah diambilalih dan jang sudah dinasionalisasi tidak hanja penting untuk ketertiban perusahaan dan peningkatan produksi, tetapi lebih<sup>2</sup> lagi pentingnja untuk menghalangi penguasa-penguasa tertentu jang bermaksud mempartikelirkan perusahaan atau mendjalankan kekuasaan direksi setjara bebas untuk mengadakan manipulasi<sup>2</sup> dan korupsi.

Mengenai produksi perusahaan<sup>2</sup> yang diambilalih ada yang naik, tetapi pada umumnya konstan jika dibanding dengan ketika belum diambilalih. Jika terdapat kemunduran maka sebabnya bukanlah karena ketidakmampuan kaum buruh tetapi karena tidak cukup persediaan bahan<sup>2</sup> baku yang harus diimpor atau karena pasaran luarnegeri mengalami kesulitan<sup>2</sup>.

Hingga sekarang setjara ber-angsur<sup>2</sup> memang makin lama makin banyak nasionalisasian perusahaan<sup>2</sup> yang sudah diambilalih terutama perusahaan<sup>2</sup> perkebunan. Dengan tetap memperhatikan segala kekurangannya, politik ambillah dan kemudian politik nasionalisasi perusahaan<sup>2</sup> kaum kolonialis Belanda adalah salahsatu hasil kongkrit dan penting, satu tindakan patriotik yang besar daripada kabinet Djuanda yang didukung oleh PKI dan kekuatan<sup>2</sup> demokratis lainnya (*Tepuktangan*). Satu pelajaran, bahwa dengan persatuan nasional yang kuat dan tindakan tegas anti-kolonialisme, kita bisa berbuat sesuatu yang menguntungkan tanahair dan Rakyat Indonesia. Sekarang harus dijaga agar hasil<sup>2</sup> yang positif ini tidak dirusak oleh kaum egois anti-nasional, kaum pedagang spekulan, tukang tjatut dan koruptor baik sivil maupun militer.

Dalam hubungan dengan memperbaiki ekonomi negeri adalah sangat penting masalah *komunikasi dan transpor*. Yang sangat serius dan perlu segera dan per-tama<sup>2</sup> mendapat pemertihan ialah soal *transpor laut*. Adalah tepat sekali bahwa Pemerintah melarang KPM bekerja di Indonesia, karena maskapai pelajaran ini dapat digunakan oleh pihak Belanda sebagai alat sabotase dilapangan ekonomi dan alat penjelundup orang<sup>2</sup> djahat masuk dan keluar Indonesia. Sekarang tonase nasional untuk pelajaran inter-insuler belum 50% pulih jika dibanding dengan ketika masih ada KPM (kira<sup>2</sup> 290.000 BRT pada November 1957). Lebih<sup>2</sup> lagi berhubungan kapal<sup>2</sup> sangat diperlukan untuk operasi<sup>2</sup> militer, maka tonase kapal sekarang masih djauh dari cukup. Problem mengatasi kekurangan tonase kapal adalah problem yang penting dan sangat mendesak. Ini dapat ditempuh dengan menggiatkan pembikinan kapal didalamnegeri, dengan mentjarter atau membeli kapal dari luarnegeri oleh Pemerintah.

Pembangunan *djalan raja dan pengangkutan sungai* diluar Djawa merupakan masalah transpor yang sangat penting dan mendesak. Sebenarnya soal ini bukanlah soal yang sangat sulit, asal Pemerintah mau menggunakan setjara maximal kemungkinan<sup>2</sup> yang bisa didapat dari hubungan ekonomi dengan negara<sup>2</sup> Sosialis yang pengalamannya banyak dan memiliki alat<sup>2</sup> yang paling modern untuk keperluan ini, sedangkan tenaga manusia kita lebih dari cukup.

Pengangkutan *kereta-api* sebagai alat transpor yang murah sam-

pa; sekarang belum lagi direhabilitasi. Dilihat dari sudut banjaknja ketjelakaan kereta-api masalah rehabilitasi adalah masalah jang sangat urgen, disamping soal ketjelakaan ini harus djuga dilihat dari sudut kegiatan elemen<sup>2</sup> subversif asing. Tetapi rehabilitasi tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak diadakan rekonstruksi setjara luas dengan memperlengkapi bengkel<sup>2</sup> kereta-api dengan alat<sup>2</sup> mesin baru untuk mempertinggi kemampuan bekerdjanja. Loko dan wagon<sup>2</sup> perlu diperbanjak, pemeliharaan dan servis harus diperbaiki.

Pengangkutan bermotor mengalami kesulitan<sup>2</sup> jang disebabkan oleh kurangnya persediaan dan mahalnja onderdil<sup>2</sup> motor, sebagai akibat daripada matjetnja ekspor jang membikin kemampuan impor kita mendjadi sangat terbatas. Dari sini dapat ditarik pelajaran, betapa buruknja dika terlalu mengqantungkan diri pada impor dan djika kita belum djuga memiliki pabrik<sup>2</sup> mesin jang dapat membikin onderdil<sup>2</sup> untuk kendaraan bermotor dan untuk pabrik<sup>2</sup> kita jang sudah ada. Selandjutnja pemasukan alat<sup>2</sup> pengangkutan bermotor harus mengutamakan truck bus dan alat<sup>2</sup> pengangkutan umum lainnya sedangkan impor mobil<sup>2</sup> lux supaya dihentikan.

Sudah tentu, dalam hubungan dengan membitjarakan komunikasi dan transpor adalah sangat penting masaalah memperluas dan mengintensifkan ln<sup>2</sup> hubungan udara. Bepergian dengan kapal terbang sudah mendjadi kebutuhan se-hari<sup>2</sup> dari kehidupan ekonomi, politik dan sosial Rakjat Indonesia.

*Karena Indonesia adalah negeri jang luas dengan ribuan pulau, maka penilaian terhadap sesuatu pemerintah akan diukur a.l. dari seriusnja dan berhasilnja pemerintah itu memetjahkan masalah komunikasi dan transpor Masalah kesatuan Indonesia djuga banjak tergantung dari pemetjahan masalah ini.*

### (3) Memperluas Perdagangan Dengan Negeri<sup>2</sup> Sosialis

Dari uraian diatas mendjadi djelas, bahwa krisis ekonomi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tergantungnja ekonomi negeri kita pada dunia kapitalis. Oleh karena itu, untuk mengatasi keadaan ini, kedudukan jang tergantung ini harus dihentikan dan Indonesia harus memperluas hubungan ekonominja dengan pasaran dunia Sosialis jang stabil dan jang tidak mengenal krisis.

Angka<sup>2</sup> statistik pemerintah jang terachir menundjukkan kenaikan dalam hubungan perdagangan dengan negara<sup>2</sup> sosialis dalam tahun 1958 dan permulaan tahun 1959 dibandingkan dengan tahun 1957. Ekspor ke-negara<sup>2</sup> Sosialis jang dalam tahun 1957 ha-

nja 3½% (seluruh ekspor Indonesia 11 milyar rupiah), dalam tahun 1958 menjadi dua kali lipat, sedangkan impor dari negara² Sosialis yang dalam tahun 1957 hanya kira² 4% (seluruh impor Indonesia 9 milyar rupiah), dalam tahun 1958 juga menjadi dua kali lipat. Jadi krisis AS yang terakhir membawa perkembangan baru dalam perdagangan Indonesia dengan negara² Sosialis. Sebaliknya ekspor ke Eropa Barat dan Amerika Serikat secara langsung dan melalui Singapura (termasuk minyak tanah) mengalami kemunduran dari Rp. 8,1 milyar dalam tahun 1957 menjadi Rp. 5,7 milyar dalam tahun 1958 atau merosot dengan 24 milyar rupiah devisa (hampir 30%). Dengan sendirinya impor dari negara-negara kapitalis juga merosot.

Tetapi, walaupun sudah ada kemajuan dalam perdagangan dengan negara² Sosialis, terutama dengan Uni Soviet dan RRT, politik perdagangan luar negeri Indonesia masih tetap berat ke Barat. Negeri² kubu Sosialis adalah produsen dari lebih sepertiga daripada produksi industri dunia, sedangkan perdagangan Indonesia dengan negara² Sosialis masih dibawah 10%. Baru dapat kita katakan bahwa politik perdagangan luar negeri Indonesia tidak berat sebelah jika perdagangan Indonesia dengan negara² Sosialis sudah meliputi paling kurang sepertiga dari seluruh perdagangan.

Pemerintah Indonesia sekarang belum mengadakan tindakan² yang cukup penting dan sungguh² guna meluaskan hubungan dagang dengan negeri² kubu Sosialis agar dapat mengurangi beban Indonesia dari akibat² krisis ekonomi negeri² imperialis. Dalam kata² sudah banyak diucapkan oleh pejabat² resmi tentang mengubah orientasi perdagangan luar negeri, tetapi dalam perbuatan orientasi perdagangan luar negeri Indonesia masih tetap berat ke AS, Inggris, Jerman Barat, Jepang dan negeri² imperialis lainnya.

Dalam hubungan dengan perdagangan luar negeri kenyataan masih menunjukkan, bahwa sekalipun perusahaan² Belanda sudah diambilalih, saluran perdagangan Belanda diluar negeri masih digunakan dengan alasan „tradisi” dan „ahli”. Masih digunakannya sistem transitto dalam perdagangan luar negeri, dalam hal ini Bremen dan Antwerpen, menunjukkan masih kuatnya ikatan perdagangan luar negeri Indonesia dengan pasaran kapitalis. Tindakan ini sampai batas² tertentu merugikan kaum monopolis Belanda, tetapi tidak berarti besar bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Merugikan Belanda memang penting, tapi yang lebih penting ialah supaya menguntungkan Indonesia. Baru besar artinya bagi perbaikan ekonomi Indonesia jika Indonesia samasekali meninggalkan sistem transitto dalam perdagangan luarnegerinya.

Dimasa lampau tjara penguasaan modal monopoli Belanda atas perdagangan impor-expor Indonesia adalah dilakukan melalui sistim „persetudjuan<sup>2</sup> agen tunggal” (”sole agency agreements”) dari pabrik<sup>2</sup> dan industri<sup>2</sup> besar di-negeri<sup>2</sup> Barat. Sistim ini didasarkan atas prinsip liberalisme dalam perdagangan luarnegeri, jaitu bebas mengimpor dan bebas mengexport dari dan kenegeri mana sadja yang disukai oleh pedagang. Bertjokolnja sistim „persetudjuan<sup>2</sup> agen tunggal” ini dengan sendirinja berarti kuatnja kedudukan monopoli industri<sup>2</sup> Barat dipasaran Indonesia dengan segala kesewenang’annya dalam politik harga mereka. Melalui sistim ini kaum monopolis Belanda sebagai agen tunggal dari kebanyakan industri<sup>2</sup> besar di Barat, menerima komisi<sup>2</sup> atas pendjualan barang’nja dipasaran Indonesia. Komisi<sup>2</sup> ini, yang merupakan pendapatan yang luarbiasa besarnya dikirim langsung oleh industri<sup>2</sup> Barat ke-kantor<sup>4</sup> pusat kongsi<sup>2</sup> Belanda di Nederland. Sekalipun perusahaan<sup>2</sup> Belanda sudah diambil alih dan dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia tetapi selama transaksi<sup>2</sup> perdagangan dengan Barat itu masih diteruskan dan Indonesia masih terus dibikin tergantung pada pasaran dunia kapitalis maka selama itu pula komisi<sup>2</sup> besar masih terus mengalir ke Nederland atas kerugian Rakyat Indonesia sebagai konsumen. Kenyataan ini menunjukkan betapa modal Belanda masih mempunyai kekuasaan dalam perdagangan luarnegeri kita, chususnja impor kita.

Djelaslah mengapa kaum modal monopoli asing berkepentingan sekali untuk, melalui agen<sup>2</sup> mereka di Indonesia, mempertahankan terus sistim liberal dari impor Indonesia. Siapapun mengetahui bahwa dengan sistim impor yang liberal ini adalah sukar untuk bisa mengambil langkah<sup>2</sup> yang njata guna memperluas perdagangan luarnegeri kita dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis. Kita tidak bisa memperluas perdagangan kita dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis apabila tidak ditijptakan sjarat<sup>2</sup> dan kemungkinan<sup>2</sup> untuk membeli dari negeri<sup>2</sup> itu. Padahal, negeri<sup>2</sup> Sosialis tidak hanja merupakan pasaran yang stabil dan luas bagi barang<sup>2</sup> expor kita, tetapi djuga merupakan sumber yang tepertjaja untuk mendapatkan barang<sup>2</sup> modal dan barang<sup>2</sup> konsumsi yang kita butuhkan. Ini merupakan sjarat objektif yang baik untuk mengatasi kematjetan dalam impor-expor dan produksi kita. Sjarat<sup>2</sup> tjukup banyak untuk memperluas hubungan ekonomi dan teknik dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis *atas dasar persamaan dan saling menguntungkan*, djadi tidak atas dasar keuntungan satu pihak sadja.

Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang pertama pernah mulai menerobos ikatan sistim liberal tsb. dengan mengadakan sistim „impor berentjana” („import planning”) dan pembayaran dengan djalan „clearing” („clearing payment”). Tetapi sistim impor berentjana

ini tidak mentjapai maksud mengatasi liberalisme dalam impor atau dalam perdagangan luarnegeri umumnya, sebab apa yang dijalankan oleh Pemerintah Ali Sastroamidjojo pada pokoknya hanya memindahkan pembagian devisa dari tangan importir<sup>2</sup> asing ketangan importir<sup>2</sup> partikelir nasional yang pada waktu itu berdjumlah kira<sup>2</sup> 6.000.

Impor atau perdagangan luarnegeri yang berentjana seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dalam negeri yang berdasarkan politik pembangunan ekonomi yang kongkrit. Motif perdagangan luarnegeri seharusnya tidak terutama mengedjar devisa (mata-uang asing) tetapi untuk mendapatkan barang<sup>2</sup> modal, bahan<sup>2</sup> baku dan sedjumlah barang<sup>2</sup> kebutuhan Rakyat se-har.<sup>2</sup>

Segi yang baik dari tindakan Kabinet Ali Sastroamidjojo ialah pelaksanaan sistim pembayaran setjara „clearing“ artinya dalam djangka waktu tertentu diadakan perhitungan nilai barang<sup>2</sup> yang diexport dan diimport antara Indonesia dengan negara lain dan pembayaran baru diselesaikan setelah djangka waktu itu habis. Sistim „clearing“ inilah yang telah memungkinkan adanya orientasi baru dalam perdagangan luarnegeri Indonesia yaitu dengan memasuki pasaran<sup>2</sup> baru, khususnya pasaran Sosialis. Djika sistim ini dikembangkan bisa mengadakan politik perdagangan luarnegeri yang baru dan yang menjambung pada politik pembangunan, yaitu politik impor yang disesuaikan dengan djurusan dan perkembangan export kita guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri.

Tetapi sistim „clearing“ tidak berlangsung lama, karena politik impor liberal dari „sosialis“ Sumitro, Menteri Perekonomian dalam kabinet B.H., telah menghapuskan sistim „clearing“ ini dan dengan demikian kembali meliberalisasi sistim impor kita. Sajangnya, sistim liberal yang dipulihkan kembali ini pada pokoknya masih sadija tetap dipergunakan sampai kini, ketjuali untuk satu-dua negeri, yaitu Tjekoslowakia, Mesir dan RRT.

Djadi kalau Indonesia ingin mengatasi kematjetan dalam ekonominya dan ingin mendapatkan barang<sup>2</sup> yang sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaan ekonominya, maka djalan yang se-baik<sup>2</sup>nja ialah menghapuskan sistim liberal tsb. dan kembali kesistim „clearing“, terutama dalam perdagangan dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis, negeri<sup>2</sup> Asia-Afrika dan Amerika Latin. Politik impor kita harus disesuaikan dengan rentjana pembangunan yang kongkrit dan urgen sehingga barang<sup>2</sup> yang diimport sungguh<sup>2</sup> berguna untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang. Dengan djalan ini orientasi yang masih sangat berat ke Barat dalam struktur perdagangan luarnegeri kita dapat dirombak.

Bertalian dengan masalah impor ini, perlu diperhatikan bahwa

Pemerintah Djuanda jll. telah mengeluarkan peraturan impor baru, yang jika dilaksanakan setjara baik memang bisa membantu untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Menurut peraturan impor baru ini, Pemerintah menguasai langsung impor barang<sup>2</sup> penting (1. kapas kasar, 2. benang tenun, 3. tekstil, 4. kertas, 5. semen, 6. besi beton dan besi pengikat beton, 7. tinsplate, 8. goni jute, 9. tepung trigo). Selain daripada 9 jenis barang<sup>2</sup> ini ada 4 barang lain yang juga masuk penguasaan Pemerintah (1. beras, 2. tjengkeh, 3. cambries dan 4. rokok). Yang diserahi tugas melaksanakan impor barang<sup>2</sup> ini ialah „8 Besar“ yang sepenuhnya bekerja dengan modal negara (CTC Usindo, PT Indestim, PT Indivitra, PT Junda Bhakti, PT Mira Sari, PT Satya Negara, PT Triangle).

Segi positif peraturan impor baru ialah, bahwa dengan ini dipenuhilah sebagian daripada tuntutan Rakyat supaya impor barang-barang penting dikuasai oleh Pemerintah, dan dengan demikian berarti bahwa 75% daripada nilai seluruh impor yang berupa devisa berada ditangan Pemerintah. Dengan tindakan ini, jika dilaksanakan dengan konsekwen, maka dapatlah diakhiri permainan daripada lk 4 000 importir yang pada umumnya avonturir dan spekulasi-spekulasi legal dan illegal.

Tetapi peraturan impor baru bisa gagal dalam pelaksanaannya jika tidak segera diikuti oleh tindakan<sup>2</sup> yang diperlukan. Perusahaan „8 Besar“ ini harus dijaga agar tetap sepenuhnya milik negara. Selain daripada itu harus dipetjahkan masalah badan pelaksanaan impor-ekspor dan penjalurannya, misalnya dengan mendirikan *Badan Impor-Expor Negara* yang tunggal, sedangkan perusahaan<sup>2</sup> „8 Besar“ hanya menjadi penjalur barang<sup>2</sup> impor dan ekspor itu. Dengan demikian dapat dihindari persaingan diantara perusahaan<sup>2</sup> „8 Besar“ yang bisa terjadi karena perebutan keuntungan dan perebutan komisi diantara pengurus<sup>2</sup>nya.

Tindakan lebih lanjut ialah supaya Badan Impor-Expor Negara dan „8 Besar“ serta semua perusahaan negara yang bentuk dan statusnya ber-matjam<sup>2</sup> seperti NV atau PT, Jajasan dll. diatur statusnya oleh Undang<sup>2</sup> Perusahaan Negara yang menetapkan prinsip-prinsip antara lain seperti berikut : sepenuhnya modal pemerintah pusat atau swatantra, pimpinan atau pengusahaan harus langsung oleh pemerintah pusat atau swatantra, dibentuk dewan pertimbangan atau dewan penasehat dimana ikutserta wakil<sup>2</sup> serikat-buruh yang bersangkutan, upah dan djaminan sosial kaum buruh diperbaiki.

Dengan berkomplot dengan kapitalis<sup>2</sup> besar asing dan kakitangan-kakitangannya yang bertjokol dipemerintahan, kaum pengusaha impor partikelir yang berkepalabatu, kaum spekulasi dan tu-

kang tjatut besar tentu akan mengadakan perlawanan dengan sekuat tenaga terhadap tindakan<sup>2</sup> madju Pemerintah dilapangan impor dan distribusi a.l. dengan menggunakan „relasi<sup>2</sup> baik” mereka diluarnegeri untuk mensabot usaha<sup>2</sup> Pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah dan Rakjat harus waspada, dengan pandai dan teguh mematahkan perlawanan kaum reaksioner dilapangan ekonomi ini. Kawan<sup>2</sup>!

Untuk menghentikan kemerosotan jang terus-menerus dilapangan ekonomi, dan terutama untuk melepaskan Indonesia dari akibat buruk krisis dunia kapitalis, kita mengajukan tuntutan- sbb :

*Pertama*, supaya produksi dalam negeri diperbesar antara lain dengan djalan membikin perusahaan<sup>2</sup> milik kolonialis Belanda jang telah diambilalih menjadi sepenuhnya milik negara, dengan sendirinja termasuk Bank Belanda di Indonesia. Saham<sup>2</sup> Belanda dalam BPM harus dioper oleh Pemerintah Indonesia. Djuga perusahaan<sup>2</sup> KMT harus disita dan dijadikan milik negara. (*Tepuktangan*). Perusahaan<sup>2</sup> negara harus terus diperluas dan diperkuat sehingga menduduki „posisi komando”. Dengan djalan kerdjasama antara Pemerintah, para ahli dan Rakjat pekerdja segala usaha supaya dilakukan untuk merealisasi politik sedapat mungkin memenuhi kebutuhan sendiri dalam perekonomian, dan terutama sekali dalam soal bahan makanan dan pakaian, atau dalam istilah sekarang sandang-pangan. (*Tepuktangan*). Untuk suksesnja peningkatan produksi di-perusahaan<sup>2</sup> negara harus dilaksanakan prinsip „pimpinan patriotik, tertinggi produksi, tjegah korupsi dan sabotase, djamin demokrasi dan perbaiki nasib buruh”. (*Tepuktangan*). Untuk memperbesar produksi bahan makanan areal tanahgarapan harus diperluas, tjara mengerdjakan tanah harus lebih intensif dan tingkathidup kaum tani harus diperbaiki.

*Kedua*, supaya ekspor-impor dan distribusi bahan<sup>2</sup> penting sepenuhnya ditangan Pemerintah. Pemerintah harus menjalankan politik harga rendah jang disesuaikan dengan kemampuan dajabeli Rakjat. Penjelundupan dan barter-lar supaya diberantas sampai ke-akar<sup>2</sup>nja. Pemerintah supaya sungguh<sup>2</sup> mengutamakan ekonomi sektor negara, sebagai djaminan dapatnja Pemerintah mengendalikan seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi modal asing. Masalah komunikasi dan transpor harus mendapat pemetjahan segera.

*Ketiga*, prinsip perdagangan luarnegeri harus diubah. Perdagangan luarnegeri harus dititikberatkan pada usaha merombak orientasi jang berat sebelah ke-negara<sup>2</sup> imperialis dengan djalan meluaskan hubungan dagang dengan negeri<sup>2</sup> A-A dan dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis jang tidak mengenal krisis ekonomi, agar tertjapai

maksud lebih meluaskan pasaran bagi bahan<sup>2</sup> ekspor Indonesia dan untuk mendapatkan barang<sup>2</sup> modal yang diperlukan untuk mendirikan industri, terutama industri guna mengolah sendiri bahan-bahan mentah yang dihasilkan Indonesia. Juga supaya didatangkan cukup bahan<sup>2</sup> baku untuk keperluan industri dalam negeri. Devisen yang dihasilkan oleh maskapai<sup>2</sup> minjak asing supaya dapat dikuasai oleh Pemerintah dan digunakan untuk melantarkan pembangunan dalam negeri dan untuk menjejatkan keuangan negara.

*Keempat*, supaya Pemerintah berusaha mengatasi keperluan akan barang<sup>2</sup> modal dan teknik dari luar negeri melalui pindjaman luar negeri dengan bunga yang serendah-rendahnya dan tanpa ikatan politik atau militer, baik ikatan setjara terang<sup>2</sup>an maupun rahasia, untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan industri negeri kita dan untuk mengeksploitasi pelikan (mineral) yang banjak ragam dan djumlahnya yang terdapat didalam bumi negeri kita. Dalam rangka pindjaman luar negeri harus dipentingkan juga pembangunan tanur<sup>2</sup>, pabrik<sup>2</sup> kimia dan pabrik<sup>2</sup> yang memproduksi mesin<sup>2</sup> dan alat<sup>2</sup> produksi lainnya sebagai usaha permulaan untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungan dalam ekonomi pada luar negeri. Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing harus dibatalkan. (*Tepuktangan*).

Dengan melaksanakan tuntutan<sup>2</sup> diatas maka akan tertijptalah syarat<sup>2</sup> untuk melepaskan Indonesia dari tjengkeraman krisis ekonomi yang terus-menerus dan hingga sekarang berlangsung di negeri kita. Djadi, kemerosotan ekonomi yang terus-menerus di Indonesia dapat diatasi, dengan melaksanakan tuntutan<sup>2</sup> diatas, dan bukan dengan djalan mengundang penanaman modal asing, memperberat pajak Rakjat, mempartikelirkan atau mejajasankan perusahaan<sup>2</sup> negara dan tindakan<sup>2</sup> reaksioner lainnya dilapangan ekonomi dan keuangan.

Pelaksanaan tuntutan<sup>2</sup> ekonomi tsb. tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tuntutan<sup>2</sup> Rakjat banjak sekarang, jaitu membasmi habis sisa<sup>2</sup> pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” (*tepuktangan*) dan gerombolan<sup>2</sup> teror DI-TII dan melakukan tindakan-tindakan „tangan besi” terhadap pengatjau<sup>2</sup> ekonomi dari kaum modal besar asing yang berkomplot dengan kaum komprador dan elemen<sup>2</sup> parasiter, baik sivil maupun militer, yang ada didalam badan<sup>2</sup> ekonomi dan aparat<sup>2</sup> pemerintah. (*Tepuktangan*).

Untuk memulihkan sepenuhnya keamanan dalam negeri dan memperbaiki keadaan ekonomi semua kekuatan nasional perlu dibangkitkan dan digerakkan. Telah mendjadi pengalaman Rakjat, bahwa sedjak persetudjuan KMB kabinet<sup>3</sup> silihberganti, tetapi ternjata

belum ada kabinet yang cukup kuat untuk mengatasi kesulitan<sup>2</sup> yang menimpa negeri dan Rakyat. Rakyat sudah mengalami kabinet<sup>2</sup> yang anti-Komunis seperti kabinet<sup>2</sup> Hatta Natsir Sukiman dan BH (Burhanuddin Harahap). Kabinet<sup>2</sup> ini bukan hanya tidak mampu memecahkan masalah<sup>2</sup> mendesak daripada Rakyat, tetapi telah menjeret Indonesia lebih jauh kedalam jurang krisis ekonomi dan perpetjahan nasional. Kabinet<sup>2</sup> non-Komunis, yaitu tanpa orang Komunis turut didalamnya, tetapi disokong oleh Komunis seperti kabinet Wilopo, kabinet<sup>2</sup> Ali Sastroamidjojo pertama dan kedua dan kabinet Djuanda juga tidak berdaya dalam mengangkat Indonesia dari krisis. Bertjermin kepada pengalaman<sup>2</sup> ini dan berpedoman pada gagasan<sup>2</sup> yang terkandung dalam Konsepsi Presiden Sukarno, adalah pada tempatnya dan adil jika Rakyat dalam rangka pelaksanaan UUD 45 menuntut pembentakan Kabinet Gotongrojong dibawah pimpinan Presiden Sukarno (*tepuktangan lama*) dimana didalamnya diwakili setjara adil partai dan golongan-golongan kerja yang mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan tjtta<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 yang bersifat nasional dan demokratis. Hanya dengan Kabinet Gotongrojong yaitu kabinet dengan orang<sup>2</sup> Komunis, akan dapat semua kekuatan nasional dibangkitkan dan digerakkan setjara besartan untuk mengatasi kesulitan<sup>2</sup> apa saja yang dihadapi oleh negeri dan Rakyat kita, termasuk krisis ekonomi yang sudah berlarut<sup>2</sup> ada harapan dapat diatasi.

#### (4) Pengangguran, Kemiskinan, Kependudukan, Ekonomi dan Sosial

Sebagai akibat krisis ekonomi di Indonesia yang makin mendalam, ditambah dengan meradjalelanya perdagangan spekulasi sehingga harga barang<sup>2</sup> kebutuhan hidup sehari<sup>2</sup> menjadi tak terkendalikan samasekali, dan ditambah lagi dengan politik harga Kementerian Perdagangan yang tunduk pada kaum spekulan, penderitaan Rakyat pekerdja Indonesia makin lama makin bertambah berat.

*Kaum buruh*: Sebagai akibat krisis ekonomi yang diderita oleh Indonesia, kehidupan kaum buruh bertambah berat. Kaum buruh Indonesia dihadapkan pada kesulitan<sup>2</sup> pokok a.l. sebagai berikut:

- \* Kemerosotan terus-menerus daripada tingkat hidup kaum buruh, pegawai dan Rakyat pekerdja pada umumnja;
- \* Terus membubungnja harga barang<sup>2</sup> kebutuhan hidup yang pokok dengan tjepat;

- \* Bertambah besarnya antjaman pemetjatan dan meluasnja pengangguran;
- \* Bertambah sempitnja kesempatan kerdja karena tidak berkembanganja industri sektor negara dan partikelir nasional.

Menurut statistik Kementerian Perburuhan tahun 1956 dari djumlah 3 896 perselisihan antara buruh dengan madjikan, 2.893 perselisihan adalah mengenai persoalan upah dan pemetjatan. Dalam tahun 1957 angkanya ialah 4.131 perselisihan, 3.216 mengenai persoalan upah dan pemetjatan, sedangkan dalam tahun 1958 dari sebanjak 3 350 perselisihan, 2.613 mengenai upah dan pemetjatan.

Menurut buku statistik resmi tahun 1959, selama 4 tahun dari 1954 sampai tahun 1958 dapat disimpulkan, bahwa kenaikan upah rata<sup>2</sup> sebesar 50%. Djuga dikalangan pegawai dan pekerdja negeri selama 4 tahun tertjatat kenaikan<sup>2</sup> gadji dan jang terakhir dikeluarnya PP 7 1959, jaitu peraturan jang mengatur berlakunja index 135 dengan pengurangan tundjangan kemahalan daerah, mengatur kenaikan pensiun bagi para pensiunan pegawai serta 10% kenaikan upah bagi para pekerdja negeri. Tetapi dengan kenaikan upah jang diperdjuaungkan dengan susah-pajah itu nasib kaum buruh dan pegawai negeri tidak mendjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga<sup>2</sup> kebutuhan hidup djauh lebih tinggi dari kenaikan upah. Index 19 matjam barang<sup>2</sup> kebutuhan se-hari<sup>2</sup> menurut BPS (Biro Pusat Statistik) tertjatat angka 106 untuk tahun 1954 dan 258 untuk tahun 1958 (1953 = 100) atau dalam 4 tahun ini harga<sup>2</sup> naik dengan 143%. Ini berarti upah riil tahun 1954 jang sudah sangat rendah itu tidak dapat dipertahankan dan sampai tahun 1958 merosot dengan 38%. Keadaan pada pertengahan tahun 1959 bertambah suram dengan sangat tjepatnja meningkat harga barang<sup>2</sup> kebutuhan se-hari<sup>2</sup>, terutama tekstil, gula minjak kelapa, ikan asin dll. Dengan demikian komposisi dan mutu makanan serta kebutuhan hidup lainnja dari kaum buruh bertambah merosot mendjadi komposisi dan mutu jang lebih djelek, hal mana terang mengantjam kesehatan djasmani dan rohani kaum buruh. Lazimnja keadaan penghidupan Rakjat pekerdja adalah lebih buruk daripada apa jang dinjatakan oleh laporan<sup>2</sup> resmi burdjuis. Upah rata<sup>2</sup> sekarang dengan wujud uang Rp. 6.50 dan ditambah natura mendjadi rata<sup>2</sup> Rp. 10.—, sedangkan disamping itu masih ada kaum buruh lepas jang menerima upah sehari antara Rp. 4.50 — Rp. 5.—, jang berarti hanya kira<sup>2</sup> tjukup untuk membeli 1 liter beras.

Dalam bidang per-undang<sup>2</sup>an jang langsung menjangkut soal<sup>2</sup> perburuhan perlu ditjatat tentang Undang<sup>2</sup> jang meratifikasi Konvensi I.L.O. No. 98 jang memuat larangan bagi madjikan untuk

menggunakan segala matjam dajaupaja untuk menghalangi atau menghambat kemajuan pertumbuhan organisasi serikatburuh: Undang<sup>2</sup> yang meratifikasi Konvensi I.L.O No 100 tentang hapusnja perbedaan<sup>2</sup> upah antara buruh wanita dengan buruh laki<sup>2</sup>. Undang<sup>2</sup> No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perburuhan yang sedikit lebih demokratis daripada Undang<sup>2</sup> Darurat No 16 tahun 1951. Pengalaman sampai sekarang ini ternyata bahwa kemenangan yang ditjapai dalam bidang per-undang-an yang sebenarnya tjukup penting bagi perkembangan organisasi serikatburuh belum dengan sungguh<sup>2</sup> dilaksanakan Pemerintah. Oleh serikatburuh-pelaksanaan undang<sup>2</sup> ini masih belum tjukup kuat dituntut

Laporan Kementerian Perburuhan yang teracher menggambarkan disatu fihak bertambahnja tenaga-kerdja sebagai akibat dari bertambahnja penduduk yang menurut taksiran dengan kira 1.500.000 orang setahun, sedangkan di fihak lain kesempatan bekerdja bukannya bertambah melainkan berkurang. Kebangkruatan perusahaan nasional dan pembubaran jajasan<sup>2</sup> pemerintah mengakibatkan pemetjatan massal. Djuga modernisasi di beberapa perusahaan besar asing, terutama di-perusahaan<sup>2</sup> minjak, disamping membawa kenaikan produksi yang besar sehingga lebih menguntungkan kaum monopolis asing, telah menambah djumlah pengangguran

Bagi kaum imperialis, Indonesia masih tetap merupakan tempat penanaman kapitalnja dan gudang tenaga buruh yang murah. Mereka dengan sekuat tenaga berusaha tidak hanya untuk mempertahankan kapitalnja yang sudah ditanam di Indonesia, tetapi djuga untuk menambahnja. Modernisasi hanya mereka lakukan apabila tindakan ini lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada djika menggunakan tenaga manusia yang murah. Mereka pada pokoknja mengedjar keuntungan se-besar<sup>2</sup>nja dengan menaksa kaum buruh Indonesia untuk memproduksi lebih banyak dengan upah yang tetap rendah. Mereka mengintensifkan penghisapannja dengan menambah kewadajiban kerdja, memperpanjang djam-kerdja dengan mempraktekkan kerdja lembur paksa, mengubah status buruh tetap menjadi buruh lepas supaya dapat membebaskan diri dari keharusan memberi djaminan sosial, dan selandjutnja dengan menjerahkan bagian<sup>2</sup> tertentu dari pekerjaan kepada pemborong<sup>2</sup> supaya bisa membebaskan diri dari ketentuan<sup>2</sup> yang ditetapkan didalam perdjandjian kerdja kolektif antara madjikan dengan serikatburuh<sup>2</sup>. Malahan belakangan ini ada djuga usaha<sup>2</sup> dari agen<sup>2</sup> imperialis untuk menambah djamkerdja yang sekarang 7 djam menjadi 8 djam sehari.

*Oleh karena itu, adalah kewadajiban Partai kita dan serikatburuh<sup>2</sup> untuk dengan gigih melawan pemetjatan, mentjegah kenaikan har-*

ga, berjuang untuk kenaikan upah, kenaikan pangkat dan perbaikan jaminan sosial kaum buruh dan pegawai. (Tepuktangan).

Dewasa ini disementara kalangan sedang ramai dipersoalkan tentang mempertinggi produktivitet kerdja dengan sembojan „untuk mempertinggi pendapatan nasional“. Memang, adalah kewadjaban jang terhormat untuk memperbesar pendapatan nasional. Tetapi adalah keliru djika pemetjahan persoalan ini didasarkan atas pandangan kapitalis jang djuga dengan sekuat tenaga berusaha mempertinggi produktivitet kerdja dengan tujuan lebih memperbesar keuntungan kaum kapitalis monopoli. Pemetjahan mengenai persoalan ini hanya mungkin djika dihubungkan dengan soal merombak struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, dari ekonomi jang hidupmatinja tergantung pada impor ekspor menjadi ekonomi jang merdeka berlandaskan industri nasional dimana peranan utama ada pada ekonomi sektor negara. Setiap usaha mempertinggi produktivitet kerdja didalam rangka struktur ekonomi lama atau ekonomi kolonial jang masih berlaku sampai sekarang, tidak akan membawa hasil jang menguntungkan Rakyat pekerdja dan kepentingan nasional, ia akan menguntungkan kaum kapitalis monopoli, dan oleh karena itu tidak mungkin didukung oleh Rakyat pekerdja. Di-perusahaan<sup>2</sup> dan djawatan<sup>2</sup> pemerintah mungkin produktivitet kerdja dipertinggi, djika pemerintah jang berkuasa didukung oleh Rakyat dan ada perhatian pemerintah jang pantas terhadap perbaikan nasib kaum buruh dan pegawainja.

**Kaum tani:** Kaum tani Indonesia dewasa ini mengalami bermacam<sup>2</sup> penindasan dan gangguan a.l. sbb. :

- \* penindasan dari pihak tuantanah dan lintahdarat berhubung masih bertjokolnja sisa<sup>2</sup> feodalisme;
- \* gangguan gerombolan<sup>2</sup> DI-TII dan sisa<sup>2</sup> bandit „PRRI-Permesta“ jang dibantu oleh tuantanah<sup>2</sup> dan pengusaha<sup>2</sup> asing serta dipersendjatai oleh kaum imperialis.

Bagian terbesar penduduk Indonesia, jaitu antara 60-70% dari seluruh penduduk terdiri dari kaum tani. Pada waktu sekarang, bagian terbesar dari kaum tani adalah kaum tani jang tidak memiliki atau tidak tjukup memiliki tanah. Hakmilik atas bagian jang sangat besar dari tanah garapan berada ditangan sedjumlah ketjil tuantanah bumiputera dan ditangan kapitalis<sup>2</sup> monopoli asing. Tetapi walaupun bagian terbesar kaum tani tidak memiliki atau tidak tjukup memiliki tanah, segala bentjana jang dialami oleh desa dan pertanian djuga menjadi tanggungan kaum tani, seperti bentjana alam, musim hudjan atau musim kemarau jang tidak tentu, gangguan hama dan gerombolan<sup>2</sup> bersendjata.

Dalam rangka persiapan Kongres Nasional ke-VI ini kader<sup>2</sup> Partai telah mengadakan gerakan „turun kebawah“, antara lain pengiriman kader<sup>2</sup> tinggi dan menengah untuk mengadakan penelitian (research) tentang hubungan<sup>2</sup> agraria didesa dan kehidupan kaum tani. Hasil<sup>2</sup> penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna, tetapi ia merupakan permulaan yang sangat penting untuk memperbaiki pekerjaan Partai dikalangan kaum tani. Sesudah Kongres ini pekerjaan penelitian harus kita lanjutkan dengan lebih luas dan lebih mendalam. Dari penelitian yang sudah kita lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa disatu pihak beberapa orang tuantanah didesa menguasai tanah yang sangat luas, dan ada kalanya menguasai lebih daripada separoh tanah didesa. Di pihak lain buruhtani dan tanimiskin yang berdjumlah lebih daripada separoh penduduk desa, dan ada yang sampai berdjumlah sampai 90% daripada penduduk desa, ada kalanya memiliki kurang daripada separoh tanah didesa. Umumnya penggarap tanah tuantanah harus membayar sewatanah 50% atau lebih dari hasil panen.

Kaum burdjuis Indonesia, bahkan juga yang maju diantara mereka, karena kedudukan mereka yang masih erat berhubungan dengan sisa<sup>2</sup> feodalisme, pada umumnya masih menghindari tjara yang revolusioner dalam mengubah pemilikan tanah tuantanah menjadi pemilikan tanah kaum tani yang langsung mengerjakan tanah. Dengan begitu sudah tentu masalah membebaskan kaum tani dan membebaskan tenaga<sup>2</sup> produktif didesa tidak akan tertjapai. Oleh karena itu harapan kaum tani satu<sup>2</sup>nja ialah pada pelaksanaan Program Agraria yang revolusioner dari PKI, pada pelaksanaan sembojan „tanah untuk petani“ yang dikibarkan tinggi oleh PKI. (*Tepuktangan*).

Partai kita menilai dan mendorong ber-matjam<sup>2</sup> usaha Pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan didesa dan kedudukan kaum tani seperti :

- \* Diundangkannya UU Penghapusan Tanah Partikelir, UU Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Perkebunan dan UU Tentang Tindakan<sup>2</sup> Terhadap Perkebunan Asing serta Peraturan<sup>2</sup> Pemerintah mengenai penyelesaian sengketa tanah antara kaum tani dengan pihak perkebunan dan Djawatan Kehutanan. Peraturan<sup>2</sup> ini sedikit atau banyak memudahkan kaum tani memperjuangkan tuntutan<sup>2</sup>nja;
- \* Bantuan kredit pemerintah untuk kaum tani dan kegiatan<sup>2</sup> Djawatan Pemerintah dilapangan pertanian dan dikalangan kaum tani;

- \* Usaha<sup>2</sup> Pemerintah untuk mengikutsertakan wakil<sup>2</sup> kaum tani dalam berbagai badan atau panitia yang dibentuk oleh Pemerintah;
- \* Usaha<sup>2</sup> Pemerintah untuk memajukan koperasi<sup>2</sup> tani guna meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki penghidupan kaum tani.

Tetapi walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa nasib kaum tani sekarang masih belum mengalami perubahan yang berarti, bahkan pada tahun<sup>2</sup> belakangan ini menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, sekeciljapun tidak boleh dilupakan, bahwa tujuan terpenting gerakan tani ialah menghapuskan samasekali sisa-sisa feodalisme.

*Kaum Miskin Kota* - Kalangan burdjuasi ketjil yang belum tjukup mendapat perhatian Partai ialah kaum miskin kota, yang djumlahnya tidak sedikit. Dalam hubungan dengan memperbaiki pekerjaan Partai di-kota<sup>2</sup>, haruslah diperbaiki pekerjaan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa kaum miskin kota yang antara lain terdiri dari bakul yang mendjadjkan barangdagangan yang diterima dari djuragan, tukang loak, tukang betja yang memiliki sebuah betja untuk ditarik sendiri, tukang warung ketjil, tukang sol sepatu, tukang pateri, tukang potong rambut dll. lagi. Walaupun ada diantara kaum miskin kota ini yang mempunyai alat produksi yang sederhana, tetapi penghidupannya umumnya sengsara.

Djumlah kaum miskin kota dalam tahun<sup>2</sup> belakangan ini menjadi lebih besar dengan adanya urbanisasi, yaitu perpindahan sebagian dari kaum tani miskin atau buruhtani dari desa ke kota. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai tjukup modal untuk bisa berusaha sendiri setjara ketjil<sup>2</sup>an sedang untuk mendapat pekerjaan sebagai buruh adalah sukar berhubung sempitnya lapangan kerdja atau berhubung diperlukannya pengetahuan minimum tentang sesuatu vak. Masalah kaum miskin kota adalah djuga suatu problem masyarakat yang serius, bukan hanya karena tenaga yang banyak ini sampai sekarang tidak dapat digunakan setjara baik dalam lapangan produksi, tetapi karena banyak diantara mereka masih muda<sup>2</sup> dan djumlahnya makin lama makin besar.

Kaum miskin kota, sebagaimana halnya dengan burdjuasi ketjil pada umumnya, termasuk tenaga penggerak revolusi. Tetapi dalam keadaan penghidupan yang terlalu sukar, sebagian dari kaum miskin kota dapat dipergunakan oleh madjikan<sup>2</sup> sebagai pematih pemogokan, atau bisa sampai tertarik pada fikiran<sup>2</sup> yang ekstrim atau liar sehingga dapat ditarik oleh kaum petualang untuk menjadi anggota gerombolan pengatjau. Mereka mudah merosot menjadi

orang gelandangan. Oleh karena itu, Partai harus bekerdja lebih baik dikalangan kaum miskin kota, mengorganisasi mereka dalam organisasi<sup>2</sup> jang sesuai dengan kepentingan mereka se-hari<sup>2</sup> guna perbaikan penghidupannja.

*Kaum Nelajan* : Karena Indonesia adalah negeri kepulauan, berdjuta<sup>2</sup> penduduknja berdiam ditepi pantai dan hidup sebagai nelajan. Kaum nelajan mempunyai peranan penting dalam produksi bahan makanan jang berupa ikan dan ada kalanja mereka mempunyai peranan penting dalam melindungi keamanan dan keselamatan negeri serta djuga dalam melantjarkan pengangkutan pantai dan sungai. Ketjuali bagian jang sangat ketjil nelajan<sup>2</sup> kaya sebagian terbesar daripada kaum nelajan kita hidup dalam kesengsaraan dan keterbelakangan. Sebagian diantara mereka hidup sebagai buruh nelajan jang dihisap oleh djurağan<sup>2</sup> sero dan djurağan<sup>2</sup> perahu besar, jang djuga melakukan penghisapan sebagai lintah-darat dan tengkulak. Tingkat kebudayaan kaum nelajan kita pada umumnja masih rendah, alat<sup>2</sup> kerdjaja kuno sedang hubungan kerdjaja pada umumnja masih bersifat feodal.

Massa kaum nelajan merupakan tenaga penggerak revolusi bersama<sup>2</sup> dengan klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil kota dan elemen<sup>2</sup> demokratis lainnja. Kemelaratan jang keterlaluan didesa telah menjebakkan sebagian dari kaum tani jang hidup ditepi pantai meninggalkan pertanian dan memperkuat barisan nelajan. Oleh karena itu semakin urgenlah pekerdjaan Partai dikalangan nelajan untuk mengorganisasi dan membangkitkannja dalam aksi<sup>2</sup> buat perbaikan nasib dan kebebasan<sup>2</sup> demokratis, dan djuga untuk memperbaiki alat kerdja mereka, jang sekaligus akan turut membantu memetjahkan kekurangan bahan makanan jang penting bagi Rakjat Indonesia, jaitu kebutuhan jang besar akan ikan.

Djuga *inteligensia*, termasuk para pekerdja ilmu dan kebudayaan, masih tetap mengalami kesukaran<sup>2</sup>. Kurangnja alat, kurangnja biaja, sukarnja kesempatan kerdja dan tingginja padjak sangat menjukarkan pekerdjaan dilapangan ilmu dan kebudayaan. Kenja-taan pada waktu sekarang jalah, bahwa di-tengah<sup>2</sup> kekurangan sekolah, puluhan ribu guru SR menganggur. Adalah menggembirakan bahwa pada waktu<sup>2</sup> belakangan ini makin banjak para pekerdja ilmu dan kebudayaan serta para mahasiswa jang mentjeburkan diri kedalam gerakan progresif, jang bersimpati pada Partai atau masuk Partai. Partai harus dengan sepenuh hati bersatu dengan para pekerdja ilmu dan kebudayaan serta mahasiswa dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan<sup>2</sup>nja dan dalam mengembangkan bakat<sup>2</sup>nja.

Gambaran keadaan penghidupan kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, nelayan dan inteligensia seperti dijdelaskan diatas menundukkan bahwa penderitaan sebahagian yang sangat terbesar dari Rakjat Indonesia memang bertambah berat. Pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial makin meradjalela. Mereka adalah korban dari krisis ekonomi sekarang, korban dari-pada politik Pemerintah<sup>2</sup> yang kurang mentjerminkan kepentingan nasional dan kepentingan Rakjat banjak.

#### **(5) Memperbaiki Pekerdjaan Front Nasional Dan Mementijikan Lebih Landjut Kekuatan Kepalaibu**

**Kawan<sup>2</sup>!**

Setjara politik dalam tahun<sup>2</sup> belakangan ini, Indonesia bergeser kekiri. Sesudah berlangsung pemilihan umum Parlemen yang pertama dinegeri kita, Sidang Pleno ke-IV CC Partai telah menganalisa dan menjimpulkan adanya tiga matjam kekuatan politik yang hampir seimbang, jaitu kekuatan kepalaibu, kekuatan progresif dan kekuatan tengah yang masing<sup>2</sup> mempunjai konsep sendiri-sendiri tentang penyelesaian Revolusi Agustus 1945.

Djadi, didalam negeri kita dewasa ini terdapat kontradiksi<sup>2</sup> diantara tiga kekuatan ini, kontradiksi yang satu lebih tadjam daripada kontradiksi yang lain, ada kontradiksi yang tidak pokok dan ada yang pokok. Kontradiksi antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah adalah kontradiksi yang tidak pokok, kontradiksi dikalangan Rakjat. Sedangkan kontradiksi antara Rakjat dengan kekuatan kepalaibu adalah kontradiksi yang pokok, karena kaum kepalaibu mewakili kepentingan kaum imperialis yang memusuhi Rakjat Indonesia.

Bagaimanakah sekarang keadaan tiap<sup>2</sup> kekuatan itu? Dan bagaimana pula imbanan diantara ketiga kekuatan? Tentang ini dapat diterangkan sbb.:

Karena politik mereka yang terlalu reaksioner, sangat anti-nasional dan anti-Rakjat, „prestise” kekuatan kepalaibu sudah sangat merosot, mereka sudah kehilangan „perspektif”, mereka tidak mempunjai harapan lagi untuk kembali memimpin dan menguasai pemerintahan sentral lewat djalan parlementer. Oleh karena itulah mereka telah memaksakan konsepnja lewat djalan<sup>2</sup> extra-parlementer, djalan teror dan sampai mengadakan pemberontakan untuk bisa memegang kembali tampuk pemerintahan. Mereka sudah menempuh djalan fasis. Kekuatan pokok mereka tidak lagi terletak pada keptertjaan yang mereka dapat dari sebagian Rakjat Indonesia

jang politis paling terbelakang, tetapi pada bantuan uang, senjata dan perlengkapan<sup>2</sup> militer lainnya dari imperialis AS, Belanda dan Kuomintang, terletak pada sementara orang<sup>2</sup> militer jang korup, pada organisasi<sup>2</sup> teror, pada sabotase<sup>2</sup> dilapangan militer, ekonomi dan keuangan, pada penjelundupan<sup>2</sup> dan barter<sup>2</sup> liar. Pada pokoknya kekuatan mereka sekarang terletak pada bantuan kaum imperialis.

Sudah semakin banyak dari pengikut<sup>2</sup> kaum kontra-revolusioner jang meninggalkan mereka, tetapi bersamaan dengan itu semakin erat hubungan mereka dengan kaum imperialis jang mendia<sup>2</sup> dalangnya, terutama kaum imperialis AS. Duka tidak ada bantuan dari luarnegeri, kekuatan kapalabatu ini sudah tidak mempunyai peranan lagi.

Walaupun demikian kekuatan kapalabatu tidak boleh diremehkan, sebab masih ada faktor<sup>2</sup> jang menguntungkan mereka. Jang pertama dan terpenting ialah kenyataan bahwa Indonesia sekarang pada hakekatnya masih merupakan negeri setengah-djadian dan setengah-feodal. Selama negeri kita masih setengah-djadian maka berartilah bahwa kekuasaan imperialis masih ada dinegeri kita, dan berarti pula bahwa dinegeri kita masih ada dasar untuk hidupnya kekuatan reaksioner, kekuatan kapalabatu. Selama negeri kita masih setengah-feodal, maka berarti bahwa kekuasaan kelas tuantanah jang kontra-revolusioner masih ada. Feodalisme adalah basis sosial daripada imperialisme. Sisa<sup>2</sup> feodalisme jang masih berkuasa dalam kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan kebudayaan akan selalu merupakan sumber hidup kekuatan kapalabatu.

*Djadi, walaupun kekuatan kapalabatu sudah mendapat pukulan<sup>2</sup> politik jang berat, walaupun sudah semakin tertelandjangi watak anti-nasionalnya, walaupun semakin terbuka kedoknya jang memperlak agama dan mensalahgunakan perasaan kesukuan, walaupun ia sudah semakin terang<sup>2</sup>an memusuhi Rakjat, selama negeri kita masih merupakan negeri setengah-djadian dan setengah-feodal, kekuatan kapalabatu masih tetap merupakan salahsatu kekuatan jang harus tidak henti<sup>2</sup>nya ditelandjangi dan dilawan dengan segenap kekuatan. (Tepuktangan lama).*

Mengenai kekuatan tengah, kita telah mempunyai pengalaman<sup>2</sup>. Partai kita telah menjimpulkan, bahwa kekuatan tengah disatu pihak bimbang dalam melawan imperialisme dan feodalisme karena hubungan ekonomi mereka jang belum terputus samasekali dengan kaum imperialis dan tuantanah dan karena mereka djuga termasuk kelas penghisap. Tetapi di pihak lain mereka revolusioner, karena untuk kelanjutan dan kelapangan hidupnya mereka harus menghilangkan perintang<sup>2</sup> imperialis dan tuantanah. Dengan kekuatan

progresif yang besar ditambah dengan adanya program Partai yang menguntungkan golongan tengah, dengan langgamkerdja Partai yang baik, dan dengan kemampuan kekuatan kaum progresif memberikan pukulan<sup>2</sup> yang berat dan djitu pada kaum kepalabatu, ada kemungkinan bahwa kekuatan tengah untuk waktu yang lama bersikap setia pada perjuangannya anti-imperialis dan anti-feodal.

Djuga telah disimpulkan bahwa djika kekuatan tengah ini tidak lagi setia menjalankan politik anti-imperialisme, djika mereka meninggalkan kepentingan klasnya dan melatjurkan diri pada kaum kepalabatu, mereka bisa ber-sama<sup>2</sup> dengan kekuatan kepalabatu mengadakan pukulan<sup>2</sup> terhadap kekuatan progresif sehingga untuk sementara waktu dapat menghalangi perkembangan gerakan demokratis. Tetapi beberapa kali pengalaman besar sudah membuktikan bahwa persekutuan kekuatan tengah dengan kaum kepalabatu, seperti ketika kabinet Hatta dan Sukiman, samasekali tidak menguntungkan kekuatan tengah, sebaliknya kepentingan ekonomi mereka makin terdesak oleh kaum monopolis asing dan komprador serta prestise politik mereka merosot karena dipersalahkan Rakjat telah ikut ambil bagian dalam mendjual Republik Indonesia dan Rakjatnja.

Kaum burdjuis nasional Indonesia pada umumnya adalah burdjuisi dagang. Kedudukan burdjuisi Indonesia yang sangat lemah dilapangan ekonomi membikin mereka sangat tergantung pada perdagangan ekspor dan impor, dengan tekanan pada impor, dan dengan demikian berarti tergantung pada kaum imperialis yang menguasai kedua lapangan ini. Djika kedudukan mereka sebagai burdjuisi dagang sudah demikian lemahnja, maka lebih menjolok lagi kelemahan mereka dilapangan perindustrian.

Seandainya burdjuisi nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat dalam lapangan perindustrian, maka mereka dalam menghadapi kaum monopolis asing akan bersikap lebih berani sebagai saingan, dimana mereka akan mempertahankan hak hidupnya sebagai industrialis dan melawan kaum imperialis. Sebagai industrialis mereka djuga akan lebih melawan sisa<sup>2</sup> feodalisme karena mereka membutuhkan djaminan pasar dalam negeri. Dalam perlawanan terhadap imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme mereka akan bertemu dan akan sedjalan dengan massa Rakjat banjak yang djuga anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Tetapi dalam kedudukan sebagai burdjuisi dagang hampir semua usaha mereka tergantung pada kaum imperialis. Mereka harus menyesuaikan diri dengan sjarat<sup>2</sup> yang ditentukan oleh kaum imperialis. Seandainya ada niat untuk melawan, mereka tidak tjukup kuat. Keadaan<sup>2</sup> inilah yang menjadi sebab daripada watak yang sangat bimbang dan sangat tidak

konsekwen dari burdjuasi nasional Indonesia, keadaan yang telah menjadikan negeri kita tanah yang subur untuk tumbuhnya komprador<sup>2</sup> dan kapitalis<sup>2</sup> birokrat. Tetapi, di pihak lain, kelemahan kedudukan ekonomis burdjuasi nasional tidak memberikan dasar materiil yang kuat untuk adanya pertentangan yang tajam antara burdjuasi nasional dengan kelas buruh pada umumnya. Hal ini sampai batas<sup>2</sup> tertentu membantu penggalangan front nasional.

Tetapi, dengan keterangan diatas tidaklah berarti bahwa burdjuasi nasional Indonesia tidak merupakan faktor politik yang penting. Mereka mempunyai pengaruh ideologi dan politik yang berarti dikalangan kaum intelektual dan alat<sup>2</sup> negara. Oleh karena itu tetap menjadi masalah yang penting soal penggalangan persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah, di samping berusaha menjegah mereka berkapitulasi pada kekuatan kepalabatu dan imperialis.

Karena tidak ada kekuatan dan keberanian yang cukup untuk melawan kaum imperialis dilapangan ekonomi, maka sesuai dengan politik imperialis, golongan<sup>2</sup> tertentu dari burdjuasi nasional mempertajam pertentangan antara kapitalis<sup>2</sup> Indonesia sendiri, yaitu antara yang „asli“ dengan yang „tidak asli“, dan bersamaan dengan ini menjebarkan ratjun sovisme dikalangan Rakyat. Ini namanja melindungi musuh asing yang besar dan memukul teman sendiri, musuh asing yang besar menjadi makin besar dan makin bertambah, sedangkan teman sendiri menjadi babak-belur. Ini adalah politik „merusak rumah sendiri untuk memasukkan pentjuri“. Bahwa mereka memasukkan pentjuri nampak jelas dari sikap mereka yang bukan hanya tidak menolak investasi modal besar asing, tetapi malahan menjadi arsitek Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing. Kalau mereka benar<sup>2</sup> anti-modal asing, maka kewajiban mereka yang nomor satu ialah menolak investasi modal besar asing dan menggerowoti yang sudah ada. Jika mereka tidak menolak investasi modal besar asing, tetapi menjadikan pemilik<sup>2</sup> toko dan warung ketjil asing sebagai sasarannya, maka ini bukanlah politik yang benar<sup>2</sup> nasional, tetapi politik tuantanah dan lintahdarat bumiputera yang menggunakan sovisme untuk memperhebat eksploitasinya sendiri atas Rakyat pekerdja. Padahal kewajiban sejarah mereka ialah mempersatukan sebanjak mungkin kapital Indonesia, melawan kaum kapitalis besar asing dan ambil bagian dalam mengindustrialisasi negeri, yaitu menjalankan politik „memperkuat rumah sendiri dan mengusir pentjuri“.

Sesudah perjuangan anti-kolonialisme melangkah maju dengan mengambilalih perusahaan<sup>2</sup> kaum kolonialis Belanda, nampaklah dengan jelas watak egois dari sebagian kaum tengah. Setelah

kaum buruh dengan resiko yang besar dan dengan samasekali tidak mementingkan diri sendiri mengambilalih perusahaan<sup>2</sup> Belanda, maka dengan menggunakan kekuasaannya dalam pemerintahan, kaum tengah yang egois berusaha memindahkan perusahaan<sup>2</sup> itu ketangan perseorangan mereka. Dsinilah bertemu kepentingan kaum tengah dengan kepentingan kaum reaksioner yang bisa merupakan landasan daripada politik reaksioner mereka bersama. Inilah salahsatu latarbelakang yang penting daripada persetudjuan<sup>2</sup> „tukang kelontong“ antara burdjuasi kepalabatu dengan elemen<sup>2</sup> nasionalis kanan dengan sembojan untuk „membendung Komunisme“. Mereka kira dengan mengoper sembojan imperialis tersebut akan ada Rakjat yang mau memaafkan perbuatan anti-nasional mereka.

Kaum tengah ragu<sup>2</sup> ketika kaum buruh dengan semangat patriotisme yang tinggi dan resiko besar mengambilalih perusahaan<sup>2</sup> kolonialis Belanda. Tetapi begitu ada kesempatan tampillah mereka untuk „menjelamatkan“ hasil<sup>2</sup> perdjungan kaum buruh, berusaha melarang kegiatan<sup>2</sup> serikatburuh dan menempatkan dirinya sebagai pengusaha<sup>2</sup> kolonialis Belanda. Politik mempartikelirkan perusahaan<sup>2</sup> Belanda yang diambilalih pada pokoknya dapat digagalkan berkat tentangan yang keras dari Rakjat Indonesia dan Presiden Sukarno. (*Tepuktangan*). Tetapi usaha kaum reaksioner untuk mempartikelirkan masih tjukup kuat, dan malahan sudah ada bukti<sup>2</sup> kearah ini.

Bahaya baru ialah bahwa sedjumlah penguasa perusahaan<sup>2</sup> tersebut mensalahgunakan kedudukannya untuk menumpuk kekajaan buat diri sendiri dengan kliknya dan merusak produksi untuk mendemonstrasikan „ketidakmampuan Pemerintah dan buruh“, dan bersamaan dengan itu ber-kaok<sup>2</sup> bahwa pengusaha<sup>2</sup> partikelir adalah lebih „tjapak“.

Berhubung dengan djatuhnya „prestise“ kaum kepalabatu, untuk sementara kaum imperialis Amerika tidak dapat menjalankan politiknja di Indonesia setjara efektif lewat saluran kaum kepalabatu yang dikepalai oleh pemimpin<sup>2</sup> Masjumi dan PSI. Oleh sebab itu kaum imperialis memang sangat membutuhkan komprador<sup>2</sup> baru dari kalangan kekuatan tengah, baik sivil maupun militer, sambil berusaha menegakkan kembali kedudukan kaum kepalabatu Indonesia. Inilah latarbelakang sikap sajan kanan dari kekuatan tengah yang berusaha menarik seluruh kekuatan tengah meninggalkan politik bekerdjasma dengan kekuatan progresif.

Tetapi didalam kekuatan tengah itu djuga terdapat sajan kiri dan sentris disamping sajan kanan. Golongan sentris dalam kekuatan tengah biasanja bukanlah golongan yang kuat, tetapi yang

mampu „mengawinkan“ (*tawa*) sajak kiri dan kanan, dan mempunyai ketjenderungan untuk memihak jang kuat dalam kekuatan tengah. Oleh karena itulah, kemenangan sajak kiri dalam kekuatan tengah merupakan besi berani jang bisa menarik golongan sentris kekiri, dan dengan demikian dapat mentjegah kekuatan tengah bergeser kekanan.

Sajak kiri dalam kekuatan tengah menentang politik melatjurkan diri pada imperialisme dan kaum reaksioner dalam negeri. Politik sajak kiri dari kekuatan tengah sampai batas<sup>2</sup> tertentu mentjerminkan perasaan<sup>2</sup> dan harapan<sup>2</sup> massa pengikut tengah, jang sebagian besar terdiri dari massa burdjuis ketji! Sajak kiri dari kekuatan tengah memperlihatkan sifat<sup>2</sup> anti-imperialisme jang lebih teguh dan tidak mudah masuk perangkap kaum imperialis. Mereka djuga tidak menyetudjui persetudjuan<sup>2</sup> „tukang kelontong“ jang dilakukan oleh golongan nasionalis kanan dengan kaum kepalabatu, sebab tidak sesuai dengan kepentingan langsung dari massa pengikut kekuatan tengah, terutama burdjuasi ketjilnja. Djuga mereka menentang Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing, karena dengan Undang<sup>2</sup> ini hanya beberapa gelintir pemimpin<sup>2</sup> kekuatan tengah jang akan kepertjikan komisi atau keuntungan lainnja atas kerugian massa pengikut kekuatan tengah sendiri. Kontradiksi ntern jang terdapat dikalangan kekuatan tengah djika tidak terlalu tadjam bisa diselesaikan setjara diam<sup>2</sup>, tetapi djika sudah terlalu tadjam, djika kesadaran sajak kiri sudah tjukup tinggi dan sajak kanannja tetap berkepalabatu, mesti berkesudahan dengan perpetjahan.

Dalam hubungan dengan penyelesaian tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945, telah dapat disimpulkan, bahwa pada taraf sekarang sajak kiri dari kekuatan tengah sudah tidak pertjaja lagi akan kemampuan dan kedjudjuran lapisan atas dari burdjuasi nasional untuk menjelesaikannja. Mereka djuga melihat pertumbuhan kekuatan proletariat Indonesia, dan mulai menjedari bahwa klas buruh menduduki tempat jang penting dalam gerakan kemerdekaan nasional, dalam memimpin penyelesaian tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus. Akan tetapi dengan ini belum berarti bahwa sajak kiri dari kekuatan tengah sudah menerima dan mengakui pimpinan proletariat. Untuk ini proletariat harus lebih memperkuat diri lagi dan harus menunjukkan kemampuannja jang lebih besar dalam membela kepentingan seluruh Rakjat.

Ada lagi satu hal jang perlu dibikin djelas mengenai kekuatan tengah, jaitu tentang adanya tokoh<sup>2</sup> mereka jang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“. Dalam menganalisa hal ini kita harus tidak melupakan bahwa kontradiksi terpokok dinegeri kita sekarang ialah antara Rakjat Indonesia dengan

imperialisme, yang dalam kehidupan politik sehari-hari<sup>2</sup> diwakili oleh kaum kepalabatu. Perjuangan menyelesaikan kontradiksi ini masih membutuhkan waktu panjang dan Partai kita harus berusaha menghimpun sebesar mungkin kekuatan untuk dipukulkan sekeras mungkin kepada imperialisme dan kakitangan<sup>2</sup>nja.

Ada berbagai sebab mengapa tokoh-tokoh kekuatan tengah memihak kaum kontra-revolusioner. Ada yang sudah sedjak semula memang reaksioner, tetapi sebelum pemberontakan kontra-revolusioner terjadi mereka berdjubah kaum tengah. Terhadap orang<sup>2</sup> ini sikap Partai sama seperti sikap terhadap kaum kepalabatu. Tetapi, ada juga yang memihak kontra-revolusi karena tidak puas berhubung burdjuasi nasional yang berkuasa dipusat tidak mampu atau tidak mau meladeni kepentingan burdjuasi nasional yang ada di-daerah<sup>2</sup>, misalnya, tidak tjepat memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah, tidak adilnya pembagian „rezeki“ yang berupa keuntungan ekonomi atau posisi dalam pemerintahan, dsb. Dalam keadaan tidak puas ini burdjuasi nasional di-daerah<sup>2</sup> berhadapan dengan kampanye yang luarbiasa kuatnya dari kaum kontra-revolusioner dengan sembojan<sup>2</sup> „untuk pembangunan daerah“, „persetan dengan orang<sup>2</sup> pusat“, „orang<sup>2</sup> pusat hanya mementingkan Djawa“, dsb. Mereka tertipu oleh sembojan<sup>2</sup> ini, mereka tertarik oleh keuntungan<sup>2</sup> materiil yang bersifat sementara, dan oleh karena itu mereka memihak kontra-revolusi.

Djadi, kontradiksi dalam tubuh kekuatan tengah yang tidak mendapat penyelesaian telah berakibat memperlemah kekuatan Rakjat dan menambah kekuatan kontra-revolusioner, karena kaum kontra-revolusioner dapat menarik kefihaknja sebagian dari burdjuasi nasional, artinja sebagian dari Rakjat. Sikap Partai kita terhadap mereka yang sudah tersesat ini, tetapi yang sesudah „PRRI-Permesta“ dikalahkan menjatakan setia lagi kepada Republik Indonesia, tidaklah seperti terhadap kaum kepalabatu. Kita harus menarik mereka kembali kedalam front persatuan nasional, karena tugas Partai kita bukanlah menghantjurkan burdjuasi nasional, tetapi menghantjurkan kaum kontra-revolusioner. Tentu saja sikap yang demikian ini samasekali tidak boleh berarti mengurangi kewaspadaan politik. Kesimpulan lain yang dapat kita tarik ialah, bahwa kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan „PRRI-Permesta“ samasekali bukan kontradiksi antara Rakjat di Djawa dengan yang diluar Djawa, tetapi antara seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, yang diongkosi dan dipersepdjatai oleh kaum imperialis yang dikepalai oleh AS. Ini adalah salahsatu bentuk daripada kontradiksi terpokok, jaitu kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan imperialisme.

Dari uraian diatas djelaslah, bahwa ada kesukaran<sup>2</sup> tertentu jang sudah dan akan, dihadapi oleh Partai kita dalam menggalang front persatuan nasional, jaitu menggalang persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah. Tetapi, kenyataan bahwa ada sikap dan tindakan bersama antara kekuatan progresif dengan gerakan nasionalis jang dipimpin oleh Presiden Sukarno dalam melawan imperialisme, chususnja dalam memukul kepentingan ekonomi imperialisme Belanda dan dalam menghantjurkan „PRRI-Permesta“ serta melemahkan kekuatan kepalabatu pada umumnya, adalah bukti bahwa front persatuan nasional dinegeri kita makin bertambah kuat. Soal jang paling penting sekarang dalam hubungan dengan memperkuat front persatuan nasional ialah terus mengembangkan kekuatan progresif dengan mengutamakan kekuatan massa buruh dan tani dan memenangkan sapa kiri didalam kekuatan tengah. Politik kita mengenai seluruh kekuatan tengah ialah : mendorong jang sudah maju, menarik jang bimbang dan membangkitkan jang masih terbelakang.

Mengenai perkembangan kekuatan progresif, peranan kaum buruh Indonesia disekitar pengambilalihan sedikit banjak memberikan gambaran. Laporan Pleno ke-VI CC menegaskan mengenai hal itu a.l. sbb. : *„Dengan pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> Belanda oleh kaum buruh, sekali lagi proletariat Indonesia menunjukkan rol pelopornja jang gagahberani dalam perjuangan nasional untuk kemerdekaan tanahair dan kepentingan seluruh nason. Kaum buruh mengambilalih perusahaan<sup>2</sup> imperialis bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk diserahkan kepada Republik Indonesia jang pemerintahnja belum pemerintah klas buruh. Semuanya ini dilakukan oleh proletariat Indonesia dengan resiko<sup>2</sup> jang besar, resiko dibunuh, dipetjat dari pekerdjaan, dihukum dsb. Untuk kepentingan nasional proletariat melakukan semuanya ini tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri“.*

Selanjutnja, pengalaman menghantjurkan pemberontakan „PRRI-Permesta“ membikin semakin naiknja martabat PKI dan kaum progresif pada umumnya. Sudah sedjak kaum pemberontak mempersiapkan perebutan kekuasaan di-daerah<sup>2</sup>, orang<sup>2</sup> Komunis dengan organisasi<sup>2</sup> massa jang dipimpinnja memberikan perlawanan jang gigih. Orang<sup>2</sup> Komunis adalah korban<sup>2</sup> pertama daripada perangkapan dan pembunuhan oleh kaum pemberontak. Dalam situasi jang demikian, kekuatan tengah terus dalam kebimbangan. Kekuatan progresif dibawah pimpinan PKI memperlihatkan sikap jang paling tegas mendorong pemerintah dan membantu Angkatan Perang untuk menghantjurkan kaum pemberontak. Tetapi, setelah kaum pemberontak kontra-revolusioner hantjur, maka sibuklah

kaum: tengah menempati posisi<sup>2</sup> yang penting dan dimana mungkin menandang kaum progresif. Dengan perbuatan<sup>2</sup>nja yang tidak adil ini kaum tengah tidak hanya lebih mendiskreditkan dirinya dimata massa Rakyat Indonesia dan aparat<sup>2</sup> negara yang patriotik, tetapi mereka juga telah sangat memperlemah potensi Rakyat Indonesia dalam usaha menghanturkan kaum kontra-revolusioner.

Baik dalam soal pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> Belanda maupun dalam soal membasmi kaum pemberontak kontra-revolusioner terbukti, bahwa proletariat Indonesia sudah semakin dapat menempatkan dirinya dan sudah mulai mendapat pengakuan sebagai pelopor dalam perjuangan nasional pada tingkat sekarang ini, sebagai pelopor perjuangan Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945. Rakyat Indonesia telah menunjukkan kepertajaan yang tidak ketil lewat 3 kali pemilihan umum kepada PKI dan kekuatan progresif pada umumnya. Lahirnya Konsepsi Presiden Sukarno yang bertudjuan membentuk Kabinet Gotong-rojong berdasarkan perwakilan berimbang, artinya ikutsertanja orang<sup>2</sup> Komunis didalam pemerintahan sentral, adalah pentjerminan yang wajar dari harapan seluruh Rakyat pekerdja. Dukungan yang begitu kuatnja untuk mendirikan Kab.net Gotongrojong, tidak akan mungkin djika Rakyat tidak mempunyai kepertajaan yang besar kepada PKI. Kepertajaan ini menjadi lebih besar lagi setelah Rakyat mendapat pengalaman yang langsung dan baik diberbagai daerah dimana orang<sup>2</sup> Komunis yang memerintah, dimana Rakyat menjaksikan sendiri tentang satunja perkataan orang<sup>2</sup> Komunis dengan perbuatannja, dimana Rakyat untuk pertamakalinya mempunyai perasaan ikutserta menentukan djalannnja perkembangan masyarakat didaerahnja. (*Tepuktangan*).

Tetapi tidaklah mudah bagi kekuatan progresif untuk mengembangkan dirinya. Sajap kiri dari kekuatan tengah bermaksud, disamping memukul kekuatan kepalabatu, menggunakan dan membatasi kekuatan progresif. Sajap kanan dari kekuatan tengah berusaha menghambat perkembangan dari kekuatan progresif dengan politiknya „pukul kanan dan pukul kiri“, tetapi karena irihati, kuatir dan takut setengah mati pada perkembangan kekuatan progresif mereka lebih banjak memukul kekiri daripada memukul kekanan. (*Tawa*). Untuk politik kanannja, sampai batas<sup>2</sup> tertentu mereka bersedia berkompromi dengan kekuatan kepalabatu. Kaum kepalabatu berusaha mati<sup>2</sup>an tidak hanya untuk menghambat perkembangan kekuatan progresif, tetapi untuk „membasminja“.

Ketjualj usaha menghambat perkembangan kekuatan progresif dari fihak kaum nasionalis kanan, usaha memukul dan selandjutnja menghanturkan dengan kekerasan dari fihak kaum kepalabatu,

dan dorongan yang terus-menerus untuk membasmi gerakan Komunis dari fihak kaum imperialis, djuga kaum trotskis merasa sangat berdosa djika tidak turut ambil bagian dalam "memburu Komunis" ini. (*Tawa*).

Djelaslah sekarang kesulitan<sup>2</sup> yang dialami oleh kekuatan progresif dalam mengembangkan dirinya. Kaum Komunis tidak boleh mempunyai rasa puas diri dengan sukses<sup>2</sup> yang telah diperolehnya dalam mengembangkan kekuatan progresif, sebaliknya ia harus senantiasa mempertinggi kewaspadaannya dan tidak djemu<sup>2</sup>nya terus mengeratkan dan meluaskan hubungannya dengan seluruh lapisan Rakyat. Kekurangan<sup>2</sup> yang penting dalam pekerjaan menggalang front nasional masih terdapat didalam Partai kita. Dikalaupun kader<sup>2</sup> Partai masih terdapat kekaburan pandangan tentang kontradiksi tidak pokok dan pokok didalam masyarakat Indonesia sekarang, dan kurangnya pengertian bahwa pada suatu keadaan kontradiksi yang antagonis bisa menjadi tidak antagonis, sedangkan yang tidak antagonis bisa menjadi antagonis. Karena kekaburan dan kurangnya pengertian ini, maka kita kurang mampu tepat pada waktunya menggunakan tiap<sup>2</sup> keadaan untuk memperkuat front nasional. Dengan lebih banyak belajar teori dan dengan bertambahnya pengalaman, serta tidak lupa *menjimpulkan* pengalaman<sup>2</sup> yang sudah didapat, kelemahan<sup>2</sup> ini setjara berangsur akan dapat kita atasi.

Seluruh perkembangan sesudah Kongres Nasional ke-V Partai membuktikan benarnya analisa mengenai "3 kekuatan dan 3 konsep penyelesaian Revolusi Agustus 1945". Djuga adalah satu kenyataan bahwa tiga kekuatan ini mengalami pergeseran terus-menerus, dan sampai sekarang pergeseran ini adalah kekiri. Dilihat dari sudut pengikutnya, PKI bukan hanya sudah menjadi Partai yang nasional, jaitu meliputi seluruh negeri dan seluruh sukubangsa, tetapi djuga Partai yang terbesar dinegeri kita. (*Tepuktangan lama*).

Sekarang bagaimana imbangan kekuatan sesudah perjuangan anti-imperialisme Belanda meningkat selangkah maju dengan pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> Belanda, sesudah "PRRI-Permesta" pada pokoknya digulung dan sesudah kegagalan mereka mentjegah kembali ke UUD '45? Dapat dipastikan bahwa kekuatan kepala-batu sudah djauh merosot, dan bersamaan dengan itu kekuatan progresif sudah semakin besar, sedangkan kekuatan tengah pada pokoknya tetap. Walaupun martabat dari pimpinan kekuatan tengah menurun karena sikapnya yang terlalu bimbang dalam melawan kontra-revolusi dan karena persetudjuan<sup>2</sup> "tukang kelontong" dengan kaum kepala-batu yang dilakukan oleh sajak kanan dari pimpinannya, tetapi posisi kekuatan tengah dapat tertolong

karena adanya sajanj kiri kekuatan tengah jang tetap anti-imperialisme, dan djuga berhubung dengan sebagian dari massa kekuatan kepalabatu bergeser ketengah. Garis politik PKI menghadapi tiga kekuatan ini adalah tetap, jaitu . *mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjilkan kekuatan kepalabatu*. Ini berarti melaksanakan sembojan . *perbaiki pekerdjaan front nasional, pentjilkan lebih landjut kekuatan kepalabatu ! (Tepuktangan)*.

#### (6) PKI Mempertahankan Republik Proklamasi

Dewan Konstituante adalah saluran jang oleh Partai telah dipakai se-baik<sup>2</sup>nja untuk mempertahankan djiwa dan semangat Republik Proklamasi 17 Agustus 1945, djiwa dan semangat jang dapat mempersatukan seluas mungkin Rakjat Indonesia. Mempertahankan Republik Proklamasi berarti mempertahankan prinsip, bahwa untuk kedjajaannja Rakjat Indonesia harus bersatu, bahwa kedaulatan ada pada Rakjat, bahwa Rakjat mendjalankan kedaulatannja dengan melewati dewan<sup>2</sup> pihhan Rakjat dan bahwa semua penduduk adalah sama dihadapan Undang<sup>2</sup>. PKI mempertahankan djiwa dan semangat Republik Proklamasi karena Republik Proklamasi selama Revolusi Rakjat tahun 1945-1948 terbukti adalah Republik jang revolusioner, alat perdjuaan jang penting dalam mempertahankan kemerdekaan nasional, perdamaian, demokrasi dan persatuan seluruh Rakjat dengan tidak memandang perbedaan keturunan, sukubangsa, laki<sup>2</sup> atau wanita, agama, filsafat dan kejakinan politik. Mempertahankan Republik Proklamasi berarti mempertahankan Republik, dimana didalamnya didjamin kebebasan beragama dan dihormati kejakinan politik jang tidak bertentangan dengan djiwa Revolusi Agustus 1945 dan dimana badan<sup>2</sup> keagamaan dipisahkan dari negara.

PKI tetap mempertahankan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan jang daerahnja meliputi seluruh wilayah „Hindia Belanda” dulu. Dalam negara kesatuan ini didjamin adanja otonomi jang se-luas<sup>2</sup>nja bagi daerah<sup>2</sup>. PKI mempertahankan isi daripada fasal-mengenai ekonomi jang dimuat dalam Undang<sup>2</sup> Dasar 1945 jang bertudjuan untuk melikwidasi ekonomi kolonial.

Demikianlah sebab<sup>2</sup>nja, mengapa setelah Konstituante gagal membikin UUD baru jang memuat pokok<sup>2</sup> pikiran seperti tersebut diatas, PKI dan golongan patriotik lainnja dengan teguh memperdjuaan supaja UUD Revolusi, jaitu UUD '45 diterima oleh Konstituante. Setelah terbukti Konstituante pada sidang<sup>2</sup>nja akhir Mei dan permulaan Djuni tahun ini tidak dapat mensahkan UUD

'45, walaupun sudah didukung oleh golongan terbesar daripada anggota<sup>2</sup> Konstituante, tetapi tidak mentukupi  $2/3$  suara yang dibutuhkan menurut UUD Sementara, maka PKI menganggap satu-satunya jalan untuk menjelamatkan negeri dari bentjana perpetjahan nasional lebih lanjut hanyalah jika Presiden Sukarno mendekretkan UUD '45 atasnama mayoritas Rakyat Indonesia. (*Tepuktangan*). PKI menuntut pendekritan dengan maksud untuk tidak memberi kesempatan kepada elemen<sup>2</sup> reaksioner guna menimbulkan perpetjahan<sup>2</sup> nasional yang lebih djauh, dan untuk lebih mengkonsolidasi persatuan anti-imperialisme dari Rakyat. Dengan pendekritan telah dapat ditjegah kompromi yang memalekan dan merugikan Rakyat antara kekuatan tengah yang pro dengan mereka yang kontra UUD '45. Kekurangan<sup>2</sup> yang terdapat pada UUD '45 akan dapat diisi melalui sidang<sup>2</sup> Majelis Permusjawaratan Rakyat (MPR) yang demokratis dikemudian hari. Oleh karena itu PKI dan Rakyat pekerdja Indonesia menjambut pendekritan berlakunya kembali UUD '45 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno pada tanggal 5 Djuli 1959.

#### **(7) Sikap PKI Terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda**

Dalam menetapkan sikap politik yang praktis, kita harus berpedoman kepada program tuntutan yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, yang kemudian diperbaharui oleh Sidang pleno ke-IV CC dan yang sekarang diajukan lagi kepada Kongres ini, yang sudah disesuaikan dengan perkembangan situasi. Tugas pokok program tuntutan Partai adalah untuk mempersatukan seluruh Rakyat dan untuk memenuhi tuntutan<sup>2</sup> ekonomi dan politik daripada Rakyat pada tingkat<sup>2</sup> tertentu sebelum penyelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar<sup>2</sup>nja. Dalam lapangan politik program tuntutan kita sekarang pada pokoknja menghendaki pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau pembentukan Kabinet Gotongrojong, sebagai pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.

Dapat atau tidaknja Pemerintah Koalisi Nasional dibentuk tergantung pada pekerjaan Partai menggalang front persatuan, pengembangan kekuatan progresif dan melakukan pukulan<sup>2</sup> yang djitu terhadap kekuatan kepalabatu. Tentang duduknja orang<sup>2</sup> Komunis didalam Kabinet tergantung pada imbangan kekuatan yang riil pada waktu kabinet dibentuk. PKI telah dan akan terus mengadakan tuntutan pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau Pemerintah Gotongrojong diantara partai<sup>2</sup>, golongan<sup>2</sup> dan perseorangan<sup>2</sup> yang suka. PKI harus mempersoalkan duduknja dalam kabinet, ka-

rena PKI bertujuan memperkuat persatuan nasional dan PKI selamanya merasa bertanggungjawab mengenai keadaan Rakjat dan bangsa Indonesia.

Dalam hal tidak duduk dalam kabinet, Partai telah menentukan sikap sebagai berikut. *Pertama* PKI bisa menjokong dengan sja-rat-sjarat djika programnja maju, komposisinja dan menterij<sup>2</sup>nja tjukup baik untuk melaksanakan program. *Kedua*, jalah beroposisi, djika programnja reaksioner atau sekedar hanya sebagai demagogi sadia, sehingga sangat tidak memenuhi tuntutan<sup>2</sup> politik dan ekonomi jang paling minimum daripada Rakjat.

Masalah Angkatan Perang merupakan faktor jang tidak boleh dianggap ketjil dalam menggalang front persatuan nasional, dalam mengembangkan kekuatan progresif, dalam mementjilkan kekuatan kepalabatu dan dalam usaha Rakjat membentuk kabinet jang maju. Setelah kabinet Sukiman turunpanggung sebagai akibat desakan kekuatan demokratis dan sebagai gantinya berdiri kabinet Wilopo atas dukungan kekuatan demokratis, maka kaum sosialis-kanan dan kaum militeris mentjoba melakukan kudeta (17 Oktober 1952). Kegagalan kaum kontra-revolusioner pada tahun 1952 itu ditjoba untuk ditebus dengan mentjetuskan peristiwa "13 Agustus 1956" dan "16 November 1956", sebagai pertjobaan melawan kekuasaan jang sah dengan kekuatan tentara. Ketika mereka sempat berkuasa kembali selama kabinet Burhanuddin Harahap (Masjumi), mereka mentjoba mereorganisasi pimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dengan menggunakan kekuasaan politik jang ada didalam tangannja. Tetapi semua usaha ini mengalami kegagalan disebabkan oleh antara lain tiga faktor penting jaitu : *Pertama*, Presiden Sukarno jang menjatukan diri dengan Rakjat mempunyai pengaruh jang kuat dikalangan angkatan bersendjata, dan Presiden Sukarno menolak mendjadi diktator militeris. *Kedua*, APRI adalah anak kandung Revolusi Rakjat, karena itu mayoritas daripada para perwira, bintanga dan tamtama APRI tidak mudah dipaksa untuk menjalankan perintah jang ditujukan untuk melikwidasi Republik Proklamasi dengan djalan membentuk diktatur militer atau diktatur perseorangan. (*Tepuktangan*). *Ketiga*, Rakjat Indonesia tidak hanya mentjintai demokrasi, tetapi dibawah pimpinan Partai jang waspada Rakjat aktif membela demokrasi itu. Itulah sebab<sup>2</sup> pokok mengapa kudeta Masjumi-PSI dan kaum militeris jang memihak mereka menemui kegagalan, dan semuanya ini tetap merupakan kekuatan<sup>2</sup> jang dapat menggagalkan tiap<sup>2</sup> usaha perebutan kekuasaan reaksioner. (*Tepuktangan*).

Sebagaimana sudah ber-ulang<sup>2</sup> dinjatakan, kaum Komunis akan berdjuang terus supaja diktatur militer seperti jang pernah dialami

Rakjat Indonesia dimasa pendudukan Djepang tidak kembali lagi, walaupun dalam bentuk lain. Bagi perkembangan maju Indonesia, soal yang paling penting buat Rakjat Indonesia ialah mempertahankan dan meluaskan demokrasi. Tetapi, seandainya diktatur militer tidak tertegah, djadi toh terdjadi djuga, maka kewadpiban tiap<sup>2</sup> Komunis ialah melawannya dengan sekuat tenaga (*Tepuktangan lama*). Melawan diktatur militer berarti membela kemerdekaan nasional Indonesia dari serangan kekurangadjaran imperialis. Rakjat tidak suka pada diktatur militer, ini sudah dibuktikan ketika pendjadjahan Djepang dan ketika sebagian Rakjat Indonesia dihebe-rapa daerah menghadapi kaum militeris-fasis „PRRI” dan „Permesta”. Oleh karena itulah perlawanan terhadap diktatur militer pasti akan menang. Untuk sementara memang mungkin ada orang yang takut pada diktatur militer (*tawa*), tapi ini hanya untuk sementara waktu. Orang bisa takut selama ia belum langsung menghadapinya, tetapi djika sudah langsung berhadapan semua rasa takut dan ke-ragu<sup>2</sup>an akan hilang dan keberanian serta tekad bulat Rakjat akan bagaikan airbah raksasa mendobrak dan menghantjurluluhkan diktatur militer itu. (*Tepuktangan lama*) Ini sudah dibuktikan ketika Rakjat Indonesia menghadapi kaum militeris Djepang, dan sekarang dalam membasmi habis kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”.

Sekarang perlu dianalisa setjara khusus kemungkinan<sup>1</sup> tentang perkembangan kabinet Sukarno-Djuanda sebagai kelanjutan dari kabinet Djuanda yang sudah memperoleh hasil<sup>2</sup> tertentu dalam mematahkan kekuasaan ekonomi Belanda dalam rangka perdjjuangan mengembalikan Irian Barat dan dalam menindas pemberontakan kontra-revolusi „PRRI-Permesta”.

Keadaan yang khusus yang harus kita perhatikan sekitar Pemerintahan Sukarno-Djuanda sekarang adalah masih tetap berlakunya kekuasaan militer. Walaupun SOB bikinan kolonial Belanda sudah dihapuskan dan sudah diganti dengan Undang<sup>2</sup> Keadaan Bahaya bikinan Parlemen RI, akan tetapi kenyataannya pihak militerlah yang berkuasa. Kekuasaan militer telah memperlihatkan segi<sup>2</sup> positif, terutama di-daerah<sup>2</sup> bergolak. Akan tetapi tidak sedikit segi<sup>2</sup> negatifnya, yang djika tidak segera diachiri bisa ber-larut<sup>2</sup> dan bisa menutupi segi<sup>2</sup> yang positif daripada kekuasaan militer itu. Mengenai segi<sup>2</sup> negatif ini, yang sangat serius ialah peng<sup>2</sup>urangan hak<sup>2</sup> demokrasi bagi Rakjat, seperti masih berlakunya Undang<sup>2</sup> Keadaan Bahaya di-daerah<sup>2</sup> yang tidak bergolak seperti pembatasan kegiatan politik, pemberangusan koran<sup>2</sup> demokratis, larangan untuk melangsungkan rapat<sup>2</sup> yang diselenggarakan oleh partai<sup>2</sup>, termasuk partai<sup>2</sup> yang melawan pemberontakan kontra-revolusioner dan yang men-

dukung UUD '45, larangan mogok, termasuk mogok di-perusahaan<sup>2</sup> yang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner, pengusiran kaum tani, larangan untuk menjadi anggota Partai bagi pegawai negeri tertentu, dan larangan<sup>2</sup> lain yang sangat mengekang perkembangan gerakan progresif dan demokratis.

Segi negatif yang lain dari kekuasaan militer yang juga cukup serius ialah soal tumpangtatan sementara perwira yang masih aktif dalam perekonomian, keuangan dan politik pemerintahan. Jika bekas<sup>2</sup> perwira Achmad Husein, M. Simbolon, V. Sumual dan perwira<sup>2</sup> pemberontak lainnya memulai penghianatannya dengan mengadakan petualangan dilapangan ekonomi dan politik yang bukan bidangnya dan mengachirinya dengan pemberontakan kontra-revolusioner, maka adalah tidak tepat jika perbuatan chianat ini ditiru oleh perwira<sup>2</sup> yang menentang kaum pemberontak kontra-revolusioner.

Pada waktu<sup>2</sup> yang diperlukan PKI dan Rakjat bisa memberikan kekuasaan sampai batas<sup>2</sup> tertentu kepada Angkatan Perang yang patriotik, selama kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Kita harus mentjegah timbulnya kontradiksi yang tidak perlu atau yang tadjam antara Rakjat dan Angkatan Perang, dan hal<sup>2</sup> yang mungkin menuju kearah pertadjaman kontradiksi harus dihindari. Pelaksanaan garis „*Dwitunggal Rakjat dan Tentara*“, yaitu garis „*Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat*“ atau „*Salingbantu Rakjat dan Tentara*“ adalah djaminan dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

Dengan pada pokoknya berhasil menumpas kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, prestise Pemerintah meningkat, baik dimata Rakjat Indonesia maupun dimata negara<sup>2</sup> sahabat diluarnegeri. Prestise ini akan bisa terus meningkat jika Pemerintah dapat mempertahankan kedudukannya sebagai pemerintah yang menjalankan politik sesuai dengan keinginan Rakjat banyak, selalu berorientasi dan bersandar pada Rakjat, selalu dapat mengendalikan semua aparatnya guna pelaksanaan programnya dan sampai batas<sup>2</sup> tertentu mampu mengadakan perbaikan<sup>2</sup> dalam tingkat hidup Rakjat.

Dengan berlakunya kembali UUD '45 lewat dekrit Presiden Sukarno pada tanggal 5 Djuli 1959 negara Indonesia adalah tetap negara hukum dan kedaulatan tetap ada ditangan Rakjat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat (MPR). Sedangkan kekuasaan membentuk undang<sup>2</sup> ada pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (DPR). Berhubung dengan ini: segala ketjenderungan untuk berbuat se-wenang<sup>2</sup> terhadap kebebasan<sup>2</sup> politik Rakjat seperti sengadja memperlambat pemilihan

umum untuk DPR, nafsu ingin mengebiri dan membubarkan partai-partai, menjengkirkan atau mengebiri DPR sebelum maupun sesudah MPR terbentuk merupakan antjaman<sup>2</sup> terhadap sendi<sup>2</sup> demokrasi yang merupakan kepentingan vital Rakjat Indonesia, dan ini berarti mentjiderai UUD '45.

Sesudah lewat dekr.t Presiden yang didukung oleh mayoritas yang mejakinkan, Rakjat Indonesia kembali ke UUD '45 maka adalah sangat masuk-akal bahwa Rakjat mengharapkan terbentuknja Kabinet Gotongrojong dibawah pimpinan Presiden Sukarno sesuai dengan gagasan<sup>2</sup> yang ada dalam Konsepsi Presiden Sukarno. Tetapi dengan terbentuknja Kabinet Kerdja yang dipimpin oleh Sukarno-Djuanda, yang bukan Kabinet Gotongrojong maka untuk sementara harapan Rakjat ini tidak terpenuhi. Rakjat Indonesia tidak akan berhenti ditengah djalan dan tidak akan melepaskan pernyataan Presiden Sukarno yang ber-kali<sup>2</sup> mengatakan bahwa Rakjat berhak menagih pelaksanaan program Pemerintah dan bahwa se-waktu<sup>2</sup> menteri bisa diganti oleh Presiden Rakjat Indonesia yang tjinta persatuan nasional, yang demokratis dan progresif tidak akan melepaskan tuntutan politiknja yang praktis, yaitu pembentukan Kabinet Gotongrojong baik lewat penggantian menteri<sup>2</sup> yang tidak tepat maupun dengan mengadakan perombakan kabinet keseluruhannja. Tuntutan ini sangat adil dan oleh karena itu tjepat atau lambat pasti akan terlaksana. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan Dewan Perantjara Nasional (Depernas) yang komposisinja mendekati semangat gotongrojong telah lebih mendorong Rakjat Indonesia untuk meneruskan tuntutan pembentukan Kabinet Gotongrojong.

PKI akan dengan sekuat tenaga membantu pelaksanaan program kabinet Sukarno-Djuanda dan pelaksanaan pokok<sup>2</sup> fikiran yang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Sukarno yang di-utjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959, selama Pemerintah tidak menghalang-halangi perkembangan gerakan kemerdekaan dan gerakan demokratis. Sokongan PKI terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda adalah sokongan yang ichlas dan kritis, berpedoman pada prinsip : menjokong politiknja yang madju tanpa reserve, mengkritik politiknja yang ragu<sup>2</sup> supaja mendjadi madju, dan menentang menteri<sup>2</sup> yang politiknja merugikan Rakjat. Dengan membantu perkembangan gerakan kemerdekaan dan gerakan demokratis, kabinet akan dapat memperkuat kedudukannja sendiri dan berdjasa pada perdjuaan Rakjat menudju Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis, menudju pelaksanaan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar<sup>2</sup>nja.

## (8) Memperkuat dan Memperluas Demokrasi

Ketidakmampuan sistim demokrasi liberal memetjahkan berbagai persoalan penting yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia telah menjebabkan bahwa kebangkrutan daripada sistim ini tidak dapat ditutup-tutupi lagi terhadap Rakjat Indonesia. Bersamaan dengan makin merosotnja kewibawaan sistim ini merosot pulalah kedudukan partai<sup>2</sup> burdjuas yang telah menggunakan sistim ini „se-baik<sup>2</sup>nja“ untuk memperkaja lapisan atas dari burdjuasi dengan djalan menggunakan kedudukan politik untuk melakukan korupsi dan perbuatan-perbuatan tertjela lainnya. Sistim yang dalam masa krisis umum kapitalisme sekarang setjara sedjarah sudah bangkrut, djuga di Indonesia sudah terbukti satunja sistim demokrasi liberal dengan korupsi dan birokrasi, dengan ketidakmampuan memetjahkan persoalan-persoalan pokok dan penting yang dihadapi oleh Rakjat Indonesia.

Kaum kanan yang paling reaksioner, setelah melihat gelagat bahwa mereka tidak dapat lagi memperalat demokrasi liberal, sudah sedjak djauh hari berusaha menutupi ketidakmampuan sistim ini dengan pertjobaan merebut kekuasaan politik dengan djalan extra-parlementer untuk mentjiptakan sistim pemerintahan fasis yang berbentuk junta-militer. Setelah gagal pertjobaan mereka dipusat, maka mereka mentjoba dengan mendjagokan tokoh<sup>2</sup> militer dibeberapa daerah untuk merebut kekuasaan politik setjara lokal sebagai alat untuk menekan Pemerintah pusat supaya bertekuk-lutut. Dengan pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“ pada awal tahun 1958 tokoh<sup>2</sup> Masjumi-PSI dapat mendjadikan dirunja „Radja<sup>2</sup> sehari“ di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, berkat bajonet orang<sup>2</sup> militer yang sefaham dengan mereka dan berkat dorongan dan bantuan negara<sup>2</sup> imperialis yang dikepalai oleh Amerika Serikat.

Tetapi, meskipun tokoh<sup>2</sup> reaksioner dan petualang<sup>2</sup> dari „PRRI-Permesta“ telah mengalami kegagalan, kaum reaksioner dan petualang politik masih tjukup banjak dinegeri kita, dan masih ada tuan Hatta (*tawa*) yang dapat didjadikan alat guna pertjobaan menundukkan Rakjat Indonesia, baik dengan djalan membentuk kabinet reaksioner seperti yang dituntut oleh Dr. Sukiman (Masjumi) maupun dengan mendirikan diktatur militer atau diktatur perseorangan.

Tjepatnja kebangkrutan demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh dua proses. *Pertama*, proses kesadaran Rakjat Indonesia sendiri, yang berdasarkan pengalamannja sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi, birokrasi dan ketidak-

mampuan dalam memecahkan persoalan<sup>2</sup> pokok dan penting dari Rakjat Indonesia. Kedua, karena agitasi anti-Parlemen, yang pada hakekatnya anti-kehidupan demokratis oleh promotor<sup>2</sup> junta-militer dan elemen<sup>2</sup> fasis lainnya.

Kebangkrutan sistem demokrasi liberal di mata Rakjat Indonesia tidak terjadi dalam situasi dimana imbalan kekuatan antara Rakjat Indonesia disatu pihak dan kaum imperialis beserta tuan-tanah di pihak lain sudah memungkinkan Rakjat Indonesia mengatasi krisis sistem politik ini dengan meniadakan kekuasaan Rakjat, yaitu kekuasaan politik dimana kedaulatan sepenuhnya berada ditangan Rakjat, dan dimana musuh<sup>2</sup> Rakjat ditjabut semaksimal hak<sup>2</sup> politiknya.

Tetapi, walaupun demikian Rakjat Indonesia tidak mengizinkan krisis demokrasi liberal, diatasi dengan kemenangan kaum reaksioner, yaitu kemenangan „PRRI-Permesta“, kemenangan diktatur militer atau diktatur perseorangan, atau dengan terbentuknya kabinet reaksioner. Didalam tangan Rakjat Indonesia sudah ada senjata untuk mengatasinya, yaitu Konsepsi Presiden Sukarno dan gagasan Demokrasi Terpimpin. Inilah jawaban Rakjat Indonesia pada waktu sekarang, supaya krisis demokrasi liberal berakhir dengan kemenangan Rakjat. (*Tepuktangan*).

Dalam situasi yang demikian ini sangatlah penting arti gagasan Demokrasi Terpimpin dari Presiden Sukarno. PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa yang diterimanya adalah demokrasi, meskipun bukan Demokrasi Rakjat, tetapi demokrasi yang anti-liberalisme, anti-diktatur militer dan anti-diktatur perseorangan. Segi positif daripada Demokrasi Terpimpin ialah, disatu pihak anti-diktatur militer dan anti-diktatur perseorangan, dan di pihak lain anti-liberalisme. Anti-liberalisme dilapangan politik, tidak bisa diartikan lain ketjuai pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, yaitu pembentukan kabinet Gotongroyong berdasarkan perwakilan berimbang diantara partai<sup>2</sup> dan golongan<sup>2</sup> pendukung Konsepsi Presiden. Anti-liberalisme dilapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain ketjuai anti „persaingan bebas“ („free fight liberalism“), dan ini berarti mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai syarat untuk dapat memimpin seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi kapital besar asing.

Segi<sup>2</sup> positif dari Demokrasi Terpimpin harus dikembangkan dan ditunjukkan untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%. Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden Sukarno adalah satu kesatuan.

Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno harus dilakukan diantara partai<sup>2</sup>, golongan<sup>2</sup> dan perseorangan<sup>2</sup> yang menjetudjuinya.

Mereka yang menolaknya adalah anti-persatuan nasional, pro-liberalisme, pro-diktatur militer atau pro-diktatur perseorangan. Karena itu adalah keliru jika pelaksanaan tjtta<sup>2</sup> yang baik ini di-gantungkan pada mereka yang menolaknya.

Masih adanya partai<sup>2</sup>, golongan<sup>2</sup> dan klik<sup>2</sup> yang menolak Konsepsi Presiden Sukarno dan Demokrasi Terpimpin, dan menginginkan adanya diktatur militer atau diktatur perseorangan adalah bukti, bahwa walaupun Rakyat Indonesia sudah memilih demokrasi, tetapi bahaya fasisme masih tetap ada. Oleh karena itu kewaspadaan revolusioner harus dipertinggi untuk mengalahkan bahaya ini.

Untuk mengalahkan bahaya fasisme, PKI berpendapat bahwa kewajiban seluruh Rakyat Indonesia ialah dengan gigih memperjuangkan agar Pemerintah :

- \* Sungguh<sup>2</sup> melaksanakan programnya untuk memenuhi kebutuhan Rakyat akan makanan dan pakaian, menjamin keamanan Rakyat dan negara dan meneruskan perjuangan melawan imperialisme.
- \* Memberikan kebebasan<sup>2</sup> demokratis yang se-luas<sup>2</sup>nja kepada Rakyat dan organisasi<sup>2</sup> Rakyat, membatalkan semua undang<sup>2</sup> dan peraturan yang membatasi kebebasan gerakan patriotik, dan dimana kaum pemberontak kontra-revolusioner dan gerombolan-gerombolan teroris tidak ada atau sudah dihancurkan, maka kebebasan<sup>2</sup> demokratis bagi Rakyat harus segera dipulihkan dengan menjabut berlakunya Undang<sup>2</sup> Keadaan Bahaya.
- \* Menjamin semua hak dan kebebasan kepada kaum buruh untuk membela kepentingan<sup>2</sup>nja yang sah, membatalkan semua undang<sup>2</sup> dan peraturan yang melarang kaum buruh mogok.
- \* Menindas dan membasmi kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, DI-TII dan gerombolan<sup>2</sup> teroris lainnya sampai ke-akar<sup>2</sup>nja, memberi kebebasan kepada organisasi<sup>2</sup> Rakyat mengembangkan diri untuk mematahkan pengaruh politik dan kekuatan bersenjata kontra-revolusioner, terutama di-daerah<sup>2</sup> dimana bandit<sup>2</sup> „PRRI-Permesta“ dan bandit<sup>2</sup> DI-TII masih leluasa melakukan kekedjamannya. Memberi hak kepada kaum tani untuk mengangkat senjata dibawah pimpinan APRI buat membela diri terhadap perbuatan<sup>2</sup> gerombolan<sup>2</sup> teroris kontra-revolusioner.
- \* Menghormati kedudukan dan hak<sup>2</sup> daripada Dewan<sup>2</sup> Perwakilan Rakyat Pusat (Parlemen) dan Daerah, mempertahankan sistim kepala daerah yang dipilih oleh Rakyat, (tepuktangan), meluaskan wewenang daripada pemerintah<sup>2</sup> daerah Swatantra

tingkat I dan II dan melaksanakan pembentukan pemerintah daerah Swatantra tingkat III.

- \* Mendemokraskan semua lembaga umum yang menjalankan fungsi yang bersifat ekonomi dan sosial.
- \* Mendemokraskan dan mereorganisasi alat<sup>2</sup> negara, memetjat dari djabatan<sup>2</sup> sivil dan militer pengchianat<sup>2</sup> bangsa, orang<sup>2</sup> reaksioner, penggelap<sup>2</sup> serta koruptor<sup>2</sup> dan supaya orang<sup>2</sup> ini dihukum. Mengisi alat<sup>2</sup> negara dengan orang<sup>2</sup> yang bersedia mengabdikan diri kepada kepentingan Rakjat. Mendemokraskan tentara dan mengadakan hubungan yang erat antara Tentara dan Rakjat. (*Tepuktangan*).

## II

### UNTUK MEMPERKUAT FRONT INTERNASIONAL ANTI-KOLONIAL DAN TJINTA DAMAI

#### Kawan<sup>2</sup>!

Dari pengalamannya yang banyak sedjak meletusnya Revolusi Agustus 1945 sampai sekarang, Rakjat Indonesia yakin bahwa saha<sup>2</sup> serta tjita<sup>2</sup>nja tidak dapat dipisahkan dari proses kedjadian<sup>2</sup> tidunia dan bahwa haridepan negerinya djuga takterpisahkan dari perdjuaan Rakjat diseluruh dunia untuk perdamaian dan kema-djuan, untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan Sosialisme.

Pengalaman dan tjita<sup>2</sup>nja sendiri tidak memungkinkan Rakjat Indonesia bersikap netral atau atjuh-tak-atjuh terhadap kolonialisme dan kemerdekaan, terhadap fasisme dan demokrasi, terhadap peperangan dan perdamaian, terhadap keterbelakangan dan kema-djuan, terhadap kapitalisme dan Sosialisme. Untuk kepentingan nasionalnja sendiri dan untuk tjita<sup>2</sup> kemanusiaannya, Rakjat Indonesia memihak kemerdekaan, demokrasi, perdamaian, kema-djuan dan Sosialisme. Netral atau atjuh-tak-atjuh terhadap semuanya ini adalah bertentangan dengan pendirian dan pandangan hidup Rakjat Indonesia, bertentangan dengan kepentingan nasional Rakjat Indonesia.

Sedjak hari<sup>2</sup> permulaan Revolusi Agustus 1945 politik luarnegeri RI merupakan bagian yang penting dari Revolusi. Ini berarti bahwa politik luarnegeri RI harus tegas<sup>2</sup> diabdikan untuk memenangkan Revolusi Agustus. Djuga sudah terbukti, bahwa kebidjaksanaan politik luarnegeri yang tidak diabdikan kepada tugas nasional me-

menangkan Revolusi Agustus, adalah suatu pengkhianatan terhadap Republik dan Rakjat Indonesia.

Bersamaan dengan mengabdikan Revolusi Agustus 1945, politik luar negeri RI harus mengabdikan perdamaian antara bangsa<sup>2</sup>. Dua tugas politik luar negeri ini, yaitu memenangkan Revolusi Agustus dan perdamaian, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Dalam perkembangannya semendjak 1945, politik luar negeri RI mengalami kemunduran<sup>2</sup> dan kemajuan<sup>2</sup>nya. Ternyata bahwa tiap kali kebidaksanaan politik luar negeri menjeleweng dari tudjuan dan semangat Revolusi Agustus, maka tiap kali pula politik luar negeri itu dikutuk oleh Rakjat, dan Indonesia mengalami masa yang tjelaka dalam pergaulan antara bangsa<sup>2</sup>. Sebaliknya tiap kali politik luar negeri ditudjukan untuk mengabdikan Revolusi Agustus, maka tiap kali pula politik luar negeri disokong Rakjat dan membawa RI ke-kemajuan<sup>2</sup> digelanggang internasional. Semua ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemimpin<sup>2</sup> Rakjat, para penguasa dan petugas negara di bidang ini.

Pengalaman Indonesia sudah tjukup banyak untuk dapat mengumpulkan suatu kebidaksanaan politik luar negeri yang objektif dan benar, ditudjukan untuk melaksanakan dua tugas politik luar negeri seperti tersebut diatas.

Sedjarah diplomasi dan pengalaman Indonesia memberi pelajaran bahwa politik luar negeri yang tepat adalah politik luar negeri yang disokong oleh Rakjat dan yang bisa ditjapai hanya apabila dibentuk dan disusun bersama-sama dengan Rakjat melalui konsultasi-konsultasi demokratis dan bentuk<sup>2</sup> kerdjasama lainnya yang tetap antara Pemerintah dan Rakjat.

Politik luar negeri yang tepat dan bisa sukses hanyalah politik luar negeri yang bersandarkan kekuatan dan kepentingan massa Rakjat Indonesia, dan bersandarkan kekuatan dan kepentingan umum Rakjat diseluruh dunia.

Berdasarkan tindjauan dan kebidaksanaan politik luar negeri ini, Partai sudah dan akan dapat membangkitkan dan memelihara kewaspadaan nasional. Partai sudah dan akan dapat mengawasi dengan saksama djalannya politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, memperbaiki dan mendorongnya maju, atau djika perlu, menentangnja. Dengan demikian Partai akan selalu bisa mensinjalir proletariat dan Rakjat Indonesia terhadap bahaya<sup>2</sup> provokasi, intervensi dan agresi imperialis yang mengantjam Republik terus-menerus.

Partai harus merumuskan politik luar negerinya yang mampu menghadapi musuh internasional Rakjat Indonesia yang paling berbahaya, yaitu imperialisme AS. Ia harus mampu mentjegah dan

mengalahkan intervensi dan agresi imperialis yang tiap saat mengancam keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia. Ia harus mampu menghadapi segala musuh politik reaksioner dan segala konplotan kontra-revolusioner yang bersumber pada politik subversi dan intervensi imperialis terhadap Indonesia. Politik luar-negeri kita harus mampu membantu tertjapainja pelaksanaan pembangunan ekonomi dan perbaikan hidup seperti yang ditjatakan oleh Rakjat Indonesia. Ia harus benar<sup>2</sup> sesuai dan mentjerminkan segala yang madju daripada keadaan dalam negeri Indonesia.

Politik luar negeri yang wadjar dan objektif inilah yang harus digariskan oleh Partai dan yang harus dijadikan milik Rakjat, supaya Partai bersama Rakjat memperjuangkan politik luar negeri ini untuk lambat-laun dapat dijadikan garis kebijaksanaan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.

### (1) Inti Pokok Zaman Kita Jalah Peralihan Dari Kapitalisme Ke Sosialisme

Dalam rangka menetapkan arah politik luar negeri Partai kita, adalah sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu perubahan ekonomi dan sosial apakah yang sedang terjdadi didunia kita sekarang. Tentang ini „Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh dari negeri<sup>2</sup> Sosialis, yang dikeluarkan dalam bulan November 1957 antara lain mengatakan, bahwa „Inti pokok dari zaman kita jalah peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme yang telah dimulai dengan Revolusi Sosialis Oktober Besar Rusia”. („Deklarasi” halaman 7, Jajasan „Pembaruan” 1958). Kebenaran daripada apa yang telah dinjatakan ini dibuktikan oleh kenyataan, bahwa kira<sup>2</sup> 1.000 djuta penduduk dunia atau lebih dari sepertiga umatmanusia telah menempuh djalan Sosialisme dan sedang membina hidup baru. (*Tepuktangan lama*).

Dalam periode antara Kongres Nasional ke-V Partai sampai kini, kehidupan politik internasional sangat kaya dengan perubahan<sup>2</sup> intensif dan tjepat, dengan pengalaman<sup>2</sup> dan kemadjuan<sup>2</sup>. Imbangan kekuatan internasional mengalami perubahan besar. Ini disebabkan oleh landjutnja dua proses sosial yang berlawanan satu sama lain dan yang makin tjepat menurut arahnja masing<sup>2</sup>. Disatu fihak dunia imperialis dengan proses sosialnja menudju kehantjurannja sendiri dan difihak lain dunia Sosialis dengan proses sosialnja menudju kearah perluasan dan kemadjuan terus-menerus. Satu dengan proses sosial yang kedua ini adalah perkembangan gerakan kemerdekaan nasional yang sekarang sudah banjak melahirkan negeri<sup>2</sup> yang

baru merdeka dan dengan se-djelas-nja menundukkan makin rontoknja sistim kolonial-imperialis. Seluruh perkembangan kedjadian<sup>2</sup> didunia berkisar disekitar dua proses pokok ini. Tentang ini „Deklarasi“ tersebut diatas menjatakan seperti berikut : „Sedang Sosialisme tengah dalam menaik, imperialisme menudju kepenurunan. Kedudukan imperialisme telah sangat menjadi lemah sebagai akibat menghanturnja sistim kolonial“ (halaman 9).

Kegagalan berbagai avontur imperialis seperti misalnja kegagalan agresi militernja terhadap Mesir dan kegagalan kontra-revolusi terhadap Hongaria pada achir 1956, kegagalan kasak-kusuknja di Kambodja, kegagalan intervensinja yang aktif membantu kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, kegagalan agresinja di Libanon dan Jordania sehingga dengan demikian berarti kegagalan rentjana intervensi terhadap Republik Irak yang baru lahir pada waktu itu, kegagalan agresinja diselat Taiwan, kegagalan intervensinja di Tibet, adalah tanda<sup>2</sup> djelas yang menundjukkan merosotnja kedudukan dan kekuatan kaum imperialis. Perlu djuga disebut ketidakmampuannja mengatasi setjara damai krisis yang kini sedang menimpa lagi ekonomi AS. Seluruh dunia termasuk Rakjat Indonesia sudah tjukup mengenal sifat agresif, intervensionis dan penindas, dan sifat lapuk dan mundur kalau dilawan dari imperialis Amerika Serikat.

Rakjat di Amerika Latin menjatakan perasaan tidak senangnya dengan memberikan sambutan yang mentjemoohkan dan menolak terhadap kunjungan John Foster Dulles dan Wakil Presiden Nixon pada tahun 1958 yang lalu. Makin terdesak kaum imperialis, makin nekad dan biadab pula tindakan<sup>2</sup>nja sehingga makin dibentji dan dimusuhi oleh Rakjat sedunia. Achirnja dalam keadaan mereka sudah tidak bisa lagi mengatasi kesulitan<sup>2</sup>nja dengan tjara<sup>2</sup> yang biasa dilakukannja, maka dalam usahanja untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnja, mereka tak segan<sup>2</sup> untuk menggunakan tjara<sup>2</sup> kudeta fasis dan junta-militer untuk membentuk pemerintah boneka seperti misalnja sekarang di Korea Selatan, di Vietnam Selatan, di Pakistan, di Muangthai dan dibeberapa negeri lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tetapi djalan pemerintah boneka tidak selalu djalan yang aman bagi imperialis seperti ternjata dari penggulingan kekuasaan Nuri es Said oleh Revolusi Irak. (Tepuktangan lama).

Kaum imperialis AS adalah musuh nomor satu dari seluruh bangsa-bangsa didunia. „Deklarasi“ 12 Partai Komunis dan Partai Buruh tersebut tentang ini menjatakan bahwa „Dengan politik mereka golongan<sup>2</sup> agresif tertentu di Amerika Serikat berusaha keras untuk menghimpun disekitar mereka semua kekuatan reaksioner

dari dunia kapitalis. Dengan bertindak begini mereka menjadi pusat reaksi dunia, menjadi musuh bebujutan Rakjat" (halaman 12). Melawan imperialisme AS dalam situasi dunia sekarang merupakan bagian yang takterpisahkan daripada perjuangan untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian abadi (Tepuktangan).

## (2) Situasi Ekonomi Dunia Kapitalis Sekarang

Kawan<sup>2</sup>!

Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis sekarang berarti berbitjara tentang krisis „kelebihan produksi“ („overproduksi“), tentang pengangguran, tentang kontradiksi<sup>2</sup> sosial yang makin sukar dapat diatasi. Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis sekarang berarti berbitjara tentang ekonomi Amerika yang sekarang dengan sekuat tenaga berusaha untuk menguasai seluruh ekonomi dunia kapitalis, dan juga berarti berbitjara tentang semakin tajamnya persaingan diantara negeri<sup>2</sup> kapitalis itu sendiri. Berbitjara tentang ekonomi dunia kapitalis dewasa ini tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan situasi ekonomi dunia Sosialis yang sedang berkembang dengan megahnja.

Kontradiksi<sup>2</sup> didalam masyarakat kapitalis berpokok pada keinginan kaum kapitalis untuk memperbesar produksinya dan dengan demikian memperbesar keuntungan-nya setjara tidak terbatas, halmana berlawanan dengan kemampuan dajabeli yang terbatas dari pasaran dalamnegeri. Kontradiksi<sup>2</sup> ini sudah berkali-kali menimbulkan krisis di AS sedjak berakhirnya Perang Dunia II dan akibatnya sudah pula dirasakan oleh negeri<sup>2</sup> kapitalis di Eropa Barat. Kontradiksi-kontradiksi ini bertambah dengan makin sempitnya dunia kapitalis karena meluasnya dunia ekonomi Sosialis dan karena kemadjuan negeri<sup>2</sup> non-Sosialis yang baru merdeka dan mulai membangun ekonominya yang berindustri. Dengan demikian kesulitan<sup>2</sup> dalam bentuk krisis ekonomi yang makin mendalam makin sering menimpa dunia kapitalis. Persaingan diantara negeri<sup>2</sup> kapitalis untuk menguasai pasaran kapitalis semakin menghebat seperti terlihat dari pertarungan sengit yang sedang terjadi disekitar masalah Pasaran Bersama Eropa diantara 6 negara Eropa Barat (Djerman Barat, Perantjis, Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg) dan konsepsi Inggris tentang Daerah Dagang Bebas yang meliputi 17 negeri anggota Organisasi Kerdjasama Ekonomi Eropa. Pasaran Bersama Eropa maupun Daerah Dagang Bebas, walaupun ada pertentangan-pertentangan diantarnya, ke-dua<sup>2</sup>nya memusuhi gerakan kemerdekaan nasional dan merintang<sup>2</sup> usaha peredaran ketegangan

internasional, karena ke-dua<sup>2</sup>nja tetap bertudjuan memonopoli pembelian bahan<sup>2</sup> mentah dengan harga yang se-murah<sup>2</sup>nja dan mempertahankan adanja blok<sup>2</sup> militer.

Dalam beberapa kali krisis ekonomi yang dialami oleh ekonomi AS sesudah Perang Dunia II, nilai produksinja turun dengan 10% dalam krisis di-tahun<sup>2</sup> 1948/1949, dengan 11% dalam krisis di-tahun<sup>2</sup> 1953/1954, dan dengan 14% dalam krisis di-tahun<sup>2</sup> 1957/1958. Satu kechususan dari krisis yang sekarang ini ialah bahwa berbeda dengan di-tahun<sup>2</sup> 1948/1949 dan 1953/1954, maka selama krisis di-tahun<sup>2</sup> 1957/1958 semua negara kapitalis, tanpa perke-tjuaian, seluruhnja terkena dan menderita. Dalam enam bulan pertama dari tahun 1958 kemunduran produksi dari seluruh dunia kapitalis berdjumlah sebesar 6% dibanding dengan masa yang sama ditahun 1957, sedangkan kemunduran dari nilai perdagangan dunia kapitalis adalah 8%.

Krisis di AS yang paling belakangan, yang dimulai dalam tahun 1957, dan yang kemudian disusul oleh krisis<sup>2</sup> di-negeri<sup>2</sup> kapitalis lainnja sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi di-negeri<sup>2</sup> yang kurang maju. Harian „*Financial Times*“ yang terbit di London mengatakan bahwa „salahsatu segi yang paling serius daripada resesi yang baru ini menghinggapi AS dan Eropa adalah pengaruhnja terhadap harga bahan<sup>2</sup> mentah dan oleh karenanja terhadap ekonomi di-negeri<sup>2</sup> yang menghasilkan bahan<sup>2</sup> mentah“. Harian itu menjelaskan bahwa angka<sup>2</sup> yang dikemukakan dalam „*World Economic Survey*“ tahun 1958 yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan bahwa „penghasilan ekspor dari negara<sup>2</sup> yang menghasilkan bahan<sup>2</sup> mentah telah turun dengan 7,8% dalam tahun 1958 jika dibandingkan dengan tahun 1957“. Dan jika diingat bahwa harga barang<sup>2</sup> industri yang dibeli oleh negeri<sup>2</sup> itu dari negeri<sup>2</sup> kapitalis terus meningkat selama krisis, maka dapat dibayangkan betapa hebatnja pukulan yang diderita oleh negeri<sup>2</sup> yang kurang maju sebagai akibat dari krisis ekonomi negeri<sup>2</sup> kapitalis itu.

Inggris dan umumnya negeri<sup>2</sup> kapitalis di Eropa selain menghadapi kontradiksi<sup>2</sup> sosial dalam masyarakat mereka sendiri, djuga menderita karena turunnja penghasilan dan dajabelu dari negeri<sup>2</sup> yang kurang maju, disebabkan karena krisis di AS yang mengurangi pembelian<sup>2</sup>nja di-negeri<sup>2</sup> ini. Akibatnja ialah kemerosotan ekspor Eropa ke-negeri<sup>2</sup> yang kurang maju, chususnja ekspor barang-barang modal. Produksi industri badja Inggris misalnja di-tahun 1958 turun dengan 17% jika dibandingkan dengan tahun 1957, dan dalam triwulan pertama tahun ini turun lagi dengan 15% jika dibandingkan dengan waktu yang sama tahun yang lalu.

Perbandingan angka rata<sup>2</sup> pengangguran penuh diberberapa negeri kapitalis dalam tahun 1957, 1958 dan 1959 lebih mendjelaskan keadaan, jaitu sbb. :

	1957	1958	1959
A.S.	2.936.000	4.700.000	4 700 000 (Djan.)
Kanada	274.000	450 000	750 000 (Djan )
Inggris	347 000	500 000	620 000 (Djan.)
Belgia	116.000	180 000	250 000 (Maret)
Djepang	530 000	600 000	(belum tersedia)

Di AS masalah pengangguran sangat menghawatirkan umum. Tentang pengangguran di AS ini madjalah *Economist* dari London (Djanuari 1959) mengatakan : „*Bahkan atas dasar perkiraan<sup>2</sup> yang paling optimis dari produksi total selama 1959 tidak ada harapan bahwa pengangguran akan turun dibawah 3,5 djuta selama seluruh tahun*“. Oleh umum sudah diakui bahwa ekonomi AS harus menjesuaikan diri dengan suatu „*pengangguran kronis yang permanen*“ (*“permanent chronic unemployment”*) sebesar kira<sup>2</sup> 5% dari seluruh tenagakerdja (sebelum 1957, 1958 angka tetap ini kira<sup>2</sup> 3% dari seluruh tenagakerdja). Djikalau menurut dahil ahli<sup>2</sup> ekonomi burdjuis pengangguran sedjumlah 2,5% dari seluruh tenagakerdja dianggap tidak ada pengangguran, maka golongan yang berkuasa di AS menganggap angka 2,5% itu terlalu ketjil dan merasa perlu diperbesar mendjadi 5%<sup>1</sup>. (*Tawa; seruan „Wah, wah!”*). Dengan kenyataan ini maka lenjaplah segala omongan tentang „masa kemakmuran“ bagi ekonomi AS. Dalam hubungan ini baik pula diperhatikan apa yang dikatakan oleh *“U.S. News and World Report”* (Februari 1959), jaitu bahwa dalam 10 tahun yang terachir ini (1948-1958) djumlah buruh dundustri AS hanja naik dengan 1%, sedangkan hasil<sup>2</sup>nja naik dengan 32%. Dalam sistim kapitalisme seperti AS sekarang, kenaikan mutu teknik dalam produksi seperti misalnja otomasi, ternjata tidak membawa kemakmuran bagi Rakyat seperti di-negeri<sup>2</sup> Sosialis, tetapi sebaliknya membawa pengangguran, kerugian<sup>2</sup> fisik dan materil dari kaum buruh serta ketegangan<sup>2</sup> sosial yang lebih genting. Hal ini dengan djelas dibuktikan oleh pemogokan 500.000 buruh badja AS pada minggu ke-3 bulan Djuli tahun ini yang telah melumpuhkan kira<sup>2</sup> 90% dari produksi badja AS.

Dengan dalih melawan inflasi, Pemerintah AS yang dikuasai oleh kaum monopolis besar sekarang sedang mempersiapkan diri untuk melawan setiap usaha kaum buruh untuk mentjapai perbaikan nasibnya. Dengan adanya pengangguran kronis, maka teranglah bahwa perjuangannya kaum buruh di AS untuk perbaikan nasib menjadi semakin sengit. Ahli<sup>2</sup> ekonomi di Barat suka membanggakan bahwa krisis, yang oleh mereka masih biasa disebut „resesi“, telah dapat diatasi. Tetapi kenyataannya ialah, bahwa kenaikan<sup>2</sup> dalam nilai produksi yang tertjapai sedjak bulan Mei 1955 belum dapat memulihkan produksi sampai pada tingkatan produksi tahun 1957 dan samasekali tidak membawa perbaikan dalam penghidupan Rakyat.

Dalam hubungan dengan krisis ekonomi dunia sekarang, yang mulai dalam tahun 1957, baik pula kiranya hal yang berikut diperhatikan :

*Pertama*, situasi ekspor AS, yang ditahun 1958 telah turun dengan 18% djika dibandingkan dengan tahun 1957 dan yang dewasa ini masih berada dalam tingkatan yang djauh dibawah situasi sebelum krisis. Berbitjara tentang ekspor AS majalah „Economist“ (Mei 1959) mengatakan bahwa „masih sadja belum kelihatan ada perbaikan disektor ini“.

*Kedua*, situasi investasi modal, yang telah turun dari angka rata-rata tahun berdjumlah US \$ 37.000 djuta ditahun 1957 menjadi US \$ 30.000 djuta ditahun 1958. Menurut perkiraan, tingkatan tahun 1957 baru akan dapat ditjapai lagi paling tjepat pada tahun 1960. Tetapi inipun belum lagi berarti perluasan kapasitas produksi dan kesempatan kerdja, karena sebagian besar dari investasi-investasi yang direntjanakan untuk tahun 1959 bukanlah untuk mendirikan pabrik<sup>2</sup> baru tetapi untuk mengganti dan memodernisasi mesin<sup>2</sup> yang sekarang sudah ada. Yang terakhir ini akan memperbesar lagi pengangguran seperti yang sudah dijelaskan dimuka.

*Ketiga*, kenaikan dalam produksi industri badja yang memainkan peranan penting dalam kenaikan produksi selama 5 bulan pertama tahun 1959 ternyata disebabkan oleh muslihat kaum monopolis AS untuk menimbun persediaan badja yang tjukup supaya bisa lebih mampu menghadapi aksi<sup>2</sup> mogok kaum buruh industri badja yang menuntut kenaikan upah. Pemogokan buruh industri badja yang sangat ditakuti oleh kaum monopolis AS sudah terdjadi seperti diterangkan diatas.

*Keempat*, mengenai sifat umum daripada krisis yang sekarang ini, perlu dikemukakan bahwa proses penarikan negeri<sup>2</sup> kapitalis kedalam krisis ini berdjalan relatif lambat dan menunjukkan pula ketidak-serentakan. Disaat krisis disatu atau dibeberapa negeri

kapitalis se-akan<sup>2</sup> telah berachir, di-negeri<sup>2</sup> lain sedang menghebat atau malahan baru mulai, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa krisis telah berachir. Dan pula, setiap adanya krisis disatu negeri kapitalis mempersukar negeri<sup>2</sup> kapitalis lainnja seperti terlihat dari kenyataan bahwa belumlah terdjadi perbaikan dalam ekspor AS ke-negeri<sup>2</sup> kapitalis lainnja.

Semuanja ini tjukup mendjelaskan bahwa sekarang ekonomi AS masih belum dapat mengatasi kesulitan<sup>2</sup> pokok jang dihadapinja dan bahwa kontradiksi<sup>2</sup> intern dalam masjarakat kapitalis itu sendiri akan makin tadjam, halmana berarti bahwa krisis sekarang diduga akan lebih tjepat disusul oleh krisis lain jang lebih dalam lagi.

#### Kawan<sup>2</sup> !

Dalam usahanja untuk mengatasi krisis<sup>2</sup> ekonomi jang dihadapinja itu, kaum monopolis mengambil djalan memperbesar pengeluaran-pengeluaran militer. Djalan memiliterisasi ekonomi negeri merupakan satu<sup>2</sup>nja djalan keluar jang masih terbuka bagi mereka. Inilah keterangannya mengapa negara<sup>2</sup> imperialis mendjalankan politik luarnegeri jang makin agresif terhadap negeri<sup>2</sup> lain.

Sedjarah ekonomi kapitalis telah membuktikan bahwa pengeluaran militer dari pemerintah memang merupakan satu<sup>2</sup>nja tindakan anti-krisis jang terpenting dan efektif. Madjalah "*U.S. News and World Report*" pernah menamakan angkatan perang sebagai „langganan Amerika jang paling besar“ ("*America's biggest customer*").

Depresi besar jang berlangsung selama 10 tahun (1930-1940), jaitu ketika angka pengangguran di AS tidak pernah turun dibawah 10 djuta, baru dapat diatasi hanja setelah AS mulai terlibat dalam persiapan<sup>2</sup> Perang Dunia II. Krisis ekonomi di-tahun<sup>2</sup> 1949-1950 baru dapat diatasi setelah kaum imperialis mulai mempersiapkan dan melakukan agresinja terhadap Korea. Dan krisis ekonomi di-tahun<sup>2</sup> 1953-1954 timbul setelah kaum imperialis terpaksa harus menghentikan perang kolonialnja terhadap Korea karena desakan Rakjat tjinta damai diseluruh dunia.

Ekonomi AS sesungguhnya tidak pernah selengkapnja dikembalikan mendjadi ekonomi damai sesudah berachirnja Perang Dunia II. Pengeluaran<sup>2</sup> jang dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan angkatan perang, jang rata<sup>2</sup> berdjumlah 60% dari pengeluaran, merupakan sumber pokok dan terpenting dari penghasilan kongsi<sup>2</sup> besar dan seluruh kegiatan ekonomi AS. Ia mewakili bagian jang menentukan dalam „pendapatan nasional“ AS dan merupakan sumber jang menentukan bagi kesempatan kerdja di AS. Industri perang AS memakai hampir separo dari seluruh investasi

industri partikelir dan merupakan sampai 39% dari total produksi industri berat AS. Senjata merupakan bahan ekspor Amerika yang terpenting, djuga dalam rangka „bantuan“ yang diberikannya kepada negeri<sup>2</sup> lain. Sekalipun tidak setingkat seperti selama Perang Dunia II, namun djelas merupakan kenyataan, bahwa ekonomi AS adalah ekonomi perang, dimana pengeluaran dan konsumsi militer merupakan unsur pokok yang paling menentukan.

Ini berarti bahwa AS dan kapitalisme dunia lebih tidak mungkin lagi mengatasi kekatjaan dalam sistim ekonominya sendiri. Satu<sup>2</sup>-nya yang dapat mereka tjoba ialah melalui djalan memperbesar pasaran bagi industri perangnya, yaitu dengan menjalankan politik luarnegeri yang menimbulkan peperangan<sup>2</sup> lokal yang baru. Tiap kali ekonomi imperialis mengalami krisis, maka tiap kali pula politik internasional menjadi lebih tegang dan masalah perang dan damai menjadi masalah dunia yang paling penting dan menonjol. Tetapi politik militerisasi ekonomi AS tidak lain hanya makin mempertadjam lagi kontradiksi<sup>2</sup> intern didalam tubuh sistim kapitalisme AS sendiri.

Djelaslah bahwa kepentingan imperialis adalah bertentangan dengan kepentingan hidup seluruh umatmanusia. Ketakutan terhadap kekuatan militer yang unggul dari negeri<sup>2</sup> Sosialis dan terhadap pendapat umum dunia yang kuat menentang perang menyebabkan kaum imperialis sampai sekarang tidak berani begitu saja nekad untuk membakar dunia dalam perang dunia yang baru.

*Politik kaum imperialis yang bersumber pada djalan buntu daripada sistim kapitalisme, sistim yang tidak mempunyai haridepan lagi, merupakan sumber dan biangkeladi utama dari semua ketegangan internasional dan telah berakibat mempertentangkan bangsa-bangsa tertentu satu sama lain.*

Politik ini harus dilawan dan dikalahkan demi keselamatan dan keamanan dunia, demi kemerdekaan dan kemadjuan bangsa<sup>2</sup>. Partai Komunis disemua negeri memelopori dan memimpin perlawanan terhadap perang, terhadap politik pembunuhan massal. Adalah satu kenyataan, apakah orang suka atau tidak suka mengakuinya, bahwa Partai Komunis dan Pemerintah Uni Sovjet memelopori perjuangannya melawan politik perang negara<sup>2</sup> imperialis yang dikepalai oleh AS. (*Tepuktangan lama*).

### (3) Kubu Sosialis Dan Pengaruh Internasionalja

Kawan<sup>2</sup> !

Tidak ada seorangpun dapat membantah bahwa sekarang Sosialisme sedang mengungguli kapitalisme dalam semua hal yang

berarti maju, berguna dan baik bagi Rakyat pekerja dan umat-manusia. Sekarang tidak lain dari Amerika Serikat sendiri, negara pimpinan daripada kapitalisme, yang sudah memikirkan bagaimana *mengedjar Uni Sovjet* dalam sedjumlah cabang penting daripada ilmu dan teknologi. Dalam produksi industri Uni Sovjet sudah lama melampaui negara<sup>2</sup> kapitalis yang terbesar di Eropa yaitu Inggris, Perancis dan Jerman Barat. Dalam laporannya kepada Kongres ke-21 (Luarbiasa) PKUS, yang dilangsungkan dari tanggal 27 Januari — 5 Februari 1959, Kawan Chrusjov<sup>1</sup> mengatakan, bahwa dalam waktu Rentjana Tudjuh Tahun ditambah dengan kira<sup>2</sup> 5 tahun, jadi dalam tahun 1970, atau mungkin juga sebelumnya „*Uni Sovjet akan menduduki tempat nomor satu di dunia, baik dalam volume produksi mutlak, maupun dalam produksi per kapita (tiap jiwa)*. Hal ini akan merupakan kemenangan Sosialisme yang bersedjarah-dunia dalam perlombaan damai dengan kapitalisme digelanggang internasional”. (*Tepuktangan lama*)

Tak dapat dibantah oleh siapapun, bahwa sputnik<sup>2</sup> dan planit buatan Sovjet adalah bukti yang paling menjolok dari kenyataan bahwa dibawah Sosialisme telah diwujudkan hasrat<sup>2</sup> yang paling berani dan berhasil daripada manusia. (*Tepuktangan*).

Kawan<sup>2</sup>!

Sekarang inipun produksi industri per kapita dari seluruh dunia Sosialis telah menjusul produksi industri per kapita dari seluruh dunia kapitalis. (*Tepuktangan*). Negeri<sup>2</sup> Sosialis yang didiami oleh sepertiga penduduk dunia sekarang sudah menghasilkan lebih dari sepertiga produksi industri dunia, hampir separoh dari produksi gandum dan 43% dari produksi kapas. Sesudah Rentjana Tudjuh Tahun Uni Sovjet terlaksana sepenuhnya, dan ditambah lagi dengan ketjepatan yang tinggi dari perkembangan ekonomi negeri<sup>2</sup> demokrasi Rakyat, maka dalam tahun 1965 sistem dunia Sosialis bukan hanya akan unggul dalam produksi per kapita, tetapi juga akan menghasilkan lebih dari separoh produksi industri dunia. (*Tepuktangan*). Sebagaimana sudah dikatakan diatas, dalam tahun 1970 atau sebelumnya Uni Sovjet akan menduduki tempat nomor satu di dunia, baik dalam volume produksi mutlak maupun dalam produksi per kapita. Ini berarti bahwa dalam tahun 1970 Uni Sovjet, sebagai pelopor daripada negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis, akan mampu menjamin tingkat penghidupan yang paling tinggi diseluruh dunia. (*Tepuktangan*). Ini nanti akan merupakan peristiwa dunia yang bersedjarah dalam perlombaan damai antara Sosialisme dengan kapitalisme digelanggang internasional, perlombaan yang setjara pasti akan dimenangkan oleh Sosialisme. (*Tepuktangan*).

Kongres ke-21 PKUS telah menetapkan tugas<sup>2</sup> pokok untuk me-

wujudkan segala syarat materiil dan teknik serta menjiapkan massa Rakyat politik dan ideologis untuk memasuki masa pembangunan Komunisme di Uni Sovjet.

Plan 7 Tahun URSS memang suatu tugas raksasa, sehingga pers burdjunpun seperti yang dinjatakan oleh madjalah Inggris "*Economist*" terpaksa mentjatat, bahwa rentjana itu menimbulkan "*kesan yang mengagumkan*". Pekerdjaan raksasa dari Rakyat Sovjet ini menundukkan bahwa sekarang Uni Sovjet sudah memasuki tingkat yang baru dalam perlombaan ekonomi dengan kapitalisme, suatu tingkat yang menundukkan bahwa Uni Sovjet sudah bisa "*mengadu tenaga*" dengan negeri kapitalis yang paling kuat seperti Amerika Serikat. Melebihi AS berarti melebihi angka<sup>2</sup> kapitalisme yang paling tinggi.

Sedjak sekarang sudah dapat dibayangkan bahwa keadaan dan imbanan kekuatan internasional akan berubah samasekali, apabila nanti Uni Sovjet sudah menjadi negeri industri nomor satu didunia dan seluruh negeri<sup>2</sup> Sosialis sudah menghasilkan lebih dari separoh produksi industri dunia. Sukses Sosialisme ini akan berarti diperkokohnya kekuatan tjinta damai diseluruh dunia. Walaupun kemenangan Sosialisme didunia belum tertjapai sepenuhnya, dan disebagian dunia masih ada kapitalisme, namun sudah terdapat tjukup syarat untuk menghilangkan peperangan dunia dari kehidupan manusia. Keunggulan kubu Sosialis dalam imbanan kekuatan internasional merupakan syarat objektif yang menentukan bagi tertjapainya kemenangan perdjuaan untuk memaksa kaum imperialis buat se-lama<sup>2</sup>nja meninggalkan perang sebagai tjara penyelesaian masalah<sup>2</sup> internasional.

Republik Rakyat Tiongkok, sekalipun masih menghadapi tugas dilapangan politik dan militer untuk membebaskan Taiwan, sekarang sedang melaksanakan tugas<sup>2</sup> pembangunan Sosialis dengan gaja madju melompat. Pembentukan Komune<sup>2</sup> Rakyat membuktikan sekali lagi daya kreasi yang tinggi dari Rakyat dan Partai Komunis Tiongkok dalam memperkuat Sosialisme dan dalam menudju ke Komunisme di Tiongkok. Setelah menyelesaikan Plan Lima Tahun Pertama dalam waktu 4 tahun, sekarang Rakyat Tiongkok sedang giat membangun untuk menjusul dan melampaui Inggris, negeri industri yang paling tua didunia, dalam waktu 15 tahun sedjak tahun 1957 dalam djumlah produksi besi dan badja serta hasil<sup>2</sup> industri lainnya yang terpenting. Melihat perkembangan produksi besi dan badja di Tiongkok sekarang, sangat mungkin bahwa rentjana ini akan tertjapai dalam waktu yang djauh kurang dari 15 tahun.

Kemadjuan<sup>2</sup> yang ditjapai RRT dalam tahun 1958 memang sa-

ngat mengagumkan. Nilai total produksi industri dalam tahun 1958 adalah 66% lebih tinggi daripada tahun 1957, dan produksi baja, besi, batubara dan hasil<sup>2</sup> industri lainnja menjadi dua kali lipat. Hasil mesin perkakas ("machine tools") naik 3,2 kali lipat dalam tahun itu. Dilapangan pertanian produksi kapas mentah ditahun 1958 naik lagi dengan 28% daripada tahun 1957, sehingga RRT sekarang menduduki tempat nomor satu didunia sebagai negeri penghasil kapas. Produksi gandum telah naik dengan 35% ditahun 1958, jaitu menjapai angka 250 djuta ton.

Suksesnja gerakan Komune Rakjat di RRT menandakan suatu tingkat baru dari pembangunan Sosialis di-desa<sup>2</sup> dan mempunyai arti internasional yang amat penting. Sedjak semula Komune Rakjat telah menarik perhatian seluruh dunia Terhadap organisasi sosial yang baru ini musuh<sup>2</sup> Rakjat ber-tiak- se-olah- Komune Rakjat menghanturkan kehidupan keluarga. Teriakan imperialis AS yang memfitnah RRT itu djuga diikuti oleh teriakan kaum reaksi di Indonesia sematjam Hatta, yang memang tidak bisa melihat sesuatu yang sungguh<sup>2</sup> baik untuk Rakjat. (Tawar, Komune<sup>2</sup> Rakjat yang makin berkembang di-desa<sup>2</sup> RRT sedjak pertengahan tahun 1958 telah „menggabungkan industri, pertanian, perdagangan, pendidikan dan urusan kemiliteran dan dimana administrasi pemerintahan dan urusan Komune telah dipersatupadukan" (Resolusi Tentang Beberapa Masalah Komune Rakjat, Sidang Pleno ke-VI CC ke-8 Partai Komunis Tiongkok, Desember 1958). Perkembangan Komune Rakjat merupakan bagian yang wajar dari kemajuan terusmenerus dan setjara melompati segala lapangan dalam produksi pertanian dan kesadaran politik dari 500 djuta petani Tiongkok yang kian hari kian meningkat. Semua ini mempercepat dan memperkokoh pembangunan Sosialis di RRT yang berarti sumbangan besar bagi kemenangan Sosialisme didunia. Ratusan djuta Rakjat Tiongkok yang sudah terkonsolidasi dalam Komune<sup>2</sup> Rakjat dan yang tidak se-mata<sup>2</sup> berketjimpung dalam urusan ekonomi, tetapi djuga terlatih dalam kebudayaan dan kemiliteran, terang merupakan kekuatan yang luarbiasa dalam perjuangan untuk membela perdamaian dan untuk mengalahkan imperialisme.

Lawan<sup>2</sup> Sosialisme tidak dapat membantah adanya kemajuan<sup>2</sup> luarbiasa yang telah ditjapai oleh Tiongkok Sosialis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa djalan yang diambil oleh RRT adalah djalan yang benar dan djaja dan yang wajar ditempuh pula oleh negeri<sup>2</sup> Asia lainnja, tentu sadja dengan mengingat kechususan<sup>2</sup> negeri<sup>2</sup> itu. (Tepuktangan).

Perkembangan Sosialisme dunia yang dipelopori oleh Uni Sovjet djuga ditandai oleh penyelesaian pembangunan Sosialisme dise-

djumlah negeri lain di Eropa dan Asia. Di Tjekoslowakia penghapusan manusia atas manusia pada dasarnya sudah dihapuskan. (*Tepuktangan*). Ditinjau dari sudut volume produksi industri, Tjekoslowakia sekarang merupakan salahsatu Republik yang terkemuka didunia. Di Bulgaria Sosialisme sudah menang di-kota<sup>2</sup> dan desa. Di Republik Demokrasi Djerman, Polandia, Rumania, Hongaria, Albania, Republik Rakjat Demokrasi Korea, Republik Demokrasi Vietnam dan Republik Rakjat Mongolia pembangunan Sosialisme maju dengan pesat.

Keunggulan ekonomi Sosialis djuga terbukti dari tingkat ketjepatan perkembangan yang lebih tinggi dibanding dengan negeri<sup>4</sup> kapitalis. Selama 40 tahun yang lalu, produksi industri di Uni Sovjet naik dengan rata<sup>2</sup> 10,1% tiap tahun, sedangkan untuk AS angka ini adalah 3,2%, untuk Inggris 1,9% dan untuk Perantjis 3,2%. Djika hanya tahun<sup>2</sup> damai saja yang diperhitungkan, perkembangan ekonomi Sovjet malahan ternyata lebih tjepat lagi. Selama 11 tahun sebelum perang (1930-1940) dan 11 tahun sesudah perang (1947-1957) kenaikan perkembangan produksi industri Sovjet rata<sup>2</sup> berdjumlah 16,2%, sedangkan AS 2,7%, Inggris 3,2% dan Perantjis 3,1%. Ditahun 1957 total produksi industri di Uni Sovjet berdjumlah 33 kali lipat lebih tinggi djika dibandingkan dengan tahun 1913. Untuk AS angka ini adalah 4,1 untuk Inggris 1,8 dan untuk Perantjis 2.

Kerdjasama dilapangan ekonomi antara negeri<sup>2</sup> Sosialis menjadi lebih sempurna dengan adanya Dewan Saling Bantu Ekonomi. Kerdjasama ekonomi ini terutama ditudjukan untuk memajukan sumber<sup>2</sup> bahan mentah dan tenaga listrik serta pada soal mempergunakan segala apa yang paling baru ditjapai dilapangan teknologi. Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan kordinasi yang lebih besar dan pada spesialisasi dilapangan permesinan yang akan memungkinkan pelaksanaan massa-produksi setjara besar<sup>2</sup>an serta modern dan yang akan sangat mengurangi biaya produksi. Dewan Saling Bantu Ekonomi ini merupakan pernajaan yang se-murni<sup>2</sup>.nja dari internasionalisme proletar. Ini adalah bentuk dan sistim kerdjasama internasional bagi masyarakat dunia diharidepan.

Berlainan dengan sistim pembagian kerdja seperti yang terdapat didunia kapitalis, dimana Indonesia djuga termasuk, dimana kemadjuan<sup>2</sup> yang tertjapai hanya terbatas pada beberapa negeri imperialis yang berkuasa saja, sedangkan negeri<sup>2</sup> lainnya tinggal terbelakang dan tidak mengalami kemadjuan, maka sistim pembagian kerdja internasional didunia Sosialis mendjamin adanya kemadjuan yang merata, tjepat dan saling menguntungkan bagi semua negeri pesertanja. Dalam waktu beberapa tahun saja, semua negeri So-

sialis, tanpa ketjuali, telah mentjapai kemadjuan<sup>2</sup> jang njata dan mengagumkan dalam membangun industri dan seluruh ekonominya.

Kemadjuan ekonomi jang merata dan tjepat dari semua negeri Sosialis mempunjai arti jang sangat penting bagi negeri<sup>2</sup> jang mependuduk dunia. Sampai<sup>2</sup> kepada tokoh<sup>2</sup> negara<sup>2</sup> non-Sosialis jang baru merdeka di Asia dan Afrika dalam berbagai bentuk pernyataan djuga menghendaki dan ber-tjita<sup>2</sup> Sosialisme. Kita mungkin tidak sependapat dengan tokoh<sup>2</sup> ini mengenai tjara<sup>2</sup> mentjapai Sosialisme dan maksud<sup>2</sup> jang terkandung dibelakang pernyataan itu, tetapi jang penting ialah bahwa mereka telah menjatakan apa jang menjadi hasrat Rakjat jaitu Sosialisme. Sesungguhnya meluapnja dan menangnja perdjuaan kemerdekaan bangsa<sup>2</sup> di Asia dan Afrika sesudah perang adalah merupakan satu bagian jang penting dan merupakan salahsatu bentuk peralihan dari proses runtuhnya kapitalisme dunia dan tumbuhnja Sosialisme (*Tepuktangan*).

Sosialisme sudah menjadi sistim dunia menjadi simbol dan perwakilan dari segala sesuatu jang baik dan maju serta menjadi daya penarik internasional dan harapan serta tudjuan hidup bagi be-ratus<sup>2</sup> djuta manusia jang masih meringkuk dan sengsara dibawah penghisapan dan penindasan kapital.

Sosialisme dalam diplomasi dan politik internasional merupakan pembela jang setia dan teguh dari kemerdekaan bangsa<sup>2</sup> dan perdamaian dunia, pengandjur dan pelaksana dari hidup berdampingan setjara damai dan bersahabat antara bangsa<sup>2</sup>, tjontoh daripada kemauan baik dan kesanggupan hidup dan kerdjasama setjara damai antara bangsa<sup>2</sup> dengan sistim sosial jang berlainan, pengandjur dari normalisasi perdagangan internasional tanpa diskriminasi dan tukar-menukar hasil ilmu dan kebudayaan setjara damai antara Timur dan Barat.

Sosialisme dilapangan ekonomi merupakan kesanggupan bekerdja setjara berentjana, mengindustrialisasi negeri setjara besar<sup>2</sup>an, penggunaan otomasi se-luas<sup>2</sup>nja, mekanisasi pertanian, dan kesanggupan membawa kemadjuan dan kemakmuran jang terus-menerus meningkat dalam kehidupan materil dan kulturil manusia. Keunggulan sistim Sosialisme atas kapitalisme ditjerminkan dilapangan kesedjahteraan Rakjat. Angka kematian di Uni Soviet adalah paling rendah didunia, sedangkan tambahnja penduduk lebih tinggi daripada kebanyakan negara kapitalis. Pada tahun terakhir daripada Plan 7 Tahun akan dilaksanakan setjara ber-angsur<sup>2</sup> 30 djam kerdja seminggu untuk kaum buruh jang bekerdja dibawah tanah dan dalam produksi dengan sjarat<sup>2</sup> kerdja jang merugikan kesehatan dan 35 djam kerdja seminggu bagi kaum buruh lainnja. Tudjuan lebih djauh ialah untuk melaksanakan minggu-

kerdja 5 hari dengan enam-tujuh djam kerdja sehari. Pengurangan jumlah hari kerdja seminggu bukan hanya tidak diikuti oleh pengurangan gaji, tetapi malahan diikuti oleh kenaikan gaji yang nyata. Pendeknya, dalam waktu yang tidak lama lagi di Uni soviets terbelakang, sebab kubu Sosialis semakin merupakan sumber dari barang<sup>2</sup> yang mereka perlukan bagi pembangunan ekonomi nasionalnya dan semakin sanggup membeli bahan<sup>2</sup> mentah yang mereka hasilkan. Dengan adanya kubu Sosialis yang terus maju, maka tertipta dan terdijaminlah kemungkinan untuk maju bagi negeri-negeri yang masih terbelakang. (*Tepuktangan*).

Kawan<sup>2</sup>!

Proses peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme yang berlangsung dalam abad kita sekarang ini tidak hanya telah melahirkan Sosialisme di-daerah<sup>2</sup> yang luas di-benua Eropa dan Asia, tetapi juga telah melahirkan kubu perdamaian yang sangat kuat dan melahirkan gerakan kemerdekaan nasional yang belum pernah ada taranya dalam sedjarah dunia.

Sebelum Perang Dunia II hanya ada satu negeri Sosialis disepert enam permukaan bumi, yaitu Uni Sovjet dengan penduduk kira-kira 170,4 djuta. Dalam tahun 1956 penduduk dunia ada 2.737 djuta (angka PBB). Sekarang ini hampir 1.000 djuta dari penduduk dunia hidup di-negeri<sup>2</sup> Sosialis, 700 djuta di-negeri<sup>2</sup> yang baru merdeka dan anti-imperialis seperti Indonesia, India, Irak, Birma, Mesir, dll. 600 djuta sedang berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya melawan imperialisme dan hanya 400 djuta tinggal di-negeri<sup>2</sup> imperialis seperti AS, Inggris, Perancis, Belgia, Italia, dsb. Tetapi dari yang 400 djuta itu sebagian yang terbesar ambil bagian dalam perjuangan revolusioner melawan imperialisme dan kapitalisme. (*Tepuktangan*).

Sebelum Perang Dunia II keanggotaan serikatburuh diseluruh dunia hanya 40 djuta, tetapi sekarang sudah 4 kali lipat yaitu 160 djuta. (*Tepuktangan*). Gerakan perdamaian yang juga berwatak anti-kolonial, terutama sesudah Konferensi Stockholm pada pertengahan tahun 1958, makin hari makin bertambah kuat dan meluas. Persekutuan kaum buruh dengan kaum tani, sebagai tulang-punggung daripada persatuan Rakyat, makin berkembang diseluruh dunia.

Sebagai tulangpunggung dan sebagai tenaga pimpinan daripada gerakan Rakyat progresif diseluruh dunia, sebelum Perang Dunia II Partai Komunis hanya terdapat di 43 negeri dengan keanggotaan 4,2 djuta. Sekarang Partai Komunis dan Partai Buruh (Komunis) sudah terdapat di 83 negeri dengan keanggotaan 8 kali lipat, yaitu 33 djuta, (*tepuktangan lama*) dimana 1,5 djuta terdapat di Indo-

nesia. (*Tepuktangan dan seruan : „Hidup !”*). Sebelum Perang Dunia II di Indonesia hanya terdapat beberapa ribu orang Komunis yang tidak terorganisasi sebagaimana mestinya.

Sosialisme sebagai ide sudah mengisi pikiran bagian terbesar Sovjet akan ada harikerja dan minggukerja yang paling singkat didunia bersamaan dengan perkembangan kesedjahteraan penduduk. Semuanya ini mungkin karena keunggulan Sosialisme dimana produksi yang makin meningkat tidak ditujukan untuk memperbesar keuntungan tuan<sup>2</sup> besar kapitalis, tetapi untuk pemenuhan maksimal kebutuhan<sup>2</sup> semua anggota masyarakat.

Keunggulan Sosialisme atas kapitalisme adalah juga dibuktikan oleh keunggulan dilapangan ilmu dan teknologi, dilapangan kebudayaan, moral dan kekuatan militer.

Segala komplotan kontra-revolusioner satu persatu telah dapat digagalkan dimana saja ia muntjul dinegeri Sosialis. Barisan Sosialis menjadi makin kokoh, pembangunan Sosialis makin lantjar dan martabat Sosialisme makin menaik.

Intisari dari pengalaman<sup>2</sup> Komunis yang paling berharga telah dirumuskan dalam „Deklarasi” dari 12 Partai Komunis dan Partai Buruh negeri<sup>2</sup> Sosialis dan „Manifest Perdamaian” dari 64 Partai Komunis dan Partai Buruh sebagai hasil dan kesimpulan dari Konferensi Moskow dibulan November 1957. Juga Partai kita adalah peserta aktif dalam Konferensi yang bersedjarah itu. Suksesnya Konferensi ini menandakan permulaan dari suatu tingkatan baru dalam gerakan Komunis sedunia.

Kedua dokumen tersebut memberikan analisa jelas tentang situasi dunia sekarang beserta perspektif yang terang tentang perkembangannya diharidepan. Kedua dokumen tersebut merupakan pedoman aksi dan program kerja yang demokratis bagi perjuangan kaum Komunis dan semua orang yang tjinta damai dan kemerdekaan.

Dalam hubungan ini, orang perlu diperingatkan akan usaha<sup>2</sup> yang hendak mengatjau dan memetjahbelah gerakan Komunis sedunia. Usaha ini adalah sangat berbahaya bagi Sosialisme dunia, bagi front internasional anti-kolonial dan tjinta damai. Yang perlu disebut disini adalah penjelewengan yang berupa revisionisme modern, yang sekarang menghinggapi klik Tito dalam pimpinan Liga Komunis Jugoslavia, (LKJ). Atasnama Sosialisme dan atasnama Komunisme, klik Tito menempatkan diri diluar kubu Sosialis dan diluar gerakan Komunis.

Dalam kata<sup>2</sup>, klik Tito ini juga menempatkan diri diluar kubu imperialis, tetapi dalam kenjataannya mereka samasekali tidak pernah setjara tegas menjalahkan apalagi mengutuk poitik pemerin-

tah AS yang agresif. Sebaliknya, bersama Turki dan Yunani mereka membikin Pakta Balkan yang menjalarkan mereka ke-NATO. Tidaklah mengherankan apabila kkk Tito dengan semangat balas-dendam (semangat revansis) tidak djemu<sup>2</sup>nja ber-ulang<sup>2</sup> menuduh dan memfitnah Uni Sovjet sebagai imperialis yang hendak meniadakan kemerdekaan Jugoslavia. Mereka menjatakan dirinja berdiri diluar „dua blok politik militer“. Dengan pernyataan ini mereka memfitnah se-olah<sup>2</sup> tudjuan politik luarnegeri Uni Sovjet sama dengan tudjuan politik luarnegeri yang agresif dari imperialis AS. Padahal, seseorang tidak perlu menjadi Komunis untuk mengerti perbedaan antara Sosialisme dan imperialisisme dan perbedaan politik luarnegeri dari masing<sup>2</sup> sistim ini.

Kkk Tito dari Liga Komunis Jugoslavia suka ber-teriak<sup>2</sup> seperti djuga kaum imperialis, tentang „imperialisisme Sovjet“ dan menuduh negara<sup>2</sup> Sosialis sebagai „satelit<sup>2</sup> Sovjet“. Tetapi tahukah mereka bahwa di Jugoslavia sekarang bisa berkuasa kembali radja<sup>2</sup> djika tidak ada kubu Sosialis yang dipelopori oleh Uni Sovjet, karena kaum imperialis lebih pertjaja kepada radja<sup>2</sup> daripada kepada pemimpin<sup>2</sup> LKJ ? Ketjuai kalau pemimpin<sup>2</sup> LKJ sudah tidak ada bedanja lagi dengan radja<sup>2</sup> ! Karena sekarang sudah ada kubu Sosialis yang dapat mengungguli dunia kapitalis dalam banyak hal, karena sudah ada front internasional anti-kolonial dan tjinta damai yang kuat, penguasaan imperialis setjara lama sudah tidak dimungkinkan lagi. (*Tepuktangan*).

Djelaslah bahwa kkk Tito sedang mendjalankan suatu politik yang pada hakekatnja sama dengan politik imperialis, yaitu memetjahbelah persatuan kaum Komunis sedunia. Dengan berbuat demikian mereka djuga mengharap akan dapat menarik pemimpin<sup>2</sup> burdjua nasional yang memerintah di-negeri<sup>2</sup> non-Sosialis yang baru merdeka di Asia dan Afrika yang mendjalankan politik luarnegeri untuk perdamaian dunia dan anti-kolonial. Dengan djalan ini kaum revisionis berharap akan dapat menarik mereka kedalam apa yang mereka namakan suatu „blok ketiga“ sebagai saluran dan aparatur untuk menjauhkan negara<sup>2</sup> non-Sosialis di Asia dan Afrika dari kubu Sosialis yang menjadi inti daripada front perdamaian dan anti-imperialis serta menjeret negara<sup>2</sup> tsb. keblok imperialis. Dengan demikian mereka bermaksud memetjah front internasional anti-kolonial dan tjinta damai yang sekarang sedang tumbuh diseluruh dunia.

Tetapi hasilnya bukanlah seperti yang diinginkan oleh kkk Tito. Kaum Komunis bukannya terpetjahbelah, tetapi malahan makin kokoh bersatupadu. Hanya dikalangan kaum nasionalis di-negeri<sup>2</sup> Arab, sampai batas<sup>2</sup> tertentu, Tito berhasil menimbulkan petjah-

belah. Hal ini sangat kita sesalkan, karena ini sedikit atau banyak dapat melemahkan front internasional anti-kolonial dan tjnta damai.

Dalam hubungan ini kita ingin menjebut kedudukan Presiden Nasser dari Mesir yang telah mengorbankan nama baiknja sebagai pedjuang anti-kolonial dengan mengikuti djedjak klik Tito mendjalankan politik anti-Komunis yang reaksiener dari kaum imperialis.

Padahal, kenjataannja sekarang jalah bahwa pemimpin<sup>1</sup> nasionalis di-negeri<sup>2</sup> Asia-Afrika yang baru merdeka dapat dengan lega dan bangga berkata, bahwa negeri mereka tidak akan mati<sup>3</sup> djika diboikot oleh AS dan negeri<sup>2</sup> imperialis lainnja, karena ada negeri<sup>2</sup> Sosialis yang setiap saat bersedia mengulurkan tangannja untuk membantu dengan tanpa sjarat. (*Tepuktangan*). Mungkinkah ada kebanggaan demikian djika tidak ada kubu Sosialis yang kuat? Djawabnja yang djudjur jalah: tidak mungkin! Djawaban yang lebih djudjur lagi jalah: djika tidak ada kubu Sosialis yang kuat yang dipelopori oleh Uni Sovjet, kaum imperialis masih akan meradjalesa di Asia-Afrika dan di-negeri<sup>2</sup> yang sekarang sudah merdeka masih bertachta gubernur<sup>2</sup> djenderal kulitputih dan radja<sup>2</sup> yang mesum dan korup. Adanja kubu Sosialis objektif menguntungkan dan membantu mempertjepat kemenangan perdjjuangan kemerdekaan nasional, tidak perduli apakah kebenaran ini diakui atau tidak. (*Tepuktangan*).

Adanja RRT telah mengubah wadjah dunia. Tetapi untuk Asia, adanja RRT mempunyai arti yang lebih penting lagi. Dengan adanja Republik Rakjat Tiongkok yang berpenduduk kira<sup>4</sup> 700 djuta ditambah lagi dengan penduduk Republik Rakjat Mongolia, Republik Rakjat Demokrasi Korea dan Republik Demokrasi Vietnam, berarti bahwa lebih separoh dari penduduk Asia sudah masuk kubu Sosialis dan merupakan benteng yang sangat kuat dalam perdjjuangan menghantjurkan sisa<sup>2</sup> kekuasaan imperialis di Asia. (*Tepuktangan*). Bajangkan betapa rupanja Asia sekarang djika Tiongkok masih dikuasai oleh Tjiang Kai-sek dan Amerika Serikat. Dan lihatlah sekarang sesudah Tiongkok mendjadi anggota kubu Sosialis yang kuat! Perdjjuangan kemerdekaan nasional negeri<sup>2</sup> Asia-Afrika mendjadi lebih dipermudah, kaum imperialis tidak berani lagi berbuat serampangan di Asia-Afrika, atau djika mereka berani berbuat serampangan mereka akan menanggung akibat<sup>2</sup>nja yang berarti kehantjuran mereka sendiri.

Adanja RRT telah memungkinkan lahirnja monumèn bersedjarah dalam diplomasi dan politik internasional, jaitu Lima Prinsip Tjou En-lai — Nehru, jaitu prinsip saling menghormati keutuhan

wilayah dan kedaulatan, non-agresi, tidak tjampurtangan dalam urusan dalamnegeri masing<sup>2</sup>, persamaan dan saling menguntungkan, serta hidup berdampingan setjara damai. Lima Prinsip Tjoun-Nehru ini sangat membantu dalam kita menindjau berbagai persoalan dan pertikaian internasional. Lima Prinsip ini merupakan sendjata didalam tangan Rakjat didunia untuk menilai kebijaksanaan politik luarnegeri pemerintahnja masing<sup>2</sup>, untuk mengawasi politik luarnegeri imperialis dan mengenal serta menilai politik luarnegeri Sosialis. Lima Prinsip tsb. adalah Lima Prinsip Keamanan dan Perdamaian Internasional. Ini adalah sumbangan Asia pada dunia diplomasi dan politik internasional, salahsatu pernjataan daripada hembusan angin Timur jang mengalahkan angin Barat. Ini adalah djuga pembenaran apa jang setjara profetis sudah dikatakan oleh Lenin dalam tahun 1913 tentang „*Eropa jang terbelakang dan Asia jang madju*“. (Tepuktangan).

Dengan demikian djelaslah, bahwa gerakan Komunis sedunia dan kubu Sosialis belum pernah begitu kuat dan begitu bersatu seperti sekarang ini, terutama setelah sukses<sup>2</sup> besar dalam pembangunan Sosialisme, chususnya berhubung dengan dimulainja pembangunan Komunisme di URSS dan gerakan Komune Rakjat jang djaja di RRT.

Kawan<sup>2</sup>!

Demikianlah kenjataan masjarakat dunia sekarang. Dua sistim sosial, kapitalisme dan Sosialisme, adalah sebagai kenjataan dan hidup berdampingan. Jang satu, kapitalisme, sistim jang sudah lapuk dan sedang dalam proses menudju keruntuhanja. Jang lain, Sosialisme, sistim dunia baru, jang mendapat simpati kaum pekerdja disemua negeri, sistim jang sedang berkembang dengan tjepatnja, jang mempunjai haridepan jang gemilang dengan kemungkinan-kemungkinan jang takterhingga. Memang hal ini tidak bisa terus berlangsung se-lama<sup>2</sup>nja dan harus disudahi sistim mana jang objektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kemandjuaan hidup umat-manusia. Soalnja jalah bagaimana tjara menjudahinja, dengan saling bermusuhan, saling mengisolasi dan berperang, atau dengan bersaing setjara damai.

Mengenai hal ini, kaum Komunis sudah lama menundjukkan djalan keluar jang paling demokratis dan paling menguntungkan bagi seluruh umatmanusia, jaitu djalan jang dikemukakan Lenin tentang prinsip hidup berdampingan antara negara<sup>2</sup> jang sistim sosialnja berlainan, prinsip ko-existensi setjara damai antara negara-negara kapitalis dan Sosialis. Sedjak tahun 1917 sedjarah sudah membuktikan bahwa sistim kapitalisme tidak mungkin bisa dipaksakan dengan djalan apapun, djuga tidak dengan djalan perang

kepada suatu masyarakat yang memang sudah tjukup sjarat<sup>2</sup>nja untuk Sosialisme.

Sosialisme sebagai sistim dunia yang baru adalah suatu kenja-taan. Adalah pula suatu kenyataan bahwa kapitalisme sebagai sis-tim dunia masih ada dan belum lenjap samasekali dari dunia. Tidak bisa lain, kapitalisme dan Sosialisme harus hidup berdampingan dan bersaing setjara damai, dan harus melakukan hubungan<sup>2</sup> yang normal dan damai antara satu sama lain dilapangan sosial, kebu-dajaan, ekonomi dan politik. Dalam laporannya kepada Kongres ke-21 PKUS, Kawan Chrusjov mengatakan bahwa „*rentjana yang disahkan oleh Kongres kita itu ditujukan untuk mendjamin hidup berdampingan setjara damai dan memperkuat ichtia untuk per-damaian diseluruh dunia*“ dan bahwa „*Program ekonomi dari pem-bangunan damai di URSS untuk djangka waktu 1959-1965 mem-berikan perspektif<sup>2</sup> yang luas untuk memperkembangkan perdagang-an Uni Sovjet dengan semua negeri*“ dan Uni Sovjet „*se-kurang<sup>2</sup>-nja bisa dua kali memperbesar perdagangan luainegeri*“.

Salahsatu pernyataan yang sangat penting daripada prinsip hidup berdampingan setjara damai adalah diadakannya hubungan dagang yang bebas, normal dan damai antara Barat dan Timur. Adalah satu kenyataan bahwa di-tahun<sup>2</sup> belakangan ini perdagangan antara negara<sup>2</sup> kapitalis sendiri pada umumnya menurun, sedangkan per-dagangan antara Barat dan Timur menaik sampai dua kali lipat, jaitu US \$ 6.000 djuta dalam tahun 1957 dan US \$ 3.000 djuta dalam tahun 1953. Pemimpin<sup>2</sup> Uni Sovjet sudah berulangkali me-majukan adjakan dan tawaran berdagang bebas kepada Barat, hal mana, djika diterima oleh Barat, akan merupakan saluran djalan keluar dan bantuan yang meringankan kesulitan<sup>2</sup> ekonomi yang se-dang dihadapi oleh Barat sekarang.

Pernyataan lain yang penting daripada prinsip ko-existensi se-tjara damai adalah pertukaran internasional antara wakil<sup>2</sup> peme-rintah dan wakil<sup>2</sup> Rakjat dari berbagai negeri. Dalam rangka ini adalah penting sekali disedari arti dan pengaruh yang sangat baik daripada kontak<sup>2</sup> pribadi dan pergaulan<sup>2</sup> setjara langsung dari para pemimpin negara<sup>2</sup> seperti yang misalnja dilakukan dengan kun-djungan Wakil<sup>2</sup> PM Anastas Mikojan dan kemudian Frol Kozlov ke AS, kundjungan PM Inggris MacMillan dan Wakil Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Uni Sovjet dan salingkundjung yang akan diadakan antara Nikita Chrusjov dan Dwight Eisenho-ver dalam tahun ini djuga. Tak dapat dilupakan betapa pentingnya arti pergaulan erat yang pernah terdjadi antara para Perdana Men-teri yang telah berhasil melahirkan Konferensi Asia-Afrika yang bersedjarah di Bandung dan demikian pula kontak<sup>2</sup> dan pertemuan<sup>2</sup>

langsung antara Presiden Sukarno dengan para pemimpin tertinggi dari negara<sup>2</sup> lain. Hal ini perlu diperluas lebih lanjut, terutama dengan kontak<sup>2</sup> dan pergaulan<sup>2</sup> langsung dari para sardjana, seniman, olahragawan, wartawan dan wakil organisasi<sup>2</sup> Rakjat Indonesia dengan para terkemuka negeri<sup>2</sup> lain.

Satu-satunya alternatif daripada ko-existensi setjara damai adalah djalan perang, djalan bentjana pembunuhan dan penghantjuran setjara massal. Sudah djelas bahwa djalan perang adalah djalan keneraka, djalan anti-kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan. Kaum Komunis akan terus berbuat se-gala-nja untuk mentjegah djangan sampai djalan perang bisa dipaksakan kepada dunia. Dalam „Deklarasi“ 12 Partai Komunis dan Partai Buruh ditegaskan bahwa „soal perang atau ko-existensi setjara damai sekarang menjadi soal yang menentukan dalam politik dunia“ (halaman 15). Satu-nja pilihan yang benar adalah djalan damai, djalan ko-existensi dan bersaing setjara damai antara sistim kapitalisme dan sistim Sosialisme!

Tidaklah mengherankan apabila umatmanusia makin meninggalkan kapitalisme dan makin mengerumuni Sosialisme. Inilah sesungguhnya yang menjadi hakekat pokok dari perkembangan dan pergolakan internasional sekarang.

#### (4) Situasi Politik Internasional

Keadaan masyarakat dunia seperti diuraikan diatas beserta persoalan-nja tertjermin djelas dalam persoalan<sup>2</sup> dan pertikaian<sup>2</sup> politik internasional, yang pada dasarnya terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran yang membela dan mempertahankan kapitalisme dan aliran yang membela dan memperjuangkan Sosialisme. Pertarungan antara kedua aliran ini meliputi seluruh dunia dan djuga terdapat di Indonesia dan di-negeri<sup>2</sup> non-Sosialis lainnya di Asia, Afrika dan di Amerika Latin.

Kedua aliran ini memang mentjerminkan proses objektif yang sedang terdjadi dimasyarakat dunia. Oleh karenanja, adalah suatu kepalsuan reaksioner untuk menjadikan situasi yang objektif ini sebagai hanja soal pertentangan kepentingan ekonomi dan politik antara Amerika Serikat dan URSS se-mata<sup>2</sup>.

Sedjarah perdjjuangan untuk Sosialisme sudah membuktikan dalam teori dan praktek bahwa yang ternjata terudji benar adalah Sosialisme ilmu seperti yang telah disimpulkan dan dirumuskan oleh K. Marx dan F. Engels dan dikembangkan lebih lanjut oleh W.I. Lenin dan pemimpin<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> Komunis lainnya.

Aliran politik yang membela dan memperjuangkan Sosialisme

tampil kemuka dengan tujuan yang dijudur dan diujatakan sejara terus-terang seperti yang tertjermin dalam politik Partai<sup>2</sup> Komunis dan diplomasi Sosialis. Aliran politik ini, yang mewakili proses sosial yang objektif dan benar, tidak memerlukan pempuan atau bersembunyi dibelakang sembojan<sup>2</sup> yang kosong dan palsu.

Tetapi sebahknja, aliran yang hendak membela dan mempertahankan kapitalisme terpaksa dan terbukti harus bersembunyi dibelakang sembojan<sup>2</sup> kosong dan palsu dan harus membontjeng kepada demagogi „sosialis“, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Nehru dari India. Ini tidak lain jalah karena tujuan orang<sup>2</sup> dari aliran ini berlawanan dengan proses objektif dan oleh karena itu sukar untuk mendapatkan pasaran dikalangan massa Rakyat. Hal ini djuga terlihat di Indonesia. Ada pembela<sup>2</sup> setia dari kapitalisme dan mati<sup>2</sup>an memusuhi Sosialisme tetapi dalam omongan se-hari<sup>2</sup> mereka berkedok dibelakang merk „sosialis“ dan „Marxis“. (Tawa). Berbagai variasi sembojan „sosialis“ dipergunakannja, misalnja oleh kaum sosialis kanan, tetapi pada hakekatnja kesemuanja itu hanjalah bentuk<sup>2</sup> konsepsi burjuasi yang sedang mentjoba untuk membela kepentingan klasnja yang memusuhi Sosialisme. Ini sekali lagi membuktikan apa yang sudah digambarkan oleh Lenin dalam tahun 1913 dengan perkataan: „*Dialektika sedjarah adalah demikian rupa sehingga kemenangan teoritis Marxisme memaksa musuhnja menjamar sebagai kaum Marxis*“ (Lenin dalam „*Nasib Sedjarah Adjaran Karl Marx*“).

Pertarungan antara kedua aliran ini dalam politik internasional mengambil berbagai bentuk dan mengakibatkan timbulnja berbagai persoalan yang menjangkut kepentingan umum seluruh dunia. Yang terpokok diantaranya adalah masalah perang dan damai, masalah perang dingin, masalah kolonialisme, masalah pangkalan militer dinegeri lain, masalah perdagangan bebas dan normal antara Timur dan Barat, masalah larangan digunakannja sendjata<sup>2</sup> nuklir, masalah dihentikannja pertjobaan<sup>2</sup> bom nuklir, masalah perlutjutan persendjataan, dan masalah<sup>2</sup> hangat lainnja seperti misalnja masalah remilitierisasi Djepang, masalah penjatuan kembal Vietnam dan Korea, masalah Berlin Barat, masalah perdjandjian perdamaian dengan Djerman, masalah pakt<sup>2</sup> militer agresif SEATO, NATO dll. Semua soal itu menjangkut kepentingan dan keamanan umum dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu Rakyat Indonesia tidak boleh bersikap pasif terhadap masalah<sup>2</sup> tersebut, tetapi harus menghadapinja dan mengambil bagian aktif dalam menjelesaikannja.

Diantara semua masalah hangat itu, masalah Berlin Barat dan Djerman adalah yang paling mendesak dewasa ini. Adalah memang tidak masuk akal bahwa setelah hampir 15 tahun perang dunia

berakhir Berlin Barat masih sadja diduduki oleh tentara asing dan perdjandjian perdamaian dengan Djerman belum lagi ditandatangani. Politik damai dan demokratis dari Uni Sovjet dan semua negeri Sosialis ditujukan untuk mengakhiri situasi yang pintjang di Eropa ini. Sebaliknya, negara<sup>2</sup> Barat hendak terus memelihara kepintjangan ini, karena dengan berbuat demikian mereka berharap dapat mempertahankan kekuasaannya di Eropa. Adenauer dan Pemerintah Djerman Barat yang mewakili kepentingan kaum imperialis Djerman, merupakan biangkeladi utama yang bersama dengan negara<sup>2</sup> Barat lainnya terus menunda-nunda penyelesaian masalah Berlin Barat dan masalah Djerman. Hal ini ditentang setjara luas oleh Rakyat Djerman sendiri. Imperialis Djerman yang dihidupkan kembali dengan bantuan kaum monopolis AS merupakan bahaya yang sangat mengganggu keamanan dan perdamaian di Eropa. Untuk menyelesaikan masalah<sup>2</sup> ini Uni Sovjet sudah sampai mengusulkan diadakannya Konferensi Tingkat Tertinggi dari Empat Besar. Pihak Barat bukannya kompak dalam menghadapi usul<sup>2</sup> Sovjet itu. Tiga Besar Barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, masing<sup>2</sup> berusaha untuk menjalankan politiknja sendiri-sendiri, sekalipun keluar nampaknja satu. Tetapi bagi dunia demokratis dan tjinta damai, termasuk Rakyat Indonesia, sudahlah sewadjarnja untuk menjokong politik diadakannya KTT, karena politik ini langsung memperkuat perdamaian. (*Tepuktangan*).

Kawan<sup>2</sup>!

Sedjalan dengan berlangsungnja dua proses didunia, yaitu proses kehantjuran kapitalisme dan proses kenaikan Sosialisme, maka dalam politik dan diplomasi internasional terdapat dua matjam kebidjaksanaan, dengan tudjuan, tjara<sup>2</sup> dan semangatnja sendiri<sup>2</sup>. Jang satu adalah politik luarnegeri imperialis yang membela dan mempertahankan penghisapan dan penindasan, kolonialisme dan perang. Jang lain politik luarnegeri negara<sup>2</sup> Sosialis yang berdjung untuk menghapuskan penghisapan, kolonialisme dan perang, dan untuk mentjiptakan masyarakat baru didunia yang adil dan makmur, damai dan madju.

Ber-turut<sup>2</sup> dan terusmenerus imperialisme melakukan intervensi dan agresi terhadap negeri<sup>2</sup> lain, dan ber-turut<sup>2</sup> dan terusmenerus pula negeri<sup>2</sup> Sosialis menentangnja dan membela hak dan kepentingan negara<sup>2</sup> korban intervensi dan agresi imperialis. Ber-turut<sup>2</sup> dan terusmenerus negeri<sup>2</sup> Sosialis mengambil inisiatif dan memajukan usul<sup>2</sup> damai dan demokratis serta memberi tjontoh untuk mengurangi ketegangan<sup>2</sup> internasional, tetapi ber-turut<sup>2</sup> dan terusmenerus pula Amerika Serikat dan negara<sup>2</sup> imperialis lainnya menolak dan menggagalkannya.

Dalam Kongres Nasional ke-V Partai kita telah mengkonstatasi perimbangan kekuatan internasional dan prospek perkembangannya menuju ke arah yang makin lebih menguntungkan bagi kemerdekaan nasional, perdamaian dan Sosialisme. Dalam periode sesudah itu perkembangan internasional benar<sup>2</sup> menunjukkan pergeseran kekiri, ke arah yang makin mementingkan dan merugikan kaum imperialis, terutama imperialis AS yang terus menerus nekad mempertahankan kolonialisme, terus menimbulkan ketegangan<sup>2</sup> baru, terus mengadakan subversi, intervensi dan agresi dan mengubah perang dingin menjadi perang panas. Sebagai akibatnya, belum pernah imperialisme Inggris-Perancis begitu terisolasi dan begitu dibentji Rakyat sedunia seperti di waktu mereka melancarkan agresi militernya terhadap Mesir. Juga belum pernah kaum imperialis AS-Inggris begitu terisolasi dan begitu dibentji Rakyat sedunia seperti di waktu mereka mendaratkan pasukannya di Libanon dan Jordania.

AS mendapat pukulan bukan main hebatnya dengan meletusnya revolusi di Irak pada tanggal 14 Juli 1958. Peristiwa ini menandakan adanya pasang baru dalam gerakan revolusi nasional sedunia. Revolusi Irak ini kemudian diikuti oleh proklamasi Republik Aljazair dan Guinea. Belum pernah AS begitu terpentil sendirian seperti ketika AS melakukan agresi terhadap RRT disekitar Selat Taiwan. Bandingkanlah keadaan ini dengan keadaan ketika pada tanggal 25 Juni 1950 AS melancarkan agresinya terhadap Korea yang berlangsung terus sampai tanggal 27 Juli 1953. Pada waktu itu AS masih dapat memaksakan kehendaknya pada banyak negeri di dunia, termasuk Indonesia, misalnja mengenai embargo terhadap RRT.

Pendapat umum sedunia makin mengenal betapa tidak sungguhnya AS dalam mengusahakan persetujuan internasional untuk menghentikan pertjoaan<sup>2</sup> senjata nuklir dengan segera, tanpa syarat dan untuk selamanya. Padahal Uni Sovjet sudah menunjukkan kemauan baiknja dengan menghentikan setjara sefihak mulai tanggal 31 Maret 1958 pertjoaan<sup>2</sup> senjata nuklir untuk waktu 6 bulan. Uni Sovjet terus menerus mengajak AS dan Inggris untuk mentjapai persetujuan internasional mengenai hal ini, meskipun jumlah pertjoaan bom nuklir yang sudah dilakukannya kurang daripada yang pernah dilakukan oleh AS maupun oleh Inggris. Tetapi usaha baik ini tidak berhasil, Amerika dan Inggris tetap mau meneruskan pertjoaan<sup>2</sup> senjata nuklir.

Kebangunan anti-kolonial dari bangsa<sup>2</sup> Asia dan bangsa<sup>2</sup> Arab terus meluas dan mentjapai kemandua<sup>2</sup> penting. Beberapa pengalaman dan pelajaran penting dapat disimpulkan dari perlawanan

sengit bangsa<sup>2</sup> Arab terhadap kaum imperialis. Jang terpenting di-antaranya adalah tersesatnya djalan Nasser dari Mesir. Pengalaman Mesir ini memberi pelajaran bahwa tidak mungkin politik luar-negeri jang maju dipertahankan, selama politik dalam negerinya anti-demokratis dan anti-Komunis. Pengalaman Mesir telah membuktikan bahwa politik anti-Komunis, politik mengekang dan menindas hak<sup>2</sup> demokratis dari Rakjat<sup>2</sup> Mesir dan Siria, adalah berlawanan dengan prinsip<sup>2</sup> anti-kolonial dan tjinta damai dari Putusan<sup>2</sup> Bandung, dan njatannya sedjalan dengan politik imperialis jang mempertahankan kekuasaan kolonialnya di-negeri<sup>2</sup> Arab, di Asia dan di-bagian<sup>2</sup> dunia lainnya. Politik anti-demokratis ini djuga didjalkan oleh kalangan jang berkuasa di India, khususnya jang merupakan tindakan membubarkan Pemerintah negara-bagian Kerala jang dipimpin oleh kaum Komunis, jang setia pada Konstitusi India dan jang telah bertindak menguntungkan Rakjat Kerala. Ini merupakan pelajaran praktis bagi Rakjat pekerdja sedunia, betapa gampangnja burdjuasi melemparkan UUD dan demokrasi djika kepentingan mereka terantjam, dan betapa burdjuasi tidak sukarela menerima djalan damai untuk perubahan sosial jang di-tempuh oleh proletariat.

Berbeda dengan Mesir adalah Irak, jang setelah kemenangan Revolusi 14 Djuli 1958 mendjalkan politik luar dan dalam negeri jang bersandar atas kepentingan dan kekuatan Rakjatnja, jang tidak anti-Komunis, jang anti-kolonial dan tjinta damai dan be-kerdjasama dengan kubu Sosialis menudju kekebangunan dan persatuan Arab. Djalan Mesir dan djalan Irak merupakan konfrontasi pilihan bagi dunia Arab. Tidak disangsikan lagi bahwa djalan Irak sekarang, djalan kerdjasama Nasional dan Komunis, adalah djalan Arab dan djalan kemerdekaan nasional jang sedjati. (*Tepuk-tangan*).

Dalam tahun<sup>2</sup> belakangan ini imperialisme makin terpukul lagi dengan makin meluapnja perdjjuangan anti-imperialisme dari Rak-jat<sup>2</sup> di Afrika dan di Amerika Latin. Konferensi se-Afrika di Accra, Ghana, jaitu Konferensi Pemerintah Negara<sup>2</sup> se-Afrika pada bulan April 1958 dan Konferensi Rakjat<sup>2</sup> se-Afrika, djuga di Accra, pada bulan Desember 1958, melandjutkan dan memperluas semangat anti-kolonial Bandung kebenua Afrika. Aksi<sup>2</sup> massa sesudah Accra sangat meluas ke Kongo, Nyasa, Rhodesia dan kehampir semua negeri di Afrika Barat, Tengah dan Selatan. Perlawanan bersen-djata tidak lagi hanja terbatas pada Aldjazair, tetapi sudah me-luas kedaerah Kamerun, Uganda dan Afrika Tengah. Djuga di Amerika Latin aksi<sup>2</sup> massa demokratis makin meluas dan mentja-pai kemenangan<sup>2</sup>. Negeri<sup>2</sup> seperti Argentina, Venezuela, Brazilia,

Chili dll., menjadi daerah<sup>2</sup> yang tidak aman lagi bagi kapital AS. Kemenangan Revolusi di Kuba merupakan sumber inspirasi yang penting bagi perjuangan pembebasan Rakyat diseluruh Amerika Latin. (*Tepuktangan lama*).

Kemenangan mutlak „Partai Aksi Rakyat” dalam pemilihan umum di Singapura pada awal tahun ini merupakan demonstrasi penolakan Rakyat terhadap pendudukan Inggris dipulau ini, dan sekaligus menelanjangi kebangkrutan politik pro-Inggris Tengku Abdul Rachman dari Malaja. (*Tepuktangan*).

Pukulan<sup>2</sup> dan kekalahan<sup>2</sup> ber-tubi<sup>2</sup> yang diderita oleh imperialisme dunia mengharuskan Rakyat untuk makin mempertinggi kewaspadaannya. Imperialisme tidak akan mau menyerah setiara sukarela tetapi harus dipaksa untuk menyerah oleh kekuatan aksi massa proletariat dan massa Rakyat lainnya sedunia. Tiap usaha imperialis untuk menjeret dunia kedalam api peperangan dunia baru ber-sama<sup>2</sup> dengan kehantjuran mereka harus dilawan.

Meluapnya kebangkitan anti-kolonial ini yang sekarang meliputi seluruh daerah Asia, Afrika dan Amerika Latin sangat berpengaruh didalam mengubahimbangan kekuatan internasional yang menguntungkan kemerdekaan, demokrasi, Sosialisme dan perdamaian.

Dalam hubungan ini harus dijakini arti internasional yang amat penting dari gerakan dunia untuk menentang perang dan membela perdamaian abadi. „Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh menegaskan: „Partai<sup>2</sup> Komunis memandang perjuangan untuk perdamaian sebagai tugas mereka yang terutama. Mereka, ber-sama<sup>2</sup> dengan semua kekuatan yang tjinta damai, akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka mentjegah perang”. (halaman 17). (*Tepuktangan*).

Pengalaman Rakyat sendiri telah memberi pelajaran betapa benarnya kesimpulan yang telah diambil oleh Biro Perdamaian Dunia dalam sidangnja di Moskow pada tanggal 21-25 Februari 1959, jaitu bahwa musuh<sup>2</sup> perdamaian adalah pula musuh<sup>2</sup> kemerdekaan bangsa<sup>2</sup>, dan bahwa gerakan perdamaian dan gerakan anti-kolonial adalah satu dan tak bisa di-pisah<sup>2</sup>kan. Gerakan kemerdekaan nasional tanpa gerakan perdamaian tidak akan dapat mentjapai hasil sepenuhnya. Hal ini sesuai sekali dengan sembojan Rakyat Indonesia: „Kami tjinta perdamaian, karena kami tjinta kemerdekaan”. Tepat sekali apa yang sering dikatakan oleh Presiden Sukarno, bahwa tidak ada perdamaian selama masih ada kolonialisme. Oleh karena itu, gerakan perdamaian dunia yang sekarang sudah menjadi gerakan massa demokratis yang paling luas didunia, adalah gerakan untuk mentjegah peperangan dan anti-kolonial

Penghentian samasekali pertjobaan<sup>2</sup> sendjata nuklir dan pelarangan penggunaan sendjata<sup>2</sup> tersebut, pengachiran perang dingin, serta terdjaminnja kemerdekaan bagi semua bangsa adalah tuntutan<sup>2</sup> terpenting daripada gerakan perdamaian dunia.

Rakjat Indonesia telah memberikan sumbangannja kepada tertjapainja tjita<sup>2</sup> perdamaian didunia. Peranan Rakjat dan Pemerintah Indonesia dalam pembelaan hak Mesir ketika menghadapi agresi militer Inggris, Perantjis dan Israel, dan dalam mensukseskan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, adalah sumbangan<sup>2</sup> penting dan berharga. Pernyataan<sup>2</sup> dan pidato<sup>2</sup> yang bersemangat anti-imperialisme dan tjinta damai dari Presiden Sukarno di Washington, di Moskow, di Peking, di Ankara, di Pnompenh, di Hanoi dan pada kesempatan<sup>2</sup> lain mempunyai pengaruh yang baik dalam meluaskan dan membesarkan kekuatan<sup>2</sup> damai didunia. Pengakuan segera oleh Pemerintah Indonesia atas desakan Rakjat terhadap Republik Irak, Pemerintah Sementara Aljazair, Republik Ghana dan Guinea penting sekali artinja bagi perjuangangan anti-kolonial dan tjinta damai.

Pengalaman perjuangangan Rakjat telah pula membuktikan betapa benarnja kesimpulan Partai selama ini bahwa *kebangunan nasional dalam bentuk meluapnja gerakan dan aksi-aksi anti-kolonial dari bangsa<sup>2</sup> di Asia, Afrika dan Amerika Latin bukanlah merupakan suatu kekuatan yang tersendiri didunia atau merupakan kekuatan blok ketiga yang berdiri diantara kekuatan imperialis dan Sosialis, melainkan satu kekuatan bagian yang memang amat penting dari kebangunan seluruh umatmanusia, yang bersama kubu Sosialis menentang imperialisme menudju kekemerdekaan nasional semua bangsa, demokrasi, perdamaian dan Sosialisme. (Tepuktangan).*

Adalah suatu kenjataan, bahwa imbalanced kekuatan internasional yang menguntungkan bagi Sosialisme merupakan syarat objektif yang menentukan bagi berhasilnja perjuangangan mempertahankan perdamaian dunia dan mentjegah petjahnja perang dunia yang baru. Tentang ini Kawan Mikojan antara lain menjatakan, bahwa *„imbangan kekuatan baru itu dan prospek<sup>2</sup> selandjutnja dari perkembangan memberikan alasan untuk menjatakan pada Kongres ke-21 PKUS bahwa 'suatu kemungkinan yang njata tentang disingkirkannja perang dunia dari kehidupan masjarakat akan mendapat bentuk, malahan sebelum Sosialisme menang diseluruh dunia', dengan kapitalisme masih berlangsung dibeberapa bagian dunia'. Ini akan merupakan sumbangan Sosialisme yang takternilai pada sedjarah manusia, perwujudan harapan<sup>2</sup> serta hasrat<sup>2</sup> yang paling dikandung semua Rakjat".*

Partai kita telah mengkonstatasi adanya front internasional anti-kolonial dan tjinta damai. Partai telah menyimpulkan bahwa Indonesia sudah semestinya menempatkan diri sebagai partisipan yang aktif dalam front ini, sesuai dengan jiwa dan tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ber-tjita<sup>2</sup> masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan masyarakat dunia yang aman dan damai. Partai selalu berusaha untuk mendorong Pemerintah Indonesia supaya bertindak dan menjalankan kebidaksanaan politik luar-negeri kearah ini.

Bagi kaum Komunis pekerdjaan dalam gerakan perdamaian dunia bukanlah suatu musuh atau sikap pura<sup>2</sup> sebagaimana yang selalu difitnahkan oleh kaum imperialis dan kakitangan-nja, tetapi adalah merupakan tugas perjuangan yang serius dan sungguh<sup>2</sup> harus dilakukan dengan sepenuh-hati.

Seluruh kekuatan Rakjat anti-kolonial kekuatan pedjuang<sup>2</sup> perdamaian dan kekuatan Sosialis merupakan suatu front internasional yang luas dan meliputi semua negeri, menghadapi satu musuh, jaitu imperalisme dunia yang dikepalai oleh Amerika Serikat. Front internasional ini, yang disukai atau tidak berintikan kubu Sosialis, harus terusmenerus diperkuat, diperluas dan dikonsolidasi untuk keselamatan umatmanusia, untuk keamanan internasional dan untuk kemandjuaan umatmanusia diseluruh dunia.

#### **(5) Soalnja Bukan „Memilih Blok”, Tetapi Mendjalankan Politik Luarnegeri Jang Menguntungkan Rakjat Indonesia**

Sedjarah Republik Indonesia sendiri tjukup membuktikan bahwa kerdjasama dengan Uni Sovjet dan negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis lainnja dalam front internasional untuk perdamaian dan anti-kolonial memberikan djaminan bagi keselamatan, kemandjuaan dan haridepan yang lebih baik bagi Rakjat Republik Indonesia. Ini bukan „memilih blok” tetapi ini hanjalah soal mengakui suatu kenyataan se-mata<sup>2</sup>. Seribu kali orang bisa mengatakan „Indonesia tidak memilih salahsatu blok” tetapi njatanja jalah, bahwa tiap kebidaksanaan yang memusuhi Uni Sovjet dan kubu Sosialis sudah terbukti menguntungkan imperalisme, dan ini adalah bertentangan dengan kepentingan Indonesia dan pasti menemui kegagalan. Sebaliknja, tiap tindakan yang bersahabat dan kerdjasama dengan Uni Sovjet dan negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis lainnja adalah sesuai dan sedjalan dengan kepentingan Indonesia dan pasti berhasil. Seorang kepalabatu anti-Komunis seperti Dr. Hatta (*tawa*) terpaksa mengakui kebenaran ini dan mengatakan pada pertengahan tahun 1948, bahwa „benar djuga bahwa Sovjet Rusia membela kemere-

dekaan negeri<sup>1</sup> yang terdjadjah, berdasarkan kepada ideologinja sendiri" (Hatta dalam *„Mendajung Diantara Dua Karang“*).

Hanja dengan meluaskan kerdjasama dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis, politik luarnegeri yang bebas dan aktif menudju perdamaian dan anti-kolonial bisa diletakkan diatas sendi<sup>2</sup> dan dalam proporsi yang sebenarnya. Hanja dengan demikian, politik ini tidak akan salah tumbuh mendjadi suatu politik netral yang bantji dan tidak berani memihak dalam menghadapi berbagai masalah internasional, atau tumbuh mendjadi suatu politik „tidak pilih kasih antara kedua blok" yang berarti bersikap dan memberikan perlakuan yang sama baiknya kepada imperialisme seperti kepada Sosialisme. Disinilah tepatnya apa yang berulang kali dikatakan oleh Presiden Sukarno, bahwa dalam masalah perang dan damai, dalam masalah imperialisme dan kemerdekaan, kita tidak netral tetapi tegas berpihak pada perdamaian dan kemerdekaan. Inilah politik luarnegeri yang sungguh<sup>2</sup> anti-kolonial dan tjnta damai, politik yang pasti akan mentjapai sukses dan akan membawa kemadjuan bagi Indonesia.

Apa sesungguhnya politik yang bebas dan aktif yang dianut oleh Pemerintah Indonesia?

Pada mulanja apa yang dinamakan politik bebas adalah tjiptaan Sutan Sjahrir (soska) yang menguasai politik luarnegeri Indonesia dalam tahun<sup>2</sup> pertama Revolusi Agustus, dan kemudian dilandjutkan oleh Dr. Hatta ketika ia memegang pemerintahan. Sementara kalangan ada yang hendak menondjolkkan seolah-olah Sutan Sjahrir adalah pembentuk politik luarnegeri Indonesia yang didjalankan sekarang.

Tetapi apakah sesungguhnya konsepsi politik luarnegeri Sjahrir? Dalam tulisannja *„Perdjuangan Kita“* yang ditulis dua bulan sesudah Republik Indonesia berdiri, antara lain dikatakannja bahwa *„Letak Indonesia didalam lingkungan daerah pengaruh kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika. Nasib Indonesia tergantung daripada nasib kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika“* (halaman 12). Alangkah malangnja Rakjat Indonesia, karena nasibnja digantungkan pada nasib kaum imperialis Inggris-Amerika!

Selanjutnja dikatakan oleh Sjahrir dalam tulisannja tersebut, bahwa dalam batas<sup>2</sup> pertentangan antara kepentingan politik AS dan politik Inggris, yang masing<sup>2</sup> dikatakannja ingin menggunakan kekuasaan Belanda di Indonesia, terletak *„kemungkinan untuk kita mendapatkan kedudukan yang baru yang tjotjok dengan hendak politik raksasa Pasifik ini“* (halaman 13). Dari konsepsinja itu Sjahrir mengakui, bahwa kemerdekaan yang mungkin kita dapat tidak lebih daripada *„kemerdekaan“* seperti yang terlihat pada negeri<sup>2</sup> lain yang berada dibawah pengaruh negara imperialis

besar, jaitu berupa kemerdekaan dalam nama sadja. Dijelaslah bahwa konsepsi politik luarnegeri Sjahrir hanya mengaku, suatu maximum objektif yang tidak lebih daripada suatu kemerdekaan boneka model Filipina, Malaja, Vietnam Selatan atau Korea Selatan.

Inipun hanya bisa didapat, kata Sjahrir, jika Pemerintah RI bisa „menghindarkan kekatjauan yang akan mengantjam keinginan dan kemungkinan modal luarnegeri“ sebab, demikian katanya selanjutnya, „jika dianggapnya benar<sup>2</sup> merugikan, ia (kaum kapitalis luarnegeri) akan mengerahkan sekalian tenaga untuk menentang kita, serta ia akan tidak ragu<sup>2</sup> menyebabkan intervensi militer untuk membela kepentingan modalnya“ (halaman 9). Katanya tidak perlu di-ragu<sup>2</sup>kan lagi, bahwa fikiran kapitulasi, ini pulalah yang menyebabkan tuan Hatta mengeluarkan Manifes Politik 1 November 1945 yang mendjamin akan dikembalikannya perusahaan<sup>2</sup> imperialis, termasuk perusahaan<sup>2</sup> Belanda.

Pendeknja, sudah sedjak semula Sjahrir memegang peranan penting dalam politik luarnegeri Indonesia, ia sudah menakutkan Rakjat Indonesia dan mengandjurkan supaya menyerah kepada imperialisme dan supaya jangan meruq<sup>2</sup>kan atau membikin marah kaum imperialis. Politik kapitulasi ini diseluti, dengan istilah „politik kekuatan ketiga“. Apa yang dapat diharapkan dari konsepsi politik seperti ini, selain daripada kapitulasi dan sekali lagi kapitulasi?

Djadi, jelaslah, bahwa politik bebas Sjahrir langsung bertentangan dengan politik luarnegeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian dan anti-kolonial yang dengan disokong oleh Rakjat dijalankan oleh Pemerintah<sup>2</sup> Indonesia sedjak Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama dan yang kedua sampai sekarang. Sjahrir bukan pembentuk politik luarnegeri Indonesia yang sekarang didukung oleh Rakjat Indonesia, sebaliknya, ia adalah lawannya.

Dalam kata<sup>2</sup> maupun dalam praktek politik luarnegeri Hatta tidak lebih daripada kelanjutan politik luarnegeri Sutan Sjahrir yang chianat itu. Dalam djawaban Dr. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri kepada Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam bulan September 1948 antara lain dikatakan, bahwa „berhubung dengan letak tanahair kita di-tengah<sup>2</sup> perhubungan internasional itu, yang masa sekarang masih dilingkungi oleh negara-negara besar kapitalis, adalah suatu politik yang bidjaksana bahwa kita tidak memperbesar lingkungan musuh kita“ (dalam „Mendajung Diantara Dua Karang“). Kata<sup>2</sup> ini diutjapkan oleh Hatta djustru pada saat semangat anti-imperialisme daripada Rakjat sedang me-luap<sup>2</sup>, dan ketika AS lewat „peranasehat<sup>2</sup>nja“

setjara langsung mentjampuri persoalan dalam negeri Republik Indonesia untuk mengadakan pengedjaran terhadap kaum Komunis. Oleh sebab itu mendjadi djelaslah bahwa dengan „politik bebas“-nja itu Hatta bermaksud agar Indonesia tidak memusuhi dan tidak menimbulkan amarah imperialis. Kelandjutannja jalah, karena kaum imperialis menghendaki supaya me-ngedjar<sup>2</sup> dan men-teror kaum Komunis, maka agar kaum imperialis tidak marah, didjalankanlah kehendak imperialis itu. Agar kaum imperialis tidak marah dan tidak memusuhi Indonesia maka ditimbulkanlah tragedi nasional Provokasi Madiun. Karena kaum imperialis menghendaki Indonesia menjerah pada Belanda, maka dilahirkanlah persetudju-an KMB yang chianat. Karena kaum imperialis menghendaki Indonesia sekah lagi me-ngedjar<sup>2</sup> kaum Komunis agar dengan „ten-teram dan aman“ bisa ditandatangani persetudjuan MSA yang akan mengangkat RI pada Amerika, maka agar kaum imperialis tidak marah, berdasarkan „politik bebas“ model Sjahrir-Hatta di-adakanlah Razzia Agustus oleh tuan Sukiman. Inilah praktek po-litik bebas Sjahrir dan Hatta yang didasarkan atas politik menjer-ah kepada imperialisme. Padahal siapakah musuh kemerdekaan Indonesia kalau bukan imperialisme? Bagaimana bisa mempertahankan kemerdekaan dengan tidak mengambil sikap menentang imperialisme? „Politik bebas“ mereka adalah politik bebas me-milih imperialisme!

Politik luarnegeri Sjahrir dan Hatta yang meremehkan kekuatan Rakjat Indonesia sendiri dan kekuatan anti-kolonial didunia dan jang sebaliknya menjerah pada intimidasi<sup>2</sup> dan kehendak<sup>2</sup> impe-rialisme achirnja tumbuh mendjadi politik komprador, jaitu politik tunduk pada imperialisme dan memusuhi perdjuaan kemerdekaan Rakjat Indonesia untuk membela dan menjempurnakan Re-publik Proklamasi. Memang ini adalah politik luarnegeri Sjahrir dan Hatta jang hanya menghendaki kemerdekaan sematjam Fili-pina, dimana pada hakekatnja bukan Rakjat Filipina jang ber-kuasa ditanahairnja. Atau seperti Malaja sekarang, dimana pe-merintah Malaja tidak lebih daripada perisai Inggris untuk meng-hantjurkan kekuatan Rakjat Malaja jang sedjati, jang dipelopori oleh Tentara Pembebasan Rakjat dan Partai Komunis Malaja. (*Tepuktangan lama*).

Bagaimana Irian Barat akan dapat dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan RI, djika sedjak semula sudah berpendirian tidak me-lawan imperialis? Tidaklah mengherankan apabila politik luar-negeri Sjahrir dan Hatta jang ternjata telah bangkrut dan men-tjelakakan Indonesia itu di-pudji<sup>2</sup> oleh kaum imperialis disatu fi-hak, sedangkan difihak lain ditentang oleh Rakjat Indonesia, se-

hingga sekarang sudah menjadi politik yang sudah tidak laku lagi.

Jang perlu diperhatikan ialah bahwa politik luar negeri Sjahrir-Hatta jang anti-nasional dan pro-imperialis itu dewasa ini belum lagi lenjap samasekali. Diantara para diplomat dan para penguasa dalam politik luar negeri Republik Indonesia masih terdapat cukup banyak oknum<sup>2</sup> jang dalam djalan fikirannya dan dalam praktek pekerdjaannya sesungguhnya masih berdjawa dan bersemangat konsepsi politik luar negeri Sjahrir-Hatta. Ini sangat menghambat perkembangan dan kemajuan RI sehingga oleh karenanya perlu segera dibersihkan oleh pemerintah mana saja yang ingin politik luar negerinya diabdikan kepada tita<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 dan perdamaian dunia.

Sesungguhnya tradisi politik luar negeri Republik Indonesia semendjak berdirinya adalah berdasar hubungan dan kerjasama persahabatan dengan Timur walaupun Sutan Sjahrir merintangi ini. Pembelaan pertama terhadap RI oleh wakil Ukraina Sovjet dalam PBB, D. Manuilsky, adalah salahsatu sendi penting jang telah diletakkan untuk menegaskan kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. Ini diperkuat lagi oleh berhasilnya perlawanan Rakjat terhadap politik pro-Barat Sjahrir dengan dijadikannya hubungan diplomatik pertama tingkat duta antara Republik Indonesia dengan Republik Tjekoslowakia dalam tahun 1947 dan kemudian hubungan konsuler dengan Uni Sovjet dalam bulan Mei tahun 1948. Negara<sup>2</sup> Sosialis adalah pembela<sup>2</sup> dan penjokong<sup>2</sup> setia jang sedjak tahun<sup>2</sup> pertama Revolusi sudah membela Republik Indonesia. Ini menguntungkan Indonesia. Djuga menguntungkan Indonesia, dan tidak mungkin diabaikan arti-pentingnya bantuan dan pengakuan negara<sup>2</sup> Asia-Afrika pada tahun<sup>2</sup> permulaan Revolusi. Semuanya ini adalah bukti, bahwa sahabat<sup>2</sup> tradisional RI dan sahabat<sup>2</sup> di-waktu<sup>2</sup> jang sukt adalah negara<sup>2</sup> Timur dan bukan negara<sup>2</sup> Barat. (*Tepuktangan*). Tidak ada satu hidungpun dapat membantah, bahwa pada saat<sup>2</sup> Indonesia dalam kesukaran negara<sup>2</sup> Barat selamanya berdiri difihak Belanda.

Dalam hubungan ini Rakjat Indonesia perlu menyatakan penghargaan dan rasa terimakasih jang se-besar<sup>2</sup>nja kepada proletariat Nederland beserta Partainya, jaitu Partai Komunis Nederland jang dari sedjak semula selalu melawan politik kolonial Pemerintah Nederland dan selalu membela kemerdekaan Indonesia dan hak Republik Indonesia atas Irian Barat. Djuga terimakasih Rakjat Indonesia perlu dinjatakan kepada proletariat dan Rakjat sedunia jang selamanya memihak Rakjat Indonesia dalam perdjjuangan sutjinja. (*Tepuktangan*).

Dalam perkembangannya lebih landjut, ternyata bahwa politik

bebas model Sjahrir-Hatta tidak bisa dipertahankan karena bertentangan dengan kepentingan Indonesia dan bertentangan dengan hasrat Rakyat Indonesia. Keadaan inilah yang menyebabkan adanya penyesuaian tertentu sehingga akhirnya dinamakan „politik luar-negeri yang bebas dan aktif menurut perdamaian“ dari Kabinet Wilopo, kabinet pertama yang disokong oleh PKI semendjak adanya persetudjuan KMB. Semendjak itu politik bebas Sjahrir dan Hatta mulai ditinggalkan, tetapi kesanggupan untuk menempatkan Indonesia tegas<sup>2</sup> dalam front internasional anti-kolonial dan tjuta damai belum tjukup pada Kabinet Wilopo. „Politik bebas“ berada dalam krisis dan terombang-ambing antara disatu pihak kenyataan bahwa kepentingan Republik Indonesia memang terletak dan terdjamin dalam kerdjasama dengan negara<sup>2</sup> kubu Sosialis sedangkan di pihak lain masih kuat ke-ragu<sup>2</sup>an dan ketakutan burdjuasi yang berkuasa untuk menentang dan melawan imperialis. Dalam keadaan demikian Partai menghadapi tugas penting untuk membantu dan mendorong burdjuasi nasional dan Pemerintah Indonesia supaya berani dan sanggup melawan politik perang imperialis, melawan kolonialisme dan berani serta sanggup bekerja sama yang dijudjur dengan negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis.

Salahsatu akibat dan puntjak dari politik anti-Komunis dan politik luar-negeri anti-Timur yang terbukti anti-Indonesia adalah yang dilakukan oleh kaum pemberontak bersendjata „PRRI-Permesta“ yang dilakukan dengan mendapat inspirasi atas perongkosan dan perintah AS. Keselamatan dan keutuhan Republik telah dapat tertolong oleh kebidjaksanaan Pemerintah Djuanda yang mau mengakui kenyataan<sup>2</sup> dan sampai batas<sup>2</sup> tertentu mau meninggalkan politik anti-Komunis dan politik luar-negeri yang anti-Timur. Sekarang kelanjutan keamanan dan kemajuan Republik sepenuhnya tergantung pada kesetiaan dan kesanggupan Pemerintah untuk meneruskan dan mengembangkan pekerjaan dalam arah yang benar ini.

Atas desakan kekuatan progresif, dasar politik luar-negeri Indonesia yang agak maju telah diletakkan, terutama oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo yang telah berhasil mendorong lahirnya Prinsip<sup>2</sup> dan Semangat Bandung yang bersedjarah. Politik luar-negeri ini dilandjutkan oleh Kabinet Djuanda dengan menundjukkan tanda<sup>2</sup> kesediaan untuk memperbesar kerdjasama ekonomi dan kebudayaan dengan negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis dan dengan menempuh politik „djalan lain“ mengenai Irian Barat. Umum mengetahui betapa politik „djalan lain“ mengenai Irian Barat ini mengakibatkan timbulnya kekuatan<sup>2</sup> baru dalam negeri dan menggontjangkan kedudukan klas yang berkuasa di Nederland.

Dengan politiknya yang tegas menentang pendaratan tentara AS di Pakan Baru pada awal tahun 1958, pemerintah Djuanda dengan dukungan Rakyat Indonesia telah berhasil menyelamatkan RI. Politik luarnegeri RI akan dapat lebih banyak menguntungkan Rakyat Indonesia, jika dilanjutkan dan dikembangkan kerdjasama yang lebih erat dengan Timur, hidup berdampingan setjara damai dengan semua negara dan teguh menentang intervensi asing. Tetapi bahwasanya hal ini masih sadja belum wadjar, terujata diantaranya dari sikap Pemerintah RI yang belum djuga mau mengadakan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Demokrasi Korea dan dengan Republik Demokrasi Djerman, padahal dengan Djerman Barat Indonesia sudah lama mengadakan hubungan diplomatik dan ekonomi yang sangat luas.

Adalah mendjadi tugas Partai untuk lebih mengembangkan lagi hasil<sup>2</sup> positif yang telah ditjapai oleh politik luarnegeri Indonesia. Yang per-tama<sup>2</sup> perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan yang kongkrit dan sungguh<sup>2</sup> dari Putusan<sup>2</sup> Bandung. Sangat disayangkan, bahwa dalam menghadapi persoalan<sup>2</sup> politik internasional yang sangat mendesak seperti misalnja usul mengadakan Konferensi Tingkat Tertinggi, usul untuk menghentikan pertjoabaan<sup>2</sup> sendjata nuklir, agresi militer AS terhadap Libanon dan agresi militer Inggris terhadap Jordania, agresi militer AS terhadap RRT disekitar Selat Taiwan, pengatjauan AS dan SEATO di Laos, Konferensi 4 Besar Menlu di Djeneva mengenai masalah Berlin Barat dan perdjandjian perdamaian dengan Djerman, dll. lagi, para anggota terkemuka dari kerdjasama Asia-Afrika, chususnya Lima Negara Kolombo tidak sampai bisa bersama membitjarakannya dan memberikan suara<sup>2</sup>nja, sedangkan Indonesia tidak menundjukkan inisiatifnja kearah ini.

Didalam lingkungan PBB kerdjasama kelompok A-A perlu dipererat dan lebih diaktifkan lagi, karena sjarat<sup>2</sup> objektif ada bagi kelompok ini untuk mengeluarkan suara dan sikapnja yang berpengaruh dibadan internasional ini. Kepada Rakyat Indonesia terlekat tugas untuk lebih mengaktifkan saluran<sup>2</sup>, baik resmi maupun organisasi<sup>2</sup> Rakyat, dan bentuk<sup>2</sup> kerdjasama Asia-Afrika sebagai pelaksanaan dan kelanjutan dari Putusan<sup>2</sup> Bandung.

Satu segi positif yang penting dari Putusan<sup>2</sup> Bandung adalah masalah hubungan tetangga baik atas dasar azas<sup>2</sup> memelihara perdamaian dan anti-kolonial. Untuk keselamatan dan keamanan RI sendiri, adalah penting sekali untuk mendjamin agar Indonesia dilingkungi oleh negara<sup>2</sup> tetangga yang bersahabat dan yang politik luarnegerinja sedjiwa dengan putusan<sup>2</sup> Konferensi A-A di Bandung. Untuk ini Pemerintah perlu mengadakan usaha<sup>2</sup> yang inten-

sif terhadap negara tetangga satu persatu. Usaha ini akan lebih berhasil apabila dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Rakjat. Bagi Indonesia, masalah politik tetangga baik adalah masalah yang kongkrit dan mendesak. *Haruslah menjadi kesadaran yang dalam bahwa Indonesia berada dibarisan terdepan dalam melawan SEATO yang berarti menghadapi tugas nasional dan internasional yang tidak enteng.* Pengalaman dengan pemberontakan DI-TII dan „PRRI-Permesta” jelas membuktikan kebenaran ini.

Sekarang Belanda menjalankan taktik bersekutu dengan SEATO melalui Australia untuk maksud mempertahankan kekuasaannya di Irian Barat. Ini berarti bahwa bagi Indonesia politik tetangga baik adalah sama dengan politik menghalaukan subversi dan intervensi, imperialis, sama dengan politik melawan dan menengalahkan SEATO. Adalah menjadi kepentingan Rakjat Indonesia untuk menjokong perjuangan Rakjat<sup>2</sup> Malaya, Laos, Kambodja dll., untuk menjegah negeri<sup>2</sup> ini masuk menjadi anggota SEATO, dan menjokong perjuangan Rakjat<sup>2</sup> Filipina, Muangthai, Pakistan dan Australia untuk dapat membebaskan negeri<sup>2</sup> mereka dari ikatan SEATO serta tekanan<sup>2</sup> AS. (*Tepuktangan*).

Rakjat Indonesia sudah seharusnya dengan teliti memperhatikan Djepang yang berada dibawah kekuasaan AS dan kaum monopolis Djepang sendiri. Golongan yang berkuasa di Djepang sampai sekarang masih belum menundukkan kesadaran untuk menjalankan suatu politik luarnegeri yang tjinta damai, demokratis dan bersahabat terhadap negeri<sup>2</sup> tetangga di Asia. Sikap pemerintah Djepang yang memusuhi RRT dan yang hendak meneruskan 'politik „saudara tua”-nja terhadap bangsa<sup>2</sup> di Asia Tenggara yang pernah didjadjahnja, menimbulkan antipati dan kegusaran yang besar di kalangan Rakjat<sup>2</sup> Asia. Sikap ini menundukkan bahwa imperialisme Djepang masih merupakan bahaya yang mengganggu perdamaian dan kemerdekaan negeri<sup>2</sup> Asia. Sikap ini adalah bertentangan dengan hasrat dan kepentingan Rakjat Djepang sendiri yang dengan gigih melawan kekuasaan pendudukan Amerika dan penindasan imperialisme Djepang dan yang pada waktu<sup>2</sup> belakangan ini menjapai kemandirian<sup>2</sup> penting. Dengan teguh dan setia Rakjat Djepang berdjung untuk persamaan dan persahabatan antara bangsa<sup>2</sup> Asia, untuk perdamaian kekal di Asia dan didunia. Ini mendapat simpati dan setiakawan sepenuhnya dari Rakjat Indonesia. Tetapi sebaliknya oknum<sup>2</sup> burdjuis tertentu di Indonesia harus lekas tahu diri, lekas meninggalkan sikap menjilat terhadap kaum monopolis yang berkuasa di Djepang dan supaja menjdjung kehormatan bangsa Indonesia yang merdeka. (*Tepuktangan*).

Adalah satu politik luarnegeri yang realis dan sesuai dengan

aspirasi<sup>2</sup> nasional Rakyat Indonesia djika Pemerintah Indonesia ber-sama<sup>2</sup> dengan kelompok A-A meneruskan perjuangannya dengan lebih teguh didalam PBB dan diforum internasional lainnya untuk memasukkan RRT dan Republik Rakyat Mongolia di PBB untuk menghapuskan perbedaan rasial di Afrika Selatan dan di-bagian<sup>2</sup> dunia lainnya, dan untuk memelihara keamanan internasional di Timur Tengah dan Timur D jauh dengan menuntut penarikan mandur semua tentara asing dari daerah<sup>2</sup> tersebut dan untuk pembentukan daerah perdamaian dan per-tama<sup>2</sup> daerah bebas atomi di Timur Tengah, Timur D jauh dan diseluruh Pasifik (*Tepuktangan*).

Mengenai perjuangan pembebasan Irian Barat politik luar-negeri mempunyai tugas yang tidak kecil. Adalah kewadiban Pemerintah Indonesia untuk meneruskan perjuangan Irian Barat di-dalam dan diluar PBB dan dengan lebih meyakinkan negara<sup>2</sup> di-dunia, terutama negara<sup>2</sup> di Asia, Afrika dan djuga negara<sup>2</sup> sahabat di Amerika Latin tentang adil dan benarnya tuntutan Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mungkin menyetujui sikap dan kebijak-sanaan yang tidak mau membawa masalah Irian Barat ke PBB, karena ini berarti tidak menggunakan semua djalan dan menutupi kedjahatan politik kolonial AS yang menolak tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan menjokong Belanda untuk terus bertjokol di-ilajah RI ini. Untuk perjuangan Irian Barat Pemerintah harus bertindak lebih bidjaksana dengan mengadakan konsultasi dan kerdjasama yang lebih erat dengan organisasi<sup>2</sup> Rakyat.

Dilapangan hubungan ekonomi luar negeri pada waktu<sup>2</sup> belakangan ini kelihatan kemadjuan<sup>2</sup>, terutama karena lebih banyaknya bantuan ekonomi dari negeri<sup>2</sup> Sosialis dan lebih banyaknya kese-diaan dari pihak Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dagang dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis.

Dilapangan kebudayaan dan kerdjasama ilmu dan teknik ter-dapat sedikit kemadjuan dengan dikirimkannya lebih banyak maha-siswa Indonesia untuk beladjar di-negeri<sup>2</sup> Sosialis, dengan dida-tangkannya ahli<sup>2</sup> dan guru<sup>2</sup> besar dari negeri<sup>2</sup> tersebut dsb.

Tetapi djika dibandingkan dengan politik luar negeri Pemerintah yang agak maju dalam melawan kolonialisme dan tjinta damai, luasnya kerdjasama dilapangan ekonomi, kebudayaan, ilmu dan teknik dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis masih belum seimbang, masih ter-lalu sedikit, masih berat ke Barat.

Menghadapi situasi politik internasional yang serba pelik seperti sekarang ini, terutama sekali perlu ada kedjernihan dan kedjelasan dalam pandangan dan pengertian politik luar negeri, bahwa yang mendjadi musuh dan penghalang utama dari keselamatan dan ke-utuhan Republik Indonesia adalah imperialisme dunia yang dike-

pala oleh AS. Karena adanya imperialismelah maka kedudukan dan kemerdekaan Indonesia menjadi terantjam terus-menerus. Tiap pikiran, tiap kemauan dan tiap tindakan yang tidak melawan imperialisme adalah merugikan Indonesia, adalah bertentangan dengan kepentingan nasional Rakyat Indonesia.

Adalah menjadi kebiasaan dan sifat dari politik imperialis untuk menggunakan tjara<sup>2</sup> intimidasi dan intervensi terhadap negeri<sup>2</sup> lain agar dapat menguasainya. Bagi Indonesia dan bangsa<sup>2</sup> yang hendak membela dan mempertahankan keselamatan dan keutuhan negerinya tidaklah ada sikap dan djalan lain ketjuai menghadapinya dan melawannya dengan sungguh<sup>2</sup>. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa *kekuatan imperialis bukannya tidak terbatas, bahwa imperialisme adalah matjan-kertas yang bukannya tidak terkalahkan*. Bukti sudah terlalu banyak bahwa *kaum imperialis mundur djika dilawan. (Tepuktangan)*.

Pemerintah selamanya akan berhasil dalam politik luar negerinya, djika Pemerintah dengan sadar menggunakan sistim konsultasi dengan organisasi<sup>2</sup> Rakyat untuk makin memperbaiki pekerdjanya dibidang politik internasional. Rakyat Indonesia dewasa ini sudah lebih dewasa dan tidak akan mungkin bisa ditinggalkan dalam hal<sup>2</sup> yang mengenai kepentingan negerinya. Sedjarah diplomasi menunjukkan bahwa massa Rakyat mempunyai pengaruh dan rol yang tidak kecil dalam menentukan arah dan kbidjaksanaan politik luar negeri. Zaman diplomasi rahasia, yang merahasiakan segala sesuatu terhadap Rakyat, sekarang sudah lalu dan sudah diganti dengan diplomasi terbuka, jaitu diplomasi bersama dan untuk Rakyat.

Dengan tak henti<sup>2</sup> dan tak djemu-djemunya PKI selalu dan terus akan membantu dan mendorong Pemerintah untuk menentang dan melawan intervensi imperialis di Indonesia dan dinegeri manapun djuga.

Partai harus selalu waspada dan selalu memimpin dan memobilisasi Rakyat untuk melawan intervensi imperialis terhadap Indonesia yang dilakukannya melalui politik pro-imperialis Masjumi-PSI, melalui gerombolan teroris DI-TII, melalui pemberontakan anti-Republik dari „PRRI-Permesta“ dan melalui beberapa petualang politik Indonesia yang atasnama sembojan „anti-Komunis“ ingin mendjual kemerdekaan Indonesia kepada imperialis AS dengan tudjuan memasukkan Indonesia kedalam pakt militer SEATO.

Sudah menjadi kenyataan sedjarah, bahwa politik anti-Komunis sama artinja dengan mengundang subversi dan intervensi imperialis dan ini berarti mentjiderai kepentingan nasional Rakyat In-

donesia. Rakjat harus senantiasa waspada terhadap berbagai matjam pandangan dan usaha jang pada dasarnya memusuhi Rakjat Indonesia, jang mula<sup>2</sup> hanya bermain mata, tapi kemudian bekerdjasama dengan imperialis dengan menjalankan konsepsi „politik berdamai“ dengan imperialis, „politik minta“ kepada imperialis. Ini adalah bentuk baru dari politik „kekuatan ketiga“ Sjahrir dan Hatta jang sudah bangkrut dan dikutuk Rakjat itu. Adalah bidjaksana apabila Pemerintah djuga waspada dan menjauhi politik sematjam ini, demi keselamatan Indonesia, demi kemadjuan Republik Indonesia.

Untuk pelaksanaan semua pekerdjaan tersebut diatas, Pemerintah perlu mempunyai aparatur jang dapat dipertjaja dan mampu, jang patriotik, demokratis dan ahli. Elemen<sup>2</sup> „PRRI-Permesta“ dan elemen<sup>2</sup> anti-Republik lainnya jang masih bersembunyi di-aparat<sup>2</sup> Kementerian Luarnegeri dan di Perwakilan<sup>2</sup> RI diluarnegeri harus dibersihkan. (*Tepuktangan lama*).

Kawan<sup>2</sup>!

Demikianlah kedudukan internasional Indonesia dan tugas<sup>2</sup> Partai dan Rakjat Indonesia dilapangan politik luarnegeri. Sedjalan dengan perkembangan kekuatan front persatuan nasional didalam-negeri, dan sesuai dengan semangat dan djiwa Revolusi Agustus 1945, maka djuga dibidang politik luarnegeri terdapat tjukup sjarat-sjarat jang memungkinkan tertjapainja persatuan antara semua golongan demokratis, dan antara Pemerintah dengan Rakjat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan nasional Indonesia dan untuk perdamaian di Asia dan didunia. (*Tepuktangan*).

### III

## MENERUSKAN PEMBANGUNAN PARTAI

### (1) Perkembangan Partai Antara Kongres Nasional ke-V Dan ke-VI

Kawan<sup>2</sup>!

Selama masa antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI, bersamaan dengan makin madjunja gerakan untuk kemerdekaan nasional jang penuh dan demokrasi dinegeri kita, Partai telah mengalami perubahan<sup>2</sup> jang besar, telah berkembang meluas keseluruh negeri sedangkan di beberapa pulau djuga sudah mulai mendalam dan berakar. Dilihat dari djumlah pengikutnja, Partai sekarang dengan pemilihnja jang lebih dari 8 djuta sudah merupakan Partai

terbesar dinegeri kita. (*Tepuktangan*). Kemajuan melompat daripada Partai tidak hanya dalam peningkatan jumlah anggota dan pengikut, tetapi juga dalam peningkatan kesedaran ideologi, politik dan organisasi.

Perbandingan antara anggota dan tjalonanggota Partai, yang seluruhnya sekarang berdjumlah lebih dari 1.500.000, adalah hampir sama. Djadi berbeda dengan ketika Kongres Nasional ke-V dimana anggota berdjumlah 49.042 dan tjalonanggota 116.164, artinya tjalonanggota merupakan kira<sup>2</sup> 70% daripada seluruh keanggotaan.

Djumlah anggota pada waktu sekarang seharusnya sudah djauh lebih banyak daripada jumlah tjalonanggota, tetapi karena adanya kelengahan sementara Komite dan karena keadaan di berbagai daerah yang dikatjau kaum pemberontak kontra-revolusioner, maka peningkatan tjalonanggota menjadi anggota tidak dapat dilakukan tepat pada waktunya. Masih banyak tjalonanggota yang sudah ber-tahun<sup>2</sup> lamanya mengerdjakan tugas<sup>2</sup> Partai dengan baik dan bersemangat, tetapi karena hal<sup>2</sup> tsb. mereka belum ditingkatkan menjadi anggota. Kelengahan ini telah menyebabkan perbandingan antara anggota dengan tjalonanggota tidak tjepat dapat diperbaiki. Lebih daripada itu, ketentuan dalam Konstitusi tidak berdjalan dengan baik dan hak tjalonanggota yang baik untuk menjadi anggota tepat pada waktunya sudah diabaikan oleh Komite<sup>2</sup> yang bersangkutan.

Dengan makin baiknya pekerjaan Partai dikalangan kaum tani, prosentase keanggotaan Partai dari kalangan ini sekarang sudah lebih besar djumlahnya. Kalau dalam Kongres yang lalu anggota yang berasal dari kaum tani kurang dari 50% dari seluruh keanggotaan, maka sekarang mayoritas anggota Partai adalah berasal dari kaum tani. (*Tepuktangan*). Djuga perbaikan pekerjaan Partai dikalangan intelektual dan wanita telah menyebabkan lebih banyak dari kalangan<sup>2</sup> ini yang masuk menjadi anggota atau bersimpati pada Partai. Dari elemen buruh djuga sudah bertambah banyak didalam Partai kita, tetapi prosentasenya tidak mengalami perubahan penting.

Ringkasnya, peluasan keanggotaan Partai telah mengalami lompatan<sup>2</sup> sbb. : Ketika Konferensi Nasional Partai pada *permulaan tahun 1952* tertjatat djumlah anggota dan tjalonanggota 7.910. Konferensi ini memutuskan meluaskan keanggotaan menjadi 100.000 dalam 6 bulan. Ketika *akhir tahun 1952* diperiksa hasil peluasan, maka tertjatat 126.671 anggota dan tjalonanggota. Pada waktu Kongres Nasional ke-V Partai, jaitu pada *bulan Maret 1954* tertjatat anggota dan tjalonanggota 165.206. Pada *pertengahan*

1959 sudah tertjatat lebih dari 1.500.000 anggota dan tialonanggota dimana terdapat kira<sup>2</sup> 250.000 atau 17% wanita. (*Tepuktangan*). Pada waktu Konferensi Nasional tahun 1952 anggota<sup>2</sup> dan organisasi<sup>2</sup> Partai baru tersebar di Djawa dan Sumatera dan tersebar<sup>2</sup>nya juga sangat tidak merata. Sesudah peluasan keanggotaan dalam tahun 1952, organisasi Partai mulai tersebar juga di Madura, Sulawesi, Kalimantan, Nusatenggara dan Maluku. Sekarang tersebar<sup>2</sup>nya organisasi Partai diseluruh negeri sudah lebih merata, sedangkan di Djawa dan Sumatera sudah lebih intensif daripada di-pulau<sup>2</sup> lain.

Penyebaran Partai setjara merata dan intensif lebih didorong lagi dengan dilaksanakannya *Plan 3 Tahun Pertama Mengenai Organisasi Dan Pendidikan* yang diputuskan oleh Sidang Pleno ke-IV CC dalam bulan Djuli 1956.

Sebagian besar anggota Partai kita telah mengalami penggemblengan dalam perjuang<sup>2</sup>an revolusioner. Sebagian dari anggota Partai yang masuk sebelum Konferensi Nasional tahun 1952 telah mengalami pukulan<sup>2</sup> yang berat dari kaum kolonialis Belanda diantaranya ada yang dipendjarakan sampai ber-tahun<sup>2</sup> atau dibuang ke Digul (Irian Barat), sebagian lagi mengalami perjuang<sup>2</sup>an berat melawan militerisme Djepang, dan sebagian besar telah ambil bagian aktif dalam Revolusi 1945-1948, dalam perang<sup>2</sup> gerilja melawan agresi Belanda, dalam melawan provokasi Madiun tahun 1948 dan Razzia Agustus Sukiman tahun 1951.

Mereka yang masuk Partai sesudah Konferensi Nasional 1952, djadi sesudah pembaruan dalam pimpinan sentral Partai, telah ambil bagian aktif dalam perlawanan terhadap pertjubaan<sup>2</sup> kudeta kontra-revolusioner yang mau memfasiskan sistim pemerintahan, terhadap berbagai kekedjamaan yang ditudjukan kepada kaum buruh dan kaum tani, terhadap gerombolan<sup>2</sup> teroris DI-TII, terhadap provokasi<sup>2</sup> yang dilantjarkan terhadap Partai, terhadap pensalahgunaan Undang<sup>2</sup> Keadaan Bahaja dan terhadap pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“. Yang terakhir ini terutama di Sumatera Barat, Riau Daratan, Tapanuli, Sulawesi Utara dan Tengah. Perlawanan<sup>2</sup> gagahberani dan pengorbanan besar yang sudah diberikan oleh anggota<sup>2</sup> Partai ini telah menggembelng seluruh barisan Partai kita, telah sangat meningkatkan martabat Partai kita dimata Rakjat, telah lebih mengeratkan hubungan Partai kita dengan massa Rakjat dan dengan alat<sup>2</sup> negara yang patriotik. Bersamaan dengan itu ia juga telah membadjakan persatuan didalam Partai, persatuan dikalangan pimpinan atasan, persatuan antara pimpinan atasan dengan bawahan dan persatuan antara pimpinan dengan massa anggota. (*Tepuktangan*).

Ketjintaan dan solidaritet antara sesama Komunis adalah semangat yang berkuasa didalam Partai kita, dan semangat ini pulalah yang telah memberi inspirasi kepada anggota<sup>2</sup> Partai untuk lebih sungguh<sup>2</sup> mengabdikan diri kepada kepentingan tanahair dan Rakyat pekerdja.

Apa sebabnja dapat didjalankan peluasan organisasi dan keanggotaan Partai, begitu tjepat ? Apa sebabnja PKI bisa mendjadi Partai massa yang besar ?

Sedjak Revolusi Agustus 1945 sampai sebelum terdjadinja teror putih dalam Peristiwa Madiun tahun 1948 pengaruh Partai adalah luas dan meliputi semua golongan. Pengaruh Partai tidak hanya dikalangan kaum buruh dan kaum tani, tetapi djuga dikalangan pemuda dan peladjar, dikalangan Angkatan Perang dari tamtama sampai perwira, dikalangan pegawai<sup>2</sup> negeri, dikalangan pengusaha-pengusaha nasional dan dikalangan pekerdja<sup>2</sup> kebudayaan. Akan tetapi simpati yang begitu besar terhadap Partai tidak diorganisasi dan dikonsolidasi setjara sistimatis. Partai tidak memberikan program perdjuaan yang tepat untuk mendjawab persoalan<sup>2</sup> yang dihadapi oleh Revolusi Indonesia dan massa Rakyat. Sebaliknya Partai melakukan kesalahan<sup>2</sup> dilapangan politik dan organisasi seperti yang sudah dibahas dalam resolusi *„Djalan Baru Untuk Republik Indonesia”*. Dalam politik front nasional Partai pada waktu itu lebih mementingkan kerdjasama dengan kaum sosialis kanan yang tidak mempunjai tradisi revolusioner dan tidak dikenal oleh Rakyat, daripada mementingkan kerdjasama dengan kaum nasionalis yang mempunjai tradisi revolusioner dan dikenal oleh Rakyat; selandjutnja pada waktu itu ada 3 Partai politik yang menamakan dirinja Partai Marxis-Leninis, jaitu Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia.

Mendjelang Peristiwa Madiun orang<sup>2</sup> Komunis yang agak baik terorganisasi dan terdidik dari 3 Partai Marxis-Leninis tsb. berdjumlah hanya kira<sup>2</sup> 10.000 orang. Sudah tentu dengan kaum Komunis yang hanya 10.000 orang, sedangkan penduduk Indonesia kira<sup>2</sup> 80.000.000 ketika itu dan tersebar diribu pulau besar dan ketjil, pekerdjaan revolusioner tak mungkin dapat terpinpin dengan baik. Ketika terdjadi teror putih Hatta akibat<sup>2</sup> dari kesalahan<sup>2</sup> politik dan organisasi tsb. diatas sangat terasa. Berdjuta<sup>2</sup> orang yang selama itu mengehlingi Partai, tetapi tidak diorganisasi dan tidak mendapat pendidikan politik dan teori revolusioner dari Partai, mendjadi takut dan malahan sebagian memihak kaum kontra-revolusioner; tetapi yang paling berat dirasakan ialah kekurangan pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani.

Pengalaman<sup>2</sup> pahit tsb. diatas telah mendorong Politbiro baru

jang dibentuk pada permulaan tahun 1951 untuk merombak Partai menjadi Partai massa jang luas, jang meliputi seluruh negeri dan mempunjai djumlah anggota jang besar. Tetapi untuk menjapai tujuan itu harus terlebih dulu diperbaiki kesalahan<sup>2</sup> fondamental dari Partai dilapangan politik dan organisasi. Maka dirumuskanlah garis politik front persatuan nasional jang konsekwen anti-imperialisme dan jang berbasiskan persekutuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh. Kerdjasama dengan kaum nasionalis diperbaiki. Dengan berpedoman pada resolusi „Djalan Baru“ organisasi Partai dibangun kembali. Untuk bisa menarik kaum tani menjadi sekutu klas buruh jang tersetia. Partai menyusun program agraria. Selain itu Partai senantiasa memperluas hubungannya dengan Rakjat diluar kaum buruh dan kaum tani, jaitu dengan massa burdjuis kecil, kaum intelektual, kaum pengusaha nasional dan golongan<sup>2</sup> penduduk lainnya. Mereka ber-angsur<sup>2</sup> memandang Partai kita sebagai satu<sup>2</sup>nja Partai jang djujur dan jang dapat setjara tepat menganalisa dan memetjahkan persoalan<sup>2</sup> nasional jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

Program Partai untuk menjapai kemerdekaan nasional dengan melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda, mengirim kembali „Misi Militer Belanda“ dan semua „penasehat“ Belanda serta membatalkan persetujuan KMB, menasionalisasi semua perusahaan<sup>2</sup> vital kepunjaan kaum pendjadjah Belanda, dan selandjutnja mempertahankan Irian Barat sebagai wylajah sah Republik Indonesia dimengerti dan disokong kuat oleh massa Rakjat. Demikian djuga politik Partai jang menuntut perlindungan bagi industri nasional terhadap persaingan barang<sup>2</sup> asing, jang menuntut persiapan sjarat<sup>2</sup> mengindustrialisasi negeri, perdjuaan Partai supaya ada kesempatan kerdja jang lebih luas dan perlakuan<sup>2</sup> istimewa terhadap para ahli Indonesia jang dengan sungguh<sup>2</sup> bekerdja untuk kemadjuan ilmu dan kebudajaan. Semuanya ini menarik lebih banyak massa Rakjat jang luas, termasuk kaum pengusaha dan kaum intelektual disekeliling Partai.

Bagi Rakjat Indonesia sudah merupakan kenyataan bahwa Partai kita tidak hanya bisa berpropaganda, akan tetapi djuga mampu menundjukkan djalan<sup>2</sup> pemetjahan jang tepat bagi persoalan<sup>2</sup> nasional dan persoalan<sup>2</sup> lain jang dihadapi oleh Rakjat Indonesia. Selandjutnja Partai djuga sudah menundjukkan kemampuannya mengambil dan mengembangkan sari<sup>2</sup> jang berharga jang bersifat nasional dan progresif dari sedjarah, kebudajaan dan tradisi<sup>2</sup> Rakjat kita. Inilah antara lain sebab<sup>2</sup>nja mengapa Partai kita bisa dalam waktu jang singkat mempunjai djumlah keanggotaan jang besar dan tumbuh menjadi Partai massa. Kenyataan ini adalah dja-

waban jang paling djitu pada semua fitnahan terhadap Partai. Kebenaran politik Partai telah sangat besar artinja bagi pekerjaan pembangunan Partai, bagi pekerjaan memperkuat dan meluaskan Partai.

Hubungan Partai kita dengan Partai<sup>2</sup> sekawan makin hari makin bertambah erat, baik dengan djalan mempeladjar pengalaman Partai<sup>2</sup> sekawan, maupun dengan menghadiri kongres<sup>2</sup> mereka atau kontak<sup>2</sup> pribadi antara pemimpin<sup>2</sup> Partai kita dengan pemimpin<sup>2</sup> Partai sekawan. Ikutsertanja wakil<sup>2</sup> Partai kita dalam Konferensi Partai Komunis dan Partai Buruh di Moskow dalam bulan November 1957, jang telah melahirkan „Deklarasi“ dan „Manifest Perdamaian“ sangat mempererat hubungan Partai kita dengan Partai<sup>2</sup> sekawan. „Deklarasi“ dan „Manifest Perdamaian“ telah sangat besar artinja dalam mengkonsolidasi Partai kita dilapangan politik dan ideologi.

Dalam rangka mempererat hubungan Partai kita dengan Partai<sup>2</sup> Marxis-Lennis sekawan, sangatlah penting arti daripada hadirnja delegasi persahabatan PKI dalam Kongres ke-21 PKUS, tidak hanya karena Kongres ini adalah Kongres kaum pembangun Komunisme, tetapi djuga karena dalam Kongres ini Kawan Chrusjov menegaskan bagaimana seharusnya hubungan antara Partai<sup>2</sup> Komunis, Kawan Chrusjov antara lain mengatakan bahwa :

*„dalam gerakan Komunis dan djuga dalam kubu Sosialis baik dulu maupun sekarang, ada persamaan<sup>2</sup> hak<sup>3</sup> dan kemerdekaan antara semua Partai Komunis dan Partai Buruh dan antara negeri<sup>2</sup> Sosialis. Sesungguhnya PKUS samasekali tidak memimpin Partai lain. Uni Sovjet tidak memimpin negara<sup>3</sup> lain. Dalam gerakan Komunis tak ada Partai atasan dan bawahan. Semua Partai Komunis dan Partai Buruh sama dan bebas, semua bertanggungjawab atas nasib gerakan Komunis, atas kekalahan dan kemenangannya.“ (Tepuktangan !).*

Bagi kaum Komunis jang mengerti benar hakekat gerakan Komunis dan gerakan buruh sedunia, apa jang ditegaskan oleh Kawan Chrusjov ini adalah menggambarkan keadaan jang sesungguhnya, dan puluhan tahun jang lalu sudah diadjudkan oleh Lenin. Tetapi diadjudkannja soal ini dalam situasi sekarang, dimana kaum imperialis dan begundal-begundalnja sedang mempernebat fitnahannja terhadap kaum Komunis, adalah penting artinja. Penegasan ini tidak hanya untuk membantah fitnahan kaum reaksioner, tetapi djuga merupakan dorongan bagi kaum Komunis di-tiap<sup>2</sup> negeri untuk dapat melihat dengan djelas apa jang mendjadi tugas<sup>2</sup> klas, tugas<sup>2</sup> nasional dan tugas<sup>2</sup> internasionalnja. Dengan djelasnja semua tugas ini, maka djuga kita kaum Komunis Indonesia akan lebih

mampu menghimpun banjak kaum demokrat dan patriot sedjati disekeliling Partai kita.

## (2) Pendidikan Marxisme-Leninisme Sjarat Mutlak Untuk Persatuan Didalam Partai

Ketika pada pertengahan tahun 1948 Partai kita mengadakan koreksi besar, sangat ditekankan tentang pentingnya pekerdjaan dilapangan organisasi. Ini adalah tepat, karena pada waktu itu, sesudah kesalahan dilapangan politik pada pokoknya selesai dikoreksi, maka kelemahan dilapangan organisasi adalah yang paling menonjol. Pada waktu itu ada 3 Partai yang berazaskan Marxisme-Leninisme dan jumlah anggota dari semua Partai ini hanya 10.000. Partai memang telah membikin kesalahan yang serius dilapangan organisasi.

Kesalahan dilapangan organisasi ini sudah lama kita perbaiki. Dengan kebanggaan Komunis dapat kita simpulkan bahwa garis umum pembangunan Partai yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V, yaitu *„meneruskan pembangunan PKI yang diboisjewikkan, yang meluas diseluruh negeri, yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi“* pada pokoknya sudah kita kerdjakan dengan baik. (*Tepuktangan*). Tetapi pelaksanaan sepenuhnya daripada garis umum pembangunan Partai ini bukanlah sesuatu yang dapat dilaksanakan dalam masa antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI. Penjempurnaan pelaksanaan garis umum pembangunan Partai masih harus kita teruskan.

Dalam hubungan dengan pembangunan Partai, sekarang timbul persoalan yang sangat mendesak sebagai akibat dari bertambahnya jumlah anggota Partai dengan tjepat. Bertambahnya keanggotaan dengan tjepat akan tidak baik akibatnya jika tidak disertai dengan pendidikan setjara besar<sup>2</sup>an didalam Partai. Mengingat hal ini, maka setiap kali dilakukan gerakan peluasan keanggotaan semenjak tahun 1952, selalu disertai dengan gerakan mempelajari program dan Konstitusi Partai untuk anggota<sup>2</sup> baru, sedang anggota<sup>2</sup> lama diwajibkan mempelajari dokumen<sup>2</sup> Partai serta buku<sup>2</sup> teori Marxisme-Leninisme.

Ketika Sidang Pleno ke-IV CC dalam bulan Djuli 1956 menjusun Plan 3 Tahun Pertama Partai yang pada waktu itu sudah beranggota lebih dari 1 djuta, pimpinan sentral Partai telah memperingatkan tentang tidak boleh dilupakan, bahwa massa anggota Partai berasal dari ber-matjam<sup>2</sup> klas, bahwa lingkungan keluarga mereka sekarang djuga ber-matjam<sup>2</sup> dan bahwa tingkat kebudaja-

annya serta pengalaman revolusionernya ber-beda<sup>2</sup>. Maka tidak heran, bahwa masih terdapat dan terus akan terdapat ber-matjam<sup>2</sup> fikiran dikalangan kaum Komunis. Djadi, soal persatuan dalam fikiran dikalangan kaum Komunis adalah soal pendidikan bagi seluruh anggota Partai. Sidang Pleno ke-IV CC itu djuga mengambil keputusan untuk memperkuat pekerdjaan pendidikan dan penjelidikan keadaan kongkrit guna mempertinggi taraf Marxisme-Leninisme daripada Partai. Disinilah arti yang sangat penting daripada Plan 3 Tahun Pertama Mengenai Organisasi Dan Pendidikan.

Berdasarkan Plan 3 Tahun Pertama, maka diadakan pendidikan diseluruh Partai tentang prinsip<sup>2</sup> fondamentil Marxisme-Leninisme dan tentang mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Pendidikan ini mula<sup>2</sup> untuk kader<sup>2</sup> tinggi Partai, kemudian semua fungsionaris Partai dan selandjutnja ditudjukan kepada semua anggota Partai. Pendidikan dihubungkan setjara erat dengan tugas<sup>2</sup> Partai, dan dipandang sebagai usaha untuk menghilangkan rintangan<sup>2</sup> ideologis agar tugas<sup>2</sup> Partai sekarang dapat dilaksanakan dengan baik dan agar para kader tidak asing mengenai tugas yang akan dilakukan dikemudian hari.

Sekarang mayoritas daripada kader<sup>2</sup> sentral sampai ke Komite<sup>2</sup> basis sudah terdidik menurut plan pendidikan baru. Tetapi mayoritas daripada anggota belum terdidik menurut plan ini. Salahsatu pekerdjaan Partai sesudah Kongres ke-VI ialah mendidik semua fungsionaris dan aktivis Partai, dan mendidik mayoritas daripada massa anggota menurut sistim pendidikan baru. Dalam jangka waktu Plan 3 Tahun Kedua Partai semua anggota yang masuk Partai sebelum Kongres ke-VI dan sebagian besar anggota yang masuk sesudah Kongres ke-VI harus selesai dididik menurut sistim pendidikan baru.

Dengan dilaksanakannya plan pendidikan, maka kebulatan fikiran mendjadi terdjamin, semangat Komunis mendjadi lebih kuat berkuasa didalam Partai. Pilihan matapeladjaran untuk seluruh tingkatan pendidikan, jaitu tentang sedjarah perkembangan masyarakat, tentang soal<sup>2</sup> pokok revolusi Indonesia, tentang front persatuan nasional dan tentang pembangunan Partai sudah diudji ketepatannya.

Matapeladjaran filsafat dan matapeladjaran tentang gerakan buruh internasional yang selama ini hanya diberikan di Sekolah<sup>2</sup> Partai yang diselenggarakan oleh CC dan CDB<sup>2</sup> tertentu, sudah waktunya didjadikan matapeladjaran disemua Sekolah dan Kursus Partai.

Matapeladjaran tentang gerakan buruh internasional sangat

penting artinja bagi pelaksanaan politik Partai dalam memadukan semangat patriotisme dan internasionalisme, politik untuk mengalahkan nihilisme nasional dan sovinnisme burdjuis. Untuk mempertinggi taraf teori kader<sup>2</sup> Partai sangat penting arti konferensi<sup>2</sup> teori, konsultasi<sup>2</sup> teori dan keharusan bagi para kader tinggi dan menengah untuk mempelajari buku<sup>2</sup> teori klasik baik yang ditentukan oleh CC maupun yang dipilihja sendiri.

Agar semua anggota dapat ambil bagian dalam menkmati beladjar sendiri dari harian dan penerbitan<sup>2</sup> Partai lainnya, maka pekerdjaan memberantas butahuruf didalam barisan Partai harus lebih digiatkan, disamping djuga terus menggiatkan pemberantasan butahuruf diluar barisan Partai. Bersamaan dengan itu kader<sup>2</sup> Partai tidak boleh henti<sup>2</sup>nja meningkatkan pengetahuan umumnja dan mempertinggi keahlian dalam djurusan atau vaknja masing<sup>2</sup>. (*Tempuktangan*).

Tepat sekali kesimpulan yang pernah diambil oleh Partai kita jaitu, bahwa *„Persatuan didalam Partai hanya mungkin djika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, jaitu fikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme. Hanya djika ada persatuan fikiran dari orang<sup>2</sup> Komunis, barulah ada persatuan yang sungguh<sup>2</sup> didalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan didalam aksi<sup>2</sup> Rakjat yang dipimpin oleh Partai Komunis”*. Oleh karena itu, semua bentuk dan djalan yang dapat mempersatukan fikiran seluruh anggota Partai harus ditempuh oleh Partai.

Kongres Nasional ke-V Partai telah memberi djawaban mengenai semua masalah penting dan pokok daripada Revolusi Indonesia. Kongres itu telah meletakkan dasar<sup>2</sup> untuk pekerdjaan Partai yang lebih baik dalam menggalang front persatuan nasional, telah memberikan djawaban tentang semua masalah pokok pembangunan Partai. Perkembangan sesudah Kongres menunjukkan bahwa semuanya ini adalah benar. Berdasarkan pengalaman<sup>2</sup> selama masa yang kita tindjau, dapatlah kita simpulkan bahwa pada pokoknja, garis politik dan garis organisasi yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga pada pokoknja ia adalah djuga garis daripada Kongres Nasional ke-VI. Tentu sadja kita harus mengadakan perubahan<sup>2</sup> disana-sini; bagian<sup>2</sup> yang sudah lewat waktu harus kita tiadakan, bagian<sup>2</sup> yang kurang harus kita tambah, sedangkan yang kurang tepat harus dibikin lebih tepat.

Dalam melaksanakan garis politik dan garis organisasi yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai tentu ada kesukaran<sup>2</sup> yang kita temui dan ada kesalahan<sup>2</sup> yang kita buat. Hal<sup>2</sup> ini tidak biasa kita hindari. Djika tidak terdapat pada CC, maka

terdapat pada Komite<sup>2</sup> bawahan atau pada ke-dua<sup>2</sup>nja. Djuga dimasa jang akan datang kitapun tidak akan terluput dari kesukaran<sup>2</sup> dan kemungkinan<sup>2</sup> membuat kesalahan.

Jang penting ialah asal kita selamanya mengerti apa jang menjadi sebab daripada semua kesukaran dan kesalahan itu. Dalam Kongres Nasional ke-V sudah kita simpulkan bahwa segala kesalahan, baik kesalahan karena dogmatisme maupun kesalahan karena empirisme, adalah bersumber pada ideologi subjektivisme. Dalam melaksanakan tugas kita selanjutnja, dan tugas ini pasti akan lebih berat karena makin peliknya keadaan dan makin tadjamnja pertentangan<sup>2</sup> diantara klas<sup>2</sup> didalam masyarakat kita, maka kitapun pasti akan menemui lagi kesukaran<sup>2</sup> dan kemungkinan<sup>2</sup> akan membikin kesalahan<sup>2</sup>.

Pengalaman kita selama ini djuga menunjukkan, bahwa setiap kali Partai memperoleh kemajuan dan kemenangan, setiap kali pula timbul kesulitan<sup>2</sup> baru dan timbul kemungkinan membuat kesalahan<sup>2</sup> baru. Ini adalah satu hukum. Oleh karena itu adalah kewajiban pimpinan Partai untuk mempeladjar dan menganalisa kesalahan<sup>2</sup>nja dimasa lampau, menarik pelajaran dari kesalahan<sup>2</sup> jang lampau itu, agar sebagaimana dikatakan oleh Kawan Liu Sau-tji *„dalam pekerjaan selanjutnja membuat lebih sedikit kesalahan, dan sedapat mungkin tidak mengulangi kesalahan jang pernah terjadi serta tidak menjejabkan kesalahan ketjil menjadi kesalahan besar“* (Laporan Politik CC PKT kepada Kongres Nasional ke-VIII). (Tepuktangan).

### (3) Subjektivisme Harus Terus Kita Perangi

Dalam Kongres Nasional ke-V sudah kita simpulkan, bahwa untuk melawan subjektivisme didalam Partai adalah sangat penting untuk melakukan dua hal: *Pertama*, mengadjar anggota<sup>2</sup> Partai untuk memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisa situasi politik dan dalam mengukur kekuatan klas. Dengan demikian kita menentang analisa dan perhitungan setjara subjektif. *Kedua*, memimpin perhatian anggota<sup>2</sup> kearah penjelidikan dan studi dilapangan sosial dan ekonomi agar dapat menentukan taktik perjuangan dan metode kerdja, dan dengan demikian membikin kawan<sup>2</sup> kita mengerti bahwa kesalahan dalam penjelidikan sesuatu keadaan jang njata akan menjejabkan mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme.

Melakukan dua hal tersebut diatas berarti bahwa kita mempertinggi taraf Marxisme-Leninisme daripada Partai. Ini berarti bahwa kita harus dengan sepeoleh hati mempeladjar Marxisme-

Leninisme setjara sistimatis, terutama dikalangan kader tinggi, agar mereka pandai menggunakan pendirian, pandangan dan metode klas buruh untuk merundjau dan memetjahkan soal<sup>2</sup> praktis yang dihadapi. Ini berarti, bahwa kader<sup>2</sup> Partai harus mengadakan pemeriksaan dan penjelidikan dengan sikap sungguh<sup>2</sup> dan djudjur terhadap massa dengan memakai tjarakerdja „dari massa kembali kemassa“. Pokoknja kita harus memadukan teori dengan praktek. Pekerdjaan ini hanya bisa berhasil dan dapat dikonsolidasi djika kita mendidik dan menjusun barisan pekerdja<sup>2</sup> teori Partai untuk pekerdjaan<sup>2</sup> ilmiah mengenai Marxisme-Leninisme dan meneruskan gerakan „turun kebawah“.

Singkatnja, kita harus tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan untuk meningkatkan hasil pekerdjaan. Tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan, inilah sembojan beladjar dan sembojan bekerdja kita.

Dalam Kongres Nasional ke-V Partai telah kita simpulkan, bahwa sumber sosial daripada subjektivisme ialah karena negeri kita sekarang adalah negeri burdjuis ketjil. Partai kita seperti sebuah perahu yang sedang berlajar dilautan burdjuis ketjil. Partai tidak hanya dilingkungi oleh klas burdjuis ketjil, tetapi djuga sebagian besar anggota Partai berasal dari klas ini. Djadi, bahwa kemurnian ideologi Partai dapat ditjarkan oleh ideologi klas yang tidak sah didalam Partai bukanlah sesuatu kemustahilan. Dalam kita terus-menerus melawan ideologi burdjuis ketjil didalam Partai, kita tidak boleh melupakan bahwa ideologi burdjuis adalah djuga antjaman yang terus-menerus terhadap kemurnian ideologi dan politik Partai. Demikianlah kalau dilihat sumber sosial daripada kesalahan<sup>2</sup> kita.

Tapi kesalahan<sup>2</sup> kita bisa djuga tidak berpangkal pada sumber sosial, tetapi berpangkal pada sumber pengertian yang salah. Tentang ini dikatakan oleh Kawan Liu Sau-tji sbb. : „Djika seseorang tidak mengetahui, bahwa pendapat yang tepat itu tidak lain daripada pentjerminan objektif yang meliputi segala sudut dari kenjataan, dan bertindak menurut keinginannya yang subjektif dan berat sebelah, maka dia tetap akan membikin kesalahan yang besar atau ketjil, sungguhpun segala motifnja itu mengandung maksud yang baik. Karena itu, untuk mengelakkan kesalahan kita harus dengan tepat memahami kenjataan objektif dan dengan tepat membedakan mana yang benar dan mana yang salah“.

Sedjarah Partai kita menunjukkan, bahwa sedjak berdirinja sampai tahun 1951 Partai membikin kesalahan<sup>2</sup>, atau oportunisme kanan atau oportunisme „kiri“, atau ke-dua<sup>2</sup>nja sekaligus, yang sudah menimbulkan banjak kerusakan dan kerugian pada Partai.

Tapi sedjak tahun 1951, jaitu tahun pembaruan pimpinan sentral Partai, kita tidak lagi membikin kesalahan jang demikian seriusnja. Dan kemungkinan membikin kesalahan jang demikian mendjadi lebih diperketjil sesudah ada garis politik, ada program Partai dan garis organisasi Partai jang tepat jang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V.

Kenjataan pada waktu sekarang jalah, bahwa kaum reaksioner sukar memukul politik Partai, karena begitu satunja politik Partai dengan kepentingan<sup>2</sup> ekonomi dan politik jang langsung daripada massa Rakjat dan dengan kepentingan<sup>2</sup> nasional Mereka djuga sukar menjerang program Partai, karena menjerang ini berarti menjerang kepentingan vital daripada Rakjat dan bangsa.

Oleh karena itu mereka lebih banyak menjurahkan kegiatannja dalam gelanggang ideologi, dimana mereka setjara diam<sup>2</sup> menjelundupkan pandangan<sup>2</sup> dunia idealis dalam mendjelaskan masalah<sup>2</sup> politik hukum, kesenian, dsb., sehingga menimbulkan kekatjauan dalam dunia ideologi. Dengan demikian mereka berharap dapat menghalang-halangi kemadjuan gerakan progresif, kemadjuan perdjuaan anti-imperialisme dan anti-feodalisme pada umumnja.

Dalam filsafat, kaum imperialis dan kakitangannja serta kaum burdjuis dalamnegeri pada hakekatnja berada dalam satu front dan sangat aktif menjerang benteng filsafat klas buruh. Menghadapi serangan frontal dilapangan filsafat ini adalah keliru sekali untuk bersikap pasif, karena ini berarti membiarkan benteng filsafat klas buruh dimasuki dan diobrak-abrik oleh elemen<sup>2</sup> perusak, jang akan melemahkan semua bidang kegiatan gerakan buruh dan gerakan Rakjat pekerdja pada umumnja.

*Djelaslah bahwa salahsatu tugas terpenting sekarang, jalah meneruskan pembangunan Partai dengan penekanan pada segi pembangunan ideologi. Dengan mengemukakan ini tidak berarti bahwa kita boleh menganggap remeh masalah pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi adalah tetap penting, tetapi lebih penting lagi pembangunan ideologi.*

Djika kita sekarang lebih mementingkan ideologi Partai, tidaklah berarti bahwa selama ini belum ada usaha Partai dilapangan ideologi, tetapi jang dimaksud jalah bahwa pekerdjaan kita belum tjukup banjak dan belum tjukup baik dalam membentuk ideologi anggota<sup>2</sup> Partai. Untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dalam lapangan ideologi, di-masa<sup>2</sup> datang kita harus lebih mengutamakan peladjaran filsafat Marxisme-Leninisme, jaitu filsafat materialisme dialektik dan histori. Kita harus lebih banjak mengadjarkannja kepada kader<sup>2</sup> Partai dan memperkenalkannja kepada massa anggota baik dengan mendjadikannja matapeladjaran di Sekolah<sup>2</sup> dan

Kursus<sup>2</sup> Partai, maupun dengan melalui berbagai matapelajaran lain dan dengan menghubungkan filsafat Marxisme-Leninisme dengan semua lapangan kehidupan.

Mengenai pentingnja pembangunan ideologi pada waktu belakangan ini sudah mulai disedari sungguh<sup>2</sup> oleh kader<sup>2</sup> Partai. Sudah semakin disedari bahwa Partai kita adalah Partai yang berdisiplin badja, tetapi disiplin tidak bisa hanya bersandar pada organisasi sadja, melainkan harus terutama bersandar pada kesadaran anggota. Ini berarti bahwa lebih tinggi kesadaran anggota lebih tinggi pula rasa disiplinnya. Djuga makin disedari bahwa tidak ada tugas Partai yang dapat dilaksanakan dengan baik djika tidak ada persiapan ideologi, dan Partai hanya bisa kokoh djika bersandar pada kesatuan ideologi. Oleh karena itu bagi kita kaum Komunis, ideologi adalah djenderal. Tanpa ideologi yang tepat tidak ada yang bisa berdjalan beres sebagaimana halnya tanpa djenderal yang baik tidak ada tentara yang bisa menang.

Fikiran sementara anggota bahwa filsafat sama dengan mistik adalah keliru. Begitu djuga anggapan bahwa filsafat sukar dimengerti dan hanya bisa dimengerti oleh ahli<sup>2</sup> dan teoritikus<sup>2</sup> adalah keliru. Penghantjuran fikiran<sup>2</sup> yang keliru ini merupakan syarat pertama untuk bisa meluaskan peladjaran filsafat dalam Partai kita. Mempeladjar filsafat adalah sama sadja dengan mempelajari teori<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme lainnya. Djika mempelajari filsafat terlepas dari kenyataan, maka menjadi sukar difahami. Tetapi djika filsafat dipeladjar sebagaimana mestinya, yaitu menghubungkan dengan praktek kehidupan, dengan kenyataan<sup>2</sup>, dengan dokumen<sup>2</sup> Partai, dengan garis umum dan politik se-hari<sup>2</sup> daripada Partai, maka mempelajari filsafat tidak akan menimbulkan kesukaran-kesukaran yang besar, karena persoalannya menjadi kongkrit.

Selama ini masih banyak anggota<sup>2</sup> Partai yang dapat mengatakan bahwa garis umum dan politik Partai adalah baik dan tepat, tetapi mereka tidak bisa menerangkan mengapa baik dan mengapa tepat. Hanya dengan memahami filsafat Marxisme-Leninisme, kader<sup>2</sup> Partai dapat menguraikan mengapa garis umum dan politik Partai tepat. Dengan memahami filsafat bagi mereka akan menjadi jelas bahwa filsafat itu adalah dasar teori daripada segala taktik, garis, pedoman dan politik Partai, dan dengan demikian kader<sup>2</sup> tidak hanya „tahu kebenaran“, tetapi djuga „tahu sebab kebenaran“ garis politik Partai.

Kesalahan politik yang paling mungkin dibikin oleh Partai sesudah ada garis politik dan Program Partai yang tepat, ialah bahwa kita tidak bisa membedakan antara Program Partai yang umum,

jang akan dilaksanakan oleh Partai djika Partai memimpin pemerintahan, dengan program tuntutan atau program khusus jang harus diperdjuangkan oleh Partai. jang harus dituntut oleh Partai kepada kekuasaan jang ada sekarang.

Karena subjektivisme, kita bisa membikin kesalahan menuntut pelaksanaan Program Umum sepenuhnya sekarang. Sebagai tjontoh tentang kesalahan subjektivisme ialah Manifes Pemilihan Umum Parlemen jang pertama jang disahkan dalam Kongres Nasional ke-V tetapi jang kemudian dikoreksi oleh Sidang Pleno ke-III CC. Kesalahan ini tidak sampai menimbulkan akibat<sup>2</sup> jang sangat merugikan berkat selalu adanya kebulatan dalam pimpinan Partai.

Sebaliknya, djuga karena subjektivisme, jaitu karena tidak mengutamakan kepentingan bagian jang sangat terbesar daripada Rakyat, kita bisa tidak menerangkan kepada Rakyat Program Umum kita, sehingga Rakyat tidak tahu perbedaan antara program kita dengan program partai<sup>2</sup> burdjuis liberal.

Kemungkinan membikin kesalahan subjektivisme seperti tersebut diatas sudah sangat diperketijl sesudah Sidang Pleno ke-IV CC, dimana dengan tegas kita bedakan antara Program Umum dengan program khusus atau program tuntutan, tetapi dengan tegas pula kita tundjukkan hubungan jang satu dengan jang lain. Dengan Program Umumnya Partai memperlengkapi tugas<sup>2</sup> dan sembojan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945. Djika tugas<sup>2</sup> dan sembojan<sup>2</sup> ini dilaksanakan sama artinja dengan menyelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus jang bersifat nasional dan demokratis sampai ke-akar<sup>2</sup>nja. Program tuntutan kita adalah tuntutan<sup>2</sup> pada kekuasaan jang ada sekarang, jang bisa ber-ubah<sup>2</sup> sesuai dengan perubahan dan perbedaan keadaan.

Dalam memperdjuangkan program tuntutan harus ditjegah gejala birokrasi jang menghinggapi sementara fungsionaris Partai, jaitu kurang tjepat memberikan tuntunan aksi dalam memenangkan tuntutan<sup>2</sup> massa jang mendesak dan tidak tjukup memikirkan, bagaimana membikin tuntutan itu menjadi persoalan massa dan kegiatan massa. Rasa puasdiri karena sudah dapat membikin pernjataan atau membikin pidato di-dewan<sup>2</sup> perwakilan Rakyat dan di-tempat<sup>2</sup> lain jang dilengkapi dengan angka<sup>2</sup> dan fakta<sup>2</sup> harus dihindarkan. Membuktikan segala sesuatu dengan angka<sup>2</sup> dan fakta<sup>2</sup> adalah sangat penting, tetapi tidak boleh ada fungsionaris Partai jang „terpaku“ kepada angka<sup>2</sup> dan fakta<sup>2</sup> tanpa memetjahkan persoalannya sehingga dapat membangkitkan, memobilisasi, dan mengorganisasi massa, untuk melaksanakan program tuntutan Partai pada tiap<sup>2</sup> situasi.

Pendeknja pada waktu sekarang Partai sudah diperlengkapi dengan strategi dan taktik<sup>2</sup> pokok jang terang, sehingga tidak mudah lagi terdjerumus mendjadi mangsa daripada fikiran ke-kiri<sup>2</sup>an dan fikiran menjerah, tidak mudah lagi terprovokasi dan tidak mudah lagi mendjadi lupa daratan djika memperoleh kemenangan<sup>2</sup>.

Tetapi mengerti strategi dan taktik<sup>2</sup> pokok sadja belumlah cukup. Partai kita harus senantiasa menguasai situasi jang sedang berdjalan setjara lengkap atau agak lengkap, menetapkan sikap terhadap situasi itu dan menentukan langkah<sup>2</sup> dan aksi<sup>2</sup> jang menguntungkan Rakjat serta mendorong maju gerakan revolusioner. Dengan demikian kita tidak hanya mengerti taktik<sup>2</sup> pokok tetapi djuga taktik se-hari<sup>2</sup>. Adalah tepat sekali putusan CC untuk mengintensifkan pemeriksaan dan penjelidikan atas berbagai keadaan dan penghidupan massa, dan putusan bahwa semua anggota CC dan kader<sup>2</sup> penting lainnja harus turun kebawah buat ambil bagian dalam pemeriksaan dan penjelidikan ini dan bertanggungjawab akan kemadjuan organisasi Partai lokal jang meliputi sedjumlah organisasi<sup>2</sup> basis jang pemeliharaannya diserahkan kepadanya. Ini salahsatu djaminan bahwa pemimpin<sup>2</sup> Partai kita tidak akan terpisah dari massa anggota dan dari kehidupan massa Rakjat pekerdja.

Hendaklah senantiasa diingat, bahwa diantara strategi dan taktik<sup>2</sup> pokok Partai atau garis politik Partai jang sudah benar, dengan pelaksanaannya masih ada djarak pemisah. Walaupun kita sudah beladjar teori Marxisme-Leninisme, sudah berusaha mengenal keadaan, dan djuga menguasai garis politik Partai dengan baik, kemungkinan kita membuat kesalahan masih tetap ada. Untuk mengurangi kemungkinan membuat kesalahan ini, Partai kita sudah dipersendjatai dengan sendjata jang ampuh, jaitu sendjata kritik dan selfkritik. Dengan melakukan kritik dan selfkritik setjara *serius*, tetapi djuga setjara *sabar* dan *bidjaksana*, maka kita akan berhasil menemukan kesalahan<sup>2</sup> dan kekurangan<sup>2</sup> dalam pekerdjaan kita, agar dengan demikian kita dapat *„menarik pelajaran dari kesalahan jang sudah<sup>2</sup> sebagai peringatan bagi hari kemudian“* dan kita djuga dapat *„mengobati pehjakit untuk menjembuhkan sisakit“*.

Didalam Partai harus dibangunkan keberanian melakukan kritik, terutama kritik dari bawah kepada atasan, dengan berpegang pada pedoman jang dikemukakan oleh Kawan Mau Tje-tung jaitu *„bertitik pangkal pada kemauan bersatu, dan melalui kritik dan selfkritik, mentjapai persatuan baru atas dasar jang baru“*. Dengan setia mengamalkan kritik dan selfkritik berarti kita memerangi subjektivisme, dan dengan demikian kemungkinan membikin ke-

salahan menjadi diperketil serta persatuan didalam Partai lebih diperkuat.

Hanja dengan terus-menerus memerangi subjektivisme, baik dalam tjara berfikir maupun dalam tjarakerdja, Partai kita dapat menjadi pimpinan jang objektif dan realis, dapat mengikis birokratisme dan sektarisme dalam mengembangkan Partai, dalam menggalang persatuan Rakjat di-mana<sup>2</sup> dan dalam mengorganisasi aksi<sup>2</sup> massa sehingga dapat memimpin dan mendjuruskan perkembangan situasi. Dengan melaksanakan semuanya itu kita mewujudkan suatu langgamkerdja jang membedakan Partai kita dengan partai<sup>2</sup> lain jatu langgamkerdja Partai jang dengan singkat dapat dirumuskan sbb . *Memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa Rakjat dan melaksanakan selfkritik. (Tepuktangan lama).*

#### (4) Teruskan Bekerdja Dengan Plan 3 Tahun

Putusan Sidang Pleno ke-IV CC untuk memimpin perkembangan Partai dengan mengadakan Plan 3 Tahun Pertama tentang Organisasi dan Pendidikan adalah putusan jang bersedjarah. Inilah untuk pertama kalinya perkembangan jang meluas dan mendalam daripada Partai dipimpin oleh suatu Plan jang djangka waktunya agak panjang, mengenai semua orgnisasi Partai dan semua anggota Partai. Plan ini telah menimbulkan suasana baru, telah membawa kesegaran dan kegembiraan bekerdja dalam barisan Partai. Plan ini telah mempertinggi daya memobilisasi daripada Partai. Didalam Partai mulai dibiasakan tjarakerdja jang rasionil dan efektif. Para fungsionaris dan aktivis Partai menjadi makin terlatih untuk bekerdja „banjak segi“, pandangan mereka tidak lagi hanja terbatas pada lapangannya masing<sup>2</sup>, tetapi sudah melihat hubungan lapangannya sendiri dengan pekerdjaan Partai keseluruhannya. Dengan adanya Plan ini para fungsionaris dan aktivis Partai menjadi lebih didorong untuk memperdalam pengertian mereka mengenai pekerdjaan<sup>2</sup> masing<sup>2</sup>, untuk mempelajari lebih baik keadaan daerahnya masing<sup>2</sup> dan keadaan suku:bangsa<sup>2</sup> jang ada didaerahnya. Tanpa melakukan semuanya ini, para fungsionaris dan aktivis Partai tidak dapat ikut ambil bagian jang aktif didalam pelaksanaan Plan 3 Tahun Partai.

Mengenai lapangan pendidikan, di Sekolah<sup>2</sup> dan Kursus<sup>2</sup> Partai dilakukan pendidikan pedjuang<sup>2</sup> revolusioner, untuk memberikan semangat dan pandangan dunia Komunis, jang akan membikin anggota<sup>2</sup> Partai dalam keadaan bagaimanapun tetap yakin, bahwa djalan revolusioner jang sudah dipilihnya adalah djalan jang se-

tepat<sup>2</sup>nja, djalan hidup baru dan untuk masjarakat baru Berdasar-kan Plan 3 Tahun Partai semua Comite ambil bagian aktif dalam penyelenggaraan plan pendidikan, sedangkan anggota<sup>1</sup> jang terpilih untuk mengikuti Sekolah atau Kursus Partai menerima penetapan itu sebagai suatu kehormatan jang tinggi.

Dengan adanya perlombaan dalam melaksanakan Plan 3 Tahun Pertama Partai, pimpinan kolektif dan pekerdjaan massa daripada Partai menjadi lebih berkembang, sebab pelaksanaan Plan tidak mungkin berhasil baik djika tidak ada pimpinan kolektif dan pekerdjaan massa. Dengan adanya pimpinan kolektif jang disertai kritik dan selfkritik, demokrasi didalam Partai menjadi berkembang dan dengan ini berkembang pula kepribadian, dajajpta dan militansi para anggota Partai. Berkembangnja demokrasi didalam Partai memperkuat sentralisme Partai. (Tepuktangan).

Garis massa ber-angsur<sup>2</sup> menjadi sungguh<sup>2</sup> garis politik, garis organisasi dan garis moral daripada Partai. Telah menjadi kejakinan Partai kita bahwa untuk suksesnja Plan dan untuk suksesnja semua pekerdjaan Partai dan semua pekerdjaan massa daripada Partai, Partai harus setia pada pimpinan kolektif, pada kritik dan selfkritik dan pada garis massa. Hanya dengan memadukan pimpinan kolektif dengan kritik dan selfkritik dan dengan garis massa kita akan dapat mewujudkan pimpinan kolektif jang kritis, objektif dan realis, jang sempurna dan kuat, jang akan memperbesar kemampuan dan otoritet Partai.

Tetapi situasi revolusioner berkembang tjepat, lebih tjepat daripada perkembangan Partai. Perdjuaan anti-kolonialisme Rakjat Indonesia makin sengit dan meningkat kefase jang baru, jaitu kembalinja semangat Revolusi Agustus 1945 jang disertai dengan kesadaran Rakjat tentang besarnja kekuatannja sendiri, kesadaran tentang murninja dan pentingnja sokongan Rakjat pekerdja diseluruh dunia dan sokongan negara<sup>2</sup> kubu Sosialis. Ini disatu fihak, sedangkan difihak lain tumbuhnja kesadaran Rakjat akan terbatasnja kekuatan imperialis dan kekuatan kaum reaksioner dalam negeri. Didalam situasi jang demikian inilah berlangsung Sidang Pleno ke-VI CC jang mengambil resolusi tentang keharusan untuk menjesuaikan badan<sup>2</sup> pimpinan Partai dengan perkembangan situasi revolusioner jang tjepat jang dimulai dari CC sampai kepada Comite<sup>2</sup> jang paling bawah. Dengan tindakan penjesuaian ini dimaksudkan agar hubungan Partai dengan massa dapat lebih dieratkan lagi agar semua persoalan massa dapat terdjawab atau terpetjahkan oleh Partai. Penjesuaian ini tidak hanya terbatas pada badan<sup>2</sup> pimpinan Partai, tetapi djuga mengenai seluruh Partai dan seluruh

organisasi massa revolusioner yang berada dibawah pimpinan Partai.

Pimpinan sentral Partai disempurnakan dengan membentuk Dewan Harian Politbiro CC ; untuk melantarkan pekerjaan Sekretariat CC dibentuk Biro<sup>2</sup> baru yang ditudjukan untuk mengurus daerah<sup>2</sup> tertentu ; di CC dan Komite<sup>2</sup> bawahan dibentuk Biro Plan yang mengontrol pelaksanaan Plan 3 Tahun ; Departemen<sup>2</sup> dan Bagian<sup>2</sup> baru dibentuk ; promosi kader dilakukan diseluruh Partai dan mutasi kader dilakukan ke-tempat<sup>2</sup> yang sangat kekurangan kader. Semuanya ini telah meningkatkan semangat dan hasil pekerjaan Partai.

Perkembangan situasi revolusioner yang tjepat seperti ditekankan diatas tidak mungkin kita tampung djika seandainya kita tidak mempunyai Plan Tiga Tahun, artinya djika kita tidak mempunyai pengalaman bekerja sistimatis dan tidak meluaskan Partai serta mendidik anggota<sup>2</sup> Partai. Oleh karena itu, kita harus meneruskan pekerjaan dengan Plan Tiga Tahun, djika selesai dengan yang pertama harus disusul dengan yang kedua dan seterusnya. Kontrol yang intensif, yang sistimatis dan terus-menerus mengenai pelaksanaan Plan harus dianggap sebagai salahsatu pekerjaan terpenting untuk suksesnya Plan. Disamping itu kita harus meninggalkan subjektivisme dalam menyusun Plan.

Bagaimana mengenai djatah<sup>2</sup> yang ditetapkan dalam Plan 3 Tahun Pertama ? Dilapangan organisasi ditetapkan djatah<sup>2</sup> tentang peluasan keanggotaan dan organisasi ; penggrupan tiap anggota ; peningkatan tjalonanggota menjadi anggota setelah melalui masa-tjalon yang terpimpin ; pengaktifan bagian<sup>2</sup> daripada Komite<sup>2</sup> ; penjelenggaraan konferensi<sup>2</sup> dan rapat<sup>2</sup> periodik dari Komite<sup>2</sup> dan Grup<sup>2</sup> ; pemetjahan masalah perlengkapan kantor dan perpustakaan Partai oleh tiap Komite ; pengintensifan pengumpulan iuran serta peluasan donasi dan usaha<sup>2</sup> produktif, dsb. Pelaksanaan djatah<sup>2</sup> dilapangan organisasi seperti yang ditetapkan dalam Plan 3 Tahun Pertama sudah sangat membantu dalam usaha meluaskan dan mengkonsolidasi Partai, tetapi masih belum berhasil seluruhnya sehingga masih perlu mendapat penekanan-penekanan lagi dalam Plan 3 Tahun Kedua.

Djatah dalam lapangan pendidikan meliputi pengorganisasian Sekolah<sup>2</sup> Partai, Kursus<sup>2</sup> Partai dan Sekolah<sup>2</sup> Politik. Djuga ditetapkan djatah mengenai djumlah konferensi<sup>2</sup> teori yang harus diselenggarakan ; djatah yang harus ditjapai dalam pemberantasan butahuruf ; selandjutnja ketentuan tentang mendirikan badan<sup>2</sup> pendidikan bagi orang<sup>2</sup> progresif diluar Partai dengan mendirikan „Universitas Rakjat“ diibukota Republik dan kota<sup>2</sup> lainnja, djatah

mengenai peluasan penerbitan dan peredaran literatur Partai, khususnya mengenai kenaikan oplah „Harian Rakjat“.

Pada umumnya djatah<sup>2</sup> yang ditjapai dalam lapangan pendidikan lebih baik daripada djatah<sup>2</sup> yang ditjapai dalam lapangan organisasi, bahkan beberapa Komite sampai berhasil melampaui djatah yang ditetapkan mengenai penjelenggaraan Sekolah Partai atau Kursus Partai. Tetapi ada juga bagian<sup>2</sup> penting yang belum tertjapai, diantaranya yang sangat serius ialah mengenai peredaran literatur Partai, khususnya peningkatan oplah „Harian Rakjat“.

Mengenai pentingnya HR didalam kehidupan Partai sehari-hari sudah tjukup djelas dan sudah tjukup difahami oleh kader<sup>2</sup> Partai. Tetapi mengenai pekerjaan praktis untuk perbaikan distribusi HR masih belum tjukup disadari. Belum tjukup disadari bahwa distribusi HR adalah pekerjaan politik yang penting. Peluasan pengaruh Partai lewat HR sangat tergantung pada besarnya oplah HR, dan oplah hanya dapat diperbesar jika distribusinya luas dan baik. Masalah distribusi adalah masalah pemeliharaan para langganan dengan telaten, masalah ketelitian dalam pembukuan dan dalam surat-menjurat, dan selanjutnya masalah ketertiban dalam penciciran uang langganan kepada administrasi HR. (Tawa). Hal<sup>2</sup> inilah yang tidak dilakukan setjara baik oleh sementara Komite.

Jang paling baik ialah jika Komite Partai sendiri memegang semua keagenan HR, akan tetapi pada tingkat organisasi kita sekarang hal yang demikian terlampaui banyak meminta tenaga dan fikiran dari fungsionaris<sup>2</sup> Komite. Oleh karena itu adalah keliru, jika sesuatu Komite mengambilalih keagenan dari agen yang sudah berdjalan lantjar, hanya dengan alasan bahwa agen tersebut bukan orang yang ditundjuk oleh Komite. Tindakan sematjam itu mungkin bisa memetjahkan kesulitan keuangan Komite yang bersangkutan untuk waktu yang sangat pendek, tetapi sebaliknya bisa menimbulkan kerugian<sup>2</sup> yang besar dalam politik dan organisasi Partai.

Djadi, titikberat dalam memajukan HR sekarang ialah dalam memperbaiki distribusi. Distribusi HR harus dianggap sebagai pekerjaan politik yang penting. Hanya dengan perbaikan distribusi: oplah HR dapat ditingkatkan, dan hanya jika oplahnya besar pengaruh politik Partai yang dibawa HR dapat mentjapai massa yang luas. Masalah distribusi HR harus menjadi tanggungjawab sekretaris<sup>2</sup> Komite dan semua kader penting Partai.

Di-tengah<sup>2</sup> kesibukan seluruh Partai melaksanakan Plan Tiga Tahun Pertama dan menyesuaikan organisasi Partai dengan situasi revolusioner yang berkembang tjepat, ada beberapa kawan kita yang tidak mau tahu dengan semuanya ini. Kawan<sup>2</sup> ini bukannya sibuk dengan mengkonsolidasi Partai dan kemenangan<sup>2</sup> Rakjat.

tetapi mereka sibuk dengan „mengkonsolidasi diri“, yaitu „memperkaya diri“. (tawa). menjadi „pahlawan keluarga“ (tawa) atau tenggelam dalam kemesuman moral burdjuis. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan Rakyat dan Partai untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat pusat atau daerah, di-dewan<sup>2</sup> pemerintah daerah atau di-kedudukan<sup>2</sup> lain, mereka „bukanja mentjurahkan segenap tenaga dan fikirannja untuk memenuhi mandat Rakyat dan Partai, tetapi sibuk dengan „urusan sendiri“. Kita mengetahui bahwa kawan<sup>2</sup> ini sering berkata dalam hatinya, bahwa orang<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> lain yang berkedudukan sama dengan mereka berbuat djauh lebih buruk. Tetapi kawan<sup>2</sup>, bukanlah orang<sup>2</sup> yang berbuat buruk itu harus ditjontoh! (Tawa).

Dalam masalah ideologi pimpinan Partai tidak kenal ampun, tetapi tidak akan buru<sup>2</sup> mengambil tindakan memetjat kawan<sup>2</sup> ini, dan akan dengan telaten menjedarkan mereka bahwa mereka sedang berada di-djalan yang salah dan supaya kembali kedjalan yang benar. Pimpinan Partai selamanya menjajang dan mentjintai anggota<sup>2</sup> Partai, dan djika ada yang berbuat salah, pimpinan dengan telaten, sabar dan dengan tjara meyakinkan berusaha mengembalikannja kedjalan yang benar selama yang bersangkutan masih mau memperbaiki diri. Tetapi djika ternyata bahwa keadaannja sudah berlarut<sup>2</sup> dan tidak ada tanda<sup>2</sup> bahwa „sisakit“ akan sembuh, malahan sudah ada tanda<sup>2</sup> bahwa penjakitnja akan menular kepada kawan<sup>2</sup> lain sehingga akan mengendorkan persatuan dan disiplin didalam Partai, maka tidak ada djalan lain ketjuali terhadap pembawa „penjakit menular“ itu harus diambil tindakan disiplin dengan memetjatnja dari Partai berdasarkan Konstitusi Partai. (Tepuktangan lama).

Tetapi senantiasa hendaklah dungat, bahwa kelemahan ideologi didalam Partai tidak mungkin diberantas hanya dengan memetjati elemen<sup>2</sup> yang korup dan bermoral bedjat sadja. Ia harus diatasi dengan meningkatkan kesedaran Marxis-Leninis diseluruh Partai, dan oleh karena itulah bagian pendidikan dari Plan Tiga Tahun Partai harus senantiasa mendapat perhatian yang utama, baik ketika menyusun Plan maupun dalam pelaksanaannja.

Berhubung dengan itu didalam menyusun Plan 3 Tahun Kedua yang akan datang peladjaran filsafat Materialisme Dialektik dan Histori harus menjadi matapeladjaran terpenting disemua Sekolah dan Kursus Partai. Selandjutnja Sekolah Partai Central dan Sekolah<sup>2</sup> Partai Daerah Besar harus mendjam<sup>2</sup> kesatuan teori Marxisisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia disamping merupakan perpaduan badan pendidikan dengan badan penjelidikan (research). Sekolah Partai Central dan Sekolah Partai Daerah

Besar selandjutnja mempunjai tugas untuk mendidik kader' pekerdja teori ; harus meneruskan mendidik pekerdja' politk dan organisasi ; dan selandjutnja mendidik guru' untuk berbagai mata-peladjaran untuk Sekolah<sup>2</sup> Partai Dacrah Besar. Berhubung dengan itu sjarat<sup>2</sup> untuk mendjadi siswa harus lebih dise-takan dengan tugas<sup>2</sup> ini dan Akademi Ilmu Sosial „Al-harcham" harus ambil bagian penting dalam melaksanakan tugas<sup>2</sup> tersebut.

Mengingat pengalaman dalam menyusun dan kemudian merevisi Plan 3 Tahun Pertama maka penjsusunan dan penetapan Plan 3 Tahun Kedua harus dilakukan lebih objektif dan realis. Untuk ini, laporan<sup>2</sup> detail yang objektif dari CDB<sup>2</sup> kepada Buo Plan CC merupakan sjarat yang tidak boleh tidak harus dipenuhi.

### (5) Memperkuat, Memperluas dan Memperbaharui Partai

Didalam menghadapi tugas<sup>2</sup> baru dari Partai yang akan diletakkan oleh Kongres Nasional ke-VI, kita harus membikin Partai dan gerakan massa kita mendjadi satu tubuh perkasa, yang berdiri tegak, dan menatap kedepan, karena mempunjai tulang punggung yang kuat. Tulangpunggung Partai ialah pemimpin<sup>2</sup>nja yang sudah terdidik dan terus mendidik diri dalam ilmu Marxisme-Leninisme dan dalam perjuangn revolusioner. Tulangpunggung gerakan massa ialah seluruh Partai kita. Dengan tulangpunggung Partai yang kuat kita mendjadiakan seluruh Partai tulangpunggung daripada gerakan massa.

Tugas<sup>2</sup> urgen daripada Partai sesudah Kongres Nasional ke-VI pada pokoknja masih tetap seperti sebelum Kongres Nasional ke-VI, jaitu menggalang front persatuan nasional dalam arti memperbaiki pekerdjaan dilapangan ini, dan bersamaan dengan itu meneruskan pembangunan Partai dalam arti mengkonsolidasi dan meluaskan Partai. Dua tugas ini tak dapat di-pisah<sup>2</sup>kan satu sama lain. Berhubung dengan ini harus terus digemblerg kesatuan fikiran dan kesatuan sikap didalam Partai mengenai front persatuan nasional, sebab kalah atau menangnja revolusi Indonesia ditentukan oleh berhasil atau tidaknja klas proletar menggalang front persatuan nasional. Tetapi supaya Partai bisa bulat mengenai persoalan front persatuan nasional, maka haruslah senantiasa terdapat kebulatan mengenai ideologi, mengenai ajaran<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme dan pentrapannja di Indonesia.

Setiap fikiran dan perbuatan yang merugikan front persatuan nasional, harus dianggap sebagai suatu kesalahan terhadap Partai, terhadap Rakjat, terhadap revolusi dan harus segera diambil tindakan untuk membetulkannja. Setiap fikiran dan perbuatan yang

merugikan persatuan didalam Partai, jaitu sjarat utama untuk ada dan kuatnja front persatuan nasional, harus dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Konstitusi Partai, dan oleh sebab itu tidak boleh dibiarkan.

Sedjak bulan Maret 1958 pekerdjaan menyesuaikan organisasi Partai dengan situasi jang berkembang tjepat sudah kita mulai setjara menjeluruh. Ini berarti terus menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan gerakan revolusioner, sehingga dapat diselesaikan dengan tepat dan pada waktunja kontradiksi antara organisasi dan situasi, antara pimpinan dan anggota, antara Partai dan massa. Tetapi, walaupun tidak sedikit djumlah kader jang sudah dipromosikan dan diberi tugas<sup>2</sup> jang lebih bertanggungjawab, walaupun pembagian pekerdjaan dan pembagian waktu sudah diatur lebih efisien, kenjataanja pekerdjaan masing<sup>2</sup> kader tidak bertambah ringan, bahkan sebaliknya. Kenjataan ini membuktikan, bahwa sebelum *penjesuaian* banyak hal<sup>2</sup> jang harus dikerdjakan, tetapi tidak dikerdjakan, banyak persoalan Rakjat jang harus dipetjahkan, tetapi tidak dipetjahkan.

Sekarang, sesudah dimulai dengan *penjesuaian* memang rangkaian pekerdjaan masing<sup>2</sup> kader umumnja belum berkurang, tetapi kita sudah mendjadi lebih mampu dalam memetjahkan semua persoalan dan dalam mengerdjakan semua pekerdjaan Partai dan massa. Pekerdjaan *penjesuaian* masih djauh dari selesai; dan masih harus lebih dipertjepat, antara lain dengan djalan memperluas djumlah anggota<sup>2</sup> Pleno Komite<sup>2</sup> Partai, mengadakan pembagian pekerdjaan dan pembagian waktu kerdja jang lebih rasionil, menemukan bentuk<sup>2</sup> baru jang lebih tjepat dalam mendidik dan melatih kader di-sektor<sup>2</sup> jang diperlukan. Satu hal jang sudah pasti jalah, bahwa sesudah dimulai dengan *penjesuaian* pada umumnja kader<sup>2</sup> Partai bekerdja dengan gembira, dengan penuh jiwa dan bersemangat, karena semua persoalan jang dihadapi oleh Partai dan massa dapat dipetjahkan, dan semua pekerdjaan jang harus dikerdjakan dapat dilaksanakan.

Kewadajiban kita sekarang jalah meneruskan pembangunan Partai. Semojan kita untuk ini sekarang jalah *„memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai”*. Hanja dengan Partai jang demikian akan ada djaminan untuk mentjapai sukses dalam memperbaiki pekerdjaan front persatuan nasional dinegeri kita.

Memperkuat Partai berarti per-tama<sup>2</sup> mengkonsolidasi dan mengembangkan hasil<sup>2</sup> Plan 3 Tahun Pertama; menjusun Plan 3 Tahun Kedua jang lebih objektif dan realis serta mensukseskan pelaksanaannja; memeriksa kembali seluruh barisan Partai untuk mentjari kelemahan-kelemahan Partai supaya dapat dilikwidasi,

selain itu mempergiat pekerjaan untuk memelihara kemurnian ideologi Partai. Kita harus tidak henti-hentinya mengintensifkan pelajaran teori Marxisme-Leninisme, terutama dikalangan pimpinan Partai disemua tingkat. Kita harus meningkatkan gerakan Komunis yang sudah besar sekarang menjadi organisasi Komunis yang tidak hanya besar karena ia meliputi seluruh negeri dan sukubangsa, melainkan juga merupakan organisasi yang aktif dan yang memimpin di-tiap<sup>2</sup> lingkungan Rakyat yang berjuang untuk perbaikan nasib dan haridapan yang lebih baik, sampai pada lingkungan yang se-ketjil<sup>2</sup>nja. (*Tepuktangan*). Setiap anggota Partai harus merupakan elemen yang aktif dilingkungannya masing<sup>2</sup>, berarti mengembangkan individualitet masing<sup>2</sup> anggota untuk tujuan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa.

Ringkasnja, memperkuat Partai berarti mempertinggi kwalitet Partai, mempertinggi kwalitet dari semua organisasi Partai, yaitu Comite, Fraksi, Basis, Grup dan badan-badan Partai lainnya, dan semuanya ini berarti mempertinggi kwalitet tiap anggota Partai. Dengan Partai yang diperkuat bukan hanya kepribadian dan kewibawaan Partai terhadap Rakyat menjadi lebih besar, tetapi bersamaan dengan itu kepribadian dan kewibawaan Rakyat Indonesia juga menjadi lebih besar. (*Tepuktangan*).

Memperluas Partai berarti mengembangkan dan mengeratkan hubungan Partai dengan Rakyat dari semua sukubangsa diseluruh negeri. Ini berarti menjempurnakan badan<sup>2</sup> transmisi daripada Partai dan memperbanyaknja, mulai dari serikatburuh<sup>2</sup> sampai kepada organisasi-organisasi kepanduan, olahraga, rekreasi, turisme, gerakan dan pendidikan kanak<sup>2</sup>, dsb. yang dapat menghubungkan Partai dengan massa penduduk yang paling terbelakang atau paling atjuh-tak-atjuh terhadap persoalan<sup>2</sup> umum, yang sampai sekarang masih paling sulit diorganisasi. Pekerjaan massa daripada Partai harus lebih disempurnakan, per-tama<sup>2</sup> dengan meresapkan pengertian didalam Partai bahwa antara kepentingan Partai dengan kepentingan massa tidak ada perbedaan. Kita harus terus mengadakan perlawanan terhadap sektarisme yang berakibat mendjaubkan Partai dari massa banjak dan bisa membikin Partai terisolasi. Achirnja memperluas Partai berarti menambah djumlah anggota dan djumlah organisasi Partai. Hanya dengan djumlah anggota yang besar dan masing<sup>2</sup> aktif bisa dibangun front persatuan nasional yang luas dan betul<sup>2</sup> kokoh. Hanya dengan organisasi Partai yang luas bisa ditijptakan gerakan massa yang luas, yang memusat dan kuat untuk mempertahankan dan meluaskan hak<sup>2</sup> politik daripada Rakyat dan untuk mengubah imbangan kekuatan. Hanya dengan meluasnja keanggotaan dan organisasi

Partai, bisa terdjadi perkembangan yang tjepat, dan hanya dengan demikian Partai mampu memusatkan ketjerdasan Rakjat seluruh negeri dan menjadikan ketjerdasan itu sebagai tekad yang bulat dan aksi yang berdisiplin.

Ringkasnja, dengan memperbesar djumlah anggota dan organisasi Partai, dengan lebih mengkonsolidasi dan memperluas hubungan<sup>2</sup> seluruh anggota Partai dengan berdjuta-djuta Rakjat pekerdja Indonesia dengan perdjjuangan yang lebih gigih dalam memper tahankan kepentingan<sup>2</sup> pokok Rakjat pekerdja dan seluruh Rakjat Indonesia, kaum Komunis Indonesia akan melaksanakan dengan penuh kehormatan tugas<sup>2</sup> yang dihadapinja dalam zaman kini.

Memperbaharui Partai per-tama<sup>2</sup> berarti memperbaharui Konstitusi Partai, yaitu memasukkan kedalam Konstitusi Partai kemenangan<sup>2</sup> yang telah ditjapai semendjak Kongres Nasional ke-V dalam lapangan politik dan organisasi. Seluruh Konstitusi Partai dan tiap fasal daripada Konstitusi harus mentjerminkan kebenaran prinsip<sup>2</sup> organisasi Partai tipe Lenin. Fasal<sup>2</sup> daripada Konstitusi ditudjukan untuk memperbesar daya memobilisasi, daya mengorganisasi serta daya memimpin daripada Partai.

Memperbaharui Partai djuga berarti bahwa Partai harus senantiasa bekerdja menurut Plan, Plan yang meliputi seluruh Partai dan seluruh negeri. Selandjutnja kader<sup>2</sup> Partai tidak boleh bekerdja setjara spontan atau dengan me-raba<sup>2</sup>, atau menetapkan politik dan bekerdja hanya berdasarkan perasaan sadja, tetapi mereka harus bekerdja berdasarkan hasil<sup>2</sup> penjelidikan (research) atau bekerdja setjara ilmiah untuk memperbaiki pekerdjaan praktis mereka dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama massa kaum buruh dan kaum tani. Ini berarti bahwa Partai kita harus membiasakan diri bekerdja setjara ilmiah, bekerdja dengan mengadakan penjelidikan<sup>2</sup>, eksperimen<sup>2</sup>, pentjataan tiap<sup>2</sup> perkembangan dengan teliti yang disusul dengan perenungan. Yang terakhir, dan ini yang masih sering dilupakan oleli kawan<sup>2</sup> kita, ialah penjimpulan daripada hasil<sup>2</sup> penjelidikan<sup>2</sup>, eksperimen<sup>2</sup>, pentjataan<sup>2</sup> dan perenungan-perenungan. Kemalasan atau kelengahan menjimpulkan ini berarti mengerdjakan pekerdjaan separoh<sup>2</sup>, tidak serius dan dengan sendirinja tidak membantu mengembangkan pekerdjaan Partai. Hanya dengan bekerdja setjara ilmiah kita dapat menghindari bekerdja sebagai mesin yang mendjemukan, dan setiap persoalan, djuga yang nampaknja biasa dan remeh, dapat kita petjahkan setjara kreatif sesuai dengan tempat dan waktunya.

Memperbaharui Partai djuga diartikan mempertinggi kehidupan intern Partai, terutama dengan senantiasa setia pada azas sentral-

isme-demokratis dan dengan mengembangkan kritik dan selkritik. Partai harus senantiasa berada dalam suasana berlomba dalam melaksanakan Plan, dalam mengembangkan daya-tjpta masing-masing anggota dan dalam memperkuat kesatuan Partai dalam segala hal. Oleh sebab itu fasal<sup>2</sup> mengenai hal<sup>2</sup> anggota harus dididjundjungi tinggi dan setiap pelanggaran atas hak<sup>2</sup> anggota itu harus dianggap sebagai kesalahan yang serius.

Memperbaharui Partai samasekali tidak berarti membikin „Partai Baru“. Partai kita adalah tetap Partai tipe Lenin, Partai yang terus-menerus memperbaharui diri agar selamanya dapat memimpin keadaan.

Dalam rangka memperbaharui Partai adalah sangat penting untuk mengadakan gerakan memperbaiki tjara<sup>2</sup> memimpin yang didasarkan atas perpaduan seruan<sup>2</sup> umum dengan tuntunan-kongkrit dan perpaduan pimpinan dengan massa. Gerakan memperbaiki tjara<sup>2</sup> memimpin ini dimulai oleh kader<sup>2</sup> atasan yang bertanggungjawab, dengan sembojan „*atasan memberi tjontoh kepada bawahan*“. Perbaikan tjara<sup>2</sup> memimpin ini terutama ditujukan untuk mentjegah tjara<sup>2</sup> memimpin yang birokratis, sektaris dan subjektif, singkatnja yang tidak konsekwen memegang garis massa. Perbaikan tjara<sup>2</sup> memimpin ini akan membawa Partai lebih tjepat terkonsolidasi dilapangan politik, organisasi dan ideologi dan akan lebih mengeratkan hubungannya dengan massa Rakyat sebagai djaminan untuk dapat mendorong perkembangan situasi lebih tjepat.

Sembojan „*atasan memberi tjontoh kepada bawahan*“ tidak boleh dibatasi pada lapangan kehidupan politik dan kehidupan organisasi saja, melainkan setjara berangsur-angsur seluruh kehidupan se-hari<sup>2</sup> dari kader<sup>2</sup> atasan harus dapat didjadikan tjontoh, misalnja tentang kesederhanaan, kebijaksanaan dan tentang moral Komunis.

Memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai hanya dapat terlaksana djika didalam Partai betul<sup>2</sup> terdjamin hegemoni daripada ideologi proletariat, djika ideologi burdjuis ketjil dan ideologi burdjuis selalu dikikis dan dibersihkan dari Partai, sehingga terdjamin kemurnian Partai dilapangan politik, organisasi dan ideologi.

Pekerdjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai bukan „pekerdjaan musiman“, tetapi pekerdjaan yang terus-menerus harus kita lakukan. Dengan demikian kita mentjiptakan sjarat bagi Partai untuk selamanya dalam kedudukan berinisiatif dan selamanya militan.

Pekerdjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai

berarti juga, bahwa kesalahan<sup>2</sup> jang sudah pernah diperbuat diusahakan djangan sampai terulang lagi dan dipeladjar sungguh<sup>2</sup> sumber<sup>1</sup> daripada kesalahan-kesalahan itu. Disinilah pentingnja bagi kader<sup>2</sup> Partai untuk mempelajari se-dalam<sup>2</sup>nja sedjarah Partai kita, sedjarah kesalahan<sup>2</sup>, kegagalan<sup>2</sup> dan sukses<sup>2</sup>nja. *Djika terdapat kesalahan baru harus diusahakan melokalisasinja dan melawannja dalam waktu jang pendek. Djika satu kesalahan sudah dapat diatasi djangan ada fikiran se-olah<sup>2</sup> kita sudah sembuh samasekali daripada penyakit itu sehingga mengurangi kewaspadaan kita.*

Jang terpenting sekarang dalam mempertinggi kewaspadaan adalah melawan dengan sekuat tenaga bahaya revisionisme-modern. Melawan ini berarti menegakkan semua prinsip Marxisme-Leninisme, melawan segala fitnahan terhadap benteng utama Sosialisme dan perdamaian, jaitu Uni Sovjet, dan terhadap PKUS; aktif mendjelaskan peranan jang menentukan dan peranan pelopor dari PKUS dan Uni Sovjet dalam menghanturkan imperialisme sampai ke-akar<sup>2</sup>nja. (*Tepuktangan lama*). Melawan revisionisme-modern berarti melawan sovinsisme sebagai musuh terbesar daripada perdjjuangan proletariat internasional untuk membebaskan dirinja, berarti menegakkan pandji<sup>2</sup> internasionalisme proletar dan membikin internasionalisme proletar mendjadi sesuatu jang wadjar dikalangan Rakyat jang sedang mendjalankan perdjjuangan anti-imperialis. Melawan revisionisme-modern berarti melawan rasa puas-diri jang bersumber pada subjektivisme burdjuis ketjil.

Gerakan Komunis di Indonesia, seperti halnja dengan gerakan Komunis sedunia, sekarang ini sudah lebih kokoh daripada masa-masa jang lampau. Gerakan Komunis sedunia jang semakin monolit (bulat) telah memberikan pukulan jang menentukan pada revisionisme-modern. Akan tetapi kaum Marxis-Leninis tidak boleh menganggap sepi kenyataan bahwa revisionisme Tito masih ada, dan oleh karena itu perdjjuangan melawan revisionisme, bahaya utama dalam gerakan Komunis sedunia, tidak boleh mendjadi lemah. (*Tepuktangan lama*).

Untuk memelihara kewaspadaan didalam Partai harus dikembangkan kebiasaan jang sudah kita tanamkan sesudah Kongres Nasional ke-V, jaitu kebiasaan mengadakan gerakan pembetulan fikiran. Partai sudah ber-kali<sup>2</sup> mengorganisasi gerakan pembetulan fikiran dengan mewadjabkan anggota<sup>2</sup> Partai mempelajari buku<sup>2</sup> teori jang ditentukan atau melaksanakan suatu instruksi jang khusus untuk tudjuan itu. Sebagai tjontoh, untuk melawan fikiran ke-kiri<sup>2</sup>an semua kader Partai diwadjabkan mempelajari buku Lenin „Komunisme Sajak Kiri, Penyakit Kanak<sup>2</sup>“, dan untuk mem-

perbaiki pekerjaan dilapangan front nasional diwajibkan mempelajari buku Kawan Mau Tje-tung „Tentang Mengurus Setjara Tepat Kontradiksi Dikalangan Rakjat“ ; untuk mempertahankan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari dan jangan menjadi sombong sesudah Partai keluar sebagai pemenang dari tiga kali pemilihan. Politbiro pernah mengeluarkan instruksi gerakan pembetulan pikiran ; ketika persatuan kaum Komunis sedunia diserang oleh revisionis<sup>2</sup> LKJ, Politbiro melantjarkan gerakan pembetulan pikiran untuk mempertebal semangat patriotisme dan internasionalisme proletar. Begitulah selanjutnya Partai harus sering melantjarkan gerakan<sup>2</sup> pembetulan pikiran untuk mempertinggi kewaspadaan dan memperbaiki pekerjaan Partai.

### (6) Pimpinan Partai Pada Gerakan Massa

Perjuangan untuk memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai tidak mungkin berhasil jika tidak erat dihubungkan dengan perjuangan untuk memperkuat dan memperluas demokrasi. Sedangkan perjuangan untuk memperkuat dan memperluas demokrasi tidak akan berhasil dengan baik jika tidak setara erat dihubungkan dengan pimpinan Partai pada gerakan massa melawan kaum kapitalis monopoli dan monopoli tuantanah<sup>2</sup> atas tanah. Undang<sup>2</sup> Dasar sekarang memang tidak memuat tentang melikwidasi hubungan<sup>2</sup> produksi kapitalis, tetapi ia memungkinkan adanya perubahan<sup>2</sup> (reform<sup>2</sup>) yang bersifat menggerowoti susunan pra-kapitalis yang sangat terbelakang dan mengurangi atau menghapuskan susunan<sup>2</sup> monopoli yang paling menindas dan paling menghisap (parasiter).

Perjuangan melawan kapitalis<sup>2</sup> monopoli dan perjuangan melawan monopoli tuantanah<sup>2</sup> atas tanah untuk mengadakan reform<sup>2</sup> berarti mengkonsolidasi dan meluaskan gerakan massa dibawah pimpinan Partai berdasarkan politik persatuan seluruh massa Rakjat. Ini berarti bahwa PKI harus meneruskan dan memperbaiki pekerjaannya membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani. Meneruskan pembangunan Partai tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan massa ini.

Sampai sekarang pekerjaan massa daripada Partai masih belum memuaskan. Salahsatu sebab mengapa belum memuaskan ialah karena masih belum tjukup banjak perhatian yang diberikan kader<sup>2</sup> Partai pada persoalan<sup>2</sup> praktis daripada massa. Sementara kader yang bekerja didalam organisasi<sup>2</sup> massa ada yang meremehkan pekerjaan<sup>2</sup> praktis sehari-hari<sup>2</sup>, sebab dianggapnya „kurang penting“ dan „kurang revolusioner“. Perhatian mereka terbatas pada „pe-

kerdjaan" jang berat", umpamanja memimpin rapat raksasa dan demonstrasi, memimpin pemogokan dan aksi<sup>2</sup> ber-kobar<sup>2</sup> lainnja. Semua pekerdjaan ini memang penting, tetapi ini bukan pekerdjaan saban hari. Tidak mungkin saban hari ada rapat raksasa, demonstrasi dan mogok. Apakah djika tidak ada pekerdjaan-pekerdjaan ini berarti Partai tidak ada kerdjanja? Sudah tentu tidak demikian! Massa mempunyai banyak sekali persoalan sehari-hari jang pemetjahannja mengharapkan bantuan Komunis. Umpamanja disatu pabrik, si-buruh-muda ingin berolahraga tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan waktu terluangnja, si-buruh-tua memikirkan harituannja, si-buruh-ahli ingin memperdalam pengetahuan kedjuruanja, sebagian lagi ingin membangun atau mengembangkan koperasi, jang lain ingin berrekreasi, dsb. Semuanja ini adalah persoalan se-hari<sup>2</sup> kaum buruh, dan Partai harus membantu mereka dengan pekerdjaan massa se-hari<sup>2</sup>.

Djadi anggota<sup>2</sup> Partai jang bekerdja dikalangan massa harus membantu memetjahkan kesulitan<sup>2</sup> se-hari<sup>2</sup> daripada massa, harus melakukan pekerdjaan se-hari<sup>2</sup> untuk massa. Tanpa pekerdjaan se-hari<sup>2</sup> jang baik tidak mungkin ada pekerdjaan<sup>2</sup> jang ber-kobar<sup>2</sup>.

Untuk memperbaiki pekerdjaan massa daripada Partai kita harus berpedoman *„berdjalan dengan dua kaki“*, ja tu mengkombinasikan pekerdjaan ber-kobar<sup>2</sup>, dengan pekerdjaan tekun. Dengan pekerdjaan ber-kobar<sup>2</sup> diartikan pekerdjaan jang mengobarkan semangat massa Rakjat seperti gerakan pembatalan KMB, anti-subversi asing, untuk pelaksanaan konsepsi Presiden Sukarno, untuk pembebasan Irian Barat, untuk penghantjuran „Dewan<sup>2</sup> Partikelir“, untuk pembasmian DI-TII dan „PRRI-Permesta“, untuk mendekritkan Undang<sup>2</sup> Dasar 1945 dsb. Gerakan jang ber-kobar<sup>2</sup> adalah penting, sebab ia mendemonstrasikan kebulatan tekad dan kekuatan persatuan Rakjat, dan membikin gerakan kemerdekaan dan gerakan untuk demokrasi tidak pernah berhenti, tetapi terus maju dengan langkah<sup>2</sup> jang makin lama makin tegap.

Gerakan ber-kobar<sup>2</sup> bisa terdjadi dari dua djurusan, jang pertama ialah jang dari semula sudah bersifat nasional seperti sudah terbukti dari gerakan dengan sembojan<sup>2</sup> „bebaskan Irian Barat“, „laksanakan konsepsi Presiden Sukarno“, „dekritkan Undang<sup>2</sup> Dasar '45“, „tjabut larangan kegiatan politik“, „batalkan Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing“ dsb. Jang kedua ialah dimulai sebagai gerakan lokal, tetapi kemudian mendjadi nasional, seperti gerakan „stop traktor maut“, gerakan „bebaskan Maesuri“, dsb. Gerakan ber-kobar<sup>2</sup> ada djuga jang hanja meliputi selapangan kerdja, seperti umpamanja gerakan „batalkan UU Darurat Tedjasukmana“. Pengalaman Rakjat Indonesia membuktikan, bahwa gerakan jang

ber-kobar<sup>2</sup> adalah sangat penting guna mengembangkan gerakan revolusioner. Hanya kaum reaksioner yang takut dan berusaha menghalangi adanya gerakan massa yang ber-kobar<sup>2</sup>. Ini bukan soal baru. Bung Karno biasa menjebutnya massa-aksi. Hanya kaum kepalabatu yang anti massa-aksi. (*Tepuktangan lama*).

Tetapi hanya dengan gerakan ber-kobar<sup>2</sup> saja tidak akan membawa hasil yang banyak. Sebab itu pekerjaan yang mendalam dan teliti, pekerjaan yang memetjahkan persoalan<sup>2</sup> praktis se-hari<sup>2</sup> daripada massa adalah perlu sekali. Umpamanya memekikkan „Ambilalah perusahaan Belanda!“ adalah tidak sukar akan tetapi untuk melaksanakannya kita menghadapi soal<sup>2</sup> yang pelik. Untuk mengambil sebuah kapal KPM yang sedang berlayar ditengah laut banyak persoalan yang harus dipetjahkan baik sebelum maupun sesudah pengambilalihan Begitu juga mengerjakan „bebaskan Irian Barat!“ adalah gampang, tetapi untuk melaksanakannya banyak persoalan yang harus dipetjahkan dan dikerjakan. Usaha untuk memetjahkan seribu-satu persoalan ini, itulah yang termasuk dalam pekerjaan se-hari<sup>2</sup> pekerjaan tekun yang meliputi pekerjaan organisasi, pendidikan, politik dan ideolog. Tanpa mengerjakan pekerjaan se-hari<sup>2</sup> ini dengan teliti dan telaten djangan diharap akan adanya aksi yang ber-kobar<sup>2</sup> yang berdisiplin. Hanya dengan mengerjakan pekerjaan tekun dengan baik maka gerakan yang ber-kobar<sup>2</sup> dapat membawa hasil seperti yang diharapkan.

Djadi pekerjaan yang mendalam dan teliti adalah penting sekali dan dikerjakan sebelum gerakan ber-kobar<sup>2</sup>. Semua persoalan harus difikirkan setjara komplit dan baru kemudian sesudah diteliti dengan seksama Partai menentukan garis yang bisa melahirkan gerakan yang ber-kobar<sup>2</sup>. Selanjutnya sesudah selesai gerakan ber-kobar<sup>2</sup> itu harus kembali bekerja dikalangan massa setjara tekun untuk lebih mempertinggi kesadaran politik dan kesadaran organisasi daripada massa dengan menemukan segala kekurangan serta menarik peladjaran<sup>2</sup> baru dari gerakan ber-kobar<sup>2</sup> yang sudah berdjalan itu. Tetapi tidak selalu harus dimulai dengan pekerjaan tekun, sebab kebalikannya bisa djuga terdjadi, yaitu dimulai dengan gerakan ber-kobar<sup>2</sup>. Tetapi yang perlu ialah mengkombinasikan kedua pekerjaan itu sehingga kita selalu „berdjalan dengan dua kaki“.

Kapan dapat dikatakan bahwa pekerjaan massa daripada Partai itu sudah baik, bahwa gerakan ber-kobar<sup>2</sup> sebagai kelanjutan dari pekerjaan tekun sudah membawa hasil yang diharapkan? Aksi yang berhasil dari sesuatu organisasi massa selamanya mengeratkan persatuan diantara anggotanya dan memperkokoh serta

memperluas organisasi basis dari organisasi massa itu. Sesuatu aksi dapat dikatakan berhasil jika membawa persatuan yang lebih erat dikalangan massa, bersamaan dengan itu berhasil mengkonsolidasi pengaruh Partai dan selanjutnya berhasil mempertinggi kwalitet tjarakerdja Partai dan mempertinggi tingkat ideologi aktivis<sup>2</sup> Partai. Jika tidak demikian, maka aksi itu tidak berhasil, dan aksi yang pasti tidak akan berhasil sudah semestinya tidak diadakan.

Pekerdjaan massa daripada Partai kita selama ini dapat berhasil, karena Partai mampu mengeluarkan seruan<sup>2</sup> politik yang sesuai dengan kehendak dan perasaan massa yang luas, seperti ketika Partai menjerukan pembasmian DI-TII dan „PRRI-Permesta“. Rakyat di-daerah<sup>2</sup> yang bersangkutan, bahkan diseluruh negeri bangkit serentak dan menjadikan seruan itu sebagai seruannya sendiri yang akan dilaksanakannya sendiri. Begitu juga sekarang dengan seruan yang tepat dari Partai mengenai tuntutan 6 : 1, yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak dan perasaan buruhtani dan tanimiskin Indonesia, kita yakin bahwa ber-djuta<sup>2</sup> buruhtani dan tanimiskin diseluruh tanahair akan bangun dan menjadikan tuntutan Partai itu menjadi tuntutanja sendiri. (*Tepuktangan lama*).

Sampai sekarang pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani masih tetap belum memuaskan. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Anggota<sup>2</sup> Partai yang berasal dari kalangan tani, walaupun sudah banyak bertambah jika dibandingkan dengan ketika Kongres Nasional ke-V Partai, tetapi menurut perbandingan belumlah banyak. Kader-kader Partai umumnya belum mengerti benar tentang hubungan-hubungan agraria. Fungsionaris<sup>2</sup> Partai masih banyak yang menghindari pekerdjaan didesa. Semua kekurangan ini mesti diatasi dengan segala kekuatan.

Apa yang sekarang sudah mulai kita kerdjakan, seperti misalnya mengirim anggota pimpinan Partai yang penting ke-desa<sup>2</sup> untuk mengadakan penjelidikan tentang hubungan agraria dan penghidupan kaum tani untuk waktu yang agak lama, mengadakan seminar<sup>2</sup> dan konferensi<sup>2</sup> tentang hubungan agraria dan penghidupan kaum tani semuanya ini harus kita teruskan dengan lebih teratur dan lebih sungguh<sup>2</sup>. Pekerdjaan mengkonsolidasi dan meluaskan organisasi tani revolusioner harus menjadi pekerdjaan yang utama daripada Partai. Kita tetap berpegang teguh pada apa yang sudah disimpulkan dalam Kongres Nasional ke-V, bahwa „tidak mungkin ada front nasional yang sungguh<sup>2</sup>“, dan bahwa „tidak mungkin kita berbitjara tentang peranan memimpin dari Partai Komunis dalam front ini selama Partai kita belum dapat mengorganisasi dan memimpin massa kaum tani yang luas“.

Gerakan „turun kebawah“ dengan mendjalankan „tiga sama“ telah membikin lebih terang bagi kita tentang hubungan<sup>2</sup> agraria, tentang masih mendalamnja sisa<sup>2</sup> feodalisme di-desa<sup>2</sup>. Pengetahuan-pengetahuan jang kita peroleh setjara langsung ini adalah djauh lebih berharga dan lebih berkesan daripada pengetahuan jang kita peroleh dari membatja ber-puluh<sup>2</sup> buku mengenai persoalan jang sama. Gerakan itu djuga telah membikin djelas, bahwa persoalan pokok dalam gerakan tani ialah masalah sandaran dan masalah pimpinan. Dalam keadaan jang bagaimanapun djuga kita harus selalu bersandar pada buruhtani dan tan.miskin, selandjutnja hanya dengan pimpinan kaum Komunis gerakan kaum tani bisa menjadi sekutu jang akrab dari klas buruh dalam melawan semua musuh Rakjat pekerdja.

Pekerdjaan mengkonsolidasi organisasi tani revolusioner tidak boleh dianggap sama seperti mengkonsolidasi serikatburuh. Menurut sifatnja organisasi serikatburuh selalu menghendaki pemusatan, sampai pada pemusatan setjara nasional dan pemusatan setjara internasional. Sebaliknya sasaran dari organisasi tani revolusioner terdapat ditiap desa jang masing<sup>2</sup> mempunyai kehususannya. Berhubung dengan itu tjara<sup>2</sup> pengorganisasian kaum buruh pabrik tidaklah dapat digunakan oleh organisasi tani, karena hal ini hanya akan membikin gerakan tani kaku dan sulit berkembang.

Pengalaman jang lain jang diperoleh dari gerakan „turun kebawah“ itu ialah bahwa untuk bisa memobilisasi se-banyaknja kaum tani diperlukan tidak hanya sebuah organisasi tani revolusioner dan sebuah organisasi koperasi, tetapi ber-puluh<sup>2</sup> matjam bentuk organisasi lain jang sesuai dengan keadaan penghidupan didesa dan dengan tingkat kebudayaan penduduk jang pada umumnya masih rendah. Semua bentuk perkumpulan, walaupun hanya untuk menghadapi sesuatu kedjadian atau keadaan tertentu, seperti kumpulan arisan atau kumpulan kematian, pendeknja semua usaha jang dapat mempersatukan kaum tani guna meringankan penderitaannja, harus didirikan dan didorong.

Selandjutnja memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani tidak dapat dipisahkan dari pekerdjaan memperkuat ideologi Partai, sebab hanya dengan kebulatan ideologi bisa terdapat antusiasme jang penuh didalam melaksanakan politik agraria Partai. Seperti telah didjelaskan diatas, politik perubahan agraria dari Partai tidaklah dilaksanakan sekaligus, melainkan selangkah demi selangkah, dan pada tingkat sekarang ini Partai baru tampil dengan tuntutan „turun sewa“ dan tuntutan „ketjil hasil“ lainnja jang bersifat tuntutan bagian.

Pelaksanaan tiap tuntutan bagian memerlukan kebulatan tekad

didalam pimpinan organisasi tani revolusioner yang langsung memimpin gerakan itu, dan juga menuntut kebulatan ideologi didalam Komite<sup>2</sup> Partai. Umpamanya untuk mensukseskan tuntutan setjara nasional 6 : 4 harus tidak ada kontradiksi antara kepentingan perseorangan dari anggota pimpinan organisasi tani revolusioner serta fungsionaris Partai yang bertugas dengan tujuan dari gerakan itu. Dengan perkataan lain, tidak boleh terdapat ideologi tuantanah dalam pimpinan supaya gerakan bisa berkembang dan dipimpin setjara antusias.

Dalam melantjarkan gerakan<sup>2</sup> nasional yang berat harus senantiasa disesuaikan ideologi pimpinan dengan tujuan gerakan, jika perlu dengan menjalankan perubahan didalam pimpinan; kebulatan ideologi dalam pimpinan akan melahirkan aksi<sup>2</sup> yang antusias, dan sebaliknya aksi<sup>2</sup> yang demikian akan mengkonsolidasi pimpinan dan gerakan. Sudah barang tentu hal ini tidak boleh diartikan penggantian pimpinan terus-menerus pada tiap kali pelaksanaan sesuatu aksi, dan tidak seharusnya diartikan pemertjatan atau pengisolasian terhadap fungsionaris yang perlu digeser itu.

Konferensi Nasional Tani PKI yang dilangsungkan pada pertengahan April 1959 adalah sangat penting artinya dalam usaha memperbaiki pekerjaan Partai dikalangan kaum tani. Dalam Konferensi itu antara lain disimpulkan bahwa :

Tugas terpenting revolusi Indonesia pada tingkat sekarang ialah menggulingkan kekuasaan musuh dari luar, yaitu imperialisme, dan menggulingkan kekuasaan tuantanah feodal dalam negeri. Tetapi dikatakan juga dalam dokumen<sup>2</sup> Partai kita, bahwa yang primer ialah menggulingkan imperialisme. Jadi ada 2 musuh pokok, yaitu imperialisme dan feodalisme, tetapi musuh yang terpokok ialah imperialisme.

Dalam pelaksanaan garis umum ini, yaitu pelaksanaan dari dua tugas pokok ini, ada dua ketjenderungan terdapat dikalangan kader-kader Partai. Yang pertama ialah ketjenderungan mau melaksanakan dua tugas ini, se-olah<sup>2</sup> satu samalain tidak ada hubungan. Sedangkan yang kedua ialah ketjenderungan yang mau membikin identik (sama) dua tugas ini sedjak permulaan. Kedua ketjenderungan ini harus kita lawan.

Dilihat dari sudut strategi atau dilihat dari tugas menyelesaikan Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar<sup>2</sup>nja, dua tugas tersebut diatas sangat erat hubungannya dan tak terpisahkan satu dengan lainnya. Strategi kita atau penyelesaian Revolusi Agustus sampai ke-akar<sup>2</sup>nja berarti menggulingkan kekuasaan imperialisme dan feodalisme.

Selanjutnya disimpulkan, bahwa :

Dilihat dari sudut taktik, dua tugas tsb. diatas, yaitu tugas menggulingkan kekuasaan imperialisme dan kekuasaan feodalisme tidak bisa dilakukan sekaligus. Dilihat dari sudut taktik pada waktu dan keadaan tertentu seperti sekarang ini, udjung tombak dampada revolusi per-tama<sup>2</sup> harus ditudjukan kepada musuh<sup>2</sup> asing (imperialisme) dan tuantanah<sup>2</sup> serta burdjuasi *yang menjadi agen<sup>2</sup> musuh-musuh asing itu. (Tepuktangan).*

Tetapi dengan kesimpulan<sup>2</sup> diatas tidaklah berarti bahwa PKI sekarang tidak menggabungkan diri pada kaum tani dalam melawan kaum tuantanah. PKI tetap berdiri dibarisan paling depan sekarang dan dikemudian hari, dalam membela kepentingan kaum tani, dan tentang ini disimpulkan sbb.:

Berdasarkan garis umum tsb. diataslah, maka dalam program tuntutan PKI tidak ditantumkan soal mensita milik tanah semua tuantanah. PKI hanya menuntut supaya milik tanah tuantanah<sup>2</sup> imperialis asing dan milik tanah tuantanah<sup>2</sup> bumiputera yang memihak DI-TII dan „PRRI-Permesta“ disita dan dibagikan dengan tjuma<sup>2</sup> kepada kaum tani. *(Tepuktangan. Seruan: „Betul“)*. Ini adalah adil dan ini adalah keharusan djika kita mau mengalahkan sampai ke-akar<sup>2</sup>nja gerombolan<sup>2</sup> bandit DI-TII dan „PRRI-Permesta“, karena disamping dapat bantuan kaum imperialis, gerombolan<sup>2</sup> bandit ini mempunyai penjokong<sup>2</sup> dari kalangan tuantanah bumiputera.

Berdasarkan garis umum tsb. diatas, dalam program tuntutanja PKI hanya menuntut pengurangan sewatanah bagi penggarap. Djika sekarang pada umumnja pembagian hasil panen antara penggarap dan tuantanah diatur 5 : 5, maka sekarang PKI menuntut supaya pembagian diatur 6 : 4, artinja untuk penggarap minimum 6 bagian sedangkan untuk tuantanah maximum 4 bagian. Bahwa PKI tidak bermaksud mensita tanah<sup>2</sup> tuantanah yang tidak memihak imperialis, djelas sekali dari kesimpulan, bahwa tuantanah tidak akan mendapat kurang dari 25%, ketjual<sup>2</sup> yang selama ini memang sudah mendapat kurang dari 25%.

Kesimpulan penting lainnja yang diambil oleh Konferensi Nasional Tani ialah mengenai pembentukan Koperasi Rakjat pekerdja di-desa<sup>2</sup>. Partai sudah bertekad bulat untuk mengibarkan *tiga bendera koperasi*, yaitu *koperasi kredit, koperasi produksi dan koperasi djual-beli*, guna melawan penindasan dan pemerasan serta untuk memperbaiki penghidupan Rakjat pekerdja didesa.

Djuga telah disimpulkan, bahwa lewat koperasi<sup>2</sup> produksi orang<sup>2</sup> Komunis harus mengusahakan sedapat mungkin supaya produksi pertanian meningkat dengan mengadakan 5 prinsip mengerdjakan tanah, yaitu : „*Luku dalam, tanam rapat, perbanjak rabuk, per-*

baik diikut dan pengajaran". (Tepuktangan). Disamping 5 prinsip ini sudah tentu ada prinsip<sup>2</sup> lain yang harus dilaksanakan untuk menjamin produksi pertanian yang lebih besar, misalnya „sawah lawan hama, perbaiki alat pertanian, dsb.". Disementara daerah 5 prinsip andjuran Partai ini sudah disambut dengan gairah oleh kaum tani. Kaum tani pertjaja penuh akan maksud baik Partai dan karena itu menjambut dengan gembira Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti Partai yang membantu kaum tani mengerdjakan tanahnya dalam rangka menjambut Kongres Nasional ke-VI Partai. Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti ini harus kita bentuk se-banyak-nja, sebagai tanda bukti bahwa Partai kita memang ingin sungguh<sup>2</sup> bersatupadu dengan kaum tani dan sebagai alat pendorong perkembangan koperasi<sup>2</sup> produksi di-desa<sup>2</sup>. (Tepuktangan).

Dengan sungguh<sup>2</sup> melaksanakan putusan<sup>2</sup> Konferensi Nasional Tani yang dilangsungkan pada pertengahan April 1959 Partai melaksanakan andjuran guru besar kita, Friedrich Engels, yang mengatakan bahwa „..... untuk memenangkan kekuasaan politik partai ini harus per-tama<sup>2</sup> pergi dari kota<sup>2</sup> kedesa, harus menjadi satu kekuatan didesa". (Tepuktangan). (Friedrich Engels dalam „Masalah Tani di Perancis dan Jerman"). Karena Indonesia negeri kepulauan, maka „kedesa" harus juga diartikan kepantai, untuk membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi berdjuta-djuta kaum nelayan yang pada umumnya senasib dengan kaum tani. Persiapan politik dan ideologi untuk kedesa dan kepantai sudah tjukup, sekarang langkah<sup>2</sup> yang tegas dan organisasi yang rapi harus menjusul segala persiapan yang sudah ada. Lumpur sawah menjuburkan padi dan PKI, para petani bersatu, berdjuang, menjanji dan menari. (Tepuktangan).

Terus-menerus memperbaiki pekerjaan dikalangan kaum tani tidaklah berarti harus menterlantarkan pekerjaan Partai dikalangan kaum buruh. Sebaliknya PKI harus terus-menerus memperkuat kedudukannya dikalangan kaum buruh dan menarik bagian yang terbesar daripada massa kaum buruh kefihaknya. Sudah ter-njata bahwa pelaksanaan tuntutan<sup>2</sup> atas dasar prinsip „ketjil hasil" dan prinsip „keadilan, menguntungkan dan tahu batas" telah mempertinggi otoritet Partai dikalangan kaum buruh. Itu berarti bahwa bekerdja ber-kobar<sup>2</sup> dari Partai dikalangan kaum buruh sudah semakin baik, dan selandjutnja yang masih harus lebih diperbaiki ialah pekerjaan yang tekun, mendalam dan teliti dikalangan massa kaum buruh yang meliputi pekerjaan ideologi, pendidikan dan mempersatukan seluruh kaum buruh.

Berdasarkan pengalamannya kaum buruh Indonesia telah menjedari bahwa perdjuangannya untuk tuntutan<sup>2</sup> sosial-ekonomi

tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjuangannya politik dan adalah perlu sekali untuk meluaskan kesadaran ini dalam rangka melawan sisa<sup>2</sup> penjakit „ekonomisme“ dalam gerakan serikatburuh. Disamping itu setiap perjuangan politik serikatburuh seperti politik menuntut terbentuknya Kabinet Gotongrojong, politik ambilalih perusahaan<sup>2</sup> Belanda, harus selalu disertai dengan perjuangan perbaikan nasib. Demikian juga politik mengambilalih perkebunan-perkebunan Belanda oleh kaum buruh perkebunan tak dapat dipisahkan dari politik meluaskan transpor laut agar dapat mengangkut hasil<sup>2</sup> perkebunan itu.

Pekerjaan di-basis<sup>2</sup> serikatburuh harus mendapat perhatian lebih besar. Ketidakstabilan ekonomi dinegeri kita sudah tentu membawa akibat yang buruk bagi kehidupan sehari<sup>2</sup> daripada Rakyat; massa-onlah masih terus mengantjam kaum buruh; ditambah lagi dengan usaha<sup>2</sup> mengurangi hak<sup>2</sup> serikatburuh. Semuanya ini menimbulkan rasa gelisah dikalangan massa kaum buruh dan dapat mengakibatkan tindakan<sup>2</sup> putusasa atau tindakan<sup>2</sup> radikal<sup>2</sup>an jika tidak mendapat pimpinan yang tepat. Itulah sebabnya mengapa harus lebih banyak ditjurahkan perhatian untuk memperbaiki pekerjaan di-basis<sup>2</sup>.

Serikatburuh<sup>2</sup> Indonesia tidak seharusnya ragu<sup>2</sup> untuk memberikan pendidikan tentang Sosialisme kepada massa anggotanya, sebab tidak diragukan lagi bahwa massa kaum buruh Indonesia memandang Sosialisme sebagai satu<sup>2</sup>nja yang dapat mengachiri nasibnya yang tjelaka untuk se-lama<sup>2</sup>nja.

Harus ditijptakan segala matjam usaha guna mempertahankan dan meluaskan demokrasi di-basis<sup>2</sup>; penempelan koran<sup>2</sup> progresif di-pabrik<sup>2</sup> tidak seharusnya hanya bersifat insidentil tetapi harus menjadi aktivitet sehari<sup>2</sup> dari serikatburuh<sup>2</sup>. Semua kegiatan ini harus dipadukan dengan tuntutan<sup>2</sup> politik dan ekonomi dari kaum buruh dipabrik yang bersangkutan. Hanya dengan demikianlah serikatburuh<sup>2</sup> kita ber-angsur<sup>2</sup> menjadi sekolahan bagi Komunisme.

Pada tahun<sup>2</sup> belakangan ini bersama dengan seluruh Rakyat kaum buruh Indonesia memusatkan aktivitetnya untuk turut ambil bagian dalam menghantjurkan pemberontakan<sup>2</sup> kontra-revolusioner diberbagai daerah. Selain itu kaum buruh Indonesia telah membuktikan ketangkasanja dalam melaksanakan politik ambilalih perusahaan<sup>2</sup> Belanda.

Kaum buruh Indonesia juga telah membuktikan kemampuan untuk turut memetjahkan kesulitan<sup>2</sup> ekonomi negeri kita. Ketjuali semakin tjakap untuk membela nasibnja, juga makin tinggi rasa tanggungjawab nasionalnja. Serikatburuh<sup>2</sup> mengadakan usul<sup>2</sup>

jang kongkrit dan praktis guna melantjarkan transpor, menjehatkan djawatan<sup>2</sup> dan mempertinggi produksi serta memperbaiki kwalitetnja. Dalam hubungan ini semakin djelas bahwa pekerdjaan kita dikalangan buruh transpor masih belum sesuai dengan tuntutan situasi jang dihadapi negeri dewasa ini. Begitu djuga masih harus diperbaiki pekerdjaan untuk mempersatukan pegawai<sup>2</sup> dan mendorong mereka supaya memiliki semangat Revolusi Agustus 1945, sehingga mereka menduduki tempat jang terhormat sebagai pegawai jang patriotik dan setia mengabdikan kepada kepentingan Rakjat dan kepentingan revolusi. Kaum buruh jang bagian terbesar sudah memihak Partai harus tertus-menerus dididik dan ditingkatkan kesedaran politiknya oleh Partai.

*Bekerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani tetap merupakan bentuk kegiatan jang terpenting dan pokok daripada PKI. Berhasil atau tidaknja pekerdjaan front nasional sangat tergantung pada berhasil atau tidaknja pekerdjaan dikalangan kaum buruh dan tani. Front nasional adalah front persatuan antara Rakjat pekerdja, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil diluar kaum tani, dengan kaum penghisap, jaitu burdjuasi nasional. Tanpa adanya front persatuan jang kuat antara Rakjat pekerdja, terutama klas buruh dan kaum tani, tidak mungkin ada front persatuan nasional jang kuat dan konsekwen anti-imperialisme. Front nasional tanpa persekutuan buruh dan tani jang kuat adalah front nasional tanpa basis jang tahan udji.*

Bekerdja dikalangan massa pemuda pada waktu sekarang adalah salahsatu pekerdjaan massa jang terpenting daripada Partai. Pemuda Rakjat dalam Kongres kelimanja, jaitu dalam bulan November tahun 1956 telah memutuskan bahwa organisasi pemuda ini senantiasa akan berusaha untuk mendjadi pembantu jang setia dan terpertjaja dari Partai dalam melaksanakan tugas-tugas politiknya. (*Tepuktangan*). Ini adalah kemenangan jang besar bagi Partai kita, dan Partai harus mendjaga supaya pernjjataan kesediaan Pemuda Rakjat mendjadi pembantu Partai harus disertai dengan kesediaan dan kesanggupan seluruh Komite Partai memberi pimpinan dan pendidikan jang lebih baik kepada Pemuda Rakjat. Ini tidak berarti bahwa Partai membatasi diri hanya dengan bekerdja dikalangan Pemuda Rakjat. Partai harus mendorong maju seluruh gerakan pemuda dan menjadikannya pengabdian jang setia kepada Rakjat pekerdja, tanahair dan revolusi.

Sifat organisasi massa daripada Pemuda Rakjat harus senantiasa didjaga, tetapi bersamaan dengan itu Pemuda Rakjat adalah organisasi massa pemuda jang mempunyai kesedaran klas buruh, organisasi pemuda jang paling revolusioner, paling militan dan

paling patriotik. Sifat<sup>2</sup> jang baik ini hanya mungkin dimiliki oleh Pemuda Rakjat dibawah pimpinan Partai Komunis, dengan beladjar Marxisme-Leninisme dan dengan terus-menerus memperkuat kepertjajaan dan kesetiaannya pada Partai Komunis. Pendidikan teori dan politik revolusioner sudah menjadi soal jang urgen dalam Pemuda Rakjat jang sekarang beranggota lebihkurang 1 djuta orang. (*Tepuktangan*).

Untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan intelektual, persoalan intelektual di Indonesia perlu mendapat peninjauan jang lebih mendalam. Proses kelahiran dan pertumbuhan dari kaum intelektual dinegeri kita tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan kolonialisme. (*Tepuktangan*). Seluruh „pendidikan“ jang diberikan oleh kaum pendjadjah kepada kaum intelektual Indonesia ditujukan untuk kepentingan eksploitasinya dan oleh karena itu dibatasi hanya pada apa jang dibutuhkan oleh sistem pendjadjahan. Dengan demikian djumlah orang jang mendapat pendidikan menengah atau tinggi sangat terbatas dan pekerdjaan dalam lapangan mengembangkan ilmu oleh putera<sup>2</sup> Indonesia selalu dihalang-halangi. Oleh sebab itu, semendjak zaman pendjadjahan kaum intelektual Indonesia bersama Rakjat sudah bangkit untuk melawan penindasan dan penghinaan sehingga dengan demikian lahirah suatu tipe kaum intelektual jang patriotik dan berdjwa anti-kolonialisme. (*Tepuktangan*). Sedjarah kebangkitan nasional bangsa Indonesia mentjatat puntjak<sup>2</sup> seperti lahirnja Budi Utomo pada tahun 1908, lahirnja Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan meletusnya Revolusi Rakjat pada 17 Agustus 1945. Ketiga peristiwa sedjarah ini djuga ditandai oleh aktivitas revolusioner dari kaum peladjar Indonesia. Bagian tertentu dari mereka tidak ragu<sup>2</sup> memihak Rakjat dan gerakan revolusioner.

Tjita<sup>2</sup> jang terkandung didalam Revolusi Agustus 1945 mempertemukan dan mempersatukan seluruh kekuatan jang hendak menumpas kolonialisme sampai ke-akar<sup>2</sup>nja. Tjita<sup>2</sup> revolusi itu mempersatukan kaum buruh dan tani dengan kaum intelektual serta sampai batas<sup>2</sup> tertentu mempertemukan ilmu dengan praktek revolusi Rakjat, sehingga dengan demikian mendekatkan ilmu pada Rakjat dan menanamkan semangat kerakjatan pada kaum intelektual Indonesia.

Tetapi sesudah revolusi Rakjat 1945 mengalami kegagalan dan kaum burdjuis Indonesia sudah terbukti tidak mampu memberikan djalan keluar dari kesulitan<sup>2</sup> jang dihadapi oleh Rakjat dan negeri kita, maka dikalangan kaum intelektual nampak gedjala<sup>2</sup> pesimisme. Kedudukan burdjuasi Indonesia jang sangat lemah dilapangan ekonomi dan politik, jang memaksa mereka harus menjesuaikan diri

dengan syarat<sup>2</sup> yang ditentukan oleh kaum imperialis, mendapatkan pertermimannya pada ideologi dari sebagian kaum intelektual yang juga menundukkan sifat bimbang dan tidak konsekwen yang merugikan dunia keilmuan. Malahan juga ideologi kaum kepalabatu mendapatkan pembela<sup>2</sup>nja dikalangan intelektual seperti Prof. Dr. Sumitro dan Prof. Drs. Tan Goan Po yang menjadi tokoh<sup>2</sup> kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“. Demikian juga usaha<sup>2</sup> dari seqolongan kaum terpeladjar untuk menentang Kensepsi Presiden Sukarno dengan dalih<sup>2</sup> „ilmiah“ dan penjelenggaraan diskusi<sup>2</sup> terbuka diantara kaum intelektual yang ditudjukan untuk mentorpedo pelaksanaan „gagasan kembali ke UUD '45“, tidaklah mempertinggi martabat kaum intelektual tersebut, melainkan sebaliknya, mendiskreditkan dan menjauhkan mereka dari Rakjat banjak. (*Tepuktangan*).

Disamping mensuarah gedjala<sup>2</sup> buruk yang ada, dengan rasa bangga Partai kita dapat berbitjara tentang kaum intelektual yang sudah mulai dilahirkan dan ditjptakan oleh Rakjat pekerdja Indonesia yang berusaha melandjutkan tradisi kerakjatan dari kaum intelektual Indonesia.

Tetap, adalah satu kenyataan bahwa kemadjuan pekerdjaan Partai dikalangan kaum intelektual masih terlampau lambat dan tidak seimbang dengan kemadjuan<sup>2</sup> yang diperoleh di-lapangan<sup>2</sup> lain. Sebab itu para kader Partai dilingkungan kaum intelektual harus bekerdja lebih giat dan lebih baik dan harus berusaha supaya menjadi tjontoh dalam memperkaja dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan Rakjat.

Partai bersama Rakjat akan tetap memberikan penghormatan yang tinggi kepada kaum intelektual yang berdjwa progresif, seperti Dr. A. Rivai, Dr. Tjiptomangunkusumo dan Dr. Ki Hadjar Dewantara, dan yang sekarang antara lain diwakili oleh Presiden Dr. Ir. Sukarno. (*Tepuktangan lama*). Partai harus selalu memberikan bantuan dan dorongan dalam mempersatukan kaum intelektual Indonesia dan dalam usahanya yang mulia untuk menumpas semua yang kolot dan lapuk serta memperkaja dan mempertinggi taraf ilmu dinegeri kita.

Para sardjana dan pekerdja<sup>2</sup> kebudayaan anggota Partai, disamping mempertinggi mutu pengertian Marxisme-Leninisme masing<sup>2</sup>, mereka berkewadajiban memperluas dan memperdalam keahlian dan pengetahuannya untuk dapat membantu Partai dalam memberi djawaban yang se-baik<sup>2</sup>nja mengenai soal<sup>2</sup> yang timbul dilapangan ilmu dan kebudayaan atau mempersiapkan diri se-baik<sup>2</sup>nja agar dapat menjawab soal<sup>2</sup> apa sadja yang dihadapi oleh negeri dan Rakjat. Para guru anggota Partai, disamping harus berusaha untuk

mendjadi Marxis jang baik, djuga harus mendjadi pengadjar dan pendidik tipe baru, jang ahli dalam vaknja dan ditjunta oleh para murid dan orangtua<sup>2</sup> murid.

Partai harus meneruskan pekerdjaannja dikalangan kaum mahasiswa dan pemuda peladjar sekolah menengah. Sebagaimana djuga massa pemuda, maka kaum mahasiswa dan peladjar sekolah menengah, ketjuali jang sudah mendjadi korban ratjun ideologi imperialis dan tuantanah, djuga mempunyai semangat revolusioner dan tekad untuk mengabdikan kepada Rakjat pekerdja. Sukses<sup>2</sup> jang ditjapai oleh Partai dalam pekerdjaan dikalangan para mahasiswa dan peladjar sekolah menengah pada waktu<sup>2</sup> belakangan ini menunjukkan, bahwa dikalangan mahasiswa dan peladjar sekolah menengah Partai mempunyai banyak sahabat dan pentjunta. Pergeseran kekiri daripada seluruh kehidupan politik dinegeri kita telah mempengaruhi golongan<sup>2</sup> ini, telah membukakan mata mereka bahwa kaum sosialis kanan (PSI), Masjumi dan kaum reaksioner lainnja bukanlah sahabat Rakjat dan bukan pengabdikan kepentingan Indonesia. Dalam hubungan dengan ini adalah sangat penting, bahwa anggota<sup>2</sup> Partai jang mendjadi mahasiswa atau peladjar sekolah menengah dengan sungguh<sup>2</sup> mendjadi mahasiswa atau peladjar jang radjin dan baik.

Majoritet jang sangat terbesar dari massa wanita adalah jang paling tertindas hidupnja sebagai akibat daripada krisis ekonomi jang terus-menerus mentjengkeram negeri kita. Mereka adalah korban pertama daripada meradjalelanja pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan ekonomi dan sosial dinegeri kita. Baik setjara umum maupun didalam Partai sendiri, Partai memberikan perhatian khusus terhadap masalah wanita. (*Tepuktangan*).

Peristiwa penting telah terdjadi dalam kehidupan Partai kita dengan dilangsungkannja Konferensi Wanita Komunis, baik jang setjara regional maupun setjara nasional. Partai mendidik para wanita Komunis mendjadi wanita<sup>2</sup> jang inteleknya, kemauannja dan perasaannja berkembang se-luas<sup>2</sup>nja dan se-dalam<sup>2</sup>nja, agar mereka tidak hanja dapat membeberkan kekurangan<sup>2</sup> masyarakat sekarang, tetapi djuga tahu menjinari semua problem perdjuaan wanita untuk emansipasi dan untuk Indonesia Baru dan dunia baru dari semua segi, agar semua problem dapat dipetjahkan. Bersamaan dengan mengkonsolidasi dan meluaskan keanggotaan Partai dikalangan wanita, adalah kewadjiban Partai kita untuk menggalang organisasi massa wanita revolusioner jang besar, jang anggotanja ber-djuta<sup>2</sup>, sebagai sjarat jang penting untuk memperkuat

seluruh gerakan wanita dan gerakan massa pekerdja Indonesia pada umumnya.

Pekerdjaan khusus Partai untuk mengembangkan kebudayaan dan meningkatkan taraf kesedaran politik sukubangsa<sup>2</sup> merupakan pekerdjaan yang sangat penting berhubung dinegeri kita terdapat banjak sukubangsa yang tidak sama besar dan tingkat kemadjuannya. Mengenai hal ini dalam program umum Partai sudah dijelaskan bahwa kita menghendaki pemerintahan<sup>2</sup> daerah yang demokratis dan otonomi sukubangsa yang luas, sedangkan program tuntutan PKI menjetudju, otonomi daerah, artinya belum otonomi sukubangsa, asal untuk daerah<sup>2</sup> itu diadakan pemilihan<sup>2</sup> DPRD<sup>2</sup> dan Kepala<sup>2</sup> Daerah setjara demokratis dan dibentuk DPD<sup>2</sup> berdasarkan perwakilan berimbang. Dengan duduknya kaum Komunis dalam pemerintahan<sup>2</sup> daerah, bahkan disedjumlah daerah swatantra II Kepala Daerahnya orang Komunis dan majoritet mutlak anggota DPRD-nya terdiri dari orang<sup>2</sup> Komunis, pekerdjaan Partai dikalangan sukubangsa<sup>2</sup> dapat kemadjuan<sup>2</sup>. Berdasarkan pengalaman<sup>2</sup>, jalan untuk memperbaiki pekerdjaan dikalangan sukubangsa ialah terutama dengan memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani tiap<sup>2</sup> sukubangsa, karena kaum tani merupakan goiongan terbesar dari penduduk tiap daerah. Ketjuali itu usaha Partai untuk mengembangkan kebudayaan sukubangsa perlu lebih dipergiat.

Selanjutnya mengenai pekerdjaan Partai dikalangan minoritet keturunan asing, seperti keturunan Arab, Tionghoa dan Eropa, perlu diperhatikan bahwa kaum soviniis selalu berusaha untuk mengobarkan rasa purbasangka rasial terhadap warganegara<sup>2</sup> keturunan asing dengan ber-matjam<sup>2</sup> dalih seperti „melindungi kepentingan ekonomi nasional“, „melindungi kaum yang lemah“ dll. Politik rasial yang berbahaja ini tadinja di-kobar<sup>2</sup>kan oleh „Gerakan Asaat“, jaitu gerakan yang dipimpin oleh Asaat, sekarang tokoh pemberontak „PRRI-Permesta“. Tapi sekarang nampaknya politik ini djuga dianut oleh bagian<sup>2</sup> tertentu daripada golongan tengah, sehingga perhatian mereka tidaklah per-tama<sup>2</sup> ditujukan kepada musuh nasional kita yang pokok, jaitu imperialisme. Sebaliknya mereka mentjari „musuh“ yang sebenarnya bukan musuh.

Partai berpendapat dan berkejakinan bahwa warganegara keturunan asing tidak berbeda dengan warganegara<sup>2</sup> lainnya dan mereka merupakan potensi yang berguna dalam membangun suatu Indonesia Baru yang demokratis. Partai harus senantiasa menjelaskan kepada Rakjat bahwa musuh yang sebetulnya dari Rakjat Indonesia adalah imperialisme. Kita harus mengakui kenjataan, bahwa pekerdjaan Partai masih belum tjukup intensif dikalangan warganegara<sup>2</sup> keturunan asing, sedangkan mereka didalam meng-

hadapi serangan<sup>2</sup> rasial dan soviniis itu sangat memerlukan bantuan. Bantuan yang djudjur hanya dapat diberikan oleh Partai kita karena patriotisme dan internasionalisme proletarnya yang bebas dari segala bentuk soviniisme dan rasialisme. (*Tepuktangan*).

### (7) Djadikan Koperasi Djuga Sendjata Ditangan Rakjat Pekerdja

Pekerdjaan yang selama ini sangat kurang mendapat perhatian Partai ialah pekerdjaan mengembangkan koperas. Rakjat pekerdja. Ini mudah dimengerti karena kader<sup>2</sup> Partai yang terbatas djumlahnja harus ditempatkan dalam organisasi<sup>2</sup> massa yang paling mendesak dan langsung untuk pembangunan Partai sendiri.

Kita akan tetap waspada dan menentang tiap<sup>2</sup> propaganda dari kaum reaksioner, yang mengatakan se-olah<sup>2</sup> dengan koperasi sadja kita dapat mengachiri kekuasaan imperialis, bahwa kalau koperasi sudah besar dan luas, ekonomi imperialis „dengan sendirinja“ akan tidak berdjaja lagi. Ini adalah propaganda agen<sup>2</sup> imperialis yang bermaksud membius Rakjat Indonesia supaya tidur pulas dengan rajuan lagu koperasi, agar Rakjat Indonesia tidak mengorganisasi dan memobilisasi diri untuk setjara revolusioner mengachiri kekuasaan imperialis dan tuantanah. Kita djuga akan terus menentang penggunaan nama „koperasi“ oleh perusahaan<sup>2</sup> kapitalis dengan maksud untuk menghindari kewadajiban<sup>2</sup> sebagai perusahaan kapitalis dan untuk menipu Rakjat.

Tetapi, adalah keliru djika kaum Komunis tidak dengan sungguh-sungguh memakai djalan koperasi untuk mempersatukan Rakjat pekerdja, untuk mengurangi penghisapan<sup>2</sup> tuantanah, lintahdarat dan kapitalis atas diri Rakjat pekerdja, dan untuk meningkatkan hasil produksinja.

Sembojan<sup>2</sup> „tanah untuk kaum tani“, „pembagian tanah kepada kaum tani“ dan „milik perseorangan tani atas tanah“, serta tuntutan<sup>2</sup> seperti „turunkan setoran dan bunga uang“, „naikkan upah buruh tani“, dll. adalah sembojan<sup>2</sup> dan tuntutan<sup>2</sup> yang tepat. Sembojan<sup>2</sup> dan tuntutan<sup>2</sup> ini dapat mempersatukan seluruh kaum tani berkerumun disekeliling Partai. Kaum buruhtani dan tanimiskin menjambut hangat sembojan<sup>2</sup> dan tuntutan<sup>2</sup> ini, sedangkan kaum tanisedang dapat menjokongnja.

Tetapi djangan kita lupakan, bahwa tanisedang dan tanimiskin yang mempunjai sedikit tanah, menginginkan agar mereka dapat lepas dari tjengkeraman tukangidjon dan lintahdarat sekarang djuga, agar mereka dapat pasar yang baik bagi hasil pertaniannja, dapat membeli barang<sup>2</sup> kebutuhan mereka dengan harga yang pan-

tas, dan bahwa mereka djuga ingin supaya produksi pertaniannya meningkat. Untuk ini tidak ada djalan lain ketjuali kaum tanisedang dan tanimiskin harus diorganisasi didalam koperasi<sup>2</sup> jang dapat memberikan kredit, dapat mengusahakan pasar jang baik bagi barang<sup>2</sup> produksi mereka, dapat membeli barang<sup>2</sup> konsumsi dengan harga jang pantas dan dapat membantu mempertinggi produksi pertanian, peternakan dan perikanan. *Kaum tanimiskin dan tanisedang jang hanja mungkin mentjapai kebebasannya dengan pimpinan proletariat, akan lebih tebal kepertjajaannya kepada proletariat, djika Partai proletariat dapat mengorganisasi dan memimpin mereka dalam koperasi<sup>2</sup> untuk meringankan beban mereka sekarang djuga.*

Koperasi tidak hanja dapat didjadikan sendjata kaum tani, tetapi djuga dapat didjadikan sendjata Rakjat pekerdja lainnya. Kaum keradjan tangan dan kaum nelajan memerlukan organisasi koperasi agar mereka dengan teratur dan dengan harga jang pantas mendapatkan bahan<sup>2</sup> dan alat<sup>2</sup> untuk bekerdja, dan agar hasil pekerdjaan mereka tidak djatuh ketangan tengkulak sehingga harganya sangat murah. Kaum buruh, para pegawai dan kaum miskin-kota djuga membutuhkan koperasi agar dapat memenuhi kebutuhan<sup>2</sup> mereka akan barang<sup>2</sup> konsumsi dengan harga jang pantas. Kaum pedagang ketjil djuga dapat dikoperasikan agar mereka dapat mengurangi penghisapan kaum kapitalis besar dan lintah-darat. Ja, kaum peladjar sekolah menengah dan mahasiswa dapat menggunakan koperasi untuk mengatasi kesulitan<sup>2</sup>nja akan rumah pondokan, akan buku, menggunakan masa libur setjara baik, rekreasi, dan sebagainya.

Undang<sup>2</sup> Koperasi jang sudah ada sekarang dapat dipakai untuk memadjukan gerakan koperasi asal dipimpin oleh orang<sup>2</sup> jang djudjur. Untuk suksesnja, gerakan koperasi harus merupakan gerakan jang berdiri sendiri, mempunjai Peraturan Dasar jang demokratis dan dapat mempersatukan sebanyak mungkin koperator<sup>2</sup> setjara sukarela. Kesukarelaan adalah sjarat mutlak daripada koperasi. Selain daripada itu, sifat berdiri sendiri dan sifat non-politik daripada koperasi harus didjaga dengan keras.

Dalam membangun koperasi djanganlah kita lupa akan satu kenyataan, jaitu bahwa Rakjat pekerdja Indonesia sudah sedjak lama diketjewakan oleh koperasi<sup>2</sup> karena dipimpin oleh orang<sup>2</sup> jang tidak djudjur dan tidak tjakap, oleh orang<sup>2</sup> jang mendirikan koperasi untuk dengan sengadja menipu Rakjat. Kaum Komunis harus memberikan bukti, bahwa ada perbedaan besar antara koperasi<sup>2</sup> jang dipimpin oleh kaum Komunis dengan jang dipimpin oleh burdjuasi. Komite<sup>2</sup> Partai harus mengawasi dengan teliti dan

keras anggota<sup>2</sup> Partai yang memimpin koperasi, dan tepat pada waktunya mengkritik mereka atau menarik mereka dari koperasi jika ternyata mereka berbuat merugikan kepentingan Rakyat pekerja yang tergabung dalam koperasi yang dipimpinnya. Elemen<sup>2</sup> yang militan dan tidak mementingkan diri sendiri, yaitu elemen pemuda harus banyak ditarik dalam kegiatan koperasi, sebagai pembantu<sup>2</sup> yang setia daripada koperasi. (*Tepuktangan*).

\*\*

Kawan<sup>2</sup>!

Partai kita yakin, bahwa dengan memperkuat dan memperluas gerakan massa, dengan memperkuat dan memperluas demokrasi dan dengan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai, PKI akan menjapai hasil<sup>2</sup> yang lebih besar dalam mengubahimbangan kekuatan antara kaum imperialis, kelas tuantanah dan burduasi komprador disatu pihak, dan kekuatan Rakyat difihak lain. Ini berarti bahwa kita menjari djalan keluar dari keadaan negeri kita yang belum merdeka penuh dan setengah feodal sekarang.

Kawan<sup>2</sup>, marilah kita tetap bersatu untuk dengan segenap kekuatan yang ada pada kita masing<sup>2</sup> membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, untuk melaksanakan tuntutan<sup>2</sup> mendasak dari Rakyat dan Partai kita, yaitu peluasan hak<sup>2</sup> demokrasi dan pembentukan Pemerintah yang memenuhi rasa keadilan Rakyat, pembentukan Kabinet Gotongrojong seperti yang dimaksudkan oleh Konsepsi Presiden Sukarno. (*Tepuktangan lama*). Ini berarti kita mendekatkan Rakyat Indonesia kepada pelaksanaan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar<sup>2</sup>nya, kepada Indonesia yang bebas dari semua imperialisme dan bebas dari feodalisme, yaitu Indonesia Baru yang merdeka penuh dan demokratis. Ini berarti kita memperkuat front internasional anti-kolonial dan tjinta damai. (*Tepuktangan lama*).

Kawan<sup>2</sup>!

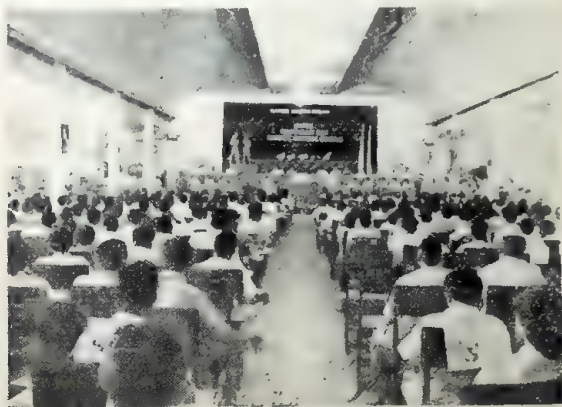
Segera sesudah Kongres ini selesai kita akan berangkat kemudian perjuangan yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dimana lebih dari 1,5 djuta Komunis dengan hati berdebar-debar menanti-nantikan hasil<sup>2</sup> Kongres yang bersedjarah ini, dimana lebih dari 88 djuta Rakyat Indonesia makin memerlukan adanya pengabdian yang tulus dari kaum Komunis, dimana seribusatu masalah besar dan ketjil yang pelik menunggu pemetjahan dan tenaga kaum Komunis untuk mendapat pemetjahan yang tepat. Menghadapi semuanya itu, kawan<sup>2</sup>, asal sadja kita senantiasa menggunakan Marxisme-Leninisme yang djaja sebagai pedoman

aksi<sup>2</sup> kita, asal sadja kita selalu kreatif melaksanakan hasil<sup>2</sup> Kongres ini, akan dapat kita atasi dan dengan PKI didepan Rakjat Indonesia pasti akan dapat merebut kemenangannya satu demi satu. (*Tepuktangan*).

Hidup Rakjat Indonesia dan Partai Komunis Indonesia! (*Tepuktangan. Pekik: „Hidup!“*).

Hidup persatuan nasional dan Republik Indonesia! (*Tepuktangan. Seruan: „Hidup!“*).

Hidup Partai<sup>2</sup> Komunis dan Partai<sup>2</sup> Buruh diseluruh dunia, Partai<sup>2</sup> Lenin yang menjadi inspirator dan organisator Rakjat pekerdja untuk dunia baru, dunia damai dan Sosialisme! (*Tepuktangan lama sekali Semua berdiri dan berseru: „Hidup PKI! Hidup Kawan Aidit!“*).



## PIDATO PENGANTAR UNTUK RENTJANA PERUBAHAN KONSTITUSI PARTAI

Disampaikan oleh Kawan M.H. LUKMAN, Wakil Sekretaris  
Djenderal I CC PKI, pada tanggal 9 September 1959

Kawan<sup>2</sup>,

Sudah hampir lima setengah tahun sedjak Partai kita mengadakan Kongres Nasional Ke-V pada bulan Maret 1954. Selama masa itu Partai kita dibawah pimpinan Komite Central yang diketuai oleh Kawan Aidit telah mengalami perubahan<sup>2</sup> besar (*Tepuktangan*). Djumlah keanggotaan Partai telah meningkat dari 165 206 mendjadi lebih dari 1.500.000. (*Tepuktangan lama, tentakan : „Hidup“*). Begitu djuga djumlah organisasi Partai telah meluas dan merata keseluruh tanahair. Pengaruh politiknya djuga telah meningkat dengan tjepat, sehingga baik kawan maupun lawan tidak sedikit jang merasa kagum. (*Tepuktangan*). Antara lain sebagai bukti daripada meningkatnja pengaruh politik jang setjara mengedjutkan itu ialah hasil jang telah ditjapai oleh Partai kita dalam pemilihan umum. Djika dalam pemilihan untuk Parlemen dan Konstituante pada tahun 1955 Partai kita memperoleh suara seluruhnja masing<sup>2</sup> lebih dari 6 djuta, maka dua tahun kemudian, dalam pemilihan untuk DPRD<sup>2</sup> pada tahun 1957, jang sampai sekarang belum dilakukan diseluruh daerah, Partai kita telah memperoleh suara seluruhnja kuranglebih 8 djuta. (*Tepuktangan lama*). Ini berarti bahwa djika pemilihan untuk DPRD itu dilakukan diseluruh daerah, maka suara jang bisa ditjapai oleh Partai kita pasti lebih dari 8 djuta.

Kawan<sup>2</sup>,

Gambaran jang lengkap mengenai perubahan jang dialami oleh Partai kita selama masa antara Kongres Nasional Ke-V dan Ke-VI, terutama jang mengenai kedudukan Partai kita dalam gelanggang politik nasional Indonesia, telah diuraikan dalam Laporan Umum CC jang diberikan oleh Kawan Aidit.

Tetapi apakah jang menjebabkan Partai kita boleh dikatakan telah bisa maju melompat dalam segala lapangan ?

Ada memang faktor<sup>2</sup> objektif dalam dan luarnegeri jang menguntungkan Partai kita, dalam arti membantu Partai kita dalam

mentjapai kemadjuan<sup>2</sup>. Faktor<sup>2</sup> dalam negeri yang membantu kemadjuan Partai kita ialah semangat revolusioner yang tinggi dikalangan massa Rakjat yang terutama telah ditjptakan oleh Revolusi Agustus '45; dan kegagalan Revolusi Agustus itu sendiri bukan sadja tidak mematahkan semangat, tetapi malahan merupakan bahan pembangkit kesedaran politik dan semangat revolusioner dikalangan massa Rakjat. (*Tepuktangan*). Dengan faktor luarnegeri dimaksudkan kemadjuan<sup>2</sup> yang ditjapai oleh kekuatan<sup>2</sup> Sosialisme, kekuatan<sup>2</sup> anti-kolonialisme dan tjunta-damai. Kemadjuan<sup>2</sup> dilapangan ekonomi, teknik dan kebudayaan yang ditjapai oleh negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis semakin nyata menunjukkan keunggulan<sup>2</sup> sistim Sosialisme atas kapitalisme. (*Tepuktangan*). Bukti yang hidup daripada keunggulan sistim Sosialisme atas kapitalisme mempunyai daya-tarik yang sangat kuat bagi kaum buruh, kaum tani dan kaum intelektual disemua negeri. Hal ini berarti sangat membantu dalam membangkitkan dan meningkatkan kesedaran politik daripada massa Rakjat umumnya dan membikin mereka lebih menaruh harapan dan kepercayaan kepada Sosialisme, kepada Partai Komunis. (*Tepuktangan*). Tidak perlu diterangkan lagi bahwa faktor dalam dan luarnegeri ini timbal-balik saling mempengaruhi.

Tetapi disamping faktor<sup>2</sup> objektif ini, ada faktor lain lagi yang bersifat menentukan djuga bagi kemadjuan melompat yang ditjapai oleh Partai kita, yaitu faktor intern Partai, faktor yang lahir dari dalam tubuh PKI sendiri. Yang dimaksudkan dengan faktor intern ini ialah adanya program politik dan program organisasi yang benar, atau biasa djuga disebut adanya garis politik dan garis organisasi yang benar daripada Partai.

Dalam bentuk apakah setjara pokoknja program politik dan organisasi itu dirumuskan? Tidak lain ialah dalam bentuk Konstitusi Partai.

Djadi, dengan perkataan lain dan setjara singkat dapat djuga dikatakan bahwa kemadjuan melompat daripada Partai kita pada pokoknja adalah djuga sebagai hasil daripada pelaksanaan Konstitusi Partai.

Kawan<sup>2</sup>,

Partai kita memang baru mempunyai Konstitusi yang agak sempurna mulai tahun 1951. Berhubung dengan kegagalan rentjana Kongres pada tahun 1948, karena didahului oleh Provokasi Madiun, maka Konstitusi Partai tahun 1947 yang kurang memenuhi syarat sebagai Konstitusi daripada Partai Marxis-Leninis terpaksa masih berlaku sampai akhir tahun 1950. Baru pada permulaan tahun 1951 Komite Central yang disusun baru dibawah pimpinan Kawan Aidit membuat Konstitusi Sementara untuk menggantikan

Konstitusi tahun 1947.

Dengan Konstitusi Sementara inilah kita berhasil membangun Partai, meskipun begitu kita mulai, begitu kita mengalami keadaan setengah dibawah tanah selama lebihkurang satu tahun, yaitu dengan mengamuknja Razzia Agustus Sukiman. Dengan berpedoman pada program politik dan program organisasi yang dirumuskan pokoknja dalam Konstitusi Sementara itu, kita telah berhasil mengubah kedudukan Partai kita dari Partai yang kecil dan terisolasi menjadi Partai yang agak besar dan mulai mampu menggalang front persatuan nasional. Keanggotaan Partai kita yang pada permulaan tahun 1952 hanya berdjumlah 7.910 dapat kita perluas menjadi 126.671 pada akhir tahun itu (*tepuktangan*) dan menjadi 165.206 ketika Kongres Nasional Ke-V pada bulan Maret 1954. (*Tepuktangan*). Sedjalan dengan bertambah besarnya kekuatan organisasi Partai, bertambah besar pula kemampuan Partai kita untuk memberikan pukulan<sup>2</sup> kepada kekuatan<sup>2</sup> reaksi dan untuk menarik kekuatan tengah kedalam front persatuan nasional. Demikianlah seterusnya perkembangan Partai kita dan perkembangan front persatuan nasional itu timbal-balik saling mempengaruhi. Dan dengan kekuatan front persatuan nasional inilah kita dapat memberikan pukulan<sup>2</sup> yang lebih keras lagi satu demi satu kepada kekuatan<sup>2</sup> pendukung utama daripada kaum imperialis dan tuantanah di Indonesia yaitu Masjumi-PSI, dimulai dengan pukulan yang mengakibatkan jatuhnya Pemerintah Sukiman. (*Tepuktangan*).

Hasil<sup>2</sup> dari pembangunan Partai berdasarkan Konstitusi Sementara Partai tahun 1951 inilah yang menjadi syarat menentukan bagi berhasilnja Kongres Nasional Ke-V Partai pada bulan Maret 1954.

Dalam Kongres Nasional Ke-V itu Konstitusi Sementara Partai, sesudah mengalami perbaikan<sup>2</sup>, disahkan sebagai Konstitusi tetap.

*Dengan sedikit pendjelasan diatas ini dapatlah disimpulkan, bahwa kemajuan melompat yang ditjapai oleh Partai kita selama ini merupakan bukti daripada kebenaran dan tepatnja garis politik yang ditetapkan oleh Kongres Nasional Ke-V dan kebenaran serta tepatnja pimpinan politik yang dijalankan oleh Komite Central Partai kita sesudah Kongres Nasional Ke-V. Juga kemajuan melompat itu merupakan bukti daripada kebenaran dan tepatnja garis organisasi yang ditetapkan oleh Kongres Nasional Ke-V dan kebenaran serta tepatnja pimpinan organisasi yang dijalankan oleh Komite Central Partai kita sesudah Kongres Nasional Ke-V. (Tepuktangan).*

Kebenaran garis politik memanglah harus sedjalan dengan ke-

benaran garis organisasi. Partai tidak akan bisa maju dan berkembang jika hanya salahsatu saja yang benar dan tepat.

Sebelum Konstitusi Partai tahun 1947 diganti, kelemahan dan kesalahan yang fundamental dan karena itu sangat besar membawa kerugian kepada Partai kita ialah kelemahan dan kesalahan dilapangan organisasi. Dengan Konstitusi Partai tahun 1947 memang tidak mungkin dijalankan garis organisasi dan pimpinan organisasi yang benar dan tepat. Konstitusi Partai tahun 1947 bukan saja sangat kurang sempurna, tetapi juga malahan memuat fasal<sup>2</sup> yang samasekali tidak sesuai dengan prinsip<sup>2</sup> organisasi Partai Komunis. Untuk menjabutkan satu tjontoh saja misalnja : dalam bab keanggotaan ada dimuat fasal mengenai apa yang disebut anggota istimewa yang terdiri dari organisasi massa. Sedangkan kesalahan pimpinan organisasi yang fundamental pada waktu itu, yang telah mengakibatkan Partai sebagai organisasi samasekali tidak merupakan kekuatan yang berarti, ialah terutama terletak pada pembentukan organisasi<sup>2</sup> Partai yang memakai nama Partai Sosialis dan Partai Buruh disamping mempertahankan organisasi PKI yang dibawahtanah. *Kesalahan ini sumbernja terletak pada kesalahan pimpinan organisasi yang setjara sukarela menempatkan diri pada kedudukan illegal atau semi-illegal. Ini berarti setjara sukarela membatasi aktivitet dan menjempitkan lapangan bergerak daripada Partai.* Sudah dengan sendirinja bahwa sebagai akibatnja yang wadjar ialah Partai tidak bisa menjadi besar dan kuat. Adalah satu prinsip organisasi Partai Komunis bahwa ia tidak boleh *setjara sukarela* bekerdja illegal atau semi-illegal.

Kesalahan dilapangan organisasi ini pada waktu itu tidak menondjol dimata umum, karena ia tidak difahami oleh umum dan djuga oleh kebanyakan anggota Partai sendiri. Kesalahan fundamental yang menondjol pada waktu itu ialah kesalahan dilapangan politik, jaitu kesalahan mengenai persetudjuan Linggardjati dan Renville. Padahal sebenarnja kesalahan Partai kita yang djuga fundamental pada waktu itu ialah kesalahan dilapangan organisasi. Kesalahan dalam pimpinan organisasi yang telah mengakibatkan Partai sebagai organisasi samasekali tidak merupakan kekuatan yang berarti, sesungguhnya djuga merupakan salahsatu sumber daripada politik kompromi Linggardjati dan Renville. Sikap yang sedjak semula telah mem-besar<sup>2</sup>kan kekuatan Belanda dan imperialisme lainnja, dan mengetjilkan kekuatan Revolusi Indonesia dengan sekutu<sup>2</sup>nja, jaitu kekuatan<sup>2</sup> anti-imperialis, ditambah dengan kesalahan dalam pimpinan organisasi yang menjebakkan ketjilnja kekuatan Partai telah lebih mendorong kedjurusan politik kompromi itu. Itulah sebabnja Partai kita pada waktu itu tidak

sadja dikatakan telah membuat kesalahan karena melepaskan atau kehilangan kebebasan dilapangan politik, tetapi djuga karena melepaskan atau kehilangan kebebasan dilapangan organisasi. Malahan Kawan Musso pada waktu itu suka mengatakan bahwa kesalahan politik Linggardjati dan Renville tidak akan berakibat begitu djauh, djika kita tidak membikin kesalahan dilapangan organisasi yang begitu berat dan prinsipil. Oleh karena itu djelaslah, bukan suatu kebetulan bahwa koreksi dilapangan organisasi djustru mendjadi bab yang pertama didalam Resolusi „Djalan Baru“. Kesalahan dilapangan organisasi, pada waktu itu pada pokoknja ialah tidak menempatkan PKI pada kedudukan yang semestinya sebagai Partai klas buruh dan pelopor revolusi, dan oleh Kawan Musso biasa djuga dikatakan „menempatkan Partai dibawah latja“.

Kawan<sup>2</sup>,

Dengan sedikit mengingatkan kembali kepada kesalahan Parlemb lebih djelas lagi dapat kita fahami bahwa Konstitusi Partai yang disahkan oleh Kongres Nasional Ke-V sungguh<sup>2</sup> merupakan partai dilapangan organisasi selama tahun<sup>2</sup> Revolusi Agustus '45 seperti yang dikemukakan didalam „Djalan Baru“ maka mendjadi pelaksanaan yang sempurna daripada koreksi „Djalan Baru“ dilapangan organisasi.

Sekarang didalam Kongres ini kita djuga akan membicarakan perubahan<sup>2</sup> daripada Konstitusi Partai kita yang telah ditetapkan oleh Kongres Ke-V itu. Apakah ini tidak berarti bahwa didalam Konstitusi itu masih terdapat kekurangan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup>?

Pada umumnja garis dan prinsip<sup>2</sup> organisasi serta peraturan<sup>2</sup> yang ditetapkan didalam Konstitusi yang disahkan oleh Kongres Ke-V telah diperkuat kebenarannya oleh pengalaman pekerjaan praktek dilapangan organisasi selama ini. Djadi, adanya usul<sup>2</sup> perubahan sekarang ini samasekali tidaklah mengenai prinsip<sup>2</sup>nja yang telah ditetapkan oleh Kongres yang lalu. Disatu pihak usul<sup>2</sup> perubahan itu lebih bersifat penjempurnaan dan memperdjelas pengertian daripada perumusan<sup>2</sup> garis dan prinsip<sup>2</sup> organisasi serta peraturan<sup>2</sup> yang pada umumnja sudah benar; difihak lain usul<sup>2</sup> perubahan itu merupakan pengembangan yang wajar daripada prinsip<sup>2</sup> organisasi yang telah ditetapkan didalam Konstitusi berdasarkan pengalaman yang didapat dari pekerjaan praktek selama ini.

Dibawah ini saja akan memberikan pendjelasan mengenai alasan<sup>2</sup> daripada beberapa usul perubahan dan pendjelasan<sup>2</sup> lainnya mengenai beberapa bagian daripada Konstitusi yang meskipun tidak mengalami perubahan tetapi menurut pengalaman ternyata masih

kurang cukup jelas difahami atau masih memerlukan penekanan<sup>2</sup> didalam pelaksanaannya.

# I

## PREAMBUL KONSTITUSI \*

### Kawan<sup>2</sup>.

Konstitusi Partai kita terdiri dari dua bagian pokok, jaitu Program Umum Konstitusi dan pasal<sup>2</sup> peraturan Konstitusi. Dua bagian ini merupakan suatu kesatuan Seorang anggota yang menyetujui Konstitusi Partai berarti bukan sadya menyetujui pasal<sup>2</sup> peraturan Partai yang dimuat didalam Konstitusi, tetapi juga menyetujui Program Umumnya sebagai dasar dan pedoman untuk aktivitasnya. Program Umum Konstitusi adalah program politik dan program organisasi yang terpokok daripada Partai, sedangkan pasal<sup>2</sup> peraturan Konstitusi, adalah ketentuan<sup>2</sup> pokok yang mengatur kehidupan intern daripada Partai.

Dalam Rentjana Perubahan Konstitusi sekarang ini, dengan samasekali tidak merubah maksud dan isi pokoknya, kita merubah penamaan Program Umum Konstitusi menjadi Preambul Konstitusi. Dengan Program Umum Konstitusi sebenarnya juga dimaksudkan tidak kurang dan tidak lebih sebagai preambuli Konstitusi. Jadi dalam hal ini kita hanya mengganti nama Program Umum menjadi Preambul. Maksud penggantian nama ini hanyalah sekedar supaya tidak terdjadi kekeliruan lag. diwaktu kita menjebutkan Program Umum Konstitusi dengan Program Partai, yang merupakan dokumen Partai tersendiri dan yang biasa juga dikatakan terdiri dari dua bagian pokok, jaitu Program Umum dan Program Tuntutan.

Preambul Konstitusi sekarang ini adalah sama seperti Program Umum Konstitusi yang lama, jaitu ia juga tetap berisi program politik dan program organisasi yang terpokok daripada Partai. Itulah sebabnya kita katakan bahwa dengan merubah nama Program Umum menjadi Preambul kita samasekali tidak merubah maksudnya. Juga mengenai isi pokoknya kita tidak mengadakan perubahan samasekali. Ia tetap seperti semula berisi keterangan singkat tentang sifat dan teori daripada Partai, tentang watak, tenaga<sup>2</sup> penggerak, tugas<sup>2</sup> dan tjiri<sup>2</sup> yang menondjol daripada revolusi Indonesia, tentang politik pokok daripada Partai dan sjarat<sup>2</sup> yang harus dimiliki oleh Partai, tentang kritik-selfkritik didalam Partai, tentang garis massa dan tentang prinsip<sup>2</sup> organisasi daripada Partai.

## Kawan<sup>2</sup>,

Mengenai teori daripada Partai, didalam Preambul kita mengadakan perubahan<sup>2</sup> perumusan. Misalnya, kita sekarang mengatakan bahwa „Seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme“. Kita hanya menjebutkan teori Marxisme-Leninisme dan tidak menjebutkan nama<sup>2</sup> murid yang besar dari Marx, Engels dan Lenin, yang telah mengembangkan Marxisme Leninisme itu sendiri, seperti Kawan Stalin dan Kawan Mao Tje-tung. Djuga kita tidak mentjantumkan „Koreksi Besar Musso“. Dengan perubahan ini samasekali tidak berarti bahwa perumusan yang dulu itu adalah salah. Karena memang banyak adjaran<sup>2</sup> Kawan Stalin dan Kawan Mao Tje-tung yang pada waktu itu kita jadikan dasar untuk perjuangan memperbaharui Partai kita. Djuga pada waktu itu kita sedang berdjuaug untuk sepenuhnya melaksanakan Koreksi Besar Musso.

Sekarang ini tidak akan salah djika kita mengatakan bahwa „Koreksi Besar Musso“ yang dirumuskan didalam Resolusi „Djailan Baru“ sudah sepenuhnya kita laksanakan. Oleh karena itu sudah tidak terasa kepentingannya untuk mentjantumkannya didalam Preambul.

Mengenai adjaran<sup>2</sup> Kawan Stalin dan Kawan Mao Tje-tung, kita bisa mengatakan bahwa kebenaran<sup>2</sup> umum yang terkandung didalamnya, yang berlaku untuk Indonesia, djuga sudah termasuk dalam kebenaran<sup>2</sup> umum Marxisme-Leninisme. Perumusan dalam Preambul sekarang mengatakan bahwa „Karena Marxisme-Leninisme bukanlah suatu dogma melainkan suatu pedoman untuk aksi, maka dalam aktivitetnja PKI berpegang kepada prinsip memadukan kebenaran<sup>2</sup> umum Marxisme-Leninisme dengan praktek yang njata daripada perjuangan revolusioner Indonesia“. Dengan perumusan ini bukan sadja adjaran<sup>2</sup> Kawan Stalin dan Kawan Mao Tje-tung sudah tertjakup didalamnya, tetapi djuga sekaligus mengingatkan kita supaya djangan sampai kita mendjadi dogmatis.

Mengenai bahaja<sup>2</sup> yang harus kita lawan, Preambul sekarang memasukkan djuga bahaja revisionisme, baik yang lama maupun yang modern. Ini adalah penting. Sebab berdjuaug melawan revisionisme modern sekarang ini berarti berdjuaug untuk solidaritet dan kesatuan gerakan Komunis sedunia. Sebagaimana kita ketahui, bahaja revisionisme modern terletak dalam rolnja merusak solidaritet dan memetjahbelah persatuan gerakan Komunis sedunia seperti yang dilakukan oleh pemimpin<sup>2</sup> Liga Komunis Jugoslavia. Dalam ideologi, revisionisme itu baik yang lama maupun yang modern, adalah sama sadja dengan reformisme dan sosial demokrasi.

Kemudian mengenai pandangan-dunia yang kita tentang, peru-

musan dalam Preambul sekarang menyatakan bahwa PKI menentang pandangan-dunia idealisme dan metafisika. Dengan perubahan perumusan ini kita bermaksud menundukkan lawan yang langsung daripada pandangan-dunia materialisme dialektik. Sebab lawan yang langsung daripada materialisme ialah idealisme dan lawan yang langsung daripada dialektika ialah metafisika.

PKI menentang pandangan-dunia idealisme, sebab orang yang berpandangan-dunia idealis dalam tjara menerangkan atau memahami sesuatu menganggap kedjawaan (spiritual) lebih utama daripada kebendaan. Dalam praktek hidup se-hari<sup>2</sup> orang yang berpandangan-dunia idealis tidak mau melihat dan tidak mau mencari setiap kebenaran didalam kenyataan. Sebaliknya, kita yang berpandangan dunia materialis, samasekali bukannya mengabaikan sesuatu yang bersifat kedjawaan, seperti yang selalu difitnahkan terhadap kita oleh kaum reaksioner, melainkan kita menganggap kebendaanlah yang lebih utama daripada kedjawaan. Dalam praktek hidup se-hari<sup>2</sup>, sebagai kebalikan dari kaum idealis, kita kaum materialis selalu menundukkan dan mencari setiap kebenaran didalam kenyataan.

PKI juga menentang metafisika atau tjara berfikir metafisik, sebab orang yang berfikir setjara metafisik memandang sesuatu setjara terpisah dari keadaan njatannya dan setjara terpisah dari perubahan dan perkembangannya. Orang yang berfikir setjara metafisik memandang sesuatu setjara terpisah satu dari yang lainnya, mengabaikan saling hubungannya, memandang sesuatu akan<sup>2</sup> tetap dan beku, mengabaikan perubahan dan perkembangannya. Sebaliknya, kita yang berfikir setjara dialektik, memandang sesuatu selalu didalam gerak dan saling hubungannya yang njata dan bertudjuan menjelidiki perubahan<sup>2</sup> dan saling hubungannya yang njata didunia.

Dengan penegasan bahwa pandangan-dunia PKI ialah materialisme dialektik dan materialisme histori Marxis-Leninis, berarti bahwa yang kita maksudkan dengan materialisme ialah materialisme Marxis-Leninis, dengan dialektika ialah dialektika Marxis-Leninis, dan dengan materialisme histori ialah prinsip<sup>2</sup> metode dialektik dan filsafat materialisme Marxis-Leninis yang diluaskan dalam mempelajari kehidupan masyarakat dan sedjarah masyarakat. Sebab memang ada matjam<sup>2</sup> materialisme yang bukan Marxis-Leninis, antara lain materialisme yang tidak dialektik, ialah materialisme mekanik, dan ada juga dialektika yang bukan Marxis-Leninis, ialah dialektikannya Hegel yang tidak materialis.

Setiap anggota dan tjalonanggota Partai harus memiliki atau beladjar untuk memiliki pandangan-dunia materialisme dialektik.

Ini berarti memiliki atau beladjar untuk memiliki pandangan-dunia materialisme dan tjara berfikir dialektik. Pandangan-dunia materialisme dialektik sama djuga artinja dengan filsafat materialisme dialektik. Sebab itu dengan perkataan pandangan-dunia dimaksudkan djuga filsafat.

Tetapi bisakah anggota Partai kita jang kebanyakannya terdiri dari kaum buruh dan kaum tani mempunyai filsafat atau beladjar filsafat? Bukankah filsafat itu suatu ilmu jang sangat sukar dan hanya bisa dimiliki dan dipeladjar oleh orang<sup>2</sup> jang terpeladjar sadja?

Memang untuk menjusun dan merumuskan sesuatu pandangan filsafat setjara pasti dan sistimatik tidaklah mudah. Pekerjaan ini hanya dilakukan oleh ahli<sup>2</sup> filsafat. Tetapi hal ini samasekali tidak berarti bahwa filsafat itu tidak bisa dimiliki atau tidak bisa ditaham: oleh massa Rakjat. Sebab filsafat jalah tidak lain daripada pandangan kita jang paling umum mengenai sifat dunia dan tempat kita didalamnya, jaitu pandangan-dunia kita. Oleh karena itu, sesungguhnya setiap orang mempunyai sesuatu matjam filsafat, sekalipun mereka tidak pernah mempeladjarinja. Dan setiap orang tentu dipengaruhi oleh pandangan<sup>2</sup> filsafat meskipun mereka tidak merasa telah memikirkannya dan tidak bisa merumuskannya. Misalnya, pendapat seseorang bahwa soal kaya dan miskin didunia ini adalah soal takdir, dan bahwa setiap penderitaan atau kenikmatan jang kita alami adalah takdir dan pertjobaan jang harus sama<sup>2</sup> kita terima dengan perasaan sjukur, (*tawa*) ini adalah suatu pandangan filsafat.

Penjusunan dan perumusan pandangan<sup>2</sup> filsafat adalah hasil pekerjaan dari ahli<sup>2</sup> filsafat. Tetapi isi dari pandangan<sup>2</sup> itu sendiri tidak boleh tidak mempunyai dasar sosialnja dalam fikiran<sup>2</sup> jang mentjerminkan aktivitas masyarakat dan hubungan<sup>2</sup> masyarakat. Karena masyarakat itu terbagi didalam klas<sup>2</sup>, maka setiap pandangan filsafat adalah djuga pandangan klas.

Pandangan-dunia atau filsafat materialisme dialektik dan materialisme histori Marxis-Leninis adalah pandangan-dunia atau filsafat klas buruh. Ia bisa membantu Rakjat untuk bisa mengerti sifat dunia dan tempat manusia didalamnya, sehingga bisa merubah dunia dan merubah masyarakat, mengembangkan kekuasaan manusia atas alam dan membebaskan manusia dari penindasan dan tachajul.

Oleh karena itu djelaslah, bahwa mendjadi kewadajiban Partai untuk mendidik semua anggota supaja dengan sadar bisa memiliki dan menggunakan pandangan-dunia atau filsafat Marxis-Leninis. Hanya dengan djalan demikian filsafat Marxis-Leninis akan bisa

diluaskan menjadi milik massa Rakyat dan menjadi senjata didalam perjuangannya melawan kelas penghisap. Tidak menggunakan filsafat, didalam kenyataannya berarti setjara tidak kritis menerima dan menggunakan filsafat kelas penghisap. (Tawa).

Untuk membentuk pandangan materialis kalangan anggota Partai, kita harus menjalankan pendidikan yang berisi bimbingan kepada para anggota untuk mencari setiap kebenaran didalam kenyataan. Ambillah sebagai contoh tentang peristiwa<sup>2</sup> kebakaran yang banyak terjadi di Djakarta akhir<sup>2</sup> ini. Untuk menemukan kebenaran mengenai sebab<sup>2</sup> kebakaran<sup>2</sup> itu, kita harus mencarinya pada hal<sup>2</sup> yang nyata. Kita harus menunjukkan kenyataan bahwa kebakaran<sup>2</sup> itu selalu terjadi justru di-perkampungan<sup>2</sup> Rakyat dimana rumah<sup>2</sup> Rakyat itu lebih banyak merupakan gubug<sup>2</sup> yang berdempet<sup>2</sup> dan dibikin dari bahan<sup>2</sup> yang gampang dimakan api pada musim panas. Sebaliknya, didaerah Menteng, dimana tinggal orang<sup>2</sup> besar dalam gedung<sup>2</sup> yang besar dengan pekarangan<sup>2</sup> yang luas, disana tidak pernah terjadi kebakaran.

Kawan<sup>2</sup>,

Mengenai bagian yang menerangkan watak, tenaga<sup>2</sup> pergerakan, tugas<sup>2</sup> dan tji<sup>2</sup> yang menondjol daripada revolusi Indonesia, Preambul sekarang hanya mengalami sedikit perbaikan redaksionil disana-sini.

Untuk memahami bagian ini setjara lebih jelas, membuat brosur Kawan Aidit mengenai soal<sup>2</sup> pokok revolusi Indonesia („Masjarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia“) adalah sangat membantu. Tetapi berhubung dengan berbagai pertanyaan yang timbul ketika mendiskusikan rencana perubahan Konstitusi ini, maka dirasa perlu untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai bagian ini.

Didalam Preambul sekarang dipakai dua istilah mengenai kedudukan Indonesia, yaitu „belum merdeka penuh“ dan „setengah-djadjahan“. Kita memakai dua istilah ini dalam arti kata yang sama. Karena kenyataan bahwa sebagian wilayah Indonesia, yaitu Irian Barat masih didjadjah sepenuhnya oleh imperialisme Belanda, sedangkan ekonomi dibagian wilayah yang sudah berada dibawah kekuasaan Republik Indonesia bukan sadja untuk sebagian besarnya masih dikuasai oleh kaum imperialis tetapi juga sangat bergantung kepada ekonomi negeri<sup>2</sup> imperialis karena keterbelakngannya, maka setjara politik, ketjuali di Irian Barat, kita bisa mengatakan bahwa sudah ada kemerdekaan politik, tetapi setjara ekonomi, Indonesia masih didjadjah oleh kaum imperialis asing. Seandainya seluruh wilayah Indonesia sudah berada dibawah kekuasaan Republik Indonesia, tetapi ekonomi Indonesia masih di-

kuasa atau sangat bergantung kepada negeri<sup>2</sup> imperialis, dalam keadaan yang demikianpun Indonesia belum bisa dikatakan telah merdeka penuh. Sebab kekuasaan politik tidaklah mungkin dipisahkan dari kekuasaan ekonomi, malahan kekuasaan ekonomi itulah yang justru menjadi dasar daripada kekuasaan politik. Oleh karena itu tidak mungkin sesuatu negeri bisa berkuasa penuh dilapangan politik, jika ekonomi negeri itu masih dikuasai atau sangat bergantung kepada negeri<sup>2</sup> lain, negeri<sup>2</sup> imperialis. Dengan demikian djelaslah, bahwa sesuatu negeri yang belum merdeka dilapangan ekonomi berarti djuga belum merdeka penuh dilapangan politik. Itulah sebabnja, sebagaimana diuraikan didalam laporan umum Kawan Aidit, kita bisa menjimpulkan bahwa, meskipun setjara politik Indonesia sudah bisa dikatakan merdeka tetapi karena ekonominja masih kolonial, maka pada hakekatnja ia masih djuga merupakan setengah-djadjahan.

Tetapi meskipun perkataan „belum merdeka penuh“ dan perkataan „setengah-djadjahan“ pada hakekatnja mengandung isi yang sama, orang biasanja mendengar kedua perkataan itu dengan perasaan yang berlainan. Supaja bisa didjalankan kebidjaksanaan didalam menggunakan kedua matjam istilah yang maksudnja sama itu, maka didalam Preambul kita pakai ke-dua<sup>2</sup> istilah itu.

Untuk bisa mengerti siapa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan sekutu revolusi Indonesia, kita lebih dulu harus mengerti dengan djelas hakekat daripada revolusi Indonesia. Didalam Preambul diterangkan bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi burdjuis-demokratis tipe baru, atau revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat yang luas, yang dipimpin oleh proletariat. Ini berarti bahwa meskipun pada dasarnya revolusi Indonesia pada tingkat sekarang berwatak burdjuis-demokratis, tetapi tudjuannja bukan lagi terbentuknja masjarakat kapitalis dan negara dibawah diktatur burdjuis, melainkan masjarakat Sosialis melalui sistim kekuasaan diktatur bersama dari semua klas yang revolusioner, jaitu kekuasaan Demokrasi Rakjat. Oleh karena itu sudah dengan sendirinja bahwa tugas dan tanggungdjawab yang ditentukan oleh sedjarah untuk memimpin revolusi Indonesia supaja bisa mentjapai tudjuannja yang objektif, tidak bisa lain ketjuali djatuh diatas pundak klas buruh. Bedanja dengan revolusi burdjuis-demokratis tipe lama ialah dalam tudjuan objektifnja, jaitu revolusi burdjuis-demokratis tipe lama bertudjuan mentjiptakan masjarakat kapitalis dan negara diktatur burdjuis. Karena itu, pimpinan revolusi burdjuis-demokratis tipe lama tidak boleh tidak mesti ada ditangan klas burdjuis.

Tetapi faktor<sup>2</sup> apakah yang menentukan bahwa revolusi Indo-

nesia pada tingkat sekarang mesti berwatak burdjuis-demokratis tipe baru ?

Kawan<sup>2</sup>,

Didalam Preambul diterangkan bahwa faktor<sup>2</sup> yang menentukan watak burdjuis-demokratis tipe baru daripada revolusi Indonesia ialah : Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal, tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil dan elemen<sup>2</sup> demokratis lainnya yang dirugikan oleh imperialisme, di Indonesia sudah ada Partai Komunis yang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh, dan keadaan<sup>2</sup> internasional sekarang. Faktor<sup>2</sup> in. saling menentukan satu sama lain, sehingga semuanya itu sebenarnya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.

Indonesia yang masih belum merdeka penuh, atau masih setengah-djadjahan dan masih setengah-feodal, berarti bahwa ekonomi kapitalis di Indonesia masih terbelakang dan sebagian besar ekonominya adalah ekonomi pertanian yang masih terbelakang dan setengah-feodal. Pada pokoknja, ekonomi Indonesia masih bersifat kolonial, ekonomi impor-expor dan sangat bergantung kepada pasaran luarnegeri. Suatu negeri yang bukan sadja ekonomi kapitalisnja belum maju, tetapi malahan sebagian besar ekonominya masih ekonomi pertanian yang setengah-feodal, tidak akan bisa langsung melahirkan revolusi Sosialis. Revolusi dinegeri sematjam ini pada pokoknja tidak bisa lain ketjuali merupakan revolusi agraria, jaitu revolusinja kaum tani untuk mendapatkan tanah garapan. *Revolusi yang pada pokoknja tidak menghapuskan tetapi malahan akan memberikan hakmilik perseorangan atas alat<sup>2</sup> produksi, jaitu memberikan tanah sebagai hakmilik perseorangan kepada kaum tani, sudah terang bukanlah revolusi Sosialis, melainkan revolusi burdjuis-demokratis.* Itulah sebabnja revolusi di-negeri<sup>2</sup> djadjahan biasa djuga dinamakan revolusi agraria, jaitu revolusinja kaum tani.

Tetapi revolusi Indonesia, meskipun berwatak burdjuis-demokratis, karena zamannja, ia tidak bisa lagi berwatak burdjuis-demokratis tipe lama, jaitu tidak bisa sepenuhnya berwatak burdjuis. Revolusi burdjuis-demokratis tipe lama hanja terdjadi pada zaman mulai berkembangnja kapitalisme. Tetapi revolusi Indonesia terdjadi djustru pada zaman imperialisme, zaman revolusi proletar dunia, dan malahan pada zaman dimana sudah berdiri negeri<sup>2</sup> Sosialis, dimana Sosialisme sudah mendjadi sistim dunia. Dilihat dari sudut zamannja sadja, karena revolusi Indonesia langsung memukul dan melemahkan imperialisme dunia, maka ia mendjadi bagian daripada revolusi proletar dunia. Mau atau tidak mau revolusi

Indonesia berarti tambahan kekuatan bagi negeri<sup>2</sup> Sosialis yang sudah ada dan bagi gerakan kelas buruh sedunia. Ini berarti bahwa mau atau tidak mau revolusi Indonesia adalah sekutu daripada negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis dan gerakan kelas buruh sedunia (*Tepuktangan*). Sebaliknya, negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis dan gerakan kelas buruh sedunia, karena mereka itu telah dan akan terus semakin melemahkan kekuatan imperialisme yang justru menjadi musuh utama daripada revolusi Indonesia, maka mereka itu, diakui atau tidak, merupakan kekuatan bagi revolusi Indonesia. Dan kenyataannya memang tidak bisa disangkal, bahwa negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis dan gerakan kelas buruh sedunia telah dan masih terus memberikan bantuan kekuatan kepada revolusi Indonesia. (*Tepuktangan*). Oleh karena itu, diakui atau tidak, negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis dan gerakan kelas buruh sedunia adalah sekutu yang tepertjaja daripada revolusi Indonesia. (*Tepuktangan, teriakan: „Betul!”*).

Dilihat dari sudut kedudukan kelas buruh Indonesia sendiri, memang suatu kenyataan yang harus kita terima, bahwa kelas buruh Indonesia adalah ketjil jumlahnya jika dibandingkan dengan kaum tani, usianya sebagai kelas buruh masih muda jika dibandingkan dengan kelas buruh di Eropa dan tingkat kebudayaannya masih rendah jika dibandingkan dengan kelas burjuis. Tetapi berkat perjuangannya sendiri yang ulet dan dibawa oleh kemadjuan gerakan kelas buruh sedunia, terutama oleh gerakan kelas buruh yang sudah mentjapai kemenangan dengan mendirikan negeri<sup>2</sup> Sosialis, yang telah dipelopori oleh gerakan kelas buruh Rusia dengan terdjadinja Revolusi Sosialis Oktober Besar tahun 1917, kelas buruh Indonesia telah bisa mentjapai tingkatan kesadaran politik dan organisasi yang memungkinkannya untuk berdiri sendiri sebagai kekuatan kelas. Ini dibuktikan oleh adanya Partai kita, Partai Komunis Indonesia.

Dengan adanya Partai Komunis Indonesia, yakni Partai kelas buruh Indonesia, berartilah bahwa kelas buruh dan Rakyat pekerdja Indonesia lainnya sudah mempunyai pimpinan politiknya sendiri, dan tidak perlu mengikuti pimpinan politik kelas burjuis. Djuga didalam revolusi, kelas buruh yang sudah sadar akan klasnya dan sudah mempunyai pimpinan politiknya sendiri, sudah tentu tidak akan menjerahkan pimpinan revolusi kepada kelas burjuis. (*Tepuktangan*).

Dengan demikian djelaslah, adanya Partai Komunis Indonesia, apalagi Partai Komunis yang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh, merupakan salahsatu faktor yang menentukan bahwa revolusi Indonesia tidak bisa lagi berwatak burjuis-demokratis tipe lama, melainkan berwatak burjuis-demokratis tipe baru se-

bagai suatu bentuk peralihan kerevolusi Sosialis. (*Tepuktangan*).

Karena revolusi Indonesia adalah revolusi Demokrasi Rakyat yang akan berdjalan terus dan meningkat kerevolusi Sosialis, maka tenaga<sup>2</sup> penggeraknja tidak bisa lain ketjuali klas<sup>2</sup> yang bisa menerima Sosialisme. Diluar klas buruh hanjalah kaum tani dan klas burdjuis ketjil lainnja (diluar kaum tani) yang bisa menerima Sosialisme. Kaum buruh, kaum tani dan klas burdjuis ketjil bisa menerima Sosialisme karena mereka pada pokoknja bukanlah klas<sup>2</sup> yang menghisap, melainkan Rakyat (klas<sup>2</sup>) pekerdja dan dalam banyak hal dihisap oleh klas tuantanah dan klas kapitalis.

Klas burdjuis nasional, meskipun nasional, adalah tetap klas penghisap. Karena itu ia tidak bisa menerima Sosialisme, terutama sebelum kekuatan revolusi tjukup besar. Karena itu pula klas burdjuis nasional bukanlah tenaga penggerak revolusi Demokrasi Rakyat. Klas burdjuis nasional memang dalam periode<sup>2</sup> tertentu dan sampai batas<sup>2</sup> tertentu bisa ambil bagian didalam revolusi melawan imperialisme, dan dengan demikian menjadi kekuatan revolusioner. Tetapi pada waktu dan keadaan<sup>2</sup> tertentu yang lain ia bisa meninggalkan revolusi dan berfihak kepada klas burdjuis komprador.

Dari sini djelaslah, bahwa yang dimaksudkan didalam Preambul dengan „elemen<sup>2</sup> demokratis lainnja yang dirugikan oleh imperialisme“ sebagai tenaga penggerak revolusi Indonesia, bukanlah klas burdjuis nasional, melainkan *orang<sup>2</sup> atau golongan* dari klas lain diluar klas buruh, kaum tani dan klas burdjuis ketjil yang dengan lebih konsekwen mengambil bagian didalam revolusi. Djadi bisa djuga orang<sup>2</sup> atau golongan dari klas burdjuis nasional.

Djika sudah djelas bahwa tenaga penggerak pokok daripada revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani dan klas burdjuis ketjil, yang dengan demikian bisa djuga diartikan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusinja klas buruh, kaum tani dan klas burdjuis ketjil, maka djelas pula siapa<sup>2</sup> atau klas<sup>2</sup> mana sadja yang bisa dimasukkan sebagai sekutu daripada revolusi Indonesia. Didalam negeri yang bisa dimasukkan sebagai sekutu daripada revolusi ialah klas dan elemen<sup>2</sup> diluar klas buruh, kaum tani dan burdjuis ketjil, yang bisa turut mengambil bagian didalam revolusi, seperti klas burdjuis nasional. Diluar negeri, ialah semua kekuatan yang bisa membantu memperkuat revolusi Indonesia setjara langsung ataupun tidak langsung, seperti klas buruh internasional, negeri<sup>2</sup> Sosialis, Rakyat dan bangsa<sup>2</sup> yang terdjadjah di Asia, Afrika dan Amerika Latin, dsb.

Kawan<sup>2</sup>,

Mengenai tjiri yang menondjol daripada revolusi Indonesia,

didalam Preambul diterangkan bahwa revolusi Indonesia berkembang setjara tidak sama, memakan waktu lama dan bersifat pelik. Faktor<sup>2</sup> yang menjebabkannya ialah pertama, Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal, yang berarti masih besarnya kekuatan musuh. Kedua, Indonesia adalah negeri kepulauan yang luas, yang banyak penduduknya tetapi tidak merata dan terdiri dari banyak sukubangsa serta tidak sama kemajuannya, yang semuanya ini mengandung arti sukar<sup>2</sup>nya perhubungan, dan ber-beda<sup>2</sup>nya tingkat kesadaran serta pengalaman gerakan Rakjat dari berbagai sukubangsa diberbagai daerah dan kepulauan. Semuanya ini sampai batas<sup>2</sup> tertentu berarti tambahan kekuatan bagi musuh.

Djadi, meskipun Rakjat Indonesia terutama kaum buruh dan kaum tani, mempunja tradisi revolusioner, tetapi djalan revolusi yang harus ditempuhnya menghadapi rintangan<sup>2</sup> yang besar. Itulah sebabnya didalam Preambul diterangkan, bahwa untuk bisa memimpin revolusi yang memakan waktu lama dan bersifat pelik itu, kita harus memiliki sifat<sup>2</sup> yang berupa kesabaran revolusioner dan keuletan yang didasarkan pada kejakinan teori yang dalam dan pada watak yang teguh untuk melawan ketjenderungan kapitulasi dan avonturisme.

Kawan<sup>2</sup>,

Dalam menghubungkan lahirnya Partai kita sebagai pewaris dan penerus perjuangan yang heroik dan revolusioner daripada Rakjat Indonesia dengan bukti<sup>2</sup> perjuangan Rakjat yang heroik itu, Preambul Konstitusi kita sekarang menjantumkan lebih banyak lagi peperangan<sup>2</sup> dan pemberontakan<sup>2</sup> yang bersedjarah melawan kolonialisme Belanda dan pendudukan militerisme Djepang. Hal ini adalah penting, karena ia menundjukkan bahwa Partai kita ditiap daerah semakin mengenal sukubangsa<sup>2</sup> didaerahnya, semakin mengenal sedjarah perjuangan didaerahnya masing<sup>2</sup>, semakin mengenal pahlawan<sup>2</sup>nya, yang kesemuanya ini akan membikin Partai kita mendjadi lebih dirasakan wadjarnya sebagai pewaris dan penerus tradisi yang heroik dan revolusioner dari Rakjat setjara regional maupun nasional.

Mengenai Revolusi Agustus 1945, didalam Preambul ditundjukkan bahwa ia merupakan salahsatu tonggak sedjarah perjuangan Rakjat Indonesia yang terpenting, karena ia merupakan puntjak daripada perjuangan heroik yang memberikan tradisi revolusioner yang paling luas dan mendalam kepada seluruh Rakjat Indonesia. Meskipun kaum Komunis pada waktu itu mengambil bagian yang sangat aktif, baik dalam waktu persiapan untuk Proklamasi maupun dalam mendjalankan setiap bagian daripada roda revolusi

sampai kepada pertempuran di front yang terdepan, tetapi Revolusi Agustus 1945 telah mengalami kegagalan. Sebagai sebabnya yang terpokok, disamping pengkhianatan burjuasi komprador yang telah menimbulkan Provokasi Madiun dan selanjutnya mengadakan persetudhuan KMB, ialah karena massa tani yang ber-djuta<sup>2</sup> tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi.

Apakah yang dimaksudkan dengan massa tani yang ber-djuta<sup>2</sup> tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi?

Didalam Preambul ada diterangkan mengenai kelemahan klas buruh Indonesia didalam Revolusi Agustus 1945, ialah bahwa klas buruh pada waktu itu kurang sadar akan rolnya sebagai pemimpin revolusi. Hal ini membawa akibat bahwa PKI sebagai Partai klas buruh pada waktu itu telah kehilangan kebebasannya dalam lapangan organisasi dan politik. Karena kelemahan ini, maka Partai kita pada waktu itu belum bisa mengemukakan program agraria yang revolusioner dan tepat untuk dilaksanakan setjara sadar dalam perjuangan se-hari<sup>2</sup>. Padahal revolusi Indonesia pada hakekatnya adalah revolusinya kaum tani untuk melepaskan diri mereka dari belenggu penindasan dan penghisapan sisa<sup>2</sup> feodalisme.

Djadi teranglah, bahwa yang dimaksudkan dengan massa tani yang ber-djuta<sup>2</sup> tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi, ialah tidak diadjukannya program agraria yang revolusioner dan dilaksanakannya setjara sadar program agraria sematjam itu dalam perjuangan se-hari<sup>2</sup> oleh Partai kita.

Kawan<sup>2</sup>,

Berhubung telah dapat diatasinya kerusakan<sup>2</sup> Partai sebagai akibat kesalahan<sup>2</sup> di waktu yang lampau dan sebagai akibat Provokasi Madiun, maka dalam Preambul sekarang tidak ditjantumkan lagi soal menjembuhkan luka<sup>2</sup> Partai yang ditimbulkan oleh kesalahan<sup>2</sup> yang lampau dan oleh Provokasi Madiun itu.

Dalam hubungan dengan masalah penggalan front persatuan nasional, didalam Preambul sekarang ada diterangkan, bahwa PKI memperjuangkan pelaksanaan politik hak sama bagi semua suku-bangsa dengan tidak memandang perbedaan besar atau ketjil, dan madju atau terbelakangnya dan pelaksanaan hak sama bagi semua warganegara dengan tidak memandang asal keturunan dan ke-pertjajaan agamanya. Dengan keterangan ini kita bermaksud memberikan pengertian, bahwa dalam melakukan pekerjaan front persatuan nasional, disamping dan terutama harus dilihat dari sudut klas<sup>2</sup> yang bisa dipersatukan karena memang mempunyai dasar persamaan kepentingan untuk bersatu, kita djuga harus selalu ingat akan adanya dua faktor lain yang sangat penting, jaitu faktor suku-bangsa dan minoritet keturunan asing, serta faktor agama.

Karena Rakjat Indonesia terdiri dari banyak sukubangsa dan minoritet keturunan asing, dan karena adanya pengaruh agama, terutama agama Islam, dikalangan massa Rakjat, maka djika kita tidak menetapkan sikap politik jang tepat mengenai sukubangsa dan minoritet keturunan asing serta mengenai agama, pekerdjaan front persatuan dari Partai kita akan menghadapi lebih banyak kesulitan dan rintangan, bahkan bisa mengalami kegagalan.

Kawan<sup>2</sup>,

Dalam Preambul sekarang dimasukkan keterangan mengenai kemungkinan peralihan ke Sosialisme setjara damai. Ini mempunyai arti jang penting baik setjara teori maupun setjara praktis.

Para pembela dan propagandis imperialis, termasuk pemimpin<sup>2</sup> Masjumi-PSI jang setjara terbuka atau tertutup, langsung atau tidak langsung, turut mengambil bagian atau membantu pemberontakan dan teror buas "PRRI-Permesta" dan DI-TII, selalu memfitnah kita kaum Komunis dengan menggambarkan se-akan<sup>2</sup> kaum Komunis itu terdiri dari orang<sup>2</sup> jang haus darah, jang selalu dan dimana saja menghendaki kekerasan dalam mentjapai tujuannya.

Djelaslah, dari sudut ini saja, yaitu dari sudut pekerdjaan praktis se-hari<sup>2</sup> dalam menghadapi propaganda fitnahan kaum reaksioner jang terusmenerus mentjaba menakut-nakuti massa Rakjat dengan momok jang mengerikan tentang djalan kekerasan, kita bisa merasakan pentingnya untuk mengemukakan tentang kemungkinan peralihan ke Sosialisme dengan djalan damai. Dengan ketegasan bahwa kita berdjuaug dengan sekuat tenaga untuk menjadikan kemungkinan itu suatu kenyataan, kita sekaligus dapat menundjukkan bahwa djika terdjadi djuga kekerasan, maka hal itu, sebagaimana selalu dibuktikan, tidak dimulai atau tidak datang dari fihak kaum Komunis dan samasekali bukan jang dikehendaki oleh kaum Komunis. (*Tepuktangan*).

Setjara teori, mengemukakan soal kemungkinan peralihan ke Sosialisme dengan djalan damai berarti mengemukakan kebenaran bahwa Marxisme-Leninisme memang tidak menundjukkan djalan jang mutlak sama menudju Sosialisme bagi semua negeri dalam masa jang berbeda-beda dan dalam keadaan internasional jang berbeda<sup>2</sup> pula. Ini berarti djuga bahwa kita kaum Marxis-Leninis tidak mengikat diri pada soal<sup>2</sup> bentuk, pada metode<sup>2</sup> dan tjara<sup>2</sup> melaksanakan revolusi, karena segala sesuatuja bergantung pada perimbangan kekuatan<sup>2</sup> klas jang kongkrit, pada tingkat organisasi klas buruh dan lawannya, pada ketjakapan klas buruh untuk menarik sekutu<sup>2</sup> kefihaknja, terutama kaum tani, dan dengan mem-

perhitungkan lembaga<sup>2</sup> demokrasi, kebiasaan<sup>2</sup> dan tradisi masing<sup>2</sup> negeri.

Pada zamannya, Marx pernah mengemukakan, bahwa ada negeri<sup>2</sup> seperti Amerika dan Inggris dimana kaum buruh dapat menjapai tujuan mereka dengan jalan damai. Marx membikin perketjuaian ini dengan memperhitungkan lembaga<sup>2</sup>, kebiasaan<sup>2</sup> dan tradisi<sup>2</sup> dari negeri<sup>2</sup> yang bersangkutan. Tetapi Lenin dalam tahun 1917 menulis bahwa dalam keadaan<sup>2</sup> baru dari kapitalis monopoli, karena pertumbuhan aparat polisi-birokratis di Inggris dan Amerika Serikat, maka perketjuaian yang dinjatakan oleh Marx itu tidak berlaku lagi. Dalam pada itu Lenin selalu menekankan bahwa klas buruh sudah tentu lebih suka mengambil kekuasaan kedalam tangannya setjara damai. Djuga Lenin pernah meramalkan, bahwa disebuah negeri burjuis yang ketjil peralihan ke Sosialisme mungkin berlangsung setjara damai djika ada negeri<sup>2</sup> tetangga yang Sosialis. Ini menunjukkan bahwa bukan sadsja perimbangan kekuatan<sup>2</sup> klas dinegeri yang bersangkutan, tetapi djuga adanya Sosialisme yang menang di-negeri<sup>2</sup> tetangga mempengaruhi atau turut menentukan jalannya peralihan ke Sosialisme dinegeri itu. Ini berarti djuga bahwa dalam meninjau masalah jalan<sup>2</sup> revolusi didalam periode sekarang kita harus berpedoman pada perhitungan yang tepat mengenai perimbangan kekuatan<sup>2</sup> klas di-masing<sup>2</sup> negeri dan perimbangan kekuatan<sup>2</sup> klas yang meliputi seluruh dunia. Sesuai dengan adjaran<sup>2</sup> Marx dan Lenin inilah, jaitu dengan memperhitungkan keadaan<sup>2</sup> objektif dalam perimbangan kekuatan dunia diantara kekuatan<sup>2</sup> Sosialisme dan demokrasi disatu pihak, dan kekuatan<sup>2</sup> imperialisme difihak lain, dan berdasarkan pengalaman negeri<sup>2</sup> Eropa Timur yang peralihannya ke Sosialisme tidak semuanya melalui peperangan didalamnegeri. Kawan Chrusjov didalam Kongres ke-XX PKUS mengemukakan satu kesimpulan bahwa dalam keadaan<sup>2</sup> sekarang negeri<sup>2</sup> tertentu mempunyai kemungkinan yang njata untuk beralih ke Sosialisme setjara damai.

Bagi kita di Indonesia, djika kita berbitjara tentang kemungkinan peralihan ke Sosialisme setjara damai, maka yang dimaksudkan ialah kemungkinan ditjapainya kekuasaan Demokrasi Rakjat setjara damai. Sebab, djika sistim Demokrasi Rakjat, sebagai suatu bentuk peralihan ke Sosialisme, bisa ditjapai dengan jalan damai, maka hal ini berarti djuga suatu kemungkinan diteruskannya pengembangan sistim Demokrasi Rakjat itu ke Sosialisme dengan jalan damai.

Tetapi apakah kemungkinan ditjapainya kekuasaan Demokrasi Rakjat dinegeri kita setjara damai merupakan suatu kemungkinan yang kongkrit?

Didalam Preambul diterangkan bahwa PKI dengan sekuat tenaga berdjuaug untuk mendjadikan kemungkinan ini suatu kenyataan. Dan djika bergantung kepada PKI, djalan damai, djalan parlementerlah jang dipilih. Ini berarti bahwa selama ada kebebasan<sup>2</sup> demokratis bagi Rakjat dan ada parlemen, PKI akan berdjuaug untuk mendapatkan majoritet jang stabil didalam parlemen dengan dukungan aksi<sup>2</sup> massa, sehingga bisa mendjamui bahwa parlemen sungguh<sup>2</sup> mendjadi alat kemauan Rakjat terbanyak untuk mengadakan perubahan<sup>2</sup> jang fundamental dilapangan ekonomi, sosial dan susunan negara. (*Tepuktangan*). Dan kemungkinan untuk mentjapai ini ada, mengingat semakin tjepat meningkatnja kesedaran politik dan organisasi daripada Rakjat dalam melawan kekuatan<sup>2</sup> kepalabatu dari kaum tuantanah dan kaum burdjus komprador, dan mengingat keadaan<sup>2</sup> internasional sekarang jang menguntungkan.

Tetapi soalnya, apakah klas<sup>2</sup> jang reaksioner akan membiarkan Rakjat pekerdja dibawah pimpinan Partai kita untuk mentjiptakan kekuasaan Rakjat dengan djalan damai? (*Terdengar utjapan: „Tidaaak“ dan tawa*). Apakah mereka tidak akan menggunakan kekerasan untuk menekan dan menindas pertumbuhan kekuatan Rakjat, misalnja dengan kekerasan menghapuskan hak<sup>2</sup> kebebasan demokratis daripada Rakjat dan dengan kekerasan pula melumpuhkan atau memadakan samasekali parlemen? (*Terdengar utjapan: „Waaah“*).

Pengalaman Rakjat di Pakistan, dan baru<sup>2</sup> ini sadja di Kerala, India, harus benar<sup>2</sup> mendjadi peladjaran bagi kita. Oleh karena itu, didalam membitjarkan soal kemungkinan ditjapainja kekuasaan Demokrasi Rakjat setjara damai, didalam Preambul dinjatakan bahwa PKI harus menundjukkan kewaspadaan jang se-besar<sup>2</sup>nja. Ketjuali itu kita harus tetap ingat bahwa menurut adjaran Marxisme-Leninisme djalan damai itu adalah sebagai perketjuaan jang menguntungkan Rakjat pekerdja, dan bahwa setiap peralihan ke Sosialisme, meskipun setjara damai, adalah revolusi. Dan tentang revolusi Lenin mengatakan: „..... tjiri jang lebih dalam dan tetap daripada revolusi ini dan sjarat bagi kemenangannja, dulu dan sekarang, ialah organisasi massa proletar, organisasi Rakjat pekerdja. Didalam organisasi djutaan Rakjat pekerdja inilah terletak sjarat<sup>2</sup> terbaik bagi revolusi, sumber jang paling dalam bagi kemenangan<sup>2</sup>nja”.

Dalam hubungan ini adalah penting apa jang dinjatakan didalam Preambul sekarang, bahwa dengan tetap mengingat sifat<sup>2</sup> khusus daripada revolusi Indonesia, jang akan menetapkan djalan jang khusus bagi Indonesia menudju ke Sosialisme, Partai kita

menarik pelajaran dari pengalaman yang kaya dari gerakan kelas buruh seluruh dunia, khususnya gerakan kelas buruh yang sudah berhasil membangun Sosialisme. Ini berarti bahwa disamping mengakui adanya kebenaran yang khusus berlaku di-satu<sup>2</sup> negeri, tetapi se-kali<sup>2</sup> tidak boleh melupakan kebenaran umum yang berlaku untuk semua negeri mengenai peralihan ke Sosialisme, yaitu bahwa faktor yang menentukan dan mutlak ialah pimpinan politik dari kelas buruh yang dipimpin oleh pelopornya, Partai Marxis-Leninis. (*Tepuktangan lama*).

Kawan<sup>2</sup>,

Bagian<sup>2</sup> yang terakhir daripada Preambul menerangkan dengan perumusan<sup>2</sup> yang jelas tentang kritik-selfkritik, tentang garis massa dan tentang prinsip sentralisme-demokratis, sebagai syarat mutlak bagi pengembangan dan pembulatan Partai dalam politik, ideologi dan organisasi. Mengenai semuanya ini tidak diperlukan penjelasan lagi, karena disamping sudah cukup jelas, juga akan bisa lebih diperjelas lagi pengertiannya didalam memahami peraturan<sup>2</sup> Konstitusi. Kritik-selfkritik, garis massa dan prinsip sentralisme-demokratis adalah isi jiwa dan semangat daripada peraturan<sup>2</sup> Konstitusi Partai kita.

Sekianlah mengenai Preambul.

## II

### PERATURAN<sup>2</sup> KONSTITUSI

Kawan<sup>2</sup>,

Diantara fasal<sup>2</sup> peraturan Konstitusi yang dirasa perlu diberikan sekedar penjelasan adalah fasal<sup>2</sup> dari bab<sup>2</sup> yang berikut ini.

#### 1. Bab Keanggotaan.

Menurut peraturan Konstitusi, seseorang baru boleh diterima menjadi anggota Partai sesudah ia mentjapai usia 18 tahun. Ini adalah berdasarkan pertimbangan, bahwa pada umumnya seseorang baru bisa mempunyai pendirian politik yang boleh dikatakan teguh sesudah mentjapai usia 18 tahun.

Perlu ditegaskan disini bahwa yang dimaksudkan dengan diterima menjadi anggota Partai adalah sedjak diterima sebagai tjalonanggota. Hal ini tidak perlu dinjatakan didalam peraturan karena kedudukan dan tanggungjawab anggota dan tjalonanggota Partai sesungguhnya adalah sama — kewajiban<sup>2</sup>nja sepenuhnya sama, sedangkan mengenai hak<sup>2</sup>nja hanya berbeda dalam hal

hak memilih dan dipilih serta hak suara dalam mengambil putusan. Ketjuali itu, seseorang jang mau masuk Partai sedjak semula adalah memang dengan niat mendjadi anggota. Soal keharusan melalui masatjalon lebih dulu, hal ini hanjalah sekedar prosedur jang harus ditempuh djustru untuk bisa memenuhi niatnja mendjadi anggota Partai.

Selain sjarat usia didalam penerimaan anggota, peraturan Konstitusi djuga membagi orang<sup>2</sup> jang mau diterima mendjadi anggota dalam empat golongan berdasarkan asal sosial mereka masing'.

*Golongan pertama* terdiri dari kaum buruh, buruhtani, tanimiskin atau kaum miskin kota. Sjarat bagi penanggung mereka dan lama masatjalonnja boleh dikatakan sangat ringan. Ini berarti bahwa penerimaan anggota dari kalangan proletar dan semi-proletar tidak ada pembatasan- jang istimewa. Atau bisa djuga dikatakan bahwa Partai memberikan hak istimewa bagi orang<sup>2</sup> dari kalangan kaum proletar dan semi-proletar untuk mendjadi anggota Partai. Ini adalah sesuatu jang wadjar, karena Partai Komunis adalah Partainja klas buruh.

Kaum miskin kota, seperti diterangkan didalam laporan Kawan Aidit, antara lain terdiri dari bakul jang mendjadjkan barang-dagangan jang diterimanja dari djuragan, tukang loak, tukang betjak jang memiliki betjak untuk ditarik sendiri, tukang warung ketjil, tukang sol sepatu, tukang pateri, tukang potong rambut, dsb.

*Golongan kedua* terdiri dari orang<sup>2</sup> revolusioner dari kalangan burdjuasi ketjil. Penerimaannya mendjadi anggota harus ditanggung oleh anggota Partai jang sudah lebih berpengalaman dan masatjalonnja adalah selama satu tahun. Sjarat<sup>2</sup> ini diperlukan berhubung dengan kenyataan, bahwa ideologi dari orang<sup>2</sup> jang berasal dari klas ini biasanja agak rumit, dan mereka seringkali mempunjai fikiran jang ragu terhadap disiplin Partai dan dalam menghadapi perdjjuangan revolusioner jang sengit.

Pegawai kantor jang dimasukkan dalam golongan kedua ini, tidak termasuk pegawai rendahan, karena mereka termasuk dalam golongan pertama.

*Golongan ketiga* terdiri dari orang<sup>2</sup> revolusioner jang dulunja termasuk lapisan tengah dan atas dari klas penghisap. Ideologi mereka sudah tentu lebih rumit dan lebih sukar untuk menerima Program dan disiplin Partai. Oleh karena itu, penerimaan mereka mendjadi anggota harus ditanggung oleh anggota<sup>2</sup> Partai jang sungguh<sup>2</sup> sudah berpengalaman dan harus disetujui oleh Komite Partai jang agak tinggi dengan melalui masatjalon selama dua tahun.

*Golongan keempat*, terdiri dari orang<sup>2</sup> jang sudah pernah me-

nerima kejakinan politik lain dan pernah mendjadi anggota partai lain. Penerimaan mereka mendjadi anggota Partai menurut peraturan Konstitusi harus dengan tanggungan anggota<sup>2</sup> Partai yang sudah lebih berpengalaman lagi dan harus disetujui oleh Komite Partai yang djuga lebih tinggi lagi. Tetapi dari bekas anggota<sup>2</sup> partai lain harus dibedakan antara bekas anggota biasa dan bekas anggota pimpinan. Djuga harus dibedakan orang<sup>2</sup> yang masuknja kepartai lain hanya karena sesuatu yang bersifat paksaan atau karena didaftar sadja setjara serampangan tanpa persetujuannja. Terhadap mereka ini, djika selama mereka sebagai anggota tidak turut dalam aktivitet politik dari partai itu, berlakulah peraturan Konstitusi mengenai prosedur penerimaan anggota sesuai dengan asal klas mereka masing<sup>2</sup>.

Berbeda dengan yang sebelum dirubah, dalam Konstitusi sekarang ditetapkan peraturan bahwa anggota Partai yang sudah pernah dipetjat bisa diterima kembali mendjadi anggota atas putusan Komite Partai yang telah memetjatnja dan menurut ketentuan tjara<sup>2</sup> mengatur penerimaan anggota. Usia keanggotaan yang lama dari seseorang yang pernah dipetjat dan diterima kembali mendjadi anggota Partai tidak dihitung.

Djuga dalam peraturan Konstitusi sekarang ada dinjatakan, bahwa tjalonanggota atau anggota Partai bebas untuk keluar dari Partai. Oleh karena itu, djika ada permintaan keluar dari seorang tjalonanggota atau anggota, rapat Resort harus mengambil putusan untuk menghapuskan nama orang tersebut dari daftar keanggotaan Partai dan melaporkannja kepada Komite Partai yang langsung diatasnja. Hanya djika dianggap perlu Komite Partai yang bersangkutan dapat mentjaba untuk menjarankan supaja anggota atau tjalonanggota itu membatalkan niatnja untuk keluar. Tetapi djika seseorang anggota atau tjalonanggota yang meminta keluar itu telah melakukan pelanggaran<sup>2</sup> disiplin yang berat yang bisa mendjadi alasan untuk pemetjatannja, maka putusan pemberhentiannja itu dinjatakan sebagai pemetjatan. Semuannja ini mendjelaskan bahwa keluar dari Partai adalah bebas, tetapi untuk masuk mendjadi anggota Partai ada sjarat<sup>2</sup>nja dan tidak bebas.

Mengenai anggota Partai yang sudah pernah keluar dari Partai atas kemauan sendiri tidak ditentukan peraturannja yang pasti djika ia mau masuk mendjadi anggota Partai kembali. Hal ini adalah dengan pertimbangan untuk membedakan penerimaan kembali mendjadi anggota dari seseorang yang pernah dipetjat dengan seseorang yang keluar dari Partai atas kemauan sendiri. Dengan ini dibuka berbagai matjam kbidjaksanaan dalam mene-

rima kembali anggota yang pernah keluar dari Partai. Kebidjaksanaan itu bisa berupa kemungkinan untuk menghitung kembali usia keanggotaannya yang lama sebagian atau sepenuhnya memperpendek masatjalon atau tidak melalui masatjalon samasekali dan bisa djuga tidak menghitung samasekali usia keanggotaannya yang lama. (*Tepuktangan lama*). Semuanya ini harus dipertimbangkan dengan mengingat alasan<sup>2</sup> yang menyebabkan anggota yang bersangkutan ini sampai keluar dari Partai dan mengingat aktivitetnya sesudah dan selama diluar Partai. Memang satu kenyataan, bahwa seseorang anggota Partai yang pernah minta keluar dari Partai menundukkan kebimbangan dan ketidakteguhan pendirian politiknya. Tetapi berdasarkan pengalaman dan kepentingan pembangunan Partai di-daerah<sup>2</sup> yang baru, keb diaksanaan yang longgar ini perlu ditempuh. Dalam pada itu satu hal yang pasti untuk membedakan dengan penerimaan kembali anggota Partai yang sudah pernah dipetjat ialah se-kurang<sup>2</sup>nya penerimaan kembali anggota yang sudah pernah keluar dari Partai masatjalonnya bisa di-perpendek atau tidak melalui masatjalon samasekali.

Mengenai anggota Partai yang karena terpaksa oleh keadaan menyebabkan terputus hubungannya dengan Partai, dengan segera harus diterima kembali sebagai anggota sesudah menjampaikan permintaan, dan keterangannya mengenai sebab terputusnya hubungan dengan Partai dibenarkan oleh Komite Daerah Besar yang bersangkutan.

Menurut peraturan Konstitusi setiap permintaan menjadi anggota, yang harus disertai dengan keterangan yang bertanggungjawab dari anggota<sup>2</sup> Partai yang menanggungnya, harus dibitjarkan dan diputuskan oleh rapat Resort dan disahkan oleh Komite Partai yang lebih tinggi. Upatjara penerimaan tjalonanggota dilakukan dengan mengutjapkan Sumpah Partai oleh tjalonanggota yang bersangkutan. Ada yang mengusulkan supaya upatjara pengutjapan Sumpah Partai itu dilakukan sekali sadja, jaitu pada waktu penerimaan menjadi tjalonanggota, atau pada waktu penetapan menjadi anggota. Berdasarkan pengalaman bahwa dua kali pengutjapan Sumpah Partai itu mempunyai pengaruh dan mengandung arti pendidikan yang dalam bagi tiap anggota yang bersangkutan, maka dua kali upatjara pengutjapan Sumpah Partai itu dalam Konstitusi sekarang tetap dipertahankan.

Dalam soal penerimaan anggota baru, pengalaman selama ini menundukkan, bahwa peraturan<sup>2</sup> Konstitusi yang bersangkutan belum atau kurang dipatuhi sepenuhnya. Misalnja, seseorang yang diterima menjadi tjalonanggota tidak mengetahui untuk berapa lama harus menjjalani masatjalonnya. Hal ini menundukkan bah-

wa ketentuan mengenai pembagian menjadi empat golongan dari orang yang mau masuk menjadi anggota Partai, dimana bersamaan dengan itu ditetapkan juga masatjalonnja masing<sup>2</sup>, belum atau kurang diperhatikan sepenuhnya. Sebagai akibatnja ialah bahwa peningkatan dari seseorang tjalonanggota menjadi anggota tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinja. Dalam hubungan ini, perlu juga diperingatkan soal masih kurang dipenuhinja tanggungjawab dari para penanggung tjalonanggota, seperti yang ditentukan dalam peraturan Konstitusi. Jaitu masih sering terdjadi bahwa seseorang anggota menjadi penanggung tjalonanggota padahal ia sendiri tidak atau kurang mengenal tjalonanggota itu. Ia turut menjadi penanggung tjalonanggota hanya atas permintaan seseorang kawan anggota yang akan menanggung tjalonanggota itu, djadi hanya berdasarkan kepertajaan kepada keterangan yang diberikan oleh kawan anggota yang meminta bantuannya untuk turut menjadi penanggung. Kelemahan ini harus diatasi, sebab hal ini menundjukkan sikap yang tidak sungguh<sup>2</sup> disamping menundjukkan kurang kewaspadaan.

Pengalaman selama ini juga menundjukkan bahwa Komite<sup>2</sup> Partai yang bersangkutan kurang memenuhi kewadjabannya terhadap para tjalonanggota dalam hal memberikan didikan elementer Partai dan mengawasi kwalitet politik tjalonanggota. Ada gejala bahwa Komite<sup>2</sup> Partai hendak mengambil gampangnya saja dalam meningkatkan seseorang tjalonanggota menjadi anggota, jaitu hanya dengan memperhatikan ketjakaapan dan aktivitas yang lebih tjepat tampak dari seseorang tjalonanggota yang sedikit atau banyak mempunyai pengetahuan sekolah. Bahwa tinggi rendahnya tingkat pengetahuan seseorang tjalonanggota mempengaruhi lambat atau tjepatnja peningkatan pengetahuannya mengenai Program dan Konstitusi Partai, hal ini tidak dapat disangkal. Tetapi soalnya disini ialah, bantuan apa yang telah diberikan oleh Komite Partai terhadap para tjalonanggota yang berasal dari kaum buruh dan kaum tani, yang kebanyakannya memang tidak mendapat kesempatan untuk menerima pendidikan sekolah, supaya bisa lebih tjepat memahami Program dan Konstitusi Partai.

Djika sikap seperti yang diterangkan diatas ini diteruskan, maka akibatnja tidak bisa lain ketjuali memperlemah kedudukan elemen proletar dan semi-proletar didalam Partai. Sebagaimana ditentukan didalam Konstitusi, usia keanggotaan menjadi salahsatu syarat yang penting untuk bisa dipilih menjadi anggota Komite<sup>2</sup> Partai dan untuk menjadi penanggung bagi penerimaan anggota<sup>2</sup> baru. Djika peningkatan menjadi anggota dari para tjalonanggota yang berasal dari kalangan kaum buruh dan kaum tani men-

djadi terlambat karena kelalaian Komite<sup>2</sup> Partai untuk memberikan didikan pertama kepada mereka supaya bisa memenuhi kwalitet yang diperlukan untuk penetapannya menjadi anggota maka hal ini sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, berarti mengurangi hak dan kesempatan bagi elemen<sup>2</sup> proletar dan semi-proletar untuk memegang pimpinan didalam Partai dan bisa mengurangi prosentase elemen proletar dan semi-proletar dalam komposisi keanggotaan Partai seluruhnya.

Untuk mengakhiri gejala seperti yang diterangkan diatas ini, pada pokoknya Komite<sup>2</sup> Partai harus berusaha mematuhi sepenuhnya peraturan<sup>2</sup> Konstitusi yang bersangkutan dengan prosedur penerimaan anggota baru, dan tetap berorientasi kepada klas buruh dan Rakyat pekerja lainnya dalam penarikan anggota<sup>2</sup> baru.

Dalam hubungan ini adalah sangat penting untuk mentipikan petugas<sup>2</sup> yang terlatih yang khusus untuk mengurus penerimaan anggota<sup>2</sup> baru. Dyka tyukup mempunyai petugas yang demikian ini, maka akan bisa dilaksanakan peraturan Konstitusi yang menyatakan, bahwa sebelum mengambil putusan atau mensahkan penerimaan seseorang tyalonanggota, Komite Partai yang bersangkutan menunduk fungsionaris Partai untuk bertukar pikiran seluas<sup>2</sup>nya dengan orang yang mau menjadi tyalonanggota itu supaya dapat mengetahui ke-sungguh<sup>2</sup>an akan matnia memasuki Partai.

Orientasi kepada klas buruh dikota dan didesa didalam penarikan anggota baru adalah penting untuk mendjaga komposisi keanggotaan Partai supaya prosentase elemen proletar didalam Partai walaupun tidak merupakan mayoritas, se-kurang<sup>2</sup>nya seimbang dyka dibandingkan dengan elemen<sup>2</sup> dari klas lain diluar klas buruh. Untuk mentjapai ini, yaitu supaya prosentase elemen proletar dalam komposisi keanggotaan merupakan dyjumlah yang besar, Komite<sup>2</sup> Partai harus sungguh<sup>2</sup> menaruh perhatian dalam memberikan didikan elementer Partai kepada para tyalonanggota yang berasal dari kalangan kaum buruh ataupun buruhtani, sehingga mereka bisa ditingkatkan menjadi anggota tepat pada waktunya dan selanjutnya bisa dengan lebih aktif mendjalankan tugas<sup>2</sup>nya. Adalah sangat penting mendidik para tyalonanggota untuk membantu mereka memahami Konstitusi, Program dan politik Partai dan untuk membentuk dasar pandangan Komunis mereka dengan sikap yang tepat terhadap organisasi, kerdja, dan terhadap massa, dan untuk membentuk pandangan materialis mereka dalam bentuk bimbingan supaya mentjari setiap kebenaran dalam kenyataan.

Dengan mengemukakan pentingnya soal komposisi klas daripada keanggotaan Partai kita, tidaklah berarti bahwa asal sosial dari-

pada keanggotaan Partai kita merupakan satu<sup>2</sup>nja faktor yang menentukan berkuasanya ideologi proletar dan garis proletar didalam Partai. Sebab, seperti pernah dikatakan oleh Kawan Liu Sau-tji : „Faktor<sup>2</sup> yang menentukan jalah perdjjuangan<sup>2</sup> politik dan kehidupan politik Partai kita, pendidikan ideologi dan pimpinan ideologi serta pimpinan politiknya”. Djadi asal sosial daripada keanggotaan Partai kita tidaklah menentukan watak daripada Partai kita seperti halnya komposisi, klas daripada keanggotaan Partai Buruh di-negeri<sup>2</sup> Eropa yang tertentu tidak menentukan watak mereka. Meskipun mayoritas daripada anggota mereka berasal dari klas buruh tetapi Partai<sup>2</sup> Buruh itu tidak mewakili klas buruh.

Tetapi dengan prosentase elemen proletar yang tidak kecil didalam Partai, ditambah dengan pendidikan yang luas dan dalam mengenai Marxisme-Leninisme sebagai ideologi ilmiah daripada proletariat, maka sudah tentu akan lebih terdjamin lagi berkuasanya ideologi proletar didalam Partai dan kuatnja garis proletar daripada Partai.

Mengenai kewajiban dan hak<sup>2</sup> anggota, perumusan dalam peraturan Konstitusi sekarang telah mengalami perbaikan, sehingga kiranya akan bisa lebih mendjamai perkembangan yang normal daripada kehidupan intern Partai kita, bisa lebih meningkatkan aktivitas dan rasa tanggungjawab para anggota terhadap perdjjuangan Partai dan mendjamai kesatuan aksi daripada Partai.

Dalam peraturan Konstitusi sekarang, per-tama<sup>2</sup> ditjantumkan sebagai kewajiban anggota Partai ialah : mengundjungi rapat<sup>2</sup> dan kursus<sup>2</sup> Partai, membuatja dan menyebarkan harian serta penerbitan<sup>2</sup> Partai. Ini adalah karena memang kewajiban<sup>2</sup> inilah yang per-tama<sup>2</sup> harus dilakukan oleh setiap anggota, dan kewajiban<sup>2</sup> ini pula yang paling mungkin dilakukan oleh setiap anggota sedjak ia mulai diterima mendjadi tjalonanggota. Dengan mendjalankan kewajiban<sup>2</sup> yang pertama ini, tersedialah sjarat<sup>2</sup> untuk mendjalankan kewajiban yang kedua, jaitu : berusaha dengan radjin mempeladjadi dan terusmenerus mempertinggi pengertian tentang Marxisme-Leninisme serta menggunakannya dalam memecahkan masalah<sup>2</sup> kongkrit. Kewajiban<sup>2</sup> yang kedua ini adalah djuga merupakan kewajiban<sup>2</sup> yang sangat penting, karena disinilah terletak faktor yang menentukan apakah seseorang anggota Partai bisa memberikan sumbangan yang lajak kepada perdjjuangan Rakjat. Tanpa tingkatan kesedaran dan pengertian yang tinggi tentang Marxisme-Leninisme, tidaklah mungkin seseorang anggota Partai memberikan sumbangan kepada perdjjuangan Rakjat setjara sedar dan tepat, dan tidak mungkin ia mendjadi anggota Partai yang baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnja kesedaran

dan pengertian seseorang anggota tentang Marxisme-Leninisme menjadi ukuran daripada banyak sedikitnya sumbangan yang bisa diberikan oleh seseorang anggota kepada Partai dan kepada perjuangan Rakyat. Semakin tinggi kesadaran dan pengertian seseorang anggota tentang Marxisme-Leninisme, semakin besarlah sumbangan yang bisa diberikannya kepada Partai dan perjuangan Rakyat, sebaliknya, semakin rendah semakin terbataslah sumbangan yang bisa diberikannya.

Tentang betapa pentingnya kewajiban mempertahankan solidaritet dan persatuan Partai, yang tertantuni sebagai kewajiban nomor tiga dalam urutan, bisa kita fahami tanpa penjelasan yang panjang lebar, jika kita ingat, seperti yang diterangkan dalam Preambul, bahwa solidaritet dan persatuan Partai merupakan jiwa dan kekuatan daripada Partai. Didalam perjuangan Partai kita bisa menjapai kemenangan jika politiknya benar dan tepat. Tetapi dengan kebenaran dan ketepatan politik saja, kita masih belum bisa mengalahkan musuh<sup>2</sup> kita. Untuk ini politik Partai kita yang benar dan tepat itu harus didukung dan diperjuangkan oleh massa Rakyat yang bersatu. Tegasnya, untuk menjapai kemenangan kita harus sungguh<sup>2</sup> bisa menggalang persatuan dikalangan massa Rakyat. Tetapi bagaimanakah kita akan bisa mempersatukan massa Rakyat jika didalam Partai kita sendiri tidak ada solidaritet dan persatuan.

Partai kita yang sudah bertambah besar sekarang ini, yang sudah harus menghadapi segala lapangan pekerjaan, lebih daripada diwaktu yang sudah<sup>2</sup>, memerlukan solidaritet dan persatuan tidak hanya dikalangan para anggotanya, tetapi, dan terutama, dikalangan para kadernya. Partai kita yang sudah bertambah besar sekarang ini semakin banyak mempunyai kader yang ber-beda<sup>2</sup> dalam usia, dalam asal sosial dan dalam sifat serta lapangan pekerjaan. Partai kita semakin banyak mempunyai kader tua dan muda, semakin banyak mempunyai kader yang berasal dari kaum buruh, dari kaum tani, dari kalangan mahasiswa, intelektual, dsb. Mereka masing<sup>2</sup> disamping mempunyai segi<sup>2</sup> kekuatannya yang harus dikembangkan, juga mempunyai segi<sup>2</sup> kelemahannya yang harus terus-menerus dikikis. Semua kader ini merupakan kekuatan tulang-punggung daripada Partai, dan kekuatan Partai akan menjadi berlipat-ganda jika terdapat persatuan dan solidaritet dikalangan mereka. Untuk menjapai ini diperlukan sikap saling menghargai dan saling belajar.

Kewajiban<sup>2</sup> lainnya yang ditetapkan didalam peraturan Konstitusi, disamping kewajiban<sup>2</sup> untuk melaksanakan kritik-selfkritik, menentang rasa puas diri yang ber-lebih<sup>2</sup>an dan sikap sombong,

kewadjan untuk setia dan djudjur pada Partai dan senantiasa waspada, adalah kewadjan<sup>2</sup> untuk melaksanakan garis massa dalam politik, organisasi dan moral.

Seperti sudah diterangkan diatas, kemenangan perdjuaan Partai kita bergantung kepada bantuan massa. Sudah tentu massa Rakjat hanya mau membantu perdjuaan Partai kita djika mereka sudah mengenal Partai kita. Tetapi sebelum massa Rakjat mengenal Partai kita dari program politiknya, mereka lebih dulu mengenal dari orang<sup>2</sup>nya yang menjadi anggota Partai, artinya mereka lebih dulu mengenal Komunis sebagai perseorangan. Dan perkenalan pertama dengan orang<sup>2</sup> Komunis itu tidak selalu terjadi didalam aksi<sup>2</sup> perdjuaan, melainkan didalam pergaulan biasa se-hari<sup>2</sup>. Massa Rakjat mengenal kita sebagai Komunis pertama<sup>2</sup> dari sikap hidup dan tingkah-laku kita didalam pergaulan se-hari<sup>2</sup> dan dari kehidupan rumahtangga kita. Djika kita sebagai Komunis dikenal oleh massa sebagai orang yang tidak baik tingkah-lakunya didalam pergaulan se-hari<sup>2</sup>, atau dikenal dalam kehidupan rumahtangganya yang tidak beres, misalnya sering ramai<sup>2</sup> bertengkar sebagai suami-isteri dsb., maka semuanya ini sudah terang akan menjauhkan kita sebagai Komunis dari massa Rakjat, yang berarti djuga menjauhkan Partai kita dari massa Rakjat. Itulah sebabnya didalam Sumpah Partai ada dinyatakan bahwa kita sebagai Komunis harus tidak sadja menjadi tjontoh didalam perdjuaan untuk tanahair dan Rakjat, tetapi djuga harus berusaha menjadi tjontoh dalam kehidupan se-hari<sup>2</sup>. (*Tepuktangan*). Inilah yang dimaksudkan didalam peraturan Konstitusi tentang kewadjan mendjungtinggi moral Komunis.

Mengenai hak<sup>2</sup> anggota yang ditetapkan didalam peraturan Konstitusi, ada satu hal yang memerlukan sedikit pendjelasan. Jaitu mengenai hak anggota untuk mempertahankan pendiriannya djika tidak menyetujui sesuatu putusan, disamping harus melaksanakan putusan itu dengan tidak bersjarat.

Solidaritet dan persatuan didalam Partai kita ditijptakan atas dasar kesatuan ideologi. Oleh karena itu, kesatuan yang dituntut oleh Partai kita ialah kesatuan didalam segala soal pokok yang prinsipil. Meskipun demikian, didalam Partai kita tidak bisa dihindari kemungkinan timbulnya perbedaan pendapat, sedangkan kesatuan pendapat tidak bisa ditijptakan dengan paksaan. Tetapi disamping itu Partai kita mutlak menuntut adanya kesatuan tindakan didalam segala soal praktis. Oleh karena itu pemetjahan yang se-tepat<sup>2</sup>nya daripada dua kontradiksi ini tidak bisa lain ketjuali prinsip: setiap anggota Partai harus tunduk kepada organisasi Partai, suara tersedikit harus tunduk kepada suara terba-

njak, organisasi bawahan harus tunduk kepada organisasi diatasnya, dan seluruh organisasi Partai harus tunduk kepada Komite Central. Dengan ini berarti bahwa Partai mengharuskan setiap anggota yang berpendirian lain untuk melaksanakan putusan<sup>2</sup> Partai tanpa syarat dalam tindakan<sup>2</sup> praktis. Meskipun demikian, anggota Partai tersebut tetap berhak untuk mempertahankan pendiriannya, dan berhak untuk menjampakkannya kepada organisasi Partai dimana ia tergabung dan kepada badan pimpinan Partai yang lebih tinggi, dan organisasi Partai tidak boleh memaksa supaya melepaskan pendiriannya dengan kekuatan disiplin. Hal ini bukan saja tidak merugikan Partai, tetapi malahan bisa juga ada manfaatnya. Asal saja putusan<sup>2</sup> Partai itu memang benar, dan anggota yang berpendirian lain itu suka tunduk kepada kebenaran, maka akhirnya ia dengan senang hati dan dengan penuh kejakinan akan mengakui kebenaran daripada Partai dan mengakui kesalahannya sendiri. Tetapi jika, misalnya, kemudian terbukti bahwa kebenaran ada di pihak suara yang tersedikit, maka hal ini berarti bahwa perlindungan terhadap hak dari golongan yang mendapat suara sedikit bisa membantu memudahkan Partai untuk menemukan kebenaran.

Achirnya, dengan dihapuskannya „Bab Penghargaan dan Disiplin“ yang tersendiri, dan dengan dihapuskannya samasekali peraturan<sup>2</sup> mengenai penghargaan, dalam Bab Keanggotaan sekarang ini dimasukkan peraturan<sup>2</sup> mengenai disiplin Partai. Disamping dirumuskan dalam fasal<sup>2</sup> yang tersendiri mengenai tjara<sup>2</sup> untuk mengambil putusan tindakan disiplin dan bentuk<sup>2</sup> daripada tindakan<sup>2</sup> disiplin itu, didalam fasal<sup>2</sup> yang mengenai kewajiban dan hak<sup>2</sup> anggota juga dimasukkan peringatan<sup>2</sup> mengenai tindakan disiplin. Hal ini dianggap penting sebagai peringatan supaya peraturan<sup>2</sup> Konstitusi mengenai kewajiban dan hak<sup>2</sup> anggota itu sungguh<sup>2</sup> dipatuhi sepenuhnya, dan karena adanya tindakan disiplin itu pada dasarnya ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap kewajiban dan hak<sup>2</sup> anggota.

Tentang dihapuskannya peraturan mengenai penghargaan, ada dua alasanja. Pertama, dalam praktek selama ini sangat sukar untuk menjatakan setiap matjam tanda penghargaan itu dalam bentukja yang formil. Pemberian tugas yang lebih penting dan lebih bertanggungjawab kepada setiap anggota dan kader Partai adalah sesungguhnya merupakan salahsatu bentuk utama daripada penghargaan Partai terhadap mereka sesuai dengan kwalitet dan ketjakapannya masing<sup>2</sup>. Selama ini ternjata bahwa tanda penghargaan yang formil itu tidak diperlukan. Alasan kedua dan yang terpenting ialah, bahwa adanya fasal ini tidak memberikan pendidikan

jang baik. Pada dasarnya, kita kaum Komunis bekerdja bukan untuk mendapatkan penghargaan. Kita bekerdja untuk kepentingan Rakyat banyak. Djika kita mendapat kepertajaan dari massa Rakyat, karena hasil<sup>2</sup> dan kegiatan kita didalam pekerdjaan, maka inilah penghargaan jang se-tinggi<sup>2</sup>nja bagi kita sebagai anggota Partai Komunis. (*Tepuktangan*). Tetapi ini tidak berarti bahwa sudah tidak ada samasekali kemungkinan Komite atasan memberi penghargaan kepada Komite bawahan, atau Komite memberi penghargaan kepada anggota Partai jang menundjukkan djasa<sup>2</sup>nja jang luarbiasa.

## 2. Bab Susunan dan Prinsip<sup>2</sup> Organisasi

### Kawan<sup>2</sup>,

Dalam susunan organisasi Partai, peraturan Konstitusi sekurang menetapkan adanya satu bentuk organisasi Partai jang lebih tinggi dari organisasi Seksi Partai tetapi masih tetap dibawah CDB, jaitu organisasi Partai Pulau dan Kota jang didirikan di-pulau<sup>2</sup> dan kota<sup>2</sup> jang ditetapkan oleh CC. dan organisasi Partai Daerah Istimewa Jogjakarta. Dengan bentuk organisasi ini dimaksudkan supaya kepada organisasi Partai disesuaikan pulau, jang kehidupan masyarakatnja sesungguhnya merupakan suatu kesatuan, dan kepada organisasi Partai disesuaikan kota jang dianggap penting, misalnja karena vital atau besarnya djumlah penduduknja, bisa diberikan pimpinan setjara jang lebih baik oleh CDB jang bersangkutan.

Adanya organisasi Partai Daerah Istimewa Jogjakarta adalah se-mata<sup>2</sup> karena kenyataan masih adanya daerah istimewa ini, sehingga diperlukan adanya Komite Partai jang tersendiri untuk mengkoordinasi dan memimpin Seksi<sup>2</sup> Partai jang ada didaerah ini.

Dengan berlakunya Undang<sup>2</sup> No. 1 tahun 1957 mengenai otonomi daerah, jang menghapuskan nama provinsi, maka hapus pulalah sebutan organisasi Partai Provinsi dan Komite Provinsi. Sebagai gantinya disebutlah organisasi Partai Daerah Besar dan Komite Daerah Besar. Sebagai nama untuk organisasi Partai Daerah Besar, tjukuplah djika ia disebut dengan nama Daerah Besar itu saja, sebagai tjontoh : untuk organisasi Partai Daerah Besar Djawa Timur tjukup disebut „PKI Djawa Timur” dan Comitenja disebut „Komite PKI Djawa Timur”.

Djuga berhubung tidak ada lagi nama kabupaten, maka untuk Seksi Partai dikota dan dibekas kabupaten jang sama namanja perlu diadakan perbedaan sebutan. Jaitu untuk Seksi Partai dikota perlu disebutkan „kotanja” dan untuk jang dibekas kabupaten tjua-

kup disebut „nama daerahnja“. Tjontohnja : untuk Komite Seksi kota Bogor disebut „Komite Seksi Kota Bogor“ dan untuk bekas kabupaten Bogor disebut „Komite Seksi Bogor“.

Untuk Kongres dan Konferensi<sup>2</sup> Partai yang akan mengadakan pemilihan Komite, peraturan Konstitusi sekarang mengharuskan dibentuknja Komisi Pemilihan yang bertugas mengusulkan tjara<sup>2</sup> pemilihan dan daftar tjalon berdasarkan tjalon<sup>2</sup> yang diajukan.

Mengenai tjara pemilihannya sendiri, apakah setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka, peraturan Konstitusi tidak menetapkan salahsatunya. Ini adalah karena pemilihan yang dilakukan setjara rahasia ataupun setjara terbuka masing<sup>2</sup> mempunyai segi<sup>2</sup> baik dan tidak baiknya, sedangkan pertimbangan mengenai hal ini bisa ber-lain<sup>2</sup>an pada waktu dan mengenai persoalan<sup>2</sup> yang tertentu. Oleh karena itu, penetapannya diserahkan kepada kebidjaksanaan sidang yang bersangkutan atas usul Komisi Pemilihan.

Peraturan Konstitusi sekarang menetapkan sjarat usia keanggotaan seseorang untuk bisa ditjalonkan menjadi anggota Komite Partai. Ini adalah penting sebagai sjarat untuk membentuk Komite Partai yang stabil, karena usia keanggotaan merupakan salahsatu ukuran daripada kwalitet seseorang anggota Partai. Tetapi usia keanggotaan sadja tidaklah tjukup untuk mengukur kwalitet seseorang anggota Partai. Masih ada hal<sup>2</sup> lain yang tidak kurang pentingnja yang harus dipertimbangkan dengan masak<sup>2</sup>, seperti mengenai kemurnian ideologinja dilihat dari sudut politik dan moralnja, mengenai kewibawaan dan keichlasannya, dsb. Soal<sup>2</sup> sematjam ini sukar untuk bisa didiskusikan dengan teliti dan penuh kebidjaksanaan didalam sidang yang luas. Disimilah letak pentingnja tugas Komisi Pemilihan yang harus menjusun daftar tjalon. Oleh karena itu anggota<sup>2</sup> Komisi Pemilihan harus terdiri dari anggota<sup>2</sup> Partai yang sungguh<sup>2</sup> tepertjaja. (*Tepuktangan*).

Untuk kepentingan pembangunan Partai yang merata dengan pembagian kader yang se-baik<sup>2</sup>nja atau dengan penempatan kader untuk sementara, peraturan Konstitusi sekarang memberikan keleluasaan kepada Komite Partai yang lebih tinggi untuk, bila dianggap perlu, memindahkan fungsionaris<sup>2</sup> organisasi Partai bawahan.

Achirnja, yang bersangkutan dengan Bab ini perlu disebutkan peraturan Konstitusi yang mengenai hak organisasi bawahan untuk mengusulkan perubahan kepada organisasi diatasnja mengenai putusannya yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan yang njata didaerahnja atau dengan sesuatu lapangan tertentu. Ini adalah ditudjukan untuk melaksanakan prinsip sentralisme-demokratis yang sedjati dalam hubungan antara organisasi atasan dengan organi-

sasi bawahan. Ada jang mengchawatirkan bahwa kesempatan ini bisa disalahgunakan sebagai alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan sesuatu putusan. Hal ini memang bisa sadja terdjadi. Tetapi sebaliknya, djika benar terdjadi demikian, hal ini malahan bisa membantu untuk mengetahui ketidakberesan dari sesuatu organisasi bawahan. Jang terang jalah, bahwa ketentuan demikian ini akan memberikan dorongan bagi setiap organisasi bawahan untuk melaksanakan putusan<sup>2</sup> organisasi atasannya dengan penuh keajaiban dan setjara kreatif. (*Tepuktangan*).

### 3. Bab Organisasi Pusat Partai

Kawan<sup>2</sup>,

Mengenai peraturan<sup>2</sup> jang bersangkutan dengan organisasi Pusat Partai, hanya ada dua hal jang perlu diterangkan. Jang pertama jalah bersangkutan dengan soal Kongres Nasional Partai. Dalam peraturan Konstitusi sekarang, Kongres Nasional Partai diadakan 5 tahun sekali. Ini adalah karena mengingat beratnya sjarat<sup>2</sup> untuk bisa melangsungkan Kongres, dan mengingat lamanya waktu jang diperlukan untuk melaksanakan putusan<sup>2</sup>nya. Djika waktu antara dua Kongres tidak diperpanjang, maka mengingat bahwa untuk mempersiapkan Kongres diperlukan waktu jang tidak sedikit, dan begitu djuga untuk melaksanakan putusan<sup>2</sup>nya, jang semuanya ini antara lain disebabkan karena keadaan tanahair kita jang luas dan berupa kepulauan dengan alat<sup>2</sup> perhubungannya jang sukar, berartilah bahwa setiap Komite Central jang baru sadja dipilih oleh Kongres, akan hanya mempunyai sedikit waktu sadja untuk melaksanakan putusan<sup>2</sup> Kongres itu karena sudah harus segera mengadakan persiapan untuk Kongres lagi.

Mengenai sahnja Kongres, peraturan Konstitusi menetapkan bahwa ia tidak hanya didasarkan atas djumlah utusan jang mewakili lebih dari separoh djumlah anggota, tetapi djuga harus sekurang<sup>2</sup>nya mewakili 1/3 djumlah organisasi<sup>2</sup> Daerah Besar. Ini adalah penting untuk mendjaga persatuan dan kebulatan Partai kita setjara nasional, mengingat bahwa organisasi<sup>2</sup> Daerah Besar Partai kita tidak hanya harus dinilai dari segi kekuatan djumlah anggotanya, tetapi djuga harus dari segi unsur kesukuaannya.

Djuga Konstitusi sekarang mengatur kedudukan anggota dan tjalonanggota CC dalam Kongres, jaitu mereka jang tidak mendjadi utusan, hadir dalam Kongres dengan hak bitjara tetapi tanpa hak suara dalam mengambil putusan. Ini adalah suatu penjemputan.

Jang kedua jalah jang bersangkutan dengan CC. Dalam Kon-

stitusi sekarang ditetapkan bahwa CC disamping membentuk Politbiro dan Sekretariat, djuga membentuk Dewan Harian Politbiro. Perlunya ada Dewan Harian Politbiro ialah supaya Sekretariat CC bisa sepenuhnya melakukan pekerjaan sehari-hari dari CC sedangkan pekerjaan pimpinan harian CC dilakukan oleh Dewan Harian Politbiro. Tindakan ini diambil berdasarkan pengalaman seperti yang diterangkan oleh Kawan D.N. Aidit dalam laporannya kepada Sidang Pleno Ke-VI CC, bahwa karena Politbiro tidak bisa sering<sup>2</sup> mengadakan rapat, maka tidak djarang Sekretariat CC tidak hanya harus melakukan pekerjaan sehari-hari dari CC, tetapi djuga dipaksa oleh keadaan untuk mengambil oper rol badan pimpinan pusat Partai.

Ketjua<sup>2</sup> itu sebutan Sekretaris Djendral dalam Konstitusi sekarang diganti dengan sebutan Ketua. Hal ini tidak mengandung perubahan isi apa<sup>2</sup>. Sebab, selama ini kedudukan Sekretaris Djendral adalah djuga sebagai Ketua CC, jaitu Ketua seluruh Partai.

Djuga dalam Konstitusi sekarang ditetapkan sebutan Sekretaris<sup>2</sup> CC bagi Kepala dan Wakil Kepala Sekretariat CC.

#### 4. Bab Organisasi<sup>2</sup> Daerah Partai

Kawan<sup>2</sup>,

Mengenai peraturan<sup>2</sup> Konstitusi yang bersangkutan dengan organisasi<sup>2</sup> daerah Partai hanya ada satu soal yang perlu diterangkan, jaitu mengenai Konferensi Partai daerah.

Dalam Konstitusi sekarang ditetapkan adanya dua matjam Konferensi. Yang pertama, ialah Konferensi yang berkedudukan sebagai Kongres Daerah, jaitu sebagai badan pimpinan yang tertinggi dari sesuatu organisasi daerah Partai. Utusan<sup>2</sup> untuk Konferensi ini dipilih oleh Konferensi Partai yang langsung dibawahnya, dan Konferensi ini dipimpin oleh Presidium, yang disamping bertugas memimpin jalannya Konferensi djuga melakukan fungsi dan kekuasaan Komite Partai selama Konferensi.

Yang kedua, ialah Konferensi antar-waktu yang diadakan diantara dua Konferensi. Jika dibandingkan dengan yang dipusat, Konferensi antar-waktu ini adalah sama kedudukan dan fungsinya seperti Konferensi Nasional Partai. Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, Konferensi antar-waktu dihadiri oleh utusan<sup>2</sup> yang dipilih oleh Sidang Pleno Komite yang langsung dibawahnya dan putusan<sup>2</sup>nya baru berlaku sesudah disahkan oleh Komite Partai yang bersangkutan. Kiranya tidak perlu diterangkan lagi bahwa pimpinan Konferensi antar-waktu ada ditangan Komite Partai yang mengadakannya.

## 5. Bab Organisasi Basis Partai

### Kawan<sup>2</sup>.

Mengenai organisasi basis Partai, peraturan Konstitusi sekarang menentukan tjara yang lain dalam penjabutannya. Djika tadi-nja diputakan bahwa organisasi basis Partai ialah Resort Partai, atau sebaliknya Resort Partai ialah organisasi basis Partai, maka dalam Konstitusi sekarang hal ini dikemukakan setjara lain. Jaitu : organisasi basis Partai bentuknja ada dua matjam. Jang pertama, ialah organisasi basis Partai jang beranggota kurang dari 100 orang jang disebut Resort Partai. Jang kedua ialah organisasi basis Partai jang beranggota 100 orang atau lebih, jang disebut Resort Besar Partai.

Dibawah Resort Besar Partai dibentuk beberapa Resort Partai. Meskipun Resort Partai dibawah Resort Besar ini mempunyai kedudukan jang sama seperti Resort Partai biasa, dalam arti mempunyai kewadjaban<sup>2</sup> jang sama seperti jang ditetapkan dalam Konstitusi, tetapi ia tidak bisa dinamakan organisasi basis Partai. Sebab jang berkedudukan sebagai organisasi basis Partai ialah Resort Besarnya. Hal ini adalah karena peraturan Konstitusi menetapkan, bahwa di tiap pabrik, tambang, desa, kampung, djalang, perusahaan, sekolahan, perguruan tinggi, kantor dan tempatkerdja<sup>2</sup> lainnya, dengan tidak pandang berapa banyaknya anggota Partai (dari tiga orang sampai ratusan), hanja dibentuk satu kesatuan organisasi Partai.

Djadi, djika misalnja, suatu Komite Subseksi menerangkan bahwa ia memimpin sekian Resort, maka ini dengan sendirinja tidak termasuk Resort jang berada dibawah Resort Besar Partai. Sebab, kedudukan dan tugas Komite Subseksi ialah mengkordinasi dan memimpin organisasi basis Partai, sedangkan Resort Partai jang berada dibawah atau didalam Resort Besar Partai bukan organisasi basis Partai.

Mengenai djumlah anggota Grup, peraturan Konstitusi sekarang memberikan kelonggaran sampai sebanjak-banyaknja 10 orang. Dalam menjusun Grup, meskipun hal ini tidak ditjantumkan didalam Konstitusi, patutlah diperhatikan supaya anggota<sup>2</sup> wanita dimasukkan dalam Grup tersendiri. Hal ini menurut pengalaman adalah baik sebagai dorongan dan kesempatan untuk timbulnja kader<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> wanita jang lebih aktif. Djuga perlu diper-ingatkan bahwa karena adanya Grup ini hanja sekedar untuk memudahkan pekerjaan, maka bagaimanapun djuga aktifnja Grup ia harus didjaga djangan sampai mengambil rol Resort Partai. Aktivitet segenap anggota dalam Grup<sup>2</sup> harus dipersatukan dan

dipusatkan oleh Resort Partai, sehingga merupakan aktivitas Resort sebagai kesatuan. Ini untuk lebih jelasnya berarti, bahwa tidak boleh kedudukan Komite Resort ditingkatkan sebagai badan pimpinan yang lebih tinggi, melainkan ia harus tetap merupakan badan pimpinan yang langsung memimpin pekerjaan para anggota.

Organisasi basis Partai merupakan matarantai yang pokok yang menghubungkan Partai dengan massa Rakyat yang luas. Oleh karena itu adalah tugas politik yang penting dari badan pimpinan Partai untuk selalu memeriksa dan memperbaiki pekerjaan organisasi basis ini. Kelemahan yang menondjol selama ini ialah berupa kebiasaan dari badan pimpinan Partai yang lebih tinggi yang hanya sibuk menjuruh organisasi basis supaya menjalankan instruksi yang diberikannya, tetapi kurang sekali memeriksa bagaimana organisasi basis itu bekerja dan kurang sekali memberikan didikan dan bantuan yang kongkrit kepada anggota dalam organisasi basis. Kelemahan ini harus dengan sekuat tenaga diusahakan untuk mengatasinya.

## 6. Bab Fraksi<sup>2</sup> Partai Dalam Organisasi<sup>2</sup> Bukan-Partai

Kawan<sup>2</sup>,

Mengenai Bab ini, Konstitusi sekarang mengadakan dua macam perubahan yang merupakan penyempurnaan. Yang pertama ialah mengenai Fraksi Partai dalam Dewan Perwakilan dipusat dan didaerah. Mengingat pentingnya pekerjaan dalam Dewan Perwakilan, maka peraturan mengenai Fraksi dalam Dewan Perwakilan dirumuskan dalam satu pasal tersendiri setjara lebih lengkap.

Pekerjaan dalam Dewan Perwakilan, baik dipusat maupun didaerah, adalah penting dilihat dari sudut pekerjaan politik Partai dan dari sudut perjuangan menjapai perbaikan kongkrit, bagaimanapun ketjilnja, bagi massa Rakyat. Djika setiap anggota Fraksi Partai kita dalam Dewan Perwakilan sungguh melakukan pekerjaannya dengan dipimpin oleh pengertian ini, maka dengan melihat pekerjaan kita itu, massa Rakyat akan menjadi lebih mengerti dan lebih yakin lagi akan pentingnya Dewan Perwakilan sebagai badan dimana dapat dibela dan diperjuangkan hak serta tuntutan massa Rakyat. Dan dari sinilah datangnja kekuatan dari massa Rakyat untuk berjuang mempertahankan dan meluaskan hak Dewan Perwakilan.

Tetapi pekerjaan dalam Dewan Perwakilan mengandung bahaya yang bisa merusak atau melemahkan ideologi anggota Fraksi Partai kita, karena fasilitas yang bisa didapat dari kedudukan se-

bagai anggota Dewan Perwakilan. Oleh karena itu, peraturan Konstitusi sekarang menetapkan bahwa anggota<sup>2</sup> Fraksi dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan harus mendjaga namabai<sup>2</sup> dirinya masing<sup>3</sup>, yang berarti mendjaga namabai<sup>2</sup> Partai, tetap hidup setjara sederhana, tetap bersikap rendah hati dalam hubungan dengan Rakjat dan tetap menempatkan Partai diatas dirinya sendiri.

Perubahan yang kedua ialah, bahwa kedudukan dan hak<sup>2</sup> Fraksi Partai dalam Kongres Nasional dan Konferensi<sup>2</sup> ditentukan oleh Komite Partai yang bersangkutan. Ini berarti bahwa Komite<sup>2</sup> Partai bisa menetapkan kebijaksanaan untuk mengatur tjara yang se-baiknja supaya Fraksi<sup>2</sup> Partai bisa diwakili dalam Kongres Nasional dan Konferensi<sup>2</sup> Partai.

## **7. Bab Badan Kontrol Partai**

### **Kawan<sup>2</sup>,**

Mengenai Bab ini, Konstitusi sekarang menunjukkan adanya perubahan yang agak besar. Disamping penetapan tentang pembentukan Komisi Verifikasi, Konstitusi sekarang menetapkan bahwa Komisi Kontrol tidak hanya dibentuk dipusat tetapi setjara pasti dibentuk djuga di-organisasi<sup>2</sup> daerah Partai sampai ke Seksi.

Untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Partai dan mengkonsolidasi hasil<sup>2</sup> pembangunan Partai yang telah ditjapai, rol Komisi Kontrol ini adalah sangat penting.

Tugas Komisi Kontrol sekarang tidak hanya menerima pengaduan<sup>2</sup> dan permintaan banding, melainkan djuga harus dengan aktif dan teratur memeriksa pelaksanaan Konstitusi Partai dilapangan organisasi, politik, ideologi dan moral.

Berbeda dengan Komisi Verifikasi yang harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya langsung kepada Kongres Nasional Partai atau kepada Konferensi Partai, Komisi Kontrol dibentuk oleh dan bekerja dibawah pimpinan Komite Partai yang setingkat. Ini berarti bahwa setiap putusan dari Komisi Kontrol adalah sudah dengan persetujuan Komite Partai yang bersangkutan.

Adapun mengenai Komisi Verifikasi, didalam peraturan Konstitusi diterangkan bahwa kewajibannya ialah : mengontrol administrasi Partai, pembukuan dan penggunaan keuangan Partai, inventaris Partai dan usaha<sup>2</sup> produktif Partai. Pelaksanaan kewajiban ini tidaklah se-mata<sup>2</sup> bersifat administratif belaka. Adalah menjadi tugas Komisi Verifikasi untuk menjegah timbulnja birokrasi dalam Komite<sup>2</sup> Partai dalam melakukan pekerjaan<sup>2</sup>nja, misalnja didalam mengurus surat-menjurat, laporan<sup>2</sup>, instruksi<sup>2</sup>, pemasukan

dan pengeluaran keuangan Partai, dsb.

Sedikit menjangkut Bab Keuangan Partai, perlu diterangkan bahwa dalam peraturan Konstitusi sekarang tidak tegas<sup>2</sup> dinyatakan keharusan setiap anggota Partai untuk menjangkai sendiri iuran dan segala pembayaran untuk Partai yang sudah menjadi kewajibannya kepada anggota Komite Partai yang berkewajiban menerimanya. Hal ini dimaksudkan sebagai dorongan bagi petugas<sup>2</sup> Partai yang berkewajiban menerima dan mengumpulkan iuran dan sokongan untuk Partai, supaya juga melakukan usaha<sup>2</sup> dan tjara<sup>2</sup> yang bisa lebih mempermudah dan melantjarkan pemasukan keuangan Partai.

Ketjuali itu, dalam menetapkan djumlah iuran dinyatakan "sekurang<sup>2</sup>nja". Ini berarti diperlukan kebidjaksanaan didalam menetapkan djumlah iuran dari anggota<sup>2</sup> Partai yang termasuk didalam satu golongan. Sebagai tjontoh, kita ambil misalnya golongan anggota yang berpenghasilan kotor dari Rp. 251.— sampai Rp. 500.—. Dengan mempertimbangkan, misalnya, djumlah keluarga dari anggota<sup>2</sup> yang bersangkutan, maka sudah selajaknya djika anggota<sup>2</sup> yang berpenghasilan kotor Rp. 251.— dan Rp. 500.— itu, tidak sama semuanya harus membayar iuran masing<sup>2</sup> hanya Rp. 1.—

## 8. Bab Hubungan Partai Dengan Pemuda Rakjat

Kawan<sup>2</sup>,

Bab ini adalah Bab yang baru samasekali.

Sedjarah perdjuaan kemerdekaan kita menundjukkan betapa besarnya rol yang telah dan masih akan terus dilakukan oleh pemuda. Kita sekarang bisa menjaksikan betapa banyaknya kader<sup>1</sup> Partai dan kader<sup>2</sup> yang memimpin organisasi<sup>2</sup> massa buruh, tani, wanita dll. yang berasal dari gerakan pemuda. Kita juga bisa menjaksikan betapa besarnya bantuan pemuda dalam aksi<sup>2</sup> dan kampanye<sup>2</sup> yang besar, seperti misalnya dalam kampanye<sup>2</sup> pemilihan umum dan pada aksi<sup>2</sup> pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> Belanda. Semuanya ini menundjukkan bahwa pemuda merupakan tenaga tjadangan yang tepertjaja dan pembantu yang kuat bagi Partai kita. (*Tepuktangan*).

Organisasi Pemuda manakah yang telah terbukti menjadi sumber tenaga tjadangan dan pembantu Partai kita?

Pengalaman selama ini dan kenyataan sekarang menundjukkan, bahwa organisasi pemuda itu ialah Pemuda Rakjat. (*Tepuktangan*, seruan : „*Hidup Pemuda Rakjat!*“).

Ditetapkannya hubungan Partai dengan Pemuda Rakjat didalam Konstitusi berarti meletakkan kewajiban kepada Partai seperti

jang dirumuskan didalam peraturan Konstitusi, jaitu : bahwa organisasi<sup>2</sup> Partai dari semua tingkat harus memberikan perhatian jang besar kepada pekerjaan Pemuda Rakjat dilapangan ideologi dan organisasi, memberikan bimbingan kepada Pemuda Rakjat dalam pendidikan teori Marxis-Leninis untuk para anggotanja, dan mendjaga supaya terdjamin hubungan jang erat antara Pemuda Rakjat dengan massa pemuda jang luas.

Dengan semuanya ini berarti bahwa Pemuda Rakjat sebagai organisasi massa pemuda adalah berdiri sendiri, hanya pimpinan politik dan pimpinan ideologinja jang ada pada Partai kita.

Pemuda adalah hari depan kita, pewaris seluruh perjuangan kita. Karena itu kita yakin bahwa segenap organisasi Partai kita tidak akan mengabaikan tugas jang telah ditetapkan dalam Konstitusi.



### Kawan<sup>2</sup>,

Demikianlah seluruh pendjelasan jang saya anggap perlu diberikan kepada Rentjana Perubahan Konstitusi Partai kita.

Komisi Perubahan Konstitusi jang kebetulan saya ketua telah menerima tjukup banyak usul<sup>2</sup> perubahan dan saran<sup>2</sup>, djuga sambutan<sup>2</sup> sebagai pernyataan persetudjuan terhadap Rentjana Perubahan Konstitusi jang disampaikan keseluruhan organisasi Partai sebagai bahan diskusi persiapan Kongres bersama dengan Rentjana Tesis dan Rentjana Perubahan Program. Komisi menerima tidak kurang dari 158 usul<sup>2</sup> perubahan. Ada diantara usul<sup>2</sup> itu jang dapat diterima, ada jang diterima tetapi tidak sepenuhnya dan ada djuga jang tidak diterima samasekali, karena meskipun tidak salah tetapi dianggap kurang perlu. Tetapi pada umumnya usul<sup>2</sup> perubahan itu tidak bersifat bertentangan dengan rentjana, melainkan bersifat penjempurnaan.

Naskah jang sekarang sudah ada pada kawan<sup>2</sup> itu adalah naskah jang sudah mengalami perubahan dan perbaikan<sup>2</sup> berdasarkan usul<sup>2</sup> jang kita terima. Djika ada diantara kawan<sup>2</sup> jang masih merasa perlu untuk mengusulkan perubahan<sup>2</sup> baru lagi, maka saya usulkan supaya hal ini tjukup diselesaikan dengan Komisi Resolusi. (Suara : „Setudju“).

Achirnja kawan<sup>2</sup>, sebagai penutup laporan ini ingin saja mengingatkan bahwa, seperti diwaktu jang sudah<sup>2</sup>, Partai kita masih akan banyak menghadapi udjian<sup>2</sup> jang berat. Tetapi saja bisa mengatakan dengan pasti bahwa kesulitan<sup>2</sup> jang dihadapi oleh Partai dan oleh kebanyakan anggota Partai kita dimasa jang lampau, begitu pula penjelewengan<sup>2</sup> jang sebenarnja tidak perlu terdjadi, se-

bab pokoknja ialah terletak pada kurangnya persiapan teori daripada Partai kita.

Partai kita memang adalah Partai dari suatu negeri yang masih terbelakang, negeri yang masih setengah-feodal dimana proletariatnya tidak saja ketjil djumlahnja djika dibandingkan dengan djumlah kaum tani dan klas burdjuis ketjil umumnja, tetapi djuga usianya masih muda djika dibandingkan dengan proletariat Eropa, dan kebudajaannya masih ketinggalan djika dibandingkan dengan kebudayaan klas burdjuis. Tetapi dengan gembleran perdjuaan politik, disertai dengan pendidikan ideologi dan pimpinan ideologi serta pimpinan politik yang Marxis-Leninis, seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Komite Central Partai kita dibawah pimpinan Kawan Aidit (*tepuktangan*). Partai kita tentu akan terus bisa berkembang dan maju memenuhi syarat<sup>2</sup> dan kwalitet sebagai Partai Marxis-Leninis (*tepuktangan lama*), seperti Partai<sup>2</sup> Komunis dinegeri<sup>2</sup> kapitalis yang sudah maju, sehingga bisa menjadi kebanggaan Rakyat pekerdja Indonesia dan gerakan buruh sedunia. (*Tepuktangan*).

Dengan Partai yang demikian itu, betapapun djuga besarnya rintangan dan kesulitan yang dihadapi kita pasti akan bisa mengatasinja. (*Tepuktangan*).

Hiduplah Partai Komunis Indonesia (*..Hidup !!*) bersama segenap pentjunta dan ketuanja, Kawan Aidit! (*..Hidup !! Tepuktangan lama semua berdiri*).



## PIDATO PENGANTAR UNTUK RENTJANA PERUBAHAN PROGRAM PKI

*Disampaikan oleh Kawan NJOTO, Wakil Sekretaris Djenderal II  
CC PKI pada sidang tgl. 9 September 1959*

Kongres jang mulja,  
Kawan<sup>2</sup> jang tertjinta,

Disepandjang sedjarah PKI jang kini hampir berusia 40 tahun Kongres kita sekali ini adalah Kongres jang terbesar. (*Tepuktangan*).

Kongres ini mendjadi perhatian kawan<sup>2</sup> tetapi djuga lawan<sup>2</sup> didalamnegeri (*tawa, tepuktangan*); Kongres ini mendjadi perhatian kawan<sup>2</sup> tetapi djuga lawan<sup>2</sup> diluarnegeri. (*Tepuktangan*). Kongres ini adalah mertjusuar disamudera perdjjuangan klas Indonesia — daripadanya akan memantjar pidjar dan sinar, menerangi djalan perdjjuangan proletariat dan Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

Adalah suatu kehormatan jang besar bagi saja, bahwa kepada saja dipertjajakan tugas mengantarkan Rentjana Perubahan Program Partai ini. Saja pergunakan kesempatan ini untuk menjampaiakan terimakasih jang tidak terhingga kepada Kongres jang besar ini dan kepada Partai kita jang besar! (*Tepuktangan*).

### 1

Kawan<sup>2</sup>,

Kalau kita bagi sedjarah modern Indonesia mendjadi dua periode: periode sebelum Revolusi Agustus dan periode sesudahnja, maka njatalah bahwa dari 6 Kongres Partai kita 3 dilangsungkan dalam periode jang pertama dan 3 lagi dalam periode jang kedua. Tiap<sup>2</sup> Kongres itu merupakan tugu jang menghubungkan masalampau, masakini dan masadepan Partai kita. (*Tepuktangan*).

Dari ke-lima<sup>2</sup> Kongres jang lampau, baru Kongres ke-V-lah jang berhasil merumuskan suatu program jang mendjawab semua masalah pokok dan penting dari revolusi Indonesia setjara menjeluruh dan tepat.

Kongres ke-I yang dilangsungkan di Semarang pada bulan Desember 1921, Kongres ke-II — Djakarta Februari 1924, Kongres ke-III — Kotagede Desember 1924, dan Kongres ke-IV — Solo Djanuari 1947, karena berbagai faktor, karena keterbatasan<sup>2</sup> historis, belum sempat menjusun program Partai yang menjeluruh. Program<sup>2</sup> yang disusun ketika itu atau kurang lengkap dan hanya meliputi beberapa soal tertentu saja, atau tidak bebas dari kesalahan<sup>2</sup> tertentu, "kiri" maupun kanan. Seandainya Kongres ke-V Partai kita djadi berlangsung pada bulan September 1948, insitjalah pokok<sup>2</sup> fikiran yang tertjantung didalam Resolusi Konferensi Nasional Agustus '48 "Djalan Baru untuk Republik Indonesia" akan mendjadi pokok<sup>2</sup> Program Partai. Tetapi baru ditahun 1954 kita sempat melangsungkan Kongres ke-V

Dengan berhasilnja Kongres Nasional ke-V Partai merumuskan suatu Program yang menjeluruh dan tepat, maka Kongres Nasional ke-V itu benar<sup>2</sup> merupakan lompatan maju yang penting sekali dalam sedjarah PKI. Kawan Aidit menamakan Kongres itu "membawa PKI dan gerakan revolusioner dinegeri kita puluhan tahun lebih maju". (*Tepuktangan*).

Seperti dikatakan didalam Laporan Umum: "Kongres Nasional ke-V Partai telah memberi djawaban mengenai semua masalah yang penting dan pokok daripada Revolusi Indonesia. Kongres itu telah meletakkan dasar<sup>2</sup> untuk pekerdjaan Partai yang lebih baik dalam menggalang front persatuan nasional, telah memberikan djawaban tentang semua masalah pokok pembangunan Partai. Perkembangan sesudah Kongres menundjukkan bahwa semuanya ini adalah benar".

Sedjarah 5 tahun terachir ini membenarkan sepenuhnya kesimpulan ini, djuga membenarkan pernyataan Kawan Aidit bahwa Kongres ke-V "membawa PKI dan gerakan revolusioner dinegeri kita puluhan tahun lebih maju". Proses, yang dalam keadaan non-revolusioner akan memakan waktu ber-puluh<sup>2</sup> tahun, dalam keadaan revolusioner dinegeri kita telah selesai dalam waktu beberapa tahun saja. Selama 14 tahun ini perdjjuangan kemerdekaan Rakjat kita berdjalan benar<sup>2</sup> melalui hukum dialektika: ofensif mendjadi defensif, defensif mendjadi ofensif, dst. Di-hari<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945-1948 perdjjuangan Rakjat ofensif dan pemerintah<sup>2</sup> yang memegang kekuasaan ketika itu adalah pemerintah<sup>2</sup> front persatuan nasional. Antara tahun 1948 dan 1952 ofensif berbalik mendjadi defensif dan pemerintah<sup>2</sup> yang berkuasa ketika itu adalah pemerintah<sup>2</sup> kepalabatu Masjumi-PSI dengan Hatta sebagai kepalanja. Mulai tahun 1952, dengan aksentuasi sedjak Kongres ke-V Partai kita, maka perdjjuangan Rakjat kembali ofen-

sif, dan dengan hanya interupsi singkat kabinet badut Burhanuddin Harahap (*tawa, tepuktangan*) maka pemerintah<sup>2</sup> berada ditangan kaum Nasionalis, yang bekerdjasama dengan kaum Islam demokratis dan dengan sokongan Partai Komunis. Demikianlah selama 7 dan khususnya 5 tahun belakangan ini, kaum kepalabatu kian hari kian terpentil dan kian hari kian terbuka djuga hubungan<sup>2</sup> mereka dengan kaum imperialis asing.

Seandainya kita tidak mempunyai program yang tepat, program Kongres Maret 1954, tidak mungkin perkembangan ditanahair kita sepesat sekarang, karena tanpa program yang tepat, proletariat ibarat pedjuang dengan tangan telandjang, pedjuang tanpa sendjata.

Berkat program yang tepat, yang merupakan sendjata strategi dan taktik yang tadjam, dukuti oleh pelaksanaannya yang gemilang dibawah pimpinan Komite Central kita, maka tanahair kita sekarang berwadjah seperti adanya sekarang : sekalipun melalui berbagai rintangan yang pedih dan sakit, tetapi perkembangan tidak kekanan, melainkan kekiri, dan dominasi makin lama bukan makin djatuh ketangan kaum imperialis, kaum tuantanah dan burdjuasi komprador, melainkan ketangan burdjuasi nasional, burdjuasi ketjil, kaum tani dan kaum buruh. (*Tepuktangan*).

Dengan tidak meremehkan rintangan<sup>2</sup> besar yang masih mungkin dan akan kita djumpai, namun perkembangan negeri kita se'ama ini telah menggugah kegembiraan pada setiap Komunis Indonesia, bahkan pada setiap orang progresif Indonesia dan pada setiap orang progresif diseluruh dunia.

## 2

Kawan<sup>2</sup>,

Didalam Laporan Umum dinjatakan : „Berdasarkan pengalaman<sup>2</sup> selama masa yang kita tindjau, dapatlah kita simpulkan bahwa pada pokoknja, garis politik dan garis organisasi yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga pada pokoknja ia adalah djuga garis daripada Kongres Nasional ke-VI. Tentu sadja kita harus mengadakan perubahan<sup>2</sup> disana-sini ; bagian<sup>2</sup> yang sudah lewat waktu harus kita tiadakan, bagian<sup>2</sup> yang kurang harus kita tambah, sedangkan yang kurang tepat dibikin lebih tepat”.

Berdasarkan penilaian didalam Laporan Umum ini, yang terlebih dulu telah disimpulkan didalam “Rentjana Tesis”, maka kepada Kongres ini tidak diadjukan usul atau rentjana program baru,

melainkan diadjuken suatu rentjana perubahan atas Program Partai yang telah disahkan oleh Kongres Nasional ke-V.

Seperti kawan<sup>2</sup> maklum, Rentjana Perubahan itu telah disusun oleh Sidang Pleno ke-VII Comite Central dan ber-sama' dengan "Rentjana Tesis" dan "Rentjana Perubahan Konstitusi" telah disampaikan keseluruh Partai, bahkan djuga kepada orang<sup>2</sup> patriotik diluar Partai. Rentjana Perubahan Program itu telah didiskusikan didalam be-ribu<sup>2</sup> diskusi diseluruh negeri, dan sebagai pntjak dari pembahasan yang demokratis dan massal itu oleh Konferensi<sup>2</sup> Daerah<sup>2</sup> Besar dan Konferensi<sup>2</sup> Pulau<sup>2</sup> telah disampaikan kepada CC sedjumlah kuranglebih 100 amandemen.

Dengan ini saja dapat memaklumkan kepada Kongres bahwa diantara kuranglebih 100 amandemen itu tidak ada sebuahpun yang bersifat menentang Rentjana Perubahan Program (*Tepuktangan*) dan tidak ada sebuahpun yang bersifat prinsipul. Semua amandemen bersifat penjempurnaan. (*Tepuktangan*). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada pokoknja Rentjana Perubahan Program telah disetujui oleh seluruh Partai setjara bulat. (*Tepuktangan*).

Ini mendemonstrasikan kebulatan Partai dalam ideologi dan politik. Kebulatan yang mulja ini harus kita pupuk, kita bina kita tumbuhkan dan kita kembangkan, agar sampai kapanpun, selamanya Partai kita dilimpahi kebulatan ideologi, kebulatan politik dan kebulatan moral. (*Tepuktangan*).

Sungguhpun diantara kuranglebih 100 amandemen itu tidak ada sebuahpun yang bersifat prinsipiil, tetapi amandemen<sup>2</sup> itu bermutu tinggi dan membuktikan daya-kritis yang tinggi dari Partai kita.

Diantara kuranglebih 100 amandemen itu, disamping sebagian besar yang objektif, djuga ada sebagian ketjil yang subjektif, yang kurang perlu atau kurang tepat. Djuga ada amandemen<sup>2</sup> yang bersamaan atau hampir bersamaan satu dengan lainnya. Amandemen<sup>2</sup> yang objektif dan perlu pada umumnya disetujui oleh Sidang Pleno ke-VIII Comite Central untuk dimasukkan kedalam Rentjana Perubahan Program. Djika kawan<sup>2</sup> bandingkan Rentjana Perubahan Program yang sekarang dikemukakan kepada kawan<sup>2</sup> sebagai hasil Sidang Pleno ke-VIII CC dengan Rentjana Perubahan Program yang terdahulu hasil Sidang Pleno ke-VII, maka perbedaan<sup>2</sup> yang terdapat didalamnya adalah akibat amandemen<sup>2</sup> yang diterima seperti yang saja sebutkan tadi.

Kebulatan Partai kita dalam penerimaan Rentjana Perubahan Program tertjermin pula dalam penilaian yang telah diberikati oleh Konferensi<sup>2</sup> Daerah<sup>2</sup> Besar dan Konferensi<sup>2</sup> Pulau<sup>2</sup>, djuga oleh hasil<sup>2</sup> diskusi fraksi<sup>2</sup> pusat Partai.

Bahkan orang<sup>2</sup> terkemuka diluar Partai, mulai pengusaha sampai menteri, mulai perwira, seniman sampai mahaguru, banjak jang menjatakan persetudjuannya atas Rentjana Perubahan Program karena seluruh ataupun sebagian dari Rentjana Perubahan Program itu sesuai benar dengan kebutuhan<sup>2</sup> mereka dan oleh sebab itu merupakan pembelaan atas kepentingan<sup>2</sup> mereka. (*Tepuktangan*).

Mengenai Konferensi<sup>2</sup> Daerah<sup>2</sup> Besar, Konferensi<sup>2</sup> Pulau<sup>2</sup> dan diskusi<sup>2</sup> fraksi<sup>2</sup> pusat Partai, mereka ada jang mengatakan bahwa Rentjana Perubahan Program "sudah lengkap menjakup dan menjawab" persoalan<sup>2</sup> jang dihadapi Rakjat kita, ada jang mengatakan bahwa Rentjana Perubahan Program mengandung melulu "kebenaran<sup>2</sup>, dan oleh sebab itu sangat meyakinkan", ada lagi jang menilainya sebagai "analisa setjara padat dan objektif", dan oleh karena itu dengan Rentjana Perubahan Program itu Partai kita "akan lebih mampu mengorganisasi dan memobilisasi perjuangan Rakjat untuk menyelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus '45 sampai ke-akar<sup>2</sup>nja", (*tepuktangan*), dan ada pula jang sudah membayangkan bahwa dengan Rentjana Perubahan Program kita akan lebih berhasil "menarik massa Rakjat kesekeliling Partai".

Ber-turut<sup>2</sup> akan saja djelaskan peniadaan, penambahan serta perbaikan didalam Rentjana Perubahan ini djika dibandingkan dengan Program Kongres Nasional ke-V.

Terlebih dulu akan saja djelaskan dalam hal<sup>2</sup> apa Program Kongres ke-V tetap berlaku.

### 3

Dalam hal<sup>2</sup> apa Program Kongres ke-V tetap berlaku ?

Hal-halnja sebenarnja sudah ternjata dari Rentjana Perubahan Program hasil Sidang Pleno ke-VII CC, dari "Rentjana Tesis" tempohari dan sekarang dari Laporan Umum Kawan Aidit.

Hal<sup>2</sup> jang tetap berlaku itu per-tama<sup>2</sup> adalah konstataasi bahwa Indonesia sekarang adalah negeri jang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal. Kedua, bahwa musuh kita jang pertama adalah tetap imperialisme Belanda. Ketiga, bahwa Indonesia inasih tetap berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi. Keempat, bahwa pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial masih terus berlangsung. Selandjutnja, bahwa perlu menjapai Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis; bahwa djalan satu-nja untuk menjapai tudjuan ini adalah pembentukan persatuan nasional atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani ditawah

pimpinan klas buruh : bahwa kuntji soalnya terletak dalam mengubah imbanan kekuatan antara Rakjat disatu pihak dan musuh<sup>2</sup> Rakjat dipihak lain, jaitu dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa ; bahwa diatas se-gala'nja klas buruh sendiri harus meningkatkan aktivitetnja dan mendidik dirinya sendiri sehingga menjadi kekuatan jang besar dan sadar, sehingga menjadi pelopor dan pemimpin perjuangn seluruh Rakjat Indonesia.

Kita menjumpulkan bahwa semua hal ini tetap berlaku, bukan karena pandangan<sup>2</sup> jang subjektif, melainkan karena pertimbangan<sup>2</sup> objektif jang ditjapai melalui diskusi<sup>2</sup> jang seksama dan mendalam.

Misalnya mengenai watak masjarakat Indonesia sekarang, diskusi<sup>2</sup> itu telah meninjau adanya tiga kemungkinan : Indonesia sekarang negeri jang masih kolonial dan masih feodal, Indonesia sekarang sudah merdeka penuh dan sudah demokratis ; atau Indonesia sekarang belum merdeka penuh — djadi masih setengah-djadjahan — dan masih setengah-feodal. Kesimpulan kita ialah bahwa Indonesia sekarang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal.

Mengenai hal jang kedua, ditinjau adanya dua kemungkinan : apakah imperialisme Belanda, ataukah imperialisme Amerika musuh kita nomor satu dewasa ini. Kesimpulan kita ialah bahwa imperialisme Belanda masih tetap musuh kita nomor satu.

Demikianlah seterusnya, tiap<sup>2</sup> soal ditinjau dari berbagai kemungkinan, dikadji faktor<sup>2</sup> objektifnja, dan akhirnya disimpulkan. Kesimpulan<sup>2</sup>nja tidak hanya ternjata dari Rentjana Perubahan Program, tetapi djuga dari Laporan Umum dan dari Rentjana Perubahan Konstitusi.

Karena watak masjarakat kita jang tetap sama seperti ketika kita langsungn Kongres ke-V, maka watak revolusi kitapun tetap sama dan tuntutan<sup>2</sup>njapun pada pokoknja tetap sama. Oleh sebab itu, seperti djuga Program Kongres ke-V, Rentjana Perubahan Program kita sekarang terbagi kedalam dua bagian pokok : Program Umum dan Program Tuntutan. Program Umum kita adalah program Demokrasi Rakjat, program jang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Demokrasi Rakjat sendiri, sedang Program Tuntutan adalah program jang kita adjukan kepada setiap pemerintah sebelum Demokrasi Rakjat.

#### 4

Dalam hal<sup>2</sup> apa Program Kongres ke-V telah lewat waktu sehingga sekarang perlu ditiadakan ?

Tuntutan<sup>2</sup> seperti agar MMB dipulangkan, melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda dan pembatalan KMB, sudah terang tidak perlu lagi. Juga tuntutan untuk pembatalan embargo terhadap Tiongkok, untuk pampasan perang Jepang, untuk dibatakamnja persetujuan MSA, untuk adanya pemilihan umum untuk Konstituante, tuntutan<sup>2</sup> ini sudah lewat waktu.

Tetapi bahwa ada diantara tuntutan<sup>2</sup> Program Kongres ke-V yang menjadi lewat waktu, menjadi daluwarsa, hal ini sedikit-pun tak perlu disesalkan, (*tawa*), bahkan sebaliknya, ia harus membikin kita gembira. Hal<sup>2</sup> itu menjadi lewat waktu, karena perjuangannya kita menang dan menjapai hasil! (*Tepuktangan*). Ini sekali lagi merupakan suatu demonstrasi tentang tepatnya Program Kongres ke-V.

Kemenangan<sup>2</sup> yang telah dijapai itu sekarang kita pakukan didalam Rentjana Perubahan Program.

Tetapi ada pula tuntutan<sup>2</sup> Kongres ke-V yang walaupun telah tertjapai, kelandjutannya sangat mengetjewakan. Ja, tjukup banyak kita alami bahwa sesuatu yang djelek dihapuskan untuk kemudian digantikan oleh hal lain yang sama atau hampir sama djeleknja. (*Tawa*).

Misalnja, undang<sup>2</sup> larangan mogok yang terkutuk dibawah nama "undang<sup>2</sup> Tedjasukmana" benar telah dihapuskan, tetapi apakah hakmogok bagi kaum buruh sudah pulih? Apakah hak itu tidak masih sangat dibatasi dan dalam hal<sup>2</sup> tertentu mogok bahkan masih dilarang samasekali?

Misal lain, pengchianat<sup>2</sup> bangsa, orang<sup>2</sup> reaksi<sup>2</sup>ner, penggelap<sup>2</sup>, koruptor<sup>2</sup> dan elemen<sup>2</sup> fasis yang menentang UUD kita tuntutan supaya dipetjat dan dihukum. Kaharkusmen Sosrodanukusumo dan Suprpto sudah dipetjat, tetapi apakah Kedjaksanaan Agung khususnya dan aparat kedjaksanaan umumnya sudah bersih dari elemen<sup>2</sup> djelek? (*Suara dalam ruangan: „Belum!”*). Hakim Sjarif dan hakim Lim Wan-to sudah diontjlang, tetapi apakah aparat kehakiman sudah bersih? (*Suara: „Belum!”*). Sjafruddin sudah dipetjat, tetapi apakah aparat ekonomi-keuangan khususnya dan aparat sivil umumnya sudah bersih? (*Suara: „Belum!”*). Zulkifli Lubis, Ahmad Husen, Simbolon, Sumual dan beberapa lainnya sudah dipetjat, tetapi apakah aparat militer sudah bersih? (*Suara: „Belum!”*). Sumitro dan Tan Goan-po sudah dipetjat, tetapi apakah aparat universiter sudah bersih? (*Suara: „Belum!”*, *tawa*).

Misal lain lagi, sudah ada peraturan yang melarang perampasan tanahgarapan kaum tani, suatu peraturan yang menentukan keadaan stand-fast. Tetapi apakah perampasan tanahgarapan kaum tani sudah tidak terdjadi lagi? (*Suara: „Masih!”*). Apakah pihak

perkebunan mentaati peraturan itu dan apakah aparat negara sudah mentaatinja? (*Suara: „Tidak!“*).

Misal lain lagi, melalui sebuah undang<sup>2</sup>, yaitu Undang<sup>2</sup> No. 1 tahun 1958, tanah<sup>2</sup> partikelir ditentukan dibeli oleh pemerintah. Tetapi undang<sup>2</sup> itu, disamping mengandung hal<sup>2</sup> yang kurang baik, hal<sup>2</sup>nja yang baikpun belum dilaksanakan dengan sungguh<sup>2</sup>. (*Tepuktangan*).

Akan saja achiri tjontoh<sup>2</sup> ini dengan soal menindas dan membasmi gerombolan DI dan gerombolan<sup>2</sup> teroris lainnya serta soal memberi hak kepada kaum tani untuk angkat senjata memela diri terhadap gerombolan DI dan gerombolan<sup>2</sup> teroris lainnya. Dalam hal anti-DI dan anti-gerombolan<sup>2</sup> teroris lainnya, sedak Kongres ke-V 5 tahun j.l., memang banjak sudah kita tpaui kemadjuan. DI, yang tadinja begitu dianakemaskan oleh pemerintah<sup>2</sup> Hatta-Natsir-Sukiman (*tawa*) dan kemudian BH (*tawa*) sudah dinjatakan sebagai musuh negara yang harus dibasmi. (*Tepuktangan*). Begitu djuga apa yang dinamakan "PRRI-Permesta" yang kekuatan pokoknja telah dipatahkan, berkat kerdjasama Tentara dan Rakjat. Tetapi selam pembentukan OKD<sup>2</sup>, OKN<sup>2</sup> atau OPR<sup>2</sup> yang djuga masih terbatas, kepada kaum tani umumnya belum diberikan hak untuk angkat senjata membela diri terhadap DI-TII. "PRRI-Permesta" ataupun gerombolan<sup>2</sup> teroris lainnya. Malahan, masih terlalu sering pikiran dititikberatkan kepada "menambah pasukan TNI" yang mejakan persiapan lama dan ongkos banjak daripada kepada usaha memobilisasi kekuatan Rakjat yang terang dekat dan sederhana. (*Tepuktangan*). Ini mengakibatkan bahwa di Jawa Barat, di Sumatera maupun di Sulawesi kaum pemberontak kontra-revolusioner masih mempunyai kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu sadja dan bahwa gembong<sup>2</sup>nja belum djuga terangkap atau terbunuh. (*Tawa*). Padahal kalau memobilisasi kekuatan Rakjat dan kerdjasama dwitunggal Tentara dan Rakjat yang diutamakan, gerombolan<sup>2</sup> teroris tentu akan mengalami pengalaman bukan sebagai "ikan didalam air" tetapi sebagai "ikan didalam minjakgoreng". (*Tawa, tepuktangan*).

Apas<sup>2</sup> yang tersebut dalam tjontoh<sup>2</sup> ini terdjadi, karena pihak yang berkuasa disatu pihak harus bertindak, akibat desakan<sup>2</sup> Rakjat yang deras, tetapi dipihak lain mereka tidak rela menerima tuntutan<sup>2</sup> Rakjat dan makaitu mentjoba untuk mempertahankan yang lama atau menghidupkan kembali yang lama dalam bentuk yang baru. (*Tawa*). Berdasarkan pengalaman<sup>2</sup> dan kenjataan<sup>2</sup> ini maka didalam Rentjana Perubahan Program sekarang ini diadjudkan perumusan baru yang memformulasikan pendirian dan hasrat Rakjat terbanjak, baik mengenai hakmogok, elemen<sup>2</sup> djelek dalam peme-

rintahan, hak kaum tani mempertahankan tanahgarapan, nasionalisasi tanah<sup>2</sup> partikelir, pembasmian gerombolan<sup>2</sup> teroris maupun mengenai soal<sup>2</sup> lainnja jang serupa.

## 5

Kemudian, dalam hal<sup>2</sup> apa Program Partai kita ditambah ?

Selama 5 tahun in. banjak peristiwa<sup>2</sup> besar terdjadi, peristiwa<sup>2</sup> didalam kehidupan Partai maupun jang meliputi seluruh bangsa.

Imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda dan makin mendapat kedudukan dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan di Indonesia. Ini dilakukan Amerika disamping mereka bersekongkol dengan Belanda didalam NATO dan bersekongkol pula dalam ber-sama<sup>2</sup> meridjadjah Irian Barat sesuai dengan tudjuan pakt agresif SEATO jang paling kurangadjar adalah intervensi kaum imperialis Amerika ketika petjah pemberontakan kontra-revolusioner "PRRI-Permesta". Iring<sup>2</sup>an kapalperang<sup>2</sup> mereka meng-geretak<sup>2</sup> kita di-batas<sup>2</sup> perairan kita bahkan sudah beberapa kali melanggar batas perairan kita dan kekuranganadjaran mereka memuntjak ketika mereka "memberitahukan" kepada pemerintah RI akan mendaratkan pasukan<sup>2</sup> nja di Pakanbaru. Adalah tekad jang kuat dari Rakjat Indonesia jang melawan usaha itu mati<sup>2</sup>an jang telah mendorong pemerintah untuk menolak pendaratan gila itu. (*Tepuktangan lama*).

Berhubung dengan kenyataan<sup>2</sup> ini, maka didalam Rentjana Perubahan Program dirumuskan bahwa, disamping imperialisme Belanda merupakan musuh nomor satu Rakjat Indonesia imperialisme Amerika sekarang merupakan musuh Rakjat Indonesia jang paling berbahaja. (*Suara „Betul!“, tepuktangan*).

Dan berhubung dengan kesimpulan ini maka kita rumuskan tuntutan baru, sbb. : Perlakukan perusahaan<sup>2</sup> AS sama dengan perusahaan<sup>2</sup> Belanda, djika AS terus-menerus mempersendjatai gerombolan<sup>2</sup> kontra-revolusioner atau membantu Belanda dengan sendjata dalam agresinja terhadap RI (*Suara : „Betul!“, tepuktangan lama*). Hal ini sudah diutjapkan oleh Presiden Sukarno dalam *Manifesto Politik* dan sudah kita beritahukan kepada Jones. (*Tepuktangan*).

Mengenai imperialisme Belanda, perdjuaan kita terhadapnja telah menempuh lompatan madju sedjak Rakjat Indonesia, dipelopori oleh kaum buruhnja mengambilalih praktis semua perusahaan mereka.

Berhubung dengan ini tuntutan kita sekarang adalah : mobilisasi

dan koordinasi seluruh kekuatan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi yang lebih besar, dengan jalan a.l. menasionalisasi semua perusahaan<sup>2</sup> Belanda termasuk modal Belanda didalam perusahaan<sup>2</sup> tjampuran, a.l. BPM. (*Tepuktangan lama*). Kita juga menuntut agar perusahaan<sup>2</sup> bekas milik Belanda dijadikan perusahaan<sup>2</sup> pemerintah dan agar ditjegah pemart.kelitan perusahaan<sup>2</sup> pemerintah.

Mengenai perdjuaan kaum tani, Partai kita telah menjimpulkan pengalaman<sup>2</sup>nja dan merumuskan tugas<sup>2</sup> selanjutnja ketika Partai melangsungkan untuk pertama kalinya Konferensi Nasional Tani beberapa waktu j.l.

Berhubung dengan ini kita masukkan kedalam Rentjana Perubahan Program jaitu didalam Program Tuntutan kesimpulan<sup>2</sup> terpenting dari Konfernas Tani itu, yakni : pertama, agar diperbaiki keadaan kaum tani dengan mewadjabkan tuantanah<sup>2</sup> menurunkan sewatanah, sehingga kaum tani penjewa tanah menerima minimum 60% dan tuantanah menerima maximum 40% dari hasil panen (*tepuktangan*); kedua, agar dibatasi milik tanah tuantanah serta dibeli tanah<sup>2</sup> kelebihan dari tuantanah itu dengan tjara dan harga yang ditentukan oleh pemerintah dan agar dibagikan tanah<sup>2</sup> itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin (*tepuktangan*); ketiga, agar disita tanah dan milik lain dari kaum tuantanah yang memihak gerombolan pengatjau kontra-revolusioner dan gerombolan<sup>2</sup> teroris lainnja, dan agar dibagikan tanah<sup>2</sup> itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin. (*Tepuktangan*).

Mengenai perdjuaan untuk suatu Konstitusi yang demokratis, perkembangannja sudah demikian rupa sehingga kita sekarang kembali sudah ke UUD 1945.

Berhubung dengan ini kita rumuskan tuntutan : Laksanakan UUD 1945 sesuai dengan djiwa, semangat dan watak Revoiusi Agustus 1945, yang anti-imperialis dan demokratis.

Mengenai susunan pemerintah, Presiden Sukarno telah melantunkan Konsepsinja yang terkenal sebagai Konsepsi Presiden. Konsepsi itu, seperti diketahui, pada pokoknja mengandjurkan dibentuknja suatu pemerintah gotongrojong, djadi suatu pemerintah koalisi nasional atau boleh dinamakan Kabinet Ho-lopis-kuntulbaris. (*Tepuktangan*).

Berhubung dengan ini, sekalipun Program Tuntutan yang kita susun bisa dilaksanakan oleh setiap pemerintah yang menghendaki bantuan Rakjat, apabila pemerintah mau menempuh djalan kemerdekaan nasional, demokrasi dan kemajuan bagi Indonesia, tetapi tegas<sup>2</sup> pula kita njatakan bahwa Program Tuntutan itu yang

paling baik ialah djika dilaksanakan oleh suatu pemerintah gotong-rojong. (*Tepuktangan*).

Dan berhubung dengan Sidang Pleno ke-IV Comite Central, yang barangkali merupakan Sidang Pleno CC yang terpenting selama masa antara Kongres yang lalu hingga Kongres yang sekarang, yang telah merumuskan sembojan "selesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar<sup>2</sup>nja", maka didalam Rentjana Perubahan Program pendirian suatu pemerintah Demokrasi Rakjat kita rumuskan djuga sebagai penjelesaian tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar<sup>2</sup>nja.

Demikianlah tambahan<sup>2</sup> terpenting yang dimasukkan kedalam Rentjana Perubahan Program. Penambahan ini tidak mengurangi sedikitpun kebenaran Program Kongres ke-V diwaktu yang sudah dan penambahan itu menjadi perlu se-mata<sup>2</sup> karena perkembangan keadaan, djadi karena adanya situasi<sup>2</sup> baru.

## 6

Sekarang, dalam hal<sup>2</sup> apa Program Kongres ke-V kurang tepat sehingga sekarang harus dibikin lebih tepat?

Baiklah segera saja terangkan, bahwa kekurang-tepatan inipun pada umumnja akibat dari perkembangan keadaan. Seperti kawan<sup>2</sup> maklum, adalah sudah menjadi hukum bahwa apa yang tepat buat satu ketika belum tentu tepat buat ketika lain.

Dalam Program Umum misalnja, djika tadinja kewadajiban be-ladjar yang tjuma<sup>2</sup> bagi anak lelaki maupun perempuan ditentukan sampai umur 12 tahun, sekarang kita robah menjadi sampai umur 13 tahun, a.l. mengingat kenjataan, bahwa djika tadinja anak be-ladjar dinegeri kita dimulai pada umur 6 tahun, sekarang dimulai pada umur 7 tahun.

Dalam Program Tuntutan, untuk perbaikan nasib kaum buruh, djika tadinja kita menitikberatkan pada tuntutan mendjamin semua hak dan kebebasan kepada kaum buruh untuk membela kepentingan<sup>2</sup>nja yang sah, sekarang, disamping meneruskan tuntutan ini dikemukakan perumusan agar diperbaiki upah riil kaum buruh dan pegawai negeri dan agar diperbaiki djaminan sosial dan sjarat<sup>2</sup> kerdja mereka.

Dalam Program Tuntutan djuga, untuk perbaikan nasib kaum tani, djika tadinja yang kita tuntutan dilarang adalah perampasan tanahgarapan kaum tani terutama dalam hubungannja dengan "perkebunan<sup>2</sup> asing", sekarang "asing"<sup>2</sup>nja kita tiadakan dan tuntutan pelarangan itu kita bela dalam hubungannja dengan semua

perkebunan, karena kenjataanja perampasan tanahgarapan sekarang dilakukan terkadang oleh perkebunan<sup>2</sup> asing, terkadang lagi oleh perkebunan<sup>2</sup> bukan asing ; djika tadinja belum djelas pembelaan kita terhadap nasib pamongdesa, ini sekarang kita perdjelas ; begitu djuga, akibat Konfernas Tani jang bersedjarah itu, sekarang kita perdjelas pula pembelaan terhadap kaum nelayan dan terhadap koperasi<sup>2</sup> Rakjat.

Dalam Program Tuntutan pula, mengenai Irian Barat, djika tadinja tuntutan kita hanja berbunyi "mempertahankan Irian Barat tetap sebagai daerah Republik Indonesia", sekarang, sesudah mendapatkan pengalaman<sup>2</sup> akibat berkembangnja gerakan pembebasan Irian Barat, tuntutan kita rumuskan sbb. : "Perhebat lebih lanjut perdjuaan pembebasan Irian Barat dengan djalan menasak kekuatan dalamnegeri, menggalang semua potensi nasional memodernisasi perlengkapan AD, ALRI dan AURI, dan menarik solidaritet internasional, untuk menghadapi segala kemungkinan". (*Tepuktangan*).

Demikianlah, kawan<sup>2</sup>, beberapa tjontoh tentang bagaimana kita bikin Program kita lebih tepat.

Penjempurnaan<sup>2</sup> ini adalah penting, karena bagi kita kaum Komunis, Program Partai haruslah perumusan jang paling representatif mengenai kepentingan<sup>2</sup> objektif massa Rakjat serta pikiran dan perasaan massa Rakjat tentang hal<sup>2</sup> tertentu pada ketika tertentu.

## 7

Kawan<sup>2</sup>,

Pengalaman<sup>2</sup> apa jang kita perdapat selama kita 5 tahun memperdjuaan Program Kongres ke-V ?

Pada pokoknja ada dua matjam pengalaman : jang tepat dan jang tidak tepat.

Jang tepat ditandai oleh dua tjiri : pertama, memahami hubunganja antara Program dan kehidupan aktuil ; kedua, memahami hubunganja antara Program Umum dan Program Tuntutan.

Barangsiapa hanja kenal Program tetapi tak kenal kehidupan aktuil, mereka itu seperti orang<sup>2</sup> kenal sendjata tetapi tak kenal sasaran. (*Tawa*). Sebaliknja, barangsiapa hanja kenal kehidupan tetapi tak kenal Program, mereka itu seperti orang<sup>2</sup> kenal sasaran tetapi tak kenal sendjata. Ke-dua<sup>2</sup>nja tidak bisa menembak ! (*Tepuktangan*).

Memahami hubungan antara Program dan kehidupan aktuil ber-

arti memahami bahwa ada persatuan tetapi juga ada pertentangan antara yang dua itu. Ada persatuan antara Program dan kehidupan aktual, karena Program itu sendiri lahir dari kehidupan aktual dan karena Program itu mentjerminkan kehidupan aktual dalam perkembangannya yang progresif. Tetapi juga ada pertentangan antara Program dan kehidupan aktual, karena banyak hal<sup>2</sup> yang sudah ada didalam Program tetapi belum ada didalam kehidupan, sehingga harus diubah, harus dirombak kehidupan itu sampai ia menjadi sesuai dengan yang dirumuskan didalam Program.

Memahami hubungan antara Program Umum dan Program Tuntutan berarti memahami bahwa Program Tuntutan adalah sebagian daripada Program Umum dan makaitu memperjuangkannya harus memudahkan jalan bagi Program Umum, dan sebaliknya, Program Umum hanya bisa dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Tuntutan.

Seperti dikatakan Kawan Aidit didalam Laporrannya kepada Sidang Pleno ke-IV Komite Central: "Program Umum dengan Program Tuntutan adalah berbeda, tetapi satusamalah ada hubungannya, tidak terpisah".

Lebih lanjut Kawan Aidit dalam Sidang Pleno tsb. mengatakan :

"Dengan program umumnya PKI mengemukakan apa yang menjadi tujuannya, apa yang diperjuangkannya dalam seluruh tingkat revolusi nasional dan demokratis, atau disebut juga tingkat revolusi burjuis-demokratis. Pokok<sup>2</sup> daripada program umum ini tidak akan berubah selama tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 yang bersifat nasional dan demokratis belum dilaksanakan sampai ke-akar<sup>2</sup>nya. Jadi, program umum akan tetap menjadi program PKI selama Demokrasi Rakyat belum menjadi kenyataan. Program Umum PKI adalah program yang terusmenerus harus dipropagandakan oleh kaum Komunis dan simpatisan<sup>2</sup> Komunis sampai selesainya pelaksanaan tuntutan Revolusi Agustus sampai ke-akar<sup>2</sup>nya. Program Umum PKI adalah program jangka panjang atau dasar kerdjasama taraf tinggi antara PKI dengan semua partai, dengan semua golongan dan perseorangan yang demokratis dan patriotik lainnya dalam menyelesaikan seluruh tuntutan Revolusi Agustus".

"Tetapi PKI tidak hanya mempropagandakan program jangka panjangnya, tidak hanya mempropagandakan program umumnya. PKI juga menunjukkan jalan untuk memetjahkan soal<sup>2</sup> kongkrit sekarang. Disamping mempropagandakan program umumnya, PKI mempersatukan Rakyat berdasarkan tuntutan<sup>2</sup> politik dan

ekonomi yang kongkrit sekarang dan mendjadikan tuntutan kongkrit sekarang sebagai alas (platform) untuk bekerdjasama waktu sekarang dengan semua partai, semua golongan dan perscorangan yang demokratis dan patriotik".

Demikian penjelasan Kawan Aidit.

Adapun mengenai pengalaman yang tidak tepat, inipun ada dua matjamnja : pertama, yang tidak melihat perbedaannya dan maka itu mentjampuradukkan Program Umum dan Program Tuntutan ; dan kedua, yang tidak melihat salinghubungannya dan maka itu memisah<sup>2</sup>kan setjara mutlak Program Umum dan Program Tuntutan.

Kesalahan yang pertama membikin kita tidak meletakkan titik-berat pada Program Tuntutan dan langsung memperdjuaangkan Program Umum, sehingga dengan demikian mempersempit front, sedang kesalahan yang kedua bisa membikin kita berhenti pada Program Tuntutan dan tidak memperdjuaangkannya untuk tudjuan Program Umum.

Sedikitbanjaknja kesalahan<sup>2</sup> seperti ini pernah ada didalam Partai, kalau tidak setjara nasional, setjara lokal, kalau tidak untuk waktu lama, untuk waktu singkat. Tetapi djustru pengalaman<sup>2</sup> itu, sekalipun lokal dan untuk waktu singkat, telah membikin Partai kita lebih dewasa dan lebih matang dalam memahami, menggunakan dan memperdjuaangkan Program Partai. Kesalahan diwaktu yang sudah akan menghindarkan kesalahan yang sama diwaktu yang akan datang, asal kita menjumpulkan kesalahan<sup>2</sup> itu dan mendjadikannya pelajaran. Ini sangat penting bagi perkembangan Partai kita di-waktu<sup>2</sup> yang akan datang.

## 8

Bagaimana sebenarnya hubungan setjara teori dan setjara praktek antara Program Umum dan Program Tuntutan ?

Hubungan ini sesungguhnya adalah hubungan antara revolusi dan reform, yang seperti dikatakan oleh Kawan Lenin hanya bisa didefinisikan setjara presis dan tepat oleh Marxisme.

Untuk memahami masalah ini setjara setepatnja, adalah sangat berguna djika kita mempeladjadi tulisan<sup>2</sup> dan pidato<sup>2</sup> Kawan Lenin mengenai Revolusi Sosialis Oktober, yang terutama disusunnja antara tahun 1918 dan 1922.

Didalam salahsatu tulisannya itu Kawan Lenin menegaskan bahwa tingkat revolusi yang satu dan tingkat revolusi yang lain "tidak dipisahkan..... oleh tembokbesar Tiongkok". Djadi, dari sini dapatlah kita menarik kesimpulan, bahwa antara sesuatu Pro-

gram Umum dan sesuatu Program Tuntutan pada sesuatu tingkat revolusi tertentupun tidak ada "tembokbesar Tiongkok" yang memisahkannya.

Marilah saja ambil tjontoh yang kongkrit.

Didalam Program yang belum diubah, yaitu Program Kongres ke-V, kita menuntut dilepaskannya Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda, dikirimkannya kembali MMB dan dibatalkannya KMB didalam Program Tuntutan, tetapi juga didalam Program Umum. Artinya, ketika itu kita mempersiapkan diri untuk kemungkinannya tuntutan<sup>2</sup> itu baru terlaksana didalam Demokrasi Rakjat. Tetapi apa djadinya? Kita masih djauh atau agak djauh dari Demokrasi Rakjat, tuntutan<sup>2</sup> pembatalan "Uni", pemilangan MMB dan pembatalan KMB itu sudah terlaksana ke-tiga<sup>2</sup>nja.

Sebaliknya, didalam Rentjana Perubahan Program sekarang kita memasukkan soal Irian Barat didalam Program Tuntutan. Tetapi ini bukannya berarti kepastian bahwa Irian Barat akan bebas sebelum Demokrasi Rakjat. Kita harus siap untuk kemungkinannya Irian Barat belum berhasil kita bebaskan, sekalipun Demokrasi Rakjat sudah ditjapai di-bagian<sup>2</sup> lain Indonesia. Se-kurang<sup>2</sup>nja teoritis kemungkinan ini ada, dan praktisipun dia bukan suatu kemustahilan. (*Tepuktangan*).

Bahwa sebagian dari apa yang tertjantum didalam Program Umum bisa ditjapai sebelum Demokrasi Rakjat, sedang sebaliknya sebagian dari apa yang tertjantum didalam Program Tuntutan bisa belum tertjapai diwaktu Demokrasi Rakjat sudah berdiri, kemungkinan<sup>2</sup> yang bukan "harga mati" (*tawa*) ini hanya membuktikan tidak adanya "tembokbesar Tiongkok" yang memisahkan antara Program Umum dan Program Tuntutan.

Djadi, bagaimana hubungan antara Program Umum dan Program Tuntutan, atau antara tuntutan pokok dan tuntutan bagian, antara revolusi dan reform?

Kawan Lenin memberikan batasan begini: "reform adalah hasil-sampingan dari perdjjuangan klas revolusioner proletariat". Hubungan ini, kata Kawan Lenin selanjutnja, "merupakan dasar daripada taktik revolusioner proletariat", merupakan "ABC"nja.

Disepandjang perdjjuangan klas revolusioner proletariat, tuntutan-tuntutan bagian atau reform<sup>2</sup> dimenangkan sebagai "hasil-sampingan". Tetapi tanpa dia, tidak mungkin kita memenangkan tuntutan pokok atau revolusi. Tertjapainja Program Tuntutan djadinja meretas djalan bagi tertjapainja Program Umum.

Barangsiapa mentjoba memenangkan Program Umum tanpa melalui perdjjuangan untuk Program Tuntutan, mereka itu tak tahu samasekali ABC-Marxisme tentang taktik. (*Tawa*). Mereka men-

djalani kesalahan "kiri". Sebaliknya, barangsiapa puas dengan hasil<sup>2</sup> reform dan berhenti pada hasil<sup>2</sup> reform, tidak meneruskannya kepada pentjapaian Program Umum, mereka itu bukan Marxis samasekali. (*Tepuktangan*). Mereka mendjalani kesalahan kanan. Untunglah bahwa dua matjam penjelewengan besar ini pada pokoknja tidak terdapat lagi didalam Partai kita. (*Tepuktangan*).

## 9

### Kawan<sup>2</sup>,

Djika kita didalam Kongres ini mengkonstatasikan bahwa pada pokoknja penjelewengan<sup>2</sup> besar, baik jang ke"kiri" maupun jang kekanan mengenai pelaksanaan Program Partai, tidak terdapat lagi didalam Partai kita, kitapun sedar bahwa keadaan jang baik ini bukannya terdjadi dalam waktu sehari-semalam.

Peranan besar telah dimainkan oleh Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan.

Kawan Aidit mengatakan bahwa "persatuan didalam Partai hanya mungkin djika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, jaitu fikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme". Kemudian dikatakan oleh Kawan Aidit, bahwa "soal persatuan dalam fikiran dikalangan kaum Komunis adalah soal pendidikan bagi seluruh anggota Partai".

Dengan Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan jang telah kita lakukan ialah "pendidikan tentang prinsip<sup>2</sup> fundamenteil Marxisme-Leninisme, dan pendidikan mempertahankan pandangan klas, sikap klas dan metode klas, melawan semua ideologi jang salah".

Ketika mengantarkan usul Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan itu didalam Sidang Pleno ke-IV CC saja telah mengatakan bahwa "djika rantjangan ini kita selesaikan, maka tiga tahun lagi kita akan mempunyai beberapa ribu kader jang dididik langsung oleh CC, oleh Provcom<sup>2</sup> dan Comite<sup>2</sup> lainnja".

Dari laporan jang akan disampaikan Kawan A. Anwar Sanusi saja kira akan ternjata bahwa djatah jang dirantjangkan ini telah tertjapai dengan baik.

Didalam Sidang Pleno ke-IV CC djuga telah dikatakan bahwa "djika rentjana ini kita laksanakan, maka kita akan terbebas dari perdebatan<sup>2</sup> jang tidak perlu, dan kita akan mempersoalkan semua soal kita dengan titikpangkal jang satu dan sama, dengan landasan jang satu dan sama. Ini akan lebih mendewasakan Partai kita".

Demikianlah peranan plan pendidikan jang kita bajangkan

tempohari, dan demikianlah peranan pian pendidikan menurut pengalaman kita sekarang.

Karena kita telah menjelesaikan Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan itu dengan baik, maka jang dikatakan Kawan Aidit "persatuan fikiran" itu telah terdjamin didalam Partai, dan djustru inilah jang telah membikin Partai kita, seluruh Partai kita, melaksanakan Program Partai setjara tepat, setjara pada pokoknja terbebas dari penjelewengan<sup>2</sup> serius ke"kiri" maupun kekanan. (*Tepuktangan*).

Seandainya tidak ada Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan, tak tahulah kita apa akan djadinja Partai kita sekarang: mungkin ia besar dalam djumlah anggota, tetapi tidak bersatu dalam fikiran. Ini akan menialahi dalil Marx bahwa sekalipun benar kekuatan proletariat itu pertama<sup>2</sup> dalam djumlahnja, tetapi djumlah sadja tidak tjukup dan jang akan membikin bilangan djumlah itu berbitjara adalah persatuannja. (*Tepuktangan*).

Plan 3 Tahun ke-I Pendidikan telah mempersatukan Partai dalam fikiran. Plan 3 Tahun ke-II Pendidikan tentulah harus dan akan lebih memperkokoh persatuan fikiran didalam Partai itu. (*Tepuktangan*).

## 10

Sampailah saja sekarang membitjarakan peranan slogan atau sembojan didalam perdjuaan menjapai Program Partai.

Tentang menetapkan dan menggunakan sembojan Partai kita telah mempunjai pengalaman<sup>2</sup> jang tidak sedikit.

Sedjak tahun 1950 kita mempunjai satu sembojan pokok, jang pelaksanaannja ternjata telah menentukan arah perdjalan dan arah dinegeri kita. Sembojan pokok itu ialah: *Batalkan KMB!* (*Tepuktangan*).

Dengan sembojan inilah kita melangsungkan perdjuaan anti-imperialisme, dengan sembojan inilah kita menggalang front persatuan nasional, dengan sembojan ini pulalah kita melaksanakan pembangunan Partai.

Sekarang, sesudah semakin djauh kita terdjarak dari pembatalan KMB, semakin djelaslah bagi setiap kita betapa besar, bahkan betapa menentukan peranan slogan "*Batalkan KMB!*" itu dalam kehidupan politik, ekonomi, kultur dan militer dinegeri kita.

Didalam Kongres Nasional ke-V Partai kita menetapkan sembojan pokok "*Mentjapai kemerdekaan nasional jang penuh dan perubahan<sup>2</sup> demokratis*", dengan melalui "*Djalan ke Demokrasi Rakjat bagi Indonesia*".

Djuga sembojan tentang "kemerdekaan penuh dan demokrasi" ini telah memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan politik dinegeri kita, dan dengan sembojan ini pulalah kita melaksanakan dua tugas urgen menggalang front persatuan dan membangun Partai.

Didalam Sidang Pleno ke-IV CC yang terkenal itu, sembojan pokok Kongres ke-V itu dituangkan pula kedalam bentuk baru yang lebih sesuai dengan bentuk<sup>2</sup> historis negeri kita dan dengan tuntutan situasi yang aktual. Sembojan tsb. adalah "Selesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke akarnya".

Kedua sembojan yang hakekatnya sama ini — "mentjapai kemerdekaan nasional yang penuh dan perubahan<sup>2</sup> demokratis" dan "menyelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke akarnya" — adalah sembojan<sup>2</sup> strategis kita, yang akan tetap berlaku sampai terdjadi perubahan<sup>2</sup> fundamental dalam masyarakat negeri kita, perubahan<sup>2</sup> Demokrasi Rakjat.

Dan setelah pada hari 21 Februari 1957 Presiden Sukarno memaklumkan Konsepsi Presiden yang menjadi masalah itu. Sidang Pleno ke-V CC segera sesudah itu, merumuskan sembojan baru: "*Ubah imbangannya kekuatan untuk melaksanakan Konsepsi Presiden Sukarno 100%*".

Ini adalah sembojan untuk mentjapai suatu Pemerintah Koalisi Nasional atau suatu Pemerintah Gotongroyong sembojan yang mentjerminkan hasrat yang paling adil dari massa Rakyat sebelum kita sampai pada Demokrasi Rakjat. Dan sembojan tersebut masih dalam rangka perjuangannya reform dilapangan politik sembojan taktis.

Pengalaman kita mengenai sembojan<sup>2</sup> taktis pun sudah agak banyak. Djika sesuatu sembojan dirumuskan setjara tepat, dan djika untuk memperjuangkannya dilakukan persiapan<sup>2</sup> yang tjukup, maka sembojan<sup>2</sup> demikian biasanja mentjapai hasil. Kita ingatlah bagaimana segera sesudah Kabinet Sukiman djatuh kita rumuskan sembojan taktis "Bentuk kabinet yang membebaskan semua tahanan Razzia Agustus" — sembojan ini mentjapai hasil (*tepuktangan*): kita ingatlah bagaimana segera sesudah Kabinet Wilopo djatuh kita rumuskan sembojan taktis "Bentuk kabinet tanpa Masjumi" — sembojan ini mentjapai hasil. (*Tepuktangan*). Begitulah, dalam menghadapi setiap situasi politik yang gawat Partai selalu tampil dengan sembojannya yang tersendiri. Ini kita lakukan diwaktu kita mendorong Pemerintah untuk tegas<sup>2</sup> membasmi DI-TII, ini kita lakukan diwaktu kita mendorong Pemerintah melawan intervensi Amerika, subversi Kuomintang dan kontra-revolusi "PRRI-Permesta". Disaat melabrak "PRRI-Permesta" itu kita lantjarkan sem-

bojan "dwitunggal Tentara dan Rakjat", dan sesudah perusahaan<sup>2</sup> bekas Belanda yang diambilalih oleh kaum buruh dioper oleh Pemerintah, kita lantjarkan sembojan: "pimpinan patriotik, pertinggi produksi, tjegah korupsi dan sabotase, djamin demokrasi dan perbaiki nasib buruh", (*Tepuktangan*) Sembojan<sup>2</sup> taktis ini, satu demi satu, telah berlaku sebagai obor yang bernjala dan didjundjung dibagian depan barisan kita, yang menerangi djalan kita dan yang membawa keadaan maju.

Pada saat<sup>2</sup> achir<sup>2</sup> ini kitapun merumuskan sebuah sembojan baru dalam memimpin perlawanan kaum tani, yang bunjinja singkat sekali, tetapi yang djika berhasil kita laksanakan akan menentukan sedjarah yang pandjang, yaitu sembojan "6 . 4" (*Tepuktangan*).

Dan mendjelang Kongres kita yang sekarang ini, Komite Central telah merumuskan 4 sembojan pokok yang terkenal.

Sembojan pertama "Dengan PKI di depan meneruskan perdjjuangan Rakjat untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis" ditudjukan untuk merealisasi rol pimpinan Partai dalam perdjjuangan menjapai Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis djadi untuk menjapai tudjuan strategis.

Sembojan kedua "Perbaiki pekerjaan front nasional, pentjikan lebih lanjut kekuatan kapalabatu" (*tepuktangan*) ditudjukan untuk menggalang kekuatan bangsa seluas mungkin guna mengalahkan kaum kapalabatu. Sembojan ini adalah sembojan untuk tudjuan taktis maupun tudjuan strategis.

Sembojan ketiga "Perkuat front internasional anti-kolonial dan untuk perdamaian" (*tepuktangan*) adalah medium politik luar negeri Partai, yang berarti penerusan setjara konsekwen dari keputusan<sup>2</sup> Konferensi Asia-Afrika yang besar di Bandung itu.

Sembojan keempat "Landjutkan pembangunan Partai diseluruh negeri yang bersatu erat dengan massa, yang terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi" (*tepuktangan*) adalah sembojan garis umum pembangunan Partai.

Ke-empat<sup>2</sup> sembojan ini harus per-tama<sup>2</sup> diabdikan kepada sembojan "Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongrojong" (*seruan: „Hidup!, Hidup!“, tepuktangan lama*) djadi untuk tudjuan taktis Partai yang terpenting, tetapi yang sekaligus akan mendekatkan kita pada tudjuan strategis.

Dalam perdjjuangan politik sembojan tidak bisa ditinggalkan. Ia adalah sjarat mutlak. Sudah tentu, yang saja maksudkan, sembojan yang tepat. (*Tawa*). Kitapun tentu sadja harus mengingat, bahwa sembojan yang tepat sadja tidak tjukup, dan bahwa yang tidak kalah pentingnja adalah persiapan<sup>2</sup> disegala bidang untuk terlaksananja sesuatu sembojan.

Apakah sesungguhnya sembojan itu?

Sembojan, tidak lain adalah, perumusan yang singkat dan jelas tentang sesuatu tudjuan atau soal, yang diadakan pada saat<sup>2</sup> tertentu dalam keadaan<sup>2</sup> tertentu.

Djuga dalam kehidupan-intern Partai kita membutuhkan dan memang menggunakan sembojan<sup>2</sup>, seperti misalnya sembojan "turun kebawah" atau sembojan yang dalam Kongres ini diadakan yaitu "tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan".

Pendeknja, didalam kehidupan Partai maupun dalam kehidupan politik nasional atau internasional, sembojan itu selalu diperlukan. Dan pengalaman Partai kita selama ini, khususnya antara Kongres Nasional ke-V hingga Kongres yang sekarang ini, telah mengajar kepada kita betapa ruginja jika kita tidak memahami dan makaitu mengabaikan peranan sembojan, sebaliknya, betapa menguntungkanja jika kita memahami dan makaitu menempatkan dan menggunakan se-tepatnja peranan sembojan<sup>2</sup> revolusioner dalam perjuang-an revolusioner.

## 11

Kawan<sup>2</sup>,

Perjuangan klas revolusioner selalu adalah perjuangan yang bersegibanyak, perjuangan yang meliputi, kepentingan kaum buruh, kaum tani, kaum inteligensia, dll, perjuangan yang mempunyai segi<sup>2</sup> politik, ekonomi dan kulturil, perjuangan yang mempunyai segi<sup>2</sup> nasional dan internasional.

Oleh sebab itu perjuangan klas revolusioner selalu menghimpun, selain kaum buruh juga kaum tani, kaum inteligensia, dan elemen<sup>2</sup> demokratis lainnja; ia selalu menjatakan dirinya dengan medium<sup>2</sup> politik seperti parlementarisme, rapat<sup>2</sup> dan demonstrasi<sup>2</sup> massa, pers dan literatur politik, medium<sup>2</sup> ekonomi seperti pemogokan dan boikot, salingbantu dan gotongrojong, dan medium<sup>2</sup> kulturil seperti musik, sastera, film, sendidrama, ilmu, dll.

Tiap<sup>2</sup> segi sudah tentu mempunyai pernyataan<sup>2</sup>nya sendiri<sup>2</sup>, bentukja sendiri<sup>2</sup>, tetapi kesemuanja selalu berputar pada satu poros, dan poros itu ialah tudjuan politik yang langsung yang mendjadi tuntutan keadaan pada satu<sup>2</sup> ketika, sebagaimana yang diformulasikan didalam sembojan<sup>2</sup> taktik Partai.

Bukankah kita semua masih ingat bahwa ketika sembojan taktik Partai yang pokok "Batalkan KMB!", segala sesuatu berdjalan dengan "pembatalan KMB" sebagai poros? Gerakan buruh dan gerakan pemuda, gerakan tani, wanita, veteran, mahasiswa dan kebudajaan, semuanya ketika itu untuk pembatalan KMB.

Hanja berkat pemusatan jang demikianlah maka sembojan taktik Partai jang pokok itu mentjapai hasilnja dengan gilang-gemilang.

Sekarang, kita melangsungkan Kongres Nasional ke-VI Partai ini dibawah sembojan "Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongrojong". Ini berarti bahwa aktivitet Partai di-hari<sup>2</sup>, di-bulan<sup>2</sup> dan di-tahun<sup>2</sup> sesudah Kongres ini akan ditudjukan untuk mempertahankan hak<sup>2</sup> dan bahkan meluaskan hak<sup>2</sup> demokrasi bagi Rakjat, dan untuk terbentuknja suatu kabinet gotongrojong, jang seperti dikatakan Presiden Sukarno ketika melantik anggota<sup>2</sup> DPA, Depernas dan Bapekan pertengahan bulan j.l. merupakan sjarat mutlak bagi kelangsungan hidup Republik kita. (*Tepuktangan*).

Djadi, untuk demokrasi dan kabinet gotongrojong haruslah mendjadi poros jang akan memutar seluruh roda perdjuaan revolusioner dinegeri kita untuk tahun<sup>2</sup> j.a.d. ini (*Tepuktangan*).

Dan djika kita bandingkan sembojan "Batalkan KMB!" dari Kongres j.l dengan sembojan Kongres sekarang "Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongrojong", maka djelaslah dimana letak perbedaannja. dulu kita ditjoba diisolasi oleh kaum reaksioner Masjumi-PSI, sekarang tukang<sup>2</sup> isolasinja jang terisolasi! (*Tawa, tepuktangan lama*).

## 12

Kawan<sup>2</sup> jang tertjinta,  
Kongres jang mulja,

Demikianlah pengantar saja atas Rentjana Perubahan Program jang diadjukan kepada Kongres ini untuk dimintakan persetudjuannja.

Dengan Program jang telah diperbarui ini, jang terdiri dari 10 Program Umum dan 50 Program Tuntutan, Partai kita dipersemdjatai dengan sangkur jang baru diasah (*tawa*), jang akan memudahkannja untuk membabat rintangan demi rintangan jang ada didepannja, dan dengan demikian memperlebar djalan Rakjat Indonesia menudju kemasjarakat jang benar<sup>2</sup> adil dan makmur, jaitu masjarakat jang merdeka penuh dan demokratis, dimana tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 telah terlaksana sampai ke-akar<sup>2</sup>nja.

Selama ini telah terbukti bahwa djalannja sedjarah membenarkan Program Partai Komunis Indonesia. Kita tidak ragu sedikit-pun, bahwa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau lebih, Rakjat akan mendjadi saksi bahwa lagi<sup>2</sup> djalan sedjarah membenarkan Program PKI. (*Tepuktangan lama, seruan : „Hidup!”*).

Ini mungkin dan ini akan terdjadi, karena, seperti dikatakan Karl Marx didalam "Kritik atas Program Gotha", sebuah program

itu "harus dipersiapkan oleh suatu masa pandjang aktivitet bersama". Masa aktivitet bersama, dari Rakjat kita jang mempersiapkan Program ini telah berlangsung 14 tahun.

PKI menjusun Programnja bukan hanja untuk diumumkan, tetapi untuk dilaksanakan dalam kehidupan aktuul. Dan PKI tidak pernah gagal melaksanakan Programnja didalam praktek, selama PKI bersandar kepada massa, selama PKI setia kepada garis massa, selama PKI beladjar dari massa agar bisa mengadjar massa untuk kemudian beladjar lagi dari massa. (*Tepuktangan*).

Langit pagi sudah memerah (*tawa. tepuktangan*), tanda hari bahagia bagi Rakjat Indonesia akan tiba. (*Tepuktangan*) Mari kita perhebat usaha untuk menjongsong datangnya hari idam2an itu!

Hidup Partai Komunis dan Rakjat Indonesia jang djaja' (*Tepuktangan lama, scruan2. "Hidup PKI", Hidup PKI!"*).



## PILIHAN COMITE CENTRAL DAN KOMISI VERIFIKASI

*Pidato Kawan D.N. AIDIT sebagai Ketua Komisi Pemilihan  
Badan<sup>2</sup> Central PKI pada tgl, 10 September 1959*

Kongres jang mulia !

Kawan<sup>2</sup> jang tertjinta !

Komisi Pemilihan jang dibentuk oleh Kongres Nasional ke-VI PKI telah mengadakan beberapa kali sidang untuk melaksanakan tugasnja.

Kepada Komisi Pemilihan telah masuk banjak usul dari para utusan, baik tertulis maupun lisan, baik untuk Comite Central maupun untuk Komisi Verifikasi. Semua usul ini membantu Komisi dalam melaksanakan tugasnja dan untuk itu atasnama Komisi saja mengutipkan terimakasih. Disamping itu, Komisi djuga mendapat banjak bantuan mengenai keterangan<sup>2</sup> tentang kader<sup>2</sup> Partai, baik dipusat maupun didaerah, untuk dipertimbangkan buat mendiadi anggota dua badan jang harus dipilih oleh Kongres ini.

Dalam Konstitusi Partai jang baru diterima dengan suara bulat oleh Sidang Kongres pada siang kemarin, tanggal 9 September, menurut fasal 28 a.l. dikatakan, bahwa :

*„Pemilihan Comite<sup>2</sup> Partai dilakukan setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka dari daftar tjalon<sup>2</sup> dengan djaminan, bahwa pemilih<sup>2</sup> berhak mengkritik dan mengganti setiap tjalon dalam daftar”.*

Djuga dikatakan dalam fasal tsb. bahwa tugas Komisi Pemilihan ialah *„mengusulkan tjara<sup>2</sup> pemilihan”.*

Berhubung dengan ketentuan dalam fasal 28 Konstitusi tsb. terserahlah pada Kongres apakah CC dan Komisi Verifikasi jang akan kita pilih sekarang akan dilakukan setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka.

Mengingat kebulatan jang monolit daripada Partai kita, jang dengan kuat telah didemonstrasikan oleh Kongres Nasional ke-VI Partai ini, Komisi mengusulkan supaja pemilihan dilangsungkan setjara terbuka. (*Tepuktangan, seruan : „Hidup ! Hidup !”*).

Saja usulkan kepada Presidium supaja menajikan kepada Kongres, apakah usul Komisi dapat disetujui.

(*Semua mengangkat kartu-pesertanja tanda setuju pemilihan dilakukan setjara terbuka — tepuktangan lama*).

Kawan<sup>2</sup>! Kenyataan bahwa Kongres dengan suara bulat menje-  
tudjui pemilihan setjara terbuka tidak hanya merupakan demonstrasi  
persatuan intern jang djaja daripada Partai kita, tetapi djuga me-  
nundjukkan moral Komunis jang tinggi (*tepuktangan*), moral jang  
tidak merahasiakan sesuatu dalam soal jang menjangkut kepen-  
tingan Partai dan kepentingan Rakjat. (*Tepuktangan lama*). Djika  
kita harus merahasiakan kesesuatu, maka keharusan ini hanya ber-  
laku terhadap musuh<sup>2</sup> Rakjat. (*Tepuktangan*).

Kawan<sup>2</sup>! Partai kita sekarang rukan lagi Partai lima tahun jang  
lalu. Partai kita sekarang adalah Partai jang sudah meliputi se-  
luruh negeri, didukung oleh lapisan<sup>2</sup> Rakjat jang termadju dari  
tiap<sup>2</sup> suku, mendapat simpati dan ketjintaan jang dalam dari massa  
kaum buruh, kaum tani, pekerdja kebudayaan dan intelektual pe-  
kerdja lainnja, massa pemuda, wanita, peladjar, dan golongan<sup>2</sup>  
Rakjat jang progresif lainnja. (*Tepuktangan*). Partai kita telah  
mendjadi Partai jang besar dan ditjintai oleh massa Rakjat jang  
luas, adalah berkat pekerdjaan jang tidak mementingkan diri sen-  
diri, baik oleh anggota<sup>2</sup> Partai jang bekerdja dipusat maupun di-  
daerah, didalam Komite<sup>2</sup> Partai maupun dalam organisasi<sup>2</sup> massa  
dan oleh semua angkatan Komunis Indonesia. (*Tepuktangan lama*).  
Semua mereka jang telah mengambil bagian dalam membesarkan  
dan memperkuat Partai ini dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan  
dalam menjusun Komite Central maupun dalam menjusun Komisi  
Verifikasi. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini Komisi  
Pemilihan mengusulkan kepada Kongres kawan<sup>2</sup> untuk Komite  
Central sbb. :

(*Kawan Aidit mengumumkan daftar nama*).

Semuanja diusulkan sebagai anggota CC. Sebagai tjalonang-  
gota<sup>2</sup> CC diusulkan :

(*Kawan Aidit menjebut nama kawan<sup>2</sup> jang diusulkan. Daftar  
nama anggota dan tjalonanggota CC dimuat pada halaman 219*).

Lewat Presidium saja tanjakan : Apakah ada jang ingin meng-  
ajukan kritik kepada tjalon<sup>2</sup>? (*Kongres menjatakan : „Tidak  
ada !”*).

Lewat Presidium saja menajakan kepada Kongres apakah na-  
ma-nama jang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Badan<sup>2</sup> Central  
PKI ini dapat disetudjui? (*Semua mengangkat kartu tanda setu-  
dju, semua berdiri dan tepuktangan lama*).

Mengenai Komisi Verifikasi, Komisi Pemilihan mengusulkan  
nama<sup>2</sup> sbb. :

(*Daftar nama anggota, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Verifi-  
kasi dimuat pada halaman 220*).

Lewat Presidium saja tanjakan : Apakah ada jang ingin meng-

ajukan kritik kepada tjalon<sup>2</sup>? (*Kongres menjatakan: „Tidak ada!”*).

Lewat Presidium saja menanyakan kepada Kongres apakah nama-nama yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan untuk Komisi Verifikasi ini dapat disetujui? (*Kongres menjetudju dengan semua mengangkat kartu tanda setuju, semua berdiri dan tepuktangan lama*).

Kawan<sup>2</sup>!

Sekali lagi kita telah mendemonstrasikan persatuan yang monolit daripada Partai kita, dan kali ini mengenai pimpinan central daripada Partai, yang oleh Kongres yang mewakili semua anggota dan tjalonanggota Partai, dipertjajakan untuk memimpin Partai selama antara Kongres Nasional ke-VI dan ke-VII.

Atasnama semua kawan yang baru mendapat keprtjajaan Kongres untuk memimpin seluruh Partai kita, izinkanlah saya meng-utjapkan terimakasih yang se-besar<sup>2</sup>nja kepada Partai yang telah memberi keprtjajaan begitu besarnya kepada kami. Kami sadar, bahwa segala yang terbaik yang ada pada kami tidak tjukup baik untuk diberikan kepada Partai dan proletariat. Kami akan mendjunjungtinggi keprtjajaan yang telah diberikan oleh Partai dan akan memberikan apa saja yang ada pada kami yang diminta oleh Partai.

Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk atasnama kawan<sup>2</sup> yang baru terpilih menjadi anggota dan tjalonanggota Komite Central dan yang menjadi anggota Komisi Verifikasi mengulangi sumpah kami kepada Partai seperti yang sudah pernah kami utjapkan berdasarkan fasal 4 Konstitusi Partai:

*Kami bersumpah akan memenuhi semua kewadajiban Partai; memelihara kesatuan Partai; melaksanakan putusan<sup>2</sup> Partai; menjadi tjontoh dalam perdjuaan untuk tanahair dan Rakjat; berusaha menjadi tjontoh dalam kehidupan sehari-hari; meneguhkan hubungan massa dengan Partai; berusaha memperdalam kesedaran dan menguasai prinsip<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme, berterusterang dan djudjur kepada Partai; menjaga keselamatan Partai. (Tepuktangan lama).*

Kawan<sup>2</sup>! Demikian pengulangan sumpah kami semua, yang kami njatakan dalam menerima kedudukan kami sebagai anggota dan tjalonanggota Komite Central dan anggota Komisi Verifikasi.

Sekian.

(*Tepuktangan lama, semua berdiri*).

## KEMBANGKAN SEMANGAT KONGRES NASIONAL ke-VI PKI

*Sambutan pada pesan<sup>2</sup> tamu<sup>2</sup> luarnegeri dan pidato penutupan  
Kongres Nasional Ke-VI PKI diutjapkan oleh Ketua CC PKI  
Kawan D.N. AIDIT pada malam tgl. 14 September 1959*

*Sebelum Kawan Aidit berpidato, pemimpin sidang Kawan Lukman mengumumkan, bahwa sidang pertama CC PKI yang baru telah memilih dengan suara bulat D.N. Aidit sebagai Ketua CC PKI (Tepuktangan lama, semua berdiri menjerukan „Hidup Aidit!“)*

Kawan Dimo Ditchew dari Bulgaria, Kawan Jerzy Albrecht dari Polandia, Kawan Morris Hughes dari Australia, Kawan Ursinio Rojas dari Kuba, Kawan Pal Ilku dari Hongaria, Kawan Kurt Barthels dari Djerman dan Kawan Giuseppe Boffa dari Italia, izinkanlah saja atasnama semua peserta Kongres Nasional Ke-VI PKI, atasnama lebih dari 1,5 djuta Komunis Indonesia dan atasnama Rakjat pekerdja Indonesia mengutjapkan rasa terimakasih yang se-dalam<sup>2</sup>nja kepada kawan<sup>2</sup>, kepada Partai kawan<sup>2</sup> dan kepada Rakjat kawan<sup>2</sup>. (Tepuktangan lama). Kami sungguh terharu mendengar pesan<sup>2</sup> kawan<sup>2</sup>. Sungguh besar solidaritet Partai kawan<sup>2</sup> dan Partai<sup>2</sup> sekawan lainnja terhadap Partai Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia. (Tepuktangan lama).

Pesan<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> sekawan kepada Kongres kami, kepada Partai Komunis dan Rakjat Indonesia memberi kekuatan yang besar kepada kami dalam meneruskan perdjuaan kami yang berat, yang memakan waktu panjang dan rumit. Solidaritet Partai<sup>2</sup> sekawan dan Rakjat<sup>2</sup>nja merupakan tambahan kekuatan yang penting bagi kami. (Tepuktangan).

Dengan datangnya delegasi persahabatan dari tudjuh Partai sekawan ke Indonesia dengan tudjuan untuk menghadiri Kongres Nasional ke-VI PKI, maka gagallah usaha kaum reaksioner untuk mengisolasi Partai Komunis Indonesia dari gerakan Komunis se-dunia. (Seruan dalam ruang : „Hidup! hidup!“ Tepuktangan lama). Seandainya kawan<sup>2</sup> tidak djadi memberikan pesan<sup>2</sup> dengan lisan kepada para peserta Kongres, inipun sudah merupakan kemenangan, karena pada pokoknja rintangan sudah dipatahkan dengan

kenjataan kawan<sup>2</sup> datang untuk Kongres kami, sedangkan kami dengan penuh antusiasme menjambut kedatangan kawan<sup>2</sup>. (*Seruan : „Hidup !” Tepuktangan lama*). Apalagi sekarang, setelah kawan<sup>2</sup> berada di-tengah<sup>2</sup> kami dan sudah memberikan pesan<sup>2</sup> jang sangat mendpwai kami, benar<sup>2</sup> sudah merupakan keagagalan total kaum reaksioner untuk memisahkan kaum Komunis Indonesia dari gerakan Komunis sedunia. (*Seruan : „Hidup !” Tepuktangan lama*). Internasionalisme proletar ternyata djauh lebih kuat daripada uang dolar jang sudah di-hambur<sup>2</sup>kan untuk mengisolasi PKI dari gerakan Komunis sedunia. (*Tepuktangan*). Kekuatan progresif ternyata lebih besar daripada kekuatan reaksioner. (*Tepuktangan lama*).

Hidup solidaritet internasional! (*Seruan : „Hidup ! Hidup !” Tepuktangan lama*).

Hidup semua Partai sekawan kita ! (*Seruan : „Hidup !” Tepuktangan lama*).

Selanjutnja, izinkanlah saja mengumumkan badan<sup>2</sup> pimpinan Central sebagai hasil pilihan Kongres Nasional Ke-VI Partai. (*Kawan Audit mengumumkan susunan Komisi Kontrol Central, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II CC, Politbiro dan Sekretariat CC dengan sambutan jang gemuruh. Daftar nama anggota<sup>2</sup> badan<sup>2</sup> pimpinan ini dimuat pada halaman 219 dan 220*).

Kawan<sup>2</sup>, satu peristiwa bersedjarah sudah berlalu dengan semangat dan gembira, jaitu Kongres Nasional Ke-VI PKI. Adalah sangat mengharukan, bahwa Laporan Umum CC, Perubahan Konstitusi, Perubahan Program, Komite Central jang baru, Komisi Verifikasi Central dan putusan<sup>2</sup> lainnja telah diterima oleh Konggres dengan suara bulat. (*Tepuktangan*). Ini adalah Kongres PKI jang terbesar selama umurnja jang hampir 40 tahun. (*Tepuktangan*). Kongres ini merasuk sangat dalam kelubuk hati kaum Komunis dan Rakjat pekerdja Indonesia. (*Tepuktangan*). Rintangan<sup>2</sup> jang dipasang orang untuk menghalang-halangi Kongres ini djustru telah lebih merapatkan barisan kaum Komunis dan lebih mempersatukan massa Rakjat pekerdja dengan kaum Komunis. (*Seruan : „Hidup !” Tepuktangan*). Dihati massa Rakjat pekerdja Indonesia Kongres ini adalah Kongresnja sendiri. (*tepuktangan*), lebih<sup>2</sup> lagi karena Kongres ini mendapat berbagai rintangan. (*Tepuktangan lama*).

Pidato saja ketika menutup Kongres Nasional Ke-V lebih dari 5 tahun jang lalu berkepala „Kembangkan periode 1951”, jaitu periode sesudah Partai bangkit kembali dengan garis politik dan garis organisasi jang Leninis. Kita sudah mengembangkan periode ini dan hasilnja jalah, bahwa kita sekarang sudah memiliki Partai

jang sudah lebih tersebar diseluruh negeri, jang mempunyai karakter massa jang lebih luas, jang sudah lebih terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik dan organisasi. (*Tepuktangan lama*). Kongres Nasional Ke-VI kita adalah bukti jang paling menjolok dari semuanya ini. Tidak ada satu Daerah Besar, satu Pulau atau satu angkatan Komunis Indonesia jang tidak diwakili dalam Kongres Nasional Ke-VI kita, putera<sup>2</sup> jang terbaik dari banjak suku-bangsa hadir dalam Kongres dan terpilih duduk dalam Badan<sup>2</sup> Pimpinan Central daripada Partai. (*Tepuktangan lama*).

Rintangan<sup>2</sup> jang dialami Kongres bukannya mengurangi simpati massa kepada Kongres, sebaliknya, membikin me-luap<sup>2</sup>nja sambutan massa, baik jang berupa sumbangan<sup>2</sup> materiil maupun jang berupa seribusatu bentuk lainnya. (*Tepuktangan*).

Kongres ini kita laksanakan dengan semangat patriotisme jang tinggi, semangat membela kebebasan<sup>2</sup> demokratis, semangat membela Republik Proklamasi dan semangat anti-imperialisme jang kuat. (*Tepuktangan*).

Djuga semangat internasionalisme proletar adalah semangat Kongres Nasional Ke-VI Partai kita, jang dinjatakan oleh dokumen<sup>2</sup> jang disahkan oleh Kongres, oleh sambutan<sup>2</sup> Kongres pada pesan<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> sekawan, baik jang disampaikan oleh delegasi<sup>2</sup> persahabatan Partai<sup>2</sup> sekawan, maupun jang dengan perantaraan surat<sup>2</sup> dan telegram. (*Tepuktangan lama*).

Kongres Nasional ke-VI PKI dilangsungkan dengan semangat dan kesedaran proletariat jang tinggi. Semangat dan kesedaran ini merupakan djaminan, bahwa Partai kita, dalam keadaan bagaimanapun akan terus mendaki dan akan sampai kepuntjak gunung kemenangan Rakjat. (*Tepuktangan lama*).

Djika pidato saja sekarang ini berkepala „Kembangkan semangat Kongres Nasional Ke-VI“, maka jang saja maksudkan ialah supaya semangat ini makin lama makin dalam mendjwai semua pekerdjaan Partai. Tetapi jang terutama saja maksudkan ialah semangat persatuan didalam Partai, semangat pengabdian kepada Rakjat dan bersatu dengan massa. (*Tepuktangan lama*). Tidak ada bidadari jang akan dapat melemahkan hati kita, dan tidak ada setan jang dapat menakut-nakuti kita (*tawa*) djika Partai sudah benar<sup>2</sup> bersatupadu dengan massa. (*Tepuktangan*). Partai akan tetap berdiri tegak bagaikan batukarang ditengah lautan walaupun ada gelombang tinggi dan dahsjat. (*Tepuktangan lama*).

Dengan semangat Kongres Nasional Ke-VI Partai kita harus bersatupadu dengan bagian terbesar daripada kaum buruh, dengan bagian terbesar daripada kaum tani, dengan bagian terbesar daripada kaum intelektual pekerdja dan dengan bagian terbesar daripada

massa Rakyat pekerdja lainnja. (*Tepuktangan lama*). Semuanya ini adalah mungkin, karena Kongres Nasional Ke-VI PKI sudah membuka djalan untuk itu. (*Tepuktangan lama*).

Tetaplah setia pada nama jang sudah kita setudjui untuk Kongres Nasional Ke-VI Partai, jaitu Kongres daripada penggalang<sup>2</sup> front persatuan nasional dan Kongres daripada pembangun<sup>2</sup> Partai Komunis Indonesia jang djaja. (*Tepuktangan lama*). Inilah kita, kawan<sup>2</sup>! (*Tepuktangan*). Djundjunglah tinggi nama ini, dan berikanlah semua jang diminta untuk mendjaga kehormatan nama ini. Ini berarti kita setia pada patriotisme dan internasionalisme proletar, ini berarti kita setia pada Marxisme-Leninisme jang kreatif. Ini berarti kita berdjuaug untuk demokrasi dan Kabinet Gotongrojong. (*Tepuktangan lama*).

Kawan<sup>2</sup>, tahun depan, tahun 1960, adalah ulangtahun ke-40 Partai kita dan ulangtahun ke-15 Republik kita. Marilah kita song-song hari<sup>2</sup> bersedjarah ini dengan semangat berkompetisi dalam „tahun pertama periode Kongres Nasional Ke-VI“. (*Tepuktangan lama*).

Tepat sekali kata Kawan Njoto, jaitu bahwa langit pagi sudah memerah, tanda hari bahagia bagi Rakyat Indonesia akan tiba. (*Tepuktangan*). Benar pula kata Kawan Fachrul dari Kalimantan Timur, jaitu bahwa bagi kaum reaksioner hari sudah hampir magrib. (*Tawa, tepuktangan*).

Marilah kita bekerdja terus dengan semangat Kongres Nasional Ke-VI madju menjongsong fadjar harapan Rakyat, dan supaja magrib segera disusul gelapgelita bagi kaum reaksioner. (*Seruan : „Jaah!“ Tepuktangan lama*).

Partai kita sekarang bukan hanya anak zaman jang gagah perkasa, tetapi ia sekarang sedang dalam proses melahirkan zaman baru bagi Rakyat Indonesia. (*Tepuktangan lama*).

Hidup Partai Komunis Indonesia, pengabdii jang tersetia dari Rakyat dan tanahair Indonesia! (*Seruan : „Hidup!“ Tepuktangan lama*).

Kembangkan semangat Kongres Nasional Ke-VI! (*Tepuktangan lama, semua berdiri dan menjanjikan lagu „Internasionale“*).

## SUKSESJA KONGRES NASIONAL ke-VI PKI ADALAH KEMENANGAN DEMOKRASI JANG BESAR!

*Pidato Ketua CC PKI, Kawan D N. AIDIT pada malam resepsi penutupan Kongres Nasional Ke-VI PKI tgl 16 September 1959*

Paduka Jang Muha Presiden Sukarno Bung Karno jang terhjinta!

Jang Mulia para Menteri, Anggota<sup>2</sup> Dewan Pertimbangan Agung, Anggota<sup>2</sup> Parlemen, Anggota<sup>2</sup> Dewan Perantjang Nasional dan para pembesar lainnja!

Para tamu dari Perwakilan negara<sup>2</sup> sahabat!

Para saudara dan kawan<sup>2</sup>!

Pertama-tama izinkanlah saya atasnama Komite Central dan semua peserta Kongres Nasional Ke-VI PKI mengutjapkan selamat datang dan banjak terimakasih kepada saudara<sup>2</sup> jang sudah memerlukan datang keresepsi penutupan Kongres Nasional Ke-VI PKI ini. Kami merasa berhutang budi dan mendapa. kehormatan besar berhubungan dengan kedatangan para tamu kami jang mulia. Peribahasa kita mengatakan „*Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati*“. (*Tepuktangan lama*). Tetapi orang<sup>2</sup> Komunis jang sekarang masih hidup sudah berbulat tekad, bukan untuk membayar hutang budi karena ini memang tidak mungkin dibayar, tetapi untuk memberikan segala apa jang ada pada kami untuk melaksanakan tugas urgen PKI jang nomor satu, jaitu tugas menggalang dan memperkuat front persatuan nasional sebagai djamuan untuk tertjapainja kemerdekaan nasional kita jang penuh, untuk kemerdekaan politik dan ekonomi negeri kita. (*Tepuktangan*).

Kongres Nasional Ke-VI PKI djuga telah menamakan dirinja Kongres daripada penggalang<sup>2</sup> front nasional. Kaum Komunis Indonesia memang belum puas dengan hasil<sup>2</sup> jang sudah ditjapainja dalam pekerdjaan ini, tetapi se-kurang<sup>2</sup>nja kami ingin mendjadi penggalang<sup>2</sup> jang sungguh<sup>2</sup> daripada front nasional dinegeri kita.

Para saudara dan kawan<sup>2</sup>!

Kongres Nasional Ke-VI PKI dilangsungkan dari tanggal 7 sampai tanggal 14 September 1959. Ini adalah Kongres PKI jang terbesar selama umur PKI jang sudah hampir 40 tahun. Semua daerah dan pulau, semua angkatan Komunis Indonesia dan semua anggota dan tjalonanggota jang djumlahnja lebih dari 1,5 djuta

diwakili dalam Kongres ini. (*Tepuktangan*). Praktis semua suku-bangsa diwakili dan banyak putera<sup>2</sup> yang terbaik dari sukubangsa<sup>2</sup> duduk dalam Presidium yang memimpin Kongres dan juga terpilih untuk duduk dalam badan<sup>2</sup> pimpinan central PKI. (*Tepuktangan lama*). Kongres Nasional Ke-VI PKI adalah Kongres persatuan djaja daripada kaum Komunis dan Rakyat pekerdja Indonesia.

Kenyataan bahwa PKI dalam usanya yang hampir 40 tahun baru enam kali dapat melaksanakan Kongresnya, yaitu 3 kali dalam masa pendudukan Belanda dan 3 kali dalam zaman Republik Indonesia, adalah djuga menunjukkan betapa beratnya masa<sup>2</sup> lampau PKI. Sedjak pemberontakan tahun 1926 dizaman pendudukan Belanda, melalui kekuasaan militerisme Djepang sampai ke Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, djadi hampir 20 tahun, PKI terpaksa bekerdja dibawah tanah. Kongres pertama, kedua dan ketiga sudah tentu dilangsungkan dalam keadaan yang sangat sulit dengan pengawasan keras dan pembatasan<sup>2</sup> yang luarbiasa dari penguasa<sup>2</sup> kolonial. Kongres keempat dan kelima dilangsungkan dalam suasana Indonesia merdeka, tanpa pengawasan dan pembatasan<sup>2</sup> seperti dizaman kolonial. Kongres Nasional Ke-VI yang baru sadja selesai djuga dilangsungkan dalam suasana Indonesia merdeka, tetapi dengan pembatasan<sup>2</sup> yang mengingatkan kita kembali kepada suasana zaman yang tidak enak dulu. (*Tawa*).

Tapi pada saat<sup>2</sup> terakhir dari Kongres ini, berkat adanya saling mengerti antara PKI dengan para penguasa, keadaan berubah, kelonggaran<sup>2</sup> didapat oleh Kongres dan tamu<sup>2</sup> luarnegeri PKI diberi kesempatan untuk menjampaikan pesan<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> dan Rakyat<sup>2</sup>nya kepada para peserta Kongres (*Tepuktangan*). Lebih daripada itu, tamu<sup>2</sup> luarnegeri dari Kongres Nasional Ke-VI PKI telah mengadakan pertemuan ramahtamah dengan Menteri Inti Pertahanan dan Keamanan, Letnan Djenderal A.H. Nasution, (*tepuktangan*) dan Menteri Inti Luarnegeri Dr. Subandrio. (*Tepuktangan*). Malahan malam ini tamu<sup>2</sup> luarnegeri kita berada dalam ruangan ini ber-sama<sup>2</sup> dengan Presiden Sukarno (*tepuktangan lama*) dan pembesar<sup>2</sup> Indonesia lainnya. Dengan semuanya ini, maka usaha<sup>2</sup> kaum imperialis untuk mengisolasi PKI dari gerakan Komunis sedunia mengalami kegagalan total. Persaudaraan antara umat manusia, persahabatan antara pedjuang<sup>2</sup> revolusioner sedunia adalah djauh lebih kuat daripada keinginan<sup>2</sup> yang aneh dan dluwarsa daripada kaum reaksioner. (*Tepuktangan lama*).

Sungguh<sup>2</sup> kami sesalkan, bahwa pada waktu Kongres akan dimulai tersiar desas-desus, se-olah<sup>2</sup> Kongres Nasional Ke-VI PKI adalah persiapan untuk perebutan kekuasaan atau kudeta oleh PKI

dalam tahun 1960. (*Tawa*). Saja kagum akan „kekreatifan“ (*tawa*) tukang<sup>2</sup> desas-desus ini. Enam bulan sebelum Kongres dilangsungkan CC PKI sudah mengeluarkan Rentjana Tesis yang sangat djelas menundjukkan djalan mana yang mau ditempuh oleh PKI dalam usahanya untuk mengadakan perubahan dalam politik Indonesia. Kudeta adalah djalan orang yang kehilangan akal. (*tepuktangan*, teriak : „Betul. betul“), yang tidak mempunyai kepertajaan pada Rakjat dan demokrasi. Sedangkan PKI mempunyai kepertajaan yang tidak terbatas pada Rakjat sebagai sumber segala kekuatan.

PKI mendasarkan perjuangannya pada apa yang dinamakan oleh Bung Karno „massa actie“. (*Tepuktangan lama*). Rakjat Indonesia makin lama makin bergeser ke kiri dan makin lama makin banyak yang berdiri di pihak PKI. Kenyataan bahwa dalam hanya dua tahun, yaitu dari pemilihan umum Parlemen yang pertama sampai pemilihan DPRD, PKI telah tumbuh dari Partai no. 4 dengan pemilih 6 djuta lebih menjadi Partai no. 1 dengan pemilih 8 djuta lebih. (*tepuktangan lama*) adalah bukti segedé gadjah (*tawa*) bahwa perubahan dalam politik dapat diadakan dengan djalan<sup>2</sup> demokratis. (*Tepuktangan*).

Djadi, kalau mau mentjari tukang<sup>2</sup> kudeta djanganlah mentjari-nya dalam tubuh PKI, tetapi tjarilah pada pihak<sup>2</sup> lain. (*Tawa. tepuktangan*). Selama masih terbuka djalan demokratis, PKI akan menempuh djalan ini. Kalau pemilihan umum Parlemen kedua tertunda-tunda bukanlah salahnya PKI. PKI senantiasa siap kapan sadja pemilihan umum ini mau diadakan. (*tepuktangan*), makin tjepat makin baik. (*Tepuktangan lama*).

PKI memang pernah memimpin pemberontakan dalam tahun 1926 (*tepuktangan*) dan orang<sup>2</sup> PKI memang turut ambil bagian dalam pemberontakan terhadap kaum militeris Djepang dan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi harus diingat bahwa pada waktu itu memang tidak ada djalan demokratis yang mungkin ditempuh oleh PKI.

Jang lebih mentertawakan lagi ialah, desas-desus tentang Kongres PKI akan menjiapkan kudeta diembel-embeli lagi dengan keterangan, bahwa Kongres PKI merupakan „nationaal gevaar“ (*bahaya nasional*). (*Tawa*). Kalau kaum kolonialis Belanda atau kaum imperialis Amerika Serikat atau imperialis<sup>2</sup> lain berbitjara begini tidaklah mengherankan. Tetapi bahwa „hollands denken“ (*tawa*) atau „imperialistisch denken“ (*tawa*) ini masih ada pada orang<sup>2</sup> penting dalam aparat<sup>2</sup> Republik, ini adalah keterlaluan. (*Tepuktangan*). Jang merupakan „nationaal gevaar“ bukanlah PKI, tetapi djustru fikiran<sup>2</sup> sementara pendjabat yang masih ketjekokan

„hollands denken“, „PID-isme“, „Djenakum-isme“, „Sarekat Hedjo-isme“, „Kenpeitaisme“, (*tepuktangan lama*), atau yang biasa disebut oleh Bung Karno „tjetjunguk-isme“, (*Tepuktangan*).

Tetapi walaupun bagaimana, Kongres Nasional Ke-VI PKI sudah berlangsung dengan selamat. Pada tempatnya saja mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pembesar sipil dan militer, kepada tokoh-tokoh ilmu kebudayaan dan masyarakat yang telah membantu dan telah memberi ucapan selamat kepada Kongres ini. Ucapan selamat dari banyak Menteri dan pembesar<sup>2</sup> lainnya kepada Kongres Nasional Ke-VI adalah segi lain yang layak dapat penilaian jika mau mengerti situasi politik yang sesungguhnya di Indonesia. Kalau zaman kolonial dulu pekerjaan yang terpenting daripada kepala polisi ialah mencari Komunis untuk dipendjarakan dan dibuang ke Boven Digul, tapi sekarang Kepala Polis, Negara yang juga Menteri Negara *ex officio*, mengucapkan selamat dan mengharapkan sukses bagi Kongres PKI. (*Tepuktangan*).

Pokoknya, aparat yang masih „hollands denken“, yang masih sama dengan kaum kolonial Belanda menganggap kaum Komunis sebagai „bahaja“, (*tawa*), masih takut banyak. Tetapi yang sudah melepaskan diri dari tjara berfikir lama dan menerima nilai<sup>2</sup> baru daripada perkembangan dinegeri kita sedjak proklamasi 17 Agustus 1945 juga sudah banyak. Terhadap yang pertama Rakjat dan PKI akan meneruskan perlawanannya, sedangkan terhadap yang kedua Rakjat dan PKI akan terus mengusahakan kerdjasama. (*Tepuktangan*).

Suksesnya Kongres Nasional Ke-VI PKI bukanlah hanya sukses bagi PKI dan klas buruh Indonesia, tetapi juga adalah sukses bagi seluruh gerakan patriotik dan demokratis. (*Tepuktangan*). Ini adalah kemenangan besar daripada demokrasi dan merupakan satu bukti yang menjolok, bahwa walaupun masih ada orang<sup>2</sup> yang „hollands denken“, tapi orang<sup>2</sup> ini bukan takterkalahkan. „PID-isme“, „tjetjunguk-isme“, (*tawa*), „Djenakum-isme“ dan „tjoro-isme“ sudah ternjata bukan zamannya lagi, (*tepuktangan*), walaupun ada orang<sup>2</sup> yang masih mau mempraktekannya.

Para saudara dan kawan<sup>2</sup>!

Kongres Nasional Ke-VI PKI disiapkan dengan semangat pengabdian Komunis yang besar pada Rakjat. Kongres ini disongsong dengan gerakan amal kaum Komunis kepada Rakjat lewat pembentukan ribuan Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti (*tepuktangan*) dimana pemimpin<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> PKI ambil bagian didalamnya. Sebagai hasil dari pekerjaan gotongrojong Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti ini telah diperbaiki atau dibikin *djalan* sepanjang 3.249 Km, (*tepuk-*

tangan). telah diperbaiki atau dibikin selokan sepanjang 985 Km. (tepuktangan). telah diperbaiki atau dibikin rumah sebanyak 2.280 buah. (tepuktangan). telah diperbaiki atau dibikin rumah<sup>2</sup> sekolah sebanyak 80 buah. (tepuktangan). telah dibikin bendungan sebanyak 138 buah. (tepuktangan). telah diperbaiki atau dibikin jembatan sebanyak 1477 buah. (tepuktangan). telah dibikin atau diperbaiki kakus umum sebanyak 5119 buah. (tepuktangan). telah dibersihkan atau diperbaiki kuburan sebanyak 1608 buah (tepuktangan). telah dibikin atau diperbaiki kolam sebanyak 432 buah. (tepuktangan). telah diperbanyak hasil bumi dengan mengerd akan tanah 362 HA. (tepuktangan). telah diberantas tikus sebanyak 186.698 ekor. (tepuktangan). telah didirikan kursus PBH di 351 tempat. (tepuktangan). telah dibikin atau diperbaiki tempat<sup>2</sup> pemandian umum sebanyak 3133 buah. (Tepuktangan). Selain daripada itu juga telah dibuat atau diperbaiki balai<sup>2</sup> Rakjat lapangan olahraga, dan atas permintaan Rakjat setempat juga mesjid atau geredja, dll. (Tepuktangan).

Regu<sup>2</sup> kerdjabakti yang ribuan jumlahnya ini adalah merupakan sukses Kongres Nasional Ke-VI PKI sebelum Kongres itu dimulai. (Tepuktangan). Ia tidak hanya telah lebih mengeratkan hubungan PKI dengan massa. tidak hanya telah membantu massa Rakjat pekerdja dalam mengatasi berbagai kesulitannya. tetapi juga telah membikin pemimpin<sup>2</sup> PKI lebih kenal kehidupan, dan pemimpin<sup>2</sup> PKI yang biasanya hanya bekerja otak telah mentjeburkan diri dalam kerdja badan. Berdasarkan pengalaman<sup>2</sup> yang baik dan sukses<sup>2</sup> ini, Kongres Nasional Ke-VI telah memutuskan untuk sesudah Kongres meluaskan pembentukan Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti, baik yang hanya terdiri dari orang<sup>2</sup> Komunis ataupun yang menggabungkan diri dengan Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti yang dibentuk oleh pemerintah<sup>2</sup> setempat atau Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti ber-sama<sup>2</sup> dengan golongan<sup>2</sup> lain. Kaum Komunis yakin. karena tjotjok dengan semangat gotong-rojong Rakjat. Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti yang dibentuk atas prinsip sukarela, lambatlaun akan merupakan organisasi sosial yang sangat dibutuhkan dan ditjintai oleh Rakjat pekerdja Indonesia.

Tetapi pembentukan Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti tidak semudah mengutapkannya. Ia menghendaki ketelatenan, kesabaran revolusioner dan keberanian. Perintahisme atau komandoisme tidak mendorong pembentukan Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti. Prinsip sukarela dan prinsip kesadaran harus didjundjung setinggi-tingginya. Keberanian juga diperlukan, karena dibanyak tempat pembentukan Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti juga dihalang-halangi oleh pendjabat<sup>2</sup> setempat yang masih ketjekokan „hollands denken” (tawa. tepuktangan) dan difitnah sebagai persiapan PKI untuk mengadakan pemberontakan. Belum

berapa lama berselang Mas Kartopawiro dan Hardjosenu didjatuhi hukuman oleh pengadilan Bojolali karena ..... bekerdjabakti membikin djembatan, sedangkan Mas Hadimuljono dan Sukoto dituntut dan dihukum karena ..... bekerdjabakti membersihkan selokan. Inilah keadjaiban, orang bekerdjabakti, dan beramal kepada Rakjat dituntut dan dihukum sedangkan orang<sup>2</sup> jang korup dan penuh dengan „hollands denken“ diperlindungi. Keadjaiban ini harus diakhir. Ketjuriqaan tidak harus ditudjukan kepada Rakjat tetapi kepada musuh<sup>2</sup> Rakjat. (*Tepuktangan lama*).

Para saudara dan kawan<sup>2</sup>!

Walaupun sangat banyak kesulitan<sup>2</sup> jang kami alami dalam melaksanakan Kongres Nasional Ke-VI PKI, tetapi sekarang Kongres sudah berialu dengan sukses. Malam ini, kaum Komunis merasa sangat berbahagia. Besar Bukit Barisan, tapi lebih besarlah hati kaum Komunis pada malam terang bulan ini. (*Tepuktangan lama*).

Mengapa para saudara?

Betapa tidak! D-tengah<sup>2</sup> kaum Komunis jang sedang bergembira menjambut Kongresnya jang sukses, ada Bung Karno (*tepuktangan*), patriot Indonesia jang besar dan djuru pemersatu Rakjat Indonesia. (*Tepuktangan lama*). Walaupun Bung Karno sedang menghadapi berbagai persoalan negara jang sulit, tetapi memerlukan djuga datang keresepsi ini. (*Tepuktangan, teriakkan: „Hidup Bung Karno“*). Bersama-sama dengan Presiden Sukarno djuga datang keresepsi ini pembesar<sup>2</sup> lainnya jang telah terbukti patriotismenya dalam perdjjuangan untuk kemerdekaan negeri kita. (*Tepuktangan*).

Ditengah-tengah kita sekarang djuga ada wakil<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> sekawan, (*tepuktangan lama*), jaitu dari Partai Persatuan Buruh Polandia, (*tepuktangan*), Partai Komunis Bulqaria, (*tepuktangan*), Partai Komunis Australia, (*tepuktangan*), Partai Sosialis Rakjat Kuba, (*tepuktangan lama*), Partai Buruh Sosialis Hongaria, (*tepuktangan*), Partai Persatuan Sosialis Djerman (*tepuktangan*), dan Partai Komunis Italia. (*Tepuktangan*). Wakil<sup>2</sup> Partai<sup>2</sup> sekawan ini adalah patriot<sup>2</sup> besar tanahairnya, (*tepuktangan*), tetapi bersamaan dengan itu mereka mengerti benar apa jang mendjadi aspirasi<sup>2</sup> daripada bangsa<sup>2</sup> dan Rakjat<sup>2</sup> negeri<sup>2</sup> lain. (*Tepuktangan*). Karena adanja pengertian inilah, maka mereka datang dari negeri<sup>2</sup> jang beribu-ribu kilometer ketanahair kita. Atasnama CC PKI dan seluruh anggota serta petjinta PKI, sekali lagi saja mengutjapkan banyak terimakasih kepada Partai<sup>2</sup> kawan<sup>2</sup> jang telah mengirim kawan<sup>2</sup> dari negeri<sup>2</sup> jang beribu-ribu kilometer dari Indonesia untuk menjampaikan perasaan solidaritet dan simpati jang besar pada perdjjuangan Rakjat dan Partai Komunis Indonesia.

Sungguh, para saudara dan kawan<sup>2</sup>, sukarlah untuk menemukan malam terang bulan seindah malam ini dalam hidup kita. Pada malam ini kehormatan patriotisme dan internasionalisme bersatupadu. (*Tepuktangan*). Tentu bukan patriotismenja kaum soviet dan bukan internasionalismenja kaum kosmopolit tetapi patriotismenja internasionalis dan internasionalismenja patriot. Kebangsaan dan kemanusiaan, dua sila dari Pantjasila berada dalam paduan yang harmonis malam ini. (*Tepuktangan*).

Bung Karno<sup>1</sup> Izinkanlah saya menyampaikan utjapan terimakasih yang khusus dari semua peserta Kongres Nasional Ke-VI PKI kepada Bung Karno. Kami yang diwadjabkan oleh Partai mempelajari sedjarah Partai dan perjuangan Rakyat Indonesia tahu betapa eratnja hubungan batin antara PKI dan Bung Karno. (*Tepuktangan lama*). Tidak lam adalah Bung Karno ketika masih berusia sangat muda, yang dengan simpati besar menjambut pemberontakan heroik tahun 1926 dibawah pimpinan PKI. Kita bisa sependapat atau tidak sependapat tentang berbagai hal mengenai pemberontakan itu, tetapi yang sudah terang tidak pernah ada perbedaan pendapat antara Bung Karno dengan kaum Komunis jalah, bahwa pemberontakan terhadap pendjadjahan adalah selamanya benar. (*Tepuktangan lama*). „Tjatjungpun kalau dundjak akan berontak“. (tawa), demikian sering dikatakan oleh Bung Karno.

Adalah djuga Bung Karno, yang dimasa masih meradja jelanja kaum militeris Djepang, bersedia menerima kedatangan dan mendengar pendapat<sup>2</sup> orang<sup>2</sup> yang bagi Bung Karno terang orang<sup>2</sup> Komunis yang pada waktu itu bekerja dibawah tanah, padahal Kenpeitai mondar-mandir didepan rumah. Bung Karno bukanlah seseorang yang menjadi putjat-pasi djika dizaman kekuasaan kaum militeris Djepang dulu kedatangan orang Komunis ditengah malam buta. (*Tepuktangan lama*).

Bung Karno, tjerita<sup>2</sup> lama ini, walaupun hanya satu-dua yang saja ungkapkan, adalah sangat penting bagi kami dalam mengikuti langkah<sup>2</sup> Bung Karno yang sekarang memegang tampuk pimpinan tertinggi daripada negara. Peribahasa mengatakan, bahwa sahabat yang sedjati adalah sahabat diwaktu sukar. (*Tepuktangan lama*) Adakah waktu yang lebih sukar bagi kaum Komunis Indonesia daripada ketika pendjadjahan Belanda dan pendjadjahan kaum militeris Djepang? Orang djahil mungkin berkata: Ja, tapi pernah ada pertentangan pendapat antara Bung Karno dan PKI. Saja tidak membantahnja. Saja hanya bertanja: apakah pernah ada dua sahabat karib yang samasekali tidak pernah bertentangan pendapat? (*Teriakan: „Tidak“*). Persahabatan yang kekal bukanlah per-

sahabatan yang samasekali tidak pernah mengalami perselisihan laham, tetapi yang selamanya dapat mengachiri perselisihan laham setjara sahabat dan tepat pada waktunya. (*Tepuktangan*). Adalah tjerta<sup>2</sup> lama seperti diatas yang memudahkan kami menangkap maksud<sup>2</sup> baik dari tindakan<sup>2</sup> Bung Karno.

Sedjak dari brosur Bung Karno *Mentjapai Indonesia Merdeka*, melalui *Lahirnja Pantjasila*, *Konsepsi Presiden*, *Gagasan Demokrasi Terpimpin* dan sampai pada *Manifesto Politik R.I. tanggal 17 Agustus 1959*, nampak dengan djelas merentang didalamnja bagaikan benang merah tjita<sup>2</sup> Bung Karno untuk mempersatukan Rakjat Indonesia, untuk membebaskan Rakjat Indonesia dari semua imperialisme (*Tepuktangan lama*). Lima wasiat Bung Karno, jaitu *Mentjapai Indonesia Merdeka*, *Lahirnja Pantjasila*, *Konsepsi Presiden*, *Gagasan Demokrasi Terpimpin* dan *Manifesto Politik 17 Agustus 1959* merupakan mertjusuar<sup>2</sup> yang sangat membantu kami dalam menetapkan garis<sup>2</sup> politik dimasa dekat yang kita hadapi. Lima wasiat ini djelas menundjukkan kepada Rakjat Indonesia apa yang mendjadi musuh terpokoknja, jaitu imperialisme. (*Tepuktangan*).

Kongres Nasional Ke-VI PKI memang telah memutuskan bahwa musuh<sup>2</sup> pokok Rakjat Indonesia adalah imperialisme dan feodalisme, tetapi yang terpokok pada waktu sekarang ialah imperialisme. (*Tepuktangan*). Untuk mengalahkan musuh terpokok ini segala pertentangan yang terdapat dikalangan Rakjat Indonesia harus dapat diselesaikan setjara berunding. Saling tjuriga yang tidak menentu dikalangan Rakjat Indonesia harus dilenjapkan. Djadi, seluruh kekuatan Rakjat Indonesia harus dipersatukan dan harus terusmenerus dikonsolidasi. Tiap<sup>2</sup> usaha untuk mempertadjam pertentangan dikalangan Rakjat, artinja dikalangan mereka yang menentang imperialisme, harus dianggap bermain dengan kartu imperialis, karena ini melemahkan kekuatan Rakjat, melemahkan potensi nasional.

Dengan djelasnja musuh terpokok, maka dengan sendirinja mendjadi djelas pula tugas terpokok Revolusi Indonesia sekarang, jaitu melenjapkan imperialisme dari mukabumi Indonesia. (*Tepuktangan*). Tidak hanja melenjapkan imperialisme dari Irian Barat, tidak hanja melenjapkan imperialisme dilapangan politik, tetapi djuga dilapangan ekonomi, kebudajaan dan sosial. (*Tepuktangan*). Kami setudju dengan gagasan Bung Karno, jaitu sebelum sampai kemasjarakat adil dan makmur, kita harus lebih dulu melalui masa peralihan, jaitu „fase ekonomi nasional“ sebagai pengganti ekonomi kolonial yang sekarang masih bertyokol. Tugas menasionalkan ekonomi Indonesia sudah tentu tidak bisa dipisahkan daripada ke-

wadajiban mengachiri sifat tergantung daripada ekonomi Indonesia dari pasaran kapitalis, dengan djalan berangsur<sup>2</sup> mengindustrialisasi negeri dan setjara konsekwen melaksanakan politik bebas dan aktif dilapangan perdagangan luarnegeri Republik Indonesia. Sekarang perdagangan Republik Indonesia dengan negeri<sup>2</sup> sosialis berada dibawah 10%, sedangkan dengan negeri<sup>2</sup> kapitalis diatas 90%, padahal negeri<sup>2</sup> sosialis sekarang adalah produsen lebih daripada sepertiga produksi industri dunia. (Tepuktangan) Oleh karena itulah, Kongres Nasional Ke-VI PKI antara lain memutuskan, bahwa kita baru dapat berkata perdagangan luarnegeri, kita sesuai dengan politik luarnegeri yang bebas dan aktif djika perdagangan R.I. dengan negeri<sup>2</sup> sosialis sudah menjapai paling kurang 30% daripada seluruh perdagangan luarnegeri kita.

Para saudara dan kawan<sup>2</sup>!

Kongres Nasional Ke-VI PKI dilangsungkan dengan semboyan terpokok „Untuk Demokrasi Dan Kabinet Gotongrojong“. (Tepuktangan). Kenapa kami tekankan kepada dua hal ini, yaitu „Demokrasi“ dan „Kabinet Gotongrojong“? Kami berpendapat tidak ada djalan lain. Alternatif lain ialah diktatur militer atau diktatur perseorangan, dan perpetjahan nasional yang tidak habisnya. Soal demokrasi sekarang menjadi sangat menondjol, karena memang ada ketjenderungan di-negeri<sup>2</sup> yang baru merdeka di Asia dan Afrika untuk penjelewengan kediktatur militer. Sebabnya ialah, karena pihak yang berkuasa, berhubung dikatjau terusmenerus oleh imperialis, tidak bisa memecahkan masalah ekonomi yang paling mendesak, sedangkan tuntutan Rakjat untuk perbaikan nasib makin lama makin santar. Dalam keadaan demikian, satu-satunya djalan keluar bagi kaum penguasa yang pendek fikiran ialah diktatur militer. Saja katakan pendek fikiran, karena belum ada dan tidak akan ada diktatur militer atau diktatur perseorangan yang mampu memecahkan masalah<sup>2</sup> ekonomi negeri yang paling mendesak dan memenuhi tuntutan perbaikan nasib dari Rakjat. (Tepuktangan).

Saja berpendapat, bahwa ketjenderungan kearah diktatur militer seperti disementara negeri<sup>2</sup> Asia dan Afrika harus dengan sekuat tenaga kita hindari di Indonesia. Sjarat<sup>2</sup> untuk menghindari ini tjukup dinegeri kita. Pertama, gerakan demokratis dan revolusioner dinegeri kita sudah maju; kedua, Bung Karno sudah menunjukkan djalan demokratis yang harus ditempuh, yaitu djalan *Konsepsi Presiden, Gagasan Demokrasi Terpimpin dan Manifesto Politik 17 Agustus 1959*; dan ketiga, tokoh<sup>2</sup> penting militer Indonesia yang mempunyai rasa tanggungjawab besar tidak menginginkan diktatur militer. (Tepuktangan).

Saja berpendapat, bahwa djika kita di Indonesia berhasil me-

Jaksanakan Gagasan Demokrasi Terpimpin dengan Kabinet Gotongrojongnya sebagai syarat yang tidak boleh tidak untuk menyelesaikan fase sosial-ekonomi daripada revolusi Indonesia, maka sudah dapat dipastikan bahwa Gagasan Demokrasi Terpimpin dan sistem Kabinet Gotongrojong juga akan menjadi jalan keluar bagi banyak negeri di Asia dan Afrika yang baru merdeka. (*Tepuktangan lama*).

Diktatur militer atau diktatur perseorangan hanya akan menimbulkan bentrokan<sup>2</sup> sosial yang tajam dan yang banyak korban<sup>2</sup>. Adalah satu lamunan jika mengira bahwa dengan melemparkan demokrasi dan memungut diktatur militer, keadaan akan dapat diperbaiki. Satu<sup>2</sup>nya jalan yang menguntungkan bangsa Indonesia ialah, supaya demokrasi tetap dipertahankan dan yang dilemparkan ialah excess<sup>2</sup>nya yang berupa anarki dan liberalisme.

Sesuai dengan semangat yang terdapat dalam Kongres Nasional Ke-VI PKI, demi suksesnya gagasan Demokrasi Terpimpin saja ingin menampakan harapan kepada Bung Karno supaya kita semua hati<sup>2</sup> dan waspada terhadap penumpang<sup>2</sup> gelap (*tawa dan tepuktangan*) dalam kapal Demokrasi Terpimpin dan UUD '45. Jika penumpang<sup>2</sup> gelap ini berhasil memainkan peranannya, maka bukan hanya perkembangan maju menjadi terhenti, tetapi Gagasan Demokrasi Terpimpin dan UUD '45 pun tidak akan memenuhi amanat penderitaan Rakyat, sebaliknya akan menambah penderitaan Rakyat. Gejala<sup>2</sup> tentang kegiatan penumpang<sup>2</sup> gelap ini sungguh menguatirkan.

Para saudara dan kawan<sup>2</sup>!

Dengan keterangan singkat saya diatas, jelasilah bahwa segala desas-desus tentang Kongres Nasional Ke-VI PKI akan mengubah politik PKI dari menjokong menjadi menentang Kabinet Sukarno-Djuanda dan oleh karenanya ber-siap<sup>2</sup> untuk kudeta, adalah isapan djempol orang<sup>2</sup> djawatan rahasia imperialis yang goblok. (*tawa*), yang tidak mengenal PKI, tidak mengenal Presiden Sukarno dan tidak mengenal Rakyat Indonesia. (*Tepuktangan*). Yang mereka kenal hanya hasil bumi, hanya bau minyak, (*tawa*), hasil keringat dan darah Rakyat Indonesia. Biarkanlah mereka tetap dalam ke-goblokannya!

Duga desas-desus sebelum dan selama Kongres, bahwa PKI akan memperhebat seragannya pada tentara adalah impian orang<sup>2</sup> seberang lautan yang setjara tolol di-sebar<sup>2</sup>kan di Indonesia oleh tjetjunguk<sup>2</sup> dan tjoro<sup>2</sup>. (*Tawa dan tepuktangan*). Sebaliknya, PKI sudah lama melontarkan sembojan „Dwitunggal Tentara dan Rakyat“. (*Tepuktangan*). Orang<sup>2</sup> seberang laut, terutama djawatan<sup>2</sup> rahasia serta mesin<sup>2</sup> propaganda mereka sudah sedjak lama menjiar-

kan dongengan tentang adanya „duel antara PKI dan Tentara“, „duel antara Aidit dan Nasution“. (Tawa). Dengan ini mereka ingin menutupi duel yang sebenarnya harus diadakan, yaitu duel antara seluruh Rakyat Indonesia dengan kaum imperialis (Tepuktangan lama). Utjapan selamat Letnan Djenderal A.H. Nasution pada Kongres Nasional Ke-VI PKI yang dengan gemuruh disambut oleh semua peserta Kongres ketika pesan itu dibacakan adalah dijawabkan yang paling ditu pada desas-desus yang berbisu itu.

Djadi djelaslah apa yang diucapkan oleh kaum imperialis yaitu pertentangan antara Presiden Sukarno dan oknum dalam pimpinan tentara dengan massa Rakyat yang revolusioner. Mereka tahu benar, bahwa persatuan antara Presiden Sukarno tentara dan massa Rakyat yang revolusioner merupakan vonnis hukuman mati bag. mereka untuk selama-lamanya (Tepuktangan lama). Dijawab kita yang paling tepat ialah persatuan semua kekuatan yang akan menghukum mati kaum imperialis ditanah kita (Tepuktangan). Ini adalah juga semangat daripada Kongres Nasional Ke VI PKI. Memindjam perkataan Bung Karno „biarlah mereka geger“ (tawa) melihat kita bersatu dan mengkonsolidasi diri. Sekarang kegegeran mereka ditambah lagi dengan pendaratan roket kosmos Umi Sovjet di Bulan. (Tepuktangan lama) „Biarlah mereka geger“, asal kita Rakyat Indonesia dengan tenang dan rukun menjusun kekuatan kita untuk mengachiri samasekali kekuasaan asing disemua lapangan kehidupan negeri kita.

Kaum Komunis Indonesia, sesuai dengan semangat Kongres Nasional Ke-VI PKI, akan berlaku se-tulus<sup>2</sup>nja dalam bekerdjasama dengan semua klas, semua golongan dan semua orang yang demokratis dan patriotik. Kami bersedia untuk dikritik oleh siapapun djuga djika kami membuat kekeliruan dalam melaksanakan tugas yang paling urgen ini, tugas mempersatukan semua kekuatan Rakyat Indonesia.

Bertentangan dengan yang di-harap<sup>2</sup>kan kaum imperialis dan kakitangannya, Kongres Nasional Ke-VI PKI telah lebih mengeratkan hubungan PKI dengan klas<sup>2</sup>, golongan<sup>2</sup> dan orang<sup>2</sup> yang demokratis dan patriotik didalamnegeri. Djuga telah lebih mengeratkan hubungan antara PKI dan klas buruh Indonesia dengan gerakan Komunis dan gerakan klas buruh sedunia. Ini tentu akan membikin kaum imperialis lebih geger lagi. (Tepuktangan). Tetapi, „biarlah mereka geger“. Kawan monjet yang mengetahui, bahwa pohon yang ditempatinja sedang dibakar orang dari bawah tentu geger tak menentu dan me-lompat<sup>2</sup> kesana-kemari. (Tepuktangan). Tetapi achirnja ialah, bahwa monjet<sup>2</sup> yang geger itu mati dibakar

oleh api. (*tepuktangan*), dan geger<sup>2</sup> jang ramai<sup>2</sup> itu tidak ada gunanya samasekali.

Para saudara dan kawan<sup>2</sup>!

Biarlah mereka geger kita berdjalan terus. Langit pagi sudah memerah tanda hari, kemenangan Rakyat sudah hampir tiba (*Tepuktangan*). Sebaliknya bagi kaum reaksioner bagi monjet<sup>2</sup> tukang geger hari sudah magrib (*tawa*) dan sebentar lagi akan disusul oleh malam gelapgelita (*Tepuktangan lama*).

Hidup Rakyat Indonesia jang gagah perwira! (*Seruan* „Hidup, hidup!“ *Tepuktangan lama*).

Hidup Partai Komunis Indonesia, pengabdai tersetia kepentingan rakyat dan tanahair Indonesia! (*Seruan* „Hidup, hidup!“ *Tepuktangan lama*).

Hidup Bung Karno, pemimpin pemersatu Rakyat Indonesia! (*Seruan* „Hidup, hidup!“ *Tepuktangan lama*).



## Susunan Presidium Kongres Nasional ke-VI PKI

Adjitorop, Jusuf; Aidit, D.N.; Alimin, Angkatan '26. Anwar Sanusi, Amir; Djadi Wirosubroto pemimpin Gerakan Tani, Djoko Sudjono, Angkatan '35. Gunawan Hendra, pelukis, Jakap Djawa Barat; Jasin, Muslimin, Nusatenggara Tengah Kandel Kutub, Ko Jong Tiay, golongan keturunan asing Kusen Angkatan '26. Lukman, M.H.; Madjid Mr Abdul, Kepala Daerah Kotapradja Semarang; Martono, Kalimantan Timur Mangkudun Satu Angkatan '26. Muchlis, Aminuddin, Sulawesi Selatan Tenggara, Munasiah, Angkatan '26. Nirahua, M., Maluku. Njono pemimpin Gerakan Buruh, Njoto; Nursuhud, Sumatera Barat. Paso, Angkatan '26. Ramelan, Utomo, Kepala Daerah Kotapradja Surakarta. Rissi, Thobias Paulinus, Nusatenggara Timur. Rokaja Enoek Djawa Barat, Ruslan Kamaludin, Djawa Timur, Sakirman, Ir., Moh. Samikidin, Atjeh; Sardjono, Nj.; Satnio, Dr., Kepala Daerah Kotapradja Surabaya; Setjjo, Kalimantan Barat, Sjaitudin, Nj. Amir; Sjiradj, Dasuki, Angkatan '26; Sofjan, Sajid Achmad Kalimantan Selatan; Sudisman; Sukatno, pemimpin Pemuda Rakyat; Sumarni, Nj., Ketua DPRD Kabupaten Tjilatjap; Supit, Karel, Sulawesi Utara; Surasto, Nj. Setiati, pemimpin Gerakan Buruh; Suwardiningsih, Djawa Timur. Taib, Bar-mawi, Kalimantan Selatan, Tanggap Peleng, Messer, Kalimantan Tengah; Thajeb, Ir. Thaher, Atjeh; Torey, Jean, Irian Barat; Utarjo, S., Djakarta Raya. Widodo, Angkatan '35. Zaelani, M. Sumatera Selatan.



### Sekretariat Kongres

Ketua : Siswojo

Wakil Ketua : Supeno

### Komisi Mandat

Ketua : Peris Pardede

### Komisi Redaksi

Ketua : Anwar Kadir

Wakil Ketua : Tjugoito

### Komisi Pemilihan Badan<sup>2</sup>

#### Central PKI

Ketua : D.N. Aidit

### Komisi Resolusi

Ketua : Anwar Sanusi

Wakil Ketua : Nursuhud

### Komisi Pemberian Pandji<sup>2</sup>

Ketua : Sudjito

Wakil Ketua : Hendaja

Badan<sup>2</sup> Pimpinan Baru Hasil Pilihan Kongres  
Nasional ke-VI PKI

COMITE CENTRAL PKI -

Anggota<sup>2</sup> :

1. Achmad Sumadi
2. Adjitorop. Jusuf
3. Aidit, D.N.
4. Amar Hanafiah
5. Anwar Kadir
6. Anwar Sanusi. Amir
7. Dahlan Rivai
8. Djoko Sudjono
9. Imron. A.
10. Ismail Bakri
11. Lukman, M.H.
12. Muhammad Samikidin
13. Nasution, Djalaludin Jusuf
14. Njono
15. Njoto
16. Nungtjik, A.R.
17. Nursuhud
18. Pardede, Peris
19. Rewang
20. Ruslan Kamaludin
21. Sakirman, Ir.
22. Sidartojo
23. Siswojo
24. Sofjan, Sajid Achmad

25. Sudisman
26. Sudojo
27. Suharti. Nj.
28. Sundjono
29. Supit, Karel
30. Suwardiningsih
31. Tjoo Tik Tjun
32. Tjugito
33. Utarjo. S.
34. Wikana
35. Zaelani, M.

Tjalonanggota<sup>2</sup> :

1. Adenan Rachman
2. Alihamy, Abdullah
3. Baraqbah, Sajid Fachrul
4. Harahap, Banda
5. Jasin, Muslimin
6. Kandel, Ktut
7. Lesteluhu, Umar
8. Muchlis, Aminuddin
9. Rissi, Thobias Paulinus
10. Sukatno
11. Tanggap Peleng, Messer.

K e t u a            CC PKI : D.N. Aidit  
Wakil Ketua I CC PKI : M.H. Lukman  
Wakil Ketua II CC PKI : Njoto



## KOMISI KONTROL CENTRAL

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Dahono         | 5. Suhaemi Rachman    |
| 2. Mangkudun Sati |                       |
| 3. Pane, M.A.     | Ketua : Peris Pardede |
| 4. Pardede, Peris |                       |

\*  
\*\*

## KOMISI VERIFIKASI CENTRAL

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Busjari Latif          | 7. Sundari, Nj.             |
| 2. Djadi Wirosubroto      | 8. Supeno                   |
| 3. Kertapati, Sidik       | 9. Tambunan, Laurens Darman |
| 4. Ngadiman Hardjosubroto | 10. Tan Ling Dje            |
| 5. Singgih Tirtosubroto   | 11. Thajeb, Ir. Thaher      |
| 6. Sujono Pradigdo        |                             |

Ketua : Sujono Pradigdo  
Wakil Ketua : Tambunan, Laurens Darman

\*  
\*\*

## POLITBIRO CC PKI

Anggota<sup>2</sup> :

1. Aidit, D.N.
2. Lukman, M.H.
3. Njoto
4. Sakirman, Ir.
5. Sudisman

Tjalonanggota<sup>2</sup> :

1. Adjitorop, Jusuf
2. Njono

\*  
\*\*

## SEKRETARIAT CC PKI

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Adjitorop, Jusuf   | 5. Pardede, Peris |
| 2. Anwar Kadir        | 6. Siswojo        |
| 3. Anwar Sanusi, Amir | 7. Sudisman       |
| 4. Djoko Sudjono      | 8. Supit, Karel   |

Kepala Sekretariat CC PKI : Sudisman (Sekretaris)  
Wakil Kepala Sekretariat CC PKI : Jusuf Adjitorop (Sekretaris)

Pemenang<sup>2</sup> Pandji<sup>2</sup> Kongres Nasional ke-VI PKI berdasarkan hasil pelaksanaan Plan 3 Tahun Pertama Organisasi, Pendidikan, Gerakan Amal dan Kesenian

	<i>Organisasi.</i>	<i>Pendidikan.</i>	<i>A m a l.</i>	<i>Kesenian.</i>
Pemenang ke I	Kalmantan Selatan.	Djawa Barat.	Djawa Barat.	Djawa Tengah.
ke II	Djawa Tengah.	Djawa Timur.	Sumatera Utara.	Djawa Barat.
ke III	Djawa Barat.	Djawa Tengah.	Djawa Timur.	Djawa Timur.



## RESOLUSI TENTANG LAPORAN UMUM CC PKI KEPADA KONGRES NASIONAL KE-VI

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 7-14 September 1959 di Djakarta, setelah mendiskusikan Laporan Umum CC yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal CC, Kawan D.N. Aidit yang berjudul „UNTUK DEMOKRASI DAN KABINET COTONGROJONG“, berpendapat bahwa CC Partai pada pokoknya telah dapat melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V dan bahwa tugas-tugas baru dilapangan ideologi, politik dan organisasi yang dirumuskan dalam Laporan ini adalah tepat sepenuhnya, dan karenanya dengan suara bulat menyetujui Laporan Umum tersebut.

Sedjak Kongres Nasional ke-V banyak pengalaman yang kaya telah disimpulkan, dan apapun yang sudah terjadi, serta betapapun kesulitan yang pernah dihadapi Rakyat dan Partai, sekarang kita berada dalam situasi dalam dan luarnegeri, dan situasi intern Partai, yang jauh lebih baik, lebih maju dan lebih terkonsolidasi. Dapat dikatakan bahwa Partai selalu berada dalam kedudukan memegang inisiatif dalam kehidupan politik negeri, kepertajaan massa Rakyat akan kebenaran garis politik Partai semakin besar, kenyataan mana membikin makin beratnya kewajiban dan tanggungjawab Partai, karena persoalan-persoalan yang dihadapi Partai semakin luas dan pelik.

Kongres menyetujui kesimpulan bahwa tugas-tugas urgen kita belum berubah dari yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, yaitu, *pertama*, menggalang front persatuan nasional anti-imperialis yang berdasarkan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodal dibawah pimpinan kelas buruh; dan *kedua*, meneruskan pembangunan Partai yang tersebar diseluruh negeri dan mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi. Berdasarkan kedua tugas urgen kita itu, Kongres juga menyetujui empat sembojan pokok yang dikemukakan didalam Laporan, yaitu : „Dengan PKI didedan meneruskan perjuangan Rakyat untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis“, „Perbaiki pekerdjaan front nasional, pentjilkan lebih lanjut kekuatan kepala-batu“, „Perkuat front internasional anti-kolonial dan tjinta damai“ dan „Landjutkan pembangunan

*Partai diseluruh negeri jang bersatu erat dengan massa, jang terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi", jang selanjutnja akan mendjuwai semua kegiatan kita, terutama kegiatan<sup>2</sup> untuk demokrasi dan Kabinet Goto-grojong, sesudah Kongres Nasional ke-VI Partai, jang berarti bahwa kita menunaikan tugas<sup>2</sup> nasional dan internasional kita.*

## I

### 1. Imperialisme Belanda Musuh Pertama, Imperialisme Amerika Serikat Jang Paling Berbahaja

Kongres membenarkan kesimpulan, bahwa apa jang diinjatakan dalam program PKI, yaitu tentang tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional dan perubahan<sup>2</sup> demokratis di Indonesia jang belum lagi terlaksana, sampai sekarang masih tetap berlaku. Walaupun telah tertjapai hasil<sup>2</sup> dalam perdjjuangan melawan kolonialisme Belanda dan dalam pendemokrasian sistim pemerintahan, samasekali tidaklah berarti bahwa tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional dan perubahan<sup>2</sup> demokratis dinegeri kita telah rampung.

Dari kenyataan bahwa perdjjuangan Rakjat Indonesia untuk mengakhiri kekuasaan kaum imperialis Belanda masih belum selesai, bahwa tugas pembebasan nasional samasekali belum rampung, bahwa Indonesia masih belum merdeka penuh atau pada hakikatnja masih setengah-djadjahan, maka oleh karena itu imperialisme Belanda masih tetap merupakan musuh pertama Rakjat Indonesia.

Dari kenyataan masih bertjokolnja sisa<sup>2</sup> feodalisme di-desa<sup>2</sup>, maka djelaslah bahwa kita tidak mungkin berbitjara tentang sudah terlaksanajnja tugas<sup>2</sup> perubahan demokratis, dan bahwa oleh karena itu Indonesia masih tetap merupakan negeri setengah-feodal.

Selain daripada itu, kita samasekali belum dapat berb.tjara tentang selesainja tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional, karena imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda dan makin menempati kedudukan<sup>2</sup> penting di Indonesia dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan, sehingga dari kenyataan ini Laporan menarik kesimpulan bahwa imperialisme AS adalah musuh Rakjat Indonesia jang paling berbahaja berhubung imperialisme ini adalah jang paling agresif, paling mampu melaksanakan maksud<sup>2</sup> djahatnja, berhubung karena penanaman modalnja jang makin besar di Indonesia, berhubung masih agak banjakknja orang<sup>2</sup> Indonesia jang berkedudukan penting jang naif mengira imperialisme AS tidak begitu djahat. Politik anti-

imperialisme tanpa melawan infiltrasi dan intrik<sup>2</sup> AS adalah omongkosong.

Oleh karena itu Kongres membenarkan kesimpulan, bahwa kewajiban pembebasan nasional kita sekarang ialah membebasikan sisa<sup>2</sup> kolonialisme Belanda dan dengan teguh melawan kegiatan subversif AS dengan SEATO-nja, menentang bertambahnya penanaman modal AS dan imperialis lainnya serta memperlakukan perusahaan<sup>2</sup> AS sama dengan perusahaan Belanda, apabila AS terusmenerus mempersendjatai gerombolan<sup>2</sup> kontra revolusioner atau memberikan bantuan bersenjata kepada Belanda dalam melakukan agresinya terhadap Republik Indonesia. Dalam hubungan ini adalah sangat penting untuk meneruskan perjuangan meruntuh dibatalkannya Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing.

## **2. Indonesia Masih Tetap Dalam Tjengkeraman Krisis Ekonomi**

Indonesia masih tetap berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi yang terusmenerus sebagai akibat sifat ekonomi yang kolonial. Krisis ekonomi Amerika Serikat da am tahun 1957-1958 yang berakibat sangat luas pada dunia kapitalis lebih memperdalam lagi tjengkeraman krisis pada tubuh ekonomi Indonesia.

Mengenai sebab<sup>2</sup> pokok yang menyebabkan masih berlangsungnya keadaan ekonomi yang suram itu, Kongres membenarkan Laporan yang menjimpulkan sbb. :

*Pertama*, pembagian kerdja internasional setjara kapitalis, dimana Indonesia termasuk didalamnya, mengakibatkan (a) perbedaan yang semakin besar diantara negeri<sup>2</sup> industri dan negeri<sup>2</sup> terbelakang, dan (b) tetap terbelakangnya keadaan negeri<sup>2</sup> yang sudah terbelakang itu. Hal ini telah membikin Indonesia praktis tidak mempunyai potensi dan kemampuan untuk mengatur dan memperbesar produksinya dalam segala lapangan. Kedudukan bahan<sup>2</sup> ekspor kita yang makin tak terdjamin dipasaran dunia kapitalis, karena menghadapi saingan barang<sup>2</sup> sintetis, spekulasi dan manipulasi harga dari kaum monopolis besar, kegontjangan permintaan yang semakin sering dan hebat serta pasaran kapitalis yang semakin terbatas, telah membikin tidak mampunya Indonesia mengimpor barang<sup>2</sup> yang diperlukan, terutama barang<sup>2</sup> modal dan ini menyebabkan tidak adanya dasar samasekali bagi Indonesia untuk memperbesar produksi barang<sup>2</sup> yang didjual dalam pasaran kapitalis itu.

*Kedua*, sisa<sup>2</sup> feodalisme yang masih meradjalesa tidak memungkinkan pembebasan tenaga<sup>2</sup> produktif di-desa<sup>2</sup> dan tidak memungkinkan adanya kenaikan produksi bahan<sup>2</sup> makanan dan hasil<sup>2</sup> pertanian lainnya.

*Ketiga*, krisis ekonomi Indonesia djuga disebabkan oleh sangat lemahnja ekonomi sektor negara, jang seharusnya menempati „posisi komando“ dan jang seharusnya mendorong, memimpin serta memupuk perkembangan industri dalam negeri, khususnya perkembangan industri berat. Lemahnja ekonomi sektor negara djuga menyebabkan pemerintah tidak akan dapat mengatasi kesukaran<sup>2</sup> keuangan, berupa defisit jang terus menerus meningkat dalam anggaran belandja negara dan kenaikan uang jang dipinjam dari bank sentral.

*Singkatnja*, krisis ekonomi Indonesia jang bersifat kematjetan dalam produksi, kelemahan karena masih tergantung pada ekspor-impor jang terus menerus mengalami kegontjangan, semakin banyaknja uang beredar jang tidak produktif dan semakin meradja-lelanja inflasi dan kenaikan harga barang<sup>2</sup> pokok, adalah berpangkal pada sifat kolonial daripada ekonomi Indonesia, ekonomi jang masih sangat tergantung kepada pasaran kapitalis.

Kongres membenarkan Laporan jang mentjela tindakan mengadakan sistem BE, jang ternyata tidak dapat memperbaiki ekspor-impor kita jang semakin memerosotkan nilai rupiah dan jang mengakibatkan naiknya harga barang<sup>2</sup>. Walaupun sekarang BE sudah dihapuskan, tetapi ini tidak berarti bahwa orientasi perdagangan luar negeri dengan sendirinja akan berubah. Adanja tindakan dilapangan keuangan pada tanggal 24 Agustus tahun ini belum menundukkan tanda<sup>2</sup> akan turunnja harga barang, walaupun tindakan<sup>2</sup> ini, djka diikuti oleh tindakan<sup>2</sup> lain jang maju bisa menimbulkan kemungkinan<sup>2</sup> untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan negeri.

Pemerintah seharusnya melaksanakan politik harga rendah jang ditetapkan dan dikendalikan setjara konsekwen oleh pemerintah. Tjaranja jalah dengan mengharuskan pasar mengikuti harga rendah barang<sup>2</sup> pokok jang ditetapkan pemerintah, dengan membandjiri pasar dengan barang<sup>2</sup> pokok dan dengan langsung melaksanakan distribusi barang<sup>2</sup> pokok melalui koperasi<sup>2</sup> Rakjat pekerdja, RK<sup>2</sup> dan RT<sup>2</sup> serta warung<sup>2</sup>. Dalam hubungan ini, pemerintah seharusnya memberikan lebih banyak proteksi dan fasilitas tanpa diskriminasi kepada koperasi<sup>2</sup> jang didirikan oleh Rakjat pekerdja.

Mengenai perusahaan<sup>2</sup> Belanda jang diambilalih dan dinasionalisasi, setelah usaha<sup>2</sup> untuk mempartikelirkan perusahaan<sup>2</sup> tsb. pada pokoknja dapat digagalkan, Kongres membenarkan Laporan jang menekankan tentang pentingnja didjamin komposisi badan pelaksanaan nasionalisasi jang demokratis, dimana serikatburuh<sup>2</sup> diikutsertakan, untuk ketertiban perusahaan dan meningkatkan produksi dan lebih<sup>2</sup> untuk mentjegah penguasa<sup>2</sup> tertentu jang masih ingin

untuk mempartikelirkan perusahaan<sup>2</sup> itu atau mendjalankan kekuasaan direksi setjara bebas untuk mengadakan manipulasi<sup>2</sup> dan korupsi. Kongres memperkuat Laporan yang memperingatkan bahwa perusahaan<sup>2</sup> Belanda yang diambilalih dan kemudian dinas onalisasi itu, yang merupakan salahsatu hasil kongkrit dan penting dari Kabinet Djuanda, haruslah dijaga agar tidak dirusak oleh kaum egois anti-nasional, agen<sup>2</sup> modal asing, kaum pedagang spekulasi, tukang tjatut, koruptor, baik sivil maupun militer.

Karena Indonesia adalah negeri yang luas dengan ribuan pulau, maka dalam hubungan dengan memperbaiki ekonomi negeri, adalah sangat penting masalah komunikasi dan transpor yang meliputi transpor laut, pembangunan djalan raya dan transpor tungal, pengangkutan kereta-api dan pengangkutan bermotor serta pengangkutan udara. Adalah sepenuhnya benar kesimpulan yang menyatakan, bahwa kebaikan sesuatu pemerintah akan diukur antara lain dari seriusnja pemerintah itu memecahkan masalah komunikasi dan transpor, dan bahwa masalah kesatuan Indonesia juga banyak tergantung dari pemecahan masalah ini.

### 3. Memperluas Perdagangan Dengan Negeri<sup>2</sup> Sosialis

Untuk mengatasi kemacetan dalam pembangunan ekonomi di negeri kita, Kongres memperkuat kesimpulan bahwa kedudukan Indonesia yang tergantung kepada dunia kapitalis harus diakhiri dan bahwa Indonesia harus memperluas hubungan ekonomi dengan pasaran dunia Sosialis yang stabil dan yang tak mengenal krisis. Tetapi kenyataan sekarang, menundukkan bahwa, walaupun sudah ada kemajuan dalam perdagangan dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis, terutama dengan Uni Sovjet dan RRT, politik perdagangan luarnegeri Indonesia masih tetap berat ke Barat. Dalam kata<sup>2</sup> sudah banyak diujjapkan tentang mengubah orientasi perdagangan luarnegeri, tetapi dalam perbuatan orientasi perdagangan luarnegeri masih tetap berat ke AS, Inggris, Djerman Barat, Djepang dan negeri<sup>2</sup> imperialis lainnja. Karena negeri<sup>2</sup> Sosialis merupakan produsen lebih dari sepertiga produksi industri dunia, maka barulah dapat dikatakan tidak berarsebelah apabila volume perdagangan luarnegeri Indonesia dengan negeri<sup>2</sup> tersebut ditingkatkan menjadi se-kurang<sup>2</sup>nja sepertiga dari seluruh perdagangan luarnegeri Indonesia.

Sistim liberal dalam perdagangan luarnegeri yang membikin Indonesia tergantung kepada negeri<sup>2</sup> imperialis itu menjukarkan kita untuk bisa mengambil langkah<sup>2</sup> yang njata guna memperluas

perdagangan luarnegeri dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis. Padahal, negeri<sup>2</sup> Sosialis adalah bukan hanya pasar yang stabil, luas dan tak terbatas bagi barang<sup>2</sup> ekspor kita, tetapi juga merupakan sumber yang terpertaja untuk mendapatkan barang<sup>2</sup> modal dan barang<sup>2</sup> konsumsi yang kita butuhkan.

Dalam hubungan ini, Kongres membenarkan Laporan yang menilai sistem pembayaran dengan jalan „clearing” (clearing payment) yang diupayakan oleh Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang pertama sebagai usaha untuk menerobos ikatan sistem liberal tersebut yang membawa perbaikan dalam struktur dan nilai perdagangan luarnegeri kita. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa kalau Indonesia ingin mengatasi kemacetan dalam pembangunan ekonominya dan mendapat barang<sup>2</sup> yang sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaan ekonominya, maka jalan yang sebaik<sup>2</sup>nja ialah menghapuskan sistem yang liberal ini dan kembali kesistem pembayaran dengan jalan „clearing”, terutama dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis dan dengan negeri<sup>2</sup> Asia-Afrika dan juga dengan negeri<sup>2</sup> Amerika Latin. Politik impor kita harus disesuaikan dengan rentjana pembangunan yang kongkrit dan urgen sehingga barang<sup>2</sup> yang diimpor sungguh<sup>2</sup> berguna untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang. Dengan jalan ini orientasi yang masih sangat berat ke Barat dalam struktur perdagangan luarnegeri kita dapat dirombak.

Mengenai peraturan impor baru dari Pemerintah Djuanda, dapat dikatakan bahwa peraturan ini mempunyai segi<sup>2</sup> positif, karena menurut peraturan ini Pemerintah menguasai impor barang<sup>2</sup> penting sedjumlah 75% daripada nilai seluruh impor yang berupa devisa, yang disalurkan melalui „8 besar”, yaitu CTC, Usindo, PT Indesin, PT Indivitra, PT Juda Bhakti, PT Mira Sari, PT Satya Negara dan PT Triangle. Tetapi peraturan ini harus lebih disempurnakan lagi dengan tindakan<sup>2</sup> antara lain sbb. : perusahaan<sup>2</sup> „8 besar” agar tetap sepenuhnya milik negara, mendirikan Badan Impor dan Ekspor Negara yang tunggal dan mengatur status yang ber-matjam<sup>2</sup> dari semua perusahaan negara dalam Undang<sup>2</sup> Perusahaan Negara berdasarkan prinsip<sup>2</sup> yang demokratis dan anti-liberalisme.

Untuk menghentikan kemerosotan terusmenerus dilapangan ekonomi dan terutama untuk melepaskan Indonesia dari akibat buruk krisis dunia kapitalis, adalah penting untuk mengadakan tuntutan<sup>2</sup> sbb. :

*Pertama* : supaya produksi dalam negeri diperbesar, antara lain dengan jalan menasionalisasi perusahaan<sup>2</sup> Belanda yang diambil alih, termasuk bank Belanda di Indonesia ; saham<sup>2</sup> Belanda dalam BPM harus dioper ; perusahaan<sup>2</sup> KMT harus disita dan didjadi-

kan milik negara; perusahaan<sup>2</sup> negara harus menduduki „posisi komando“; politik memenuhi kebutuhan sendiri dalam perekonomian, terutama mengenai bahan makanan dan pakaian, harus direalisasi; di-perusahaan<sup>2</sup> negara harus dilaksanakan prinsip „pimpinan patriotik, tertinggi produksi, tjegah korupsi dan sabotase, djamin demokrasi dan perbaiki nasib buruh“, areal tanah-garapan harus diperluas, tjara mengerjakan tanah harus lebih diintensifkan dan tingkat hidup kaum tani harus diperbaiki.

*Kedua*: supaya ekspor-impor dan distribusi bahan<sup>2</sup> penting sepenuhnya ditangan Pemerintah: politik harga yang disesuaikan dengan daya beli Rakyat harus dilaksanakan, penyelundupan dan barter liar harus diberantas, ekonomi sektor negara harus ditamakan sebagai djaminan dapatnja Pemerintah mengendalikan seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi modal besar asing.

*Ketiga*: prinsip perdagangan luarnegeri harus diubah: orientasi perdagangan luarnegeri yang berat ke-negara<sup>2</sup> imperialis harus dirombak dengan meluaskan hubungan dagang dengan negara<sup>2</sup> A-A dan Sosialis, supaya didatangkan barang<sup>2</sup> modal dan bahan<sup>2</sup> baku untuk mendirikan dan mengembangkan industri dalam negeri; dan supaya produksi perusahaan<sup>2</sup> minjak asing diawasi dan distribusinja dikuasai oleh Pemerintah, djuga devisa yang dihasilkan oleh perusahaan<sup>2</sup> minjak asing itu supaya dikuasai Pemerintah.

*Keempat*: supaya Pemerintah berusaha memenuhi keperluan akan barang<sup>2</sup> modal dan teknik dari luarnegeri melalui pindjaman luarnegeri dengan bunga yang se-rendah<sup>2</sup>nya dan tanpa ikatan politik atau militer untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan industri negeri kita dan untuk mengeksploitasi pelikan yang banyak ragam dan djumlahnya yang terdapat didalam bumi negeri kita. Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing harus dibatalkan.

Selanjutnja Kongres membenarkan bahwa pelaksanaan tuntutan<sup>2</sup> ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dari usaha membasmi habis sisa<sup>2</sup> pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“ dan DI-TII serta komplotan<sup>2</sup> pengatjau ekonomi dari kaum modal besar asing yang bersekongkol dengan komprador dan elemen<sup>2</sup> parasiter, baik sivil maupun militer, didalam badan<sup>2</sup> ekonomi dan aparat<sup>2</sup> Pemerintah. Djuga tuntutan<sup>2</sup> ini tidak bisa dipisahkan dari tuntutan pembentukan Kabinet Gotongrojong dibawah pimpinan Presiden Sukarno, dimana diwakili setjara adil partai<sup>2</sup> dan golongan<sup>2</sup> kerja yang mempunyai ke-sungguh<sup>2</sup>an untuk melaksanakan tjita<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 yang bersifat nasional dan demokratis.

#### 4. Pengangguran, Kemiskinan, Ketidakadilan Ekonomi Dan Sosial

Kongres membenarkan konstataasi bahwa, sebagai akibat krisis ekonomi yang makin mendalam, pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial adalah tak terhindarkan.

*Kaum buruh* diha'apkan kepada kesulitan<sup>2</sup> pokok antara lain sbh : kemerosotan terusmenerus daripada tingkat hidup kaum buruh, pegawai dan Rakyat pekerdja pada umumnya : terus membungnja harga barang<sup>2</sup> kebutuhan yang pokok dengan tjepat ; bertambah besarnja antjaman pemetjatan dan meluasnja pengangguran ; dan bertambah sempitnja kesempatan kerdja karena tidak berkembangnja industri sektor negara dan partikelir nasional. Oleh karena itu kewadjiaban Partai dan serikatburuh<sup>2</sup> ialah dengan gigih melawan pemetjatan, mentjegah kenaikan harga, berdjuaug untuk kenaikan upah, kenaikan pangkat dan perbaikan sosial ekonomi kaum buruh dan pegawai.

*Kaum tani* meng'alami penindasan dari pihak tuantarah dan lintahdarat berhubung masih bertjokolnja sisa<sup>2</sup> feodalisme, gangguan gerombolan DI-TII dan sisa<sup>2</sup> bandit „PRRI-Permesta“, dan seribusuatu matjam kesulitan lainnja dilapangan penghidupan dan pertanian. Walaupun ada beberapa usaha Pemerintah untuk memperbaiki keadaan didesa dan kedudukan kaum tani, tetapi kenja-taannja nasib kaum tani belum mengalami perubahan fundamentil, bahkan mendjadi lebih buruk. Oleh karena itu, disamping Partai harus lebih tekun lagi membangkitkan kaum tani untuk tuntutan<sup>2</sup> bagiaannja, sekedjappun tidak boleh dilupakan bahwa tudjuan terpenting dari gerakan tani ialah menghapuskan samasekali sisa<sup>2</sup> feodalisme.

*Kaum miskin kota* yang terdiri dari bakul, tukang loak, tukang betjak yang memiliki betjak sendiri, tukang warung ketjil, tukang sol sepatu, tukang pateri, tukang potong rambut dll. dan yang djumlahnja tidak sedikit itu pada umumnya djuga mengalami nasib yang sengsara. Diantara mereka banjak yang masih muda<sup>2</sup> dan djumlah mereka makin lama makin besar berhubung adanja urbanisasi. Kaum miskin kota, sebagaimana halnja dengan burdjuasi ketjil pada umumnya, termasuk tenaga penggerak revolusi. Dalam keadaan penghidupan yang terlalu sukar, sebagian dari mereka dapat dipergunakan oleh madjikan<sup>2</sup> sebagai pematah pemogokan atau bisa sampai tertarik kepada fikiran<sup>2</sup> yang extrim atau liar. Mereka djuga mudah merosot mendjadi orang gelandangan. Oleh karena itu, Partai harus bekerdja lebih baik dikalangan kaum miskin kota dan mengorganisasi mereka untuk perbaikan peng-

hidupannya.

Ber-djuta<sup>2</sup> kaum nelayan yang mempunyai peranan penting dalam memproduksi bahan makanan yang berupa ikan, kadang<sup>2</sup> juga dalam melindungi keamanan dan menjelamatkan negeri serta dalam melanjutkan pengangkutan laut dan sungai, pada umumnya hidup dalam keadaan sengsara dan terbelakang. Sebagian dari mereka hidup sebagai buruh nelayan yang dihisap oleh djuragan<sup>2</sup> sero dan djuragan<sup>2</sup> perahu besar, tingkat kebudayaan mereka pada umumnya masih rendah, alat<sup>2</sup> kerjanya kuno, sedangkan hubungan kerjanya masih bersifat feodal. Oleh karena itu semakin urgentlah pekerjaan Partai dikalangan nelayan untuk mengorganisasi dan membangkitkannya dalam aksi<sup>2</sup> untuk perbaikan nasib, untuk kebebasan<sup>2</sup> demokratis dan untuk perbaikan alat<sup>2</sup> kerja.

Inteligensia, termasuk para pekerja ilmu dan kebudayaan masih tetap mengalami kesukaran<sup>2</sup> berupa kurangnya alat<sup>2</sup> kurangnya biaya, sukarnya sjarat<sup>2</sup> kerja dan tingginya pajak. Partai harus dengan sepenuh-hati bersatu dengan mereka dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan<sup>2</sup>nya dan mengembangkan bakat<sup>2</sup>nya.

Keadaan penghidupan yang buruk daripada kaum buruh kaum tani, kaum miskin kota, nelayan dan inteligensia kita itu menunjukkan penderitaan sebagian besar Rakyat Indonesia yang semakin berat, yang menjadi korban daripada krisis ekonomi sekarang, korban daripada politik Pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Rakyat.

### 5. Memperbaiki Pekerjaan Front Nasional Dan Mementijikan Lebih Landjut Kekuatan Kepalabatu

Mengenai masalah front nasional, Kongres membenarkan analisa bahwa setjara politik dalam tahun<sup>2</sup> belakangan ini Indonesia bergeser kekiri. Demikian juga membenarkan analisa Sidang Pleno ke-IV CC yang menjumpulkan adanya tiga matjam kekuatan politik yang hampir seimbang, yaitu kekuatan kapalabatu, kekuatan progresif dan kekuatan tengah, yang masing<sup>2</sup> mempunyai konsep sendiri<sup>2</sup> tentang penyelesaian Revolusi Agustus 1945. Diantara tiga kekuatan ini terdapat kontradiksi<sup>2</sup>. Ada kontradiksi pokok dan ada kontradiksi yang tidak pokok. Kontradiksi antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah adalah kontradiksi yang tidak pokok, kontradiksi dikalangan Rakyat. Sedangkan kontradiksi antara Rakyat dengan kekuatan kapalabatu adalah kontradiksi yang pokok, karena kaum kapalabatu mewakili kepentingan kaum imperialis yang memusuhi Rakyat Indonesia.

Dewasa ini keadaan dari tiga kekuatan itu adalah sebagai berikut :

*Kekuatan kepalabatu*, karena politik mereka yang terlalu reaksioner sangat anti-nasional dan anti-Rakjat, „prestise” mereka sudah sangat merosot mereka sudah tak mungkin lagi menguasai pemerintahan sentral lewat djalan parlementer, sedang kekuatan mereka sekarang pada pokoknja terletak pada bantuan kaum imperialis, terutama kaum imperialis AS. Walaupun demikian kekuatan kepalabatu tidak boleh diremehkan karena negeri kita yang masih setengah-djadjahan dan setengah-feodal, yang berarti masih adanya kekuasaan kaum imperialis dan kekuasaan klas tuantanah, merupakan sumber bagi kehidupan kekuatan kepalabatu. Oleh karena itu kekuatan kepalabatu masih tetap merupakan kekuatan yang harus tidak henti-hentinya ditelandjangi dan dilawan dengan segenap tenaga.

Mengenai *kekuatan tengah*, berhubung watak mereka yang bimbang, Partai telah menjumpulkan, bahwa dengan kekuatan progresif yang besar ditambah dengan adanya program yang menguntungkan golongan<sup>2</sup> dalam kekuatan tengah, dengan langgam-kerja Partai yang baik, dan dengan kemampuan kekuatan progresif memberikan pukulan<sup>2</sup> yang berat dan djitu kepada kaum kepalabatu, ada kemungkinan bahwa kekuatan tengah untuk waktu yang lama bersikap setia pada perdjuaan anti-imperialis dan anti-feodal. Djuga telah disimpulkan bahwa djika mereka tidak lagi setia mendjalankan politik anti-imperialisme, mereka bisa ber-sama<sup>2</sup> dengan kekuatan kepalabatu mengadakan pukulan<sup>2</sup> terhadap kekuatan progresif sehingga untuk sementara waktu dapat menghalangi perkembangan gerakan demokratis.

Sebagai akibat dari kedudukan ekonomis yang lemah daripada burdjuasi nasional, yang pada umumnja adalah burdjuasi dagang, kita melihat adanya dua tjiri. *Pertama*, keadaan ini menjebabkan watak yang sangat bimbang dan sangat tidak konsekwen daripada burdjuasi nasional Indonesia, yang telah menjadikan negeri kita tanah yang subur untuk tumbuhnja komprador<sup>2</sup> dan kapitalis<sup>2</sup> birokrat. *Kedua*, keadaan ini tidak memberikan dasar materiil yang kuat untuk adanya pertentangan yang tadjam antara burdjuasi nasional dengan klas buruh pada umumnja, halmana sampai batas<sup>2</sup> tertentu membantu penggalangan front nasional. Burdjuasi nasional Indonesia adalah faktor politik yang penting, karena mereka mempunyai pengaruh politik yang berarti dikalangan kaum intelektual dan alat<sup>2</sup> negara.

Politik soviniis dari golongan<sup>2</sup> tertentu dari burdjuasi nasional yang mempertadjam pertentangan<sup>2</sup> antara kapitalis<sup>2</sup> Indonesia,

jaitu antara „asli“ dan jang „tidak asli“ dan sikap mereka jang ragu<sup>2</sup> dalam mengambilalih perusahaan<sup>2</sup> Belanda pada hakekatnja djuga bersumber pada watak mereka jang bimbang dan ketidakberanian mereka dalam melawan ekonomi imperialis. Tetapi setelah pengambilalihan jang dipelopori oleh kaum buruh menjadi suatu kenyataan, kekuatan tengah jang berwatak egois itu berusaha untuk memindahkan perusahaan<sup>2</sup> itu ketangan perseorangan mereka. Disinilah bertemunya kepentingan kaum tengah dengan kepentingan kaum reaksioner jang bisa merupakan landasan politik reaksioner mereka bersama. Inilah latarbelakang persetuduan<sup>2</sup> „tukang kelontong“ antara burdjuasi kepalabatu dengan elemen<sup>2</sup> nasionalis kanan dengan sembojan untuk „membendung Komunisme“.

Dalam kekuatan tengah terdapat sajak kanan, golongan sentris dan sajak kiri.

Dengan dorongan kaum imperialis sajak kanan dalam kekuatan tengah berusaha menarik seluruh kekuatan tengah meninggalkan politik kerdjasama dengan kekuatan progresif. Latarbelakang daripada sikap ini ialah bahwa berhubung jatuhnya „prestise“ kaum kepalabatu, imperialisme AS untuk sementara tidak dapat lagi mendjalankan politiknya di Indonesia setjara efektif lewat saluran kaum kepalabatu jang dikepalai oleh partai<sup>2</sup> Majumi-PSI, dan oleh karena itu sangat membutuhkan komprador<sup>2</sup> baru dari kalangan kaum tengah, baik sivil maupun militer, sambil berusaha menegakkan kembali kedudukan kaum kepalabatu.

*Golongan sentris* dalam kekuatan tengah biasanja bukanlah golongan jang kuat tetapi jang mampu „mengawinkan“ sajak kiri dan kanan, dan mempunyai ketjenderungan untuk memihak jang kuat dalam kekuatan tengah. Oleh karena itu kemenangan sajak kiri dalam kekuatan tengah akan merupakan besi-berani jang bisa menarik golongan sentris kekiri, dan dengan demikian dapat mentjegah kekuatan tengah bergeser kekanan.

*Sajak kiri* dalam kekuatan tengah menentang politik melatjurkan diri kepada imperialisme dan kaum reaksioner dalam negeri. Politik sajak kiri dalam kekuatan tengah sampai batas<sup>2</sup> tertentu mentjerminkan perasaan<sup>2</sup> dan harapan<sup>2</sup> massa pengikut kekuatan tengah, jang sebagian besar terdiri dari massa burdjuis ketjil. Dalam hubungan penjelesaian Revolusi Agustus 1945, sajak kiri ini pada waktu sekarang sudah tidak pertjaja lagi kepada pimpinan lapisan atas dari burdjuasi nasional. Walaupun mereka belum menerima dan mengakui pimpinan proletariat, tetapi mereka sudah mulai menjedari bahwa klas buruh memainkan peranan jang penting dalam gerakan kemerdekaan nasional dan dalam memim-

pin penyelesaian Revolusi Agustus 1945. Karena itu supaya mereka lambatkan dapat menerima dan mengakui pimpinan proletariat, proletariat harus memperkuat diri lagi dan harus menunjukkan kemampuannya yang lebih besar dalam membela kepentingan seluruh Rakyat.

Menjelaskan tokoh<sup>2</sup> kekuatan tengah yang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner, Partai menetapkan sikap yang tidak menamarkan. Terhadap mereka yang sedjak semula memang sudah reaksioner tetapi sebelum pemberontakan terdjadi berdjubah kaum tengah sikap kita sama seperti sikap terhadap kaum kepala-batu. Terhadap mereka yang tersesat tetapi sesudah „PRRI-Permesta“ dikalahkan menjatakan setia lagi kepada Republik Indonesia sikap kita bukanlah seperti terhadap kaum kepala-batu. Kita harus menarik mereka kembali kedalam front persatuan nasional, karena tugas Partai bukanlah menghanturkan burdjuaasi nasional, tetapi menghanturkan kaum kontra-revolusioner.

Walaupun ada kesukaran<sup>2</sup> tertentu dalam menggaling front persatuan nasional, tetapi dari kenyataan adanya sikap dan tindakan bersama antara kekuatan progresif dengan gerakan nasionalis revolusioner yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dalam melawan imperialisme dan dalam melemahkan kekuatan kepala-batu harus ditarik kesimpulan bahwa front persatuan nasional dinegeri kita bertambah kuat.

Untuk memperkuat front persatuan nasional lebih lanjut, maka tugas kita yang penting ialah : *terus mengembangkan kekuatan progresif dengan mengutamakan kekuatan massa buruh dan tani dan memenangkan sajak kiri dalam kekuatan tengah*. Politik kita mengenai seluruh kekuatan tengah ialah : *mendorong yang sudah maju, menarik yang bimbang dan membangkitkan yang masih terbelakang*.

Mengenai *kekuatan progresif* dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari kenyataan besarnya rol proletariat dalam pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> Belanda dan dalam membasmi kaum pemberontak kontra-revolusioner dan dari kenyataan besarnya kepertajaan Rakyat kepada PKI, proletariat Indonesia sudah semakin dapat menempatkan dirinya dan sudah mulai mendapat pengakuan sebagai pelopor dalam perdjjuangan nasional dan dalam perdjjuangan Rakyat Indonesia menjelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945.

Dalam mengembangkan dirinya, kekuatan progresif selalu akan menemui kesulitan<sup>2</sup>. Sajak kiri dari kekuatan tengah bermaksud, disamping memukul kekuatan kepala-batu, menggunakan dan membatasi kekuatan progresif. Sajak kanan dari kekuatan tengah berusaha menghambat perkembangan dari kekuatan progresif dengan

politiknja „pukul kanan dan pukul kiri“, tetapi lebih banyak memukul kekiri daripada memukul kekanan. Untuk politik kanannya sampai batas<sup>2</sup> tertentu mereka bersedia berkompromi dengan kekuatan kepalabatu. Kaum kepalabatu dengan dorongan terus-menerus dari kaum imperialis berdjuaang mati-mati untuk membasmi gerakan Komunis. Djuga kaum trotskis tidak mau ketinggalan dalam usaha „memburu Komunis“ ini.

Berhubung dengan itu kaum Komunis harus senantiasa mempertinggi kewaspadaannya dan tidak djemu<sup>2</sup>nja terus mengeratkan dan meluaskan hubungannya dengan seluruh lapisan Rakyat serta mengatasi kekurangan<sup>2</sup>nja. Dewasa ini dikalangan kader<sup>2</sup> Partai masih terdapat kekaburan<sup>2</sup> pandangan tentang kontradiksi tidak pokok dan pokok didalam masyarakat Indonesia sekarang, dan kurangnya pengertian bahwa pada suatu keadaan kontradiksi jang antagonis bisa menjadi tidak antagonis, sedangkan jang tidak antagonis menjadi antagonis, sehingga kita kurang mampu tepat pada waktunya menggunakan tiap<sup>2</sup> keadaan untuk memperkuat front nasional.

Mengenai imbangan diantara tiga kekuatan itu pada waktu sekarang dapat disimpulkan bahwa „kekuatan kepalabatu sudah djauh merosot, dan bersamaan dengan itu kekuatan progresif sudah semakin besar, sedang kekuatan tengah pada pokoknja tetap“. Garis politik Partai menghadapi tiga kekuatan ini adalah tetap, iaitu mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan mementjulkan kekuatan kepalabatu. Ini berarti melaksanakan sembojan : Perbaiki pekerjaan front nasional, pentjulkan lebih landjat kekuatan kepalabatu.

## 6. PKI Mempertahankan Republik Proklamasi

Kongres membenarkan seluruh kebidjaksanaan Partai dalam Dewan Konstituante dan sikap Partai jang mendukung pendekritan UUD 1945 oleh Presiden Sukarno. Dengan adanya pendekritan tsb. telah ditutup kemungkinan bagi elemen<sup>2</sup> reaksioner untuk menimbulkan perpetjahan<sup>2</sup> nasional jang lebih djauh setelah Konstituante tidak dapat mensahkan UUD 45. Djuga telah dapat ditjegah kompromi<sup>2</sup> jang memalukan dan merugikan Rakyat antara kekuatan tengah jang pro UUD 45 dengan mereka jang kontra UUD 45.

## 7. Sikap PKI Terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda

Tentang pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau pembentukan Kabinet Gotongrojong, Kongres membenarkan kesim-

pulan bahwa dapat atau tidaknya pemerintah ini dibentuk tergantung pada pekerjaan Partai menggalang front persatuan, pengembangan kekuatan progresif dan pada kemampuan Partai melakukan pukulan<sup>2</sup> yang djitu terhadap kekuatan kepalabatu. Tentang duduknya orang<sup>2</sup> Komunis didalam kabinet tergantung pada imbahyan kekuatan yang riil. PKI harus mempersoalkan duduknya dalam kabinet, karena PKI bertujuan memperkuat persatuan nasional dan PKI selamanya merasa bertanggungjawab mengenai keadaan Rakjat dan bangsa Indonesia. Dalam hal tidak duduk dalam kabinet, sikap Partai adalah sbb : *Pertama*, PKI bisa menjokong djika programnya maju, komposisi menteri<sup>2</sup>nja tjukup baik untuk melaksanakan programnya yang maju itu, *kedua*, jalah berposisi, djika programnya reaksioner atau sangat tidak memenuhi tuntutan<sup>2</sup> politik dan ekonomi yang paling minimum dari-pada Rakjat.

Dalam menggalang front persatuan nasional, dalam mengembangkan kekuatan progresif dan mementjulkan kekuatan kepalabatu, dan dalam usaha membentuk kabinet yang maju, masalah Angkatan Perang tidak boleh dianggap ketjil Masjumi-PSI dan kaum militeris yang memihak mereka ber-kali<sup>2</sup> mentjoba mengadakan kudeta, tetapi senantiasa gagal. Kegagalan ini disebabkan antara lain oleh tiga faktor penting : *Pertama*, Presiden Sukarno yang menjatukan diri dengan Rakjat mempunyai pengaruh yang kuat dikalangan angkatan bersendjata, dan Presiden Sukarno menolak mendjadi diktator militeris; *kedua*, APRI adalah anak kandung Revolusi Rakjat, karena itu mayoritas daripada para perrwira, bintanga dan tamtama APRI tidak mudah dipaksa untuk mendjalankan perintah yang ditudjukan untuk melikwidasi Republik Proklamasi dengan djalan membentuk diktatur militer atau diktatur perseorangan; *ketiga*, Rakjat Indonesia tidak hanya mentjintai demokrasi, tetapi dibawah pimpinan Partai yang waspada Rakjat aktif membela demokrasi itu.

Bagi perkembangan maju Indonesia, PKI akan terus berdjjuang melawan bahaya diktatur militer atau diktatur perseorangan dan bersamaan dengan itu mempertahankan dan meluaskan demokrasi. Tetapi, seandainya diktatur militer atau diktatur perseorangan tidak tertjegah, djadi toch terdjadi djuga, maka kewadajiban tiap Komunis jalah melawannya dengan sekuat tenaga.

Djuga dalam menganalisa kemungkinan<sup>2</sup> perkembangan Kabinet Sukarno-Djuanda sebagai kelanjutan dari Kabinet Djuanda jl., keadaan khusus yang harus mendapat perhatian jalah masih tetap berlakunya kekuasaan militer. Kekuasaan militer telah memperlihatkan segi<sup>2</sup> positif, terutama di-daerah<sup>2</sup> bergolak. Tetapi djuga

ada segi<sup>2</sup> negatifnya. Jang terpenting diantaranya ialah pengekan-an hak<sup>2</sup> demokrasi bagi Rakjat dan tjampur tangan sementara perwira jang masih aktif dalam perekonomian, keuangan dan politik pemerintahan jang bukan bidangnya.

Pada waktu<sup>2</sup> jang diperlukan, PKI dan Rakjat bisa memberikan kekuasaan sampai batas<sup>2</sup> tertentu kepada Angkatan Perang jang patriotik, selama kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Kita harus menjegah timbulnya kontradiksi jang tidak perlu atau jang tajam antara Rakjat dan Angkatan Perang, dan hal<sup>2</sup> jang mungkin menudju kearah pertadjaman harus dihindari. Pelaksanaan garis „Dwitunggal Rakjat dan Tentara“, jaitu garis „Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat“ atau „Salang-bantu Rakjat dan Tentara“ adalah djaman dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan nasional Indonesia.

Walaupun sesudah kembali ke UUD 45 belum terbentuk Kabinet Gotongrojong, Kongres menganggap tepat sikap realis daripada Partai jang menjokong Kabinet Sukarno-Djuanda serta jang sudah dan akan membantu dengan sekuat tenaga pelaksanaan programnya dan pelaksanaan pokok<sup>2</sup> fikiran jang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Sukarno jang diujapkan pada tanggal 17 Agustus 1959, selama kabinet ini tidak meng-halang<sup>2</sup> perkembangan gerakan kemerdekaan dan demokratis. Sokongan PKI terhadap kabinet ini adalah sokongan jang ichlas dan kritis berpedoman pada prinsip : menjokong politiknja jang maju tanpa reserve, mengkritik politiknja jang ragu<sup>2</sup> supaja mendjadi maju, dan menentang menteri<sup>2</sup> jang politiknja merugikan Rakjat.

Tetapi Rakjat Indonesia tidak akan berhenti diidjalan dan tidak akan melepaskan tuntutan politiknja jang praktis, jaitu pembentukan Kabinet Gotongrojong. Dalam hubungan ini Rakjat Indonesia tidak akan melupakan utjapan Presiden Sukarno jang mengatakan bahwa Rakjat Indonesia berhak menagih pelaksanaan program dan bahwa se-waktu<sup>2</sup> menteri<sup>2</sup> bisa diganti oleh Presiden. Dibentuknja DPAS dan Depernas jang komposisinya mendekati semangat gotongrojong telah lebih mendorong Rakjat Indonesia untuk meneruskan tuntutan pembentukan Kabinet Gotongrojong.

## 8. Memperkuat Dan Memperluas Demokrasi

Dalam menganalisa perkembangan demokrasi di Indonesia, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa sistim demokrasi liberal telah mendjadi bangkrut dimata Rakjat Indonesia. Tjepatnja kebangkrutan ini disebabkan oleh dua proses. *Pertama*, proses kesadaran Rakjat Indonesia sendiri, jang berdasarkan pengalaman-

nja sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi, birokrasi dan ketidakmampuan dalam memetjahkan persoalan<sup>2</sup> pokok dan penting dari Rakjat Indonesia. *Kedua*, karena agitasi anti Parlemen, jang pada hakekatnja anti kehidupan demokratis oleh promotor<sup>2</sup> junta-militer dan elemen<sup>2</sup> fasis lainnja.

Kebangkrotan sistim demokrasi liberal dimata Rakjat Indonesia terdjadi dalam keadaan dimana imbangan<sup>2</sup> kekuatan dalam negeri belum memungkinkan diatasinja krisis sistim politik ini dengan mentjiptakan kekuasaan Rakjat.

Tetapi, walaupun demikian Rakjat Indonesia tidak mengizinkan krisis demokrasi liberal „diatasi“ dengan kemenangan „PRRI-Permesta“, kemenangan diktatur militer atau diktatur perseorangan, atau dengan terbentuknja kabinet reaksioner. Dalam keadaan sekarang pelaksanaan Konsepsi Presiden dan Demokrasi Terpimpin adalah djalan jang se-tepat<sup>2</sup>nja, supaja krisis demokrasi liberal berachir dengan kemenangan difihak Rakjat.

PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa jang diterimanja adalah demokrasi, meskipun belum Demokrasi Rakjat, tetapi demokrasi jang anti diktatur militer dan diktatur perseorangan. Anti-liberalisme dilapangan politik tidak bisa diartikan lain ketjuah pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%, jaitu pembentukan Kabinet Gotongroyong. Anti-liberalisme dilapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain ketjuah mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai sjarat untuk dapat memimpin seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi kapital besar asing.

Kongres menjetudjui bahwa untuk mengalahkan bahaya fasisme jang masih tetap mengantjam adalah kewadajiban seluruh Rakjat Indonesia untuk memperdjungkan agar pemerintah melaksanakan programnja dengan sungguh<sup>2</sup> serta memperkuat dan memperluas kehidupan demokratis disegala lapangan, antara lain dengan mendjamin kebebasan<sup>2</sup> demokratis jang se-luas<sup>2</sup>nja bagi Rakjat dan organisasi<sup>2</sup> Rakjat dan mendjamin semua hak dan kebebasan kaum buruh untuk membela kepentingan<sup>2</sup>nja jang sah.

## II

Dalam menganalisa politik luar negeri Republik Indonesia, Kongres membenarkan Laporan jang menjimpulkan bahwa *politik luar negeri Indonesia harus diabdikan untuk kemenangan Revolusi Agustus sampai ke-akar<sup>2</sup>nja*, dan bersamaan dengan itu ia djuga harus mengabdikan perdamaian dan kerukunan internasional antara bangsa<sup>2</sup>, mengabdikan perdjuangan anti-imperialisme pada umumnja.

Dua tugas politik luar negeri ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam hubungan ini politik luar negeri Indonesia harus dibentuk dan disusun ber-sama<sup>2</sup> dengan Rakyat dan berdasarkan kekuatan dan kepentingan Rakyat Indonesia dan Rakyat<sup>2</sup> sedunia.

Atas dasar ini, Kongres menjetudjui kesimpulan bahwa politik luar negeri yang wajar dan objektif ialah politik luar negeri yang mampu menghadapi musuh internasional Rakyat Indonesia yang paling berbahaya, yaitu imperialisme AS, yang mampu mentjegah dan mengalahkan intervensi dan agresi imperialis, yang mampu menghadapi segala musuh politik reaksioner dan segala komplotan kontra-revolusioner yang bersumber pada politik subversif imperialis terhadap Indonesia, dan bersamaan dengan itu ia juga harus mampu membantu tertjapainya pelaksanaan pembangunan ekonomi dan perbaikan hidup seperti yang di-tjita<sup>2</sup>kan oleh Rakyat Indonesia. Pendeknja, ia harus benar<sup>2</sup> sesuai dan mentjerminkan segala yang maju daripada keadaan dalam negeri Indonesia.

### 1. Inti Pokok Zaman Kita Jalah Peralihan Dari Kapitalisme ke Sosialisme

Kongres sepenuhnya menjetudjui Laporan Umum yang menunjukkan bahwa inti pokok dari zaman kita sekarang ialah peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme yang telah dimulai dengan Revolusi Sosialis Oktober Besar Rusia, dan bahwa didunia sekarang sedang berlangsung dua proses sosial yang berlawanan satu sama lain dan yang perkembangannya makin tjepat menudju arahnya masing<sup>2</sup>. Disatu pihak dunia imperialis dengan proses sosialnya menudju kehantjurannya sendiri dan difihak lain dunia Sosialis dengan proses sosialnya menudju kearah peluasan dan kemadjuan terusmenerus. Satu dengan proses sosial yang kedua ini adalah perkembangan gerakan kemerdekaan nasional yang sekarang sudah banjak melahirkan negeri<sup>2</sup> yang baru merdeka dan dengan se-djelas<sup>2</sup>nja menunjukkan makin rontoknja sistim kolonial imperialis. Kongres dengan gembira menjambut konstataasi bahwa sebagai akibat landjutnja dua proses ini banjak perubahan<sup>2</sup> intensif dan kemadjuan<sup>2</sup> telah terdjadi dalam kehidupan bangsa<sup>2</sup> dan dalam kehidupan politik internasional selama periode antara Kongres Nasional ke-V sampai kini.

Dari kenyataan bahwa golongan<sup>2</sup> yang berkuasa di AS berusaha keras untuk menghimpun disekitar mereka semua kekuatan reaksioner dari dunia kapitalis dan dari kenyataan sifat<sup>2</sup>nja yang agresif, intervensionis dan penindas, Kongres menganggap tepat kesimpulan yang menyatakan bahwa kaum imperialis AS adalah musuh

nomor satu seluruh bangsa<sup>2</sup> didunia, dan bahwa melawan imperialisme AS dalam situasi dunia sekarang merupakan bagian yang terpenting daripada perjuangan untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian.

## 2. Situasi Ekonomi Dunia Kapitalis Sekarang

Dalam menganalisa situasi ekonomi dunia kapitalis sekarang Kongres membenarkan Laporan Umum yang menunjukkan berkali-kali terjadinya krisis ekonomi yang menimpa AS dan dunia kapitalis sedjak Perang Dunia II, sebagai akibat dari makin meruntungnya kontradiksi<sup>2</sup> dalam masyarakat kapitalis sendiri antara keinginan untuk memperbesar produksi dan terbatasnya kemampuan dababeli dari pasaran dalam negeri, sebagai akibat dari makin sempitnya dunia kapitalis dengan meluasnya dunia ekonomi Sosialis dan oleh kemajuan negeri<sup>2</sup> non-Sosialis yang baru merdeka dan yang mula-mula membangun ekonominya yang berindustri. Juga persaingan diantara negeri<sup>2</sup> kapitalis untuk menguasai pasaran kapitalis semakin menghebat seperti terlihat dari pertarungan sengit mengenai masalah Pasaran Bersama Eropa diantara enam negara Eropa Barat dan konsepsi Daerah Dagang Bebas dari Inggris. Dalam pada itu angka<sup>2</sup> pengangguran di-negeri<sup>2</sup> kapitalis terus-menerus menaik. Di AS masalah pengangguran sangat mengkhawatirkan umum. Oleh umum sudah diakui bahwa ekonomi AS harus menjesuisakan diri dengan suatu *„pengangguran kronis yang permanen“*.

Kongres juga membenarkan Laporan yang menunjukkan bahwa dalam usahanya untuk mengatasi krisis<sup>2</sup> ekonomi yang dihadapinya kaum monopolis AS mengambil jalan memperbesar pengeluaran militer, jalan memiliterisasi ekonomi negeri, yang memang adalah satu<sup>2</sup>nya jalan yang terbuka bagi mereka. Industri perang AS memakai hampir separoh dari seluruh investasi industri partikelir dan merupakan sampai 39% dari total produksi industri berat AS. Sendjata merupakan bahan ekspor Amerika yang terpenting, juga dalam rangka „bantuan“ yang diberikannya kepada negeri<sup>2</sup> lain. Oleh karena itulah mereka senantiasa menjalankan politik luarnegeri yang menimbulkan ketegangan<sup>2</sup> sampai ketepi perang dan menimbulkan peperangan<sup>2</sup> lokal yang baru, agar dapat memperbesar pasaran bagi industri perangnya. Politik kaum imperialis yang bersumber pada jalan buntu daripada sistim kapitalisme, sistim yang tidak mempunyai haridepan lagi, merupakan sumber dan biangkeladi utama dari semua ketegangan internasional dan telah berakibat mempertentangkan bangsa<sup>2</sup> tertentu satu sama lain.

Hanja ketakutan terhadap kekuatan militer jang unggul dari negeri<sup>2</sup> Sosialis dan terhadap pendapat umum dunia jang kuat menentang perang menyebabkan kaum imperialis sampai sekarang tidak berani begitu sadja nekad untuk membakar dunia dalam perang dunia jang baru.

Oleh karena itu untuk keselamatan dan keamanan dunia untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa<sup>2</sup>, politik ini harus dilawan dan dikalahkan. Adalah satu kenyataan bahwa Partai<sup>2</sup> Komunis disemua negeri memelopori dan memimpin perlawanan terhadap perang. Adalah djuga kenyataan, bahwa Partai Komunis dan Pemerintah Uni Sovjet memelopori perjuangan melawan politik perang negara<sup>2</sup> imperialis jang dikepalai oleh AS.

### 3. Kubu Sosialis Dan Pengaruh Internasionalnja

Mengenai perkembangan negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis dan pengaruh internasionalnja, Kongres dengan gembira membenarkan konstata-si dalam Laporan, bahwa sekarang Sosialisme sedang mengungguli kapitalisme dalam semua hal jang berarti maju, berguna dan baik bagi Rakjat pekerdja dan umatmanusia. Dalam sedjumlah tjabang penting daripada ilmu dan teknologi Uni Sovjet telah meninggalkan AS. Dalam produksi industri Uni Sovjet sudah lama melampaui negara<sup>2</sup> kapitalis jang terbesar di Eropa, jaitu Inggris, Perantjis dan Djerman Barat. Dalam tahun 1970, djadi 5 tahun sesudah melaksanakan Plan 7 Tahunnja, Uni Sovjet sudah akan menempati kedudukan nomor satu didunia, baik dalam volume produksi mutlak maupun produksi per kapita. Sputnik<sup>2</sup> dan lunik<sup>2</sup> buatan Sovjet adalah bukti jang paling menjolok dari kenyataan bahwa dibawah Sosialisme telah diudjudkan hasrat<sup>2</sup> jang paling berani dan berhasil daripada umatmanusia.

Disamping itu, Laporan menundjukkan bahwa sekarangpun produksi industri per kapita dari seluruh dunia Sosialis telah menjusul produksi per kapita dari seluruh dunia kapitalis. Negeri<sup>2</sup> Sosialis jang didiami oleh sepertiga penduduk dunia sekarang sudah menghasilkan lebih dari sepertiga produksi dunia, hampir separoh dari produksi gandum dan 53% dari produksi kapas. Sesudah Rentjana 7 Tahun Uni Sovjet terlaksana sepenuhnya, dan ditambah lagi dengan ketjepatan jang tinggi dari perkembangan ekonomi negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis lainnja, maka dalam tahun 1965 sistim dunia Sosialis bukan hanja akan unggul dalam produksi per kapita, tetapi djuga akan menghasilkan lebih dari separoh produksi dunia. Sukses besar ini akan merubah samasekali keadaan dan imbalanced kekuatan internasional demikian rupa, sehingga lahirilah kemungkinan jang

njata untuk menjingkirkan peperangan dunia dari kehidupan manusia, walaupun kemenangan Sosialisme didunia belum tertjapai sepenuhnya dan disebagian dunia masih ada kapitalisme.

Selanjutnja Laporan menundjukkan bahwa perkembangan Sosialisme dunia ditandai oleh sukses<sup>2</sup> besar jang ditjapai oleh sejumlah negeri kubu Sosialis dalam membangun atau dalam penyelesaian pembangunan Sosialisme. Republik Rakjat Tiongkok sedang melaksanakan tugas<sup>2</sup> pembangunan Sosialis dengan gaya maju melompat. Dalam melaksanakan tugas<sup>2</sup> ini Partai Komunis dan Rakjat Tiongkok jang berbakat telah menundjukkan dajakreasi<sup>2</sup> jang tinggi dengan mentjiptakan Komune<sup>2</sup> Rakjat jang merupakan suatu tingkat baru dari pembangunan Sosialis di-desa<sup>2</sup> dan mempunyai arti internasional jang penting. Komune<sup>2</sup> Rakjat jang makin berkembang di-desa<sup>2</sup> RRT sedjak tahun 1958 dan jang telah *„menggabungkan industri, pertanian, perdagangan, pendidikan dan urusan kemuliteran dan dimana administrasi pemerintah dan urusan Komune telah dipersatukan“*, terang merupakan kekuatan raksasa dalam perdjungan untuk membela perdamaian dan untuk mengalahkan imperialisme. Di Tjekoslowakia penghisanan manusia oleh manusia pada dasarnya telah dihapuskan dan merupakan salahsatu Republik jang terkemuka didunia dalam produksi industri. Di Bulgaria Sosialisme telah menang dikota dan desa. Di Republik Demokrasi Djerman, Polandia, Rumania, Hongaria, Albania, Republik Rakjat Demokrasi Korea, Republik Demokrasi Vietnam dan Republik Rakjat Mongolia, pembangunan Sosialisme maju dengan pesat.

Selanjutnja Laporan menundjukkan bahwa dengan adanya Dewan Saling Bantu Ekonomi kerdjasama dilapangan ekonomi antara negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis telah mendjadi lebih sempurna lagi. Kerdjasama ekonomi ini terutama ditudjukan untuk memadjukan sumber<sup>2</sup> bahan mentah dan tenaga listrik serta pada soal mempergunakan segala apa jang paling baru ditjapai dilapangan teknologi. Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan kordinasi jang lebih besar dan pada spesialisasi dilapangan permesinan jang akan memungkinkan pelaksanaan massa-produksi setjara besar<sup>2</sup>an serta modern dan jang akan sangat mengurangi biaja produksi. Ini adalah bentuk dan sistim kerdjasama internasional bagi masjarakat dunia diharidepan.

Kongres membenarkan Laporan jang menjimpulkan bahwa proses peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme dalam abad kita sekarang tidak hanya telah melahirkan Sosialisme di Eropa dan Asia, tetapi djuga telah melahirkan kubu perdamaian jang sangat kuat dan melahirkan gerakan kemerdekaan nasional jang belum pernah

ada taranja dalam sedjarah dunia.

Adalah tak diragukan lagi bahwa Sosialisme sebagai ide sudah mengisi fikiran bagian terbesar penduduk dunia, bahwa Sosialisme sudah menjadi sistim dunia, menjadi simbol dan perwakilan dari segala sesuatu yang baik dan maju serta menjadi daya-penarik internasional dan harapan serta tujuan hidup bagi beratus<sup>2</sup> djuta manusia yang masih meringkuk dan sengsara dibawah penghisapan dan penindasan kapital.

Dalam diplomasi dan politik internasional Sosialisme merupakan pembela yang seta dan tegas dari kemerdekaan bangsa<sup>2</sup> dan perdamaian dunia, pengandjur dan pelaksana dari hidup berdam-pingan setjara damai dan bersahabat antara bangsa<sup>2</sup>, tjontoh dari-pada kemauan baik dan kesanggupan hidup dan bekerjasama setjara damai antara bangsa<sup>2</sup> dengan sistim sosial yang berlainan, pengandjur dari normalisasi perdagangan internasional tanpa dis-kriminasi dan tukar-menukar hasilbumi dan kebudayaan antara Ti-mur dan Barat. Dilapangan ekonomi Sosialisme merupakan kesang-gupan kerdja setjara berentjana, mengindustrialisasi negeri setjara besar<sup>2</sup>an, penggunaan otomasi se-luas<sup>2</sup>nja, mekanisasi pertanian dan kesanggupan membawa kemajuan dan kemakmuran yang terusmenerus meningkat dalam kehidupan materiil dan kultural ma-nusia. Keunggulan Sosialisme atas kapitalisme djuga terbukti di-lapangan ilmu dan teknologi, dilapangan kebudayaan, moral dan kekuatan militer.

Tingkatan baru dalam gerakan Komunis sedunia telah tertjapai dengan adanya „Deklarasi“ dari 12 Partai Komunis dan Partai Buruh negeri-negeri Sosialis dan „Manifes Perdamaian“ dari 64 Partai Komunis dan Partai Buruh sebagai hasil Konferensi Mos-kow dalam bulan November 1957, dimana telah dirumuskan inti-sari dari pengalaman<sup>2</sup> Komunis sedunia yang paling berharga.

Adanya RRT telah mengubah wadiah dunia dan bagi Asia RRT mempunyai arti yang luarbiasa. Dengan adanya RRT ditambah dengan adanya Republik Rakjat Mongolia, Republik Rakjat De-mokrasi Korea dan Republik Demokrasi Vietnam, berarti lebih separoh dari penduduk Asia telah masuk kubu Sosialis dan meru-pakan benteng yang sangat kuat dalam perjuangan menghantjur-kan sisa<sup>2</sup> kekuasaan imperialis di Asia.

Tetapi kendatipun telah terdjadi kemajuan<sup>2</sup> penting dan ber-sedjarah dalam gerakan Komunis sedunia, Kongres menganggap tepat bahwa Laporan mengingatkan kita akan bahaya revisionisme modern dari klik Tito di Jugoslavia, yang hendak mengatjau dan memetjahbelah gerakan Komunis sedunia.

Dari kenyataan bahwa sukses<sup>2</sup> besar telah ditjapai dalam pem-

bangunan Sosialisme, terutama dengan dimulainya pembangunan Komunisme di URSS dan gerakan Komune Rakyat yang dija di RRT. Kongres menyetujui Laporan yang menjimpulkan bahwa gerakan Komunis sedunia dan kubu Sosialis belum pernah begitu kuat dan begitu bersatu seperti sekarang ini.

Mengenai hubungan<sup>2</sup> yang seharusnya antara Sosialisme sebagai suatu sistem dunia yang terus berkembang dan kapitalisme sebagai suatu sistem dunia yang masih belum lenjap. Laporan mengingatkan bahwa kaum Komunis telah lama menunjukkan jalan keluar, yaitu prinsip hidup berdampingan antara negara<sup>2</sup> yang sistem sosialisnya bertaman, prinsip ko-existensi setjara damai antara negara<sup>2</sup> kapitalis dan Sosialis, dan bahwa kaum Komunis akan terus berbuat segala-galanya untuk mentjegah djangan sampai djalan perang bisa dipaksakan kepada dunia. Memang sistem kapitalisme tidak akan pernah dapat dipaksakan meski dengan djalan perang sekalipun terhadap suatu masyarakat yang sudah tjukup sjarat<sup>2</sup>nja untuk Sosialisme.

Dalam hubungan ini, Laporan menunjukkan bahwa pernyataan<sup>2</sup> yang sangat penting daripada prinsip hidup berdampingan setjara damai antara lain ialah diadakannya hubungan dagang yang bebas, normal dan rama, antara Barat dan Timur dan pertukaran internasional antara wakil<sup>2</sup> pemerintah dan wakil<sup>2</sup> Rakyat dari berbagai negeri.

#### 4. Situasi Politik Internasional

Berbitjara tentang situasi politik internasional, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa didunia sekarang terdapat dua aliran mengenai persoalan<sup>2</sup> dan pertikaian<sup>2</sup> politik internasional, yaitu aliran yang membela dan memperdjuangkan Sosialisme dan aliran yang membela dan mempertahankan kapitalisme, sebagai pertjerman dari proses objektif yang sedang terdjadi dimasyarakat dunia. Karena mewakili dua proses yang berbeda, kedua aliran ini djuga mempunyai watak yang berbeda pula. Yang pertama tampil kedepan dengan tudjuan yang djujur dan dinjatakan setjara terusmenerus seperti yang tertjerman dalam politik Partai<sup>2</sup> Komunis dan diplomasi Sosialis. Yang kedua terpaksa dan terbukti harus tersembunyi dan harus membontjeng kepada demagogi „Sosialis“, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Nehru dari India.

Laporan menunjukkan bahwa pertarungan antara kedua aliran ini dalam politik internasional meliputi masalah<sup>2</sup> yang menjangkut kepentingan umum seluruh dunia. Yang terpokok diantaranya ialah masalah perang dan damai, masalah perang dingin, masalah kolo-

malisme, masalah pangkalan militer dinegeri lain, masalah perdagangan bebas dan normal antara Timur dan Barat, masalah larangan digunakannya sendjata<sup>1</sup> nuklir, masalah dihentikannya pertjobaan<sup>2</sup> bom nuklir, masalah perlutjutan persendjataan dan masalah hangat lainnya, misalnja, masalah remilitarisasi Djepang, masalah penjatuhan kembali Vietnam dan Korea, masalah Berlin Barat, masalah perdjandjian perdamaian dengan Djerman, masalah pakt<sup>3</sup> militer agresi SEATO, NATO dll. Laporan menegaskan bahwa diantara semua masalah hangat ini, masalah Berlin Barat dan Djerman adalah yang paling mendesak dewasa ini. Militerisme Djerman yang dihidupkan kembali dengan bantuan kaum monopolis AS merupakan bahaya yang sangat mengganggu keamanan dan perdamaian Eropa dan dunia.

Kongres djuga membenarkan kesimpulan bahwa sedjalan dengan berlangsungnja dua proses didunia yaitu proses kehantjuran kapitalisme dan proses kenaikan Sosialisme, dalam politik diplomasi internasional terdapat dua matjam kebidjaksanaan dengan tudjuan, tjara<sup>2</sup> dan semangatnja sendiri<sup>3</sup>. Jang satu adalah politik luar-negeri jang membela dan mempertahankan penghisapan dan penindasan, kolonialisme dan perang. Jang lain politik luarnegeri negeri<sup>4</sup> Sosialis jang berdjuaug untuk menghapuskan penghisapan, kolonialisme dan perang, dan untuk mentjptakan masjarakat baru didunia jang adil dan makmur, damai dan madju.

Adalah satu kenjataan bahwa kaum imperialis kapalabatu, terutama kaum imperialis AS, karena terusmenerus nekad mempertahankan kolonialisme, terusmenerus menimbulkan ketegangan<sup>1</sup> baru, karena terus mengadakan subversi, intervensi dan agresi, dewasa ini sudah semakin terisolasi dan dibentji oleh Rakjat sedunia. Disamping itu meluapnja kebangunan anti-kolonial jang sekarang meliputi seluruh daerah Asia, Afrika dan Amerika Latin, adalah pula merupakan pukulan<sup>2</sup> jang berat bagi imperialisme dunia. Dalam hubungan ini perlu ditjatat kemenangan mutlak „Partai Aksi Rakjat“, dalam pemilihan umum di Singapura pada awal tahun ini jang merupakan pukulan berat bagi kolonialisme Inggris dan politik pro-Inggris Tengku Abdul Rachman dari Malaja. Adalah tidak berlebihan-lebihan djika berdasarkan kenjataan ini Kongres menjetudjui kesimpulan bahwa dalam periode jang ditindjau perkembangan internasional benar<sup>3</sup> menunjukkan pergeseran kekiri kearah jang lebih mementjilkan dan merugikan kaum imperialis, terutama imperialis AS.

Dalam hubungan dengan kebangunan anti-kolonial dari bangsa<sup>2</sup> Asia dan bangsa<sup>2</sup> Arab, Kongres menganggap penting bahwa Laporan mengkonfrontasikan djalan Mesir dari Nasser jang tersesat

dengan djalan Irak dari Kasim jang benar. Pengalaman Mesir menundukkan bahwa tidak mungkin politik luarnegeri jang madju dipertahankan selama politik dalam negerinya adalah anti-demokratis dan anti-Komunis dan bahwa politik anti-Komunis dan anti-demokratis adalah berlawanan dengan prinsip anti-kolonial dan tjinta damai dari Putusan<sup>2</sup> Bandung dan sedjalan dengan politik imperialis jang mempertahankan kekuasaan kolonialnya di-negeri<sup>2</sup> Arab, di Asia dan di-bagian<sup>2</sup> dunia lainnja. Tak disangsikan lagi bahwa djalan Irak sekarang, djalan kerdjasama nasionalis dan Komunis, adalah djalan Arab dan djalan kemerdekaan nasional jang sedjati.

Dalam hubungan kebangkitan anti-kolonial di Asia, Afrika dan Amerika Latin jang telah mengubah imbangan kekuatan internasional jang menguntungkan bagi kemerdekaan, demokrasi, Sosialisme dan perdamaian, Laporan menekankan perlunya dijakini arti internasional jang amat penting dari gerakan<sup>2</sup> dunia untuk menentang perang dan membela perdamaian abadi. Bagi berhasilnja perdjungan mempertahankan perdamaian dan mentjegah perang dunia jang baru. Laporan menundukkan bahwa sjarat jang menentukan jalah imbangan kekuatan internasional jang menguntungkan bagi Sosialisme.

Dalam hubungan dengan tugas<sup>2</sup> kita dilapangan politik luarnegeri Kongres memperkuat kesimpulan<sup>2</sup> Partai dimasa jang lalu bahwa Indonesia seharusnya menempatkan diri sebagai partisipan jang aktif dalam front internasional anti-kolonial dan tjinta damai, bahwa Partai harus selalu berusaha untuk mendorong Pemerintah Indonesia supaja bertindak dan mendjalankan politik luarnegeri kearah ini, dan bahwa bagi kaum Komunis bekerdja dalam gerakan perdamaian merupakan tugas perdjungan jang serius dan sungguh<sup>2</sup> jang harus dilakukan dengan sepenuh-hati.

##### **5. Soalnja Bukan „Memilih Blok”, Tetapi Mendjalankan Politik Luarnegeri Jang Menguntungkan Rakjat Indonesia**

Dalam menganalisa politik luarnegeri Indonesia, Kongres sepenuhnya menjetudjui kesimpulan bahwa kerdjasama dengan Uni Sovjet dan negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis lainnja dalam front internasional untuk perdamaian dan anti-kolonial memberikan djaminan bagi keselamatan, kemadjuan dan haridepan jang lebih baik bagi Republik Indonesia. Hanja dengan meluaskan kerdjasama dengan negeri-negeri Sosialis, politik luarnegeri jang bebas dan aktif menudju perdamaian dan anti-kolonial bisa diletakkan diatas

sendi<sup>2</sup> dan dalam proporsi yang sebenarnya. Hanya dengan demikian, politik ini tidak akan salah tumbuh menjadi suatu politik retrak yang banti, yang tidak berani memihak dan menghadapi berbagai masalah internasional, atau tumbuh menjadi suatu politik „tidak pilih kasih antara kedua blok“ yang berarti bersikap dan memberikan perlakuan yang sama baiknya kepada imperialisme seperti kepada Sosialisme.

Berbitjara tentang politik bebas dan aktif, Kongres sepenuhnya menyetujui Laporan yang menyimpulkan bahwa politik bebas Sjahrir langsung bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian dan anti-kolonial yang dengan disokong oleh Rakyat dijalankan oleh Pemerintah<sup>2</sup> Indonesia sedjak Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama dan yang kedua sampai sekarang, dan bahwa karenanya Sjahrir samasekali bukan pembentuk politik luar negeri Indonesia yang sekarang didukung oleh Rakyat Indonesia tetap, adalah lawannya. Dalam hubungan ini Laporan menjelaskan bahwa sudah sedjak semula Sjahrir memegang peranan penting dalam politik luar negeri, Indonesia ia sudah menakut-nakuti Rakyat Indonesia dan mengandjurkan supaya menjerah kepada imperialisme dan supaya jangan merugikan atau membikin marah kaum imperialis, dan bahwa karena itu kemerdekaan yang bisa dicapai oleh Indonesia menurut konsepsinya tidak lebih dari „kemerdekaan“ dalam nama saja yang tetap berada dibawah pengaruh negeri kapitalis besar.

Mengenai politik luar negeri Hatta, Laporan menjelaskan bahwa ia adalah tidak lebih daripada kelanjutan politik luar negeri Sutan Sjahrir yang chianat itu. Adalah sepenuhnya benar kesimpulan yang menyatakan bahwa politik luar negeri Sjahrir dan Hatta yang meremehkan kekuatan Rakyat Indonesia sendiri dan kekuatan anti-kolonial di dunia dan yang sebaliknya menjerah pada intimidasi<sup>2</sup> dan kehendak<sup>2</sup> imperialis akhirnya tumbuh menjadi politik komprador, yaitu politik tunduk pada imperialisme dan memusuhi perjuangan kemerdekaan Rakyat Indonesia untuk membela dan menjepurnakan Republik Proklamasi.

Dalam hubungan ini, Kongres menganggap tepat peringatan dalam Laporan bahwa politik luar negeri Sjahrir-Hatta yang anti-rasional dan pro-imperialis itu dewasa ini belum lenjap samasekali dan bahwa diantara para diplomat dan para penguasa dalam politik luar negeri Republik Indonesia masih terdapat tjukup banyak oknum<sup>2</sup> yang masih berdjawa dan bersemangat konsepsi politik luar negeri Sjahrir-Hatta. Ini sangat menghambat perkembangan dan kemajuan Republik Indonesia sehingga oleh karenanya perlu segera dibersihkan.

Adalah kenyataan sedjarah bahwa sesungguhnya tradisi politik luarnegeri Republik Indonesia semendjak berdirinja adalah berdasarkan hubungan dan kerdjasama persahabatan dengan Timur, walaupun dirantangi oleh Sutan Sjahrir. Berdasarkan kenyataan sedjarah, Kongres membenarkan Laporan bahwa negara<sup>2</sup> Sosialis adalah pembela<sup>2</sup> dan penjokong<sup>2</sup> setia sedjak tahun<sup>2</sup> pertama Revolusi dan demikian djuga negara<sup>2</sup> Asia-Afrika, dan bahwa sahabat<sup>2</sup> tradisional Republik Indonesia dan sahabat<sup>2</sup> di-waktu<sup>2</sup> jang sulit adalah negara<sup>2</sup> Timur dan bukan negara<sup>2</sup> Barat, jang selamanya memihak Belanda.

Dalam hubungan ini Rakjat Indonesia perlu menjatakan penghargaan dan rasa terimakasih jang se-besar<sup>2</sup>nja kepada proletariat Nederland beserta Partainya, jaitu Partai Komunis Nederland, jang dari sedjak semula selalu melawan politik kolonial Pemerintah Nederland dan selai membela kemerdekaan Indonesia dan hal Republik Indonesia atas Irian Barat.

Mengenai politik luarnegeri Kabinet Wilopo, kabinet pertama jang disokong oleh PKI sesudah KMB, jang dirumuskan sebagai *politik luarnegeri jang bebas dan aktif menudju perdamaian*. Kongres membenarkan Laporan jang menjimpulkan bahwa dengan ini politik bebas model Sjahrir-Hatta mulai ditinggalkan, meskipun kesanggupan untuk menempatkan Indonesia tegas<sup>2</sup> dalam front internasional anti-kolonial dan tjunta damai belum tjukup pada kabinet ini.

Kongres membenarkan kesimpulan bahwa atas desakan kekuatan progresif dasar<sup>2</sup> politik luarnegeri Indonesia jang agak maju telah diletakkan terutama oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo jang telah berhasil mendorong terlaksananya konferensi Bandung jang telah melahirkan prinsip<sup>2</sup> dan semangat Bandung jang bersedjarah, dan bahwa politik ini dilandjutkan oleh Kabinet Djuanda dengan menundjukkan tanda<sup>2</sup> kesediaan untuk lebih memperluas hubungan ekonomi dan kebudayaan dengan negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis dan dengan menempuh „djalan lain“ mengenai Irian Barat. Dengan politiknya jang tegas menentang pendaratan tentara AS di Pakanbaru pada awal tahun 1958, Pemerintah Djuanda dengan dukungan Rakjat Indonesia telah berhasil menjelamatkan Republik Indonesia.

Dalam keadaan sekarang adalah kewadajiban Partai untuk lebih mengembangkan hasil<sup>2</sup> positif jang telah ditjapai oleh politik luarnegeri Indonesia. Jang per-tama<sup>2</sup> perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan jang kongkrit dan sungguh<sup>2</sup> dari putusan<sup>2</sup> Bandung. Didalam lingkungan PBB kerdjasama kelompok A-A perlu dipererat dan lebih diaktifkan lagi.

Mengingat Indonesia berada di barisan paling depan dalam menghadapi SEATO, adalah penting supaya Pemerintah mengadakan usaha<sup>2</sup> yang intensif dalam merealisasi politik tetangga baik atas dasar azas<sup>2</sup> memelihara perdamaian dan anti-kolonial agar Indonesia dilingkungi oleh negara<sup>2</sup> tetangga yang bersahabat. Djuga sudah pada tempatnya jika Pemerintah Indonesia ber-sama<sup>2</sup> dengan kelompok A-A meneruskan perdiwaan dengan lebih teguh lagi didalam PBB dan diforum internasional lainnya untuk memasukkan RRT dan Republik Rakyat Mongolia kedalam PBB, untuk menghapuskan perbedaan rasial di Afrika Selatan dan dibagian<sup>2</sup> dunia lainnya dan untuk memelihara keamanan di Timur Tengah dan Timur Djauh dengan menuntut penarikan mundur semua tentara asing dari daerah<sup>2</sup> tsb. Demikian pula perdiwaan Irian Barat harus diteruskan djuga di PBB dan lebih meyakinkan negara<sup>2</sup> didunia, terutama negara<sup>2</sup> Asia-Afrika dan djuga negara<sup>2</sup> Amerika Latin tentang adil dan benarnya tuntutan Rakyat Indonesia. Selanjutnya demi kepentingan Indonesia sendiri kerdjasama dilapangan ekonomi, ilmu dan kebudayaan dengan negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis harus lebih diluaskan lagi sesuai dengan politik luarnegeri Pemerintah yang agak maju yang anti-kolonial dan tjunta damai.

Dalam hubungan dengan SEATO, Kongres menganggap tepat pada waktunya bahwa Laporan memperingatkan sikap Pemerintah Djepang yang belum menundukkan kesadaran untuk menjadilkan suatu politik luarnegeri yang tjunta damai, demokratis dan bersahabat terhadap negeri<sup>2</sup> tetangga di Asia, yang menundukkan bahwa imperialisme Djepang masih merupakan bahaya yang mengganggu perdamaian dan kemerdekaan Asia.

Laporan menekankan pentingnya adanya kedjernihan dan kejelasan dalam pandangan dan pengertian politik luarnegeri bahwa yang menjadi musuh dan penghalang utama dari keselamatan dan keutuhan Republik Indonesia adalah imperialisme dunia yang dikepalai oleh AS, dan oleh karena itu harus dilawan dengan sungguh<sup>2</sup> dan berani tanpa menyerah sedikitpun djuga. Sudah menjadi kenyataan umum, bahwa kekuatan imperialis bukannya tidak terbatas, bahwa imperialisme adalah matjan kertas yang bukannya tidak terkalahkan dan bahwa imperialis mundur jika dilawan.

Kongres memperkuat Laporan yang menjimpulkan bahwa untuk melaksanakan tugas<sup>2</sup> politik luarnegerinya, Pemerintah perlu mempunyai aparatur yang dapat dipertjaja dan mampu, yang patriotik dan ahli, bahwa korps diplomat dan pedjabat<sup>2</sup> dinas luarnegeri perlu dibersihkan dari kutu<sup>2</sup> elemen<sup>2</sup> „PRRI-Permesta” dan bersamaan dengan itu diperkuat dengan patriot<sup>2</sup> yang memiliki keahlian be-

kerdja jang lebih tinggi dan lebih mampu menguasai dan memecahkan masalah<sup>2</sup>nja.

### III

#### 1. Perkembangan Partai Antara Kongres Nasional ke-V Dan ke-VI

Dalam membitarakan masalah pembangunan Partai, Kongres Nasional ke-VI dengan gembira membenarkan kesimpulan, bahwa selama masa antara Kongres ke-V dan ke-VI, Partai kita telah mengalami perubahan besar dan sudah menjadi Partai terbesar dinegeri kita. Partai telah berkembang meluas keseluruh negeri dan di beberapa pulau juga sudah mulai mendalam dan berakar. Kemudian melonpat daripada Partai tidak hanya dalam peningkatan jumlah anggota dan pengikut, tetapi juga dalam peningkatan ideologi, politik dan organisasi. Berbeda dengan waktu Kongres Nasional ke-V, perbandingan jumlah anggota dan tjalon-anggota sekarang sudah hampir sama walaupun jumlah anggota seharusnya jauh lebih banyak dari jumlah tjalonanggota. Prosentase keanggotaan dari kalangan kaum tani telah lebih besar, sedangkan dari kalangan kaum intelektual dan wanita sudah lebih banyak jang masuk menjadi anggota atau bersimpati pada Partai. Dari elemen buruh juga sudah bertambah banyak didalam Partai tetapi prosentasenja tidak mengalami perubahan penting.

Sepanjang sedjarahnya, sebagian besar dari anggota Partai kita telah mengalami penggemblengan dalam pelbagai perjuangan revolusioner Perlawanan gagahberani dan pengorbanan besar jang sudah diberikan oleh anggota<sup>2</sup> Partai dalam perjuangan<sup>2</sup> ini telah menggembleng seluruh barisan Partai, telah sangat meningkatkan martabat Partai dimata Rakyat, telah lebih mengeratkan hubungan Partai dengan massa Rakyat dan dengan alat<sup>2</sup> negara jang patriotik. Bersamaan dengan itu ia juga telah membadjakan persatuan dalam Partai, persatuan dikalangan pimpinan atasan, persatuan antara pimpinan atasan dan bawah dan persatuan antara pimpinan dengan massa anggota. Ketjintaan dan solidaritet antara sesama Komunis adalah semangat jang berkuasa dalam Partai.

Mengenai sebab<sup>2</sup> mengapa Partai dalam waktu singkat ini bisa mempunyai jumlah keanggotaan jang besar dan tumbuh menjadi Partai massa, Kongres membenarkan Laporan jang menunjukkan pentingnja hal<sup>2</sup> sbb. : diadakannya koreksi atas kesalahan<sup>2</sup> fundamental dari Partai dilapangan politik dan organisasi seperti jang dibahas dalam resolusi „Djalan Baru“; kemudian tindakan<sup>2</sup> Politbiro jang dibentuk pada permulaan tahun 1951, jang telah ber-

hasil menjusun rentjana Konstitusi baru Partai, yang telah merumuskan garis politik front persatuan nasional yang konsekwen anti-imperialisme dan yang berbasiskan persekutuan buruh dan tani dan garis organisasi tentang pembangunan Partai yang dibolsiewikkan, yang meluas diseluruh negeri, yang mempunyai karakter massa yang luas; penjusunan program agraria revolusioner, penjusunan program Partai yang tepat; dan selandjutnja kemampuan Partai dalam mengambil sari<sup>2</sup> yang berharga, yang bersifat nasional dan progresif dari sedjarah, kebudayaan dan tradisi Rakjat kita. Adalah sepenuhnya terbukti, bahwa kebenaran politik Partai telah sangat besar artinja bagi pekerdjaan memperkuat dan meluaskan Partai.

Kongres djuga dengan gembira menyambut konstataci didalam Laporan bahwa hubungan Partai kita dengan Partai<sup>2</sup> sekawan, yang berdasarkan persamaan hak dan kemerdekaan masing<sup>2</sup> makin hari makin bertambah erat, baik dengan djalan mempeladjar<sup>2</sup> pengalaman Partai<sup>2</sup> sekawan maupun dengan menghadu<sup>2</sup> Kongres<sup>2</sup> mereka atau kontak<sup>2</sup> pribadi antara pemimpin<sup>2</sup> Partai kita dengan pemimpin<sup>2</sup> Partai sekawan.

## 2. Pendidikan Marxisme-Leninisme Sjarat Mutlak Untuk Persatuan Didalam Partai

Berbitjara tentang pendidikan Marxisme-Leninisme, Kongres menganggap tepat putusan pimpinan Partai untuk, sesudah kesalahannya dilapangan organisasi diperbaiki dan sesudah garis umum pembangunan Partai yang diletakkan oleh Kongres Nasional ke-V dilaksanakan dengan berhasil, melaksanakan pendidikan setjara besar<sup>2</sup>an didalam Partai. Dalam hubungan ini sangat penting artinja gerakan<sup>2</sup> semendjak tahun 1952 untuk mempeladjar<sup>2</sup> Program dan Konstitusi Partai bagi anggota<sup>2</sup> baru setiap kali diadakan gerakan perluasan keanggotaan, gerakan<sup>2</sup> yang mewadjabkan anggota<sup>2</sup> lama mempeladjar<sup>2</sup> dokumen<sup>2</sup> Partai serta buku<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme, dan lebih<sup>2</sup> lagi Plan 3 Tahun Mengenai Organisasi dan Pendidikan.

Berdasarkan Plan 3 Tahun Pertama, maka diadakan pendidikan diseluruh Partai tentang prinsip<sup>2</sup> fundamental Marxisme-Leninisme dan tentang mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Pendidikan dihubungkan setjara erat dengan tugas urgen Partai, dan dipandang sebagai usaha untuk menghilangkan rintangan<sup>2</sup> ideologis agar tugas<sup>2</sup> Partai sekarang dapat dilaksanakan dengan baik dan agar para kader tidak asing mengenai tugas yang akan dilakukan dikemudian hari.

Kongres menjedari pentingnja kesimpulan, bahwa salahsatu pe-

kerdjaan Partai sesudah Kongres Nasional ke-VI ialah mendidik semua fungsionaris dan aktivis Partai, dan mendidik mayoritas daripada massa anggota menurut sistem pendidikan baru.

Dengan dilaksanakannya pendidikan, maka kebulatan fikiran menjadi terjamin, semangat Komunis menjadi lebih kuat berkuasa dalam Partai. Dalam hubungan ini, tepat sekali kesimpulan Sidang Pleno ke-IV CC. yang menyatakan bahwa *„Persatuan didalam Partai hanya mungkin jika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, yaitu fikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme. Hanya jika ada persatuan fikiran dari orang<sup>2</sup> Komunis, barulah ada persatuan yang sungguh<sup>2</sup> didalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan didalam aksi<sup>2</sup> Rakyat yang dipimpin oleh Partai Komunis”*.

Mengenai kesukaran<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> yang kita temui dan kita perbuat dalam melaksanakan garis politik dan organisasi yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V serta kesukaran<sup>2</sup> dan kemungkinan<sup>2</sup> membuat kesalahan dimasa datang Kongres membenarkan kesimpulan bahwa yang penting ialah supaya kita selamanya mengerti apa yang menjadi pokok dan sebab daripada semua kesukaran dan kesalahan itu. Dalam Kongres Nasional ke-V sudah disimpulkan, bahwa segala kesalahan, baik kesalahan karena dogmatisme maupun kesalahan karena empirisme, adalah bersumber pada ideologi subjektivisme. Adalah kewajiban pimpinan Partai untuk mempeladjar dan menganalisa kesalahan<sup>2</sup> dimasa lampau, menarik pelajaran dari kesalahan<sup>2</sup> yang lampau itu, agar sebagaimana dikatakan oleh Kawan Liu Sau-tji *„dalam pekerjaan selanjutnya membuat lebih sedikit kesalahan, dan sedapat mungkin tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi serta tidak menyebabkan kesalahan kecil menjadi kesalahan besar.”*

### 3. Subjektivisme Harus Terus Kita Perangi

Untuk melawan ideologi subjektivisme, Kongres membenarkan Laporan yang menunjukkan kesimpulan Kongres ke-V yang menyatakan bahwa adalah sangat penting untuk melakukan dua hal: *Pertama*, mengadakan anggota<sup>2</sup> Partai untuk memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisa situasi dan dalam mengukur kekuatan kelas. Dengan demikian kita menentang analisa dan perhitungan setjara subjektif. *Kedua*, memimpin perhatian anggota<sup>2</sup> kearah penjelidikan dan studi lapangan sosial dan ekonomi. Dengan melakukan dua hal ini, kita dapat menentukan taktik perjuangan dan metode kerja, dan dengan demikian membikin kawan<sup>2</sup> kita mengerti bahwa kesalahan dalam penjelidikan sesuatu

keadaan yang njata akan menjebabkan mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme.

Melakukan dua hal tsb. diatas berarti bahwa kita mempertinggi taraf Marxisme-Leninisme daripada kader<sup>2</sup> Partai dan mendidik mereka memadukan teori dengan praktek. *Singkatnja, kita harus tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan untuk meningkatkan hasil pekerdjaan. Tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan, inilah sembojan beladjar dan sembojan bekerdja kita*

Sumber sosial daripada subjektivisme ialah keadaan negeri kita yang merupakan neger. burdjuis ketjil. Tetapi kesalahan<sup>2</sup> kita bisa djuga tidak berpangkal pada sumber sosial, tetapi berpangkal pada sumber pengertian yang salah. Untuk menghindarkan kesalahan ini, kita harus dengan tepat memahami kenyataan objektif dengan segala sudutnja dan dengan tepat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak bertindak menurut kemyman kita yang subjektif dan beratsebelah.

Selanjutnja Kongres membenarkan sepenuhnya kesimpulan, bahwa dalam usahanya untuk menghalang-halangi kemajuan gerakan progresif dan kemajuan perdjuaan anti-imperialisme dan anti-feodalisme pada umumnya, berhubung sukarnja untuk memukul politik dan program PKI, kaum imperialis dan kakitangannya serta kaum burdjuis dalam negeri pada waktu sekarang lebih banyak mentjurahkan kegiatannya dalam gelanggang ideologi, dimana mereka setjara diam<sup>2</sup> menjelundupkan pandangan<sup>2</sup> dunia idealis dalam mendjelaskan masalah<sup>2</sup> politik, hukum, kesenian dsb., sehingga menimbulkan kekutjauan dalam dunia ideologi. Oleh karena itu adalah tepat kesimpulan, bahwa *salahsatu tugas terpenting sekarang, ialah meneruskan pembangunan Partai dengan penekanan pada segi pembangunan ideologi. Dengan mengemukakan ini tidak berarti bahwa kita boleh menganggap remeh masalah organisasi. Pembangunan organisasi adalah tetap penting, tetapi lebih penting lagi pembangunan ideologi. Bagi kaum Komunis, ideologi adalah djenderal. Tanpa ideologi yang tepat tidak ada yang bisa berdjalan beres sebagaimana tanpa djenderal yang baik tidak ada tentara yang bisa menang.*

Untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dilapangan ideologi, dimasa<sup>2</sup> datang kita harus lebih mengutamakan peladjaran filsafat Marxisme-Leninisme, jaitu materialisme dialektik dan histori. Dengan memahami filsafat akan menjadi djelas bagi kader<sup>2</sup> kita bahwa filsafat itu adalah dasar teori daripada segala taktik, garis, pedoman dan politik dan dengan demikian kader<sup>2</sup> kita tidak hanya tahu kebenaran, tetapi djuga tahu sebab kebenaran garis politik Partai.

Untuk menghindarkan kemungkinan kesalahan subjektivisme yang tidak bisa membedakan antara Program Umum Partai dan Program Tuntutan atau program khusus, Laporan menundukkan pentingnya Sidang Pleno ke-IV CC, dimana dengan tegas didjelaskan perbedaan antara kedua program tsb. dan hubungannya satu sama lain.

Kongres membenarkan Laporan yang menekankan bahwa mengerti strategi dan taktik<sup>2</sup> pokok sadja belumlah tjukup. Partai harus senantiasa menguasai situasi setjara lengkap atau sekurang-kurangnya agak lengkap, menetapkan sikap terhadap situasi itu dan menentukan langkah dan aksi<sup>2</sup> yang menguntungkan Rakjat dan mendorong maju gerakan revolusioner sesuai dengan situasi.

Selanjutnya untuk mengurangi kemungkinan<sup>2</sup> membuat kesalahan yang masih tetap ada, meskipun kita sudah beladjar teori Marvisme-Leninisme, sudah menguasai keadaan dan djuga menguasai garis politik Partai dengan baik, Partai harus terusmenerus melakukan kritik dan selfkritik dengan berpedoman kepada prinsip yang diadjukan Kawan Mau Tje-tung *„bertitik pangkal pada ke-mauan bersatu, dan melalui kritik dan selfkritik, menjapai persatuan baru atas dasar yang baru“*. Keberanian melakukan kritik harus dibangunkan, terutama kritik dari bawah kepada atasan dengan serius dan sungguh<sup>2</sup> tetapi djuga setjara sabar dan bijaksana, sehingga kita dapat *„menarik pelajaran dari kesalahan yang sudah<sup>2</sup> sebagai peringatan bagi hari kemudian“* dan kita djuga dapat *„mengobati penyakit untuk menjembuhkan sisakit“*. Dengan setia melakukan kritik dan selfkritik berarti kita memerangi subjektivisme. Dengan demikian kemungkinan membikin kesalahan diperketip serta persatuan didalam Partai lebih diperkuat. Dengan demikian Partai sungguh<sup>2</sup> akan mendjadi pimpinan yang objektif dan realistik dan akan dapat membersihkan dirinja dari birokratisme dan sektarisme. Semuanya ini berarti bahwa Partai mewujudkan suatu langgamkerdja yang membedakannya dari partai<sup>2</sup> lain, yang dengan singkat dapat dirumuskan sbb.: *Memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa Rakjat dan melaksanakan selfkritik.*

#### 4. Teruskan Bekerdja Dengan Plan 3 Tahun

Mengenai arti daripada Plan 3 Tahun Organisasi dan Pendidikan Kongres membenarkan kesimpulan, bahwa Plan tsb. mempunyai arti yang luarbiasa besarnya baik bagi mempertinggi kwalitet anggota<sup>2</sup> Partai maupun bagi kemandjuaan Partai setjara keseluruhan. Plan ini telah menimbulkan suasana baru dalam Partai.

telah membawa kesegaran dan kegembiraan bekerdja dalam barisan Partai. Ia djuga telah mempertinggi daya memobilisasi daripada Partai; melatih para fungsionaris dan aktivis Partai untuk bekerdja „banjak segi“; mendorong mereka untuk memperdalam penyertian mengenai pekerdjaan masing<sup>2</sup>, untuk mempelajari lebih baik keadaan daerahnya masing<sup>2</sup> dan keadaan sukubangsa<sup>2</sup> jang ada didaerahnya; menanamkan semangat dan pandangan dunia Komunis dalam dada anggota<sup>2</sup> Partai, dan memperkembangkan pimpinan kolektif serta pekerdjaan massa dari Partai. Adanya pimpinan kolektif jang disertai kritik dan selfkritik menjabahkan makin berkembangnya demokrasi dalam Partai dan bersamaan dengan itu berkembang pula kepr.badian, daya-tjipta dan militansi para anggota Partai. Berkembangnya demokrasi dalam Partai memperkuat sentralisme Partai, sedangkan garis massa ber-angsur<sup>2</sup> menjadi sungguh<sup>2</sup> garis politik, garis organisasi dan garis moral daripada Partai.

Adalah benar, bahwa perkembangan situasi jang tjepat di tanah-air kita tidak mungkin bisa ditampung seandainya kita tidak mempunyai Plan 3 Tahun, artinya djika kita tidak mempunyai pengalaman bekerdja sistimatis dan tidak meluaskan Partai dan mendidik anggota<sup>2</sup> Partai. Dalam hubungan ini penting sekali arti daripada Sidang Pleno ke-VI CC jang mengambil resolusi tentang keharusan untuk menyesuaikan badan<sup>2</sup> pimpinan Partai dengan perkembangan situasi revolusioner jang tjepat jang dimulai dari CC sampai kepada Komite<sup>2</sup> jang paling bawah. Pekerdjaan menyesuaikan badan<sup>2</sup> pimpinan Partai dengan situasi ini adalah pekerdjaan jang harus kita kerdjakan terusmenerus.

Oleh karena itu Kongres menjtudjuj Laporan, bahwa kita harus meneruskan pekerdjaan dengan Plan 3 Tahun, djika selesai jang pertama disusul dengan jang kedua dan seterusnya. Kontrol jang intensif, jang sistimatis dan terusmenerus mengenai pelaksanaan Plan harus dianggap sebagai salahsatu pekerdjaan terpenting untuk suksesnja Plan.

Mengenai djatah<sup>2</sup> jang ditetapkan dalam Plan 3 Tahun, dapat disimpulkan, bahwa pada umumnja djatah jang ditjapai dalam lapangan pendidikan lebih baik daripada djatah jang ditjapai dalam lapangan organisasi, bahkan beberapa Komite sampai berhasil melampaui djatah jang ditetapkan mengenai penjelenggaraan Sekolah dan Kursus Partai. Namun demikian ada djuga bagian<sup>2</sup> penting jang belum tertjapai, diantaranya jang sangat serius ialah mengenai peredaran literatur Partai dan chususnja djatah untuk memperbesar oplah „Harian Rakjat“. Masalah distribusi HR harus menjadi tanggungjawab Sekretaris<sup>2</sup> Komite dan semua ka-

der penting Partai.

Berhubung adanya kelemahan<sup>2</sup> ideologi yang menghinggapi sementara kawan, Kongres menjetudju kesimpulan bahwa tjara untuk mengatasinya yang pokok ialah dengan djalan meningkatkan kesedaran Marxis-Leninis diseluruh Partai, dan oleh karena itulah bagian pendidikan didalam Plan 3 Tahun Partai harus senantiasa mendapat perhatian yang utama. Disini djuga harus ditarik kesimpulan, bahwa didalam menjusun Plan 3 Tahun Kedua yang akan datang peladjaran filsafat Materialisme Dialektik dan Histori harus menjadi matapeladjaran pokok disemua Sekolah dan Kursus Partai, Sekolah Partai Central dan Sekolah<sup>2</sup> Partai Daerah Besar harus mendidik pekerdja<sup>2</sup> teori, mendidik pekerdja<sup>2</sup> politik dan organisasi dan mendidik guru<sup>2</sup> Sekolah<sup>2</sup> dan Kursus<sup>2</sup> Partai. Selanjutnya harus mendjam n kesatuan teori Marxisme-Leninnisme dengan praktek revolusioner Indonesia, disamping merupakan perpaduan badan pendidikan dengan badan penyelidikan (research).

### 5. Memperkuat, Memperluas dan Memperbaharui Partai

Dalam menghadapi tugas<sup>2</sup> baru dari Partai sesudah Kongres Nasional ke-VI, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa kewajiban kita sekarang ialah meneruskan pembangunan Partai dengan sembojan „*memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai*”.

Memperkuat Partai berarti per-tama<sup>2</sup> mengkonsolidasi dan mengembangkan hasil<sup>2</sup> Plan 3 Tahun, menjusun dan melaksanakan Plan 3 Tahun Kedua, memeriksa kembali seluruh barisan Partai untuk mentjari kelemahan<sup>2</sup> Partai supaya dapat dilikwidasi dan mempergiat pekerdjaan untuk memelihara kemurnian ideologi Partai, dan mempertinggi kwalitet semua organisasi Partai yang berarti mempertinggi kwalitet tiap anggota Partai.

Memperluas Partai berarti mengembangkan dan mengeratkan hubungan Partai dengan massa Rakjat dari semua sukubangsa diseluruh negeri, menjempurnakan pekerdjaan massa daripada Partai, mengadakan perlawanan terhadap sektarisme dan menambah djumlah anggota serta djumlah organisasi Partai.

Memperbaharui Partai per-tama<sup>2</sup> berarti memperbaharui Konstitusi Partai, jaitu memasukkan kedalam Konstitusi Partai kemenangan<sup>2</sup> yang telah ditjapai semendjak Kongres Nasional ke-V dalam lapangan politik dan organisasi. Partai harus senantiasa bekerdja menurut Plan, yang meliputi seluruh Partai dan seluruh negeri. Kader<sup>2</sup> Partai tidak boleh bekerdja setjara spontan atau

dengan meraba-raba, atau menetapkan politik dan bekerdja hanya berdasarkan perasaan saja, tetapi mereka harus bekerdja berdasarkan hasil<sup>2</sup> penjelidikan atau bekerdja setjara ilmiah untuk memperbaiki pekerdjaan praktis mereka dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama massa kaum buruh dan kaum tani. Hasil<sup>2</sup> penjelidikan eksperimen<sup>2</sup>, pentjataan<sup>2</sup> dan perenungan<sup>2</sup> harus selalu diachiri dengan kesimpulan<sup>2</sup> untuk lebih memperbaiki pekerdjaan dimasa datang. Kehidupan intern Partai harus dipertinggi, terutama dengan setia kepada azas sentralisme-demokratis dan dengan mengembangkan kritik dan selfkritik. Partai harus senantiasa dalam suasana menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi, suasana berlomba dalam melaksanakan plan untuk mengembangkan daja-tjipta masing<sup>2</sup> anggota dan dalam suasana kesatuan Partai dalam segala hal. Djadi memperbaharui Partai samasekali tidak berarti membikin „Partai Baru“.

Dalam rangka memperbaharui Partai, Kongres menekankan pentingnja diadakan gerakan memperbaiki tjara memimpin yang didasarkan atas pepaduan seruan<sup>2</sup> umum dengan tuntutan<sup>2</sup> kongkrit dan pepaduan pimpinan dengan massa dengan sembojan „atasan memberi tjontoh kepada bawahan“. Soal „atasan memberi tjontoh kepada bawahan“ tidak hanya dilapangan kehidupan politik dan organisasi, tetapi djuga dilapangan kehidupan sehari<sup>2</sup>.

Dalam hubungan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai, perlu ditegaskan bahwa hal ini hanya bisa terlaksana djika didalam Partai betul<sup>2</sup> terdjamin hegemoni daripada ideologi proletariat, djika ideologi burdjuis ketjil dan ideologi burdjuis selalu dikikis dan dibersihkan dari Partai, sehingga terdjamin kemurnian Partai dilapangan politik, organisasi dan ideologi. Pengerdjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai tidak boleh dianggap sebagai „pekerdjaan musiman“, melainkan pekerdjaan yang harus terusmenerus dilakukan. Selandjutnja perlu ditjatkan bahwa pekerdjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai djuga berarti bahwa kesalahan<sup>2</sup> yang sudah pernah dibut diusahakan djangan sampai terulang lagi dan dipeladjar sungguh<sup>2</sup> sumber dari kesalahan itu. Disinilah pentingnja bagi kader<sup>2</sup> Partai untuk mempelajari se-dalam<sup>2</sup>nja sedjarah Partai kita, sedjarah kesalahan<sup>2</sup>nja, kegagalan<sup>2</sup>nja dan sukses<sup>2</sup>nja.

Berbitjara tentang kewaspadaan, Kongres membenarkan Laporan yang menegaskan pentingnja melawan dengan sekuat tenaga bahaya revisionisme modern. Meskipun perkembangan gerakan Komunis di Indonesia sekarang sudah lebih bersatu dari masa yang lampau dan meskipun gerakan Komunis sedunia yang semakin monolit telah memberikan pukulan yang menentukan kepada revisio-

nisme modern, namun kaum Marxis-Leninis tidak boleh menganggap sepi kenyataan adanya revisionisme kkk Tito. Oleh karena itu: perjuangan melawan revisionisme modern, bahaya utama gerakan Komunis sedunia, tidak boleh menjadi lemah.

Dalam hubungan kewaspadaan ini, juga adalah penting untuk mengembangkan kebiasaan yang sudah ditanamkan sesudah Kongres Nasional ke-V, yaitu kebiasaan mengadakan gerakan pembetulan fikiran.

## 6. Pimpinan Partai Pada Gerakan Massa

Mengenai pekerjaan massa daripada Partai, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa hal ini masih belum memuaskan. Belum cukup banyak perhatian yang diberikan kader<sup>2</sup> Partai pada persoalan<sup>2</sup> praktis daripada massa, malahan sementara kader ada yang meremehkannya, sebab dianggapnya kurang penting dan kurang revolusioner. Perhatian mereka hanya terbatas pada pekerjaan<sup>2</sup> dan aksi<sup>2</sup> yang berkobar-kobar saja. Sudah barang tentu semuanya ini adalah penting, tetapi disamping pekerjaan<sup>2</sup> yang berkobar<sup>2</sup> massa mempunyai banyak sekali persoalan<sup>2</sup> sehari<sup>2</sup> yang pemertahanannya mengharapakan bantuan kaum Komunis. Oleh karena itu benar sekali kesimpulan bahwa untuk memperbaiki pekerjaan massa daripada Partai kita harus berpedoman „berjalan dengan dua kaki“, yaitu mengkombinasikan pekerjaan berkobar<sup>2</sup> dengan pekerjaan tekun, yang meliputi pekerjaan organisasi, pendidikan, politik dan ideologi.

Perlu ditegaskan bahwa sesuatu aksi baru dapat dikatakan berhasil, jika ia membawa persatuan yang lebih erat dikalangan massa, bersamaan dengan itu berhasil mengkonsolidasi pengaruh Partai dan selanjutnya berhasil mempertinggi kwalitet tjarakerdja daripada Partai dan mempertinggi tingkat ideologi daripada aktivis<sup>2</sup> Partai.

Mengenai pekerjaan Partai dikalangan kaum tani, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa kader<sup>2</sup> Partai umumnya belum mengerti benar tentang hubungan<sup>2</sup> agraria dan fungsionaris<sup>2</sup> Partai masih saja banyak yang menghindari pekerjaan didesa. Dalam hubungan ini perlu ditekankan kembali salahsatu kesimpulan Kongres Nasional ke-V, yaitu bahwa „tidak mungkin ada *front nasional yang sungguh*“ dan bahwa „tidak mungkin kita berbitjara tentang peranan memimpin dari Partai Komunis dalam *front* ini selama Partai kita belum dapat mengorganisasi dan memimpin massa kaum tani yang luas.“

Gerakan „turun kebawah“ dengan menjalankan „tiga sama“

mempunyai arti yang besar. Ia telah membikin lebih terang bagi kita, bahwa sisa<sup>2</sup> feodalisme masih mendalam di desa<sup>2</sup>. Ia telah persoalan pokok dalam gerakan tani ialah masalah sandaran dan pimpinan bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun juga kita harus bersandar pada buruhtani dan tanumiskin dan bahwa hanya dengan pimpinan kaum Komunis gerakan kaum tani bisa menjadi sekutu yang akrab dari kelas buruh dalam melawan semua musuh. Rakjat pekerja; bahwa berhubung sasaran perjuangannya kaum tani terdapat di tiap desa yang masing<sup>2</sup> mempunyai kekhususan, r tjarah<sup>2</sup> pengorganisasian kaum buruh pabrik yang masing<sup>2</sup> tidaklah dapat digunakan untuk mengorganisasikan kaum tani, bahwa untuk bisa memobilisasi se-banyak<sup>2</sup>nya kaum tani diperlukan tidak hanya sebuah organisasi tani revolusioner dan organisasi koperasi, tetapi ber-puluh<sup>2</sup> matjam bentuk organisasi lainnya sesuai dengan keadaan penghidupan di desa dan dengan tingkat kebudayaan penduduk yang pada umumnya masih rendah, dan bahwa memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani tidak dapat dipisahkan dari pekerdjaan memperkuat ideologi Partai, sebab hanya dengan kebulatan ideologi bisa terdapat antusiasme yang benar-benar dalam melaksanakan politik agraria Partai. Memang dalam melaksanakan gerakan<sup>2</sup> nasional yang berat harus senantiasa disesuaikan ideologi pimpinan dengan tujuan dan pada gerakan, jika perlu dengan mendjalankan perubahan dalam pimpinan; kebulatan ideologi dalam pimpinan akan melahirkan aksi<sup>2</sup> yang antusias dan sebaliknya aksi<sup>2</sup> yang demikian akan mengkonsolidasi pimpinan dan gerakan.

Dalam usaha memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani, Kongres membenarkan kesimpulan<sup>2</sup> Konferensi Nasional Tani PKI yang dilangsungkan pada pertengahan April 1959. Antara lain yang terpenting adalah sbb.:

*Pertama*, dalam melaksanakan dua tugas pokok Revolusi Indonesia, yaitu menggulingkan imperialisme dan feodalisme, terdapat dua ketjenderungan. Yang pertama ketjenderungan memisahkan dua tugas ini se-olah<sup>2</sup> satu sama lain tidak ada hubungannya, sedangkan yang kedua ialah ketjenderungan yang mau membikin identik dua tugas ini sedjak permulaan. Dalam hubungan ini adalah tepat sepenuhnya kesimpulan yang menyatakan, bahwa jika dilihat dari sudut strategi Revolusi Indonesia dua tugas tsb. sangat erat hubungannya dan tak terpisahkan satu sama lain, tetapi jika dilihat dari sudut taktik dua tugas tsb. tidak bisa dilakukan sekaligus. Dilihat dari sudut taktik pada waktu dan keadaan tertentu seperti sekarang ini, udjung tombak daripada Revolusi pertama<sup>2</sup> harus ditujukan kepada imperialisme dan tuantanah<sup>2</sup> serta burduasi yang menjadi agen<sup>2</sup> imperialisme. Sudah barang tentu ini

tidaklah berarti bahwa PKI sekarang tidak menggabungkan diri pada kaum tani dalam melawan tuantanah. PKI tetap berdiri di-banisan paling depan sekarang dan dikemudian hari dalam membela kepentingan kaum tani. Berdasarkan garis umum ini pada tingkat sekarang PKI memang hanya menuntut pensitaan tanah<sup>2</sup> milik tuantanah<sup>2</sup> imperialis asing dan milik tuantanah bumiputera yang membantu kaum pemberontak kontra-revolusioner, sedangkan mengenai tuantanah<sup>2</sup> bumiputera pada umumnya PKI menuntut penurunan sewa tanah dengan mengadakan sembojan 6 : 4.

Kedua, pembentukan koperasi Rakyat pekerja di d-desa<sup>2</sup>, terutama dengan mengibarkan tiga bendera koperasi, yaitu koperasi kredit, koperasi produksi dan koperasi dijual-beli, untuk melawan penindasan dan pemerasan serta untuk memperbaiki penghidupan Rakyat pekerja.

Ketiga, lewat koperasi<sup>2</sup> produksi mengusahakan sedapat mungkin supaya produksi pertanian meningkat dengan mengadakan 5 prinsip mengerjakan tanah, yaitu *„Luku dalam, tanam rapat, per-banjang rabuk, perbaiki bibit dan pengairan“*.

Mengenai pekerdjaan Partai dikalangan kaum buruh, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa PKI harus terusmenerus memperkuat kedudukannya dikalangan kaum buruh dan menarik bagian terbesar dari massa kaum buruh kefihaknya. Pekerdjaan ber-kobar<sup>2</sup> dari Partai dikalangan kaum buruh sudah makin baik, tetapi pekerdjaan tekun, mendalam dan teliti, yang meliputi pekerdjaan ideologi, pendidikan dan mempersatukan seluruh kaum buruh, masih harus banjak diperbaiki. Setiap perdjjuangan untuk tuntutan sosial ekonomi tidak mungkin dapat dipisahkan dari perdjjuangan politik. Sebaliknya, setiap perdjjuangan politik harus selalu disertai dengan perdjjuangan perbaikan nasib. Pekerdjaan di-basis<sup>2</sup> serikat-buruh harus mendapat perhatian yang lebih besar. Serikatburuh<sup>2</sup> harus memberikan pendidikan tentang Sosialisme kepada massa anggotanya. Demokrasi di-basis<sup>2</sup> harus dipertahankan dan diluaskan. Penempelan koran<sup>2</sup> progresif di-pabrik<sup>2</sup> dan di-tempatkerdja<sup>2</sup> lainnya harus menjadi aktivitet se-hari<sup>2</sup> dari serikatburuh<sup>2</sup>. Semuanya ini harus dipadukan dengan tuntutan<sup>2</sup> politik dan ekonomi dari kaum buruh dipabrik dan lapangan kerdja lainnya yang bersangkutan. Hanya dengan demikian serikatburuh<sup>2</sup> ber-angsur<sup>2</sup> menjadi sekolahan Komunisme. Terutama pekerdjaan dikalangan buruh transpor harus lebih diperbaiki lagi.

Kongres memperkuat kesimpulan, bahwa *„bekerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani tetap merupakan bentuk kegiatan yang terpenting dan pokok daripada PKI. Berhasil atau tidaknya pekerdjaan front nasional sangat tergantung pada berhasil atau tidak-*

nja pekerdjaan dikalangan kaum buruh dan tani. Front nasional adalah front persatuan antara Rakjat pekerdja, jaitu klas buruh, kaum tani dan burdjuasi ketjil diluar kaum tani, dengan kaum penghisap, jaitu burdjuasi nasional. Tanpa adanya front persatuan yang kuat antara Rakjat pekerdja, terutama klas buruh dan kaum tani, tidak mungkin adanya front persatuan nasional yang kuat dan konsekwen anti-imperialisme".

Mengenai pekerdjaan dikalangan massa pemuda Kongres menjetudjui bahwa bekerdja dikalangan massa pemuda pada waktu sekarang adalah salahsatu pekerdjaan massa yang terpenting daripada Partai. Partai harus mendjaga supaya pernyataan kesediaan Pemuda Rakjat menjadi pembantu Partai harus disertai dengan kesediaan dan kesanggupan seluruh Komite Partai memberi pimpinan dan pendidikan yang lebih baik kepada Pemuda Rakjat. Setiap organisasi massa daripada Pemuda Rakjat harus senantiasa didjaga, tetapi bersamaan dengan itu Pemuda Rakjat adalah organisasi massa pemuda yang mempunyai kesedaran klas buruh organisasi pemuda yang paling revolusioner, paling militan dan paling patriotik. Disamping itu Partai harus mendorong maju seluruh gerakan pemuda dan menjadikan seluruh gerakan pemuda pengabd yang setia daripada Rakjat pekerdja dan revolusi.

Mengenai pekerdjaan Partai dikalangan kaum intelektual Kongres membenarkan analisa bahwa berhubungan proses kelahiran dan pertumbuhannya dalam perjuangan melawan kolonialisme, kaum intelektual Indonesia pada umumnya adalah patriotik dan berdjawa anti-kolonialisme yang kuat. Tjita<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 telah lebih menanamkan djiwa kerakjatan pada mereka.

Tetapi sesudah Revolusi Rakjat 1945 mengalami kegagalan dan kaum burdjuis Indonesia sudah terbukti tidak mampu memberikan djalan keluar dari kesulitan<sup>2</sup> yang dihadapi oleh Rakjat dan negeri kita, maka dikalangan kaum intelektual tampak gejala<sup>2</sup> pesimisme. Pada waktu sekarang terdapat dua tipe kaum intelektual dinegeri kita. *Pertama*, kaum intelektual yang menundukkan sifat bimbang dan tidak konsekwen yang merugikan dunia keilmuan. Mereka ini adalah wakil<sup>2</sup> ideologi dari burdjuasi Indonesia, yang kedudukannya lemah dilapangan ekonomi dan politik, dan yang oleh karena itu terpaksa menyesuaikan diri dengan sjarat<sup>2</sup> yang ditentukan oleh kaum imperialis. Malahan djuga ideologi kaum kepalabatu mempunyai wakil<sup>2</sup>nja dalam kalangan kaum intelektual Indonesia. *Kedua*, kaum intelektual yang sudah mulai dilahirkan dan ditjiptakan oleh Rakjat pekerdja Indonesia yang berusaha mengibarkan tinggi tradisi kerakjatan dari kaum intelektual kita.

Tetapi walaupun demikian pekerdjaan Partai dikalangan kaum

intelektuil masih djauh dari memuaskan. Sebab itu para kader Partai jang bekerdja dikalangan kaum intelektuil harus bekerdja lebih giat dan lebih baik lagi dan harus berusaha supaja mendjadi tjontoh dalam memperkaja dan mengembangkan ilmu serta memperkuat azas kerakjatan pada perkembangan ilmu. Para sardjana, pekerdja kebudayaan dan para guru anggota Partai, disamping mempertinggi mutu pengertian teori Marxisme-Leninisme, berke-wadajiban memperluas dan memperdalam keahlian dan pengetahuan mereka masing<sup>2</sup> untuk dapat membantu Partai dalam memberi djawaban jang se-baik<sup>2</sup>nja mengenai soal<sup>2</sup> jang timbul dilapangan ilmu dan kebudayaan atau mempersiapkan diri se-baik<sup>2</sup>nja agar dapat mendjawab soal<sup>2</sup> apa sadja jang dihadapi oleh negeri dan Rakjat.

Mengenai kaum mahasiswa dan peladjar sekolah menengah, disimpulkan bahwa pergeseran kekiri daripada keadaan seluruh kehidupan politik dnegeri kita mempunyai pengaruh jang tidak ketjil dikalangan mereka. Berhubung dengan itu adalah sangat penting bahwa anggota<sup>2</sup> Partai jang mendjadi mahasiswa atau peladjar sekolah menengah dengan sungguh<sup>2</sup> mendjadi mahasiswa atau peladjar jang baik.

Mengenai pekerdjaan dikalangan massa wanita, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa Partai harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah wanita, baik setjara umum maupun didalam Partai sendiri. Partai harus mendidik para wanita Komunis mendjadi wanita jang intelektnja, kemauannja dan perasaannja berkembang se-luas<sup>2</sup>nja dan se-dalam<sup>2</sup>nja. Bersamaan dengan mengkonsolidasi dan meluaskan keanggotaan Partai dikalangan wanita, Partai harus meneruskan usaha menggalang organisasi wanita revolusioner jang besar sebagai sjarat untuk memperkuat seluruh gerakan wanita dan gerakan massa pekerdja Indonesia pada umumnja.

Mengenai pekerdjaan dalam lingkungan sukubangsa<sup>2</sup> jang merupakan salahsatu lapangan jang sangat penting Kongres membenarkan Laporan jang menekankan bahwa dengan duduknja kaum Komunis dalam pemerintahan<sup>2</sup> daerah, bahkan disedjumlah daerah Swatantra II jang Kepala Daerahnja orang Komunis, dan majoritet mutlak anggota DPRD-nja terdiri dari orang<sup>2</sup> Komunis, pekerdjaan Partai dikalangan sukubangsa<sup>2</sup> mengalami kemadjuan<sup>2</sup> penting. Adapun tjara jang pokok untuk memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan sukubangsa<sup>2</sup> ialah dengan memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan kaum tani tiap<sup>2</sup> sukubangsa, karena kaum tani merupakan golongan terbesar daripada penduduk tiap daerah, disamping Partai harus mempergiat usahanja untuk mengembang-

kan kebudayaan tiap<sup>2</sup> sukubangsa.

Selanjutnya mengenai pekerjaan dikalangan minoritet keturunan asing, seperti keturunan Arab Tionghoa dan Eropa Kongres membenarkan kesimpulan bahwa warganegara<sup>2</sup> keturunan asing tidak berbeda dengan warganegara<sup>2</sup> lainnya dan bahwa mereka merupakan potensi yang berguna dalam membangun suatu Indonesia Baru yang demokratis. Partai harus lebih aktif membantu kaum minoritet keturunan asing dalam melawan serangan<sup>2</sup> rasial dan sovini. Partai harus senantiasa menjelaskan kepada Rakyat bahwa musuh yang sedjati dari Rakyat Indonesia adalah imperialisme. Bantuan yang dijudjur kepada warganegara keturunan asing hanya dapat diberikan oleh Partai kita karena Partai Komunis memiliki patriotisme dan internasionalisme proletar yang bebas dari segala bentuk soviniisme dan rasialisme.

## **7. Djadikan Koperasi Djuga Sendjata Ditangan Rakyat Pekerdja**

Mengenai koperasi, Kongres membenarkan kesimpulan bahwa, disamping kita akan tetap waspada dan menentang tiap propaganda dari kaum reaksioner yang mengatakan se-olah<sup>2</sup> dengan koperasi sadja kita dapat mengachiri kekuasaan kaum imperialis, kaum Komunis djuga harus dengan sungguh<sup>2</sup> memakai djalan koperasi untuk mempersatukan Rakyat pekerdja guna mengurangi penghisapan<sup>2</sup> tuantanah, lintahdarat dan kapitalis atas diri Rakyat pekerdja, dan untuk meningkatkan hasil produksi. *Kaum tanimiskin dan tanisedang yang hanya mungkin mentjapai kebebasannya dengan pimpinan proletariat, akan lebih tebal kepertjajaannya kepada proletariat, djika proletariat dapat mengorganisasi dan memimpin mereka dalam koperasi<sup>2</sup> untuk meringankan beban mereka sekarang djuga.*

Koperasi tidak hanya dapat didjadikan sendjata kaum tani, tetapi djuga dapat didjadikan sendjata kaum keradjinantangan, kaum nelajan, kaum buruh, para pegawai, kaum miskin kota, kaum pedagang ketjil, dan malahan djuga kaum peladjar sekolah menengah dan mahasiswa. Undang<sup>2</sup> koperasi yang sudah ada sekarang dapat dipakai untuk memadjukan gerakan koperasi asal dipimpin oleh orang<sup>2</sup> yang dijudjur.

Adalah penting untuk tetap memegang teguh prinsip bahwa gerakan koperasi harus merupakan gerakan yang berdiri sendiri, mempunjai Anggaran Dasar yang demokratis dan dapat mempersatukan sebanyak mungkin koperator<sup>2</sup> setjara<sup>2</sup> sukarela. Kesukarelaan adalah sjarat mutlak daripada koperasi. Selain daripada itu,

stat berdiri, sendiri, dan sifat non-politik daripada koperasi harus didjaga dengan teguh.

Dengan memperkuat dan memperluas gerakan massa dan demokrasi, serta dengan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai, Kongres yakin bahwa PKI pasti mentjapai sukses<sup>2</sup> yang lebih besar dalam memimpin perjuangan Rakyat Indonesia untuk mentjapai tujuan strategisnya, yaitu Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis.

Kongres berseru agar kaum Komunis lebih bersatu lagi untuk dengan sekuat tenaga membangkitkan, memobilisas, dan mengorganisasi massa untuk melaksanakan tuntutan<sup>2</sup> mendesak Rakyat dan Partai, yaitu peluasan hak<sup>2</sup> demokrasi dan pembentukan Kabinet Gotongrojong.



## RESOLUSI

### PENSAHAN PERUBAHAN KONSTITUSI PKI

Kongres Nasional ke-VI PKI, yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 sampai dengan 14 September 1959, setelah mendengar pidato pengantar tentang perubahan Konstitusi PKI yang disampaikan oleh Kawan M. H. Lukman, mensahkan dengan suara bulat perubahan Konstitusi PKI.

Kongres berkejakinan bahwa Konstitusi yang telah disempurnakan berdasarkan pengalaman<sup>2</sup> PKI sendiri dan pengalaman<sup>2</sup> gerakan kelas buruh sedunia itu merupakan senjata yang ampuh untuk menjadikan PKI makin tersebar diseluruh negeri dan ber-karakter massa luas, serta semakin bulat persatuannya dalam ideologi, organisasi dan politik.



## KONSTITUSI PKI

### P R E A M B U L

Partai Komunis Indonesia (PKI) ialah barisan depan yang ter-organisasi dan bentuk organisasi kelas yang tertinggi daripada kelas proletar Indonesia. PKI mewakili kepentingan<sup>2</sup> nasion dan Rakyat Indonesia. Dalam tingkat sekarang PKI berjuang untuk mentjuptakan sistim Demokrasi Rakyat di Indonesia, sedangkan tujuannya yang lebih lanjut ialah mewujudkan masyarakat Sosialis dan masyarakat Komunis Indonesia.

Seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme. Karena Marxisme-Leninisme bukanlah suatu dogma, melainkan suatu pedoman untuk aksi, maka dalam setiap aktivitetnya PKI berpegang kepada prinsip memadukan kebenaran<sup>2</sup> umum Marxisme-Leninisme dengan praktek yang nyata daripada perjuangan revolusioner Indonesia. PKI berjuang melawan tiap fikiran yang tidak kritis, melawan dogmatisme dan empirisme. PKI juga berjuang melawan revisionisme, baik yang lama maupun modern.

Dengan berdasarkan pandangan-dunia materialisme dialektik dan materialisme histori Marxis-Leninis, PKI menerima setjara kritis peninggalan<sup>2</sup> sedjarah Indonesia maupun luar negeri dan menentang pandangan-dunia idealisme dan metafisika.

Karena Indonesia masih belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal karena tenaga penggerak revolusi Indonesia adalah klas buruh, kaum tani, klas burdjuis ketjil dan elemen<sup>2</sup> demokratis lainnya yang diruqikan oleh imperialisme, karena di Indonesia sudah ada Partai Komunis yang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh, dan karena keadaan<sup>2</sup> internasional sekarang, semuanya ini menentukan bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi burdjuis-demokratis tipe baru atau revolusi burdjuis demokratis dalam zaman imperialisme dan revolusi proletar dunia. Revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi Demokrasi Rakjat jaitu revolusi daripada massa Rakjat yang luas, yang dipimpin oleh proletariat, dan ditudjukan untuk melawan imperialisme, feodalisme dan burdjuasi komprador. Revolusi Indonesia mempunyai banyak sekutu didalam dan diluar negeri. Oleh sebab itu kewajiban PKI dalam tingkat sekarang ialah: *kedalam* mengorganisasi dan mempersatukan kaum buruh, kaum tani dan nelayan, kaum intelektual, pengusaha ketjil, pengusaha nasional, warganegara keturunan asing, semua sukubangsa dan semua elemen anti-imperialis dan anti-feodal, pendeknja, mempersatukan keseluruhannja ini didalam satu front nasional dengan menjadikan persekutuan klas buruh dan kaum tani sebagai dasarnya dan dipimpin oleh klas buruh; *keluar*, bersatu dengan proletariat internasional, dengan semua Rakjat yang tertindas, bangsa<sup>2</sup> yang terdjadjah dan nasion<sup>2</sup> yang memandang kita sederadja, yang mentjintai kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian dunia. Semuanya ini adalah untuk mentjiptakan sjarat<sup>2</sup> bagi pembentukan Pemerintah Republik Indonesia yang konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal, yang mampu melikwidasi kekuasaan kaum imperialis, tuantanah dan burdjuasi komprador, sehingga bisa mengubah Indonesia dari negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal menjadi negeri yang merdeka penuh, demokratis, makmur dan maju. Pemerintah yang demikian ini adalah Pemerintah yang mendasarkan dirinja atas massa, pemerintah front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani dibawah pimpinan klas buruh, jaitu Pemerintah Demokrasi Rakjat. Pemerintah Demokrasi Rakjat bukanlah diktatur proletariat, melainkan diktatur Rakjat, ialah diktatur bersama dari semua klas revolusioner anti-imperialisme dan anti-feodalisme; dan ia tidak melaksanakan perubahan<sup>2</sup> sosialis melainkan perubahan<sup>2</sup>

demokratis.

Selanjutnya, jika revolusi Indonesia yang bersifat nasional dan demokratis sudah menjapai kemenangan sepenuhnya kewajiban PKI nanti ialah mengambil langkah<sup>2</sup> yang diperlukan untuk mewujudkan sistim Sosialisme dan sistim Komunisme di Indonesia sesuai dengan kebutuhan perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia serta sesuai dengan kehendak Rakyat Indonesia.

Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal adalah negeri kepulauan yang luas yang banyak penduduknya tetapi tidak merata dan terdiri dari banyak suku-bangsa dan yang kemadjuannya tidak sama. Disatu pihak massa Rakyat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani, mempunyai tradisi revolusioner didalam perjuangan melawan penindasan kolonial difihak lain, terdapat rintangan<sup>2</sup> yang besar yang menghalangi dialaminya revolusi. Faktor<sup>2</sup> inilah yang menentukan perkembangan yang tidak sama daripada revolusi Indonesia menyebabkan revolusi memakan waktu lama dan bersifat pelik. Untuk bisa memimpin revolusi yang memakan waktu lama dan bersifat pelik ini, PKI harus mendalikan taktik membawa madju perjuangan revolusioner daripada Rakjat dengan pelahan dan ber-hati<sup>2</sup> tetapi pasti, dan dengan tidak henti<sup>2</sup>nya melawan dua ketjenderungan, yaitu ketjenderungan kapitulasi dan avonturisme yang ke-dua<sup>2</sup>nya bersumber kepada ketidakuletan burdjuis ketjil. Perjuangan yang memakan waktu lama memang bisa menimbulkan bahaya bahwa orang<sup>2</sup> yang lemah dalam teori dan tidak berkarakter akan menjalankan politik kapitulasi atau avonturisme. Pengalaman revolusi Indonesia menunjukkan bahwa penjakit oportuniste, penjakit kapitulasi dan avonturisme, adalah musuh<sup>2</sup> revolusi yang berbahaya. Supaya stabil dan kuat, PKI harus melakukan perjuangan yang tepat dan tidak mengenal ampun terhadap anasir berbahaya ini.

PKI yang didirikan pada 23 Mei 1920 adalah pewaris dan penerus perjuangan yang heroik dan revolusioner dari Rakjat Indonesia. Perjuangan yang heroik dari Rakjat Indonesia dibuktikan oleh perlawanan<sup>2</sup> Rakjat terhadap pendjadjahan Belanda dengan adanya Perang Banten, Perang Surapati, Perang Timor, Perang Tondano, Perang Diponegoro, Perang Pattimura, Perang Hasanuddin, Perang Bondjol, Perang Palembang, Perang Bandjar/Dajak, Perang Atjeh, Perang Batak, Perang Lombok, Perang Puputan, Perang Djambi dan lain<sup>2</sup>nya, pemberontakan Rakjat tahun 1926, pemberontakan „Zeven Provinciën“, perlawanan terhadap fasis Djepang, diantaranya di Blitar, Singaparna, Tanah Karo, Baju dan Pandrah, perlawanan terhadap provokasi Madiun dan perlawanan terhadap pemberontakan<sup>2</sup> separatis dan kontra-

revolusioner.

Revolusi Agustus 1945 dengan perlawanan<sup>2</sup> terhadap perang<sup>2</sup> kolonial yang diadakan oleh kaum kolonialis Belanda adalah puncak daripada perjuangan heroik yang memberikan tradisi revolusioner yang paling luas dan mendalam kepada seluruh Rakyat Indonesia. Dalam Revolusi Agustus ini kaum Komunis mengambil bagian yang sangat aktif, baik dalam waktu persiapan untuk Proklamasi maupun dalam menjalankan setiap bagian daripada roda revolusi sampai kepada pertempuran<sup>2</sup> di front yang terdepan melawan tentara kolonial Belanda. Tetapi Revolusi Agustus 1945 telah gagal karena terutama massa tani yang ber-djuta<sup>2</sup> tidak dibangkitkan dan ditarik kedalam revolusi, disamping karena pengkhianatan burdjuasi komprador. Klas buruh pada waktu itu kurang sadar akan rolnja sebagai pemimpin revolusi. PKI sebagai Partai klas proletar telah kehilangan kebebasanja dalam lapangan organisasi dan politik. PKI kurang faham akan watak khusus daripada revolusi Indonesia dan kurang faham akan hakekat daripada front persatuan nasional. Semua kekurangan ini bersumber pada kelemahan dilapangan ideologi. Dengan dilaksanakannya Resolusi „Djalan Baru untuk Republik Indonesia“, maka kekurangan<sup>2</sup> itu setjara ber-angsur<sup>2</sup> dapat diatasi. Dan dengan suksesnja Kongres Nasional ke-V Partai dalam tahun 1954 kekurangan<sup>2</sup> tersebut telah dapat diatasi.

Pekerdjaan Partai sekarang adalah berat dan pelik. Masalah yang langsung dan segera kita hadapi ialah masalah penggalangan front persatuan nasional yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani dan masalah pembangunan Partai. Sebab itu, bekerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani adalah bentuk kegiatan Partai yang terpenting dan pokok. Anggota<sup>2</sup> Partai harus memimpin aksi<sup>2</sup> yang mengenai kepentingan langsung dari massa serta memberikan pendjelasan<sup>2</sup> yang terusmenerus, dengan tidak djemu<sup>2</sup>, dengan sistematik kepada massa Rakyat banjak (kaum buruh, kaum tani dan nelayan, kaum intelektual, kaum pengusaha ketjil, pengusaha nasional dan golongan<sup>2</sup> Rakyat yang demokratis lainnja) supaya mereka ini bisa dipisahkan dari kaum burdjuis komprador dan kaum tuantanah yang erat hubungannya dengan kekuasaan imperialisme. Untuk persatuan seluruh bangsa dan Rakyat Indonesia yang terdiri dari banjak sukubangsa dan minoritet keturunan asing, seperti keturunan Arab, Eropa dan Tionghoa, dan yang menganut berbagai kepertjajaan agama, PKI memperdjuangkan pelaksanaan politik hak sama bagi semua sukubangsa dengan tidak memandang perbedaan besar atau ketjil, dan madju atau terbelakangnja dan pelaksanaan politik hak sama bagi semua war-

ganegara dengan tidak memandang asal keturunan dan kepercayaan agamanya.

PKI berjuang untuk perdamaian dunia dan kerdjasama setjara damai diantara semua negeri atas dasar kemerdekaan dan persamaan penuh semua Rakyat dan nasion. PKI menjokong perjuang-an anti-imperialis dari Rakyat negeri<sup>2</sup> djadjaan dan tergantung.

Berhubung dengan keadaan dunia sekarang, yaitu disatu pihak kekuatan<sup>2</sup> Sosialisme dan demokrasi telah sangat bertambah besar diseluruh dunia, dan ide<sup>2</sup> Sosialisme sedang semakin menguasai hati seluruh umatmanusia pekerdja karena keunggulan<sup>2</sup> sistim Sosialisme atas kapitalisme semakin hari semakin nyata menampilkan diri, sedangkan di pihak lain kekuatan<sup>2</sup> imperialisme telah menjadi djauh lebih lemah, dan karena kekuatan yang terpokok dari-pada klas tuantanah serta komprador Indonesia sebenarnya terletak pada bantuan imperialisme, maka adalah suatu kemungkinan bahwa sistim Demokrasi Rakyat sebagai tingkat peralihan ke Sosialisme di Indonesia ditjapai dengan djalan damai, djalan parlementer. PKI dengan sekuat tenaga berjuang untuk menjadikan kemungkinan ini suatu kenyataan. Djika bergantung kepada PKI, djalan damai, djalan parlementer inilah yang dipilih.

Tetapi Marxisme-Leninisme mengadjarkan kepada kita, bahwa klas<sup>2</sup> yang berkuasa — untuk Indonesia ialah kaum imperialis, tuantanah dan komprador — tidak pernah menjerahkan kekuasaan mereka dengan sukarela. Tadjam atau kurang tadjamnya per-djuangan, digunakan atau tidak digunakannya kekerasan dalam peralihan ke Sosialisme adalah bergantung kepada klas penghisap, bergantung kepada apakah klas penghisap itu sendiri menggunakan kekerasan, dan bukan bergantung kepada klas buruh.

Oleh karena itulah PKI harus tetap menundjukkan kewaspadaan yang se-besar<sup>2</sup>nja. Apapun djuga bentuk peralihan kesistim Demokrasi Rakyat di Indonesia, namun faktor yang menentukan dan mutlak ialah : pimpinan PKI dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa Rakyat, terutama kaum buruh dan kaum tani, untuk mengubah imbalanced kekuatan antara kaum imperialis, tuantanah dan burdjus komprador disatu pihak, dan kekuatan Rakyat di pihak lain.

Dengan tetap mengingat sifat<sup>2</sup> khusus daripada revolusi Indonesia, yang menetapkan djalan yang khusus bagi Indonesia menuju Sosialisme, PKI menarik pelajaran dari pengalaman yang kaya dan banjak dari gerakan kaum buruh seluruh dunia, dari Uni Sovjet dan Tiongkok serta negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis umumnja. Dalam perdjalan revolusi yang lama, PKI harus mempunyai tjukup keberanian, keuletan, pengalaman dan keahlian dalam membangkit-

kan, mengorganisasi dan memobilisasi Rakjat jang ber-djuta<sup>2</sup>, harus bisa mengatasi semua kesulitan dan rintangan<sup>2</sup> serta menghindarkan diri dari bentjana<sup>2</sup> jang mungkin datang untuk madju kemuka kearah tudjuannya, dan bersamaan dengan itu tidak henti<sup>2</sup>nja memperbadja barisannya sendiri.

Dalam perdjjuangan revolusioner, PKI harus berusaha mendjadi teras daripada semua organisasi massa revolusioner. PKI djuga harus melakukan perdjjuangan jang tidak mengenal ampun melawan aktivitet didalam dan diluar Partai jang bermaksud merusak revolusi dengan djalan memetjahbelah persatuan klas buruh dan memetjah persekutuan antara klas<sup>2</sup> jang revolusioner.

PKI tidak boleh menutup-nutupi kesalahan<sup>2</sup> dan kekurangan<sup>2</sup> dalam pekerdjaannya. Tidak ada partai politik atau orang jang bebas dari kekurangan dan kesalahan<sup>2</sup> didalam pekerdjaan. Oleh karena itu PKI dan segenap anggotanya harus terusmenerus melaksanakan kritik dan selfkritik untuk memeriksa kesalahan<sup>2</sup> dan kekurangan<sup>2</sup>nja, sehingga dapatlah dikoreksi kesalahan<sup>2</sup> dan kekurangan<sup>2</sup> itu tepat pada waktunya dan dapat mendidik anggota, kader serta Rakjat PKI menentang sikap sombong, sikap jang tidak mau mengakui kesalahan<sup>2</sup> dan kekurangan<sup>2</sup> serta takut pada kritik dan selfkritik. Sebaliknya PKI menuntut kepada setiap organisasi dan anggotanya untuk mengembangkan kritik dan selfkritik, terutama sekali untuk mendorong dan membantu kritik dari bawah didalam Partai dan kritik terhadap Partai oleh massa Rakjat. PKI melarang segala bentuk tekanan terhadap kritik. Terhadap anggota<sup>2</sup> Partai jang membuat kesalahan, Partai dengan tudjuan , mengobati penjakit dan menjembuhkan sisakit" harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap didalam Partai dan menerima pendidikan serta membantu mereka untuk memperbaiki kesalahan<sup>2</sup>nja, asal sadja kesalahan<sup>2</sup> itu bisa diperbaiki didalam Partai dan anggota jang berbuat salah itu sendiri bersedia untuk memperbaiki kesalahan<sup>2</sup>nja. Tetapi terhadap mereka jang mempertahankan kesalahan<sup>2</sup>nja dan melakukan aktivitet jang merugikan Partai, adalah suatu keharusan untuk melakukan perdjjuangan jang gigih terhadap mereka bahkan sampai kepada pemetjatan mereka dari Partai.

Kaum Komunis Indonesia harus mentjurahkan segenap tenaga dan fikirannya untuk mengabdikan kepada Rakjat. Kaum Komunis Indonesia harus mengadakan hubungan<sup>2</sup> jang luas dengan massa buruh, kaum tani dan semua Rakjat revolusioner lainnya serta terusmenerus mentjurahkan perhatiannya untuk memperkuat dan memperluas hubungan<sup>2</sup> ini. Tiap anggota Partai harus mengerti bahwa kepentingan<sup>2</sup> Partai adalah sama dengan kepentingan<sup>2</sup> Rakjat, dan

bahwa tanggungjawab terhadap Partai adalah sama dengan tanggungjawab terhadap Rakyat. Tiap anggota Partai harus memperhatikan dengan teliti suara Rakyat, mengerti kebutuhan<sup>2</sup>nya yang urgen dan membantu mereka berorganisasi untuk memperjuangkan kebutuhan<sup>2</sup>nya. Tiap anggota Partai harus senantiasa bersedia untuk beladjar dari massa Rakyat dan bersamaan dengan itu dengan tidak djemu<sup>2</sup>nya senantiasa bersedia mendidik Rakyat dalam semangat revolusioner untuk membangkitkan dan meninggikan kesedarannya. PKI harus yakin bahwa terpisah dari Rakyat berarti bahaya. PKI harus senantiasa mengawasi, mentjegah dan memberantas segala penyakit subjektivisme yang bisa mengasingkan Partai dari massa, seperti sektarisme, komandoisme, birokrasi, liberalisme, dsb.

PKI diorganisasi atas dasar sentralisme-demokratis yang berarti sentralisme diatas dasar demokrasi dan demokrasi dengan pimpinan yang terpusat. Sentralisme-demokratis menghendaki bahwa setiap organisasi Partai mentaati sepenuhnya prinsip pimpinan kolektif yang dipadukan dengan pertanggungjawab perseorangan, dan bahwa setiap anggota dan organisasi Partai wajib tunduk kepada pengawasan Partai dari atas dan dari bawah.

Demokrasi didalam Partai tidak boleh terpisah dari sentralisme. PKI adalah organisasi yang bersatu dan militan dengan disiplin yang berdasarkan kejujuran dan berlaku untuk semua anggotanya. Kekuatan PKI terletak didalam solidaritetnya yang teguh dalam kesatuan kemauannya dan kesatuan aksinya. Didalam Partai tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar garis politik dan prinsip<sup>2</sup> organisasi Partai, djuga tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa memetjah Partai atau aktivitas faksionil, tidak boleh melakukan tindakan semaunya sendiri lepas dari Partai atau menempatkan perseorangan diatas badan kolektif Partai.

PKI mewadjudkan kepada setiap anggotanya mentaati Konstitusi Partai, menempatkan kepentingan Partai diatas kepentingan perseorangan, beladjar dan bekerdja aktif serta bersedia berkorban untuk melaksanakan Program dan putusan<sup>2</sup> Partai guna mentjapai kebebasan dan kebahagiaan nasyon serta Rakyat Indonesia.

## Bab I

### Bendera, Lambang, Lagu dan Sumpah Partai

*Fasal 1.* Bendera Partai berwarna merah, berukuran pandjang dan lebar 3 : 2, dengan palu-arit berwarna kuning disudut kiri atas dalam ruangan seperenam luas bendera.

*Fasal 2.* Lambang Partai adalah sebagai berikut :

- Bintang merah berudjung lima dengan palu-arit ditengan-tengahnja;
- Bendera nasional Merah-Putih diatasnja;
- Padi dan kapas dikanan kirinja; dan
- Nama PKI sebagai singkatan resmi Partai Komunis Indonesia dibagian bawah.

*Fasal 3.* Lagu klas buruh sedunia „Internationale” adalah juga lagu PKI.

*Fasal 4.* Sumpah Partai adalah sebagai berikut :

„Saja . . . . . menyatakan persetudjuan saja pada Program dan Konstitusi Partai Komunis Indonesia, dan dengan ini, menjatakan kesediaan saja untuk mendjadi tjalonanggota/anggota PKI.

„Saja bersumpah akan memenuhi semua kewadjuan Partai; memelihara kesatuan Partai; melaksanakan putusan<sup>2</sup> Partai; mendjadi tjontoh dalam perdjungan untuk tanahair dan Rakjat; berusaha mendjadi tjontoh dalam kehidupan se-hari<sup>2</sup>; meneguhkan hubungan massa dengan Partai; berusaha memperdalam kesedaran dan menguasai prinsip Marxisme-Leninisme; berterusterang dan dju-djur kepada Partai; mentaati disiplin Partai; mendjaga keselamatan Partai.

„Demikianlah pernyataan dan sumpah saja kepada Partai Komunis Indonesia, Partai jang saja djundjung tinggi dan saja tjintai”.

Sumpah ini diutjapkan pada saat seseorang diterima mendjadi tjalonanggota Partai dan pada saat seseorang tjalonanggota disahkan mendjadi anggota Partai.

## Bab II

### Keanggotaan

*Fasal 5.* Jang dapat diterima mendjadi anggota Partai ialah setiap warganegara Indonesia jang berumur se-kurang<sup>2</sup>nja 18 tahun, jang menjetudju Program dan Konstitusi Partai, menjetudju untuk masuk dan bekerdja didalam salahsatu organisasi Partai, untuk mendjalankan putusan<sup>2</sup> Partai dan membayar uang pangkal dan iuran Partai.

*Fasal 6.* Kewadjuan<sup>2</sup> anggota Partai adalah sebagai berikut :

- a. Mengundjung rapat<sup>2</sup> dan kursus<sup>2</sup> Partai, membatja dan menjebarkan harian serta penerbitan<sup>2</sup> Partai;
- b. Berusaha dengan radjin mempeladjadi dan terusmenerus mempertinggi pengertian tentang Marxisme-Leninisme serta menggunakannya dalam memetjahkan masalah<sup>2</sup> kongkrit;
- c. Memperteguh solidaritet dan persatuan Partai;
- d. Terusmenerus mempertinggi pengertian tentang garis politik

Partai dan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dengan demikian dapat lebih aktif mengambil bagian dalam gerakan revolusioner di Indonesia;

- e. Sungguh<sup>2</sup> mentaati Konstitusi Partai dan menjunjung tinggi moral Komunis;
- f. Menempatkan kepentingan Partai, yaitu kepentingan massa Rakjat diatas kepentingan perseorangan;
- g. Mengabdikan dengan sepenuh jiwa dan raga kepada massa Rakjat dan mengeratkan hubungan dengan massa Rakjat beladjar dari massa Rakjat, dengan sungguh<sup>2</sup> memperhatikan keinginan dan suara massa Rakjat serta melaporkannya kepada Partai tepat pada waktunya, menjelaskan politik dan putusan<sup>2</sup> Partai kepada massa Rakjat;
- h. Menjadi tontoh dalam menjalankan disiplin organisasi<sup>2</sup> revolusioner, menguasai garis pekerjaannya dan menjadi teladan dalam berbagai lapangan pekerjaan revolusioner.
- i. Melaksanakan kritik dan selfkritik mengemukakan kekurangan dan kesalahan dalam pekerjaan dan berusaha sungguh<sup>2</sup> untuk mengatasi serta membetulkannya; dan menentang rasa puas diri yang berlebih<sup>2</sup>an dan sikap sombong karena mendapatkan hasil<sup>2</sup> dalam pekerjaan;
- j. Setia dan dijudjur kepada Partai, tidak menutup-nutupi dan memutarbalikkan keadaan yang sebenarnya;
- k. Senantiasa waspada menghadapi segala sesuatu didalam maupun diluar Partai yang membahayakan keselamatan Partai serta melawan gejala<sup>2</sup> yang merugikan kepentingan Partai dan Rakjat.

Setiap anggota Partai tanpa memandang jasa dan fungsinya yang tidak memenuhi kewajiban<sup>2</sup> tersebut diatas dikritik dan dididik. Setiap pelanggaran yang serius terhadap kewajiban<sup>2</sup> itu, berarti pelanggaran terhadap disiplin Partai dan dikenakan tindakan disiplin.

Fasal 7. Hak<sup>2</sup> anggota Partai adalah sebagai berikut :

- a. Mengambil bagian dalam diskusi yang bebas dalam rapat<sup>2</sup> atau penerbitan<sup>2</sup> Partai tentang masalah<sup>2</sup> teoritis dan praktis yang bersangkutan dengan politik Partai;
- b. Memilih dan dipilih didalam Partai;
- c. Mengajukan usul, keterangan, atau pengaduan kepada tiap organisasi Partai, sampai kepada Komite Central (CC);
- d. Mengkritik sesuatu organisasi Partai atau seseorang fungsionaris dalam rapat<sup>2</sup> Partai;
- e. Meminta turut hadir pada waktu organisasi Partai memutuskan tindakan disiplin atau menetapkan penilaian atas watak dan

pekerdjaannja;

- f. Mempertahankan pendiriannja djika tidak menjetudjui sesuatu putusan, disamping harus melaksanakan putusan itu dengan tidak bersjarat. Perbedaan pendirian itu hanya boleh dikemukakan kepada badan pimpinan Partai.

Anggota<sup>2</sup> Partai dan anggota<sup>2</sup> jang bertanggungjawab dari organisasi Partai jang tidak menghargai hak<sup>2</sup> tersebut diatas dikritik dan dididik; pelanggaran hak<sup>2</sup> anggota merupakan pelanggaran terhadap disiplin Partai dan dikenakan tindakan disiplin.

*Fasal 8.* Keanggotaan Partai berlaku hanya atas perseorangan sesuai dengan tjara<sup>2</sup> mengatur penerimaan anggota sebagai berikut:

- a. Kaum buruh, buruhtani, tanimiskin atau kaum miskin kota dapat menjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort serta disahkan oleh Komite Subseksi (CSS), dan sesudah melalui masatjalan selama 6 bulan;
- b. Tanisedang, pegawai kantor, kaum intelektual atau pekerdja merdeka (dokter, advokat dll.), dapat menjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai jang masing<sup>2</sup> sudah menjadi anggota se-kurang<sup>2</sup>nja 1 tahun terusmenerus, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort serta disahkan CSS, dan sesudah melalui masatjalan selama 1 tahun;
- c. Seseorang jang kedudukan sosialnja lain daripada jang tertjantum dalam a atau b diatas dapat menjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai, jang masing<sup>2</sup> sudah menjadi anggota se-kurang<sup>2</sup>nja 3 tahun terusmenerus, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort serta disahkan oleh Komite Seksi (CS), dan sesudah melalui masatjalan selama 2 tahun;
- d. Anggota biasa dari partai politik lain jang sudah keluar dan akan masuk Partai kita dapat menjadi anggota Partai atas tanggungan 2 orang anggota Partai jang masing<sup>2</sup> sudah menjadi anggota se-kurang<sup>2</sup>nja 3 tahun terusmenerus dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort serta disahkan oleh CS.  
Untuk anggota pengurus daerah dari partai politik lain jang sudah keluar dan akan masuk Partai kita kedua penanggunjnja sudah menjadi anggota Partai se-kurang<sup>2</sup>nja 5 tahun terusmenerus, dan sesudah diterima oleh putusan rapat Resort dan disahkan oleh Komite Daerah Besar (CDB) atau CC. Untuk anggota pengurus jang mempunyai kedudukan tinggi (pengurus pusat) dari partai politik lain jang sudah keluar dan masuk kedalam Partai kita, pensahannja harus oleh CC. Dalam se-

mua keadaan tersebut, dibutuhkan masatjalan selama 2 tahun. Anggota Partai yang sudah dipetjat bisa diterima kembali menjadi anggota hanya atas putusan Komite Partai yang pernah memetjatnja, atau oleh Komite Partai yang lebih tinggi menurut ketentuan tjara<sup>2</sup> mengatur penerimaan anggota.

*Fasal 9.* Setiap anggota Partai yang menanggung seseorang yang akan menjadi tjalonanggota Partai harus memberikan keterangan yang bertanggungjawab dan benar kepada Partai tentang ideologi, karakter dan riwayat hidup dari orang yang bersangkutan, dan sebelum mengusulkan harus memberi keterangan tentang Program dan Konstitusi Partai kepada orang tersebut. Tiap<sup>2</sup> orang yang mau masuk Partai harus menged<sup>2</sup> dan permin-taan dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan oleh Partai.

Sebelum mengambil putusan atau mensahkan penerimaan seseorang tjalonanggota, Komite Partai yang bersangkutan menuadjudk fungsionaris Partai untuk bertukar fikiran se-luasnja dengan orang yang mau menjadi tjalonanggota itu supaya dapat menge-tahui dan memeriksanya setjara teliti.

*Fasal 10.* Dalam keadaan istimewa, CSS dan Komite<sup>2</sup> Partai yang lebih tinggi bisa langsung menerima anggota baru.

*Fasal 11.* Selama masatjalan organisasi<sup>2</sup> Partai yang bersangkutan memberikan didikan elementer Partai dan mengawasi kwalitet politik tjalonanggota.

Kewadyban<sup>2</sup> dan hak<sup>2</sup> tjalonanggota sama dengan anggota Partai, hanya sadja tidak berhak untuk memilih, dipilih dan tidak mempunyai hak suara dalam mengambil putusan.

*Fasal 12.* Setelah masatjalan selesai, penerimaan menjadi anggota ditetapkan tepat pada waktunya oleh rapat Resort dan disahkan oleh CSS atau oleh Komite Partai yang lebih tinggi.

Rapat Resort atau Komite Partai bisa memperpanjang atau memperpendek masatjalan seseorang tjalonanggota, berdasarkan belum atau sudah dipenuhinja sjarat<sup>2</sup> keanggotaan Partai.

Perpendjangan masatjalan bisa diberikan paling lama sama dengan lama masatjalan dari tjalonanggota yang bersangkutan.

Kedudukan tjalonanggota ditjabut apabila ternyata selama masatjalan tidak memenuhi sjarat untuk menjadi anggota Partai.

*Fasal 13.* Masatjalan dihitung mulai dari tanggal penetapan penerimaan sebagai tjalonanggota oleh rapat Resort.

Usia keanggotaan Partai dihitung sedjak tanggal penetapan penerimaan dari tjalonanggota menjadi anggota Partai oleh rapat Resort.

Anggota yang sudah pernah dipetjat dan masuk kembali dalam Partai, usia keanggotaannya dihitung sedjak tanggal penetapan

penerimaannya kembali sebagai anggota.

*Fasal 14.* Anggota atau tjalonanggota yang pindah ketempat lain, menjadi anggota atau tjalonanggota dari organisasi Partai ditempat yang baru dengan memberikan surat keterangan dari Komite Partai yang ditinggalkan.

*Fasal 15.* Tjalonanggota atau anggota Partai mempunyai kebebasan untuk keluar dari Partai. Jika seseorang minta keluar dari Partai rapat Resort mengambil putusan untuk menghapuskan nama orang tersebut dari daftar keanggotaan Partai, dan melaporkannya kepada Komite Partai yang langsung diatasnya.

Komite yang bersangkutan jika menganggap perlu dapat men-tjaba untuk menjarankan supaya tjalonanggota atau anggota tersebut membatalkan keinginannya untuk keluar.

Apabila seseorang anggota minta keluar dari Partai, padahal telah melakukan pelanggaran<sup>2</sup> disiplin yang berat yang bisa menjadi alasan untuk pemecatannya, maka pemberhentiannya din-jatkan sebagai pemecatan.

*Fasal 16.* Anggota atau tjalonanggota yang dalam tempo 6 bulan, sesudah diperingatkan tetap tidak mengambil bagian dalam kehidupan Partai, tidak menjalankan pekerjaan Partai atau tidak membayar iuran Partai, tanpa alasan yang sah, dianggap dengan sendirinya keluar dari Partai, dan putusan untuk menghapuskan namanya dari daftar keanggotaan Partai dilakukan oleh Rapat Resort dan dilaporkan kepada Komite Partai yang langsung diatasnya untuk disahkan.

*Fasal 17.* Terhadap anggota Partai yang melanggar disiplin Partai, organisasi Partai dari semua tingkat dapat mengambil tindakan disiplin sesuai dengan kesalahannya seperti peringatan, per-ingatan keras, pemindahan dari pekerjaan yang sudah ditentukan, pemberian tugas pertjobaan atau pemecatan dari Partai.

Waktu untuk anggota Partai yang diberi tugas pertjobaan tidak boleh lebih dari setahun, dan selama itu hak serta kewajibannya sama dengan tjalonanggota. Anggota Partai yang menjalankan tugas pertjobaan setelah terbukti dapat membetulkan kesalahannya, haknya sebagai anggota Partai dipulihkan, dan masa selama menjalankan tugas pertjobaan itu terhitung juga dalam usia keang-gotaannya; tetapi apabila ternyata tidak lajak lagi menjadi ang-gota Partai, dipetjat dari Partai.

*Fasal 18.* Setiap tindakan disiplin yang dikenakan pada ang-gota Partai diputuskan oleh Rapat Resort dan disetujui oleh Ko-misi Kontrol atau Komite Partai yang lebih tinggi.

Dalam keadaan istimewa setiap Komite Partai bisa mengambil tindakan disiplin terhadap anggota Partai dengan persetujuan

dari Komisi Kontrol atau Komite Partai yang langsung di atasnya

*Fasal 19.* Setiap putusan mengenai pemindahan dari pekerjaan yang sudah ditentukan, pemberian tugas pekerjaan atau pemecatan dari Partai terhadap anggota Komite Partai hanya boleh diambil oleh Konferensi yang memilihnya. Dalam keadaan mendesak, putusan itu bisa diambil oleh Sidang Pleno Komite Partai yang bersangkutan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Komite Partai dan disahkan oleh Komite yang langsung di atasnya.

*Fasal 20.* Setiap putusan mengenai pemindahan pekerjaan yang sudah ditentukan, pemberian tugas pekerjaan atau pemecatan terhadap anggota atau calon anggota Komite Central diambil oleh Sidang Pleno Komite Central dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Komite Central dan disahkan oleh Kongres Nasional Partai.

*Fasal 21.* Pemecatan dari Partai adalah tindakan disiplin yang paling keras. Dalam mengambil atau mensahkan putusan pemecatan itu, setiap organisasi Partai harus sangat berhati-hati, memeriksa dan mempelajari setjara seksama bahan<sup>2</sup> persoalannya dan dengan teliti mendengarkan pembelaan anggota Partai yang bersangkutan.

*Fasal 22.* Setiap organisasi Partai yang akan mendiskusikan atau memutuskan tindakan disiplin terhadap anggota Partai, terketjuali dalam keadaan istimewa, harus memberitahu anggota tersebut supaya hadir dalam rapat untuk membela diri. Apabila anggota Partai yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan disiplin itu, ia boleh mengajukan permintaan supaya persoalannya dipertimbangkan kembali dan mengajukan banding kepada Komite Partai yang lebih tinggi, kepada Komisi Kontrol sampai kepada Komite Central. Organisasi Partai dari semua tingkat harus mengurus dengan sungguh<sup>2</sup> atau meneruskan permintaan banding secepat<sup>2</sup>nja.

### Bab III

#### Susunan dan Prinsip<sup>2</sup> Organisasi Partai

*Fasal 23.* Partai disusun berdasarkan prinsip<sup>2</sup> sentralisme-demokratis. Sentralisme-demokratis berarti sentralisme yang berdasarkan demokrasi dan demokrasi dibawah pimpinan yang terpusat.

Syarat<sup>2</sup>nja yang pokok adalah sebagai berikut :

- a. Badan<sup>2</sup> pimpinan Partai dari semua tingkat dipilih;
- b. Badan<sup>2</sup> pimpinan Partai bertanggungjawab kepada organisasi

Partai yang memilihnya dengan memberi laporan pada waktu yang tertentu;

- c. Putusan<sup>2</sup> Partai harus dilaksanakan dengan tidak bersyarat. Setiap anggota Partai tunduk kepada putusan<sup>2</sup> organisasi Partai dimana ia tergabung; jumlah tersedikit tunduk kepada jumlah terbanyak; organisasi Partai bawahan tunduk kepada organisasi Partai diatasnya dan segenap organisasi Partai tunduk kepada Kongres Nasional Partai dan CC;
- d. Badan<sup>2</sup> pimpinan Partai harus senantiasa memperhatikan pendapat organisasi bawahan dan massa anggota Partai, mempelajari pengalaman<sup>2</sup>nya dan memberikan bantuan dalam memecahkan persoalannya tepat pada waktunya;
- e. Organisasi<sup>2</sup> Partai bawahan harus setjara periodik memberikan laporan mengenai pekerdjaannya kepada organisasi atasannya dan meminta instruksi tepat pada waktunya tentang soal<sup>2</sup> yang memerlukan putusan organisasi yang lebih tinggi;
- f. Semua organisasi Partai bekerdja atas prinsip memadukan pimpinan kolektif dengan tanggungjawab perseorangan: semua soal yang penting diputuskan setjara kolektif, dan bersama dengan itu masing<sup>2</sup> orang diberi kemungkinan untuk melakukan peranannya yang penuh dalam batas yang semestinya.

*Fasal 24.* Organisasi Partai didirikan atas dasar pembagian<sup>2</sup> geografi atau tempatkerdja.

Organisasi yang mengatur pekerdjaan Partai disesuatu daerah tertentu adalah badan tertinggi daripada semua organisasi Partai dalam daerah itu.

Organisasi yang mengatur pekerdjaan Partai disesuatu tempatkerdja adalah badan tertinggi daripada semua organisasi Partai dalam tempatkerdja itu.

*Fasal 25.* Badan<sup>2</sup> pimpinan Partai yang tertinggi dari berbagai tingkat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk seluruh Indonesia ada Kongres Nasional Partai dan Komite Central (CC);
- b. Untuk tiap daerah Swatantra tingkat I ada Konferensi Partai Daerah Besar dan Komite Daerah Besar (CDB);
- c. Untuk ibukota RI (Djakarta Raya) ada Konferensi Partai Djakarta Raya dan Komite Djakarta Raya (CDR) yang kedudukannya sama dengan CDB;
- d. Untuk pulau atau pulau<sup>2</sup> yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Partai Pulau atau Pulau<sup>2</sup> dan Komite Pulau atau Pulau<sup>2</sup> (CP) yang dipimpin langsung oleh CC atau CDB;
- e. Untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kota<sup>2</sup> yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Partai Daerah Jogjakarta dan Kon-

- terensi Partai Kota serta Comite Daerah Jogjakarta (CDB) dan Comite Kota (CK) yang dipimpin langsung oleh CDB;
- f. Untuk daerah Swatantra tingkat II dan daerah dibawah Swatantra tingkat II yang ditentukan oleh CC ada Konferensi Seksi Partai dan Comite Seksi (CS);
  - g. Untuk daerah Swatantra tingkat III atau Ketjamatan atau daerah dibawah Ketjamatan yang ditentukan oleh CDB atau CP ada Konferensi Subseksi Partai dan Comite Subseksi (CSS);
  - h. Untuk pabrik, tambang, desa, kampung, djalan perusahaan, sekolahan, perguruan tinggi, kantor dan tempatkerja lainnya ada Rapat Resort dan Comite Resort (CR) atau Konferensi Resort Besar dan Comite Resort Besar (CRB)

*Fasal 26.* Diantara masa dua Kongres Nasional Partai, dua Konferensi Partai dan diantara dua Rapat Resort Partai, Comite Partai yang dipilih olehnya adalah badan pimpinan tertinggi dari organisasi Partai yang sesuai dengan tingkatannya masing².

*Fasal 27.* Semua badan pimpinan Partai dipilih :

- a. CC dipilih oleh Kongres Nasional Partai;
- b. CDB, CP, CK, CS dan CSS dipilih oleh Konferensi Partai daerah masing²;
- c. CR dipilih oleh Rapat Resort, dan CRB dipilih oleh Konferensi Resort Besar.

Dimana keadaan tidak mengizinkan untuk mengadakan pemilihan², badan² pimpinan Partai dapat ditunduk oleh Comite yang lebih tinggi.

*Fasal 28.* Pemilihan² Comite² Partai dilakukan setjara tertulis dan rahasia atau setjara terbuka dari daftar tjalon², dengan djaminan, bahwa pemilih² berhak mengkritik dan mengganti setiap tjalon dalam daftar.

Untuk tiap² pemilihan Comite Partai, Kongres Nasional atau Konferensi Daerah membentuk Komisi Pemilihan yang bertugas mengusulkan tjara² pemilihan dan daftar tjalon berdasarkan tjalon² yang diadjudkan.

Untuk dapat ditjalonkan mendjadi anggota Comite Partai, harus dipenuhi sjarat usia keanggotaan sebagai berikut :

- a. Untuk CC se-kurang²nja 8 tahun;
- b. Untuk CDB se-kurang²nja 5 tahun;
- c. Untuk CP, CK dan CS se-kurang²nja 3 tahun;
- d. Untuk CSS se-kurang²nja 2 tahun; dan
- e. Untuk CR se-kurang²nja 1 tahun.

*Fasal 29.* Badan² pimpinan Partai atau anggota²nja dapat diberhentikan oleh masing² badan yang memilihnja sebelum habis masa djabatannya.

Selama masa antara dua Konferensi Daerah Partai dari semua tingkat, Komite Partai yang lebih tinggi, bila menganggap perlu boleh memindahkan fungsian<sup>2</sup> organisasi Partai bawahan.

*Fasal 30.* Untuk menjampai<sup>2</sup>kan atau mendiskusikan putusan<sup>2</sup> penting dari organisasi<sup>2</sup> Partai yang lebih tinggi, untuk merentjakan pekerjaan, memeriksa pelaksanaan atau meninjau kembali putusan<sup>2</sup> setiap organisasi Partai dapat mengadakan berbagai majelis rapat dengan kader atau dengan anggota<sup>2</sup>nja yang aktif, Konferensi Kerja, Seminar<sup>2</sup> dan lain<sup>2</sup>nja.

*Fasal 31.* Sebelum badan pimpinan Partai mengambil putusan tentang politik Partai, organisasi<sup>2</sup> Partai bawahan dan anggota<sup>2</sup> Komite Partai dapat mendiskusikannya didalam organisasi Partai dan rapat Partai setjara bebas dan praktis, dan mengajukan usul<sup>2</sup>nja kepada badan pimpinan Partai. Tetapi sesudah putusan diambil oleh badan pimpinan Partai, mereka harus tunduk. Bila organisasi Partai bawahan berpendapat bahwa putusan organisasi atasan tidak sesuai dengan keadaan<sup>2</sup> yang nyata didaerahnja atau dengan sesuatu lapangan tertentu, ia harus mengusulkan kepada organisasi atasan yang bersangkutan supaya mengubah putusannja; tetapi jika organisasi atasan tetap mempertahankan putusannja, maka organisasi Partai bawahan wadjab melaksanakannja tanpa sjarat.

*Fasal 32.* Sebelum CC mengeluarkan keterangan atau putusan bagian<sup>2</sup> atau organisasi Partai bawahan atau orang<sup>2</sup>nja yang bertanggungjawab tidak boleh semau<sup>2</sup>nja sendiri mengeluarkan keterangan atau mengambil putusan tentang politik yang bersifat nasional, walaupun mereka diperbolehkan mendiskusikan dan mengajukan pendapat kepada badan<sup>2</sup> pimpinan pusat.

Mengenai soal<sup>2</sup> daerah, organisasi Partai daerah berhak mengambil putusan<sup>2</sup> sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan putusan dari organisasi Partai yang lebih tinggi atau dengan putusan CC.

*Fasal 33.* Harian<sup>2</sup> dan madjalah<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh organisasi Partai dari semua tingkat harus mempopulerkan putusan<sup>2</sup> dan politik organisasi<sup>2</sup> pusat, organisasi<sup>2</sup> atasan dan organisasi Partai<sup>2</sup>nja sendiri.

Organisasi<sup>2</sup> Partai dari semua tingkat harus menjiarkan penerbitan<sup>2</sup> CC.

Penerbitan harian, madjalah atau brosur daerah harus dengan persetujuan Komite Partai yang langsung diatasnja.

*Fasal 34.* Pembentukan organisasi Partai yang baru atau pembubaran organisasi Partai yang sudah ada harus diputuskan oleh organisasi yang langsung diatasnja.

*Fasal 35.* Politburo CC mengadakan Departemen<sup>2</sup>, dan Dewan

Harian Komite<sup>1</sup> Partai mula, dari CSS sampai ke CDB mengadakan Bagian<sup>2</sup> menurut keperluan; juga bisa membentuk Biro<sup>2</sup>, Komisi<sup>2</sup> atau badan<sup>2</sup> lain yang dibutuhkan.

## Bab IV Organisasi Pusat Partai

*Fasal 36.* Kongres Nasional Partai diputuskan dan diadakan oleh CC.

Dalam keadaan biasa, Kongres Nasional Partai diadakan sekali dalam 5 tahun. Dalam keadaan<sup>2</sup> luarbiasa Kongres Nasional Partai bisa ditunda atau dipertjepat menurut putusan CC.

Kalau se-kurang<sup>2</sup>nja 1/3 djumlah organisasi<sup>2</sup> Daerah Besar yang mewakili lebih dari separoh djumlah seluruh anggota Partai atas putusan Konferensijnja masing<sup>2</sup> meminta supaya diadakan Kongres Nasional Partai, maka CC harus meluluskannya.

Kongres Nasional Partai adalah sah apabila dikunjungi oleh utusan<sup>2</sup> dari se-kurang<sup>2</sup>nja 1/3 djumlah organisasi<sup>2</sup> Daerah Besar dan mewakili lebih dari separoh djumlah seluruh anggota Partai.

Djumlah utusan untuk Kongres Nasional Partai dan tjara<sup>2</sup> mengatur pemilihannya ditentukan oleh CC.

Anggota<sup>2</sup> dan tjalonanggota<sup>2</sup> CC ketjuah yang menjadj: utusau hadir dalam Kongres Nasional Partai dengan hak berbitjara, tetapi tidak mempunjai hak suara dalam mengambil putusan<sup>2</sup>.

Pengumuman akan berlangsungnja Kongres Nasional Partai dan atjaranja harus dilakukan se-kurang<sup>2</sup>nja 1 bulan sebelumnya; sedangkan Kongres Nasional Partai luarbiasa diumumkan sekurang-kurangnja 2 bulan sebelumnya.

*Fasal 37.* Fungsi dan kekuasaan Kongres Nasional Partai adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan<sup>2</sup> yang diberikan oleh CC, Komisi Verifikasi dan Badan<sup>2</sup> Pusat lainnya;
- b. Menentukan garis politik Partai;
- c. Mengubah Program dan Konstitusi Partai;
- d. Memilih Komisi Verifikasi;
- e. Memilih CC.

Kongres Nasional memilih Presidium untuk memimpin djalannja Kongres dan melakukan fungsi dan kekuasaan CC selama Kongres.

*Fasal 38.* Djumlah anggota dan tjalonanggota CC ditentukan oleh Kongres Nasional Partai.

Kalau terdjadi lowongan didalam keanggotaan CC, lowongan itu diisi dengan tjalonanggota CC yang ditentukan oleh CC.

*Fasal 39.* Selama masa antara dua Kongres Nasional Partai,

CC memimpin seluruh pekerjaan Partai, melaksanakan putusan<sup>4</sup> Kongres Nasional Partai, mewakili Partai dalam hubungan<sup>2</sup>nja dengan partai<sup>2</sup> dan organisasi<sup>2</sup> lain, mendirikan badan<sup>2</sup> Partai dan memimpin aktivitas<sup>2</sup>nja, mengurus dan menempatkan kader<sup>2</sup> Partai.

*Fasal 40.* Sidang Pleno CC diadakan sekali tiap 6 bulan oleh Politbiro CC. Sesuai dengan keadaan Politbiro CC bisa menunda atau mempertajam Sidang Pleno itu. Tjalonanggota<sup>2</sup> CC hadir dalam Sidang Pleno CC dengan mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnja, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam mengambil putusan<sup>2</sup>.

*Fasal 41.* CC dalam Sidang Pleno ja memilih Politbiro, Dewan Harian Politbiro, Sekretariat CC, Ketua CC dengan wakil<sup>2</sup>-nja, Sekretaris CC sebagai Kepala dan Wakil Kepala Sekretariat CC.

Politbiro serta Dewan Hariannja melaksanakan fungsi dan kekuasaan CC selama masa antara 2 Sidang Pleno CC.

Sekretariat CC melakukan pekerjaan harian CC, dibawah pimpinan Politbiro dan Dewan Hariannja.

Ketua dan Wakil<sup>2</sup> Ketua CC adalah djuga Ketua dan Wakil<sup>2</sup> Ketua Politbiro.

Djumlah anggota dan tjalonanggota Politbiro, djumlah anggota Dewan Harian Politbiro dan djumlah anggota Sekretariat CC ditentukan oleh CC.

Djika terdjadi lowongan didalam badan<sup>2</sup> tersebut, pengisian lowongan itu ditetapkan oleh CC.

*Fasal 42.* Selama masa antara 2 Kongres Nasional Partai, CC bisa mengadakan beberapa Konferensi Nasional Partai untuk mendiskusikan dan memutuskan soal<sup>2</sup> politik dan organisasi yang mendesak.

*Fasal 43.* Konferensi Nasional Partai adalah sah apabila di-kundungi se-kurang<sup>2</sup>nja oleh utusan<sup>2</sup> yang mewakili lebih dari se-paroh djumlah seluruh organisasi Daerah Besar.

Djumlah utusan dan tjara<sup>2</sup> mengatur pemilihannja ditentukan oleh CC.

*Fasal 44.* Konferensi Nasional Partai dapat memperhentikan anggota<sup>2</sup> atau tjalonanggota<sup>2</sup> CC yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinja, dan dapat memilih penggantinya dari tjalonanggota<sup>2</sup> CC untuk mendjadi anggota CC dan memilih tjalonanggota CC yang baru, asalkan djumlah anggota dan tjalonanggota CC yang diganti atau djumlah tjalonanggota CC yang dipilih itu, pada tiap Konferensi tidak lebih dari 1/5 djumlah semua anggota dan tjalonanggota CC.

*Fasal 45.* Putusan<sup>2</sup> yang diambil oleh Konferensi Nasional

Partai dan pemberhentian serta pemilihan anggota atau calon-anggota CC oleh Konferensi itu hanya berlaku sesudah disahkan oleh CC.

## Bab V

### Organisasi Daerah Partai

*Fasal 46.* Konferensi<sup>2</sup> Partai daerah diadakan oleh Comitenja masing<sup>2</sup> untuk Daerah Besar tiap 3 tahun sekali; untuk Pulau atau Pulau<sup>2</sup>, Kota dan Seksi tiap 2 tahun sekali; dan untuk Subseksi tiap 1 tahun sekali.

Dalam keadaan luarbiasa Konferensi<sup>2</sup> tersebut dapat ditunda atau dipertcepat oleh Komite Partai yang bersangkutan.

CDB, CP, CK, CS dan CSS harus mengadakan Konferensinja masing<sup>2</sup> atas permintaan lebih dari separoh djumlah seluruh organisasi Partai yang langsung dibawahnja atau atas usul organisasi Partai yang langsung diatasnja.

Konferensi adalah sah apabila dikundjungi oleh utusan<sup>2</sup> dari se-kurangnja separoh djumlah organisasi Partai yang langsung di-bawahnja dan mewakili lebih dari separoh djumlah anggota di-daerahnja.

Utusan<sup>2</sup> untuk Konferensi<sup>2</sup> Daerah Besar, Pulau atau Pulau<sup>2</sup>, Kota, dan Seksi dipilih oleh masing<sup>2</sup> Konferensi Partai yang lang-sung dibawahnja; untuk Konferensi Subseksi dipilih oleh Konfe-rensi Resort Besar atau Rapat Resort.

Djumlah utusan dan tjara<sup>2</sup> mengatur pemilihannja ditentukan oleh Komite yang menjelenggarakan Konferensi.

Anggota<sup>2</sup> Komite lama ketjua<sup>2</sup> yang menjadi utusan hadir da-lam Konferensi dengan hak berbitjara, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam mengambil putusan<sup>2</sup>.

*Fasal 47.* Fungsi dan kekuasaan dari Konferensi Daerah Be-sar, Pulau atau Pulau<sup>2</sup>, Kota, Seksi dan Subseksi ialah :

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan<sup>2</sup> yang dibe-rikan oleh Komite Partai, Komisi Verifikasi dan Badan<sup>2</sup> Partai lainnja dari Komite Partai masing<sup>2</sup>;
- b. Memilih Komisi Verifikasi;
- c. Memilih Comitenja masing<sup>2</sup>.

Konferensi Daerah Besar djuga memilih utusan<sup>2</sup> ke Kongres Nasional Partai.

Konferensi memilih Presidium untuk memimpin djalannja Kon-ferensi dan melakukan fungsi dan kekuasaan Komite selama Kon-ferensi.

*Fasal 48.* Djumlah anggota Komite ditetapkan oleh Konferen-

sinja masing<sup>2</sup>.

CDB, CP dan CK mengadakan Sidang Plenonja 4 bulan sekali, CS 3 bulan sekali, dan CSS 2 bulan sekali.

CDB, CP, CK, CS dan CSS dalam Sidang Plenonja masing<sup>2</sup> memilih Dewan Harian, Sekretariat, Sekretaris dan Wakilnja.

Sekretaris dan Wakilnja mengetuai Sidang<sup>2</sup> Pleno, Dewan Harian dan Sekretariat dari Comitenja masing<sup>2</sup>.

Anggota<sup>2</sup> Dewan Harian dan Sekretariat dari CDB, CP, CK, CS dan CSS harus dsetudjui oleh Comite Partai jang langsung diatasnja.

Dika terdjadi lowongan pada Dewan Harian atau Sekretariat, lowongan itu diisi dengan anggota Comite Pleno oleh Dewan Harian jang bersangkutan dengan persetujuan Comite Partai jang langsung diatasnja. Untuk mengisi lowongan didalam keanggotaan Comite Pleno, Comite Partai jang bersangkutan dalam Sidang Plenonja melakukan pengangkatan dengan persetujuan Comite Partai jang langsung diatasnja.

*Fasal 49* CDB, CP, CK, CS dan CSS harus menjalankan putusan<sup>2</sup> Konferensinja masing<sup>2</sup> dan menjalankan putusan<sup>2</sup> organisasi Partai jang lebih tinggi, mendirikan Badan<sup>2</sup> Partai dan merumpin aktivitas<sup>2</sup>nja, mengurus dan menempatkan kader<sup>2</sup> Partai.

*Fasal 50.* Selama masa antara 2 Konferensi Partai daerah, CDB mengadakan Konferensi antar-waktu 2 kali dan CP, CK, CS dan CSS masing<sup>2</sup> 1 kali jang dihadiri oleh utusan<sup>2</sup> jang dipilih oleh masing<sup>2</sup> Sidang Pleno Comite jang langsung dibawahnja.

Konferensi antar-waktu Subseksi dihadiri oleh utusan<sup>2</sup> jang dipilih oleh CRB atau CR.

Djumlah utusan dan tjara<sup>2</sup> mengatur pemilihannja ditentukan oleh Comite jang menjelenggarakan Konferensi.

Konferensi antar-waktu adalah sah apabila dikundjungi oleh utusan<sup>2</sup> dari se-kurang<sup>2</sup>nja separoh djumlah organisasi Partai jang langsung dibawahnja.

Konferensi<sup>2</sup> antar-waktu dapat memperhentikan anggota<sup>2</sup> Comite jang bersangkutan dan memilih penggantinya, asalkan djumlah anggota jang diganti itu tidak lebih dari  $\frac{1}{4}$  djumlah semua anggota Comite.

Putusan<sup>2</sup> jang diambil oleh Konferensi antar-waktu baru berlaku sesudah disahkan oleh Comite Partai jang bersangkutan.

## Bab VI

### Organisasi Basis Partai

*Fasal 51.* Organisasi basis Partai didirikan menurut tempat

tinggal atau tempatkerdja. Disesuatu pabrik, tambang, desa, kampung, djalan, perusahaan, sekolahan, perguruan tinggi, kantor dan di-tempatkerdja<sup>2</sup> lainnja dimana terdapat 3 atau lebih anggota Partai, didirikan organisasi basis Partai. Djika ditempat itu terdapat kurang dari 3 anggota Partai, anggota<sup>2</sup> tersebut harus menggabungkan diri dalam organisasi basis Partai yang terdekat

*Fasal 52.* Bentuk organisasi basis Partai adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi basis Partai yang beranggota kurang dari 100 orang disebut Resort Partai;
- b. Organisasi basis Partai yang beranggota 100 orang atau lebih disebut Resort Besar Partai. Dibawah Resort Besar Partai dibentuk beberapa Resort Partai.

*Fasal 53.* Organisasi basis Partai harus mengeratkan hubungan Partai dengan massa Rakjat.

Kewajiban<sup>2</sup> umum organisasi basis Partai adalah sebagai berikut :

- a. Mendjalankan propaganda dan pekerdjaan organisasi dikalangan massa untuk melaksanakan politik Partai dan putusan<sup>2</sup> organisasi<sup>2</sup> Partai yang lebih tinggi;
- b. Selalu memperhatikan perasaan<sup>2</sup> dan tuntutan<sup>2</sup> massa Rakjat, melaporkannya tepat pada waktunya kepada organisasi<sup>2</sup> Partai yang lebih tinggi, memperhatikan kehidupan politik, ekonomi dan kebudayaan dari Rakjat dan mengorganisasi massa Rakjat untuk memetjahkan masalah<sup>2</sup> mereka sendiri;
- c. Menarik anggota<sup>2</sup> baru, mengumpulkan iuran anggota Partai, memeriksa laporan<sup>2</sup> dari anggota<sup>2</sup> Partai dan mendjaga disiplin Partai dikalangan anggota<sup>2</sup>;
- d. Mengorganisasi pendjualan harian, madjalah dan penerbitan<sup>2</sup> lainnja dari Partai;
- e. Mendidik anggota<sup>2</sup> Partai dan mengorganisasi peladjaran<sup>2</sup> mereka, termasuk pemberantasan butahuruf.

*Fasal 54.* Rapat Resort diadakan se-kurang<sup>2</sup>nja sebulan sekali dan dihadiri oleh Kepala<sup>2</sup> Grup.

Konferensi Resort Besar diadakan se-kurang<sup>2</sup>nja 2 bulan sekali dan dihadiri oleh utusan<sup>2</sup> dari CR.

Rapat Resort dan Konferensi Resort Besar menerima dan mendiskusikan laporan<sup>2</sup> yang diberikan oleh Comitenja masing<sup>2</sup>; menentukan pekerdjaan<sup>2</sup> ditempatnja masing<sup>2</sup> dan memilih CR dan CRB.

CR dipilih untuk waktu 6 bulan.

CRB dipilih untuk waktu 1 tahun.

CR memilih seorang Sekretaris dan djika perlu seorang Wakil

## **Sekretaris.**

CRB memilih Sekretariat, Sekretaris dan Wakilnya.

Suatu organisasi basis yang beranggota kurang dari 10 orang, tidak membentuk Komite, tetapi cukup memilih seorang Sekretaris dan seorang Wakilnya.

*Fasal 55.* Resort Partai yang beranggota banyak, harus membagi anggotanya dalam Grup<sup>2</sup>, yang masing<sup>2</sup> terdiri dari sebanjak-banjaknya 10 orang.

Anggota<sup>2</sup> wanita Partai dapat diorganisasi dalam Grup<sup>2</sup> tersendiri.

Grup memilih seorang Kepala Grup dan kalau perlu seorang Wakil Kepala.

Dengan persetujuan Komite Partai yang lebih tinggi, seorang anggota Partai dapat merangkap menjadi anggota Resort tempat-kerja dan Resort tempattinggal dengan ketentuan bahwa anggota tersebut mempunyai hak suara dalam mengambil putusan dan kewajiban membayar iuran hanya pada salahsatu Resort saja.

## **Bab VII**

### **Fraksi Partai Dalam Organisasi<sup>2</sup> Bukan-Partai**

*Fasal 56.* Dalam badan<sup>2</sup> pimpinan organisasi<sup>2</sup> bukan-Partai, dimana terdapat 3 atau lebih anggota Partai yang berkedudukan penting, dibentuk fraksi Partai. Kewajiban fraksi Partai ialah : bertanggungjawab atas pelaksanaan politik dan putusan<sup>2</sup> Partai, memperkuat persatuan dengan kader<sup>2</sup> non-Partai dan mengeratkan hubungan dengan massa dalam organisasi<sup>2</sup> bukan-Partai yang bersangkutan.

*Fasal 57.* Anggota<sup>2</sup> Partai dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan dipusat dan didaerah merupakan Fraksi Partai.

Anggota<sup>2</sup> Fraksi Partai dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan harus dengan teguh membela kepentingan Rakyat. Pekerjaan mereka dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan harus membawa suara dari gerakan massa Rakyat dan membela serta mempopulerkan politik Partai.

Anggota<sup>2</sup> Fraksi Partai dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan harus memelihara hubungan<sup>2</sup> yang erat dengan massa pemilih, setjara teratur memberikan laporan kepada massa pemilih tentang aktivitas dan pekerjaannya dalam Dewan Perwakilan dan senantiasa berusaha mendapatkan saran<sup>2</sup> dan nasehat dari massa pemilih.

Anggota<sup>2</sup> Fraksi Partai dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan harus menjaga nama baik dirinya masing<sup>2</sup> yang berarti menjaga nama baik Partai, tetap hidup setjara sederhana, tetap bersikap rendah hati dalam hubungan dengan Rakyat dan tetap menempatkan Partai

diatas dirinja sendiri.

Pimpinan Fraksi Partai dalam Dewan<sup>2</sup> Perwakilan ditentukan oleh Komite yang memimpinja berdasarkan pertimbangan<sup>2</sup> yang diadakan oleh Fraksi yang bersangkutan.

*Fasal 58.* Keanggotaan Fraksi ditentukan oleh Komite Partai yang memimpinja. Fraksi Partai mempunyai Sekretaris. Fraksi Partai yang mempunyai lebih dari 10 anggota membentuk Komite Kerja, Sekretaris dan anggota<sup>2</sup> Komite Kerja lainnya ditentukan oleh Komite Partai yang memimpinja berdasarkan pertimbangan<sup>2</sup> yang diadakan oleh Fraksi yang bersangkutan.

Kedudukan dan hak<sup>2</sup> Fraksi Partai dalam Kongres Nasional dan Konferensi Partai ditentukan oleh Komite Partai yang memimpinja.

*Fasal 59.* Dalam segala soal Fraksi Partai harus tunduk kepada Komite Partai yang memimpinja.

## Bab VIII

### Badan Kontrol Partai

*Fasal 60.* CC, CDB, CP, CK dan CS dalam Sidang Pleno<sup>2</sup> masing<sup>2</sup> membentuk Komisi Kontrol.

Kongres Nasional dan Konferensi<sup>2</sup> Daerah memilih Komisi Verifikasi.

Susunan Komisi Kontrol bawahan harus disahkan oleh Komite Partai yang langsung diatasnja.

*Fasal 61.* Kewajiban Komisi Kontrol ialah : setjara teratur memeriksa dan mengurus perkara<sup>2</sup> pelanggaran anggota<sup>2</sup> terhadap Konstitusi Partai, disiplin Partai dan moral Komunis, menjatuhkan atau menjabut tindakan disiplin atas anggota Partai; dan mengurus pengaduan dan permintaan banding anggota Partai.

*Fasal 62.* Komisi Kontrol dari semua tingkat menjalankan pekerjaan dibawah pimpinan Komite<sup>2</sup> Partai yang setingkat.

Komisi Kontrol yang lebih tinggi berhak memeriksa pekerjaan Komisi Kontrol bawahan dan mensahkan atau merobah putusan-putusannja.

Komisi Kontrol bawahan harus melaporkan pekerjaan kepada Komisi Kontrol yang lebih tinggi, dan memberikan laporan yang teliti dan tepat tentang pelanggaran<sup>2</sup> anggota terhadap disiplin Partai.

*Fasal 63.* Kewajiban Komisi Verifikasi ialah : mengontrol administrasi Partai, pembukuan dan penggunaan Keuangan Partai, inventaris Partai dan usaha<sup>2</sup> produktif Partai.

## Bab IX

### Keuangan Partai

*Fasal 64.* Partai dibelandjai oleh uang pangkal dan iuran anggota, oleh usaha<sup>2</sup> produktif Partai, dan oleh sokongan<sup>2</sup> jang tidak mengikat.

*Fasal 65.* Seseorang jang mau masuk Partai berkewadajiban membayar uang pangkal sebanyak uang iuran.

Ulang iuran dibayar tiap<sup>2</sup> bulan dan ditetapkan sekurang-kurangnya sbb. :

Penghasilan kotor :

	sampai Rp. 250,—	Djumlah iuran Rp. 0.50
Rp 251,—	sampai „ 500,—	Djumlah iuran „ 1,—
„ 501,—	sampai „ 750,—	Djumlah iuran „ 2.50
„ 751,—	sampai „ 1000,—	Djumlah iuran „ 5,—
„ 1001,—	keatas se-kurang <sup>2</sup> nja 1% dari penghasilan kotor, dibulatkan keatas dengan	„ 0.50.

*Fasal 66.* Anggota Partai jang mendapat kedudukan berpenghasilan atas nama Partai menjerahkan semua penghasilannya kepada Partai dan ia mendapat honorarium menurut peraturan<sup>2</sup> jang ditentukan oleh Partai.

*Fasal 67.* CDB atau CP mendapat 90% dari pendapatan uang pangkal, iuran dan pendapatan<sup>2</sup> lainnya setiap bulannya untuk Kas CDB atau CP, CK, CS, CSS dan CR. Keperluan keuangan untuk CK, CS, CSS dan CR diatur oleh CDB atau CP.

Sisa jang 10% dikirim ke CC.

## Bab X

### Hubungan Partai Dengan Pemuda Rakjat

*Fasal 68.* Pemuda Rakjat dalam Kongresnja jang ke-V telah menyatakan sebagai pembantu jang setia dan tepertjaja daripada Partai Komunis Indonesia. Pimpinan Pusat Pemuda Rakjat menerima pimpinan CC PKI.

Organisasi<sup>2</sup> Pemuda Rakjat harus memberikan bantuan jang efektif dalam melaksanakan politik dan putusan<sup>2</sup> Partai, serta mengadakan saran<sup>2</sup> kepada Comite Partai jang setingkat.

*Fasal 69.* Organisasi<sup>2</sup> Partai dari semua tingkat harus memberikan perhatian jang besar kepada pekerdjaan Pemuda Rakjat dilapangan ideologi dan organisasi, memberikan bimbingan kepada Pemuda Rakjat dalam pendidikan teori Marxis-Leninis untuk para anggotanya, dan mendjaga supaya terdjamin hubungan jang erat antara Pemuda Rakjat dengan massa pemuda jang luas.

## Bab XI

### Organisasi Partai Dalam Keadaan Luarbiasa

*Fasal 70.* Jika Partai tidak dimungkinkan oleh keadaan untuk melakukan fungsinya setjara biasa, maka bentuk organisasi dan tiarakerdja Partai ditentukan oleh CC.



## **RESOLUSI**

### **PENSAHAN PERUBAHAN PROGRAM PKI**

Kongres Nasional ke-VI PKI, yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 sampai dengan 14 September 1959, setelah mendengar pidato pengantar tentang perubahan Program PKI yang disampaikan oleh Kawan Njoto, mensahkan dengan suara bulat perubahan Program PKI.

Kongres berkeputusan bahwa Program yang telah lebih dilengkapkan dan lebih tepat dirumuskan berdasarkan pengalaman<sup>1</sup> kaja massa Rakjat Indonesia, yang disimpulkan setjara ilmiah dengan menggunakan teori Marxisme-Leninisme setjara kreatif, akan menjadi milik Rakjat diseluruh negeri, dan dengan PKI didepan akan dapat diwujudkan Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis.

Kongres menginstruksikan kepada Partai untuk menjelaskan Program Partai kepada Rakjat Indonesia dan menjadikan pedoman praktis dalam perjuangan dibidang apapun sehingga Program Partai benar<sup>2</sup> menjadi Program Rakjat Indonesia.



### **PROGRAM PKI**

#### **I**

#### **Indonesia Sekarang Adalah Negeri yang Belum Merdeka Penuh Dan Masih Setengah-feodal**

Revolusi Agustus 1945 menggariskan tugas<sup>2</sup> pembebasan nasional dan perubahan<sup>2</sup> demokratis bagi Rakjat Indonesia. Tetapi tugas<sup>2</sup> ini belum lagi terlaksana. Hasrat Rakjat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan nasional yang penuh, untuk kebebasan<sup>2</sup> demokratis dan untuk memperbaiki penghidupannya masih belum terpenuhi.

Selama revolusi Rakjat 1945-1948 massa Rakjat Indonesia telah melakukan tindakan<sup>2</sup> anti-imperialis seperti menjadikan perusahaan<sup>2</sup> penting milik asing sebagai „milik Republik Indonesia”.

menghapuskan pemerintahan perseorangan dan membentuk dewan<sup>2</sup> yang bernama „Komite Nasional Indonesia“, membentuk badan<sup>2</sup> keamanan Rakjat sampai ke-desa<sup>2</sup>, mem-ban<sup>2</sup>ikan di beberapa daerah tanah<sup>2</sup> perkebunan asing kepada kaum tani, dsb

Hanja sesudah persetudjuan KMB yang chianat, yang didahului oleh provokasi<sup>2</sup> terhadap kaum Komunis ditandatangani oleh pemerintah Hatta dan pemerintah imperialis Belanda pada tanggal 2 November 1949, Revolusi Agustus dirintang, belanda-jan<sup>2</sup>nya. Beberapa hasil revolusi dihapuskan oleh pemerintah reaksioner Indonesia. Dilapangan ekonomi politik, militer dan kebudayaan, imperialis Belanda mendapatkan konsesi<sup>2</sup> yang demikian menghinakan, sehingga „masa KMB“ merupakan salahsatu masa yang gelap dan sangat memalukan bagi bangsa Indonesia.

Tidak kurang dari 7 tahun lamanya Rakjat Indonesia berjuang untuk membatalkan persetudjuan KMB. Sekalipun pada mulanya PKI boleh dikatakan sendiri sadya memperjuangkan tadjuan ini, tetapi kian hari kian banyak partai, golongan maupun perseorangan yang ikutserta. Perjuangan untuk pembatalan persetudjuan KMB menjadi perjuangan nasional yang memobilisasi semua tenaga melawan kolonialisme Belanda dengan mendapat sokongan dari Rakjat pekerdja sedunia. Akhirnya menanglah tuntutan Rakjat, dan Pemerintah harus membatalkan persetudjuan KMB setjara sepihak.

Sebelum persetudjuan KMB dibatalkan, Rakjat Indonesia telah berhasil mengusir MMB, membubarkan Uni Indonesia-Belanda, membubarkan „Sicusa“, membatalkan „hutang Indonesia“ kepada Belanda dan menjengkirkan kontrol pemerintah Belanda atas politik luarnegeri dan perdagangan luarnegeri Indonesia. Sesudah persetudjuan KMB dibatalkan, aksi<sup>2</sup> pembebasan Irian Barat mengalami gelombang pasang, dan sebagai akibatnya, kantor<sup>2</sup> perwakilan Belanda diberbagai kota di Indonesia ditutup, pegawai<sup>2</sup> kolonial dan orang<sup>2</sup> Belanda yang dapat merugikan kepentingan Indonesia dikeluarkan dari Indonesia, dan perusahaan<sup>2</sup> kepunjaan kaum kapitalis kolonial Belanda diambilalih, kemudian dinasionalisasi.

Langkah<sup>2</sup> ini sangat penting dalam Rakjat Indonesia menuju kekemerdekaan nasional yang penuh. Sungguhpun cemikian, Irian Barat, jaitu 20% dari wilayah Republik Indonesia masih sadya diduduki oleh kaum kolonialis Belanda, dilapangan perminjakan jaitu BPM, Anglo-Dutch Shell, belum diganggugugat samasekali, perdagangan luarnegeri RI masih banyak tergantung pada saluran<sup>2</sup> kapitalis<sup>2</sup> Belanda, kapalselam<sup>2</sup> dan kapalterbang<sup>2</sup> Belanda melanggari wilayah Indonesia, gerombolan<sup>2</sup> bersendjata masih terus

dibejar dan didalangi oleh kolonialisme Belanda, kakitangan<sup>2</sup> mereka masih banyak yang menduduki fungsi<sup>2</sup> penting didalam Republik, dan bahkan dilapangan pendidikan dan kebudayaan kolonialisme Belanda masih punya pengaruh. Semuanya ini menetapkan bahwa imperialisme Belanda masih tetap merupakan musuh pertama Rakjat Indonesia.

Disamping itu, imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda dan makin mendapat kedudukan dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan di Indonesia. Imperialisme Amerika ini membantu kaum imperialis Belanda di Irian Barat dengan senjata<sup>2</sup> dan perlengkapan<sup>2</sup> lain sesuai dengan tujuan pakt agresif SEATO, dan di-daerah<sup>2</sup> Republik lainnya imperialisme Amerika membantu kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“ juga dengan senjata<sup>2</sup> dan perlengkapan<sup>2</sup> lain, malahan dengan instruktur<sup>2</sup>, penerbang dan tenaga<sup>2</sup> spesialis lainnya. Semuanya ini menunjukkan bahwa imperialisme Amerika merupakan musuh Rakjat Indonesia yang paling berbahaya.

Diterimanya Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing oleh Parlemen, sekalipun ditentang keras oleh PKI, berarti dibukanya pintu Indonesia untuk masuknya dan diperkuatnya pengaruh politik dan ekonomi negara<sup>2</sup> imperialis.

Sisa<sup>2</sup> feodalisme di-desa<sup>2</sup>, baik dalam bentuk monopoli tanah oleh tuantanah, dalam bentuk swatanah yang berwudjud barang dan kuda, maupun dalam bentuk hutang<sup>2</sup> yang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap kaum lintahdarat dan tuantanah, masih terus berlaku.

Semua ini membuktikan, bahwa Indonesia belum merdeka penuh dan belum demokratis, dan ini berarti bahwa pada hakekatnya Indonesia masih negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal.

Sekalipun telah banyak dibitjarakan oleh golongan yang berkuasa tentang rentjana untuk pembangunan, industrialisasi dan kesedjahteraan ekonomi negeri, tetapi sesungguhnya, negeri kita ada dalam tjengkeraman krisis ekonomi yang terusmenerus dan sudah dekat pada keruntuhannya. Krisis di Amerika Serikat lebih memperhebat krisis ekonomi ini.

Walaupun tanah kita subur, tetapi dinegeri kita tidak tjukup makanan untuk memenuhi kebutuhan minimum Rakjat. Rakjat hidup dalam keadaan setengah kelaparan. Nilai uang Indonesia makin merosot dan harga barang<sup>2</sup> meningkat. Sebagai akibat persaingan dari pihak Belanda, Amerika dan kemudian Djepang, industri<sup>2</sup> dan perusahaan<sup>2</sup> dagang nasional yang sedikit djumlah-

nja itu hantjur dan gulungtikar. Ketjuali sedjumlah ketjil tuan<sup>2</sup> feodal, komprador<sup>2</sup> dan pedjabat<sup>2</sup> tinggi sivil maupun militer jang korup, bagian terbesar Rakjat Indonesia hidup melarat

Upah buruh adalah rendah dan upah riil senantiasa merosot. Pemertjatan<sup>2</sup> berdjalan terus dan djumlah penganggur semakin bertambah besar. Hak<sup>2</sup> kebebasan demokratis, sekalipun didjamin didalam Undang<sup>2</sup> Dasar, kenjataanja banjak kekanjan<sup>2</sup>nja. Kesempatan kerdja djuga bertambah sempit, karena ekonomi sektor negara dan ekonomi sektor partikelir nasional, mengalami kemunduran.

Kedudukan kaum tani tidak lebih baik daripada diwaktu jang lampau. Kaum tani masih menderita kekurangan tanahgarapan atau samasekali tidak punya tanah. Berbagai bentuk penghisapan feodal masih berlaku hingga sekarang. Bagian jang sangat terbesar dari kaum tani ditindas oleh penghisapan tuantanah, lntahdarat dan oleh padjak<sup>2</sup> jang berat. Pengusiran<sup>2</sup> terhadap kaum tani dari tanahgarapannya belum samasekali lenjap. Kaum pendjadjah asing dan sebagian tuantanah Indonesia masih terus mengorganisasi gerombolan<sup>2</sup> teroris, terutama DI-TII dan „PRRI-Permesta“, jang membakar desa<sup>2</sup> dan membunuh, kaum tani. Ber-ribu<sup>2</sup> kaum tani terpaksa mengungsi ke-kota<sup>2</sup>, dimana mereka mengalami hidup jang tjelaka.

Kaum miskin kota, jang djumlahnja selalu bertambah, h.dupnja dari hari kesehari bertambah buruk, sehingga merupakan problem jang serius. Penghidupan jang berat membikin sebagian dari mereka mudah tertarik pada perbuatan<sup>2</sup> jang ekstrim, sehingga mereka merupakan tjadangan tenaga bagi kaum petualang, pematah pemogokan, dsb.

Kaum buruhnelajan masih menderita hubungan kerdja jang bersifat feodal, sedangkan kaum nelajansedang dan lebih<sup>2</sup> kaum nelajanmiskin kekurangan alat<sup>2</sup> kerdja.

Kaum inteligensia, termasuk pekerdja<sup>2</sup> ilmu dan kebudayaan tidak mempunjai haridepan jang baik. Kurangnja alat<sup>2</sup> dan sukar-nja sjarat<sup>2</sup> kerdja tidak memungkinkan hasil pekerdjaan jang baik dilapangan ilmu dan kebudayaan.

Pemerintah sedikit sekali membela kepentingan industri dan perdagangan nasional jang masih lemah itu. Burdjuasi nasional tidak hanja sukar sekali meluaskan usaha<sup>2</sup>nja dan mendirikan perusahaan<sup>2</sup> industri jang baru ; mereka djuga tidak mampu mempertahankan kedudukannya jang sekarang.

Demikianlah gambaran Indonesia sekarang jang belum merdeka penuh dan jang masih setengah-feodal.

## II

### Perlunya Mentjapai Kemerdekaan Nasional Jang Penuh dan Perubahan<sup>2</sup> Demokratis

Selama keadaan di Indonesia masih tidak berubah, artinja, selama imperialisme masih mempunyai kekuasaannya dan sisa<sup>2</sup> feodalisme belum dihapuskan, Rakjat Indonesia takkan mungkin membebaskan diri dari keadaan melarat, terbelakang, pintjang dan takberdaja dalam menghadapi imperialisme. Kekuasaan imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme tidak akan hapus di Indonesia selama tuantanah dan kaum komprador jang berhubungan erat dengan kapital asing tidak dibersihkan dari kekuasaan Republik Indonesia.

Djika Indonesia mau madju dari suatu negeri setengah-djadjahan dan setengah-feodal menjadi negeri merdeka, demokratis, makmur dan madju, maka adalah soal jang pokok, diatas se-gala<sup>2</sup>nja, menjelesakan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar<sup>2</sup>nja, dengan mendirikan suatu Pemerintah jang dibangun atas demokrasi jang ditujukan untuk semua golongan Rakjat dan demokrasi jang mengenai semua lapangan dibawah pimpinan klas buruh, suatu Pemerintah Rakjat, pemerintah demokrasi tipe baru, pemerintah Demokrasi Rakjat.

Ini akan merupakan pelaksanaan setjara konsekwen dari apa jang dikatakan Presiden Sukarno „negara 'semua buat semua'” atau „demokrasi jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial”.

Guna melaksanakan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus sampai keakar-akarnya, artinja, guna memusnahkan samasekali kekuasaan kaum imperialis asing dan kaum tuantanah, guna membangun Indonesia baru jang merdeka dilapangan politik, ekonomi dan kebudayaan, guna membangun Indonesia jang demokratis, bersatu dan makmur, PKI mengadakan suatu *Program Umum* jang sesuai dengan pendirian<sup>2</sup> bagian terbesar Rakjat Indonesia.

#### *P e r t a m a :*

Sistim negara Indonesia tidak seharusnya sistim negara anti-Rakjat jang dikuasai oleh tuantanah<sup>2</sup> dan komprador, melainkan harus sistim negara Rakjat jang sumber kekuasaannya ada pada Rakjat, jaitu negara Demokrasi Rakjat, negara dari Rakjat, oleh Rakjat dan untuk Rakjat. Hanja negara jang demikian inilah jang sesuai dengan watak Revolusi Agustus 1945. Pemerintah Demokrasi Rakjat akan merupakan suatu pemerintah jang samasekali baru djika dibandingkan dengan semua pemerintah jang ada se-

belumnya. Ia akan merupakan suatu pemerintah yang mendasarkan dirinya atas massa. Ia akan merupakan suatu pemerintah yang tujuannya ialah kemerdekaan nasional yang penuh. Ia akan merupakan suatu pemerintah front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani dibawah pimpinan kelas buruh. Mengingat terbelakangnya ekonomi negeri kita PKI berpendapat bahwa pemerintah ini harus tidak merupakan pemerintah diktatur proletariat melainkan pemerintah diktatur Rakyat. Pemerintah ini bukannya harus melaksanakan perubahan<sup>1</sup> sosialis melainkan perubahan<sup>1</sup> demokratis. Ia akan merupakan suatu pemerintah yang mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti-imperialis, yang mampu memberikan tanah dengan cuma<sup>2</sup> kepada kaum tani, yang mampu menjamin hak<sup>1</sup> demokrasi bagi Rakyat : suatu pemerintah yang mampu membela industri dan perdagangan nasional, yang mampu meningkatkan tingkat hidup materiil kaum buruh dan menghapuskan pengangguran, yang mampu memberantas buta huruf dan yang mampu melakukan revolusi kebudayaan dikalangan Rakyat. Dengan singkat, ia akan merupakan suatu pemerintah Rakyat yang mampu menjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannya melalui jalan demokrasi dan kemajuan.

### *K e d u a :*

Demokrasi Indonesia tidak seharusnya demokrasi model Barat, demokrasi liberal, demokrasi lama, melainkan harus demokrasi untuk semua golongan Rakyat, laki<sup>2</sup> dan wanita, dan mengenai semua lapangan politik, ekonomi dan kebudayaan. Demokrasi ini adalah demokrasi tipe baru, demokrasi Rakyat. Demokrasi Rakyat adalah sekaligus mungkin dan perlu. Demokrasi Rakyat adalah mungkin, karena disatu pihak burjuasi nasional sangat lemah kedudukannya dilapangan ekonomi dan tidak kuat kedudukannya dilapangan politik, sedangkan dipihak lain proletariat Indonesia telah terbukti mempunyai kesadaran kelas yang tinggi, mempunyai kemampuan yang tak bisa diabaikan dilapangan politik, dan sanggup memberi pimpinan kepada massa luas kaum tani, burjuasi ketjil kota, kaum intelektual revolusioner dan elemen<sup>2</sup> demokratis lainnya. Demokrasi Rakyat adalah perlu, karena hanya demokrasi matjam inilah yang akan mendapat dukungan penuh dari ber-djuta<sup>2</sup> kaum buruh; ber-puluh<sup>2</sup> djuta kaum tani serta burjuasi ketjil kota, kaum intelektual, burjuasi nasional, kaum ningrat (bangsawan) yang maju dan elemen<sup>2</sup> patriotik umumnya.

### ***Ketiga:***

Pohuk pemerintah Rakjat, jaitu penghapusan kekuasaan kaum imperialis disegala lapangan dan penghapusan penindasan feodal tidak seharusnya berarti digantikannya kekuasaan itu oleh kekuasaan burjuasi dalam negeri atas Rakjat banjak, melainkan harus digantikan oleh kekuasaan bersama diantara semua kelas yang anti-imperialis dan anti-feodal, jaitu sistim politik front persatuan. Dengan demikian bisa dihilangkan ketidakadilan, bahwa ber-djuta<sup>2</sup> kaum buruh dan ber-puluh<sup>2</sup> djuta kaum tani tidak turut menentukan haluan politik pemerintah, djuga bahwa ber-djuta<sup>2</sup> kaum burjuis kecil kota, kaum intelektual dan kaum burjuis nasional yang anti-imperialis dan anti-feodal tidak turut menentukan haluan pemerintah. Dengan ikut-sertanya Rakjat banjak ini dalam tampuk pimpinan negara, maka terdjamilah setjara sungguh<sup>2</sup> kekebalan perseorangan dan tempattinggal kemerdekaan beragama, kemerdekaan berkejakinan, berbitjara pers, berserikat, berkumpul, hak demonstrasi, hak mogok dan mendirikan serikathuruh, kemerdekaan bergerak dan memilih pekerjaan, serta hak semua warganegara atas upah sama untuk pekerjaan yang sama. Negara adalah badan keduniaan. Badan<sup>2</sup> keagamaan dipisahkan dari negara.

### ***Keempat:***

Struktur pemerintah Rakjat tidak seharusnya struktur demokrasi begitu sadja, djuga tidak seharusnya struktur yang memusat sadja, melainkan harus struktur demokrasi yang memusat. Ini berarti bahwa disatu pihak kekuasaan tertinggi untuk daerah<sup>2</sup> ada pada DPRD<sup>2</sup> dan dipihak lain ada pemerintah sentral yang kuat, yang mengurus urusan<sup>2</sup> umum, dan yang tunduk pada DPR pilihan Rakjat. Kekuasaan daerah harus memperkuat kekuasaan pusat dan kekuasaan pusat harus membantu perkembangan demokrasi, ekonomi dan kebudayaan daerah. Dengan demikian Republik Proklamasi dipertahankan setjara teguh dalam wujud Republik Kesatuan dengan pemerintah daerah yang demokratis dan otonomi suku-bangsa yang luas. Kekuasaan tertinggi harus ada ditangan wakil<sup>2</sup> yang dipilih oleh Rakjat, yang saban waktu bisa ditarik kembali atas putusan bagian terbesar daripada pemilihnya.

### ***Kelima:***

Tentara dan kekuatan bersendjata lainnya tidak seharusnya mendjadi alat untuk menindas Rakjat, melainkan harus mendjadi

pengabdian Rakyat. Ini sesuai dengan tradisi Angkatan Perang Republik Indonesia yang bersemangat Revolusi Agustus 1945, yang selama peperangan kemerdekaan melawan tentara kolonial Belanda dan selama pertempuran menumpas pemberontak kontra-revolusioner "PRRI-Permesta" maupun menumpas gerombolan DI-TII senantiasa hidup-semati dengan Rakyat. Sudah sewajarnya bahwa perwira<sup>2</sup>, bintara<sup>2</sup>, dan tamtama<sup>2</sup> APRI tetap setia pada tjipta<sup>2</sup> Revolusi Agustus dan berjuang untuk pelaksanaan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus itu.

### *K e e n a m :*

Ekonomi Indonesia, disamping mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai sektor yang memimpin, tidak seharusnya menentang industri dan perdagangan yang diselenggarakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan harus dengan konsekwen menentang ekonomi kaum imperialis dan feodal. Ekonomi kaum kapitalis nasional justru harus dikembangkan, dan untuk ini syaratnya adalah dihapuskannya sistem ekonomi imperialis dan feodal. Proteksi, dan fasilitas harus diberikan kepada kapitalis<sup>2</sup> nasional, terutama industri<sup>2</sup> nasional, untuk berkembang dalam batas<sup>2</sup> yang tak dapat menguasai kehidupan Rakyat dan negara, dan disamping itu ekonomi individu Rakyat pekerdja harus dibantu.

### *K e t u d j u h :*

Hubungan agraria dan pertanian tidak seharusnya bersifat imperialis dan feodal, melainkan harus bersifat merdeka dan demokratis. Oleh sebab itu semua tanah yang dimiliki oleh tuantanah<sup>2</sup> asing maupun tuantanah<sup>2</sup> Indonesia harus disita tanpa penggantian kerugian. Kepada kaum tani, per-tama<sup>2</sup> kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tanimiskin, diberikan dan dibagikan tanah dengan tjuma<sup>2</sup>. Tanah<sup>2</sup> harus dibagikan kepada anggota keluarga kaum tani seorang<sup>2</sup>. Sistem milik tanah haruslah sistem milik tanah kaum tani, artinya milik perseorangan kaum tani atas tanah. Perkebunan<sup>2</sup> yang berteknik modern, juga tanah<sup>2</sup> hutan, tidak dibagikan kepada kaum tani melainkan harus dikuasai oleh negara. Tanah dan milik lain dari kaum tanikaja tidak disita. Tanah dan milik lain dari kaum tanisedang dihindungi oleh pemerintah. Sistem rodi, pologoro dan perbudakan feodal lainnya dihapuskan. Hutang kaum tani, nelajan dan tukang<sup>2</sup> keradjinan tangan kepada lintah-darat juga dihapuskan. Kredit yang pandjang, mudah dan murah diberikan kepada kaum tani, nelajan dan tukang<sup>2</sup> keradjinan

tangan. Kaum tani dibantu dalam memperbaiki sistim irigasi jang lama dan membikin jang baru. Mengingat bahwa diberbagai pulau terdapat tanah<sup>2</sup> luas jang baik untuk dikerdjakan tetapi belum dibuka karena kurangnya tenaga kerdja, maka dengan tenaga dan alat<sup>2</sup> pemerintah diselenggarakan pemindahan ber-angsur<sup>2</sup> dari sebagian penduduk pulau Djawa dan pulau<sup>2</sup> lainnja ke-pulau<sup>2</sup> tsb, dan kepada mereka ini diberikan tanah jang tjukup sebagai milik perseorangan, djuga diberikan perlengkapan jang perlu untuk perumahan, perawatan kesehatan, kredit dan alatkerdja jang tjukup.

### *Kedelapan :*

Industri dan perburuhan tidak seharusnya bersifat kolonial, melainkan harus bersifat nasional. Industri nasional dikembangkan dan sjarat<sup>2</sup> untuk industrialisasi negeri disiapkan dengan menggunakan semua tenaga dan sumber negara. Upah minimum bagi buruh industri dan buruh perkebunan diatur, demikian pula gadji minimum bagi pegawai<sup>2</sup> pemerintah dan pegawai<sup>2</sup> kantor partikelir. Mengadakan kerdja 6 djam sehari untuk pekerdjaan tambang dibawah tanah dan industri<sup>2</sup> lam jang mengganggu kesehatan. Mengadakan liburan tahunan se-kurang<sup>2</sup>nja 14 hari dengan upah penuh. Mengadakan sistim djaminan sosial atas beaja negara dan kaum kapitalis dalam hal sakit, tjatjad, pengangguran dan hari tua. Melarang dilakukannja pekerdjaan oleh wanita<sup>2</sup> dan buruh muda dalam industri<sup>2</sup> jang mengganggu kesehatan, dan melarang kerdja anak<sup>2</sup>. Melenjapkan penghisapan setengah-feodal atas kerdja, termasuk sistim kenek, sistim kontrak, dll. Mendjamin perkembangan bebas serikatburuh<sup>2</sup> dan hak mengadakan perdjandjian<sup>2</sup> kolektif. Mengadakan kontrol jang keras atas harga barang<sup>2</sup> dagangan.

### *Kesembilan :*

Kebudayaan Indonesia tidak seharusnya kebudayaan kolonial, jang tidak ilmiah dan anti-kerakjatan, melainkan harus kebudayaan jang nasional, ilmiah dan kerakjatan. Kewadjabian beladjar jang tjuma<sup>2</sup> diadakan bagi anak lelaki maupun perempuan sampai umur 13 tahun. Pekerdjaan para sardjana dan seniman dibantu dan dikembangkan. Semua sukubangsa berhak memakai bahasa daerahnja di-sekolah<sup>2</sup>, dipengadilan dan dimana sadja, disamping menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Mengadakan sistim kesehatan Rakjat dengan pusat<sup>2</sup> peng-

obatan dan rumahsakit<sup>2</sup> yang luas, termasuk balai<sup>2</sup> kesehatan bagi wanita hamil dan anak<sup>2</sup>. Mengambil tindakan<sup>2</sup> untuk memberantas dan melenjapkan sumber<sup>2</sup> malaria, kolera, disentri dan penjakat<sup>2</sup> menular lainnya.

### **Kesepuluh:**

Politik luar negeri Indonesia tidak seharusnya politik luar negeri yang bertentangan dengan kemerdekaan, keutuhan wilayah dan perdamaian dunia melainkan harus politik luar negeri yang membela kemerdekaan, keutuhan wilayah dan perdamaian dunia. Mempertajamkan pembebasan Irian Barat sebagai wilayah yang sah dari Republik Indonesia, dan mengirim kembali tentara dan pegawai<sup>2</sup> kolonial Belanda dari Irian Barat. Mendjalankan setajara konsekwen politik bebas dan aktif yang anti-kolonialisme dan menudju perdamaian dunia yang abadi, yaitu politik perdamaian dan persahabatan dengan semua negeri yang tjinta-damai berdasarkan Dasasila Asia-Afrika. Melarang propaganda perang. Mendjalankan politik kerdjasama ekonomi, ilmu dan kebudayaan dengan semua negara atas dasar saling menguntungkan dan persamaan yang sepenuhnya.

Demikianlah *Program Umum* yang diadjukan PKI, yang benar<sup>2</sup> sesuai dengan tuntutan bagian terbesar Rakjat Indonesia.

## **III**

### **Pembentukan Front Persatuan Nasional Atas Dasar Persekutuan Kaum Buruh Dan Kaum Tani**

Pembentukan pemerintah Demokrasi Rakjat dan pelaksanaan program diatas oleh pemerintah ini berarti mendjamin mungkin mengachiri untuk se-lama<sup>2</sup>nya kekuasaan kaum imperialis, tuan-tanah dan burdjuasi komprador dinegeri kita, berarti mulainya zaman baru dalam sedjarah kemadjuan Rakjat kita.

Djalan apakah yang harus ditempuh oleh Rakjat Indonesia? Bentuk<sup>2</sup> perdjjuangan apakah yang harus diambil oleh Rakjat Indonesia?

Tiap<sup>2</sup> bangsa akan melalui djalannya sendiri menudju ke Sosialisme berdasarkan perkembangan daripada keadaan nasionalnya, daripada keadaan politik, ekonomi dan kebudayaan. Klas buruh bisa memenuhi kewadajiban sedjarahnja dalam negara yang demokratis, dimana Parlemen dan badan<sup>2</sup> lainnya diperbaharui, artinja diberi isi yang benar<sup>2</sup> demokratis serta disusun sesuai dengan ke-

inginkan Rakjat.

Snakatma, dapatkah ditjapai Demokrasi Rakjat di Indonesia melalui djalan damai, djalan parlementer?

Ini adalah suatu kemungkinan dan kemungkinan jang dengan sekuat tenaga harus kita djadikan kenyataan. Memang kalau tergantung kepada kaum Komunis, bentuk jang se-baik<sup>2</sup>nja, bentuk jang ideal dari peralihan kesistim kekuasaan Rakjat jang demokratis yaitu tingkat persiapan kesistim sosialis, ialah bentuk jang damai, bentuk jang parlementer. Djika tergantung pada kaum Komunis, djalan damai lah jang dipilih.

Tetapi apakah kaum imperialis, tuan<sup>2</sup> feodal dan tuan<sup>2</sup> komprador akan membiarkan hapusnya kekuasaan kolonial dan penghisapan feodal mereka serta peralihan kesistim kekuasaan Rakjat setjara damai, setjara parlementer? Ini tidak tergantung pada kaum Komunis: ini tergantung pada kaum imperialis, tuan<sup>2</sup> feodal dan tuan<sup>2</sup> komprador. Pengalaman membuktikan, bahwa mereka tidak akan membiarkan peralihan kekuasaan setjara damai itu, djika imbalan kekuatan menguntungkan mereka. Hanja djika imbalan kekuatan tidak menguntungkan mereka, maka mereka, sekalipun berkepentingan dan ingin, tetapi tidak mampu merintangi peralihan setjara damai itu.

Oleh sebab itu, diatas se-gala<sup>2</sup>nja kaum Komunis harus waspada, harus senantiasa mempersiapkan diri dan mempersiapkan Rakjat disegala lapangan agar kaum reaksioner tidak bisa menghalangi keinginan Rakjat untuk mentjapai perubahan<sup>2</sup> sosial jang fundamental setjara damai, setjara parlementer. Tindakan sewenang<sup>2</sup> kaum reaksioner terhadap Rakjat dan Partai Komunis hanja dapat dipatahkan dengan kekuatan Rakjat jang lebih besar daripada kekuatan kaum reaksioner dan dengan pimpinan jang teguh dari Partai Komunis jang bersatu dengan partai<sup>2</sup> demokratis lainnja.

Djadi, djalankeluar terletak dalam mengubah imbalan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuantanah dan burdjuasi komprador disatu pihak, dan kekuatan Rakjat dipihak lain. Djalankeluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani.

Klas buruh harus memelopori perdjjuangan seluruh Rakjat. Untuk tudjuan ini klas buruh sendiri harus meningkatkan aktivitasnja, mendidik dirinja sendiri dan mendjadi kekuatan jang besar dan sadar. Klas buruh tidak hanja harus melakukan perdjjuangan untuk memperbaiki tingkathidupnja, ia djuga harus meningkatkan tugas<sup>2</sup>nja ketingkatan jang lebih luas dan lebih tinggi. Ia harus membantu perdjjuangan klas<sup>2</sup> lainnja. Klas buruh harus membantu

perjuangan kaum tani untuk tanah, perjuangan kaum intelligensia untuk hak<sup>2</sup>nja yang pokok, perjuangan burdjuasi nasional melawan persaingan asing, perjuangan seluruh Rakyat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan<sup>2</sup> demokratis. Rakyat bisa mentjapai kemenangan hanya apabila klas buruh Indonesia sudah merupakan kekuatan yang bebas, sadar, matang dalam politik, terorganisasi dan mampu memimpin perjuangan seluruh Rakyat, hanya apabila Rakyat sudah melihat klas buruh sebagai pemimpinnja.

Tetapi tidak tjukup hanya dengan mempertinggi kesedaran dan organisasi klas buruh sadja : masih ada kaum tani yang harus dibangkitkan dan diorganisasi. Dengan tidak turut aktifnja kaum tani, yang merupakan 60% sampai 70% penduduk tidak mungkin kita berbitjara tentang kemenangan Rakyat. Inilah sebabnja mengapa klas buruh harus membantu perjuangan kaum tani.

Persekutuan buruh dan tani merupakan dasar perjuangan Rakyat, ia merupakan batupertama yang harus dijadikan dasar bagi perjuangan seluruh Rakyat melawan musuh<sup>2</sup> asing. Pembentukan persekutuan buruh dan tani persekutuan pedjuang<sup>2</sup> yang sadar, aktif dan terorganisasi, — disinilah letaknja djaminan bagi kemenangan Rakyat.

Kaum intelligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional seharusnya memasuki perjuangan Rakyat untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan demokratis. Kaum intelligensia berkepentingan dalam pembentukan suatu Republik Indonesia yang merdeka dan demokratis dengan kebudajaan yang madju. Burdjuasi ketjil — tukang<sup>2</sup> keradjinan tangan, pedagang<sup>2</sup> dan pengusaha<sup>2</sup> pertukangan ketjil — akan membantu perjuangan bersama dari Rakyat, karena kepentingan mereka djuga terdesak didalam Indonesia yang belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal.

Djuga burdjuasi nasional seharusnya turut ambil bagian dalam perjuangan untuk pembebasan nasional, tetapi tidak demikian halnja dengan burdjuasi komprador yang dengan seribusatu djalan berhubungan dengan kaum imperialis dan yang kepentingannya terdjalin dengan kepentingan kaum pendjadjah. Burdjuasi nasional, terutama kaum industrialis nasional, menginginkan berachirnja persaingan asing, menginginkan perkembangan industri dan perdagangan nasional.

Djadi, klas buruh, kaum tani, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional, harus bersatu didalam satu front nasional.

Persekutuan klas buruh dan kaum tani harus mendjadi dasar dari front persatuan nasional ini.

Klas buruh harus mendjadi pemimpin front persatuan nasional.

Hanja suatu front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, dipimpin oleh klas buruh, dan terbentuk sebagai hasil gerakan Rakjat yang se-luas<sup>2</sup>nja dan per-djuangan revolusioner daripada massa, akan memungkinkan Rak-jat Indonesia mendirikan suatu pemerintah Demokrasi Rakjat yang akan menjalankan program Demokrasi Rakjat dan memimpin Rakjat menuju kemenangan.

#### IV

#### Program Tuntutan PKI

PKI bertudjuan mempersatukan Rakjat Indonesia kedalam satu front nasional dan sebagai hasil perdjuaan revolusioner dari ber-djuta<sup>2</sup> massa mentjiptakan pemerintah Demokrasi Rakjat. PKI tidak memandang pekerdjaan dalam Parlemen sebagai pekerdjaan terpokok dan tidak pula menganggapnja sebagai satu<sup>2</sup>nja bentuk perdjuaan. Tetapi ini tidak berarti, bahwa PKI mengabaikan pemilihan<sup>2</sup> dan perdjuaan parlementer, djuga tidak berarti bahwa PKI mengambil sikap yang satu dan sama terhadap pemerintah<sup>2</sup> yang akan ada dikemudian hari sampai terbentuknja pemerintah Demokrasi Rakjat. Samasekali tidak.

PKI mendasarkan politiknya atas analisa Marxis mengenai keadaan yang kongkrit dan perimbangan kekuatan. PKI telah ambil-bagian dan akan terus ambilbagian yang paling aktif dalam pemilihan<sup>2</sup> dan perdjuaan parlementer. PKI, sedar sepenuhnya akan tanggungjawab politiknya, menjalankan pekerdjaan parlementer dengan penuh ke-sungguh<sup>2</sup>an. PKI bukannya tidak mem-beda<sup>2</sup>kan sikap terhadap tiap<sup>2</sup> pemerintah. Dalam keadaan<sup>2</sup> tertentu Partai beroposisi terhadap pemerintah dan berseru kepada massa untuk menggulingkannya, dalam keadaan<sup>2</sup> lain Partai menjokong pemerintah dan dalam keadaan<sup>2</sup> yang lain lagi turut dalam pemerintah.

Sokongan yang diberikan PKI kepada Konsepsi Presiden Sukarno, yang djika dijalankan akan berarti terbentuknja pemerintah gotongrojong atau pemerintah koalisi nasional, dituntun oleh pendirian yang tidak menjamakan setiap pemerintah sebelum terbentuknja Demokrasi Rakjat itu.

Apakah tuntutan<sup>2</sup> minimum, tuntutan<sup>2</sup> yang paling mendesak dari Rakjat Indonesia dewasa ini?

Berdasarkan Program Umum PKI, dan sesuai dengan perimbangan kekuatan serta sesuai dengan keadaan yang berlaku sekarang, maka PKI mengajukan Program Tuntutan yang men-tjerminkan tuntutan<sup>2</sup> yang paling mendesak dan yang objektif dari

Rakjat Indonesia sekarang.

PKI berpendapat, bahwa Program Tuntutan ini yang paling baik dilaksanakan oleh suatu pemerintah gotongroyong. Tetapi sekalipun pemerintah belum pemerintah gotongroyong selama ia berpendirian anti-kolonial dan maju, ia mempunyai syarat untuk memenuhi tuntutan<sup>2</sup> mendesak Rakjat Indonesia ini. Hanya jika pemerintah menjalankan program yang menguntungkan kepentingan nasional, yang demokratis dan maju, maka ia bisa mendapat sokongan yang kuat dari Rakjat.

Oleh sebab itu PKI mengadakan tuntutan<sup>2</sup> sebagai berikut :

### Untuk Kemerdekaan Nasional

1. Perhebat lebih lanjut perjuangan pembebasan Irian Barat dengan jalan menjusun kekuatan dalam negeri, menggalang semua potensi nasional, memodernisasi perlengkapan AD, ALRI dan AURI, dan menarik solidaritet internasional, untuk menghadapi segala kemungkinan.
2. Bantu Rakjat Indonesia yang berada di Irian Barat dalam mengorganisasi diri dan dalam semua bentuk perlawanannya terhadap pendudukan Belanda di Irian Barat.
3. Mobilisasi dan koordinasi seluruh kekuatan nasional untuk merebut kemerdekaan ekonomi yang lebih besar, dengan jalan a.l. menasionalisasi semua perusahaan Belanda, termasuk modal Belanda didalam perusahaan<sup>2</sup> tjampuran, a.l. BPM. Perlakukan perusahaan<sup>2</sup> AS sama dengan perusahaan<sup>2</sup> Belanda, jika AS terusmenerus mempersendjatai gerombolan<sup>2</sup> kontra-revolusioner atau membantu Belanda dengan sendjata dalam agresinya terhadap R.I.
4. Hantjurkan samasekali gerombolan pengatjau sisa<sup>2</sup> kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, gerombolan teroris DI-TII, gerombolan subversif KMT dan gerombolan<sup>2</sup> kakitangan imperialis lainnya dan amankan seluruh negeri dalam tempo yang se-singkat<sup>2</sup>nja.
5. Djatuhkan hukuman mati kepada orang<sup>2</sup> asing yang terang membantu pemberontak kontra-revolusioner dan djuga kepada orang<sup>2</sup> Indonesia yang mengepalai pemberontakan kontra-revolusioner dan yang memerintahkan pembunuhan<sup>2</sup> massal terhadap Rakjat dan pemimpin<sup>2</sup> Rakjat.
6. Djatuhkan hukuman yang berat kepada siapa sadja yang mengadakan gerakan<sup>2</sup> subversif dengan jalan melakukan sabotase<sup>2</sup> di-djawatan<sup>2</sup> pemerintah, dilapangan ekonomi atau di-lapangan<sup>2</sup> lain.

## Untuk Hak<sup>2</sup> Demokrasi

7. Laksanakan UUD 1945 sesuai dengan jiwa, semangat dan watak Revolusi Agustus 1945 yang anti-imperialis dan demokratis.
8. Kalahkan politik anti-persatuan dan politik diktatur anti-Komunis dari siapa saja, terutama dari sebagian pemimpin<sup>2</sup> Masjumi-PSI dan bentuk pemerintah gotongroyong diantara partai<sup>2</sup> yang setuju Konsepsi Presiden.
9. Laksanakan dengan sungguh<sup>2</sup> otonomi daerah seperti yang ditetapkan didalam Undang<sup>2</sup> no. 1 tahun 1957, adakan keseimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah serta bantu perkembangan ekonomi daerah dan kebudayaan tiap<sup>2</sup> suku-bangsa.
10. Hapuskan semua undang<sup>2</sup> dan peraturan<sup>2</sup> kolonial seperti „IGOB“, „IGOB“, dll. dan demokratisasikan pemerintah desa dengan jalan mengadakan pemilihan kepala desa setjara periodik dan membentuk otonomi daerah swatantra tingkat III.
11. Adakan tepat pada waktunya pemilihan umum yang demokratis langsung, sama, bebas dan rahasia, baik untuk DPR maupun untuk DPRD<sup>2</sup>.
12. Beri kebebasan demokratis yang se-luas<sup>2</sup>nja kepada Rakyat dan organisasi<sup>2</sup> Rakyat dan batalkan semua undang<sup>2</sup> dan peraturan<sup>2</sup> yang membatasi kebebasan gerakan patriotik. Jamin hak sama bagi semua warganegara, tanpa pandang asal keturunan, kejakinan politik dan kepertjajaan.
13. Jamin semua hak dan kebebasan kaum buruh dan pegawai negeri untuk membela kepentingan<sup>2</sup>nja yang sah dan batalkan semua undang<sup>2</sup> dan peraturan<sup>2</sup> yang bersifat melarang atau membatasi hak mogok kaum buruh dan pegawai negeri.
14. Jamin hak sama antara laki<sup>2</sup> dan wanita dalam hak memilih dan dipilih, hak memangku semua jabatan umum dan hak atas upah yang sama bagi pekerdjaan yang sama, jamin kedudukan yang sama bagi wanita dalam perkawinan, pertjeriaan dan pembagian waris serta hak sama untuk mendapatkan pendidikan dan menuntut ilmu, dan jamin bagi wanita hak keringanan kerdja selama hamil dan hak perlop sebelum dan sesudah melahirkan.
15. Petjat dari jabatan<sup>2</sup> pemerintah pengchianat<sup>2</sup> bangsa, orang<sup>2</sup> reaksioner, penggelap<sup>2</sup> dan koruptor<sup>2</sup> dan supaja orang<sup>2</sup> ini dihukum, tidak perduli mereka itu orang<sup>2</sup> sivil atau militer, anggota partai pemerintah atau bukan.
16. Tempatkan pada jabatan<sup>2</sup> pemerintah orang<sup>2</sup> yang bersedia

mengabdikan dirinya kepada kepentingan Republik dan Rakyat Indonesia.

17. Adakan hubungan salingbantu yang baik antara dwitunggal Tentara dan Rakyat dan antara perwira dan anakbuah, pertahankan hakpilih dan hak<sup>2</sup> demokratis lainnya bagi pradjurit, singkirkan dari ketentaraan pengkhianat<sup>2</sup> bangsa koruptor<sup>2</sup> dan elemen<sup>2</sup> yang hendak merusak demokrasi parlementer dan mendirikan diktatur militer atau junta militer dinegeri kita.

### Untuk Perbaikan Nasib

18. Pertinggi upah riil kaum buruh dan pegawai negeri, perbaiki djaminan sosial dan sjarat<sup>2</sup> kerdja mereka. Berikan tundjangan kepada penganggur dan larang pemetjatan se-wenang<sup>2</sup>.
19. Perbaiki keadaan kaum tani dengan mewadjudkan tuantanah<sup>2</sup> menurunkan sewatanah, sehingga kaum tani penjewa tanah menerima minimum 60% dan tuantanah menerima maximum 40% dari hasil panen, serta dengan mewadjudkan lintah-darat<sup>2</sup> mendaftarkan diri dan menurunkan bunga uang pin-djaman, dengan meringankan pajak<sup>2</sup> negara dan dengan menghapuskan tunggakan pajak bumi.
20. Perbaiki nasib buruhtani dan lindungi hak kaum tani penjewa tanah, beri pindjaman yang mudah, langsung, pandjang dan berbunga rendah kepada petani<sup>2</sup> miskin dan bantu petani<sup>2</sup> mengorganisasi diri untuk mengembangkan produksi pertanian.
21. Hapuskan setoran<sup>2</sup> paksa kaum tani, hapuskan sistim pologoro dan rodi serta perbaiki nasib pamongdesa.
22. Sahkan milik kaum tani atas tanah yang dulunya milik perkebunan<sup>2</sup> asing tetapi yang sudah lama dikerdjakan oleh kaum tani, larang perampasan tanah<sup>2</sup> tersebut oleh pihak perkebunan, dan selesaikan sengketa<sup>2</sup> tanah dengan djalan berunding.
23. Berikan dan bagikan dengan tjuma<sup>2</sup> tanah<sup>2</sup> kosong yang tak dikerdjakan kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin. Batasi milik tanah tuantanah, beli tanah<sup>2</sup> kelebihan dari tuantanah dengan tjara dan harga yang ditentukan oleh pemerintah dan bagikan tanah<sup>2</sup> itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.
24. Sita tanah dan milik lain dari kaum tuantanah yang memihak gerombolan pengatjau kontra-revolusioner dan gerombolan<sup>2</sup> teroris lainnya, dan bagikan tanah<sup>2</sup> itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.
25. Djamin hak kaum tani dan organisasi<sup>2</sup> tani dalam menentu-

- kan sewatanah kaum tani jang disewa untuk ditanami rosela, tebu, tembakau, dll.
26. Laksanakan dengan sungguh<sup>2</sup> nasionalisasi tanah<sup>2</sup> partikelir dengan harga dan tjara pembayaran jang ditentukan oleh pemerintah dan bayikan tanah<sup>2</sup> sawah dan ladang dari bekas<sup>2</sup> tanah partikelir itu kepada kaum tani takbertanah dan tani-miskin
  27. Adakan jaminan pasar, perlindungan, kredit, dan keringanan pajak bagi pengusaha<sup>2</sup> ketjil.
  28. Tjegah pembongkaran se-wenang<sup>2</sup> terhadap rumah<sup>2</sup> Rakjat dan beri bantuan kredit dan material dengan harga pantas kepada Rakjat di-kota<sup>2</sup> untuk mendirikan rumahtinggal.
  29. Bantu penanclajan dengan modal dan alat penangkap ikan, bantu mereka mengadakan pengawetan, meluaskan pasar, dan ringankan pajak lelang; bebaskan buruhnelajan dari rodi. perbaiki upah mereka dan turunkan setorannja.
  30. Adakan persiapan<sup>2</sup> jang pantas dalam melaksanakan transmigrasi, berikan tanah jang tjukup dan baik serta bantuan kredit dan alat<sup>2</sup> kerdja bagi para transmigran, dan bantu transmigran<sup>2</sup> spontan.
  31. Jamin hak mendirikan dan mengembangkan koperasi<sup>2</sup> di-kalangan kaum buruh, kaum tani, nelajan dan pekerdja<sup>2</sup> kerajinan tangan dan bantu koperasi<sup>2</sup> Rakjat pekerdja dengan modal dan fasilitas tanpa diskriminasi.
  32. Beri hak kepada kaum tani untuk dengan latihan dan pimpinan TNI mengangkat sendjata membela diri terhadap gerombolan<sup>2</sup> teroris jang membunuh kaum tani dan menghantjurkan desa<sup>2</sup>. Beri bantuan kepada kaum pengungsi korban keganasan gerombolan<sup>2</sup> teroris.
  33. Perbaiki asrama<sup>2</sup> pradjurit dan polisi, adakan perbaikan sjarathidup bagi parapradjurit dan perlakuan<sup>2</sup> istimewa terhadap pasukan<sup>2</sup>, perwira<sup>2</sup>, bintara<sup>2</sup> dan tamtama<sup>2</sup> dari semua angkatan bersendjata jang beroperasi menindas kaum pemberontak kontra-revolusioner dan gerombolan<sup>2</sup> teroris.
  34. Jamin pekerdjaan dan pendidikan kedjuruan bagi para veteran bekas pedjuang bersendjata.

### Untuk Perbaikan Ekonomi

35. Pertinggi panen padi, bahan<sup>2</sup> makanan lainnja dan kapas dengan djalan menentukan kewadajiban<sup>2</sup> kepada pemilik<sup>2</sup> perkebunan<sup>2</sup> untuk menanami sebagian kebunnja dengan padi, bahan<sup>2</sup> makanan lainnja atau kapas, dan dengan djalan mem-

- berikan bantuan kepada kaum tani berupa bibit, alat<sup>2</sup> pertanian, rabuk, bimbingan teknis dan perbaikan pengairan.
36. Perluas pembangunan industri nasional dan lindungi industri nasional terhadap persaingan barang<sup>2</sup> asing, adakan sistem tjukei yang bersifat melindungi dan kendalikan harga barang<sup>2</sup> supaya tidak terus membubung.
  37. Batalkan Undang<sup>2</sup> Penanaman Modal Asing Kuasai devisa maskapai<sup>2</sup> minyak asing, awasi produksi dan kuasa, distribusi hasil<sup>2</sup> minyak untuk menjamin kebutuhan Rakyat dan pertahanan negara.
  38. Djadikan perusahaan<sup>2</sup> bekas milik Belanda sebagai perusahaan<sup>2</sup> pemerintah dan tegah pematik keliran perusahaan<sup>2</sup> pemerintah. Konsesi<sup>2</sup> tanah untuk pertambangan yang belum digunakan supaya segera ditjabut kembali dan sedapat mungkin diusahakan oleh pemerintah sendiri.
  39. Impor dan ekspor serta perusahaan<sup>2</sup> penting disegala lapangan harus sepenuhnya dikuasa oleh pemerintah. Impor untuk keperluan negara dan kebutuhan pokok Rakyat serta ekspor barang<sup>2</sup> hasil perusahaan<sup>2</sup> negara supaya dilakukan langsung oleh pemerintah. Laksanakan distribusi bahan<sup>2</sup> kebutuhan pokok Rakyat lewat koperasi<sup>2</sup> Rakyat, RK<sup>2</sup>, RT<sup>2</sup> dan warung<sup>2</sup>.
  40. Perbaiki dan perbanyak alat<sup>2</sup> perhubungan darat, sungai, laut dan udara, terutama untuk daerah<sup>2</sup> luar Djawa.
  41. Rentjana<sup>2</sup> pembangunan ekonomi pemerintah tidak boleh memberatkan beban Rakyat, sebaliknya yang harus diberatkan ialah kapitalis<sup>2</sup> besar asing, tuantanah<sup>2</sup> dan hartawan<sup>2</sup> lainnya.

### Untuk Kemadjuan Kebudayaan

42. Tambah anggaran belandja untuk Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, tambah djumlah sekolah, gedung<sup>2</sup> dan peralatan sekolah, kembalikan gedung<sup>2</sup> sekolah yang dipakai untuk keperluan lain, djamin fasilitas<sup>2</sup> dilapangan pendidikan bagi murid<sup>2</sup> dan mahasiswa, hapuskan uang udjian, turunkan harga buku<sup>2</sup> peladjaran, perbaiki nasib guru, pergiat usaha pemberantasan butahuruf, selenggarakan pertukaran kebudayaan antar-sukubangsa.
43. Hapuskan pendidikan kolonial serta laksanakan pendidikan nasional yang ilmiah dan kerakjatan, dan larang subversi imperialis dilapangan kebudayaan melalui film, lektur, musik, dll. yang bersifat rendah dan merusak, turunkan pajak seni-màn, pajak tontonan dan pajak impor buku<sup>2</sup> ilmiah serta beri subsidi dan fasilitas kepada organisasi<sup>2</sup> kebudayaan.

44. Adakan kesempatan kerdja jang lebih luas dan perlakuan<sup>2</sup> istimewa terhadap paraahli Indonesia jang dengan sungguh<sup>2</sup> bekerdja untuk kemadjuan ilmu dan kebudayaan.
45. Adakan gedung<sup>2</sup> atau rumah<sup>2</sup> untuk pertemuan<sup>2</sup> paraseniman, untuk latihan<sup>2</sup> dan pertundjukan<sup>2</sup> kesenian. Bantu kegiatan olahraga Rakjat dan pemuda chusu<sup>2</sup>nja.
46. Perbincak klinik<sup>2</sup> pengobatan, biro<sup>2</sup> konsultasi wanita hamil, rumahsalm<sup>2</sup> dan giatan pemberantasan penjakit jang banyak terdapat dikalangan penduduk seperti malaria, trachom, penjakit<sup>2</sup> kulit, tjatjing, tbc dll.

### Untuk Perdamaian Dunia

47. Lawan remiliterasi Djepang jang membahayakan keamanan Indonesia serta perdamaian di Asia dan Pasifik.
48. Desak AS dan Inggris supaya ber-sama<sup>2</sup> Uni Sovjet menghentikan samasekali pertjobaan<sup>2</sup>, penimbunan dan pembuatan sendjata<sup>2</sup> A dan H dan tuntutan supaya SEATO dan semua pakt militer dibubarkan. Adakan daerah bebas-atom di Asia dan Pasifik.
49. Dialankan sungguh<sup>2</sup> politik luarnegeri atas dasar anti-kolonialisme dan mempertahankan perdamaian dunia, laksanakan keputusan<sup>2</sup> Konferensi Bandung dengan konsekwen dan lawan tiap<sup>2</sup> usaha jang mau menarik Indonesia kedalam blok perang dan agresi.
50. Luaskan hubungan ekonomi, ilmu dan kebudayaan dengan semua negeri, tanpa memandang perbedaan sistim sosial dan politik, atas dasar samaderadjat dan saling menguntungkan.



PKI berpendapat bahwa tuntutan<sup>2</sup> diatas adalah tuntutan<sup>2</sup> jang sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh setiap pemerintah jang menghendaki bantuan<sup>2</sup> Rakjat, apabila ia mau menempuh djalan kemerdekaan nasional, demokrasi dan kemadjuan bagi Indonesia.

PKI menjatakan kesediaannja untuk menjokong dan memberikan semua bantuan kepada setiap pemerintah jang memenuhi tuntutan<sup>2</sup> ini, jang bersedia mendjalankan tuntutan<sup>2</sup> ini untuk mengatasi kesulitan<sup>2</sup> dan perlawanan<sup>2</sup> dari reaksi.



Demikianlah, tugas PKI yang pokok ialah menyelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus sampai ke-akar<sup>2</sup>nja, yang berarti pembebasan Rakyat Indonesia dari perbudakan dan kemelaratan, menjamin hidup yang bebas dan bahagia.

Tudjuan perjuangan Rakyat Indonesia yang dijelaskan dalam program ini bersumber pada keadaan kongkrit di Indonesia dan sepenuhnya sesuai dengan harapan dan hasrat bagian terbesar Rakyat Indonesia.

Tidak meragukan lagi bahwa tudjuan ini akan terlaksana, karena bintangkedjora yang menerangi djalan perjuangan Rakyat Indonesia ialah adjaran<sup>2</sup> Marx, Engels dan Lenin yang mahadja, dan karena pengalaman dua Rakyat yang besar — Uni Sovjet dan Tiongkok — merupakan teladan yang memberi inspirasi kepada Rakyat Indonesia dibawah pimpinan klas buruh dan Partai Komunis Indonesia. Djalan lain yang lebih mudah dan lebih tepat daripada ini tidak ada dan tidak mungkin ada.

PKI berseru kepada klas buruh, kaum tani, kaum nelajan, intelligensia, burdjuasi ketjil dan burdjuasi nasional, kepada berbagai partai<sup>2</sup> politik, organisasi<sup>2</sup> dan tenaga<sup>2</sup> progresif lainnya untuk bersatu guna memperkuat dan memperluas front persatuan nasional dalam perjuangan untuk kemerdekaan, kebebasan demokratis dan kesedjahteraan ekonomi Indonesia, dalam perjuangan untuk Indonesia Baru yang bahagia.



## RESOLUSI<sup>2</sup> LAINNJA

### Habiskan Samasekali Kekuasaan Ekonomi Belanda di Indonesia

Dalam Laporan Umum Kawan D.N. Aidit yang disampaikan atasnama Komite Central Partai dan telah disahkan oleh Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 — 14 September 1959 telah disimpulkan, bahwa dengan diambilalijnja perusahaan<sup>2</sup> Belanda dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat pada akhir tahun 1957 tidaklah berarti bahwa perjuangan nasional untuk melikwidasi sepenuhnya sisa<sup>2</sup> kolonialisme Belanda sudah selesai. Belum semua kekuasaan dan pengaruh politik, ekonomi, militer dan kebudayaan kaum kolonialis Belanda dihapuskan bersih dari bumi Indonesia, diantaranya yang menjolok ialah adanya kapital Belanda dilapangan perminjangan yang belum diganggu gugat samasekali.

Karena masih mempunyai kekuasaan kapital, kaum kolonialis Belanda masih mampu mengatjaukan ekonomi Indonesia dengan tindakan<sup>2</sup>nya menekan pemerintah untuk memberikan konsesi<sup>2</sup> baru dengan djalan melakukan massa-onslah terhadap kaum buruh dan mempersulit peredaran minjak keperluan dalam negeri yang tidak hanya vital bagi penghidupan Rakyat, tetapi djuga vital bagi keperluan pembangunan dan pertahanan nasional. Djuga berarti Belanda masih mempunyai sumber keuangan buat membiyai matjam-matjam kegiatan subversi dan mengongkosi tentara pendudukanja di Irian Barat. Karena itu Rakyat Indonesia menjokong sepenuhnya peringatan keras Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknja pada tanggal 17 Agustus 1959, bahwa djika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, djika mereka dalam persoalan claim nasional kita tetap berkepalabatu, maka semua modal Belanda, termasuk yang berada dalam perusahaan<sup>2</sup> tjampuran, akan habis-tamat riwayatnja samasekali di bumi Indonesia.

Untuk melindungi kapitalnja yang masih ada dan untuk dapat terus mengangkangi Irian Barat, yang setjara se-wenang<sup>2</sup> dan kurangadjar telah ditempatkan dibawah kekuasaan Kementerian Dalamnegeri Belanda, kaum kolonialis Belanda masih terus mem-

biajai gerombolan<sup>2</sup> bersendjata anti Republik Indonesia, memper tahankan kakitangannya menduduki fungsi penting dalam alar<sup>2</sup> negara dan dilapangan ekonomi dan terusmenerus mengantara udara, lautan dan pantai<sup>2</sup> Indonesia dengan pesawat<sup>2</sup> udara dan kapalselam<sup>2</sup>. Kekurangadjaran kolonialis<sup>2</sup> Belanda ini akan ber larut<sup>2</sup> djika kepadanya tidak diberikan djawaban yang setimpal. Djawaban ini tidak lain pemerintah harus mengambil langkah<sup>2</sup> yang tegas memenuhi tuntutan Rakjat banyak jaitu menasionalisasi semua perusahaan Belanda yang diambilalih tanpa ganti kerugian dan mengoper saham<sup>2</sup> Belanda yang ada dalam BPM.

Sementara orang yang mudah dihindangi oleh rasa takut kepada imperialisme akan angkat tangan dan herbitjara, ber-hati<sup>2</sup> dalam bertindak dilapangan perminjakan karena soal ini merupakan soal internasional yang gawat. Apa yang dimaksud dengan soal gawat ini tidak lain karena lapangan perminjakan ini menjangkutpaut langsung kepentingan kaum imperialis AS yang banyak menanamkan modalnya dilapangan perminjakan. Terhadap kechwatiran ini Presiden Sukarno telah memberikan penegasan dalam Manifesto Politiknja, bahwa djika modal asing bukan Belanda menjalankan peranan yang negatif, misalnja diam<sup>2</sup> menjalankan sabotase ekonomi atau setjara gelap<sup>2</sup>an memberi bantuan kepada kontra-revolusi, maka djanganlah kaget, djika nanti Rakjat Indonesia memperlakukan mereka sama dengan modal Belanda. Telah menjadi pengalaman politik Rakjat, bahwa pengatjauan peredaran minjak tidak hanja dilakukan oleh BPM, djuga oleh SVPM, bahwa sekarang imperialis AS belum pernah merubah sikapnja menjokong pendudukan Belanda di Irian Barat dan menjadikan Irian Barat sebagai salahsatu pangkalan perang dari SEATO. Djuga telah menjadi pengalaman politik Rakjat pada waktu pengambilalihan perusahaan<sup>2</sup> Belanda dan pada waktu menggagalkan pertjobaan<sup>2</sup> pendaratan tentara AS di Pakanbaru untuk membantu setjara langsung pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“, bahwa kekuatan imperialisme sekarang ini terbatas dan terus merosot.

Situasi internasional dan nasional sekarang lebih menguntungkan djika dibandingkan dengan waktu ketika mengambilalih perusahaan<sup>2</sup> Belanda pada achir tahun 1957. Dalam rangka pelaksanaan program Kabinet Sukarno-Djuanda untuk melanjutkan perdjuaan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik, Kongres Nasional ke-VI PKI menjerukan kepada seluruh Rakjat untuk terus membulatkan persatuan nasional dan meningkatkan kewaspadaan nasional sesuai dengan djiwa UUD 1945 dalam melanjutkan perdjuaan nasional menghabisi samasekali

kekuasaan ekonomi Belanda dan membebaskan Irian Barat dengan berpedoman kepada Manifesto Politik Presiden Sukarno.



## **Turunkan Harga Barang<sup>2</sup> Dengan Melakukan Politik Harga Rendah**

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7-14 September 1959 telah melihat kenyataan<sup>2</sup>, bahwa harapan<sup>2</sup> akan mendapatkan perbaikan penghidupan telah timbul dikalangan Rakyat dalam mereka menjambut program Kabinet Sukarno-Djuanda yang mau melengkapi sandang-pangan Rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnja. Yang terutama diharapkan oleh Rakyat sekarang ini adalah turunnja harga barang<sup>2</sup> kebutuhan hidup se-hari<sup>2</sup>. Didorong oleh kenyataan, bahwa kabinet<sup>2</sup> yang telah silih berganti pada tahun<sup>2</sup> belakangan ini tidak mampu mengendalikan harga, malahan sedikit atau banjak turut menambah mahalnja harga barang<sup>2</sup> dan menambah kemerosotan tingkat hidup Rakyat adalah wadjar djika suasana baru dengan berlakunja UUD '45 diharapkan oleh Rakyat akan membawa perubahan dilapangan penghidupan mereka se-hari<sup>2</sup>.

Tindakan drastis telah dilakukan oleh Kabinet Sukarno-Djuanda yang sedjak tanggal 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang kertas Rp. 500,— dan Rp. 1.000,— mendjadi Rp. 50,— dan Rp. 100,—, pembekuan 90% simpanan uang pada bank<sup>2</sup> diatas djumlah Rp. 25.000,— dan menghapuskan sistim B.E. diganti dengan sistim PUEK (Pemungutan Expor) dan PUIM (Pemungutan Impor). Bersamaan dengan melakukan sanering uang ini didjalankan devaluasi rupiah dengan menetapkan nilai dollar Amerika Serikat mendjadi Rp. 45,—, nilai mana adalah lebih besar daripada waktu berlakunja B.E. yang berdjumlah Rp. 38,— untuk tiap dollar AS.

Karena kurangnya persiapan<sup>2</sup> yang diperlukan, tindakan drastis pemerintah itu menimbulkan banjak keluhan kesah dan tuntutan<sup>2</sup>, supaja Rakyat, terutama kaum buruh, kaum tani, pedagang<sup>2</sup> dan pengusaha<sup>2</sup> ketjil tidak mendjadi korban, demikian djuga pengusaha<sup>2</sup> nasional tidak kekurangan modal, sehingga yang dirugikan hanjalah kaum modal asing, kaum spekulan dan koruptor. Tanpa mentjegah akibat<sup>2</sup> yang merugikan Rakyat, apalagi djika tidak membawa penurunan harga, sanering uang itu hanjalah mengejewakan Rakyat.

Rakyat Indonesia telah mengalami guncang uang model Sjafarudin Prawiranegara yang hanya menguntungkan kaum modal besar asing dan komplotannya dan matjam<sup>2</sup> tindakan moneter dilapangan ekspor-impor seperti sistim BE yang semuanya ini tidak membawa perbaikan apa<sup>2</sup> dilapangan keuangan dan ekonomi, malahan menngatjaukan harga barang<sup>2</sup> kebutuhan hidup Rakyat se-hari<sup>2</sup>. Pada waktu sekarang tingkat harga barang<sup>2</sup> impor kebutuhan Rakyat sudah naik setjara luarbiasa yaitu 700% sampai 800% dari tingkat harga sebelum BE. Dan harga barang<sup>2</sup> impor sekarang dengan resmi dinaikkan oleh pemerintah dengan dilakukannya devaluasi rupiah ditambah dengan PUIM sebagai pengganti TPI yang bag. beberapa golongan barang terdapat kenaikan<sup>2</sup> prosentase.

Laporan Umum Kawan D.N. Aidit atasnama Komite Central Partai yang telah disahkan oleh Kongres telah menandakan bahwa kaum spekulan berhasil menunggangi situasi peredaran barang<sup>2</sup> yang sangat suht. selain karena matjetnja produksi dalam negeri, terbatasnja persediaan barang<sup>2</sup> impor dan tidak lantjarnya transpor, adalah djuga karena politik harga yang mendorong meradjaalanya spekulasi.

Suburnja spekulasi ini bersumber kepada politik harga liberal, yaitu menjesuaikan harga pemerintah dengan harga pasar dengan alasan supaya tidak terdapat perbedaan harga resmi dan harga pasar yang sudah tinggi. Dalam prakteknja politik harga yang liberal ini memaksa pemerintah mengikuti apa yang diperbuat oleh kaum spekulan yang selalu mempermainkan harga untuk mengedjar keuntungan sebesar-besarnja dengan mengorbankan kepentingan konsumen yang sebagian terbesar terdiri dari massa Rakyat yang tidak mampu.

Politik harga yang liberal, ditambah oleh masih berlakunja sistim distribusi dan lisensi yang hanya menguntungkan pedagang<sup>2</sup> dan tukang<sup>2</sup> tjatut besar telah tjukup mengatjaukan keadaan harga, karena itu harus diubah mendjadi *politik harga yang dipimpin. ja-itu melaksanakan politik harga rendah yang ditetapkan dan dikendalikan setjara konsekwen oleh pemerintah.* Tjara mengendalikan harga dan mentjegah meradjaalanya spekulasi dan tjatut adalah supaya pemerintah mengharuskan pasar mengikuti harga rendah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan membandjiri pasar dengan barang<sup>2</sup> kebutuhan Rakyat se-hari<sup>2</sup> dan langsung melaksanakan distribusi barang<sup>2</sup> tersebut untuk mendjamin golongan konsumen yang tidak mampu.

Pelaksanaan politik harga yang dipimpin harus disertai dengan pelaksanaan politik distribusi yang ditudjukan untuk sebanjak mungkin mengurangi djumlah pedagang perantara dan mengguna-

kan koperasi<sup>2</sup> Rakjat, RK<sup>2</sup>, RT<sup>2</sup> dan warung<sup>2</sup> sebagai saluran distribusi yang utama. Pembaharuan politik distribusi ini diperlukan karena hingga sekarang masih berlaku susunan aparat perdagangan yang ber-lapis<sup>2</sup> dalam peredaran barang<sup>2</sup> dipasar antara importir atau distributor dengan pendjual etjeran yang menyebabkan adanya pedagang<sup>2</sup> perantara yang sangat banyak djumlahnja yang mengakibatkan pengambilan keuntungan yang banyak dan ber-lapis<sup>2</sup> pula oleh matjam<sup>2</sup> golongan parasiter atas kerugian para konsumen.

Kaum modal besar asing dan komplotannja dan golongan<sup>2</sup> parasiter lainnja yang terdiri dari tukang<sup>2</sup> tjatut besar dan koruptor<sup>2</sup> sivil dan militer membuat kampanye reaksioner dengan menjebar-kan bisikan yang beratjua bahwa tindakan tegas pemerintah dalam mengendalikan harga hanya membuat hilangnja barang<sup>2</sup> dari pasar. Hilangnja barang<sup>2</sup> ini dapat ditjegah asalkan pemerintah menguasai sepenuhnya ekspor-impor, menguasai tjabang<sup>2</sup> produksi yang vital, menguasai se-banyak<sup>2</sup>nja persediaan barang<sup>2</sup> dan bahan<sup>2</sup> yang menjangkutpaut sandang-pangan Rakjat, menguasai sebagian besar gudang<sup>2</sup> dan melantjarkan transpor. Dengan barang dan bahan se-banyak-nja ditangan pemerintah dapatlah pemerintah mengatur djalannja harga.

Selain daripada itu, pemerintah hendaknja menggunakan uang yang dibekukan untuk keperluan pembiayaan projek<sup>2</sup> negara dan sektor produktif dilapangan industri dan pertanian dalam rangka usaha self-supporting beras dan pakaian. Kepada modal asing yang mempunjai hak transfer djangan diberikan kredit, malahan harus menjetorkan sebagian devisa yang dimilikinja berupa keuntungan atau lain<sup>2</sup> untuk mendapatkan rupiah dari pemerintah. Djuga kepada tuantanah<sup>2</sup> djangan diberikan kredit.

Menarik pengalaman daripada kegagalan Kabinet Djuanda yang pernah menetapkan harga pasar tidak boleh melebihi harga 15 Desember 1958 yang disebabkan, selain karena tidak diikuti oleh tindakan<sup>2</sup> yang diperlukan untuk itu dan karena sabotase kaum pengatjau ekonomi, djuga disebabkan karena tidak dilaksanakannya setjara konsekwen oleh alat<sup>2</sup> ekonomi pemerintah sendiri yang termjata belum bersih dari elemen<sup>2</sup> birokrat dan korup yang berkomplot dengan kaum modal besar asing dan kaum spekulan. Karena itu untuk mendjamin kelantjaraan pelaksanaan politik harga yang terpimpin harus dilaksanakan apa yang diserukan oleh Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknja pada tanggal 17 Agustus 1959, jaitu retooling disemua lapangan, terutama membersihkan alat<sup>2</sup> negara dari elemen<sup>2</sup> korup dan parasiter lainnja tanpa pandang bulu tidak perduli berpartai atau non-partai, tidak perduli sivil atau militer.

Kongres Nasional ke-VI PKI telah mengkonstatasi, bahwa inflasi dan kenaikan harga barang<sup>2</sup> pokok merupakan salahsatu tjuri penting daripada krisis ekonomi yang terus menjengkeram Indonesia. Karena itu pemetjahan masalah harga tidak dapat dilepaskan daripada perjuangn seluruh Rakjat untuk melepaskan Indonesia dari akibat buruk krisis duma kapitalis, dan untuk ini Kongres Nasional ke-VI PKI telah menjetudju dengan bulat tuntutan<sup>2</sup> yang diadjukan dalam Laporan Umum Kawan D.N. Aidit. Tuntutan<sup>2</sup> ini pada pokoknja ialah supaya produksi dalam negeri diperbesar, terutama dengan memperluas dan memperkuat ekonomi sektor negara dengan menasionalisasi semua perusahaan Belanda, mengoper saham<sup>2</sup> Belanda di-perusahaan<sup>2</sup> tjampuran dan menggerowoti kekuasaan ekonomi modal besar asing lainnja, mengubah perdagangan luarnegeri yang berat sebelah, jaitu berat ke-negeri<sup>2</sup> imperialis, dengan djalan meluaskan hubungan dagang dengan negeri<sup>2</sup> Sosialis yang tidak mengenal krisis ekonomi dan dengan negeri<sup>2</sup> A-A serta berusaha mengatasi keperluan akan barang<sup>2</sup> modal dan teknik dari luarnegeri melalui pindjaman dengan bunga se-rendah-nja dan tanpa ikatan politik atau militer.

Dengan melaksanakan tuntutan<sup>2</sup> diatas dapatlah diptjapkan fondamen ekonomi yang sehat dan hanya atas dasar ekonomi yang sehat inilah sanering uang dapat membawa perbaikan<sup>2</sup> dilapangan keuangan dan moneter dan dapat dilaksanakan politik harga yang menguntungkan Rakjat.

Kongres Nasional ke-VI PKI menjerukan kepada semua kaum buruh, kaum tani dan golongan<sup>2</sup> Rakjat pekerdja lainnja untuk dengan lebih gigih melawan kemahalan harga dan mendorong kepada Kabinet Sukarno-Djuanda untuk menentukan politik harga rendah yang berdasarkan kepentingan Rakjat, bukan atas kepentingan kaum modal besar asing, kaum spekulan dan komplotannja. Ini berarti politik harga yang liberal harus segera diganti dengan politik harga yang dipimpin yang mendjamin harga rendah bagi barang<sup>2</sup> kebutuhan pokok Rakjat.



## **Tjabut Kcadaan Perang di Daerah-Daerah Dimana Tidak Ada Operasi Militer**

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta dari tanggal 7-14 September 1959, setelah mendiskusikan Laporan

Umum CC PKI dalam hubungan dengan masih berlakunya keadaan perang, berpendapat bahwa Pengumuman Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 14 Maret 1957 tentang berlakunya SOB adalah suatu tindakan yang dituduhkan untuk menjelamatkan Republik Indonesia dari rongrongan kaum kontra-revolusioner separatis.

Berlakunya SOB yang kemudian diteruskan dengan „Keadaan Perang“ berdasarkan UUKB No. 74/57, telah memperlihatkan segi<sup>2</sup>nja yang positif d.-daerah<sup>2</sup> yang dikatjau oleh kontra-revolusi bersendjata.

Tetap, kenyataan djuga menunjukkan bahwa berlakunya kekuasaan militer itu tidak sedikit segi<sup>2</sup> negatifnja, yang djka tidak segera diakhir, bisa ber-larut- dan menutupi segi<sup>2</sup> positifnja. Segi<sup>2</sup> negatif yang serius adalah pengekangan hak<sup>2</sup> demokrasi bagi Rakjat, seperti adanya larangan dan pembatasan kegiatan politik, termasuk bagi golongan<sup>2</sup> dan Partai<sup>2</sup> yang melawan pemberontak kontra-revolusioner, pendukung<sup>2</sup> UUD 1945 dan pendukung<sup>2</sup> politik Pemerintah; pemberangusan pers demokratis; larangan mogok termasuk di-perusahaan<sup>2</sup> yang memihak pemberontak kontra-revolusioner; pengusiran<sup>2</sup> kaum tani dari tanahgarapannja; larangan menjadi anggota Partai bagi pegawai<sup>2</sup> golongan F dan golongan pegawai tertentu lainnja; serta larangan<sup>2</sup> lain yang sangat mengekang perkembangan gerakan progresif dan demokratis.

Tjampurtangan sementara perwira yang masih aktif dalam soal<sup>2</sup> yang bukan bidangnya, seperti dalam soal keuangan, ekonomi, politik dan pemerintahan, telah mengakibatkan exses<sup>2</sup> yang serius, padahal tugas penguasa perang adalah pendjagaan dan pemulihan keamanan dan bukan mengurus soal<sup>2</sup> yang tidak berhubungan langsung dengan soal<sup>2</sup> tersebut.

Pada waktu yang diperlukan Rakjat lewat Dewan Perwakilan Rakjat bisa memberikan kekuasaan kepada Angkatan Perang kita yang patriotik, selama kekuasaan ini memang sungguh<sup>2</sup> diperlukan dan tidak disalahgunakan. Timbulnja kontradiksi<sup>2</sup> yang tidak perlu antara Rakjat dan Angkatan Perang harus ditjegah, dan hal<sup>2</sup> yang mungkin menudju kearah pertadjaman kontradiksi harus dihindari. Untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, yang berarti mempertahankan dan mengembangkan hasil<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945, harus dilaksanakan garis „Dwi Tunggal Rakjat dan Tentara“, jaitu garis „Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat“ atau „salingbantu Rakjat dan Tentara.“

Situasi nasional dewasa ini menunjukkan, bahwa pada pokoknja pemberontakan kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“ telah dapat dipatahkan. Kenyataan djuga menunjukkan, bahwa bagi daerah<sup>2</sup> dimana tidak ada operasi militer terhadap kaum pembe-

rontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta" atau gerombolan DI-TII, tidaklah diperlukan berlakunya keadaan perang. Walaupun di-daerah<sup>2</sup> tersebut mungkin terdapat djaring<sup>1</sup> pengatjauan kontra-revolusi, tetapi pada pokoknya keadaan adalah aman dan untuk mengatasinya tidak perlu harus menggunakan kekuasaan berdasarkan keadaan perang.

Untuk membangkitkan potensi nasional dalam mendukung pelaksanaan Program Kabinet Sukarno-Djuanda, diperlukan suasana bebas dan terdjaminnya hak<sup>2</sup> demokrasi bagi Rakjat, yang memungkinkan meluasnya inisiatif dan daya-tjipta massa Rakjat. Meneruskan berlakunya keadaan perang di-daerah<sup>2</sup> dimana tidak ada operasi militer terhadap kaum pemberontak kontra-revolusioner, berarti menindas hak<sup>2</sup> Rakjat, menekan inisiatif dan daya-tjipta massa luas.

Berdasarkan pertimbangan<sup>2</sup> yang dikemukakan ini Kongres mendesak Pemerintah :

— supaya mentjabut berlakunya keadaan perang dan memulihkan kebebasan demokratis di-daerah<sup>2</sup> dimana tidak ada operasi militer terhadap kaum pemberontak kontra-revolusioner

— supaya di-daerah<sup>2</sup> operasi diberikan kebebasan kepada Rakjat dan organisasi Rakjat untuk ber-sama<sup>2</sup> dengan alat<sup>1</sup> negara melawan kegiatan politik dan kegiatan bersendjata kaum kontra-revolusioner.

Kongres menjerukan kepada seluruh Rakjat untuk mendukung dan memperdjuangkan tuntutan ini untuk memperluas kebebasan demokratis sebagai djaminan bantuan Rakjat dalam melaksanakan Program Kabinet Sukarno-Djuanda.



## Sita Perusahaan<sup>2</sup> Dan Modal Orang<sup>2</sup> Kuomintang !

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia, yang diadakan dari tanggal 7 sampai tanggal 14 September 1959 di Djakarta, menjambut dengan gembira bahwa berkat dorongan massa Rakjat yang dipelopori oleh kaum progresif telah dilakukan beberapa tindakan yang tegas atau agak tegas terhadap komplotan Kuomintang di Indonesia.

Akan tetapi Kongres menjesalkan bahwa sementara orang yang berkuasa dalam alat<sup>2</sup> negara kemudian tidak mengadakan tindakan

landjutan (follow-up) jang tepat sesuai dengan kedudukan komplotan itu sebagai musuh Rakjat dan musuh Negara. Bahkan, nampak tanda<sup>2</sup> keragu-raguan dari sementara orang jang berkuasa dalam alat<sup>2</sup> negara terhadap komplotan itu, terutama sedjak bulan<sup>2</sup> terahir dari masa berdirinja Kabinet Djuanda. Dan Kongres lebih<sup>2</sup> menjesalkan, berhubung dengan adanya gejala<sup>2</sup> jang menundjukkan sikap bermainmata dan kompromis, jang sudah pasti sikap jang tidak sesuai dengan kepentingan Rakjat dan Negara.

Mewakili perasaan dan fikiran Rakjat Indonesia, Kongres berpendapat bahwa untuk keselamatan Republik dan untuk kemandjuaan pembangunan ekonomi Indonesia jang sesuai dengan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 tindakan<sup>2</sup> jang harus diambil terhadap komplotan orang<sup>2</sup> Kuomintang tidaklah tjukup hanja dengan melarang dan membubarkan perkumpulan<sup>2</sup> mereka, hanja dengan melarang beberapa penerbitan mereka, hanja dengar melarang dan membubarkan sekolah<sup>2</sup> mereka. Tindakan<sup>2</sup> selandjutnja harus dilakukan, diantaranya jang terpenting ialah *mensita perusahaan<sup>2</sup> dan modal orang<sup>2</sup> Kuomintang* dan mendjadikannja milik negara, sedangkan terhadap orang<sup>2</sup>nja jang tetap melakukan kegiatan subversif dalam bentuk apapun harus didjatuhi hukuman jang berat atau pengusiran segera dari Indonesia. Dalam pada itu aparat<sup>2</sup> negara dipusat maupun di-daerah<sup>2</sup>, militer maupun sivil, harus segera dibersihkan dari orang<sup>2</sup> Kuomintang atau orang<sup>2</sup> suapannja dan sahabat<sup>2</sup> pelindungnja.

Kongres menjimpulkan bahwa tindakan<sup>2</sup> jang dituntut itu hanja akan mendjadi kenyataan dan berdjalan dengan sukses apabila persatuan dwitunggal Rakjat dan Tentara semakin diperkuat dan kerdjasama jang demokratis antara mereka dilaksanakan.

Kongres menjimpulkan pula bahwa soviniisme harus ditjegah dan dilawan dengan sekuat tenaga, karena soviniisme djustru membikin kabur kawan dan lawan, mempersulit dilakukannja tindakan<sup>2</sup> tegas terhadap komplotan Kuomintang dan kakitangannja, disamping merugikan perdjuaan anti-imperialisme pada umumnja. Tindakan terhadap komplotan Kuomintang tidak boleh berbau rasial, tetapi se-mata<sup>2</sup> tindakan anti-subversif asing.

Untuk menghilangkan dasar ekonomi kaum subversif Kuomintang, sitalah perusahaan<sup>2</sup> dan modal orang<sup>2</sup> Kuomintang!

Laksanakanlah kerdjasama jang demokratis antara Tentara dan Rakjat!

Waspadalah terhadap soviniisme dan waspada terhadap mereka jang mensalahgunakan kekuasaan untuk memperkaja diri!



## Djadikan Manifesto Politik Presiden Sukarno Pegangan Dalam Membantu dan Menjokong Kabinet Kerdja

Kongres Nasional ke-VI PKI yang berlangsung mulai tanggal 7 s/d 14 September 1959 di Djakarta setelah mendiskusikan Laporan Umum Komite Central Partai yang disampaikan oleh Kawan D.N. Aidit dan setelah mempelajari Manifesto Politik Presiden Sukarno, berpendapat bahwa Manifesto Politik ini yang diutjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959, merupakan dokumen penting bagi Rakyat Indonesia dalam melanjutkan revolusi nasionalnya yang belum selesai. Manifesto Politik ini juga telah memberikan pedoman umum tentang pelaksanaan tiga fasal program Kabinet Kerdja.

Adalah sepenuhnya sesuai dengan tuntutan seluruh Rakyat bahwa dalam hubungan dengan perjuangan mengusir imperialisme Belanda, Manifesto Politik menegaskan bahwa *„djika imperialisme Belanda tetap membandel dan kepalabatu dalam soal Irian Barat, maka semua modal Belanda termasuk yang berada dalam perusahaan<sup>2</sup> tjampuran akan habis-tamat riwayatnya samasekali di bumi Indonesia.*” Sudah semendjak persetudjuan KMB yang chianat itu PKI senantiasa memperingatkan bahwa kekatjauan ekonomi, kematjetan pembangunan dan penderitaan Rakyat Indonesia bersumber kepada kekuasaan modal besar asing. Kongres sepenuhnya berpendapat dengan Manifesto yang antara lain menyatakan bahwa *„terhadap modal asing lainnya, djika mereka dengan diam<sup>2</sup> mendjalankan sabotase ekonomi atau setjara gelap<sup>2</sup>an membantu pemberontak kontra-revolusioner, merekapun akan diperlakukan sama dengan modal Belanda.”*

Setelah kekuatan pokok kaum pemberontak „PRRI-Permesta” dapat dipatahkan nampak adanya usaha<sup>2</sup> dari kaum imperialis dan kakitangannya untuk mengadakan kompromi (islah) antara Pemerintah dengan sisa<sup>2</sup> kaum pemberontak. Mengingat bahwa adanya sisa<sup>2</sup> pemberontak ini tetap merupakan landasan bagi subversi asing dan tidak sedikit menjebakkan korban manusia serta kerugian materiil bagi Rakyat dan Tentara dan tidak sedikit menghabiskan uang Pemerintah, maka tepat sekali apa yang diinjatakan dalam Manifesto Politik bahwa *„Pemerintah tidak mau mengadakan perundingan atau kompromi dengan pemberontak.”*

Dalam rangka memulihkan keamanan Kongres menjambut dengan gembira pernyataan Presiden Sukarno bahwa *„Pemerintah akan meneruskan dan memperhebat operasi<sup>2</sup> keamanan dengan*

*pengerahan kekuatan alat<sup>2</sup> negara dan Rakjat setjara maximal*”. tetapi dalam pada itu Kongres djuga berpendapat bahwa mengikutsertakan Rakjat itu tidak tjukup hanya dengan mengintensifkan organisasi<sup>2</sup> keamanan Rakjat dan wadjiabatlah bagi pemuda<sup>2</sup> dan veteran sadja, melainkan haruslah djuga dengan memberikan kebebasan<sup>2</sup> demokratis kepada Rakjat dan organisasi<sup>2</sup> Rakjat. Hanya dengan djalan demikianlah garis *„dwitunggal Tentara dan Rakjat”* atau garis *„salingbantu Rakjat dan Tentara”* dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam praktek.

Pelaksanaan program Kabinet Kerdja bukanlah hanya tergantung kepada Rakjat yang memang tidak perlu lagi diragukan sedikitpun akan bantuannya, melainkan terutama tergantung kepada aparat Pemerintah sendiri. Oleh sebab itu Kongres menjambut dengan gembira maksud Presiden untuk mengadakan retooling terhadap semua alat negara yang harus berarti mendemokraskan dan mereorganisas, alat- negara, memetjat dar, djabatan<sup>2</sup> sivil maupun militer pengchianat<sup>2</sup> bangsa, orang<sup>2</sup> reaksioner, penggelap<sup>2</sup> serta koruptor<sup>2</sup> dan supaya orang<sup>2</sup> ini dihukum dan selandjutnja mengisi alat<sup>2</sup> negara dengan orang<sup>2</sup> patriotik dan tjakap yang bersedia mengabdikan diri kepada kepentingan Rakjat.

Kongres berpendapat bahwa pernyataan Presiden yang menegaskan akan dikuasanya oleh negara dan tidak dipartikelirkannja tjabang<sup>2</sup> produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai dengan fasal 33 UUD 1945 adalah sesuai dengan tuntutan dan harapan Rakjat Indonesia. Ini berarti bahwa ekonomi sektor negara harus diperkuat dan diperluas sehingga menempati posisi komando dalam kehidupan ekonomi negeri, kekuasaan modal monopoli Belanda dilikwidasi sepenuhnya, kekuasaan modal monopoli asing lainnja digerowoti, dan penghisapan feodal dari tuantanah<sup>2</sup> atas kaum tani dikurangi. Ekonomi sektor partikelir nasional dilindungi, tingkat hidup Rakjat terutama kaum buruh dan kaum tani diperbaiki.

Pengalaman memberikan pelajaran kepada kita bahwa bukan sadja melalui djalan militer tetapi djuga saluran kebudayaan digunakan oleh kaum imperialis untuk melumpuhkan semangat revolusioner Rakjat. Oleh sebab itu adalah tepat sekali pernyataan Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknja bahwa *„Pemerintah akan melindungi dan membantu perkembangan kebudayaan nasional dan menentang kebudayaan imperialis”*.

Untuk mengurangi ketegangan<sup>2</sup> internasional dewasa ini sebagai akibat dari politik perang imperialis Amerika, Kongres menjambut dengan hangat pernyataan Presiden untuk menjetop selekasnja dan dilarang se-kerasnja segala pertjobaan, segala pem-

bikinan dan pemakaian senjata nuklir. Kongres juga berpendapat bahwa gerakan perdamaian dan gerakan anti-kolonial adalah satu dan tak bisa di-pisah<sup>kan</sup>. Tepat sekali seperti apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Sukarno bahwa tidak ada perdamaian selama masih ada kolonialisme.

Kongres yakin bahwa Rakyat Indonesia pasti akan membenarkan apa yang diujatakan dalam Manifesto bahwa *„sesungguhnya kita berevolusi bukan hanya untuk menaikkan Sang Merah Putih melainkan karena kita ingin tjukup makan dan pakaian, tjukup tanah, pendeknja ingin perbaikan hidup.“* Adalah menjadi kewajiban bagi tiap<sup>2</sup> pemerintah yang menamakan dirinya nasional untuk memenuhi tuntutan<sup>2</sup> diatas. Untuk dapat memenuhi tuntutan<sup>2</sup> tersebut diperlukan sokongan dan bantuan yang teguh dari Rakyat. Supaya sokongan dan bantuan Rakyat itu dapat dimobilisasi, Pemerintah harus memberikan kebebasan<sup>2</sup> demokratis, dan berusaha untuk menghimpun bagian terbesar dari kekuatan nasional dan mengajak semua partai dan golongan<sup>2</sup> patriotik dalam pemerintahan. Pemerintah yang demikian itu tidak bisa lain ketjuah Pemerintah Gotongrojong sesuai dengan Konsep<sup>si</sup> Presiden.

Berdasarkan hal<sup>2</sup> tersebut diatas, Kongres berseru kepada seluruh kaum Komunis dan Rakyat Indonesia untuk mempelajari dan mendiskusikan Manifesto Politik Presiden Sukarno, menjadikannya pegangan dalam membantu, menjokong dan menagih pelaksanaan program Kabinet Kerdja.

Kongres mendesak kepada Pemerintah agar Manifesto Politik benar<sup>2</sup> menjadi pegangan Pemerintah dalam melaksanakan programnja setjara konsekwen.



## **Hantjurkan Sisa<sup>2</sup> Kekuatan Pemberontak Kontra-Revolusioner „PRRI-Permesta“ Dan DI-TII Sampai ke Akar<sup>2</sup>nja**

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 s/d 14 September 1959 telah memberikan perhatian istimewa terhadap masalah penghantjuran sisa<sup>2</sup> kekuatan pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“ serta gerombolan<sup>2</sup> teroris DI-TII untuk memulihkan keamanan dalam negeri sesuai dengan program Kabinet Sukarno-Djuanda.

Keterangan<sup>1</sup> yang dikemukakan oleh para utusan Kongres terutama yang datang dari daerah<sup>2</sup> yang masih belum aman menunjukkan bahwa masalah pembasmian sisa<sup>2</sup> kekuatan pemberontak dan gerombolan<sup>2</sup> teroris „PRRI-Permesta” dan DI-TII masih merupakan masalah nasional yang sangat mendesak.

Meskipun kekuatan kaum pemberontak kontra-revolusioner itu pada pokoknya telah dapat dipatahkan, kenyataan sekarang menunjukkan bahwa sisa<sup>2</sup> kekuatan mereka tidaklah boleh diremehkan. Mereka masih sadja terus mengadakan pengatjauan, pembunuhan, perampokan, penggarongan, pembakaran rumah<sup>2</sup> Rakjat dan praktek<sup>2</sup> teroris lainnya, hal mana telah menyebabkan makin berlipatgandanya penderitaan Rakjat, terutama kaum tani di-desa<sup>2</sup>. Pengaruh politik mereka dikalangan massa yang terbelakang masih belum dilumpuhkan samasekali.

Ber-larut<sup>2</sup>nya keadaan seperti sekarang djuga tidak hanya berakibat terus bertambahnya biaya yang harus dipikul oleh Pemerintah dan Rakjat tetapi djuga menambah kemerosotan produksi dan perdagangan luarnegeri kita. Disamping itu pengalaman Rakjat Indonesia telah menunjukkan bahwa gerombolan<sup>2</sup> pengatjau itu masih bisa hidup karena bantuan tuantanah<sup>2</sup> didesa dan bantuan sendjata serta perlengkapan<sup>2</sup> lain dari kaum imperialis asing. Gerombolan<sup>2</sup> pengatjau merupakan landasan bagi usaha<sup>2</sup> intervensi asing untuk terus mengatjau negeri kita. Dengan adanya gerombolan<sup>2</sup> pengatjau, kaum imperialis djuga bermaksud mempertahankan keadaan perang di Indonesia agar dengan demikian dapat menekan perkembangan gerakan demokratis.

Oleh karena itu agar keamanan segera dapat dipulihkan dan Rakjat dapat dibebaskan dari penindasan dan penderitaan yang tak tertahankan itu, sisa<sup>2</sup> kekuatan pemberontak dan gerombolan<sup>2</sup> teroris harus dibasmi sampai ke-akar<sup>2</sup>nya dalam waktu yang sesingkat<sup>2</sup>nya. Untuk ini soal yang paling pokok diatas se-gala<sup>2</sup>nya ialah tetap adanya politik pemerintah yang tegas, yang tidak setengah<sup>2</sup> dan yang tidak mengenal kompromi. Dalam hubungan ini Kongres menjambut dengan gembira pernyataan Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknja pada tanggal 17 Agustus 1959 jl. yang antara lain mengatakan sbb : *„Beleid keamanan Pemerintah tetap tegas, Pemerintah meneruskan dan memperhebat operasi<sup>2</sup> keamanan dengan pengerahan alat<sup>2</sup> negara dan Rakjat setjara maksimal. Pemerintah tidak mau mengadakan perundingan atau kompromis dengan pemberontak”*.

Tetapi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman sampai sekarang, pernyataan politik yang tegas terhadap kaum pemberontak telah diperlemah karena kurang kesungguhan dalam pelaksanaan

mengikutsertakan Rakjat dalam arti yang se-luas-luasnya. Perpaduan antara politik yang tegas dan pelaksanaan prinsip mengikutsertakan Rakjat merupakan jaminan satuannya bagi berhasilnya usaha Pemerintah dalam membasmi sisa-sisa kekuatan pemberontak „PRRI-Permesta” dan gerombolan<sup>2</sup> DI-TII sampai ke-akar-nya, sebagai telah dibuktikan oleh sukses<sup>2</sup> yang telah ditjapai dalam operasi<sup>2</sup> militer selama ini, baik di Djawa Barat, Sumatera maupun di Sulawesi dan di-tempat<sup>2</sup> lain, dan sebagai yang diakui sendiri oleh panglima<sup>2</sup> dan komandan<sup>2</sup> operasi yang bersangkutan. Oleh karena itu Kongres juga menjambut dengan gembira pernyataan Presiden Sukarno dalam Manifesto Politiknya itu yang mengatakan bahwa dalam rangka mengikutsertakan Rakjat Pemerintah akan mengintensifkan organisasi<sup>2</sup> keamanan Rakjat dan wadjablatih bagi pemuda<sup>2</sup> dan veteran. Ini berarti penjempurnaan organisasi<sup>2</sup> keamanan Rakjat, yang sekarang memang merupakan satu hal yang sangat mendesak. Dengan lebih disempurnakannya organisasi<sup>2</sup> keamanan Rakjat, maka kaum tani akan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk dibawah pimpinan APRI turut ambilbagian dalam operasi<sup>2</sup> keamanan dan pembersihan.

Tetapi dalam pada itu Kongres juga berpendapat bahwa mengikutsertakan Rakjat itu tidak tjukup hanya dengan mengintensifkan organisasi<sup>2</sup> keamanan Rakjat dan wadjablatih bagi pemuda<sup>2</sup> dan veteran saja, melainkan haruslah juga dengan memberikan kebebasan<sup>2</sup> demokratis kepada Rakjat dan organisasi<sup>2</sup> Rakjat. Pemerintah yang benar<sup>2</sup> bertekad bulat untuk membasmi sisa-sisa kaum pemberontak sampai ke-akar-nya haruslah bersandar kepada massa Rakjat. Dan ini hanya mungkin dengan memobilisasi Rakjat dengan jalan memberikan kebebasan<sup>2</sup> demokratis kepada Rakjat dan organisasi<sup>2</sup> Rakjat, disamping tidak memberikan kebebasan demokratis kepada musuh<sup>2</sup> Rakjat, termasuk tuantanah<sup>2</sup> bumiputera yang mendjadi kakitangan kontra-revolusi. Tanpa memobilisasi Rakjat sisa-sisa kekuatan pemberontak dan gerombolan<sup>2</sup> teroris itu tentu tidak dapat dihantjurkan sampai ke-akar-nya. Selain daripada itu hanya dengan memberikan kebebasan<sup>2</sup> demokratis kepada Rakjat dan organisasi<sup>2</sup> Rakjat garis „*dwitunggal Rakjat dan Tentara*”, jaitu garis „*Rakjat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakjat*” atau „*Salingbantu Rakjat dan Tentara*” dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam praktek.

Kongres menekankan bahwa djustru mengenai soal yang sangat penting ini masih terdapat kelemahan yang serius. Ini nampak pada kenyataan bahwa di-daerah<sup>2</sup> yang sudah dibebaskan, kebebasan politik Rakjat tidak tjepat dipulihkan dan malahan ada usaha<sup>2</sup> untuk tetap mengekangnja. Ini telah sangat memperlemah daja-

djuang Rakjat dan dengan demikian berarti memberi nafas kepada kaum pemberontak untuk mengkonsolidasi diri kembali. Hal yang demikian inilah yang telah menyebabkan pembasmian kaum pemberontak kontra-revolusioner menjadi ber-larut<sup>2</sup> dan memakan sangat banyak biaya.

Berdasarkan kenyataan<sup>2</sup> tersebut diatas, Kongres sekali lagi menuntut supaya Pemerintah tetap menjalankan politik yang tegas dan bersamaan dengan itu dengan konsekwen melaksanakan prinsip memobilisasi Rakjat dengan jalan memberikan kebebasan<sup>2</sup> demokratis kepada Rakjat dan organisasi<sup>2</sup> Rakjat untuk bersama<sup>2</sup> dengan Pemerintah dan APRI turut ambil bagian dalam menghantarkan samasekali kaum pemberontak baik setjara militer maupun setjara politik. Inilah jaminan satu<sup>2</sup>nja djika Pemerintah benar<sup>2</sup> mau berhasil dalam melaksanakan programnya mengenai pemulihan keamanan sesuai dengan harapan seluruh Rakjat.

Kepada kaum Komunis dan Rakjat Indonesia, Kongres berseru supaya dengan gigih dan ulet memperjuangkan prinsip<sup>2</sup> ini agar dengan demikian dapat membantu pelaksanaan program Pemerintah dengan kekuatan yang se-besar<sup>2</sup>nja.



## Susun Pola Pembangunan Untuk Melikwidasi Ekonomi Kolonial

Kongres Nasional ke-VI PKI menjambut dengan gembira pembentukan Dewan Perantjang Nasional oleh Presiden Sukarno dengan harapan agar segera dapat disusun Pola Pembangunan Ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam amanatnya kepada Sidang Pleno Pertama Depernas pada tanggal 28 Agustus 1959 Presiden antara lain menyatakan sebagai berikut :

*„Didalam alam pendjadjahan kita punja ekonomi adalah ekonomi kolonial dan ekonomi kolonial ini harus kita robah menjadi ekonomi nasional yang bersih daripada penghisapan, daripada eksploitasi oleh tenaga<sup>2</sup> luaran“.*

Berdasarkan amanat Presiden tersebut, Kongres berpendapat bahwa sudah seharusnya setiap anggota Depernas membersihkan dirinya dari fikiran<sup>2</sup> yang hendak memasukkan modal asing baru, karena hal ini langsung bertentangan dengan tudjuan melikwidasi ekonomi kolonial. Sesuai dengan djiwa fasal 33 UUD 1945 kekuasaan modal besar asing yang masih ada harus dilenjakpan.

Masih berlakunya kekuasaan ekonomi modal Belanda dan modal monopoli asing lainnya serta masih merajalelanya penghisapan feodal oleh tuan tanah dan lintah darat telah merusak keadaan ekonomi dan menyebabkan ekonomi Indonesia tetap tergantung kepada negeri<sup>2</sup> imperialis. Kerusakan<sup>2</sup> ekonomi akibat pendudukan fasis Djepang, agresi<sup>2</sup> kolonial Belanda dan pengatjauan<sup>2</sup> gerombolan<sup>2</sup> kontra-revolusi samasekali belum dipulihkan. Oleh karena itu merehabilitasi keadaan ekonomi yang rusak, melikwidasi sepe-nuhnya sisa<sup>2</sup> kolonialisme Belanda, menggerowoti kekuasaan modal monopoli asing lainnya dan melawan penghisapan feodal adalah sjarat<sup>2</sup> minimum untuk mensukseskan Pola<sup>2</sup> Pembangunan menu-dju masyarakat adil dan makmur.

Dengan pertimbangan<sup>2</sup> ini, djelaslah bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi tersebut tugas yang per-tama<sup>2</sup> dari Depernas adalah menjusun segera Pola Pembangunan djangka pendek yang realistis. Atas dasar rehabilitasi ekonomi yang dihasilkan oleh rentjana djangka pendek ini tugas Depernas seterusnya ialah menjusun Pola Pembangunan selanjutnya untuk lebih meningkatkan perkembangan ekonomi negeri.

Supaja dapat membangkitkan antusiasme Rakjat dalam menjambut dan melaksanakannya, Pola Pembangunan harus djelas meng-untungkan bagi perbaikan hidup Rakjat pekerdja dan perbaikan ekonomi negeri pada umumnya. Singkatnya isi pokok rentjana pem-bangunan djangka pendek tersebut ialah merealisasi program Ka-binet Sukarno-Djuanda untuk melengkapi sandang-pangan Rak-jat, memulihkan keamanan dalam negeri dan melawan imperialisme. Berdasarkan pokok<sup>2</sup> fikiran ini, djelaslah bahwa problem<sup>2</sup> pemba-ngunan yang urgen sekarang adalah seperti berikut :

1. Memelihara setjara intensif, memperkuat dan mengembangk-an ekonomi sektor negara terutama perusahaan<sup>2</sup> negara yang ber-bagai matjam bentuknya seperti : ICW, IBW, Jajasan, NV, Ne-gara, PT Negara dan djuga bekas perusahaan<sup>2</sup> Belanda yang di-ambilalih yang seharusnya dinasionalisasi dan didjadikan perusa-haan<sup>2</sup> negara dan Pemerintah Daerah. Tiap usaha mempartikelir-kan perusahaan<sup>2</sup> negara yang ada dalam bentuk apapun baik se-penuhnya maupun sebagian harus ditjegah dan dilawan se-keras<sup>2</sup>-nya. Perusahaan<sup>2</sup> negara dengan status yang berbagai matjam ha-rus dapat ditertibkan menurut Undang<sup>2</sup> Perusahaan Negara yang mendjamin lenjapnya otonomisme yang mendjadi sarang birokrasi, dan pemborosan uang negara seperti yang terdapat dalam PT<sup>2</sup> Negara sekarang dengan apa yang dinamakan „8 besar“.

2. Mengusahakan self-supporting dalam waktu yang tidak la-ma dalam soal memenuhi kebutuhan beras dan textil. Dalam hal

ini Pemerintah harus memberikan bantuannya yang aktif dalam mengembangkan sektor pertanian Rakjat, terutama dengan melawan penghisapan<sup>2</sup> feodal.

3. Menjelesaikan projek<sup>2</sup> setengah-djadi yang produktif diberbagai lapangan baik dikerdjakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, terutama sekali yang berhubungan dengan sandang-pangan dan kelantjaran transpor darat, laut, sungai dan udara.

4. Menjesuaikan semua bantuan luarnegeri dan perdagangan luarnegeri dengan kebutuhan yang kongkrit akan barang<sup>2</sup> modal dan bahan<sup>2</sup> baku sesuai dengan rentjana pembangunan Indonesia.

Dengan demikian, usaha pembangunan tidak didasarkan atas penanaman modal asing, tetapi berdasarkan hasil pertukaran bahan-bahan mentah negeri kita dan dimana diperlukan, dengan bantuan luarnegeri yang diperoleh dengan djalan kredit djangka pandjang tanpa ikatan<sup>2</sup> politik dan militer.

5. Menjesuaikan pendidikan tenaga ahli dan tenaga kedjuruan dengan rentjana pembangunan dengan memperbanyak sekolah<sup>2</sup> kedjuruan dan dengan mendirikan sekolah<sup>2</sup> atau kursus<sup>2</sup> diperusahaan-perusahaan dan djawatan<sup>2</sup>.

Memobilisasi se-efektif<sup>2</sup>nja modal dalam negeri terutama yang ada pada negara dan meninggalkan politik kredit yang tidak produktif yang selama ini sebagian besar hanja ditujukan pada sektor perdagangan.

Sumber<sup>2</sup> keuangan negara harus tingkat demi tingkat digeser dari pajak<sup>2</sup> langsung dan tidak langsung kesektor produktif terutama dari perusahaan<sup>2</sup> negara yang ada dan bekas perusahaan<sup>2</sup> Belanda yang diambilalih. Pada pokoknja sumber<sup>2</sup> pembiayaan pembangunan tidak boleh per-tama<sup>2</sup> dipikulkan kepada Rakjat pekerdja.

Achirnja diserukan kepada kaum buruh, kaum tani dan massa Rakjat pekerdja lainnja untuk menjatakan perasaan dan fikiran-nja guna mendorong Depernas menjusun Pola Pembangunan yang dapat mentjiptakan sjarat<sup>2</sup> yang kongkrit untuk melikwidasi ekonomi kolonial dan membangun ekonomi nasional.



## Laksanakan Sistim 6 : 4, Tambah Tanahgarapan. Djamin Keamanan Untuk Mempertinggi Produksi Pertanian

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta dari tanggal 7 s/d 14 September 1959 mengkonstatasi kemunduran-kemunduran yang serius dilapangan produksi pertanian, terutama produksi bahan makanan. Produksi beras setiap tahun sudah tidak mungkin lagi menutup kebutuhan minimum Rakjat Indonesia. Untuk mendapat rata<sup>2</sup> 93 kg. beras tiap djiwa dalam setahun seperti direntjanakan oleh Pemerintah, yang samasekali belum memenuhi sjarat<sup>2</sup> kesehatan, diperlukan tambahan beras kira<sup>2</sup> 1 djuta ton, diantaranya dengan impor yang setiap tahunnja tidak kurang dari 600.000 ton beras, yang merupakan pengeluaran devisen tidak sedikit.

Seperti dinjatakan dalam Laporan Umum Kawan D.N. Aidit, sebab pokok daripada kemerosotan ini adalah bersumber pada masih meradjalelanja sisa<sup>2</sup> feodalisme dinegeri kita dan ketergantungan ekonomi negeri kita pada negeri<sup>2</sup> imperialis yang terus-menerus ditimpa krisis ekonomi. Ini semua menjebabkan tidak mungkinja tenaga produktif didesa berkembang bebas. Indonesia tjukup memiliki modal berupa tanah pertanian yang tjukup luas dan subur, tenaga kerdja kaum tani ber-puluh<sup>2</sup> djuta yang ulet dan berpengalaman dalam pekerdjaan pertanian. Tetapi sjarat yang sangat menguntungkan ini tidak dapat digunakan se-baiknja, karena masih adanja sisa<sup>2</sup> feodalisme yang berat dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada negeri<sup>2</sup> imperialis, kurangnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah, dan djuga karena masih adanja pengatjauan gerombolan<sup>2</sup> kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“ dan gerombolan bandit DI-TIL.

Kongres Nasional ke-VI PKI menganggap bahwa tugas meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi beras, adalah tugas nasional pemerintah dan Rakjat Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri akan beras dan bahan<sup>2</sup> baku untuk industri tekstil sesuai dengan program Pemerintah Sukarno-Djuanda tentang melengkap sandang-pangan Rakjat.

Kongres memberikan penilaian yang tinggi pada usaha<sup>2</sup> kader<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> PKI yang telah membikin pertjobaan untuk meningkatkan produksi padi sampai bisa mentjapai hasil 60 sampai 120 kwintal tiap ha. Karena itu diserukan kepada segenap anggota Partai, terutama anggota<sup>2</sup> dari kalangan kaum tani untuk memper-

luas pertjobaan peningkatan produksi pertanian. Meskipun begitu, peningkatan produksi pertanian baru dapat dijalankan setjara maksimal djika kaum tani dibebaskan samasekali dari penghisapan feodal dengan melaksanakan sembojan „tanah untuk kaum tani.“

Untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi bahan makanan, chususnja beras, harus dilaksanakan 5 prinsip mengerdjakan tanah, jaitu „*Luku dalam, tanam rapat, perbanjak rabuk, perbaiki bibit dan pengairan*“. Disamping 5 prinsip ini tentu harus pula diperhatikan soal menjangi sawah, melawan hama dan memperbaiki alat pertanian. Bersamaan dengan itu Rakjat Indonesia harus mendesak Pemerintah supaja :

1. Mengambil tindakan untuk membatas<sup>1</sup> sewatanah jang boleh dipungut oleh tuantanah dengan maximum 40% dan minimum 25% dari hasil panen, ketjual<sup>1</sup> jang selama ini sudah menerima kurang dari 25%. Artinja kaum tani penjewa tanah harus menerima minimum 60% dari hasil panen. Disamping itu Pemerintah harus melindungi kaum tani penjewa tanah tuantanah dan melarang pengusiran oleh tuantanah terhadap kaum tani.

2. Membatasi milik tanah tuantanah, membeli kelebihan tanah tuantanah dengan tjara dan harga jang ditentukan oleh Pemerintah dan membagikan tanah<sup>2</sup> tersebut kepada tani takbertanah dan tanimiskin.

3. Menghapuskan hak erfpacht atas tanah<sup>2</sup> bekas perkebunan Belanda jang telah diduduki oleh kaum tani dan mensahkan tanah<sup>2</sup> itu sebagai hakmilik kaum tani jang mengerdjakan.

4. Menghantjurkan samasekali gerombolan pengatjau sisa<sup>2</sup> kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta“ dan gerombolan teroris DI-TII, mensita tanah dan milik lain dari kaum tuantanah jang memihak gerombolan pengatjau kontra-revolusioner dan gerombolan teroris lainnya, dan membagikan tanah<sup>2</sup> itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.

Kongres berpendapat bahwa dengan memenuhi tuntutan<sup>2</sup> tersebut Pemerintah akan bisa meringankan beban penghidupan kaum tani, meneguhkan sokongan kaum tani dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah untuk melengkapi sandang-pangan Rakjat.

Kongres berseru kepada segenap Komunis dan kaum demokrat Indonesia untuk memperdjuangkan dilaksanakannya tuntutan<sup>2</sup> tersebut diatas.



## Lawan Kebudayaan Imperialis, Kembangkan Kebudayaan Rakyat

Kongres Nasional ke-VI PKI yang berlangsung di Djakarta dari tanggal 7 sampai tanggal 14 September 1959, menjambut dengan gembira Laporan Umum Kawan D.N. Aidit mengenai masalah kebudayaan. Setelah mendiskusikan masalah<sup>2</sup> kebudayaan, maka Kongres mentjatat, bahwa garis „*Seni dan ilmu untuk Rakyat*“, metode „*realisme sosialis*“, langgamkerdja „*turun kebawah*“ dan sjarat „*dua tinggi*“, jaitu „*tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik*“, pada pokoknja sudah menjadi pedoman pekerdja<sup>2</sup> kebudayaan progresif Indonesia. Makaitu, Kongres yakin bahwa di-tahun<sup>2</sup> yang mendatang sesudah Kongres Nasional ke-VI PKI gerakan kebudayaan Rakyat kita akan menghasilkan karya<sup>2</sup> baru yang lebih besar, lebih tinggi dan lebih indah.

Kongres menekankan, bahwa penguasaan Marxisme-Leninisme dan hubungan erat dengan kehidupan massa Rakyat, jaitu „*tahu Marxisme-Leninisme dan kenal keadaan*“, adalah djuga menjadi sjarat mutlak bagi pekerdja<sup>2</sup> kebudayaan Komunis apakah dia seorang sastrawan, pelukis, pematung, komponis, dramaturg, sutradara, aktor dan aktris, ataupun lain-nja. Bersamaan dengan itu pekerdja<sup>2</sup> kebudayaan Komunis wadjud lebih mengeratkan kerdja-sama dengan pekerdja<sup>2</sup> kebudayaan demokratis dan patriotik lain-nja untuk memperkuat front kebudayaan nasional anti-kebudayaan imperialis, untuk setia kepada segala yang baru dan maju, setia kepada Rakyat, tanahair dan revolusi.

Kongres lebih lanjut menggarisbawahi *Manifesto Politik* Presiden Sukarno yang menegaskan, bahwa program Kabinet Kerdja „*meneruskan perdjuaan menentang imperialisme politik dan ekonomi*“ berarti pula menentang imperialisme dibidang kebudayaan. Oleh sebab itu Kongres mendesak kepada Pemerintah agar bertindak yang njata dan tegas untuk menjelamatkan kebudayaan nasional kita dari agresi kebudayaan imperialis, terutama film, lek-tur dan bunji<sup>2</sup>an yang histeris, yang memerosotkan naluri dan perasaan<sup>2</sup> manusia ketingkat hewan.

Kongres memperkuat Resolusi Sidang Pleno ke-IV CC dari Kongres Nasional ke-V bahwa salahsatu sebab yang menjadi penghalang perkembangan kehidupan kebudayaan Rakyat adalah tidak adanya atau sangat kurangnya gedung<sup>2</sup> pertemuan, gedung<sup>2</sup> kesenian, gedung<sup>2</sup> kebudayaan, dan makaitu Kongres merasa gembira bahwa CC telah berhasil mendirikan sebuah Gedung Kebudayaan, sekalipun masih sederhana.

Kongres selanjutnya merasa perlu untuk mendesak Pemerintah agar mendirikan taman<sup>2</sup> kebudayaan, gedung<sup>2</sup> pertemuan dan pertunjukan di kota<sup>2</sup> penting lainnya. Dalam rangka ini Kongres mengusulkan kepada Pemerintah agar rumah almarhum Raden Saleh, pelukis kebanggaan nasional kita, di Jalan Raden Saleh, Djakarta, dijadikan milik negara dan digunakan untuk keperluan museum seni-bentuk (art gallery), dan agar Pemerintah mengusahakan tempat lain yang sama baiknya untuk rumah sakit yang sekarang menempati bekas Rumah Raden Saleh itu. Djuga Kongres mendesak kepada Pemerintah untuk dengan sungguh<sup>2</sup> melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional. Museum<sup>2</sup> supaya lebih banyak didirikan sedangkan yang sudah ada supaya mendapat perhatian lebih besar dan pemeliharaannya lebih baik.

Kongres berseru kepada semua pekerdja kebudayaan progresif untuk memperhebat usahanya dan ber-lomba<sup>2</sup> mendaki setinggi mungkin gunung kehidupan kebudayaan Rakyat kita.



## Ilmu Untuk Rakyat dan Revolusi

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia yang berlangsung di Djakarta dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 September 1959, menjambut dengan gembira Laporan Umum CC PKI yang menekankan tentang pentingnya memperbaiki pekerdjaan Partai dikalangan intelektual dan sepenuhnya sependapat bahwa *„proses kelahiran dan pertumbuhan dari kaum intelektual dinegeri kita tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan kolonialisme“*. Kongres berpendapat bahwa Revolusi Agustus 1945 telah lebih mempersatukan kaum buruh dan kaum tani dengan kaum intelektual yang sampai batas<sup>2</sup> tertentu mempertemukan ilmu dengan praktek revolusi Rakyat. Dengan demikian ilmu telah mendekati Rakyat dan sampai batas<sup>2</sup> tertentu semangat kerakjatan telah mendjiwai pekerdjaan<sup>2</sup> ilmiah.

Ilmu pengetahuan, baik ilmu<sup>2</sup> alam maupun ilmu sosial, menempati tempat yang semakin penting dalam kehidupan Rakyat dan tanahair kita. Pemertjahan masalah<sup>2</sup> ekonomi dan politik sangat erat berhubungan dengan taraf ilmu di Indonesia dan pentrapannya diberbagai lapangan itu. Oleh sebab itu Partai harus mengembangkan pekerdjaan diberbagai lapangan ilmu untuk mendjamin

pengabdian ilmu kepada kepentingan Rakjat dan tanahair kita.

Dengan belum sesesamja Revolusi Agustus 1945 maka aspirasi kaum intelektual Indonesia untuk mengembangkan ilmu guna mengabdikan kepada Rakjat dan tanahair tidak mendapat penjaluran yang memuaskan. Kedudukan kekuatan tengah Indonesia yang lemah dilapangan ekonomi dan politik, ternyata tidak mampu memberikan bimbingan dilapangan ilmu dan kebudayaan. Kaum reaksioner masih mempunyai pengaruh<sup>2</sup> tertentu dilapangan ilmu dan kebudayaan, sedangkan pekerdjaan kaum progresif dilapangan ini belum tjukup meluas dan mendalam. Semuanya ini menjebabkan dinegeri kita terdapat kemandekan dan dekadensi dilapangan ilmu dan kebudayaan, terutama dilapangan ilmu sosial. Keadaan ini memberikan sjarat<sup>2</sup> bagi kaum imperialis dan kaum reaksioner dalam negeri untuk meratjuni perkembangan ilmu dan kebudayaan, seperti yang djuga sudah berulang kali ditjanangkan oleh Presiden Sukarno.

Kongres Nasional ke-VI Partai disamping mensjalar gejala<sup>2</sup> buruk yang ada itu, memberikan penghormatan kepada kaum intelektual yang patriotik didalam usaha<sup>2</sup> mereka untuk menumpas semua yang kolot dan lapuk dan berusaha memperkaja dan mempertinggi taraf ilmu dinegeri kita. Selandjutnja Partai merasa bangga tentang mulai lahirnja kaum intelektual dari Rakjat pekerdja Indonesia yang berusaha mengabdikan ilmu kepada Rakjat dan Revolusi. Dalam hal ini Kongres Nasional ke-VI PKI menjtjat dengan gembira hasil<sup>2</sup> kolektif kaum intelektual dan pekerdja<sup>2</sup> organisasi revolusioner buruh dan tani diberbagai tjabang produksi, seperti penemuan bibit<sup>2</sup> padi<sup>2</sup>an dan kapas yang berkualitas lebih tinggi, penemuan tjara<sup>2</sup> baru dilapangan teknik pengolahan tanah, pemeliharaan ikan dan ternak, penjelenggaraan research<sup>2</sup> dan seminar<sup>2</sup> dari mahasiswa<sup>2</sup> tentang berbagai masalah sosial yang hangat dan langsung mengenai kehidupan Rakjat, seperti masalah otonomi tingkat III, dan sebagainya. Djuga Kongres menjambut dengan gembira usaha<sup>2</sup> kaum intelektual yang mendorong berdirinja badan<sup>2</sup> konsultasi untuk memberikan nasehat dan pembelaan dalam perkara<sup>2</sup> yang dihadapi kaum buruh dan tani.

Kongres menjambut dengan hangat berdirinja dan meluasnja *Universitas Rakjat* (UNRA) diberbagai kota dinegeri kita yang menetapkan revolusi Indonesia sebagai sasaran daripada studi. Melalui UNRA ini Partai berusaha memberi sumbangan untuk memperkuat perlawanan terhadap ilmu sosial yang kolot dan mendorong perkembangan ilmu sosial yang progresif yang ditudjukan untuk mengabdikan kepada Rakjat. Dengan semakin besarnja djumlah kaum intelektual yang turutserta mengembangkan ilmu Rakjat makin

kuatlah persatuan dikalangan kaum intelektual dalam melawan kolonialisme yang mengakibatkan mereka makin dekat pada Rakyat pekerja. Hal ini berarti makin luasnya dan makin kokohnya front persatuan nasional anti-imperialis.

Kongres Nasional ke-VI PKI juga menjambut dengan hangat kemajuan ilmu, teknik dan kebudayaan di-negeri<sup>2</sup> Sosialis, khususnya di Uni Soviet, yang telah mengungguli negeri<sup>2</sup> kapitalis. Kenyataan<sup>2</sup> ini membawa perubahan besar dalam sikap dan pandangan kaum intelektual di-negeri kita terhadap Sosialisme. Hanya selapisan yang tipis, yaitu mereka yang berkepalabatu, yang tetap ngotot tidak mengakui keunggulan Sosialisme.

Dalam mentjatat hasil<sup>2</sup> tersebut Kongres Nasional ke-VI PKI membenarkan konstataasi Laporan Umum Kawan D.N. Aidit bahwa kemajuan pekerjaan Partai dikalangan kaum intelektual masih terlampaui lambat dan tidak seimbang dengan kemajuan<sup>2</sup> yang diperoleh di-lapangan<sup>2</sup> lain.

Dalam perjuangan untuk menjelesaikan tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar<sup>2</sup>nya Kongres Nasional ke-VI PKI menjimpulkan tugas<sup>2</sup> pokok pekerjaan Partai dikalangan intelektual sbb. :

1. Bekerja lebih giat dan lebih baik untuk mempersatukan kaum intelektual dan menarik mereka kedalam perjuangan revolusioner dari Rakyat;
2. Bekerja lebih giat dan lebih baik untuk mengkonsolidasi dan mengembangkan azas ilmu untuk Rakyat dan Revolusi;
3. Bekerja lebih giat dan lebih baik untuk memperbesar jumlah anggota Partai Komunis dikalangan kaum intelektual, dan supaya kaum intelektual Komunis senantiasa memperdalam ilmu Marxisme-Leninisme dan menjadi tjontoh dalam memperkaya dan mengembangkan ilmu kepentingan Rakyat;
4. Senantiasa memperbaiki tjarakerja Komite<sup>2</sup> Partai dengan melawan segala pandangan yang tidak tepat terhadap kaum intelektual.



## Bentuk dan Kembangkan Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan pada tanggal 7 s/d 14 September 1959 di Djakarta dengan rasa gembira dan terharu mendengar Laporan Umum CC tentang sukses<sup>2</sup> yang telah

ditjapai oleh Partai dalam menjambut Kongres Nasional ke-VI Partai dengan membentuk ribuan Regu Kerdjabakti Partai untuk memperbesar amal kepada Rakjat dalam bentuk ber-sama<sup>2</sup> Rakjat mengerdjakan sawah kaum tanimiskin, membikin atau memperbaiki djalan<sup>2</sup>, saluran<sup>2</sup> air, djembatan<sup>2</sup>, rumah<sup>2</sup>, Rakjat, balai<sup>2</sup> pertemuan, membersihkan kampung<sup>2</sup>, mengumpulkan pupuk, memberrantas butahuruf dan sebagainya.

Dalam Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti telah ambilbagian pemimpin<sup>2</sup> Partai dari semua tingkat jang mendapat sambutan antusias dari massa, sehingga menimbulkan suasana baru jang segar dalam gerakan Rakjat progresif. Bagi kader<sup>2</sup> jang tidak langsung bekerdja di lapangan produksi, terutama kader<sup>2</sup> tinggi, kerdjabakti jang bersifat kerdja badaniah, djika dibiasakan merupakan salahsatu bentuk pendidikan ideologi jang penting. Kerdjabakti adalah salalsatu kegiatan Partai jang penting disamping kegiatan<sup>2</sup> Partai jang lain seperti memperdjuangkan dan membela kepentingan massa melalui berbagai organisasi massa, melalui badan<sup>2</sup> perwakilan, pemerintahan daerah dan lain<sup>2</sup>.

Dengan kerdjabakti telah semakin dipererat hubungan Partai dengan massa. Kerdjabakti adalah djuga salahsatu bentuk pernjataan terimakasih Partai atas kepertjajaan Rakjat jang semakin besar terhadap Partai, dan pernjataan terimakasih atas sumbangan-sumbangan jang diberikan dengan ichlas oleh Rakjat kepada Partai dalam menghimpun berbagai dana seperti dana untuk biaya Pemilihan Umum PKI, untuk biaya pembangunan gedung CC PKI, biaya pembangunan gedung kebudayaan Partai, biaya Kongres Partai dan sebagainya. Semuanja ini terdjadi dimana Rakjat masih hidup dalam sangat kekurangan.

Istimewa didalam menjambut Kongres Nasional ke-VI Partai, dari seluruh pelosok tanahair telah mengalir sumbangan<sup>2</sup> Rakjat sebagai tanda simpati terhadap Kongres, berdasarkan putusan Sidang Pleno ke-VII CC PKI pada tanggal 19-21 November 1958 jang mengambil Resolusi untuk mengadakan gerakan pengumpulan dana Kongres. Berkat kesedaran politik dan organisasi dari anggota<sup>2</sup>, tjalonanggota<sup>2</sup> dan simpatisan<sup>2</sup> PKI, maka untuk Kongres Nasional ke-VI PKI telah terkumpul uang sebanjak Rp. 3.520.974,— (tiga djuta limaratus duapuluh ribu sembilan ratus tudjuhpuluh empat rupiah). Semua tanda simpati itu merupakan dorongan bagi Partai dan chususnja bagi peserta<sup>2</sup> Kongres untuk bekerdja lebih baik dalam melaksanakan tugas<sup>2</sup> patriotiknja.

Karena tindakan sanering uang oleh Pemerintah, djumlah sumbangan jang telah terkena peraturan itu sebanjak Rp. 507.000,— (limaratus tudjuh ribu rupiah), jang berakibat dana Kongres di-

rugikan 90% dari Rp. 507.000,— jaitu Rp. 456.300,— (empatratus limapuluh enam ribu tigaratus rupiah). Untuk mengatasi keadaan ini Panitia Kongres telah mengadakan penghematan setjara maksimal dan menjerukan supaya utusan<sup>2</sup> Kongres dari Djawa membawa perbekalan bahan makanan sendiri.

Dengan bangga dan terharu Kongres melihat kenyataan, bahwa seruan itu bukan sadia dipenuhi oleh utusan<sup>2</sup> Kongres dari Djawa, bahkan sumbangan<sup>2</sup> baru dari Rakjat mengalir lagi berupa bahan makanan yang me-limpah<sup>2</sup>. Disamping itu mengalir tandamata<sup>2</sup> yang telah lebih memperkaya isi pameran Partai yang diadakan dalam rangka penjelenggaraan Kongres.

Perhitungan yang terachir menunjukkan, bahwa djumlah uang yang masuk dan keluar untuk Kongres Nasional ke-VI Partai ialah sebagai berikut :

Pemasukan : Rp. 3.520.974,—

Pengeluaran :

a. Kongres Nasional Rp. 498.575,—

b. Kena sanering Rp. 456.300,—

---

Rp. 954.875,—

Sisa :

Rp. 2.566.099,—

(Dua djuta limaratus enam puluh-enam ribu sembilan puluh-sembilan rupiah).

Djumlah uang yang sebesar Rp. 2.566.099,— diputuskan oleh Kongres Nasional ke-VI PKI, untuk digunakan sebagai biaya perluasan Gedung Komite Central Partai dan djika ada sisanja untuk sumbangan pembangunan Gedung Kebudayaan di Djakarta.

Sebagai djawaban dan pernyataan terimakasih yang se-besar<sup>2</sup>nja kepada Rakjat, Kongres memutuskan menjetudjui usul Kawan D.N. Aidit untuk mengembangkan kerdjabakti sesudah Kongres, dengan membentuk se-kurang<sup>2</sup>nja satu Regu Kerdjabakti ditiap Ketjamatan dimana terdapat Komite PKI.

Regu<sup>2</sup> Kerdjabakti supaya setjara teratur dan berentjana melakukan kegiatan<sup>2</sup> bersama dan untuk massa Rakjat. Fungsionaris<sup>2</sup> Partai dari semua tingkat harus menggabungkan diri pada salah-satu Regu Kerdjabakti.



## Hentikan Pertjobaan<sup>2</sup> Sendjata Nuklir dan Bentuk Dacrah<sup>2</sup> Bebas Atom

Kongres Nasional Ke-VI PKI jang dilangsungkan di Djakarta pada tgl. 7-14 September 1959 berpendapat bahwa masalah pertjobaan<sup>2</sup> sendjata<sup>2</sup> nuklir adalah salahsatu masalah internasional jang harus mendapat pemetjahan dengan segera karena ia menjangkut nasib dan kelangsungan hidup umatmanusia sekarang dan generasi<sup>2</sup> jang akan datang.

Kongres mentjatat bahwa perdjuaan Rakjat sedunia untuk pelarangan pertjobaan<sup>2</sup>, penimbunan dan pemakaian sendjata<sup>2</sup> tersebut, telah mentjapai sukses<sup>2</sup> besar. Berbagai sardjana, pemimpin organisasi<sup>2</sup> massa, pemuka<sup>2</sup> pemerintahan dari berbagai negeri, demikian pula konferensi<sup>2</sup> internasional tingkat pemerintahan maupun bukan-pemerintahan telah melantangkan suara kemanusiaanja agar pertjobaan<sup>2</sup> sendjata<sup>2</sup> nuklir tersebut segera dihentikan.

Sesuai dengan kehendak Rakjat<sup>2</sup> sedunia Uni Sovjet telah menjatakan setjara sefihak untuk tidak mengadakan pertjobaan sendjata<sup>2</sup> nuklir lagi, sebagai termaktub dalam pengumuman Dewan Menteri Uni Sovjet tertanggal 31 Maret 1958. Dunia menjambut dengan gembira keputusan tersebut dan mengharap Amerika Serikat dan Inggris membuat pernjataan jang serupa. Sungguh disesalkan bahwa harapan<sup>2</sup> ini tidak terpenuhi, bahkan Amerika Serikat dan Inggris terus mengadakan serangkaian pertjobaan<sup>2</sup> baru.

Atas desakan jang semakin keras dari Rakjat<sup>2</sup> sedunia agar negara<sup>2</sup> atom mengadakan perundingan untuk mentjapai persetudjuan tentang pelarangan pertjobaan<sup>2</sup> sendjata<sup>2</sup> nuklir, desakan mana sesuai dengan peringatan „Panitia Ilmiah PBB tentang akibat<sup>2</sup> Radiasi Atom” jang dalam laporannja kepada Sidang Madjelis Umum PBB bulan Agustus 1958 menegaskan sekali lagi bahwa pertjobaan<sup>2</sup> sendjata<sup>2</sup> nuklir membahajakan umatmanusia sekarang dan generasi jang akan datang, maka pada tanggal 31 Oktober 1958 dimulailah perundingan 3 Negara Atom di Djenewa untuk mentjapai persetudjuan tentang pelarangan pertjobaan, penimbunan dan penggunaan sendjata<sup>2</sup> nuklir. Peristiwa ini adalah suatu kemenangan baru bagi Rakjat diseluruh dunia jang telah memperdjuaannja sedjak beberapa tahun lamanja.

Sungguhpun Amerika Serikat dan Inggris berusaha keras untuk menggagalkan dan merintangi tertjapainja persetudjuan dalam Konferensi Djenewa ini, tetapi adalah suatu kenyataan bahwa hingga sekarang Konferensi masih tetap berlangsung bahkan mentjapai kemadjuan<sup>2</sup> tertentu. Disamping itu adalah suatu kenyataan

jang menggembirakan bahwa selama hampir satu tahun perundingan di Djenewa berlangsung, tidak ada satupun negara jang mengadakan pertjobaan bom atom atau hidrogen. Keadaan ini sangat menggembirakan dan membuktikan bahwa sesungguhnya pertjobaan<sup>2</sup> dapat dihentikan. Oleh karena itu Kongres mendesak agar perundingan<sup>2</sup> di Djenewa terus dilangsungkan hingga akhirnya tertjapai persetudjuan. Rakjat Indonesia terutama kaum Komunis Indonesia harus melipatgandakan usahanya agar tuntutan<sup>2</sup> untuk berhasilnja Konferensi Djenewa mendjadi lebih keras dan lebih maring. Lebih baik berunding 10 tahun daripada mengadakan pertjobaan 1 bom atom.

Dalam situasi jang menimbulkan harapan demikian itu, keputusan pemerintah Perantjis untuk mengadakan pertjobaan bom atomnja jang pertama di Sahara, merupakan suatu sabotase terhadap perundingan<sup>2</sup> di Djenewa dan membukakan pintu bagi Amerika Serikat dan Inggris untuk mengalihkan perhatian dunia dari Konferensi Djenewa dan memulai kembali pertjobaan<sup>2</sup> sendjata nuklirnja, dengan demikian mengingkari harapan<sup>2</sup> jang tumbuh dikalangan Rakjat<sup>2</sup> diseluruh dunia. Adalah pada tempatnja dan sesuai dengan rasa kemanusiaan, kechawatiran umum dan pendapat umum di Indonesia maupun diseluruh dun.a, apabila pemerintah Indonesia menjampaikan protes se-keras<sup>2</sup>nja kepada pemerintah Perantjis dan menuntut agar pertjobaan bom atom Perantjis di Sahara itu dibatalkan.

Sedjalan dengan perdjungan untuk menghentikan pertjobaan<sup>2</sup>, penimbunan dan penggunaan sendjata<sup>2</sup> nuklir, adalah perdjungan untuk mentjiptakan daerah<sup>2</sup> bebas atom. Bagi Rakjat Indonesia perdjungan untuk mentjiptakan daerah<sup>2</sup> bebas atom ini mendjadi lebih mendesak lagi setelah kenyataan bertambah banjaknja negara<sup>2</sup> Asia jang menerima sendjata<sup>2</sup> nuklir. Disamping Djepang, Okinawa dan Korea Selatan dewasa ini Amerika Serikat sedang berusaha sekeras-kerasnja agar sendjata<sup>2</sup> nuklir dapat pula masuk ke Filipina, Muangthai dan Vietnam Selatan.

Kongres berpendapat bahwa dewasa ini sudah tiba waktunya bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah<sup>2</sup> njata guna terlaksananja ide pembentukan daerah<sup>2</sup> bebas atom di Asia dan Pasifik.



## Lawan Subversi dan Intervensi AS, dan Bubarkan SEATO !

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta pada tgl. 7-14 September 1959 setelah mendengar dan mendiskusikan Laporan Umum CC, membenarkan dan memperkuat analisa dan garis politik CC yang menjimpulkan bahwa imperialisme Amerika Serikat adalah musuh yang paling berbahaya bagi seluruh kemanusiaan yang tjinta damai dan kemadjuan. Salahsatu bentuk dan saluran intervensi dan agresi imperialisme AS terhadap bangsa<sup>2</sup> lain adalah pakt<sup>2</sup> militer. Melalui pakt<sup>2</sup> militer agresif ini AS dan imperialisme dunia mentjoba mempertahankan kekuasaan kolonialnya atas bangsa<sup>2</sup> lain. Melalui pakt<sup>2</sup> militer agresif ini AS mengatjau dan mengganggu keamanan dan hidup damai bangsa<sup>2</sup>. Mereka memetjahbelah dan mengadudomba bangsa<sup>2</sup> satu sama lain. Mereka menimbulkan perang dalamnegeri dan mereka menjuruh bangsa Asia bertempur melawan bangsa Asia.

Kenjaatan<sup>2</sup> dan pengalaman<sup>2</sup> Indonesia dan negeri<sup>2</sup> lain di Asia Tenggara sendiri menundjukkan bahwa bagian dunia ini merupakan salahsatu sasaran terpenting dari agresi imperialis AS yang disini diwakili oleh kegiatan<sup>2</sup> subversi, intervensi dan agresi pakt militer SEATO. Dewasa ini sedang berlangsung pula intervensi<sup>2</sup> bersendjata SEATO yang mengganggu keamanan di Asia. Di Laos intervensi SEATO yang sudah ber-tahun<sup>2</sup> dipersiapkan, sekarang sudah mengakibatkan perang dalamnegeri. Di India sedang giat diadakan usaha<sup>2</sup>, fitnahan<sup>2</sup> dan provokasi<sup>2</sup> untuk memetjahbelah hubungan tetangga baik antara India dan RRT. Djuga di Kambodja subversi SEATO masih terus giat dilakukan untuk menjatuhkan politik netral Pemerintah Norodom Sihanouk yang teguh menolak SEATO. Di Indonesia SEATO masih sadja terus membantu dan mendalangi sisa<sup>2</sup> kekuatan kaum pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta”.

Adalah mendjadi kepentingan bersama yang mendesak dari semua negeri Asia, chususnja negeri<sup>2</sup> Asia Tenggara, untuk dengan gigih melawan dan mengalahkan segala bentuk subversi, intervensi dan agresi dari SEATO, sesuai dengan Putusan<sup>2</sup> Bandung. Laporan Umum Kawan D.N. Aidit dengan tepat menjatakan bahwa dalam perlawanan terhadap SEATO ini, Indonesia berada difront yang paling depan. Tugas ini bagi Indonesia merupakan tugas nasional dan internasional yang berat tetapi mulia, demi keselamatan dan keutuhan Republik Indonesia, demi perdamaian di Asia dan didunia.

Kongres berseru dan berharap agar Pemerintah Republik Indonesia menundukkan inisiatif yang lebih berani dan terusmenerus untuk melawan segala bentuk subversi dan intervensi AS dan untuk membubarkan SEATO yang membahayakan keamanan dan keutuhan Republik Indonesia.

Kongres berseru kepada seluruh Rakyat agar mempertinggi kewaspadaannya dan melipatgandakan kegiatan untuk mendorong Pemerintah supaya mengambil tindakan<sup>2</sup> yang lebih tegas terhadap SEATO.

Perlawanan terhadap SEATO adalah perlawanan nasional seluruh Rakyat Indonesia.

Lawan subversi dan intervensi Amerika Serikat !

Bubarkan SEATO !



### Sukseskan Penjelenggaraan KTT

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta pada tgl. 7-14 September 1959 menggarisbawahi Laporan Umum CC yang meminta perhatian Pemerintah dan Rakyat Indonesia atas pentingnya tuntutan umatmanusia sedunia yang mendukung usul Uni Sovjet untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tertinggi (KTT).

Terlaksananya K.T.T. akan sangat mengurangi ketegangan<sup>2</sup> internasional dan merupakan permulaan baik bagi dihentikannya perang dingin yang sangat mengganggu keamanan internasional itu. Ia akan merupakan kemenangan dari prinsip menjelesaikan segala pertikaian internasional melalui djalan berunding dan dalam suasana damai.

Dalam proses memperjuangkan terlaksananya K.T.T. ini, Rakyat<sup>2</sup> tjinta damai terusmenerus mengalami sabotase<sup>2</sup> kaum imperialis yang hendak menggagalkan terwujudnja hasrat umatmanusia akan perdamaian ini. Tetapi Kongres berkejakinan teguh bahwa kekuatan<sup>2</sup> perdamaian adalah lebih besar dan lebih unggul daripada kekuatan perang.

Kemenangan penting kearah tertjapainja K.T.T. adalah saling-kundjung antara pemimpin<sup>2</sup> tinggi pemerintahan beberapa negara, terutama yang akan dilakukan oleh Presiden Eisenhower dari Amerika Serikat ke Uni Sovjet dan yang sudah dilakukan oleh P.M. Chrusjov dari Uni Sovjet ke Amerika Serikat baru<sup>2</sup> ini.

Peristiwa terakhir ini disambut dengan gembira dan dengan dukungan yang sangat kuat dari Rakyat demokratis disemua negeri, termasuk Rakyat Indonesia.

Kongres berpendapat bahwa adalah sewadjaranja djika pemerintahan Indonesia dalam menjambut baik kedjadian<sup>2</sup> internasional yang penting ini memikirkan serta mendjalankan usaha<sup>2</sup> yang serius kearah penjingkiran segala rintangan bagi terdjaminnja penjelenggaraan Konferensi Tingkat Tertinggi dalam waktu yang setcepat-tcepatnja.

Indonesia termasuk salahsatu negeri yang paling berkepentingan atas terpeliharanja perdamaian dunia yang merupakan syarat penting bagi kelanjutan pembangunan negerinja.

Sukseskan penjelenggaraan Konferensi Tingkat Tertinggi'



## Karena Setia Pada UUD 1945, Tolak PP No. 6 Tahun 1959

Kongres Nasional ke-VI PKI yang berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 14 September 1959 di Djakarta :

*mendengar :*

a). Laporan Umum yang disampaikan oleh Kawan D.N Aidit yang antara lain mengatakan bahwa : untuk mengalahkan bahaya anti-demokrasi yang menudju pada sistim pemerintah diktatur per seorangan ataupun diktatur militer supaja seluruh Rakyat Indonesia dengan gigih memperdjuangkan agar Pemerintah : „menghormati kedudukan dan hak-hak daripada Dewan Perwakilan Rakyat Pusat (Parlemen) dan Daerah dan mempertahankan sistim kepala Daerah yang dipilih oleh Rakyat, meluaskan wewenang daripada pemerintahan<sup>2</sup> Daerah Swatantra I dan II dan melaksanakan pembentukan pemerintah Daerah Swatantra tingkat III”.

b). Laporan<sup>2</sup> dari para utusan, chususnja mengenai otonomi daerah.

c). Pengumuman diundangkannja PP No. 6 tahun 1959 dan kinan Menteri Ipik Gandamana.

*Menimbang, bahwa :*

1. Salahsatu tugas Revolusi Agustus 1945 dalam bidang pemerintahan Daerah adalah merombak dan mengganti sistim pemerintahan „eenhoofdig” yang otokratis kolonial (seperti dibawah:

kekuasaan amtenar<sup>2</sup> BB) dengan sistim pemerintahan yang demokratis kolegial.

2. Sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 pemerintahan yang ditata<sup>2</sup>kan itu berangsur-angsur dilaksanakan, mula<sup>2</sup> dengan UU KNI Daerah No. 1 tahun 1945, kemudian disempurnakan dengan UU No. 22 tahun 1948 dan setelah itu lebih disempurnakan oleh DPR hasil Pemilihan Umum dalam bentuk UU No. 1 tahun 1957.

3. UU No 1 tahun 1957 tersebut sepenuhnya menjamin dasar Unitarisme Negara dan menutup kemungkinan segala bentuk federalisme, sebab dengan dilaksanakan sepenuhnya UU No. 1, 1957 tidak lagi ada alasan bagi petualang<sup>2</sup> untuk menghasut se-olah<sup>2</sup> segala kekuasaan dipegang Pemerintah Pusat. Terbukti oleh kenyataan, bahwa terlambatnya memberikan otonomi yang luas kepada daerah<sup>2</sup> telah sangat membantu kaum separatis dalam propaganda.

4. UU No. 1 tahun 1957 sepenuhnya sesuai dengan jiwa UUD 1945, yang didalam fasal 18 menyatakan sebagai berikut :

*„Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang<sup>2</sup> dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara.....” dan seterusnya.*

5. UU No. 1 tahun 1957 sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi terpimpin, oleh karena demokrasinya ditjerminkan dengan adanya prinsip pemilihan dan musjawarah sedang prinsip terpimpinnya didjamin oleh fasal<sup>2</sup> yang memberikan hak<sup>2</sup> pengawasan baik yang bersifat preventif maupun repressif kepada Pemerintah Pusat.

6. UU No. 1 tahun 1957, djika dilaksanakan sepenuhnya akan menghilangkan dualisme sebab hanya akan ada satu sadja pemerintah didaerah, jaitu pemerintah otonom yang kolegial demokratis dan mempunyai wewenang yang luas. Djika selama ini ada dualisme, sebab pokoknya jalah karena UU No. 1 tahun 1957 belum dilaksanakan dengan sungguh<sup>2</sup> oleh Pemerintah Pusat.

7. UU No. 1 tahun 1957 adalah sesuai dengan Manifesto Politik Presiden yang menghendaki otonomi yang se-luas<sup>2</sup>nja dan sangat sesuai dengan jiwa serta semangat gotongrojong.

8. Anggapan bahwa dengan UU No. 1 tahun 1957 telah memungkinkan seseorang yang tidak tjakap, tidak berpengalaman, dan sebagainya untuk duduk di Dewan Pemerintah Daerah (DPD), adalah tidak beralasan, karena kemampuan dan ketjakaan mereka belum pernah diudji, berhubung wewenang otonom yang se-luas<sup>2</sup>nja dengan kelengkapan aparaturnya belum pernah diserahkan pada Dewan Pemerintah Daerah. Tetapi akibat buruk

daripada „Pemerintah“ „eenhoofdig“ dan tidak kolegal sudah dibuktikan dizaman kolonial dan sesudah merdeka.

9. Dika dianggap perlu untuk menjempurnakan UUI No. 1 tahun 1957 maka, sesuai dengan fasal 18 UUD 1945, supaya dilakukan dengan undang<sup>2</sup>.

10. PP No. 6 tahun 1959 menghapuskan sistim kolegal pemerintah Daerah, DPD dibubarkan dan diganti oleh Badan Pekerdja Harian yang hanya merupakan pembantu belaka dari Kepala Daerah. Tidak ada keharusan bagi kepala daerah untuk berunding dengan BPH.

11. PP No. 6 tahun 1959 menghidupkan kembali sistim pemerintahan „eenhoofdig“, karena Kepala Daerah bisa ditunduk oleh Pusat diluar pentjalonan DPRD dan tidak bisa didjatuhkan oleh DPRD.

12. PP No. 6 tahun 1959 menjuburkan dualisme, sebab Kepala Daerah sebagai alat Daerah tidak diwadjudkan mempertanggungjawabkan tindak-kekuasaannya kepada DPRD dan DPRD sebagai badan yang dipilih oleh Rakjat tidak bisa mendjalankan tindakan korektif terhadap Kepala Daerah.

13. PP No. 6 tahun 1959 menghilangkan sifat otonomi sebab DPRD pada hakekatnja diturunkan deradajtnja dari badan legaslatif menjadi sematjam badan-penasehat (advies-college) saja yang tidak berwewenang apa<sup>2</sup>.

14. PP No. 6 tahun 1959 tidak mendjamin hak DPRD menentukan pembantu<sup>2</sup> Kepala Daerah (BPH), sebab anggota<sup>2</sup> BPH hanya se-dapat<sup>2</sup>nja diangkat dari tjalon<sup>2</sup> DPRD, tetapi bukan keharusan.

15. PP No. 6 tahun 1959 menentukan sjarat<sup>2</sup> menjadi Kepala Daerah antara lain „pengalaman dalam pemerintahan“, jaitu sjarat yang pada umumnya hanya bisa dipenuhi oleh orang<sup>2</sup> pamongpradja. Padahal, sedangkan untuk djadi anggota Dewan Menteri (Kabinet) tidak ada ketentuan sjarat demikian ini.

16. PP No. 6 tahun 1959 dikatakan untuk mentjiptakan pemerintahan Daerah yang sesuai dengan pemerintahan Pusat, padahal menurut UUD 1945 bentuk pemerintah di Pusat dan di Daerah diatur sendiri<sup>2</sup>.

17. PP No. 6 tahun 1959 dikatakan untuk menjesuaikan „stijl“ pemerintah Daerah dengan pemerintah Pusat, padahal Presiden dipilih oleh MPR sedangkan Kepala Daerah boleh menjimpang dari hasil pilihan DPRD.

18. PP No. 6 tahun 1959 hendak mentjiptakan „Sukarno<sup>2</sup> ke-tjil“ di-daerah<sup>2</sup>, padahal di Indonesia hanya ada satu Sukarno yang mendapat kepertjajaan besar dari Rakjat Indonesia karena beliau

adalah pedjuang kemerdekaan jang sudah terudji sedangkan orang<sup>2</sup> jang dikatakan berpengalaman itu termasuk orang<sup>2</sup> jang bekerdja dengan kaum kolonialis Belanda pada waktu Bung Karno melawan Belanda.

19. PP No. 6 tahun 1959 bukan hanya tidak bersumber pada UUD '45, tetapi malahan mentjiderai UUD '45, karena fasal 18 UUD '45 dengan positif menentukan bahwa soal pemerintahan dan otonomi Daerah harus diatur dengan Undang<sup>2</sup> dan bukan dengan PP.

*Memutuskan :*

1. Djustru karena setia pada UUD 1945, PKI tetap mempertahankan UU No. 1 tahun 1957 dan memperdjuangkan pelaksanaannja sepenuhnya.

2. Menolak PP No. 6 tahun 1959 bikinan Menteri Ipik Gandamana dan menuntut pentjabutannja, karena PP No. 6 bertentangan dengan UUD 1945, anti-demokratis dan anti-gotongrojong.

3. Memperdjuangkan keputusan No. 1 dan 2 melalui semua djalan parlementer dan demokratis.



## **PKI Menerima UUD 1945 dan Pantjasila untuk Memperkuat Front Nasional dan Mentjapai Masjarakat Adil dan Makmur**

Dalam Laporan Umum CC kepada Kongres Nasional ke-VI PKI jang disampaikan oleh Kawan D.N. Aidit telah dikemukakan bahwa setelah Konstituante gagal untuk membikin UUD baru, maka PKI dan golongan<sup>2</sup> patriotik lainnja dengan teguh memperdjuangkan supaja UUD 1945 diterima oleh Konstituante. Setelah hal ini tak berhasil, sekalipun mendapat dukungan suara terbanjak dalam Konstituante, PKI berpendapat bahwa satu<sup>2</sup>nja djalan untuk menjelamatkan negeri dari bentjana perpetjahan nasional lebih landjut hanjalah djika Presiden Sukarno mendekritkan UUD 1945 atasnama majoritet Rakjat Indonesia. Kekurangan<sup>2</sup> jang terdapat pada UUD 1945 akan dapat diisi dikemudian hari melalui Sidang<sup>2</sup> Madjelis Permusjawaratan Rakjat (MPR) jang demokratis. Maka itu pendekritan berlakunja kembali UUD 1945 jang terdjadi pada tanggal 5 Djuli 1959 disambut dengan baik oleh PKI dan Rakjat Indonesia pada umumnja. Kongres Nasional ke-VI PKI membe-

narkan sikap ini.

Dalam Manifesto Politik Presiden Sukarno yang diujtjapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 diterangkan, bahwa UUD 1945 *„memberikan landasan yang kuat idii dan struktural, jaitu Pantjasila dan Pemerintah yang stabil, untuk bekeidja setingkat demi setingkat mercalisasikan dasar dan tudjuan Revolusi”* Duga diujtjantumkan penegasan bahwa yang dimaksudkan dengan Pemerintah yang stabil ialah *„Pemerintah yang berwibawa, yang dapat bekeidja tenang-teguh ber-tahun<sup>2</sup>, . . . . tidak untuk mendjamin kepentingan modal asing, tetapi untuk mendjamin sandang-pangan bagi Rakjat”*. Terdapat pula penegasan bahwa *„demokrasi harus mendjadi alat Rakjat untuk mentjapai tudjuan Rakjat”*, jaitu *„Negara kuat, masyarakat adil dan makmur”*.

Kongres Nasional ke-VI PKI berpendapat bahwa putusan Partai yang sudah sedjak sebelum Kongres Nasional ke-VI menerima dan memperdjuangkan Pantjasila baik didalam maupun diluar Konstituante, serta putusan Partai untuk kembali ke UUD 1945 dan menerima Manifesto Politik Presiden Sukarno adalah sesuai dengan Konstitusi Partai dan Program Partai, sebelum maupun sesudah diperbaharui. Karena itu Kongres selandjutnja memutuskan supaya dalam menghadapi perkembangan situasi dimasa datang putusan<sup>2</sup> Partai tersebut mendjadi pegangan untuk memperkuat front nasional, memperkuat perdjuangan untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis sebagai langkah penting untuk mentjapai masyarakat adil dan makmur.



### Bebaskan Manolis Glezos!

Kongres Nasional ke-VI PKI yang dilangsungkan di Djakarta dari tgl. 7-14 September 1959 berpendapat, bahwa salahsatu perdjuangan yang penting daripada umatmanusia untuk kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian adalah perdjuangan Rakjat Junani untuk kepentingan<sup>2</sup> fundamentilnja, untuk keamanan negerinja. Dalam perdjuangan yang mulia ini, Manolis Glezos, pahlawan Rakjat Junani, ber-sama<sup>2</sup> dengan Vutsas, anggota Comitè Central Partai Komunis Junani serta pemimpin<sup>2</sup> dan demokiat<sup>2</sup> lainnja seperti Trikalinos, Singelaris, Karkayanis, Raguzeridis dan Grigoriadu telah mendjadi korban kedjahatan kaum reaksioner.

Pengadilan Atena telah mendjatuhkan hukuman pendjara 5 ta-

hun untuk Manolis Glezos atas tuduhan mengkhianati negara, tuduhan yang samasekali palsu. Hukuman ini didasarkan atas suatu undang<sup>2</sup> tahun 1936 dari pemerintahan diktatur fasis Metaxas yang sebenarnya sedjak tahun 1951 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Suatu komisi internasional dari kaum pengatjara, bahkan ketua Partai Monarki Yunani, Tsaldaris, menyatakan bahwa tuduhan pengkhianatan itu palsu se-mata<sup>2</sup>.

Tudjujan politik dari provokasi reaksioner ini tidaklah lain daripada untuk mendiskreditkan gerakan demokratis di Yunani, terutama sekali Partai Komunis Yunani. Bukanlah sesuatu yang kebetulan djika tindakan mengadili patriot<sup>2</sup> dan demokrat<sup>2</sup> Yunani ini berdjalan bersamaan dengan meningkatnja gelombang pasang gerakan Rakjat Yunani yang menentang didjadiakannja Yunani pangkalan sendjata atom dan peluru kendali Amerika Serikat. Kaum reaksioner Yunani dengan demikian berusaha menipu dan mengintimidasi Rakjat Yunani untuk menutupi kegiatan<sup>2</sup> anti-nasional mereka.

Kongres Nasional ke-VI PKI mengutuk tindakan provokatif dari kaum kontra-revolusioner yang dewasa ini berkuasa di Yunani. Kongres menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia agar menjokong dengan aktif serta mendjalankan aksi<sup>2</sup> solidaritet dengan lebih intensif untuk ber-sama<sup>2</sup> dengan Rakjat Yunani yang gagah-perwira serta umatmanusia sedunia yang tjinta damai dan tjinta keadilan menuntut pembatalan sepenuhnya dari hukuman yang tiada menurut hukum serta tiada berkeadilan itu atas diri Glezos. Hati nurani Rakjat<sup>2</sup> didunia tidak bisa menerima kenjataan bahwa putera<sup>2</sup> terbaik dari Yunani dirampas hak<sup>2</sup>nja untuk meneruskan aktivitet<sup>2</sup> patriotik mereka yang luhur itu.

Bebaskan Manolis Glezos dan kawan<sup>2</sup>nja, patriot<sup>2</sup> dan demokrat<sup>2</sup> Yunani !



### **Kutuk Pembunuhan Ali Olowi dan Penembakan Buruh Iran !**

Kongres Nasional ke-VI PKI dengan perhatian serta rasa solidaritet yang dalam mengikuti kedjadian<sup>2</sup> menjedihkan yang menerima insinjur Ali Olowi, anggota Biro Eksekutif Partai Tudeh Iran, dan buruh batubara serta buruh tekstil yang melakukan pemogokan di Teheran dan Isfahan belum lama berselang.

Pada tanggal 16 Djuni 1959, atas perintah Sjah Iran, Risa Pahlevi, insinjur Ali Olowi ditembak mati setelah meringkuk selama 3 tahun dalam pendjara. Penembakan ini dilakukan tanpa melalui proses hukum dan pada saat kaum buruh Teheran dan Isfahan mengadakan aksi<sup>2</sup> pemogokannya untuk perbaikan nasib dan untuk menentang politik anti-nasional dari pemerintah Iran yang mengabdikan kaum imperialis Amerika dan Inggris. Penembakan seorang pemimpin Partai Tudeh ini dilakukan dengan harapan dapat mengintimidasi Rakyat Iran serta membendung gelombang gerakan Rakyat di Iran. Dalam pada itu, pada tanggal 18 Djuni 1959 atas perintah Sjah, polisi militer telah menembaki buruh batubara di Teheran yang mogok selama 3 hari untuk perbaikan upah sehingga mengakibatkan 50 orang tewas dan banjak luka<sup>2</sup>. Djuga kaum buruh pabrik Matan di Isfahan ditembaki dan belasan buruh meninggal dunia.

Peristiwa itu sangat mengantjam djiwa semua tahanan politik, terutama djiwa 500 anggota Partai Tudeh, serikatburuh<sup>2</sup> organisasi<sup>2</sup> pemuda demokratis dan partisan<sup>2</sup> perdamaian yang militan yang ditahan diberbagai pendjara di Iran.

Kongres mengutuk tindakan<sup>2</sup> kedji itu yang merupakan pelanggaran hak<sup>2</sup> azasi manusia yang tertjantum dalam Piagam Hak<sup>2</sup> Manusia PBB yang djuga diakui oleh Undang<sup>2</sup> Dasar Iran sendiri. Kongres menjerukan kepada Rakyat Indonesia untuk mendesak Sekretaris Djenderal PBB, Dag Hammerskoeld, agar PBB tidak bersikap atjueh-tak-atjueh terhadap kedjahatan<sup>2</sup> kedji yang dilakukan setiap hari oleh rezim yang se-wenang<sup>2</sup>, yang mengingatkan kita pada abad pertengahan dimana manusia tidak mempunyai harga dimata kaum feodal. Kongres mendesak supaya Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), sesuai dengan wewenang<sup>2</sup>nya, mengadakan angket resmi tentang perkosaan<sup>2</sup> yang dilakukan oleh pemerintah Iran terhadap hak<sup>2</sup> azasi manusia dan hak<sup>2</sup> kaum buruh di Iran.

Kutuk pembunuhan Ali Olowi dan penembakan buruh Iran !



## **Bebaskan Fajarollah Helou, Pahlawan Libanon !**

Kongres Nasional ke-VI PKI dengan penuh rasa kuatir dan gelisah mengikuti penderitaan serta siksaan<sup>2</sup> yang mengantjam djiwa Kawan Fajarollah Helou, Sekretaris Komite Central Partai

Komunis Libanon jang ditjuluk pada tanggal 25 Djuni 1959 oleh polisi Republik Arab Persatuan di Damsjik, ibukota Suriah.

Kawan Fajarollah Helou adalah seorang patriot sedjati, seorang penulis jang penuh bakat, seorang pemimpin jang rendahhati dan sangat ditjintai oleh Rakjat Libanon karena perdjjuangannya jang gagahberani melawan imperialisme untuk kemerdekaan nasional negerinja.

Berita<sup>2</sup> jang terachir dari Damsjik menundjukkan bahwa perlawanan jang gigih dari Kawan Fajarollah Helou terhadap siksaan<sup>2</sup> polisi Republik Arab Persatuan menjebabkan bahwa polisi Republik Arab Persatuan menggunakan tjara<sup>2</sup> penjiksaan jang lebih kedjam dari tjara<sup>2</sup> siksaan Zaman Tengah, seperti memasukan udara kedalam perutnja, kemudian mengindjak perut jang kembung karena udara ini sehingga mengakibatkan perdarahan jang keras.

Kongres atasnama lebih dari 1.5 djuta Komunis dan lebih dari 8 djuta pemilih PKI, menjatakan simpati jang se-dalam<sup>2</sup>nja kepada Kawan Fajarollah Helou dan memprotes se-keras<sup>2</sup>nja kebiadaban polisi Republik Arab Persatuan serta menjerukan kepada seluruh Rakjat Indonesia jang anti-imperialis dan demokratis untuk ber-sama<sup>2</sup> dengan berbagai golongan jang luas jang mengadakan gerakan solidaritet jang menjeluruh di Libanon dan di-negara<sup>2</sup> Arab lainnya, di Italia, Perantjis, Sri Langka, Djepang dan lain<sup>2</sup> negeri diseluruh dunia mendesak pemerintah Republik Arab Persatuan segera membebaskan Fajarollah Helou atau menjerahkan<sup>2</sup>nja kepada Pemerintah Libanon.

Kongres berpendapat, dengan gerakan solidaritet internasional jang kuat Kawan Fajarollah Helou, pahlawan Libanon dapat diselamatkan, kebebasannya dapat direbut dan tangan kaum penjiksa dapat ditjegah melakukan kebiadabannya.



### **Sokong Terus Perdjjuangan Rakjat Aldjazair!**

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia jang dilangsungkan di Djakarta pada tanggal 7 s/d 14 September 1959, menjtudjui Laporan Umum Kawan D.N. Aidit, jang antara lain menjatakan bahwa perang kemerdekaan jang sedang gigih dilakukan oleh Rakjat salahsatu negeri Asia-Afrika, Rakjat Aldjazair, adalah gerakan pembebasan nasional jang harus mendapat per-

hatian serta sokongan sebesar-besarnya dari Rakyat Indonesia.

Perang kemerdekaan yang dilakukan oleh Rakyat Aljazair melawan kolonialisme Perancis selama 5 tahun hingga sekarang ini, adalah akibat logis dari politik penindasan dan penghisapan kolonial yang setjara kedjam didjalankan oleh kaum imperialis Perancis terhadap Rakyat Aljazair selama hampir 130 tahun. Seperti halnya Rakyat di-negeri<sup>2</sup> djadjahan lainnya, Rakyat Aljazair selama masa itu tidak hanya dirampas kekayaan bumi dan alamnya, tetapi djuga dilutjuti hak<sup>2</sup> kebebasannya untuk menentukan nasib sendiri.

Terutama dalam waktu 5 tahun akhir<sup>2</sup> ini, kaum imperialis Perancis dengan bantuan negeri<sup>2</sup> anggota NATO yang dikepalai oleh imperialis Amerika Serikat telah melakukan segala bentuk kebiadaban dalam usahanya menindas dan menghantjurkan sama-sekali gerakan kemerdekaan nasional Aljazair. Meninggalnya Aissat Idir, Sekretaris Djenderal Gabungan Umum Serikatburuh<sup>2</sup> Aljazair pada tanggal 25 Djuli 1959 akibat siksaan dan penganiayaan kaum kolonialis Perancis, merupakan salahsatu dari sekian banyak kebiadaban kolonial dan perkosaan hak<sup>2</sup> azasi manusia yang didjamin dalam Piagam PBB. Kaum imperialis Perancis dan seluruh komplotan agresif yang tergabung dalam NATO sangat berkepentingan untuk tetap mempertahankan Aljazair sebagai negeri djadjahan, sesuai dengan rentjana<sup>2</sup> perangnya yang hendak mendjadikan seluruh negeri<sup>2</sup> Afrika Utara sebagai sumber penghisapan kolonial dan pangkalan perang yang membahayakan perdamaian dunia.

Berkat keuletan Rakyat Aljazair sendiri dan berkat bantuan serta solidaritet dari semua kekuatan kemerdekaan, demokrasi dan perdamaian diseluruh dunia, terutama berkat dukungan dan solidaritet negeri<sup>2</sup> Sosialis yang dipelopori oleh Uni Sovjet yang senantiasa memihak Rakyat tertindas, perang kemerdekaan Rakyat Aljazair makin hari makin mendapat kemajuan.

Terbentuknja Pemerintah Sementara Aljazair, adalah suatu faktor politik yang sangat penting artinja tidak sadja bagi perjuangan Aljazair digelanggang internasional, tetapi djuga bagi segenap kekuatan kemerdekaan dan perdamaian diseluruh dunia. Oleh karenanya adalah wajar dan harus disambut dengan gem-bira sikap pemerintah<sup>2</sup> nasional beberapa negeri Asia-Afrika, termasuk pemerintah Republik Indonesia, yang ber-sama<sup>2</sup> dengan pemerintah negeri<sup>2</sup> kubu Sosialis, telah mengakui Pemerintah Sementara Aljazair yang diproklamasikan pada tanggal 18 September 1958 di Kairo.

Kongres menjerukan agar Pemerintah melandjutkan usaha<sup>2</sup> yang

lebih intensif supaya PBB mengambil keputusan diadakannya perundingan antara Pemerintah Perancis dan Pemerintah Sementara Republik Aljazair atas dasar pengakuan kemerdekaan Rakyat Aljazair.

Kongres sepenuhnya yakin bahwa imbalan kekuatan internasional dewasa ini yang sudah setjara definitif dan kongkrit menguntungkan gerakan kemerdekaan dan perdamaian, dan front nasional pembebasan Rakyat Aljazair yang semakin kokoh merupakan jaminan pasti bagi kemenangan Rakyat Aljazair.

Dengan rasa solidaritet yang se-dalam<sup>2</sup>nja serta salut yang setinggi<sup>2</sup>nja, Kongres menyatakan rasa simpati yang se-dalam<sup>2</sup>nja dan sokongan yang sekuat-kuat<sup>2</sup>nja kepada Rakyat Aljazair yang gagah-berani dalam perjuangan mulia<sup>2</sup>nja untuk mengusir se-lama<sup>2</sup>nja kaum pendjajah Perancis dari tanahair<sup>2</sup>nja, untuk membangun Aljazair baru yang merdeka penuh dan demokratis.

Segala hormat kepada Rakyat Aljazair, segala kutuk kepada imperialis Perancis, untuk Asia-Afrika yang merdeka, untuk dunia yang damai.



## **Bebaskan Pedjuang<sup>2</sup> Perdamaian Mesir dan Suriah**

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia yang ber-sidang dari tgl. 7 s/d 14 September 1959 di Djakarta dengan tje-mas dan rasa amarah mengikuti berita<sup>2</sup> tentang penahanan di Iskandariah atas sedjumlah besar anggota Dewan Perdamaian Dunia, Dewan Perdamaian Nasional Mesir dan Suriah serta para peserta Kongres Dunia Untuk Perlutjutan Sendjata Dan Kerdja-sama Internasional di Stockholm oleh kekuasaan Nasser di Republik Arab Persatuan.

Melakukan perjuangan untuk mempertahankan perdamaian dunia yang dewasa ini dibahajakan oleh rentjana<sup>2</sup> agresif kaum imperialis untuk mengobarkan perang yang akan lebih dahsjat daripada perang di-masa<sup>2</sup> yang lalu, adalah suatu keharusan sedjarah dan kewadajiban mutlak setiap orang serta setiap pemerintahan apabila ia ingin mengabdikan diri pada tjita<sup>2</sup> kemanusiaan dan tjita<sup>2</sup> kemerdekaan. Penahanan atas pedjuang<sup>2</sup> perdamaian Mesir dan Suriah oleh Pemerintah Nasser, apalagi tanpa diikuti dengan

diadilinja mereka dengan segera sesuai dengan hukum jang lazim berlaku sebagaimana halnja sekarang itu, adalah tindakan se-wenang<sup>2</sup> dan fasis, suatu kedjahatan terhadap keadilan dan ke-manusiaan.

Berdasarkan hal diatas, Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia atasnama lebih dari 1.5 djuta Komunis serta seluruh Rakjat pekerdja Indonesia jang demokratis memprotes se-keras<sup>2</sup>nja tindakan Pemerintah Nasser dan menyerukan kepada seluruh Rak-jat Indonesia jang mendjundjungtinggi demokrasi, keadilan dan kemerdekaan agar ber-sama<sup>2</sup> dengan Rakjat<sup>2</sup> progresif dan tjenta damai di Asia-Afrika dan seluruh dunia menuntut kepada Peme-rintah Nasser dari Republik Arab Persatuan sunaja pedjuang<sup>2</sup> perdamaian di Mesir dan Suriah segera dibebaskan dari tahanan.

Perdjungan Rakjat Mesir dan Suriah untuk demokrasi kemerdekaan dan perdamaian adalah djuga perdjungan Rakjat Indo-nesia!

Bebaskan pedjuang<sup>2</sup> perdamaian Mesir dan Suriah!



## Gagalkan Intervensi AS di Laos!

Dalam mendiskusikan situasi internasional, chususnja dalam meninjau situasi di-negeri<sup>2</sup> tetangga di Asia Tenggara, Kongres Nasional ke-VI PKI jang dilangsungkan di Djakarta dari tgl. 7-14 September 1959 telah membitjarakan djuga perkembangan<sup>2</sup> jang amat mengchawatirkan di Laos.

Masalah Laos, bersama dengan masalah Vietnam dan Kambo-dja sebenarnja telah dapat diselesaikan setjara damai dan me-muaskan oleh Konferensi Djenewa mengenai Indotjina dalam ta-hun 1954. Konferensi ini memutuskan untuk membentuk Komisi Pengawasan Internasional guna mengawasi pelaksanaan dari tjara<sup>2</sup> penyelesaian jang telah disetudjui dalam Konferensi Djenewa tsb.

Disamping persetudjuan Djenewa ini telah pula ditandatangani Persetudjuan Vientiane dalam tahun 1957 jang menetapkan bahwa masalah Laos akan diselesaikan setjara damai tidak dengan tjam-purtangan dari luar, apalagi dengan djalan mendatangkan amunisi, sendjata<sup>2</sup> serta instruktur<sup>2</sup> militer asing.

Tetapi kenyataan menundjukkan bahwa semua persetudjuan ini dilanggar terang<sup>2</sup>an oleh Pemerintah Phoui Sananikone jang ber-kuasa sedjak bulan Agustus 1958.

Wakil<sup>2</sup> dan pemimpin<sup>2</sup> *Nco Lao Haksat (Partai Patriotik Rak-jat)* dan gerakan front nasional Pathet Lao jang menang dan mendapat dukungan luas serta suara banjak dalam pemilihan umum, bukannya dijamin dan diakui hak<sup>2</sup>nya untuk duduk dalam pemerintahan sebagaimana seharusnya, tetapi malahan disingkirkan dari pemerintahan. Lebih daripada itu, mereka di-kedjar<sup>2</sup>, dimasukkan pendjara dan banjak jang dibunuh. Demikian pula halnja dengan perwira<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> dua bataljon pasukan Pathet Lao, jang menurut putusan Djenewa seharusnya dilebur dalam tentara keradjaan Laos telah dilutjuti ditangkap dan dimasukkan pendjara.

Bertentangan dengan putusan<sup>2</sup> Djenewa dan persetudjuan Vientiane, Pemerintah Sananikone jang mengkhianati kepentingan nasional Laos dengan resm. memasukkan perwira<sup>2</sup> A.S. untuk melatih dan langsung memimpin tentara keradjaan Laos. Lebih dari 5/6 dari 135 djuta dollar bantuan A.S. kepada Laos dipergunakan untuk memperlengkapi 30.000 pasukan keradjaan Laos jang dilatih dan dipimpin langsung oleh 30 orang perwira angkatan perang A.S. Djelaslah bahwa A.S. jang mendjadi biangkeladi teror kolonial dan perang dalam negeri di Laos dan menjuruh bangsa Laos membunuh bangsa Laos, praktek kolonial jang sudah dialami pula oleh banjak negeri Asia, termasuk Indonesia sendiri.

Kongres berpendapat bahwa intervensi<sup>2</sup> terangan dari Amerika Serikat di Laos tidak sadja merusak perdamaian dan ketenteraman hidup Rakjat Laos, tetapi djuga merupakan bahaya serius jang mengantjam perdamaian di Asia Tenggara. Intervensi ini merupakan pelanggaran jang kurangadjar terhadap persetudjuan Djenewa dan persetudjuan Vientiane. Intervensi ini bertudjuan mengubah Indotjina dari daerah damai mendjadi pangkalan perang dan sumber ketegangan<sup>2</sup> internasional jang baru, menjeret Laos dan Vietnam Selatan kedalam SEATO, mengepung dan selandjutnja menundukkan Kamboja jang mendjalankan politik netral supaja bisa diseret pula kedalam SEATO dan dengan demikian mengubah seluruh Indotjina mendjadi daerah pangkalan SEATO. Intervensi ini bermaksud menimbulkan „Korea ke-II“ dengan Laos sebagai landasan dan batu lontjatan untuk melantjarkan agresi terhadap Republik Demokrasi Vietnam (RDV) dan Republik Rakjat Tiongkok (RRT), dan untuk merusak perdamaian di Asia. Inilah latar belakang politik Pemerintah Sananikone untuk mendapatkan bantuan pasukan<sup>2</sup> PBB. Oleh karenanja mendjadi kewadajiban penting bagi Rakjat dan Pemerintah Indonesia untuk bersama Rakjat<sup>2</sup> di Asia dan diseluruh dunia melawan dan menggagalkan intervensi dan agresi A.S. di Laos.

Kongres menjerukan kepada Rakjat dan mendesak Pemerintah

Indonesia agar menuntut dihentikannya intervensi A.S. di Laos, ditarik mundurnya semua perwira A.S. dari Laos dan dihapuskan-nya semua pangkalan militer asing dinegeri ini. Kongres memperkuat usul Presiden Sukarno kepada P.M. Pham Van Dong dari RDV untuk dipekerdjakannya kembali setjara normal Komisi Pengawasan Internasional mengenai Indotjuna.

Dewan Keamanan PBB, yang sudah diminta bersidang oleh Sekretaris Djenderal PBB atas permintaan Pemerintah Sanarikone, akan bisa bertindak *adil* terhadap Laos dan Asia djika ditudjukan untuk menghidupkan kembali Komisi Pengawasan Internasional yang dibentuk oleh Konferensi Djenuwa dan bukan untuk mengirim sebuah Komisi „Facts Finding“ yang pada hakekatnya dikuasai oleh SEATO dan Amerika Serikat yang langsung tersangkut dalam intervensi di Laos. Perserikatan Bangsa<sup>2</sup> tidak berhak untuk tjampurtangan dalam urusan Laos dengan mengesampingkan putusan<sup>1</sup> Djenuwa dan Vientiane.

Gagalkan intervensi A.S. di Laos, djaminan penting bagi perdamaian di Asia Tenggara.



## Protes Fasisme Salazar dan Bebaskan Alvaro Cunhal

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia yang bersidang di Djakarta dari tanggal 7-14 September 1959 dalam mengikuti situasi internasional dan mendiskusikan soal<sup>2</sup> solidaritet internasional mentjuraahkan perhatiannya yang besar pada kedjadian<sup>2</sup> yang berlangsung di Portugal dibawah pemerintahan fasis Salazar.

31 Tahun telah lewat semendjak kaum fasis berkuasa di Portugal. Sepanjang tahun<sup>2</sup> ini makin meningkatlah pernjataan<sup>2</sup> protes dan aksi<sup>2</sup> untuk melawan rezim Perdana Menteri Salazar yang telah melenjapkan kebebasan<sup>2</sup> fundamentil warganegara Portugal dari kehidupan sosial dan politik Portugal. Setjara sistimatis klik Salazar yang berkuasa menutup-nutupi kemelaratan, kelaparan, pengangguran dan kesulitan<sup>2</sup> yang semakin meningkat dikalangan kaum tani serta lapisan tengah penduduk. Penindasan terhadap Rakjat serta kaum patriot dari berbagai aliran politik serta ideologi yang melawan diktatur fasis Salazar untuk perbaikan nasib dan demokrasi semakin keras. Untuk melakukan „tindakan keamanan“

rezim Salazar jang sepenuhnya dipimpin oleh polisi politik (P.I.D.E.) setiap hari meng-indjak<sup>2</sup> kebebasan surat-menjurat, melakukan penggeledahan rumah<sup>2</sup> setiap saat dengan se-wenang<sup>2</sup> serta tindakan<sup>2</sup> se-mena<sup>2</sup> lainnya. Para patriot, laki<sup>2</sup> maupun wanita jang membela demokrasi serta hak<sup>2</sup> azasi warganegara jang didjamu oleh Konstitusi Portugal, di-kedjar<sup>2</sup>, dipendjarakan dan disiksa dalam tahanan sampai mati tanpa diadili atau diperiksa setjara singkat sekalipun Mereka dilempar dalam „kamp<sup>2</sup> maut“ seperti kamp Tarafal dikepulauan Tandjung Hidjau (Afrika). Dalam bulan<sup>2</sup> pertama sadja dari tahun 1957, 70 orang patriot dihukum oleh pengadilan<sup>2</sup> jang hakim<sup>2</sup>nja sepenuhnya tunduk pada polisi politik dan 20 diantara mereka itu mendapat hukuman total 90 tahun, denda sebesar 100 000 escudo dan kehilangan hak-hak politik mereka selama 150 tahun.

Diantara para patriot itu terdapat *Alvaro Cunhal*, Sekretaris Djenderal Partai Komunis Portugal jang setelah mendjalani hukuman 8 tahun penjara dan bebas selama 1½ tahun ditangkap kembali atas dasar „tindakan keamanan“ untuk waktu 3 tahun. Dengan demikian Alvaro Cunhal pemimpin Rakjat Portugal jang ditjintai itu selalu tinggal terisolasi dalam sel benteng Peniche dan dewasa ini berada dalam keadaan sakit dan djiwanja terantjam.

Kongres menjampaikan salut se-tinggi<sup>2</sup>nja serta simpati jang se-dalam<sup>2</sup>nja kepada seluruh Rakjat pekerdja serta patriot<sup>2</sup> Portugal jang berdjuaug dengan gagahberani dan penuh pengorbanan melawan kebengisan fasisme Salazar, untuk perbaikan hidup serta kemadjuan sosial dan untuk menegakkan kebebasan<sup>2</sup> demokratis serta pembelaan hak<sup>2</sup> azasi manusia.

Kongres Nasional ke-VI PKI menjerukan kepada segenap kaum Komunis serta seluruh Rakjat Indonesia jang patriotik guna menjatakan perasaan serta fikiran mereka kepada Presiden Portugal, Menteri<sup>2</sup> Kehakiman dan Dalamnegeri Portugal untuk memprotes dan mengutuk tindakan<sup>2</sup> teror fasis terhadap Rakjat Portugal, di-indjak<sup>2</sup>nja hak<sup>2</sup> azasi manusia dan warganegara dan menuntut pembebasan serta amnesti total bagi semua patriot dan tawanan politik jang dewasa ini masih meringkuk dalam berbagai kamp maut Portugal.



**Kawat Utjapan Selamat CC PKI Kepada  
CC PKUS Berhubung Dengan Pendaratan  
Roket Kosmos di Bulan**

**Comite Central  
Partai Komunis Uni Sovjet  
Moskow**

Kongres Nasional ke-VI Partai Komunis Indonesia jang kini sedang berlangsung di Djakarta mengutjapkan selamat kepada para sardjana dan Rakjat Sovjet berhubung dengan suksesnja pendaratan roket kosmos Sovjet di Bulan. Peristiwa ini mengubali imbangan kekuatan<sup>2</sup> dunia jang menguntungkan perdamaian dan menghalang-halangi rentjana<sup>2</sup> perang kaum imperialis. Sekali lagi Sosialisme membuktikan keunggulannja dalam mewujudkan keinginan<sup>2</sup> manusia jang paling berani dan berhasil.

**Comite Central  
Partai Komunis Indonesia**

*D.N. Aidit*

# I S I

Sekedar pengantar .....	3
KONGRES PERSATUAN DJAJA .....	5
LINTUK DEMOKRASI DAN KABINET GOTONG-ROJONG .....	8
I Meneruskan perdjuaan untuk Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis .....	13
(1) Imperalisme Belanda masih tetap musuh pertama Rakjat Indonesia .....	13
(2) Indonesia masih tetap berada dalam tjengkeraman krisis ekonomi .....	16
(3) Memperluas perdagangan dengan negeri <sup>2</sup> Sosialis .....	23
(4) Pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial .....	30
(5) Memperbaiki pekerdjaan Front Nasional dan mementjilkan lebih landjut kekuatan kepalabatu ... ..	37
(6) PKI mempertahankan Republik Proklamasi .....	47
(7) Sukap PKI terhadap Kabinet Sukarno-Djuanda .....	48
(8) Memperkuat dan memperluas Demokrasi .....	53
II Untuk memperkuat Front Internasional Anti-Kolonial dan Tjinta-Damai .....	56
(1) Inti pokok zaman kita ialah peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme .....	58
(2) Situasi ekonomi dunia kapitalis sekarang .....	60
(3) Kubu Sosialis dan pengaruh internasionalnja .....	65
(4) Situasi politik internasional .....	77
(5) Soalnya bukan „Memilih Blok“, tetapi mendjalankan politik luarnegeri jang menguntungkan Rakjat Indonesia .....	84
III Meneruskan Pembangunan Partai .....	94
(1) Perkembangan Partai antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI .....	94
(2) Pendidikan Marxisme-Leninisme sjarat mutlak untuk persatuan didalam Partai .....	100
(3) Subjektivisme harus terus kita perangi .....	103
(4) Teruskan bekerdja dengan Plan 3 Tahun .....	109
(5) Memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai ...	114
(6) Pimpinan Partai pada gerakan massa .....	120
(7) Djadikan koperasi djuga sendjata ditangan Rakjat Pekerdja .....	134
	353

PIDATO PENGANTAR UNTUK RENTJANA PER- UBAHAN KONSTITUSI PARTAI .....	138
I Preambul Konstitusi .....	143
II Peraturan <sup>2</sup> Konstitusi .....	157
PIDATO PENGANTAR UNTUK RENTJANA PER- UBAHAN PROGRAM PKI .....	177
PEMILIHAN COMITE CENTRAL DAN KOMISI VERIFIKASI .....	199
KEMBANGKAN SEMANGAT KONGRES NASIONAL KE-VI PKI .....	202
SUKSES <sup>2</sup> JA KONGRES NASIONAL KE-VI PKI ADA- LAH KEMENANGAN DEMOKRASI JANG BESAR ! .....	206
Susunan Presidium Kongres Nasional ke-VI PKI .....	218
Badan <sup>2</sup> pimpinan baru hasil pilihan Kongres Nasional ke-VI PKI .....	219
Comite Central PKI .....	219
Komisi Kontrol Central .....	220
Komisi Verifikasi Central .....	220
Politbiro CC PKI .....	220
Sekretariat CC PKI .....	220
Pemenang <sup>2</sup> Pandji <sup>2</sup> Kongres Nasional ke-VI PKI berdasar- kan hasil pelaksanaan Plan 3 Tahun Pertama Orga- nisasi, Pendidikan, Gerakan Amal dan Kesenian ...	221
RESOLUSI TENTANG LAPORAN UMUM CC PKI KEPADA KONGRES NASIONAL KE-VI .....	222
RESOLUSI PENSAHAN PERUBAHAN KONSTITUSI PKI .....	264
KONSTITUSI PKI .....	264
RESOLUSI PENSAHAN PERUBAHAN PROGRAM PKI .....	289
PROGRAM PKI .....	289
RESOLUSI <sup>2</sup> LAINNJA .....	309
Habiskan samasekali kekuasaan ekonomi Belanda di Indonesia Turunkan harga barang <sup>2</sup> dengan melakukan politik harga rendah .....	311
Tjabut keadaan perang di-daerah <sup>2</sup> dimana tidak ada operasi militer .....	314
Sita perusahaan <sup>2</sup> dan modal orang <sup>2</sup> Kuomintang ! .....	316
Djadikan Manifesto Politik Presiden Sukarno pegangan da- lam membantu dan menjokong Kabinet Kerdja .....	318
Hantjurkan sisa <sup>2</sup> kekuatan pemberontak kontra-revolusioner „PRRI-Permesta” dan DI-TII sampai ke-akar <sup>2</sup> nja	320

Susun pola pembangunan untuk melikwidasi ekonomi kolonial	323
Laksanakan sistim 6 : 4, tambah tanahgarapan, djamin ke- amanan untuk mempertinggi produksi pertanian ...	326
Lawan kebudayaan imperialis, kembangkan kebudayaan Rakjat .....	328
Ilmu untuk Rakjat dan revolusi .....	329
Bentuk dan kembangkan regu <sup>2</sup> kerdjabakti .....	331
Hentikan pertjobaan <sup>2</sup> sendjata nuklir dan bentuk daerah <sup>2</sup> bebas atom .....	334
Lawan subversi dan intervensi AS, dan bubarkan SEATO !	336
Sukseskan penjelenggaraanan KTT .....	337
Karena setia pada UUD 1945, tolak PP no. 6 tahun 1959 ...	338
PKI menerima UUD 1945 dan Pantjasila untuk memperkuat Front Nasional dan mentjapai masjarakat adil dan makmur .....	341
Bebaskan Manolis Glezos ! .....	342
Kutuk pembunuhan Ali Olowi dan penembakan buruh Iran !	343
Bebaskan Fajarollah Helou, pahlawan Libanon ! .....	344
Sokong terus perdjjuangan Rakjat Aldjazair ! .....	345
Bebaskan pedjuang <sup>2</sup> perdamaian Mesir dan Suriah ! .....	347
Gagalkan intervensi AS di Laos ! .....	348
Protes fasisme Salazar dan bebaskan Alvaro Cunhal .....	350
Kawat utjapan selamat CC PKI kepada CC PKUS berhubung dengan pendaratan roket kosmos dibulan .....	352

## RALAT

Pada halaman 142, alinea pertama dari atas, semestinja berbunji sbb :

Dengan sedikit mengingatkan kembali kepada kesalahan Partai di lapangan organisasi selama tahun<sup>2</sup> Revolusi Agustus '45 seperti jang di kemukakan didalam „Djalan Baru” maka mendjadi lebih djelas lagi dapat kita fahami bahwa Konstitusi Partai jang disahkan oleh Kongres Nasional Ke-V sungguh<sup>2</sup> merupakan pelaksanaan jang sempurna daripada koreksi „Djalan Baru” di lapangan organisasi.

Pada halaman 199, djudul pada halaman ini mestinja sbb : Pemilihan Comite Central dan Komisi Verifikasi.



35